

G - 30 - S

DIHADAPAN

MAHMILLUB

I

(PERKARA NJONO)

PENERBIT : PUSAT PENDIDIKAN KEHAKIMAN A.D.
(AHM — PTHM)

PENJALUR TUNGGAL : P.T. PEMBIMBING MASA
D J A K A R T A

G. 30. S. DIHADAPAN MAHMILLUB I (DALAM PERKARA NJONO)

Idzin Pejabat No. KEP - 206 - P/III/1966
tanggal 30 Maret 1966

P.N. EKA GRAFIKA - 0118/IV - 66/21.000 ex.

G-30-S

"Gerakan 30 September"

DIHADAPAN

MAHMILLUB

I

(Perkara Njono)

PENERBIT : PUSAT PENDIDIKAN KEHAKIMAN A.D.

(AHM — PTHM)

PENJALUR TUNGGAL : P. T. PEMBIMBING MASA

DJAKARTA

KATA - PENGANTAR

Perkara-perkara yang diperiksa dan diadili oleh MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA (MAHMILLUB) dalam rangka penyelesaian dibidang Justisi dari peristiwa „Gerakan 30 September” (G-30-S) atau „GESTOK”, ternyata mendapat perhatian besar dari masyarakat, terutama para ahli hukum didalam maupun diluar negeri.

Berdasarkan Surat Perintah JANG MULIA MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT No : 53/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 kepada Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat (AKADEMI HUKUM MILITER — PERGURUAN TINGGI HUKUM MILITER) diperintahkan untuk menerbitkan buku-buku tentang hasil-hasil persidangan MAHMILLUB dalam penyelesaian perkara-perkara „G-30-S”.

Maksud dari penerbitan buku-buku ini agar sebanyak mungkin orang dapat mengikuti serta meneliti sebagian dari hasil-hasil operasi justisi sebagai salah satu aspek dari pada operasi pemulihan keamanan dan ketertiban dibawah pimpinan PANGLIMA KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN dan KETERTIBAN LETNAN DJENDRAL TNI — SOEHARTO, operasi-operasi mana hingga kini masih berlangsung.

G-30-S bukan sekedar suatu gerakan biasa sadja tetapi adalah suatu petualangan kontra revolusi seperti tertera dalam konsiderans Keputusan Presiden No. 370 tanggal 4 Desember 1965, hal mana dapat dibenarkan dan dibuktikan dalam pemeriksaan-pemeriksaan disidang-sidang Mahkamah, bahwa G-30-S melakukan fitnah, terror dan coup berdasarkan fakta-fakta yang berupa pengakuan-pengakuan dari pada para pelaku, keterangan saksi-saksi didepan sidang, keterangan dari saksi-saksi ahli dan keterangan dari pedjabat-pedjabat resmi didepan sidang Mahkamah.

Operasi-operasi justisi ini merupakan pemeriksaan disidang-sidang pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh MAHMILLUB berdasarkan Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963. Sidang-sidang MAHMILLUB berdasarkan Penetapan Presiden tersebut diatas pernah pula menyelesaikan perkara-perkara tokoh-tokoh Republik Maluku Selatan (R.M.S.) Mr. Dr. Chr. SOUMOKIL dan tokoh Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (K.R.J.T.) Letnan Dua-IF. IBNU HADJAR.

Perkara-perkara tokoh-tokoh G-30-S bukan sekedar perkara kriminil biasa yang pemeriksaannya bagi orang sipil dalam suatu Pengadilan biasa dan bagi anggota Militer didepan suatu Mahkamah Militer ; djustru karena sifat dan ruang-lingkupnya luar biasa ialah langsung menjangkut keamanan dan kehidupan Bangsa, Negara dan Revolusi Indonesia :

- suatu petualangan kontra revolusi yang ditujukan kepada dasar dan falsafah Bangsa, Negara dan Revolusi Indonesia ialah PAN-TJASILA;
- suatu coup untuk menjisihkan kepemimpinan Presiden Sukarno selaku Kepala Negara/Perdana Menteri/Pangti ABRI dan selaku Pemimpin Besar Revolusi dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora;
- tindakan-tindakan yang berupa pentjulikan dan pertjobaan pentjulikan, pembunuhan setjara kedjam terhadap perwira-perwira tinggi pimpinan Angkatan Darat dimana terdapat beberapa yang mempunyai kedudukan Menteri;

karena sifat-sifat inilah menghendaki penyelesaian perkara-perkara tersebut oleh suatu Mahkamah Militer yang luar biasa.

Penindakan-penindakan dibidang hukum dengan diperiksa dan diadilnja para pemimpin dan pengatur G-30-S oleh Mahkamah membuktikan lagi bahwa bangsa Indonesia mendjundjung tinggi kepastian hukum, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pantjasila yang berkewadajiban pula menegakkan keadilan dan kebenaran.

Isi dari buku ini adalah bahan-bahan otentik yang merupakan keseluruhan pemeriksaan pengadilan dari salah seorang tokoh „G-30-S” NJONO anggauta Politbiro CC PKI.

Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas mempergunakan peraturan-peraturan Pidana yang berupa hukum formil dan hukum materiel yang tertulis maupun yang tidak tertulis dari pada Revolusi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden/Pangti/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno pada waktu merestui petugas-petugas MAHMILLUB di Istana Bogor pada tanggal 12 Februari 1966.

Diharapkan dengan adanya penerbitan ini agar para mahasiswa, petugas dibidang peradilan dan ahli hukum sesudahnja meneliti proses-proses pemeriksaan perkara ini, mengadakan penanggapan ilmiah kesemuanya untuk pengembangan dan pembinaan Hukum Nasional kita chususnya Hukum Pidana dan penjempurnaan peradilan dinegara kita.

Kepada semua fihak, semua petugas yang telah memungkinkan penerbitan ini disampaikan utjapan terima kasih yang tak terhingga.

Achirnja bahan-bahan otentik ini dipersembahkan pada generasi yang mendatang, agar dapat menarik pelajaran-pelajaran dari padanja supaya dikemudian hari petualangan-petualangan sematjam ini dapat ditjegah.

Djakarta, 15 Mei 1966.

K O M A N D A N
ttd.

E.J. K A N T E R S H.
KOLONEL CKH NRP. : 16101.

MAHKAMAH AGUNG

LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 1

TEL. 02. 40497

FROMEL POB NO. 20

DJAKARTA

5 Mei 1966

19 66

NO. 301/M-519/4.III/66.

LAMPIRAN --

PERHAL Tentang kita sambutan

kepada Mahkamah Agung.

K A T A - S A M B U T A N

Penerbitan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang MAHMILLUB telah dipudji oleh kerona dengan demikian chalejak kami dapat mengetahui benar-benar, bahwa MAHMILLUB menjalankan tugasnya menurut peraturan-peraturan Mahkamah yang berlaku di Indonesia.

Ini lagi dari tanggapan masyarakat terhadap putusan-putusan MAHMILLUB tersebut, bahwa putusan-putusan itu sesuai sesuai dengan tuntutan hati nurani Rakyat Indonesia.

KATA SAMBUTAN

Wtj

(Dr. WIRJONO PRADIPALAKSO S.P.)

Djakarta, 15 Mei 1966

19 66

AMANAT P.J.M. PRESIDEN DIHADAPAN PARA HAKIM-
HAKIM MAHMILLUB DI ISTANA BOGOR PADA
TANGGAL 12 PEBRUARI 1966 a.l. :

..... didalam MAHMILLUB, saudarapun harus berpikir, bahwa saudara2 ini adalah penegak revolusi, pendja-
ga revolusi, sebagaimana kita semuanya, sebagaimana itu tadi
guru2 dan proffesor2 kita semuanya harus penegak revolusi,
penjelamat Revolusi Hanja atas dasar itu saja
minta saudara2 nanti bekerdja, djangan saudara terpengaruh
oleh suasana alam pikiran jang matjam2. Berdiri diatas hu-
kum2 jang sekarang, jang diakui sebagai hukum2 revolusi,
het geschreven recht dan het ongeschreven recht daripada
revolusi kita itu.



P.J.M. Presiden R.I., PERDANA MENTERI, PANGTI ABRI, P.B.R.,
Mandataris M.P.R.S. Dr. Ir. Soekarno.

AMANAT J.M. MEN/PANGAD PADA PENJERAHAN

perkara G-30-S a.n. NJONO dan UNTUNG

pada Tanggal 29 Djanuari 1966 a.l. :

"..... bahwa tanggal 29 Djanuari adalah bertepatan dengan wafatnja Bapak T.N.I. Djenderal Panglima Besar Soedirman, meskipun beliau telah gugur namun tjita-tjita serta wasiatnja tetap mendjiwai seluruh sanubari anggauta T.N.I. Motto Djenderal Soedirman jang berbunyi „Satu-satunja barisan perdjungan jang tetap kompak dan utuh adalah T.N.I.“ dan dengan dasar tersebut kita tetap terus berdjoang. Kita berkewadajiban untuk tetap waspada terhadap segala kemungkinan untuk mendjaga keutuhan dan kekompakan tersebut dikalangan Bangsa Indonesia umumnja dan T.N.I. chususnja.

Sebagai tradisinja T.N.I. haruslah dapat memperlihatkan kepada masjarakat akan kebenaran jang dibelanja. Saja berharap agar MAHMILLUB bekerdja sebaik-baiknya hingga menundjukkan tindakan-tindakan tegas jang berlandasan hukum terhadap penjelewengan jang hendak merusak Negara, T.N.I. chususnja.

Negara kita adalah Negara hukum berdasarkan Pantjasila — Revolusi Indonesia adalah revolusi Pantjasila, jang bertudjuan antara lain menegakkan kebenaran dan keadilan.

Perlakukanlah mereka ini jang telah menjeleweng, berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan."



foto2 KEMPEN

J.M. MEN/PANGAD, PANGKOPKAM, KEPALA STAF KOGAM, LET-DJEN. TNI. SOEHARTO selaku PEPERA (Perwira Penjerah Perkara)



foto PUSPENAD

Terdakwa Njono bin Sastroredjo alias Tugimin alias Rukma anggota Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Komite Daerah Jakarta Raya/CDR dihadapan MAHMILLUB.

ISI

KATA PENGANTAR.

Hal.

KATA SAMBUTAN.

Tjuplikan Amanat P.J.M. Presiden R.I.

Tjuplikan Amanat J.M. MEN/PANGAD. LETDJEN. TNI. Soeharto.

1. Keputusan Presiden R.I. No : 370 tahun 1965 tgl. 4 Desember 1965	1
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD. selaku PANGlima OPERASI PEMULIHAN KE- AMANAN DAN KETERTIBAN No : KEP- 5/KOPKAM/1/1966 tgl. 29 Djan. 1966	3
3. Surat Keputusan KETUA MAHKAMAH MI- LITER LUAR BIASA No : KEP-002/MBI/A/ 1966 tgl. 7 Pebr. 1966 tentang Penetapan Hari Sidang	6
4. Surat Keputusan KETUA MAHKAMAH MI- LITER LUAR BIASA No : KEP-005/MBI/A/ 1966 tgl. 9 Pebr. 1966 tentang Penunjukan Team Asistensi bagi Pembela	9
5. Surat Keputusan KETUA MAHKAMAH MI- LITER LUAR BIASA No : KEP-006/MBI/A/ 1966 tgl. 12 Pebr. 1966 tentang Penunjukan Pembela Tertuduh	11
6. Berita Atjara Pemeriksaan (tambahan) oleh Oditur yang ditugaskan pada Team Oditur Pusat MAJ/CKH-Wahju Hadiwarsito SH. ...	13
7. Surat Keputusan Penjerahan Perkara oleh MEN/PANGAD No : KEP-13/KOPKAM/1/1966 tgl. 29 Djan. 1966	15
8. Surat Tuduhan Oditur pada MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA No : TUD/001/OM/ 1966 tgl. 4 Pebr. 1966	18
9. Berita Atjara Pemeriksaan Sidang Penga- dilan No : B-011/MBI/A/1966 tgl. 1 Maret 1966 tentang Susunan Mahkamah Militer Luar Biasa	25



foto PUSPENAD

Gedung BAPPENAS di Djakarta dimana sidang2 Pengadilan G. 30. S. dihadapan MAHMILLUB, dipersidangkan a.l. terdakwa Njono.



Hakim Ketua MAHMILLUB LETKOL. CKH. Ali Said SH. jang memimpin djalannja persidangan dalam perkara Njono.

LETKOL. CKH. Datoek MOELIA SH.



Pembela Nj. Trees Sunito SH.



foto KEMPEN

ISI



foto PUSPENAD

Terdakwa Njono bin Sastroredjo alias Tugimin alias Rukma anggota Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Komite Daerah Jakarta Raya/CDR dihadapan MAHMILLUB.

Hal.

KATA PENGANTAR.

KATA SAMBUTAN.

Tjuplikan Amanat P.J.M. Presiden R.I.

Tjuplikan Amanat J.M. MEN/PANGAD. LETDJEN. TNI. Soeharto.

1. Keputusan Presiden R.I. No : 370 tahun 1965 tgl. 4 Desember 1965	1
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD. selaku PANGlima OPERASI PEMULIHAN KE- AMANAN DAN KETERTIBAN No : KEP- 5/KOPKAM/1/1966 tgl. 29 Djan. 1966	3
3. Surat Keputusan KETUA MAHKAMAH MI- LITER LUAR BIASA No : KEP-002/MBI/A/ 1966 tgl. 7 Pebr. 1966 tentang Penetapan Hari Sidang	6
4. Surat Keputusan KETUA MAHKAMAH MI- LITER LUAR BIASA No : KEP-005/MBI/A/ 1966 tgl. 9 Pebr. 1966 tentang Penunjukan Team Asistensi bagi Pembela	9
5. Surat Keputusan KETUA MAHKAMAH MI- LITER LUAR BIASA No : KEP-006/MBI/A/ 1966 tgl. 12 Pebr. 1966 tentang Penunjukan Pembela Tertuduh	11
6. Berita Atjara Pemeriksaan (tambahan) oleh Oditur jang ditugaskan pada Team Oditur Pusat MAJ/CKH-Wahju Hadiwarsito SH. ...	13
7. Surat Keputusan Penjerahan Perkara oleh MEN/PANGAD No : KEP-13/KOPKAM/1/1966 tgl. 29 Djan. 1966	15
8. Surat Tuduhan Oditur pada MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA No : TUD/001/OM/ 1966 tgl. 4 Pebr. 1966	18
9. Berita Atjara Pemeriksaan Sidang Penga- dilan No : B-011/MBI/A/1966 tgl. 1 Maret 1966 tentang Susunan Mahkamah Militer Luar Biasa	25

10. Sidang ke-I	31
11. Sidang ke-II	67
12. Sidang ke-III	121
13. Sidang ke-IV	177
14. Sidang ke-V	205
15. Sidang ke-VI	232
16. Requisitoir Oditur	283
17. Sidang ke-VII Pembelaan oleh Pembela	260
18. Pembelaan oleh terdakwa	274
19. Replik terhadap pleidooi pembela oleh Oditur	283
20. Sidang ke-VIII pembatjaan duplik pembela	285
21. Putusan Hakim Ketua No : PTS-009/MBI/A/ 1966 tgl. 21 Pebr. 1966 (penolakan eksepsi pembela oleh Hakim Ketua)	287
22. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku PANG. KOPKAM No : KEP-18/2/1966 tgl. 21 Pebr. 1966 tentang Memberikan Persetujuan Pelaksanaan, (fiat executie).	335

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 370 TAHUN 1963.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :**
1. bahwa apa jang menamakan dirinja "Gerakan 30 September" telah melakukan pentjulikan dan pembunuhan, mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan membentuk apa jang disebutnja "Dewan Revolusi Indonesia" sebagai penggantinya;
 2. bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan djustru disaat perdjjuangan maha dahsjat Negara dan Bangsa Indonesia terhadap Nekolim beserta antek-anteknja sedang mengindjak taraf jang menentukan;
 3. bahwa oleh karenanja apa jang dinamakan "Gerakan 30 September" tersebut merupakan petualangan kontra-revolusi, sehingga memerlukan penyelesaian segera;
 4. bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 119) adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan peradilan jang disertai mengadili tokoh-tokoh jang tersangkut/terlibat dalam apa jang dinamakan "Gerakan 30 September" tersebut diatas;

- MENGINGAT :**
1. Pasal 9 berhubungan dengan pasal-pasal 1, 3 dan 5 angka 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 119) tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa;
 2. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tertanggal 2 Oktober 1965 tentang penundjukan Major Djenderal TNI SOEHARTO, Panglima KOSTRAD sebagai Panglima Operasionil untuk penyelesaian masalah keamanan dalam Negeri sebagai akibat daripada "Gerakan 30 September" 1965;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Menundjuk MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1963, untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara daripada tokoh-tokoh jang tersangkut atau terlibat dalam petualangan kontra-revolusi, jaitu apa jang dinamakan "Gerakan 30 September".
- KEDUA** : Memberikan wewenang kepada Major Djenderal TNI SOEHARTO atau Perwira Tinggi jang ditundjuk oleh-nya, untuk :
- a. menentukan siapa-siapa termasuk tokoh-tokoh, sebagaimana dimaksud dalam penetapan PERTAMA diatas.
 - b. bertindak sebagai Perwira Penjerah Perkara dalam perkara-perkara tersebut.
 - c. menentukan susunan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mempersiapkan, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut diatas.
- KETIGA** : Pembiajaan dari Peradilan dan penjelesaian perkara ini dibebankan kepada Departemen Angkatan Darat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 4 Desember 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S U K A R N O

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor. : KEP-5/KOPKAM/1/66.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

selaku

PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa perkara NJONO bin SASTROREDJO, tokoh "GERAKAN 30 September", adalah suatu perkara jang merupakan bahaya besar bagi keamanan Revolusi, Bangsa dan Negara Indonesia karena merupakan suatu petualangan kontra revolusi, hingga diperlukan penjelesaian jang segera.
2. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden nr. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 nr. 119) jo Keputusan Presiden nr. 370 tahun 1965 adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan peradilan jang disertai mengadili perkara tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Penetapan Presiden nr. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 nr. 119) tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.
2. Keputusan Presiden nr. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 ketentuan PERTAMA dan KEDUA sub a dan c.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi ABRI/KOTI nr. 142/KOTI/1965 tertanggal 1 Nopember 1965.
4. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan & Ketertiban nr. KEP-03/KOPKAM/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Menundjuk Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden nr. 16 tahun 1963 untuk memeriksa dan mengadili perkara tokoh petualangan

KONTREV "G 30.S" jang bernama : NJONO bin SASTROEDJO, lahir 28 Agustus 1925 di Tjilatjap, tempat tinggal terakhir Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta, dalam suatu sidang terbuka di Djakarta.

KEDUA

I). Menundjuk untuk bertindak sebagai Hakim Ketua/Hakim Ketua Pengganti, Hakim Anggauta, Oditur/Oditur Pengganti dan Panitera/Panitera Pengganti daripada Mahkamah Militer Luar Biasa dalam mengadili perkara tersebut dalam ketentuan PERTAMA diatas, Perwira-perwira Menengah dan Pertama ABRI jang tertera dibawah ini :

1. HAKIM KETUA : LETKOL CKH ALI SAID SH NRP. 14870.
2. HAKIM KETUA : LETKOL CKH MURTI-PENGGANTI OSO SH NRP. 15131.
3. HAKIM-HAKIM : 3.1. Major Lok. A.L. Gani Djemat SH.
3.2. Major Lok. A.L. Hasan Basjtari SH.
3.3. Letkol. Ud. Zaidun Bakti Nrp. 461223.
3.4. Letkol. Ud. Mukarto Nrp. 464508.
3.5. Kompol. I Drs. Soenardi SH.
3.6. Kompol. I Drs. Taslan Karnadi SH.
3.7. Major Tit. Raffly Rasad S.H.
3.8. Major Tit. B.H. Siburian SH.
4. ODITUR : Letkol. CKH. DT. R. Mulia SH. Nrp. 12319.
5. ODITUR PENG-GANTI : Major CKH. W.H. Warsito SH. Nrp. 17692.
6. PANITERA : Kapten CKH. W. Frederik Bc. Hk. Nrp. 295948.
7. PANITERA : Letda. CKH. K. Suganda PENGANTI Bc. Hk. Nrp. 6138490.

II. 1). Hakim Ketua menentukan siapa diantara Hakim Ketua/Ketua Pengganti, Hakim anggauta dan Panitera/Panitera Pengganti jang tersebut

dalam ketentuan KEDUA ad. I) diatas, jang akan bertindak sebagai Ketua, Hakim Anggauta dan Panitera dalam suatu sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa susunan hakim anggauta harus terdiri dari Perwira-perwira dari AD, AL, AU dan AK.

2). Oditur menentukan siapa diantara Oditur/Oditur Pengganti jang tersebut dalam ketentuan KEDUA ad. I) diatas, jang akan bertindak sebagai Oditur dalam suatu sidang Pengadilan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Salinan Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. PJM. Presiden Republik Indonesia/PANGTI ABRI sebagai laporan.
2. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
3. J.M. Menteri Ketua Mahkamah Agung/Tentara Agung.
4. J.M. Menteri Djaksa Agung.
5. J.M. Menteri Kehakiman.
6. J.M. Menteri Panglima Angkatan Darat.
7. J.M. Menteri Panglima Angkatan Laut.
8. J.M. Menteri Panglima Angkatan Udara.
9. J.M. Menteri Panglima Angkatan Kepolisian.
10. Panglima Kodam V/DJAJA.
11. Inspektur Kehakiman AD.
12. Oditur Djenderal Angkatan Darat.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 DJANUARI 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

selaku

PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN

DAN KETERTIBAN

ttd.

SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL TNI.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KEP-002/MBI/A/1966.

tentang

Penetapan Hari Sidang

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

MEMBATJA : 1. Surat Keputusan Penjerahan Perkara dari Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29-1-1966;

2. Surat tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. TUD/001/OM/1966 tanggal 4-2-1966;

3. Berkas Perkara dari tertuduh NJONO bin SASTROREDJO yang disusun oleh Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. 003/OM/1966 tanggal — 1966.

MENIMBANG : 1. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa yang dimaksud dalam Penetapan Presiden RI No. 16 tahun 1963, telah ditundjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara daripada tokoh-tokoh yang tersangkut atau terlibat dalam petualangan kontra-revolusi G. 30. S./Gestok ;

2. Bahwa, Mahkamah Militer Luar Biasa berpendapat adanya tjukup alasan untuk meneruskan perkara tertuduh NJONO bin SASTROREDJO kedepan sidang berdasarkan Surat Tuduhan tersebut dalam bab „MEMBATJA” sub 2 diatas ;

3. Bahwa perlu segera menetapkan hari sidang pemeriksaan dan pengadilan daripada tertuduh NJONO bin SASTROREDJO.

MENINGAT : 1. Penetapan Presiden RI No. 16 tahun 1963 tanggal 24—12—1963;

2. Keputusan Presiden RI No. 370 tahun 1965 tanggal 4—12—1965;

3. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-5/KOPKAM/1/1966 tanggal 29—1—1966 dan No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29—1—1966.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN hari sidang Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadili perkara tertuduh :

n a m a : NJONO bin SASTROREDJO.

lahir di/tanggal : Tjilatjap/28 Agustus 1925.

alamat terakhir : Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam 147 Djakarta,

agama : tidak beragama.

pekerjaan terakhir : — anggota DPRGR.

— „-“ MPRS.
— „-“ PB Front Nasional.
— „-“ Dewan Produksi Nasional.
— „-“ Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Komite Daerah Djakarta Raya/CDR.

pada hari S E N E N tanggal 14 FEBRUARI 1966
djam 09.00 bertempat di-Gedung BAPPENAS djalanan Taman Surapati No. 2 DJAKARTA.

Dengan tjatatannya bahwa apabila pada hari yang telah ditetapkan itu, sidang pemeriksaan dan pengadilan tidak dapat diselesaikan maka oleh Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa akan ditetapkan hari sidang kelanjutannya.

MEMERINTAHKAN kepada Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memberitahukan isi Surat Tuduhan dan isi Surat Keputusan tentang Penetapan Hari Sidang ini kepada tertuduh dan menghadapkannya dalam persidangan ditempat dan pada hari, tanggal serta djam yang telah ditetapkan serta memanggil untuk dihadapkan sebagai saksi dipersidangan :

1. PERIS PARDEDE alias ABDULLAH;
2. BARTAMAN bin MASDJAN;
3. ACHMAD MUHAMAD bin JACUB;
4. PRAJITNO bin KARNEN;
5. SASTROSANDJOJO bin TJITROWI-KONGKO dan
6. SUTARNO bin DJOGOSUDARJO

yang dimaksud dalam Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa.

Dengan tjatatan bahwa tegang waktu antara pemberi tauhan disebut diatas dengan hari persidangan yang telah ditetapkan adalah sekurang-kurangnya 2 X 24 djam.

MEMERINTAHKAN t e t a p tinggalnja tertuduh dalam tahanan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 7—2—1966.

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA,

t.t.d.,

ALI SAID S.H.

LETNAN KOLONEL CKH-NRP. 14870

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

SURAT — KEPUTUSAN

NOMOR : KEP-005/MBI/A/1966.

tentang

Penundjukkan Team Asistensi bagi Pembela.

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

- MEMBATJA : 1. Surat Keputusan Inspektur Kehakiman Nomer : KEP-02/1/1966, tanggal 10—1—1966 tentang pembentukan Team Asistensi Pembela dilingkungan MAHMILLUB;
2. Surat Perintah Inspektur Kehakiman Nomer : PRIN-49/2/1966, tanggal 8 Pebruari 1966, tentang penugasan Major CKH ZAINUDDIN JUNUS Bc Hk. NRP. 12466 untuk memberi asistensi kepada para Pembela dalam penjidangan terdakwa NJONO bin SASTROREDJO.
- MENIMBANG : 1. Bahwa demi kelantjaran Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa dipandang perlu untuk membenarkan adanya asistensi kepada Pembela oleh seorang atau lebih militer;
2. Bahwa tidak berkeberatan apabila para Pembela dalam perkara tertuduh NJONO bin SASTROREDJO diberi asistensi selama melaksanakan tugasnja.
- MENINGAT : 1. Penetapan Presiden RI No. 16 Th. 1963 tanggal 24—12—1963;
2. Keputusan Presiden RI No. 370 Th. 1965 tanggal 4—12—1965;
3. Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-5/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Januari 1966 dan No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Januari 1966.

MEMUTUSKAN :

MENUNDJUK : untuk bertindak sebagai pembantu/asisten dari para Pembela dari tertuduh :

N a m a : NJONO bin SASTROREDJO.
Lahir di/tanggal : Tjilatjap/28 Agustus 1925.
A g a m a : Tidak beragama.
Alamat terachir : Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam 147 Djakarta.
selama dalam pemeriksaan dan pengadilan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa :

1. N a m a : S U W A R N O S.H.
Pangkat/Djabatan: MAJOR CKH NRP. 15453, PA TEAM ASISTENSI PEMBELA PADA MAHMILLUB.
A l a m a t : Djl. Dr. Abdulrachman Saleh I Djakarta.
2. N a m a : ZAINUDDIN JUNUS Bc. Hk.
Pangkat/Djabatan: MAJOR CKH NRP. 12466, PA TEAM ASISTENSI PEMBELA PADA MAHMILLUB.
A l a m a t : Djl. Dr. Abdulrachman Saleh I Djakarta.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 9 Pebruari 1966.

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA,
Tjap/ttd.
ALI SAID S.H.

LETNAN KOLONEL CKH NRP. 14870

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

SURAT — KEPUTUSAN

NOMOR : KEP-006/MBI/A/1966.

tentang

Penundjukkan Pembela Tertuduh

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

- MEMBATJA : 1. Surat Keputusan Penjerahan Perkara dari Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan dan Ketertiban No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Januari 1966;
2. Surat Tuduhan dari Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. TUD/001/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966;
3. Permohonan tertuduh untuk mendapatkan pembela oleh seorang atau beberapa orang Pembela selama dalam persidangan.

- MENIMBANG : 1. Bahwa Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa telah menuduh tersangka melakukan tindak pidana yang tertulis dan diantjam dengan hukuman sebagaimana terurai dalam pasal 110 jo 107 jo 108 KUHP dihubungkan dengan PENPRES No. 5 tahun 1959 pasal 2 yang berakibat dapatnja tertuduh dituntut dan didjatuhi hukuman mati;
2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dipandang perlu untuk memutuskan penundjukkan seorang untuk bertindak sebagai Pembela dan/atau Penasehat tertuduh didalam pemeriksaan/persidangan;
3. Bahwa Pembela-pembela yang disebut namanja dan diingini oleh tertuduh tiada seorangpun yang bersedia/meluluskan keinginan tertuduh untuk mendjadi Pembela ketjuali apabila ditundjuk oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.

MEMPERHATIKAN : Amanat P.J.M. Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar KOTI/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 12-2-1966 serta perintah Menteri Panglima Angkatan Darat dan Menteri Ketua Mahkamah Agung pada tanggal yang sama agar yang ditundjuk sebagai Pembela bagi terdakwa adalah salah seorang diantara mereka yang diingini oleh tertuduh.

MENGINGAT

1. Penetapan Presiden RI No. 16 Tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963;
2. Keputusan Presiden RI No. 370 Tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965;
3. Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-5/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966 dan No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966

MEMUTUSKAN

MENUNDJUK : untuk bertindak sebagai Pembela dan/atau Penasehat-penasehat dari tertuduh :

N a m a : NJONO bin SASTROREDJO.
Lahir di/tanggal : Tjilatjap/28 Agustus 1925.
A g a m a : Tidak beragama.
Alamat terachir : Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam 147 Djakarta.
Pekerdjaan terachir : — anggauta DPR-GR/MPRS/PB Front Nasional/DEPRONAS.
— anggauta Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Komite Daerah Djakarta Raya/CDR.

selama dalam pemeriksaan dan pengadilan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa ialah

N a m a : Nj. T. SUNITO - HEYLIGERS SH.
A l a m a t : Djl. Serang 1, Djakarta.

DENGAN TJATATAN : bahwa segala beaja pembelaan akan dibebankan kepada MAHMILLUB.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 12 Pebruari 1966.

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA,

Tjap./t.t.d.

ALI SAID S.H.

LETNAN KOLONEL CKH NRP. 14870

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT STAF ODITUR DJENDERAL

PRO : JUSTITIA.

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini DJUM'AT, tanggal 28 Djanuari 1966 enam puluh enam jam 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, saja,

— WAHJU HADIWARSI S.H. —

pangkat Major CKH. NRP. 17692, djabatan Oditur di tugaskan pada Team Oditur Pusat, berdasarkan Surat Perintah Wakil Oditur Djenderal A.D. selaku Ketua Team Oditur Pusat No. PRIN-020/12/1965 tanggal 17 Desember 1965, telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap.

— NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA —
yang atas pertanyaan saja terdakwa mendjawab sebagai berikut :

PERTANJAAN

DJAWABAN

1. Apakah saudara masih tetap pada keterangan saudara pada pemeriksaan yang telah lewat ?

1. Saja tetap pada keterangan-keterangan yang saja berikan pada pemeriksaan yang telah lalu dan tidak akan menambah, mengurangi atau merobahnja.

2. Didalam pemeriksaan tambahan yang lalu Saudara mengajukan permintaan kepada pemeriksa agar sewaktu Saudara menghadapi Sidang Pengadilan dapat dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembela.

Apakah Saudara ingin menundjuk sendiri seorang/beberapa orang pembela ataukah penundjukan pembela/pembela-pembela tersebut Saudara serahkan kepada Pengadilan ?

2. Saja ingin menundjuk sendiri pembela-pembela yang saja perlukan. Tjalon-tjalonnja adalah :

1. Saudara Gumuljo S.H., Djalan Surabaya 33 Djakarta.

2. Saudara Liem Kun Seng S.H., alamat tidak tahu, Djakarta, anggota DPRD-GR Djaja Djakarta,
3. Saudara Dr. Suprpto S.H., Djl. Kesehatan (nomor rumah tidak tahu) Djakarta.
4. Nj. Trees Sunito isteri saudara Sunito bagian protokol DPR-GR, alamat tidak tahu, Djakarta. Saja memerlukan 2 (dua) orang pembela.

3. Apakah masih ada sesuatu yang hendak Saudara kemukakan kepada pemeriksa.

3. Saja mengharapkan :

1. Pembela yang saja adjukan dan orangnja ke betulan dalam tahanan bisa diterima mendjadi pembela saja dengan mendapat fasilitas-fasilitas sebagai pembela biasa antara lain hak mentjari bahan-bahan dari luar.
2. Karena soal "G. 30. S." sudah mendjadi soal umum, minta supaya sidang-sidang pengadilan bersifat terbuka.
3. Mendjelang dan selama dalam proses pengadilan dapat kiranya saja dibebaskan dari tahanan kurungan.

Setelah selesai diadakan pemeriksaan, maka kepada yang diperiksa dibatjkan kembali, dan ia tetap menjatakan atas kebenarannya keterangan-keterangannya tersebut dan untuk menguatkannya ia membubuhi tanda tangan dibawah ini.

Jang diperiksa,
(NJONO bin SASTROREDJO)

Demikianlah Berita-Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah djabatan dan kemudian ditutup dan ditanda tangani di R.T.C. Salemba pada tanggal 28 Djanuari 1966.

Pemeriksa,
WAHJU HADIWARITO S.H.
MAJOOR OKH NRP. 17692.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

PRO : JUSTITIA

SURAT KEPUTUSAN PENJERAHAN PERKARA

No. : KEP-13/KOPKAM/1/1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

selaku

PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

sebagai

PERWIRA PENJERAH PERKARA

MEMBATJA

: Beras Perkara No. : 03/OM/1966 mengenai kedjahatan-kedjahatan yang dilakukan oleh NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara itu.

MEMPERHATIKAN :

Pertimbangan dan saran Oditur Djenderal Angkatan Darat selaku Ketua Team Oditur Pusat, sesuai dengan suratnja No. : R-09/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

MENIMBANG

: Bahwa terdapat tjukup alasan untuk mengadakan penuntutan terhadap orang tersebut diatas.

MENGINGAT

1. Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 370 Tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 03/KOPKAM/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966 dan No. 05/KOPKAM/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

MEMUTUSKAN :

1. Menjerahkan perkara dari tersangka :

N a m a : NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.
 U m u r : 40 Tahun.
 Dilahirkan : Pada tanggal 28 Agustus 1925 di Tjilatjap, Djawa Tengah.
 Pekerjaan : Anggauta DPR-GR, anggauta Pengurus Besar Front Nasional, anggauta MPRS, anggauta Dewan Produksi Nasional dan dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) mendjabat sebagai anggauta Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Komite Daerah Djakarta Raya (CDR).
 A g a m a : Tidak ada.
 Alamat terakhir : Dalam Tahanan Oditur Djenderal Angkatan Darat di Rumah Tahanan Khusus Salemba Djakarta.

kepada MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA yang berkedudukan di Djakarta.

2. Menuntut supaya tersangka tersebut ad 1 diperiksa dan diadili sesuai dengan surat tuduhan yang dibuat oleh Oditur Mahkamah Militer Luar Biasa.
3. Menentukan agar tersangka : tetap ditahan.

Dikeluarkan di : Djakarta
 Pada tanggal : 29 Djanuari 1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
 selaku

PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN
 DAN KETERTIBAN
 sebagai
 PERWIRA PENJERAH PERKARA
 Tjap./t.t.d.
SOEHARTO
 MAJOR DJENDRAL T.N.I.

KEPADA :

1. KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA di DJAKARTA.
2. ODITUR PADA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA di DJAKARTA.

TEMBUSAN KEPADA :

1. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
2. J.M. MENTERI/KETUA MAHKAMAH AGUNG.
3. J.M. MENTERI/PANGAL.
4. J.M. MENTERI/PANGAU.
5. J.M. MENTERI/PANGAK.
6. J.M. MENTERI/DJAKSA AGUNG.
7. D. II. MENTERI/PANGAD.
8. ODITUR DJENDERAL A.D.
9. DIREKTUR POLISI MILITER.
10. A R S I P.

SALINAN Surat Keputusan ini telah disampaikan kepada tersangka pada tanggal

..... 1966 di

Tersangka

(NJONO)

ODITUR,

Dt. R. MULIA S.H.

LET. KOL. CKH. NRP. 12319.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
STAF ODITUR

UNTUK KEADILAN.

SURAT - T U D U H A N

NO. : TUD/001/OM/1966.

ODITUR PADA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

Berdasarkan Surat Keputusan Penjerahan Perkara dari Jang Mulia Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966.

Setelah membatja dan mempeladjar Berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama TERDAKWA dan SAKSI-SAKSI beserta surat-surat lainnja jang berhubungan dengan perkara TERDAKWA :

NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA

U m u r : ± 40 tahun;

Lahir di : Tjilatjap;

Tanggal lahir : 28 Agustus 1925;

Pekerdjaan terachir : 1. Anggauta Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia;
2. Sekretaris Pertama Comite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya disingkat CDR, disamping itu djuga mendjabat sebagai :
a. Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
b. Anggauta Pengurus Besar Front Nasional;
c. Anggauta Dewan Produksi Nasional.

A g a m a : Tidak beragama;

Tempat tinggal terachir : Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta.

Ditahan sedjak tanggal 3 Oktober 1965 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Oditur Djenderal Angkatan Darat No. PRIN-5/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

Berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut diatas, terdapat tjukup alasan untuk menuntut TERDAKWA didepan sidang MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA, karena perbuatan-perbuatan sebagai berikut :



ODITUR LETKOL. CKH. DATOEK R. MOELIA SH. sedang menjitapkan diri. Tampak disebelah belak-
ang Oditur pengganti Maj. CKH. W.H. WARSI TO SH.

foto KEMPEN.

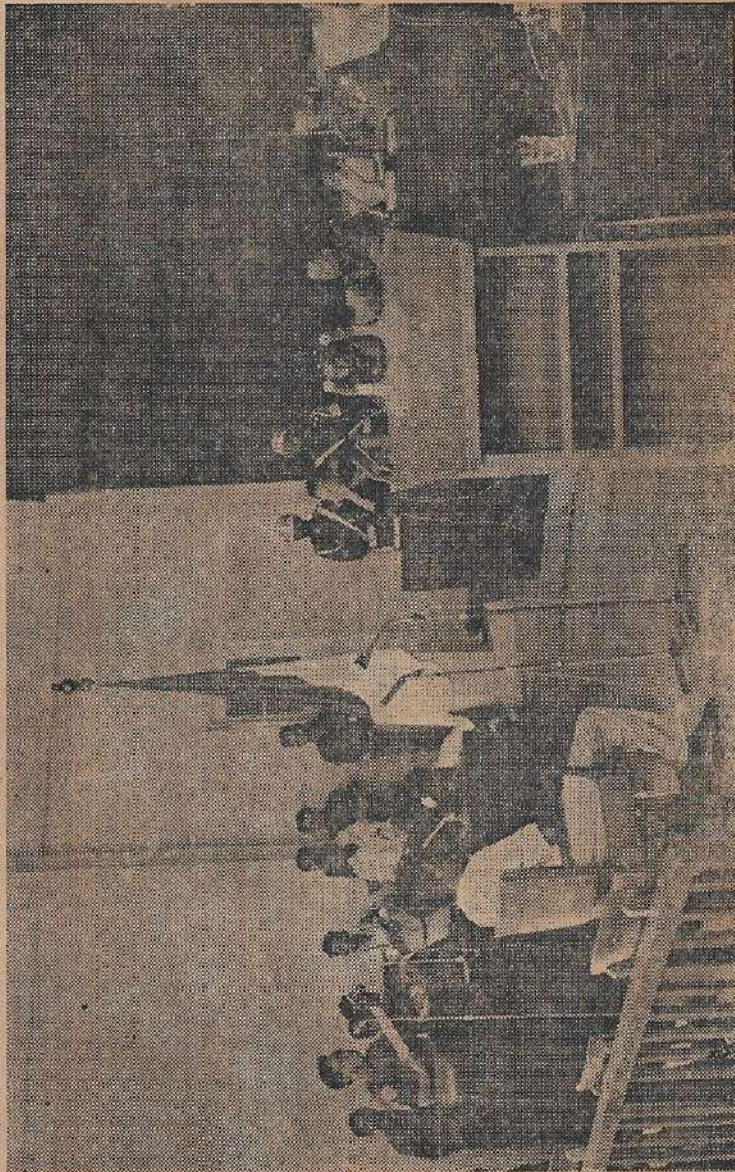


foto KEMPEL

Suasana ruang sidang, Oditur sedang membatjakan tuduhannya.

PERTAMA : Bahwa IA TERDAKWA pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidak-tidaknya kira-kira dalam bulan Agustus 1965 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam triwulan ketiga tahun 1965, bertempat di kantor Central Komite Partai Komunis Indonesia yang terletak di Djl. Kramat 81 Djakarta Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum Mahkamah Militer Luar Biasa, bersama-sama dan bersekutu dengan kawan-kawannya separtai/PKI jaitu antara lain dengan 1. D.N. AIDIT, 2. M.H. LUKMAN, 3. NJOTO, 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. ANWAR SANUSI, 7. REWANG, 8. SUWANDI, (semuanya hingga sekarang belum tertangkap) dan PERIS PARDEDE telah mengadakan komplotan (permupakatan djahat/samenspanning) untuk melakukan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan (meruntuhkan/omwentelling) Pemerintah Republik Indonesia yang sah atau untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata melawan kekuasaan pemerintah yang telah ada di Indonesia dengan tjara seperti yang disebutkan dibawah ini jaitu :

1. Pada waktu dan bertempat sebagaimana tersebut diatas telah diadakan serangkaian pertemuan/rapat-rapat yang oleh TERDAKWA disebut sebagai rapat Politbiro dan rapat Politbiro diperluas yang dihadiri oleh antara lain TERDAKWA sendiri, 1. D.N. AIDIT, 2. M.H. LUKMAN, 3. NJOTO, 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. ANWAR SANUSI, 7. REWANG, 8. SUWANDI (dari No. 1 s/d 8 hingga sekarang belum tertangkap) dan PERIS PARDEDE;
2. Dalam rapat yang berulang kali diadakan itu telah disimpulkan serta ditjapai kesepakatan dan kebulatan untuk mengadakan "operasi militer" dan membentuk „Dewan Revolusi" sebagai pengganti KABINET DWIKORA yang harus digulingkan;
3. Untuk melaksanakan hasil permufakatan djahat (samenspanning) tersebut diadakan pembagian tugas dan khusus kepada TERDAKWA dalam kedudukannya selaku Sekretaris Pertama Komite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya/C.D.R. ditugaskan untuk membentuk tenaga tjadangan bagi kepentingan "operasi militer" dari gerakan yang kemudian dikenal sebagai „Gerakan 30 September" ;

KEDUA : Bahwa IA — TERDAKWA — sebagai anggota Politbiro Central Komite Partai Komunis Indonesia dan Sekretaris Pertama Komite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya, setidak-tidaknya sebagai peserta permufakatan

djahat, dalam bulan September 1965 dan pada permulaan bulan Oktober 1965, ditempat-tempat diibu kota Republik Indonesia Djakarta Raya, sebagai pemimpin dan pengatur (leiders en aanleggers) telah melakukan makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuduhan PERTAMA dengan melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang merupakan permulaan pelaksanaan sebagai perwujudan dari kehendak akan melakukan perbuatan tersebut diatas, yaitu antara lain :

1. Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, TERDAKWA telah membentuk tenaga tjadangan untuk bantuan gerakan "operasi militer" dari "Gerakan 30 September", memerintahkan penjurusan Sektor-Sektor dan menundjuk/mengangkat Komandan Komandan Sektor, membentuk Pos-Pos Aksi yang bergaris hubungan langsung dengan Pos-Kerdja yang dipimpin oleh TERDAKWA sendiri, memberikan dan/atau menjuruh orang lain memberikan briefing/kampanje politik dengan tudjuan bila terdjadi peristiwa Gerakan 30 September oleh masyarakat akan sudah dapat difahami maksud dari gerakan tersebut ;
2. Pada kira-kira tanggal 28 September 1965 setidaknya didalam bulan September 1965 oleh TERDAKWA diketahui adanya pemanggilan kembali ke Lubang Buaja sebahagian dari tenaga tjadangan yang sudah pernah dilatih di Lubang Buaja untuk mendapatkan latihan refreshing yang ternjata kemudian merupakan konsentrasi kekuatan bersendjata belaka dalam menghadapi persiapan pelaksanaan bantuan operasi militer "Gerakan 30 September", dan bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 TERDAKWA telah menerima laporan dari Komandan Sektor I/Gambir tentang telah diusahakannya pendudukan penguasaan bangunan-bangunan vital seperti Kantor Central Telepon Otomatis Gambir, P.T.T. Djl. Thamrin, Gedung P.B. Front Nasional dan Instalasi P.L.N. Karet ;
3. Sebagai pemimpin dan pengatur, maka TERDAKWA dengan perbuatannya tersebut diatas telah dapat mewujudkan niatnya (begin van een uitvoering) untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan menggunakan kekerasan/operasi militer, ialah pada saat "Gerakan 30 September" mengumumkan melalui Radio Republik Indonesia di Djakarta yang telah dapat mereka kuasai/duduki pada tanggal 1 Oktober 1965 ± djam 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat tentang pembentukan dan susunan „Dewan Revo-

lusi" serta pendemisioneran Kabinet Dwikora walaupun perbuatan penggulingan Pemerintah Republik Indonesia yang sah itu sendiri tidak berhasil;

KETIGA

Bahwa IA — TERDAKWA — pada waktu-waktu dan ditempat-tempat serta dalam kedudukannya seperti tersebut dalam Tuduhan KEDUA, telah memimpin dan mengatur pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah yang telah ada di Indonesia yaitu antara lain dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut;

1. Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas TERDAKWA telah membentuk tenaga tjadangan untuk bantuan gerakan operasi militer dari „Gerakan 30 September" dibidang tempur dan pertahanan wilayah, memerintahkan penjurusan Sektor-sektor dan menentukan/mengangkat Komandan Komandan Sektor, membentuk Pos-Pos Komando, Pos-Pos Koordinator dan Pos-Pos Lapangan di tiap Komite Seksi Partai Komunis Indonesia yang mempunyai garis komando langsung dengan/dari Pos-Kerdja yang dipimpin oleh TERDAKWA sendiri ;
2. Kira-kira pada tanggal 28 September 1965 setidaknya didalam bulan September 1965 oleh TERDAKWA diketahui adanya konsentrasi tenaga tjadangan yang merupakan konsentrasi kekuatan bersendjata dalam menghadapi persiapan pelaksanaan operasi militer "Gerakan 30 September" dan pada tanggal 29 September 1965 setidaknya didalam bulan September 1965 TERDAKWA telah menerima pemberitahuan tentang hari „H" dan Djam „D" serta tentang dropping sendjata-sendjata api, pakaian-pakaian seragam dan lain-lainnya dari Lubang Buaja untuk Sektor-Sektor, kemudian menginstruksikan atas dasar pengetahuan itu agar Komite Seksi-Komite Seksi Partai Komunis Indonesia/Sektor-Sektor bersiap siaga untuk menerima dropping tersebut, sedang berturut-turut tanggal 30 September 1965 dan 1 Oktober 1965 TERDAKWA telah melakukan inspeksi/kontrol untuk memeriksa kesiap-siagaan Pos Komando dan Sektor Salemba serta pelaksanaan dropping dari alat/barang-barang tersebut diatas ;
3. Tanggal 1 Oktober 1965 ± djam 20.00 tenaga-tenaga tjadangan yang bersendjata dari Sektor I (Gambir) telah menjaja menduduki bangunan-bangunan vital seperti Kantor Sentral Telepon Otomatis Gambir, Djalan Merdeka Selatan, Kantor P.T.T. Djalan Thamrin, Gedung Pengurus Besar Front Nasional Djalan Merdeka Selatan, Instalasi Perusahaan Listrik Negara Karet, yang kesemua bangunan-bangunan vital tersebut me-

upakan kekuasaan/alat-alat kekuasaan/Djawatan-Djawatan resmi Pemerintah yang sudah berdiri di Indonesia ;

4. Bahwa TERDAKWA sedjak tanggal 1 Oktober 1965 sampai dengan saat penangkapannya telah menerima laporan-laporan, membuat analisa terhadap laporan-laporan yang diterima dan mengeluarkan instruksi-instruksi/perintah-perintah dalam kedudukannya selaku pimpinan Pos-Kerdja yang membawahi-perintahankan Pos-Pos Komando, Koordinator dan Lapangan.

Rangkaian tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuduhan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA tersebut diatas yang dilakukan oleh TERDAKWA, dengan mengetahui atau patut menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya Triprogram Pemerintah (Gaja Baru) dalam memperlengkapi sandang-pangan rakyat, penjelenggaraan keamanan rakyat dan Negara, dan perjuangannya menentang Nekolim, yaitu :

1. TERDAKWA telah dapat menduga sebelumnya, bahwa selama berlakunya „Gerakan 30 September” akan timbul kesulitan-kesulitan ekonomi, karenanya TERDAKWA sebelumnya ternyata antara lain telah berusaha dengan serikat-serikat buruh bersangkutan, agar dapatnya lalu-lintas darat dan udara tetap berdjalan sebagaimana biasa;
2. TERDAKWA telah memperhitungkan akan timbul kesulitan-kesulitan dalam bidang keamanan selama berlakunya „Gerakan 30 September”. yang menurut TERDAKWA akan ditimbulkan oleh unsur-unsur bekas Masjumi dan bekas Partai Murba ;
3. TERDAKWA juga telah menduga sebelumnya, bahwa menurut TERDAKWA selama berlakunya „Gerakan 30 September” yang merupakan pertentangan dalam negeri, maka pertentangan dalam negeri itu akan lebih menonjol dari pertentangan luar negeri (antara Republik Indonesia dengan Nekolim) maka jika tidak ada penjeleasaan yang tepat akan dapat memperlemah perjuangannya menentang Nekolim.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA tersebut diatas diatur dan diantjam dengan hukuman sebagaimana tertantum dalam :

a. untuk tuduhan pertama :

Pasal 110 ayat 1 berhubungan dengan pasal 107 dan pasal 108 berhubungan dengan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. untuk tuduhan kedua :

Pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. untuk tuduhan ketiga :

Pasal 108 ayat 1 sub 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kesemuanya pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada a., b., dan c. diatas berhubungan dengan pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959.

Mengingat dan memperhatikan :

1. Keppres No. 226 tahun 1963 tanggal 6 Nopember 1963;
2. Penpres No. 16 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963;
3. Keppres No. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 ;
4. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 05/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Januari 1966.

M E N U N T U T :

1. Agar perkara TERDAKWA tersebut diatas diperiksa dan diadili dalam persidangan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA karena perbuatan-perbuatan tersebut diatas.
2. Agar TERDAKWA tetap ditahan.
3. Agar dipanggil dan dihadapkan sebagai Saksi-saksi dalam perkara ini :

3.1. PERIS PARDEDE alias ABDULLAH,

Bangsa Indonesia, umur 48 tahun, tempat lahir di Lumbaran Perseburan Balige (Tapanuli Utara), agama Kristen Protestan, pekerjaan terakhir : anggota DPR-GR, anggota Sekretariat Komite Central Partai Komunis Indonesia dan tjalon anggota Politbiro Central Komite Partai Komunis Indonesia, tempat tinggal terakhir : Djalan Dr. Muwardi I/554 Grogol Djakarta.

3.2. SARTAMAN bin MASDJAN,

Bangsa Indonesia, umur 44 tahun, tempat lahir di Tjirebon, agama Islam, pekerjaan terakhir : Sekretaris Komite-Seksi Partai Komunis Indonesia Manggadua dan Agen Surat Kabar Harian Rakyat, tempat tinggal terakhir : Kebon Djeruk III No 106 Djakarta.

3.3. ACHMAD MUHAMAD bin JACUB,

Bangsa Indonesia, umur 40 tahun, lahir di Djakarta, agama Islam, pekerjaan terakhir : Sekretaris Komite Sub-Seksi Partai Komunis Indonesia Djati dan Pengurus Koperasi Komsuksi Kampung Djatibunder, tempat tinggal terakhir : Kampung Djatibunder RT. 18 RK. 8 Djakarta.

3.4. PRAJITNO bin KARNEN,

Bangsa Indonesia, umur 34 tahun, tempat lahir di Semarang, agama Islam, pekerjaan terakhir : Wakil Sekretaris Komite Seksi Partai Komunis Indonesia Kaboran Baru dan pegawai Djawatan Gedung-Gedung Negara Seksi Kaboran, tempat tinggal terakhir : Djalan Sampit No. 60 Blok M IV Kaboran Baru Djakarta.

3.5. SASTRO bin TJITROWIKONGKO,

Bangsa Indonesia, umur 37 tahun, tempat lahir di Djatiroto, agama Islam, pekerjaan terakhir : anggota Staf Komite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya, tempat tinggal terakhir : Kampung Kaju Manis No. 5 E Djatinegara.

3.6. SUTARNO bin DJOGOSUDARJO.

Bangsa Indonesia, umur 35 tahun, tempat lahir di Solo, agama Islam, pekerjaan terakhir : Wakil Kepala Bagian Keuangan P.T. RAMAC Indonesia, tempat tinggal terakhir : Dukuh Atas RT. 4, Tanah Abang Djakarta.

4. Sebagai alat-alat bukti dalam perkara ini diadjudkan alat2/barang2 sebagai berikut :
- 4.1. Sendjata-sendjata api yang terdiri dari jenis Tjung, Garrand dan G-3.
 - 4.2. Sedjumlah peluru-peluru.
 - 4.3. Tanda-tanda pengenalan yang berupa pita-pita merah, hijau dan kuning.
 - 4.4. Seberkas surat-surat yang terdiri dari :
 - 4.4.1. pengumuman-pengumuman "Dewan Revolusi".
 - 4.4.2. laporan-laporan situasi yang ditujukan terhadap TERDAKWA dan
 - 4.4.3. Surat-surat lainnya.
 - 4.5. Sebuah tas.

Djakarta, 4 Februari 1966

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

O D I T U R,

Tjap / ttd.

DT. R. MULIA S.H.

LETNAN KOLONEL CKH NRP. 12319

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

UNTUK KEADILAN

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN

NOMOR : B-011 — /MBI/A/1966.

Sidang terbuka Mahkamah Militer Luar Biasa yang dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 14 Februari 1966 bertempat di Gedung Perenjanaan Pembangunan Nasional di Jalan Taman Suropati No. 2, Djakarta, untuk mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama dan terakhir didalam perkara terdakwa : NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.

SUSUNAN MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA TERSEBUT :

Berdasarkan Surat Keputusan J.M. Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. : Kep.-5/KOPKAM/1/1966 tanggal 29—1—1966 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. LETKOL-CKH ALI SAID S.H. NRP. 14870 | KETUA |
| 2. LETKOL-CKH MOERTIJOSO S.H. NRP. 15131 | KETUA PENGGANTI |
| 3. LETKOL-(U) ZAIDUN BAKTI NRP. 161223 | HAKIM ANGGAUTA |
| 4. LETKOL (U) MUKARTO NRP. 464508 | HAKIM ANGGAUTA |
| 5. MAJOR LOK. (L) GANI DJEMAT S.H. | HAKIM ANGGAUTA |
| 6. MAJOR LOK. (L) HASAN BASJARI S.H. | HAKIM ANGGAUTA |
| 7. K.P. TK. I DRS. SOENARDHI SH. x) | HAKIM ANGGAUTA |
| 8. K.P. TK. I TASLAN KARNADI SH. x) | HAKIM ANGGAUTA |
| 9. MAJOR TIT. RAFFLY RASAD SH. | HAKIM ANGGAUTA |
| 10. MAJOR TIT. B.H. SIBURIAN SH. | HAKIM ANGGAUTA |
| 11. KAPT-CKH W.H. FREDERIK Be. Hk. NRP. 295948 | PANITERA |
| 12. LETDA-CKH KOMAR SUGANDA Be. Hk. NRP. 6138490 | PANITERA PENGGANTI |

x) Sebehum dimulai sidang telah dinaikkan pangkatnya menjadi ADJUNKOMISARIS BESAR POLISI.

Setelah Ketua membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, diminta kepada Oditur pada MAHMILLUB untuk menghadapkan terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa masuk ruangan sidang dalam keadaan tidak terbelenggu tetapi dengan pendjagaan yang kuat.

Atas pertanjan Ketua, terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

N a m a : NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.
Lahir di/pada tanggal : TJILATJAP/28 AGUSTUS 1925.
B e r a g a m a : Tidak beragama.
Pekerdjaan terachir : Anggauta MPRS/PB FN/DEPRONAS.
Dalam PKI sebagai Anggauta Politbiro dan Sekretaris Pertama CDR.
Alamat terachir : Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam 147, Djakarta.

Terdakwa ditahan sedjak tanggal 3 Oktober 1965 berdasarkan Surat Perintah Oditur Djenderal Angkatan Darat No. : PRINT-5/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

Atas perintah Ketua kemudian oleh Panitera dibatjakan Surat-Surat Keputusan tentang Penetapan Hari Sidang No. : Kep-002/MBI/A/1966 tanggal 7 Pebruari 1966, dan tentang Penundjukkan Pembela No. : Kep-006/MBI/A/1966 tanggal 12 Pebruari 1966.

Kemudian Oditur pada MAHMILLUB membatja Surat Tuduhan No. TUD-001/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966, setelah Ketua memperingatkan terdakwa agar memperhatikan betul apa yang dituduhkan terhadapnya.

Setelah pematjaan Surat Tuduhan selesai Pembela mengajukan sebuah Eksepsi yang isinya diadjukan setjara lisan sebagai berikut :

"Bahwa pemakaian Penpres No. : 16 Tahun 1963 dianggap oleh Pembela merugikan terdakwa berhubung telah keluarnya Undang-Undang No. : 19 Tahun 1964 tentang „Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman” dimana terdapat suatu azas yang penting ialah Pengadilan selalu dilakukan dalam dua tingkat dan apakah Mahkamah Militer Luar Biasa berwenang untuk mengadili terdakwa”.

Selesai pembela mengajukan Eksepsi Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur untuk mengajukan pendapatnya terhadap Eksepsi tersebut dan Oditur menangkis eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keppres No. : 226 Tahun 1963 Presiden diberi kekuasaan tertinggi untuk mengambil kebidaksanaan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan hidup Negara dan pengamanan mentjapai tudjuan Revolusi Indonesia. Penpres No. 16 Tahun 1963 tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa dikeluarkan dengan pertimbangan kalau terdjadi perkara dalam Negara yang sedang ber-revolusi, bahwa untuk keperluan itu dibentuk suatu badan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan tjepat ;
2. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa ini masih berpedoman kepada H.I.R. mengenai hukum Atjaranja, sedang pembuktian mempergunakan Undang-undang Mahkamah Agung ;

3. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa hanya mengadili perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Presiden dan adalah tidak pada tempatnja kalau kita dalam sidang ini menilai kebidaksanaan Presiden.

Setelah pengadjuan pendapat Oditur, sidang dischors untuk 10 menit setelah mana Ketua memberi Keputusannya atas Eksepsi Pembela yang berbunji sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa MENOLAK Eksepsi Pembela dengan alasan-alasan :

1. Mahkamah Militer Luar Biasa berpendapat bahwa dengan diadju-kannya tertuduh kedepan sidang ini, tertuduh tidak dirugikan meskipun telah diundangkan Undang-undang No. 9 tahun 1964, sebab sekalipun pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa didasarkan pada tudjuan untuk mengadakan suatu peradilan yang dapat menjelesaikan perkara-perkara khusus dengan tjepat sekali, azas-azas dan sendi-sendi keadilan tidaklah sekali-kali ditinggalkan sehingga hak-hak daripada tertuduh masih tetap didjamin sebagaimana dapat ditemukan dalam Penpres No. 16 Tahun 1963 ;
Disamping itu, Mahkamah Militer Luar Biasa berada dilingkungan peradilan Militer yang berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958 dalam tjaranja berpedoman pada H.I.R. yang berlaku dilingkungan peradilan umum dan disegi pembuktiannya memperlakukan hukum pembuktian Mahkamah Agung, yang ini ditundjukkan surat J.M. Menteri Ketua Mahkamah Agung No. 1281/Sek./5354/65 tanggal 16 Desember 1965 ;
2. Keraguan akan wewenang Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditangkis-djawab sebagai berikut :
 - 2.1. Mahkamah Militer Luar Biasa mendasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara daripada tokoh yang tersangkut atau terlibat didalam petualangan kontra-revolusi G. 30. S./Gestok pada Keputusan Presiden No. 370 Tahun 1965 tertanggal 4 Desember 1965, dalam diktum memutuskan bab Pertama ;
 - 2.2. Keputusan Presiden RI No. 370 Tahun 1965 tersebut mengindulkan dirinja pada Penetapan Presiden RI No. 16 Tahun 1963 tertanggal 24 Desember 1963 yang meskipun tidak memuat pasal dan ajat yang menjatakan/menetapkan adanya kemungkinan untuk mendelegasikan kewenangan Presiden RI kepada orang lain, tetapi tidak pula berisikan sebuah pasal dan sebuah ajat-pun yang menentukan larangan pendelegasian itu ;
 - 2.3. Bahwa Presiden Berkewenangan untuk mengambil kebidaksanaan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan Negara dan pentjapaian tudjuan revolusi Indonesia, mendasarkan pula segala hukum dari perundang-undangan yang ada dan segala hukum yang bersumber pada djalannya revolusi Indonesia

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI No. 226 Tahun 1963;

2.4. Disegi sahja susunan Mahkamah Militer Luar Biasa jang sekarang bersidang ini, kembali lagi persoalamnja kepada Keputusan Presiden RI No. 370 Tahun 1965 tertanggal 4 Desember 1965 tadi jang mendjadi sandaran dari Surat Keputusan Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 05/KOPKAM/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966, sedangkan penentuan tertuduh NJONO sebagai tokoh petualangan Kontra Revolusi G. 30. S./Gestok ditemukan dalam Surat Keputusan Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 03/KOPKAM/1/1966 tertanggal 27 Djanuari 1966 sebagai pemenuh sjarat jang ditentukan dalam Keputusan Presiden RI. No. 370 Tahun 1965 tersebut diatas;

2.5. Pada ahirnja persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa ini menjandarkan pemeriksaan tertuduh pada :

2.5.1. Surat Keputusan Penjerahan Perkara Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep-13/KOPKAM/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966, dan

2.5.2. Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. TUD/001/OM/1966 tertanggal 4 Pebruari 1966.

Sidang kemudian dilandjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

Setelah Ketua mengulangi inti tuduhan, kemudian menanjakan terdakwa, apakah semua jang dituduhkan terhadapnja adalah benar, pertanjaan mana oleh terdakwa dijawab dengan : „Saja menganggap tidak benar tuduhan-tuduhan dari Oditur jang dituduhkan kepada saja”.

Ketua minta menerangkan mana jang tidak benar, bagian mana jang tidak benar, dan apa jang sebenarnja.

Kemudian Sidang Pertama sampai dengan Ke-lima berlangsung dengan tanja djawab antara Ketua, Hakim Anggauta, Oditur Pembela dengan terdakwa sebagaimana tersebut dalam tjatatan-tjatatan dari sidang pengadilan jang tertulis dalam lampiran-lampiran berikut ini.

Sidang pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa berlangsung sampai dengan tanggal 21 Pebruari 1966 dengan Atjara sebagai berikut :

Nomer Urut	Mulai Tanggal	Djam.	A t j a r a	Sidang ke
1.	14-2-1966	09.00	Pemeriksaan Terdakwa	I
2.	14-2-1966	19.00	Pemeriksaan Terdakwa	II
3.	15-2-1966	08.00	Pemeriksaan Saksi : — P. Pardede — Ahmad Muhamad — Sartaman	III „ „

4.	15-2-1966	19.00	Pemeriksaan Saksi : — Prajitno — Sastrosandjojo — Sutarno	IV „ „
5. X)	16-2-1966	09.00	Pemeriksaan Saksi : — Sujono al. P. Djojo	V
6. i)	17-2-1966	11.30	Oditur minta pembatjaan requisitoir ditunda	VI
7.	17-2-1966	19.00	Pembatjaan Requisitoir	VII
8.	19-2-1966	08.00	Pleidooi Pembela dan Pleidooi Terdakwa Replik ÷ Duplik	VIII
9.	21-2-1966	19.00	PUTUSAN (VONNIS)	IX

x) Saksi jang didengar pada tanggal 16-2-1966 adalah atas permintaan Pembela pada tanggal 15-2-1966 dalam sidang ke-IV.

i) Pada sidang ke-VI Oditur mohon perpandjangan waktu untuk dapat menjusun requisitoir hal mana disetudjui oleh Ketua.

Pada tanggal 21 Pebruari 1966 djam 19.00 Ketua membuka sidang ke-IX, jang dinjatakan terbuka untuk umum. Kemudian Oditur diminta agar terdakwa dibawa masuk. Kepada terdakwa diberitahukan oleh Ketua agar selama pembatjaan Putusan (Vonnis) hakim terdakwa berdiri, dan hanja diperkenankan duduk dengan izin Ketua. Kemudian Ketua mulai membatja Putusan (Vonnis) Mahkamah Militer Luar Biasa dengan menjatakan, bahwa setelah mempertimbangkan hasil-hasil pemeriksaan dipersidangan sambil memperhatikan ketentuan-ketentuan jang berlaku, maka MAHMILLUB sampai pada suatu kesimpulan jang didalam dietumnja berbunji sebagai berikut :

M E N G A D I L I

MENETAPKAN : — bahwa TERDAKWA tersebut diatas, bernama :
— **NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA**

dilahirkan di : Tjilatjap
pada tanggal : 28 Agustus 1925
a g a m a : Tidak beragama
pekerdjaan : 1. Anggauta Politbiro Central
Comite Partai Komunis In-
donesia.
2. Sekretaris Pertama Comite
Daerah Partai Komunis In-
donesia Djakarta Raya,
disingkat CDR.

tempat tinggal : Gang Sentiong Kramat Pulo
Dalam No. 147, Djakarta

bersalah melakukan kedjahatan-kedjahatan :

1. Mengadakan komplotan (permufakatan djahat) untuk mengadakan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah dan untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang sjah;
2. Memimpin dan mengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah;
3. Memimpin dan mengatur pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia.

— MENGHUKUM TERDAKWA TERSEBUT KARENA KEDJAHATAN-KEDJAHATANNJA ITU DENGAN :

HUKUMAN MATI

- Memerintahkan supaja barang-barang bukti semuanya dirampas untuk Negara.
- Ongkos-ongkos perkara dibebankan pada Negara.

Setelah pengumuman Putusan ini selesai Ketua mendjelaskan kepada terdakwa bahwa terhadap Putusan ini tidak dapat dimohon banding. Pemeriksaan ulangan (revisi) ataupun menuntut kasasi dan menajukan terdakwa apakah menerima Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa ini dan apakah menggunakan kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi kepada P.J.M. Presiden Republik Indonesia.

Terdakwa mendjawab, bahwa ia Menerima Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa ini, dan akan mengajukan permohonan grasi (ampun) kepadanya P.J.M. Presiden Republik Indonesia.

Kemudian Ketua menutup persidangan.

Demikianlah risalah pemeriksaan ini dibuat serta ditanda-tangani oleh Ketua, dan Panitera.

Djakarta, 1 Maret 1966

KETUA,

ALI SAID S.H.

LETKOL CKH NRP. 14870.

PANITERA,

W.H. FREDERIK Bc. Hk.

KAPTEN CKH NRP. 295948

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

— SIDANG KE I PERKARA — NJONO —

Tanggal : 14 — 2 — 1966

Mulai djam : 08.00

Setelah dibatjakan tuduhan oleh Oditur, Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada TERDAKWA.

Hakim Ketua : Sekarang saja ingin tanjakan, benarkah segala sesuatu jang diutjapkan oleh Oditur dan jang dituduhkan kepada dirimu itu?

Terdakwa : Saja menganggap tidak benar tuduhan-tuduhan dari Oditur jang dituduhkan kepada saja.

Hakim Ketua : Djadi saja ulangi, menganggap tuduhan jang sudah dibatjakan oleh Oditur tadi tidak benar.

Apabila memang tidak benar, MAHKAMAH ingin mengetahui mana jang tidak benar, bagian mana jang tidak benar, dan apa jang sebenarnya.

Saja mulai dari tuduhan pertama dahulu, djangan di-tjampur-adukkan. Apa jang sebenarnya dari tuduhan pertama itu jang tidak benar, keseluruhannya atau sebagian.

Terdakwa : Saja terangkan bahwa benar Politbiro CC PKI pada bulan Agustus tahun jang lalu mengadakan permupakatan, jang biasa disebut sidang-sidang Politbiro. Djadi adanja sidang-sidang Politbiro itu saja akui (!).

Hakim Ketua : Kalau memang ada sidang-sidang Politbiro, apa sebenarnya jang dibitjarakan dalam sidang-sidang itu?

Terdakwa : Jang saja tidak akui adalah materi daripada sidang-sidang itu, atau jang didiskusikan dalam sidang-sidang Politbiro itu. Jang didiskusikan adalah situasi politik, bukan merentjanakan membuat komplotan melakukan penggulingan Pemerintah jang ada atau melakukan pemberontakan bersendjata.

Hakim Ketua : Baiklah. Dalam hal ini kami ingin mengetahui sedjak kapan diadakan rapat-rapat jang terakhir maupun pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi jang terakhir itu.

Jang dalam berita atjara saudara sebutkan jang penting ada 3 kali, dan pertama-tama disebutkan pertemuan, kemudian disebutkan rapat, jang kemudian dalam Berita Atjara Pendahuluan disebutkan diskusi-diskusi. Sedjak kapan dilakukan setjara continue, atau setjara teratur didalam rangka apa jang disebutkan ini.

Terdakwa : Jang saja anggap penting, atau jang bernilai sebagai resmi, sidang-sidang Politbiro dalam pemeriksaan saja kemukakan 3 kali.

Hakim Ketua : Mengapa disebutkan penting, apa alasan atau dasar penilaian dari NJONO untuk menjatakan 3 kali ini sadja jang penting.
Dasar penilaian "penting" itu apa ?

Terdakwa : Berhubung jang saja gunakan sebagai rapat-rapat diluar itu lebih banyak pembittjaraan tidak resmi jang menurut ketentuan dari partai itu dia masuk didalam constitusie daripada P.K.I.

Hakim Ketua : Djadi pentingnja itu dimana letaknja ?

Terdakwa : Jaitu rapat jang sjah sebagai sidang daripada Politbiro.

Hakim Ketua : Djadi karena sjahnja rapat itu ?

Terdakwa : Jang saja maksudkan penting soal materinja jang dipersoalkan, itu jang penting.

Hakim Ketua : Materie atau bahan dari rapat itu, bukan ?
Ada dua matjam jang penting.

Terdakwa : Pertama sjahnja sidang itu.

Kedua materi daripada sidang.

Hakim Ketua : Kalau mengenai sjahnja sidang, sidang jang tidak sjah itu jang bagaimana ?

Terdakwa : Jaitu jang sjah dihadiri oleh separo lebih anggota bersangkutan.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Disini jang ingin saja kemukakan, materi daripada persidangan tadi atau permupakatan.

Hakim Ketua : Nanti dulu, separo daripada anggota itu menentukan sjahnja, oleh karena demikian oleh NJONO dinilai sebagai pentingnja sidang-sidang. Pernah sebelum ini ada sidang jang tidak penting, karena tidak sjah dan tidak dihadiri oleh setengah anggota; Pernah terdjadi? Karena itu disebutkan tidak penting? Dus, ketjuali tiga kali jang penting itu rapat-rapat jang selebihnja adalah

tidak penting karena tidak sah, karena tidak didatangi oleh lebih dari setengah anggauntanja.

Terdakwa : Maksudnja itu pembittjaraan diluar.

Hakim Ketua : Djadi materinja jang menondjol, itu jang ditentukan sebagai dasar menilai rapat jang tiga kali ini penting itu? (ada djawaban "ja" dari tertuduh).

Tjoba materi jang didjadikan bahan rapat itu apa?

Terdakwa : Tadi saja kemukakan bahwa jang didiskusikan adalah situasi politik dengan tiga matjam materi.

Materi jang berupa informasi-informasi jaitu :

Pertama : Informasi tentang kesehatan dari P.J.M. Presiden jang sangat terganggu.

Kedua : Informasi akan adanya rentjana kudeta dari Dewan Djendral itu materi jang kedua.

Ketiga : Adanya inisiatip dari golongan Perwira jang mau bertindak mendahului menggagalkan rentjana kudeta dari "Dewan Djendral" itu.

Itulah tiga materi jang kami maksudkan dengan situasi politik jang didiskusikan oleh permupakatan dari Politbiro, tiga kali itu jang penting.

Hakim Ketua : Jang menjusun agenda siapa?

Terdakwa : Kebiasaan dari itu kawan Ketua partai jang mengadakan atjaranja dan inleidingnja.

Hakim Ketua : Djadi pertemuan jang penting kali itu sedjak pertemuan jang pertama materinja tiga-tiga ini sadja!

Terdakwa : Ja, ja!

Hakim Ketua : Dus tidak ada jang dilebihkan masih ingat siapa jang hadir pada waktu itu?

Terdakwa : Jang hadir jaitu kawan D.N. AIDIT, Kawan M.H. LUKMAN, kawan NJOTO, kawan SUDISMAN, kawan Ir. SAKIRMAN, kawan ANWAR SANUSI dan saja sendiri. Dan pada suatu sidang jang kedua ditambah dengan kawan REWANG, kawan PERIS PARDEDE dan kawan SUWANDI.

Hakim Ketua : Kalau didalam persidangan jang pada sidang kesatu, sidang kedua, sidang ketiga, rapat satu, rapat dua, rapat tiga, pertemuan satu, dua, tiga, tjoba djelaskan pada MAHKAMAH, kira-kira masih ingat ja! Bagaimana tjaranja sidang atau bagaimana berlakunja sidang semendjak sidang jang pertama apa jang terdjadi pada sidang jang kedua, apa pula jang diperoleh sidang jang ketiga ?

Terdakwa : Kebiasaan kami situasi politik itu diadjudkan oleh kawan Ketua (kawan D.N. AIDIT) kemudian disertai problem-stellingen, biasanja djuga tentang kemungkinan-kemungkinan politik yang mendjadi dasar probleemstellingen kemudian diadakan diskusi. Itu kebiasaan kawan mendiskusikan situasi politik.

Hakim Ketua : Lalu, tjoba tjeriterakan, Dalam pertanyaan saja itu apa atjara dan djalannja bagaimana rapat yang pertama, rapat kedua dan ketiga?

Terdakwa : Dalam rapat pertama setelah kawan Ketua D.N. AIDIT memberikan tiga materi tentang situasi politik yang dihadapi inisiatip dari golongan Perwira tadi yang mendahului bertindak terhadap "Dewan Djendral".

Hakim Ketua : Itu rapat keberapa?

Terdakwa : Itu yang pertama

Hakim Ketua : Dus, langsung naik kemateri yang ketiga?

Terdakwa : Oo, ini dalam djalannja diskusi, kurang lebih.

Hakim Ketua : Kurang lebih, ja, tadi kau adjukan materi yang ketiga. a. Ini, b. Ini, c. Mengenai Perwira yang berpikiran maju itu. Saja tanjakan tjoba tjeriterakan dengan djelas bagaimana djalannja rapat yang telah dilakukan yang menurut saudara tiga kali penting itu. Bagaimana, tjaranja rapat yang pertama, apa yang dibi-tjarakan, mengenai atjara-atjaranja apa yang dibi-tjarakan, bagaimana tjara membitjarakan pertama kedua dan ketiga.

Terdakwa : Itu semua dari kawan ketua langsung mempersoalkan atau menjampaikan informatie mengenai tiga materie tadi. Kemudian mengadakan persoalan-persoalan pokoknja oleh kawan D.N. AIDIT bahwa ketiga materi tadi mana yang mendjadi persoalan yang terpenting. Oleh kawan D.N. AIDIT diadjudkan bahwa persoalan dari tiga materi tadi yang terpenting adalah materi yang kedua, jaitu adanya bahaya coup d'etat dari Dewan Djendral. Maka dikemukakan berdasarkan materi terpenting tadi probleminja bagaimana mentjegah rentjana terhadap Dewan Djendral itu. Nah, dus ini dipersoalkan ada dua matjam tjara atau biasa dipakai istilah kami dua matjam taktik yang kelihatan jaitu pertama tjara yang mendjadi inisiatip dari golongan Perwira yang tersebut tadi jaitu tjara

bertindak dulu atau didahului pada rentjana Dewan Djenderal, kemudian lapor kepada P.J.M. Presiden. Ini tjara yang pertama, atjara yang kedua ja, karena biasanja soal dengan Dewan Djenderal menjangkut soal militer itu djuga soal politik maka tjara yang kedua adalah lapor kepada Presiden dan menunggu sikap dari-pada Presiden, itu dalam pendahuluan diskusi dari Kawan Ketua D.N. AIDIT dalam diskusi yang banyak dipersoalkan itu persoalan memang sesungguhnya im-bangan kekuatan militer yang ada.

Hakim Ketua : Atas dasar pertanyaan atau tanpa ditanya diberikan itu?

Terdakwa : Ija memang saja sebutkan tadi dalam diskusi timbul persoalan yang dianggap penting, itu persoalan daripada diskusi, diskusi bagaimana im-bangan kekuatan militer. Karena Kawan AIDIT belum siap maka waktu itu disimpulkan Kawan AIDIT untuk membuat persiapan untuk memberi istimewa bagaimana situasi im-bangan militer tadi itu dalam diskusi yang pertama tidak diambil keputusan tadi satu permintaan pada Kawan D.N. AIDIT untuk dalam sidang yang akan datang memberikan keterangannya tentang situasi umum daripada im-bangan kekuatan militer.

Hakim Ketua : Lalu?

Terdakwa : Itu sidang yang pertama, sidang yang kedua karena dianggap soalnya sangat gawat maka dipandang perlu minta pendapat-pendapat dari Kawan-kawan yang dipandang perlu ini, yang biasa kami sebut sidang Politbiro yang diperluas. Waktu itu diundang kawan REWANG selain anggota Politbiro masih melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Sekretaris daripada CDB Komite Daerah Besar DJATENG, kedua perlu djuga dimintai pendapat kawan-kawan PERIS PARDEDE sebagai tjalon anggota Politbiro waktu diperlukan memang diminta hadir dalam sidang Politbiro, ketiga dipandang perlu mendengarkan pendapat dari kawan SUWANDI itu Sekretaris dari Komite Besar P.K.I. DJATIM. Begitulah maka pada kira-kira pertengahan bulan Agustus diadakan sidang lagi yang diperluas yang sifatnja informatoris djadi menampung pikiran-pikiran dari kawan-kawan yang dipandang perlu. Dalam sidang kedua kawan AIDIT mengulangi inleiding seperti diadjudkan dalam sidang pertama. Disini dalam diskusi itu umumnja memang menjoalkan bagaimana im-bangan-im-bangan kekuatan militer, selain itu djuga disoalkan matja-matjam kemungkinan politik.

Pertama : Salah satu kemungkinan politik itu adanya

rentjana dari "Dewan Djenderal" mungkin disusunlah satu Kabinet menurut rentjana "Dewan Djenderal" itu;

Kedua : Kemungkinan lain jaitu inisiatif dari segolongan Perwira yang saja kemukakan tadi yang mau bertindak terhadap "Dewan Djenderal" kemudian mendirikan "Dewan Revolusi".

Ketiga : Tuntutan PKI sendiri, tuntutan PKI sendiri adalah mengenai Kabinet Gotong-Rojong poros Nasakom.

Mengenai imbalan militer diterangkan oleh AIDIT bahwa pada pokoknya imbalan militer ini tidak menguntungkan "Dewan Djenderal". Mengenai kemungkinan politik itu dianggap yang paling penting adalah mentjegah adanya Kabinet dari "Dewan Djenderal". Itu yang paling penting. Karena Kabinet dari "Dewan Djenderal" dianggap bersifat Nasakom phobi. Mengenai "Dewan Revolusi" itu lebih banyak melihat motifnya ialah bersifat menentang kekuatan politik. Yang menentang "Dewan Djenderal".

Mengenai Kabinet Nasakom dikemukakan satu kemungkinan yang belum tepat dipertimbangkan, mengingat diketahui P.J.M. Presiden untuk membentuk Kabinet Nasakom glagatnja masih meminta waktu. Disamping itu situasi politik yang dihadapi, disoalkan yang paling penting. Waktu itu disimpulkan yang paling urgen, adalah mentjegah adanya Kabinet dari menurut rentjana "Dewan Djenderal". Itulah tambahan keterangan D.N. AIDIT yang tidak ada dalam sidang pertama, maka diulangi lagi problem pokoknya adalah bagaimana taktik menghadapi rentjana "Dewan Djenderal" itu.

Pertama kami menempuh taktik seperti para Perwira yang saja adjukan tadi.

Kedua, taktik melaporkan kepada Presiden dan kemudian menunggu sikap Presiden.

Hal itu djalannja diskusi dan kesimpulan-kesimpulan sebagai problem pokok yang ditarik D.N. AIDIT karena sifatnja itu informatoris maka tidak diambil keputusan. Kemudian sidang ketiga disitu diambil keputusan. Keputusan yang langsung mengenai taktik menghadapi situasi politik yang saja kemukakan tadi.

Memang menurut D.N. AIDIT bahwa militer kraechtverhouding memang gunstig bagi segolongan Perwira yang mau bertindak terhadap "Dewan Djenderal". Tetapi mengenai menghadapi situasi politik tidak tjukup hanya

melihat segi militer, karena soalnya ada politik yang menjangkut kekuasaan politik yang ada, dan karena itu harus ditinjau juga segi politiknya. Sebagai faktor yang utama mengenai segi politik ini peranan dari Paduka J.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi yang dalam diskusi itu disimpulkan bahwa kedudukan dari politik dari P.J.M. Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi boleh dibidang dalam konstellasi politik sekarang ini setidak-tidaknya sangat besar pengaruhnja, dalam hal-hal tertentu menentukan. Maka itu sungguhpun imbalan militer gunstig maka disimpulkan oleh kawan D.N. AIDIT dan disetujui oleh sidang Politbiro waktu itu jaitu ditempuh taktik yang kedua, jaitu djelasnja diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada P.J.M. Presiden tentang bahaya "Dewan Djenderal" dan mengharapkan kepada P.J.M. Presiden mengambil langkah-langkah pentjegahan.
2. Tindakan atau sikap P.K.I. menunggu sikap dari P.J.M. Presiden.
3. Menginformasikan kedalam partai adanya bahaya kudeta daripada "Dewan Djenderal".

Itulah bapak ketua, Materi dan keputusan-keputusan dari permufakatan Politbiro CC PKI.

Hakim Ketua : Memang adalah hak dari tertuduh untuk mungkir, itu hak yang tidak akan ditjabut dan tak boleh ditjabut oleh siapapun juga. Tetapi MAHKAMAH ingin menanjakan, mana sebenarnya yang benar keterangan yang baru kau berikan ini ataukah pada keterangan yang beratjap kali kau berikan dan dibuatkan berita atjara pemeriksaan untuk itu. Dimana pada tiap berita atjara pemeriksaan itu setelah selesai, ditanda-tangani dibatjakan ulang dulu sebelumnya dan pada pemeriksaan kemudian selalu ditanyakan apakah ada perobahan tentang berita atjara semula, dan senantiasa mendapatkan djawaban tidak ada. Ini dalam pemeriksaan yang lalu, terdapat hal-hal yang sangat berbeda dengan apa yang kau berikan sekarang. Ini mana yang benar sebetulnja.

Apakah yang didalam berita atjara pendahuluan, ataukah yang didalam sidang ini, tanpa mentjabut hak mungkir saudara itu boleh.

Terdakwa : Yang benar adalah yang sekarang.

Hakim Ketua : Yang sekarang.

Baik, sekarang saja tanjakan. Memang yang benar yang sekarang, saudara memberi tahukan bahwa dalam sidang ke-2 itu dasar pada pemanggilan surat undangan kepada

para tjalon anggota Politbiro itu adalah karena dipandang perlu untuk mendengar pendapat dari mereka. Apa mereka mengajukan pendapat dalam rapat ini.

Terdakwa : Mereka umumnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan jaitu berputar sekitar dua soal, jaitu :

1. Bagaimana sesungguhnya keadaan imbalan militer ini yang banyak dipersoalkan, yang ditanjakan.
 2. Bagaimana hubungannya dengan tuntutan partai mengenai Kabinet Nasakom.
- Ini dua soal yang banyak ditanjakan.

Hakim Ketua : Lalu, dalam sidang yang kedua, tadi djuga didjelaskan, kalau tjotjok, oleh Ketua D.N. AIDIT pada rapat yang pertama persoalan pokok yang penting, disamping masih mengajukan problematik yang baru atau suatu materi baru soal pokok lainnya yang dibahas adalah soal sifat politik dan yang didalam diskusi pada rapat kedua itu oleh beberapa anggota ditanjakan kebenaran dari informasi yang diberikan oleh AIDIT itu. Disidang pemeriksaan pendahuluan, disitu disebut bahwa diskusi pada intinya mempersoalkan hal-hal disebut diatas kebanjakan adalah menanyakan tentang informasi yang diberikan kepada sidang yang pertama apa telah ditjek atau tidaknya, telah ditjek atau belumnya mengenai informasi-informasi 3 pokok yang penting itu. Apa benar, didalam sidang-sidang memang dibitjarkan itu, betul. Apakah AIDIT sudah mengetjek perimbangan militer. Memang benar diperbintjangkan?

Terdakwa : Ja. Djadi ada dua sikap dari anggota-anggota yang hadir. Ada yang tanya apakah sudah ditjek, ada djuga yang sudah pertjaja kepada informasi sedjak pertama.

Hakim Ketua : Masih ingat siapa kira-kira yang tanya waktu itu?

Terdakwa : Ini hanya ingatan, yang saya ingat betul jaitu persoalan-persoalan pokoknya, antara lain kalau tidak salah djuga Kawan Peris Pardede itu menanyakan, kawan SAKIRMAN, pokoknya ada beberapa anggota yang menanyakan :
"apa itu sudah ditjek".

Hakim Ketua : Apakah mendapat djawaban apa tidak?

Terdakwa : Waktu itu memang sudah ditjek, terutama dengan menekankan sumber-sumber dari informasi-informasi itu.
Itu boleh dipertjaja.

Hakim Ketua : Saudara sendiri menanyakan tidak?

Terdakwa : Saya itu yang terutama menjadi pikiran adalah soal imbalan militer.

Hakim Ketua : Oh, djadi mengenai informasi-informasi itu sudah pertjaja penuh bahwa memang benar, bahwa Bapak Sakit serious, bahwa ada "Dewan Djenderal", bahwa itu sudah yakin.

Terdakwa : Ja, sudah yakin.

Hakim Ketua : Djadi sudah yakin kepada informasi yang diinformir pada informasi yang pertama itu yang menjadi problema atau buah pikiran saudara NJONO.
Waktu itu adalah bagaimana perimbangan kekuatan militernya.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah disimpulkan perimbangan kekuatan militer itu, apa ada disimpulkan sesuatu?

Terdakwa : Tadi saja kemukakan bahwa dalam melihat situasi politik ini tidak tjukup hanya melihat segi militer harus djuga dilihat segi politiknya.

Hakim Ketua : Dalam rangka karena melihat perimbangan kekuatan militer ini dasar pokok pikirannya adalah ditudjukan pada apakah sejogjanya mendahului atau didahului oleh rentjana coup dari "Dewan Djenderal" tadi, lalu apa kesimpulannya setelah diperoleh diketahui mengenai perimbangan kekuatan militer itu.
Baiknya mendahuluikah, atau tetap didahului saja.

Terdakwa : Mengenai itu tidak ditarik kesimpulan, tidak ditarik kesimpulan. Seperti saja kemukakan 2 segi supaya di kemukakan/dilihat bersama.

Hakim Ketua : Djadi segi militer dan politik, dua segi setelah mempertimbangkan itu tidak mengambil suatu kesimpulan sama sekali.

Terdakwa : Tidak, djadi dipertimbangkan bersama sama segi militer dan segi politiknya.

Hakim Ketua : Itu kan tak logis namanya. Ini suatu pertemuan yang saudara sendiri katakan adalah suatu pertemuan yang penting. Pentingnya dimana, letak pentingnya — ada dasar undangan dan dasar materinya. Saya tanyakan kemudian yang menondjol adalah dasar materinya itu. Kalau suatu sidang sudah dinjatakan penting dan kalau saudara sudah bisa menilai sidang itu penting karena materinya, masa hanya diskusi tok tanpa mengambil suatu kesimpulan. Ini kan sulit untuk bisa diterima.

Terdakwa : Tadi sudah saja kemukakan, sungguhpun situasi militer itu gunstig tidak bisa meninggalkan segi politik, yang mana dalam hal ini segi politiknya lebih menentukan jaitu peranan dari P.J.M. Presiden. Maka itu kesimpulan-nya diambil oleh keputusan Politbiro untuk laporan.

Hakim Ketua : Kapan keputusan itu diambil ?

Terdakwa : Pada waktu sidang terakhir, yang ketiga.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Maka segi politik yang kami kemukakan itu lebih menentukan dari pada segi militer maka disimpulkan oleh sidang Politbiro yang saja kemukakan tadi.

1. Melaporkan kepada Presiden tentang bahaya "Dewan Djenderal" dan mengharapkan kepada Presiden langkah-langkah penjegahan. Itu kesimpulan yang pertama.
2. Sikap dari PKI tindakan apa yang nanti diambil, menunggu sikap dari P.J.M. Presiden.
3. Menginformasikan kedalam partai adanya bahaya "Dewan Djenderal". Itu kesimpulan-kesimpulan sesudah diambil.

Hakim Ketua : Kami ulangi, Pertama, melaporkan kepada Presiden, kedua tindakan PKI menunggu sikap Presiden, yang ketiga menginformasikan kedalam Partai tentang bahaya "Dewan Djenderal".

Jakin kalau ada "Dewan Djenderal" itu, oleh karena itu diputuskan dan disimpulkan bahwa "Dewan Djenderal" ini merupakan bahaya yang perlu diindoktrinir atau diinformasikan kedalam partai.

Terdakwa : Sidang Politbiro dan saja sendiri mempunyai kejakinan politik.

Hakim Ketua : Apakah ada bukti-bukti konkrit yang diajukan dalam sidang itu adanya "Dewan Djenderal" ?

Terdakwa : Djadi saja kuatkan bahwa soal adanya "Dewan Djenderal" itu tidak disoalkan pada waktu sidang-sidang Politbiro bulan Agustus, yang disoalkan dalam sidang-sidang bulan Agustus adalah adanya rentjana kudeta, kalau adanya "Dewan Djenderal" itu tidak dipersoalkan.

Hakim Ketua : Maksud saja djuga dalam rentjana kudeta "Dewan Djenderal" ini, ada bukti-bukti yang konkrit, bukti-bukti yang nyata, bahwa "Dewan Djenderal" akan mengadakan coup. Untuk mengadakan coup tentu lebih dulu adanya bukti-bukti yang konkrit dari "Dewan Djenderal" itu, ada barang, tidak ada, mau kup, ja tidak bisa.

Ini saja tanjakan dulu apakah pada waktu itu diadakan djuga bukti-bukti yang konkrit terhadap adanya "Dewan Djenderal" ini.

Terdakwa : Bukti-bukti konkrit tidak ada.

Hakim Ketua : Dan mengenai rentjana dari coup ini apakah djuga bisa membuktikan atau bisa dikedepankan oleh AIDIT seba-

gai pemberi informasi, misalnja hitam diatas putih, rentjana dari mereka untuk mengadakan kup dsb.

Terdakwa : Waktu itu yang diajukan adalah rentjana, sudah tersusunja rentjana dari Kabinet.

Hakim Ketua : Hitam diatas putih ?

Terdakwa : Dikemukakan sebagai informasi.

Hakim Ketua : Dikemukakan sebagai rangka pembuktian, bukti-bukti yang diajukan itu oleh AIDIT diberikan pembuktiannya atau tidak, yang berupa alat bukti atau tidak ?

Terdakwa : Tidak, hanya informasi.

Hakim Ketua : Dalam bentuk tertuliskah, ataukah dalam bentuk tapekah, didalam mana "Dewan Djenderal" itu bitjara, misalnja besuk kita kup, sampai bisa ditangkap, bisa ditjuri dalam bentuk tape mungkin, oleh karena konkrit seperti itu, jaitu bahwa pada suatu hari yang nyata mereka akan mengadakan kup.

Terdakwa : Itu sebagian kebiasaan kami dalam diskusi hanya menimbangkan informasi yang diberikan itu masuk akal atau tidak.

Kalau sudah, ja sudah masuk akal anggota jakin, itu biasa saja tidak meminta bukti-bukti konkrit dan tidak ditanja lebih lanjut apa-apanja.

Hakim Ketua : Baik, Pernah saudara katakan soal-soal pokok yang penting yang diterangkan adalah soal sifat politik disamping soal apa itu tadi djuga faktor politik ini dalam sidang yang lalu mengenai "Dewan Revolusi" yang akan menggantikan Kabinet Dwikora itu, djuga perbintjangan mengenai sifat politik dari pada "Dewan Revolusi" yang akan menggantikan Kabinet "Dwikora". Siapa yang mengajukan pembahasannya ?

Terdakwa : Djadi dalam rangka tadi saja mengemukakan kemungkinan politik, pada waktu itu AIDIT dikemukakan, inisiatif dari Perwira-perwira tadi akan menggagalkan rentjana-rentjana "Dewan Djenderal" dan akan membentuk "Dewan Revolusi".

Hakim Ketua : Kalau begitu dengan berita atjara yang lalu ada benarnya dus tidak semuanya salah.

Terdakwa : Ja. Dari segolongan Perwira, mengadakan itu dalam operasi Militer dan membentuk "Dewan Revolusi", oleh sidang itu diperbintjangkan mengenai sifat politik dari "Dewan Revolusi" ini.

Hakim Ketua : Apa yang diperbintjangkan dan sifat politik yang bagaimana ?

Terdakwa : Djadi kalau disini saja tadi ulangi, kemungkinan pertama adalah jaitu Kabinet "Dewan Djenderal". Sifat politiknya

NASAKOM phobi. Ini satu, kedua "Dewan Revolusi" kalau itu yang mendjadi inisiatip para Perwira umpamanya djadi sifat politiknya adalah merupakan koalisi nasional yang luas, yang bersifat anti "Dewan Djenderal". Dan disitu ditegaskan bukan suatu Kabinet NASAKOM. Ketiga, itu yang menjangkut P.K.I sendiri. Bagaimana dengan nasib tuntutan P.K.I mengenai Kabinet NASAKOM, berhubung ada usaha-usaha untuk mendirikan kekuasaan politik yang baru, baik dari "Dewan Djenderal" atau segolongan Perwira tadi. Itu mengenai sifat politiknya. Mengenai "Dewan Revolusi" dianggap itu seperti Kabinet NASAKOM, djadi hanya kekuasaan politik yang bersifat anti "Dewan Djenderal".

Hakim Ketua : Saja ulangi ini benar atau tidak bunjinya, agar "Dewan Revolusi" ini tidak merupakan suatu Kabinet Gotong-Rojong yang berporoskan NASAKOM sebagaimana tuntutan partai, tetapi sementara merupakan suatu koalisi nasional yang luas yang menghimpun unsur-unsur NASAKOM dan matjam-matjam golongan yang lain. Betul itu ?

Terdakwa : Ada perbaikan, djadi bukan agar "Dewan Revolusi", merupakan kehidupan didalam konstelasi politik kalau inisiatif dari Perwira-perwira itu berhasil mendirikan Dewan Revolusi. Itu Dewan Revolusi **bukanlah** merupakan kekuasaan politik sematjam Kabinet NASAKOM, tapi hanya suatu kekuasaan politik yang bersifat anti "Dewan Djenderal".

Hakim Ketua : Koalisi Nasional tadi ?

Terdakwa : Ja, koalisi Nasional yang bersifat anti "Dewan Djenderal".

Hakim Ketua : Yang menentukan siapa supaya "Dewan Revolusi" itu bersifat politik ?

Terdakwa : Hal itu inisiatip dari pada Perwira-perwira dan melihat motif dari pada dorongan inisiatip Perwira-perwira itu. Motiefnya adalah menggagalkan rentjana "Dewan Djenderal". Itu informasi yang kita dapat. Nah itulah dari motif itu yang akan kita analisa kalau itu "Dewan Revolusi" merupakan kekuatan politik yang anti Dewan Djenderal dengan sifatnya itu merupakan suatu koalisi Nasional tadi dari semua kekuatan yang menentang dari Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Apakah Kabinet DWIKORA tidak bisa memenuhi syarat sampai harus diganti oleh "Dewan Revolusi", ada yang memberikan informasi itu ?

Terdakwa : Waktu itu ada informasi

Hakim Ketua : Nanti dulu siapa yang memberikan informasi itu, dari siapa itu ?

Djuga dalam rapat itu AIDIT lagi, diajukan djuga pertimbangannya kepentingannya menggantikan Kabinet DWIKORA yang ada itu dengan suatu Kabinet koalisi Nasional dan menghimpun unsur-unsur NASAKOM lain yang tidak menjetudju rentjana "Dewan Djenderal".

Terdakwa : Hal itu inisiatip pemberi informasi !

Hakim Ketua : Ja, kalau diganti dengan "Dewan Revolusi" ini karena tidak memenuhi persyaratan, ja toh!, apakah Kabinet Gotong-Rojong ini tidak terbentuk koalisi Nasional, mungkin ?

Apakah Kabinet Gotong-Rojong ini tidak menghimpun unsur-unsur NASAKOM, apakah Kabinet Gotong-Rojong ini tidak menghimpun matjam-matjam golongan, dan apakah Kabinet DWIKORA ini tidak menghimpun djuga golongan yang tidak mungkin menjetudju Dewan Djenderal. Karena memang ja, maka itu perlu diganti dengan suatu "Dewan Revolusi" yang memenuhi persyaratan ini Koalisi Nasional dan unsur-unsur NASAKOM yang menentang Dewan Djenderal itu. Kabinet Gotong-Rojong itu tentunya terdapat hal-hal yang tidak dipenuhi syaratnya dan atas dasar pemikiran itulah perlu dibentuk Dewan Revolusi ?

Terdakwa : Mohon saja izinkan memberikan pengertiannya.

Hakim Ketua : Didalam rangka ini sadja, dus djikalau Kabinet ini harus diganti, tentunya karena tidak memenuhi syarat, kalau tidak tentunya tak perlu diganti, logisnya alasan yang penting !

Terdakwa : Pertimbangan menurut informasi, Perwira-perwira itu djadi tudjuan pokoknya, djadi yang pokok itu menggagalkan

Hakim Ketua : Sudah, itu yang djelas bahwa motif itu sudah, penggagalan daripada rentjana coup dari Dewan Djenderal ja toh !

Sekarang kita sudah meningkat kearah bentuk Dewan Revolusi yang tadi kita sudah perbincangkan, yang dibahas sifat politik dari Dewan Revolusi yang akan menggantikan Kabinet DWIKORA. Yang merupakan suatu koalisi Nasional yang luas yang menghimpun unsur-unsur NASAKOM dengan golongan yang tidak menjetudju Dewan Djenderal tadi. Saja tanjakan pada saudara, saudara djawab ini adalah benar. Sekarang saja tanjakan, dasar pemikiran untuk mengganti Kabinet DWIKORA itu apakah karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan itu ?

Terdakwa : Djadi karena motif pokok tadi itu adalah untuk menggagalkan, maka untuk melantjarkan aksi ini Kabinet DWIKORA dalam rangka aksi menggagalkan rentjana Dewan Djenderal tidak memuaskan keadaanja berhubung dalam komposisi Kabinet Dwikora itu terdapat unsur-unsur Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Itu jang kita tanjakan dan dasarnya mengapa Kabinet Gotong-Rojong itu harus diganti! Tentunja ada alasanja. Kok diulangi terus pokoknja jang djelas. Dus tadi itu, mengapa sampai Kabinet Gotong-Rojong itu harus diganti, karena adanja unsur pokok atau unsur-unsur jang tidak dipenuhi oleh Kabinet Gotong-Rojong. Oleh karena dalam Kabinet Gotong-Rojong terdapat unsur-unsur dari Dewan Djenderal. Tadi itu mengenai soal jang merupakan bahwa itu merupakan himpunan daripada unsur NASAKOM jang mendjadi persoalan. Diakui pula bahwa Kabinet Gotong-Rojong berunsurkan NASAKOM, bahwa menghimpun matjam-matjam golongan, tidak mendjadi motif dari pada penggantian. Motief dari pada penggantian terutamanja adalah bahwa didalam Kabinet Gotong-Rojong ada unsur Dewan Djenderal, oleh karenanja harus diganti. Baiklah, lalu mengenai ini pernah diadjukan djuga tentang tindakan mendahului atau melaporkan kepada Presiden itu akan dilakukan dalam bentuk operasi militer. Atas dasar itu pula terus senantiasa mendjadi pokok penting didalam persidangan, bahkan jang terpenting bagi NJONO jang telah diakui sendiri, adalah persoalan perimbangan kekuatan militer dalam rangka operasi militer itu. Siapa jang membawakan idee atau mengadjukan soal operasi militer!

Inisiatip ini siapa?

Terdakwa : Itu adalah dari segolongan Perwira. Dari Politbiro mendiskusikan adanja inisiatip.

Hakim Ketua : Dari segolongan Perwira jang menurut terminologi jang sering digunakan saudara itu, golongan Perwira jang berpikiran maju. Antara lain PERIS PARDEDE jang mengemukakan terminologi itu. Kalau saja nanti itu menjebutkan segolongan perwira jang saja maksudkap segolongan perwira jang berpikiran maju menurut terminologie saudara, mereka ingin menjelenggarakanja dalam bentuk operasi militer. Saudara mendiskusikannja antara lain saudara tertarik terutama pada pokok jang penting jaitu mengenai perimbangan kekuatan militer. Interesse apa jang ada pada saudara terhadap gerakan ini, akan diselenggarakan operasi militer oleh perwira jang maju itu, bagaimana sampai

saudara memperhatikan ini sedemikian rupa, dan sampai didjadi bahan diskusi dalam CC ini. Apa hubungan gerakan mereka dengan saudara?

Terdakwa : Hubungannja jalah dengan:

Pertama : Mengapa segolongan perwira itu sampai berani mau bertindak itu. Nah itu pertama jang mendjadi soal.

Kedua : Menjangkut perspektip politik.

Hakim Ketua : Dari golongan perwira itu pernah disebut nama-namanja oleh jang memberi informasi itu alias AIDIT itu, tidak!

Terdakwa : Waktu itu tidak.

Hakim Ketua : Dan tidak pernah ditanjakan siapa-siapanja?

Terdakwa : Oh, tidak.

Hakim Ketua : Tidak ada jang menajakan diantara jang hadir pada waktu itu?

Terdakwa : Nama-nama tidak ada jang tanja, tapi mereka pertjaja bahwa ada segolongan perwira.

Hakim Ketua : Disebutkan golongan perwira-perwira Darat-kah, Laut?

Terdakwa : Oh, tidak, pokoknja dari Angkatan Darat.

Hakim Ketua : Baiklah, tjoba itu djawab tadi mengenai operasi militer itu!

Terdakwa : Djadi, **Pertama** : Mengapa sampai lahir inisiatip jang demikian, dari golongan Perwira tadi? Inisiatip untuk berani mengambil djalan mendahului kemudian lapor kepada Presiden itu. Itu pertama, tentu apa ada sjarat-sjarat kemiliterannja untuk bertindak itu, dalam hubungan ini pertama.

Kedua : Dipertimbangkan bahwa perspektip politik, jaitu dalam rangka jang telah saja terangkan tadi kalau memang perimbangan kekuatan militer itu menguntungkan dan mereka bertindak atau kemungkinan sebagai suatu perspektief politik Dewan Revolusi itu berdiri. Djadi disini dalam hubungan dengan kemungkinan-kemungkinan politik jang akan datang.

Hakim Ketua : Baik, sebenarnja belum terdjawab pertanyaan-pertanyaan saja adalah tentang segolongan perwira Angkatan Darat, supaya lebih djelas lagi Perwira Angkatan Darat jang berpikiran maju ini jang akan bergerak. Katanja mereka akan melaksanakan idee mereka itu dalam bentuk operasi militer. La itu kan perkara mereka to! Persoalan mereka. Hubungan apa, pikiran apa atau dasar apa jang saudara gunakan untuk memberikan rechtsvaar-

diging bahwa dilingkungan CC PKI juga dibicarakan tentang perimbangan kekuatan militer dan sebagainya untuk operasi militernya. Dalam rangka apa ini! Apakah, katakan pernah terdapat suatu tanda-tanda atau suatu perdjandjian kerdja bersama antara perwira yang berpikiran maju dengan CC PKI maka kepentingan mereka patut juga dipikirkan, rentjana mereka juga patut diperhatikan PKI. Apa ada perdjandjian ini?

Terdakwa : Jang ada hubungannya adalah perspektip politiknya.

Hakim Ketua : Tahu, saja tahu. Dalam rangka sekarang segi operasi militer, militer ini. Dalam rangka operasi militer ini jang bagi NJONO sendiri jang paling penting, paling terutama dalam sidang kedua ini. Adalah djustru jang tertarik pada pokok perimbangan kekuatan militer ini, kenapa?

Terdakwa : Seperti saja kemukakan kok mereka berani, kedua untuk melihat perspektief politik jang akan datang.

Hakim Ketua : Kok mereka berani, ini hubungannya dalam kepentingan P.K.I. apa?

Terdakwa : Itu sebagai tadi saja kemukakan untuk menganalisa perspektip politik jang akan datang jang saja kemukakan ada kemungkinan Kabinet Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Bahwa saudara juga memikirkan dalam rangka ini, dalam rangka operasi militer, pada soal pertimbangan kekuatan militer apakah untuk sampai kepada suatu kesimpulan apakah lebih baik kita mendahului Dewan Djenderal atau didahului oleh Dewan Djenderal. Bukan itu!

Terdakwa : Oh, tidak.

Hakim Ketua : Lalu dalam rangka apa.

Terdakwa : Tadi sudah saja kemukakan bahwa putusan dari Politbiro itu adalah mendjawab taktik mana.

Hakim Ketua : Saja tidak menanyakan keputusan, mengapa ini didiskusikan perimbangan kekuatan militer didiskusikan, sedangkan gerakan ini oleh perwira berpikiran maju seperti Angkatan Darat, bukankah persoalan ini diluar persoalan CC PKI!

Terdakwa : Tadi saja kemukakan untuk menimbang memang bagaimana situasi militer, kedua mengenai situasi politbiro itu maksudnya dipersoalkan supaya lengkap bahan-bahannya.

Hakim Ketua : Djadi keputusannya jang tiga itu! Laporkan kepada Bapak, kemudian mentjegah jang ketiga mengindoktrinir atau

menginformasikan kebawah. Masih tetap disana, tidak dipersoalkan terlebih mengenai perimbangan kekuatan militer.

Terdakwa : Djadi putusan itu politbiro tidak tjampur tangan.

Hakim Ketua : Keputusan apa?

Terdakwa : Keputusan matjam tadi.

Hakim Ketua : Lo, katanja putusan dari politbiro adalah melaporkan kepada bapak, sekarang putusan itu kita tidak tjampur, gimana sih!

Terdakwa : Bukan, dengan adanya keputusan tiga matjam tadi djadinja politbiro tidak tjampur-tjampur urusan perwira itu.

Hakim Ketua : Oo, djadi urusan dari pada perwira itu sendiri meskipun tadinja diperbintjangkan.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Kemudian terus dikatakan kita ndak usah tjampur. Djelasnja bagaimana ini?

Terdakwa : Ja, ja. Djelasnja menunggu sikap Presiden.

Hakim Ketua : Setelah itu dilaporkan kira-kira keputusan itu diambil pada rapat ketiga tanggal 28 Agustus itu, kira-kira?

Terdakwa : Ja, kira-kira tanggal 28.

Hakim Ketua : Sesudah itu kapan lagi kau mendengar lagi keputusan itu telah disampaikan. Didalam keputusan itu juga ditentukan siapa jang akan menjampaikan kepada Presiden?

Terdakwa : Tidak, sebab menurut kebiasaan bahwa keputusan dari Polit Biro itu dilaksanakan oleh Dewan Harian Polit Biro.

Hakim Ketua : Ja, Dewan Harian Politbiro jang akan membawa/menjampaikan keputusan Politbiro ini. Kemudian, kapan kumpul lagi untuk memberi tahukan bahwa telah disampaikan?

Terdakwa : Dari penjampaian berita itu adalah,

Hakim Ketua : Baik, ja atau tidak.

Terdakwa : Tidak, tidak diadakan sidang lagi.

Hakim Ketua : Tidak diadakan sidang lagi! Semendjak tanggal 28 itu CC tidak pernah mengadakan, eh, Politbiro tidak pernah mengadakan sidangnya. Baik untuk membahas segi ada hasil-laporan Kepada Bapak ataupun soal-soal lain?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Saja ulangi lagi, bahwa tanggal 28 Agustus adalah sidang terakhir, sedjak itu tidak pernah dilakukan suatu pertemuan atau diskusi-diskusi lagi?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Baik setjara formil atau tidak, ketika itu tidak ketemu lalu bitjara-bitjara di CC, menanyakan bagaimana hasil laporan kepada Bapak.

Terdakwa : Kalau seperti jang tidak formil, ada.

Hakim Ketua : Saja menanyakan, meskipun tidak dalam sidang formil ada.

Terdakwa : Jaitu kepada kawan SUDISMAN.

Hakim Ketua : Kapan kira-kira ?

Terdakwa : Kira-kira pertengahan September.

Hakim Ketua : Kira-kira pertengahan September!

Terdakwa : Jaitu 2 Minggu setelah rapat terakhir.

Hakim Ketua : Apa jang saudara tanyakan ?

Terdakwa : Saja tanyakan apa putusan Politbiro lapor kepada Presiden sudah dijalankan.

Hakim Ketua : Sudah dijalankan, lalu!

Terdakwa : Lalu dijawab, sudah dijalankan dan diatur kawan AIDIT.

Hakim Ketua : Oleh kawan AIDIT, lalu ?

Terdakwa : Hanja itu dijawab.

Hakim Ketua : Tidak ada tambahan lagi bagaimana sikap Presiden ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Hanja ditanjakan kemudian dijawab bahwa hal ini sudah dilaporkan. Hasil dari pada laporan ini tidak ditanjakan ?

Terdakwa : Tidak ditanjakan, karena sudah dilaporkan, bagaimana sikap Presiden, dijawab belum ada.

Hakim Ketua : Lo, kalau begitu ditanjakan toh. Jang betul, ini ada tiga persoalan, dilaporkan kepada Presiden, terutama jang terakhir berupa pertanyaan, atau berita kemungkinan kita menunggu sikap Presiden. Sudah dilaporkan, sudah. Ini sadja atau bagaimana ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Djangan ja sadja. Asal ditanja, ja, asal ditanja, ja. Pakai logika sedikit. Boleh mungkir, hak saudara, boleh mungkir, tetapi pakai logika sedikit. Tidak seorangpun jang dapat mentjabut hak saudara. Kalau mungkir itu, tapi jang sedikit logis.

Pada waktu berbitjara dengan SUDISMAN pada pertengahan September 1965 itu, ketjuali persoalan sudah dilaporkan djuga bagaimana sikap Bapak tadi, dijawabnya?

Terdakwa : Belum djelas.

Hakim Ketua : Artinja belum djelas itu, Bapak belum memberikan persetudjuan atau restu ataupun djuga tidak menolak laporan ini. Begitu toh kira-kira? Djelas!

Saudara menanyakan lagi tidak, tentang sedjauh mana tidak djelasnya ini? Apakah karena keragu-raguan, apakah karena kurang djelas atau pertimbangan lain, tidak ditanjakan?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Betul ini tidak ditanjakan, nanti kalau ditanjakan ada buntutnya lagi. Betul, masih ingat, betul!

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus belum djelas sikap Bapak, terus pulang.

Terdakwa : Masih menunggu, bagaimana nantinja.

Hakim Ketua : Menunggu bagaimana djawaban-djawaban kemudian, artinja dalam segi sikap Bapak ini, Betul ini ja? Karena dalam sidang ini jang tadi sudah dikatakan jang betul didalam sidang, jang betul saja akan adjukan dalam sidang ini, meskipun jang duhu tidak betul semua, namun beberapa persoalan sudah diakui djuga ada betulnja, tidak untuk keseluruhannya jang tidak betul.

Didalam pemeriksaan jang lalu, didalam Berita Atjara Pendahuluan/pemeriksaan pendahuluan itu saudara mengatakan bahwa didalam keputusan jang diambil untuk, dus dalam keputusan untuk mengambil atau membenarkan atau mendahului jang tidak diakui oleh saudara sekarang ini timbul sebagai akibat daripada pembagian tugas. Itu betul nggak itu, pembagian tugas. Kalau memang betul ada pembagian tugas, setelah mengambil keputusan, pada waktu tanggal 28 Agustus itu, kemudian timbul pembagian tugas. Djadi kalau ada pembagian tugas tentu ada jang membagi dan jang kebagian, diantaranya ada jang mendapat pembagian tugas khusus. Siapa jang membagi tugas itu?

Terdakwa : Jang membagi tugas tidak ada.

Hakim Ketua : Disitu tinggal diputuskan dan tugasnya dibebankan kepada Politbiro tok, kepada Dewan Harian Politbiro.

Terdakwa : Dewan Harian Politbiro, itu sudah kebiasaan.

Hakim Ketua : Lalu kepada jang lain hanja menanti perkembangan lebih lanjut.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Bagaimana persisnja sesudah diambil keputusan, karena kata ini saudara sendiri jang pakai. Bagaimana waktu mengambil keputusan. Bagaimana kira-kira?

Terdakwa : Jaitu : 1. Melaporkan kepada Presiden tentang bahaya itu.

Hakim Ketua : Ini jang mengutjapkan AIDIT, ja?

Terdakwa : Begini soalnya, disimpulkan dulu oleh kawan AIDIT tentang bahaya Dewan Djenderal, disimpulkan oleh kawan AIDIT dan ditawarkan kepada sidang, apa setuju dengan ketentuan itu :

1. melaporkan kepada Presiden tentang bahaya Dewan Djenderal dan mengharapkan Presiden mengambil langkah-langkah pentjegahan;
2. Tindakan PKI menunggu sikap dari Presiden
3. Menginformasikan kedalam partai adanya bahaya Dewan Djenderal.

Itulah kurang lebih.

Hakim Ketua : Lalu setelah itu ditawarkan, didiskusikan lagi.

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Oh, tidak;

Terdakwa : Diterima pada akhir diskusi.

Hakim Ketua : Sesudah itu bubar. Lalu itu didokumentir apa tidak, itu tiap keputusan, tiap-tiap diskusi, disitu ada penulisnja?

Terdakwa : Ada tjatatannja.

Hakim Ketua : Ada tjatatannja. Itu sudah ditentukan pada tiap-tiap ada rapat jang setjara formil begini serta ditanda tangani peserta rapat.

Terdakwa : Oh, tidak.

Hakim Ketua : Ini hanya suatu kesimpulan atau suatu keputusan jang sementara ini masih ditawarkan kepada para anggota?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Lho, tadi katanja ditawarkan!

Terdakwa : Bukan itu jang keputusan resmi.

Hakim Ketua : Dalam keputusan jang telah diambil itu kembali ditawarkan dulu. Prosedurnja bagaimana, apa setelah tidak ada amandemen, tidak ada pengurangan lagi dan dianggap diterima oleh seluruh sidang dan dikembalikan kepada AIDIT dan kepada Dewan Harian, dan inilah jang melaksanakan Keputusan itu, sedang jang lain tetap tunggu perkembangan lebih lanjut. Betul ini?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Djadi keputusan lain daripada itu tidak ada lagi ja! Mengenai pembagian tugas dan lain selandutnja ditjelaskan dalam setjara fantastis disini tidak ada.

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Ada lagi satu persoalan mengenai perimbangan kekuatan militer, itu pada waktu rapat jang ketiga

rapat jang ketiga diberikan gambaran keadaan-keadaan dan diinformasikan oleh AIDIT mengenai perimbangan kekuatan, ini saja tanyakan djustru oleh karena Saudara sangat geinteresseerd, sangat tertarik pada perimbangan kekuatan militer ini. Bagaimana informasinja setelah ia mengetjek, kemudian didalam pertemuan jang selandutnja memberikan perimbangan atau memberikan informasi itu bagaimana perimbangan itu jang diutjapkan oleh AIDIT pemberi informasi itu.

Terdakwa : Itu diberikan sematjam istimit: (estimate).

1. Bahwa angkatan Darat ini tidak kompak, karena didapat informasi bahwa antara Djenderal A.H. NASUTION dan Djenderal YANI terdapat kontradiksi pendapat mengenai timing daripada kudeta. Nah dari informasi ini dianggap.

Hakim Ketua : Mengenai timingnja ja, mereka bertentangan mengenai timing, lalu ?

Terdakwa : Nah itu dia membawa akibat jang tidak kompak.

Hakim Ketua : Karena persoalan timing ini, tidak kompak akibatnja.

Terdakwa : Ja membawa ketidak kompakkan dalam persoalan. Tidak kompak dalam Angkatan Darat itu ada 2 Kontradiksi antara Dewan Djenderal dengan segolongan perwira jang kami kemukakan tadi.

Hakim Ketua : Jang mereka akan mengadakan operasi militer tadi?

Terdakwa : Ja, ja, dalam golongan angkatan Darat itu ada kontradiksinja masing-masing.

Hakim Ketua : Lalu ini informasi dari AIDIT ini?

Terdakwa : Djadi analisa setjara umum, keempat didapat informasi bahwa pada segolongan inilah jang mengambil inisiatief mendahului Dewan Djenderal tadi dalam bentuk operasi militer, fasilitas-fasilitas tertentu didapat dari tangan AURI, hal itu jang dimaksud dengan analisa situasi umum jang menguntungkan setjara militer bagi golongan Perwira tadi.

Hakim Ketua : Menguntungkan artinja menguntungkan bagi mereka. Jang memberikan keterangan ini siapa? Kawan AIDIT?

Terdakwa : Ja kawan AIDIT.

Hakim Ketua : Tidak ditanyakan bagaimana dalam memperoleh gegevens ini.

Terdakwa : Tidak, tidak ditanyakan.

Hakim Ketua : Tahu A.D. ada anu, NASUTION dan YANI bertentangan mengenai timing jang menimbulkan tidak kompaknja A.D. tidak ditanyakan informasi itu diperoleh dari mana ?

Terdakwa : Tidak. Karena dalam diskusi jang pertama saja tanyakan kawan AIDIT mengajukan, jaitu bagaimana estimatnya situasi umum mengenai situasi militer.

Hakim Ketua : Ja ini bisa sadja toh, bagaimana dia bisa membuat suatu dari mana sumber-sumber diperoleh atau diperdapat, tidak ditanjakan ?

Terdakwa : Tidak, tidak ditanjakan.

Hakim Ketua : Apakah tidak diadakan diskusi benar atau tidaknja itu?

Terdakwa : Waktu itu tidak, sudah masuk akal.

Hakim Ketua : Apakah sudah masuk akal A.D. begini, A.U. begini, jang dianggap masuk akal itu tentunja sudah dipertjajanja informasi itu, kemudian mengenai soal kembali kepada persoalan sifat politik daripada Dewan Revolusi. Jang akan membentuk Dewan Revolusi ini segolongan Perwira. Perwira tadi itu ?

Betul dari mereka sadja, tanpa mengadakan konsultasi dengan politbiro dan AIDIT sadja ini jang mengetahui bahwa mereka ini ada maksud begini, akan itu? Mengenai Dewan Revolusi jang mengadakan dalam sidang siapa?

Terdakwa : Itu informasi-informasi dari kawan AIDIT sadja.

Hakim Ketua : Lalu jang mengadakan diskusi, mulai dengan diskusinja informasi jang lainnja tidak ditanjakan?

Terdakwa : Tidak didiskusikan, sama sekali tidak.

Hakim Ketua : Tidak didiskusikan, sama sekali tidak?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tentang bentuk koalisi dari Dewan Revolusi?

Terdakwa : Itu hanja berbentuk informasi sadja.

Hakim Ketua : Dari AIDIT?

Terdakwa : Oh tidak, ini dalam rangka analisa.

Hakim Ketua : Dalam rangka Dewan Revolusi ini, jang mendjadi idee dari Perwira Angkatan Darat jang dibawa dalam sidang oleh AIDIT, oleh AIDIT diinformasikan kesidang, kemudian didiskusikan atau tidak, kalau mengenai perimbangan kemiliteran itu sadja pada waktu itu ditanjakan bagaimana keadaannja, malah NJONO sendiri jang paling tertarik dalam persoalan ini sebagaimana tadi dijelaskan tentang perimbangan kekuatan militer, tentang Dewan Revolusi ini pernah diperbintjangkan didalam rapat atau tidak?

Terdakwa : Tadi saja telah kemukakan, pernah disoalkan memang konsentrasi politik ini kalau Dewan Revolusi itu djadi berdiri, itu jang diperbintjangkan.

Hakim Ketua : Djadi soal bentuk koalisi nasional, harus berbentuk suatu

wadah jang menghimpun itu. Tidak dipersoalkan segi politiknya sama sekali?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Dari jang hadir tidak ada jang merasa tertarik apapun, masa-bodoh bentuknja apapun ?

Terdakwa : Bisa diterima, analisa bahwa Dewan Revolusi kalau itu terbentuk atas satu kekuasaan fisik jang pokoknja anti Dewan Djenderal, analisa ini, itu jang umumnja dianggap masuk akal, bisa diterima oleh partai ini.

Hakim Ketua : Ini tidak pernah disidangkan atau tidak pernah diperdebatkan mengenai badan Dewan Revolusi ini. Bahwa ini serius kiranya perlu mendalam didiskusikan, ada, pernah?

Terdakwa : Djadi saja mengakui melakukan kegiatan-kegiatan dan membantu apa kemudian dinamakan G. 30. S. ini, bahwa ada kegiatan-kegiatan membantu itu saja akui saja sendiri jang membantu.

Hakim Ketua : Dalam kegiatan apa sadja itu?

Terdakwa : Pertama kegiatan, jaitu kawan SOEKATNO pernah datang sama saja mengajukan permintaan dari apa jang biasa kami sebut L.B. (Lobang Bua) jaitu permintaan supaya latihan-latihan untuk tenaga tjadangan-tjadangan.

Hakim Ketua : Kapan itu, dimana ?

Terdakwa : Jaitu kira-kira permulaan September.

Hakim Ketua : Djadi sandara sebelum menanjakan hasil laporan atau hasil putusan, belum?

Terdakwa : Belum.

Hakim Ketua : Sebelum ada djawaban terhadap putusan?

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Itu latihan-latihan bagaimana?

Terdakwa : Itu diteruskan sampai mentjapai jumlah jang sudah pernah diadakan sebulan jang lalu. Itu sampai paling tidak 2000 untuk kawan KATNO untuk sewaktu-waktu kalau diperlukan bagi Gerakan dari Perwira sewaktu-waktu bisa dijadikan tenaga tjadangan.

Hakim Ketua : Awal September ini?

Terdakwa : Ja, pada permulaan September, djadi sebelum saja menanjakan bagaimana sikap Presiden.

Oleh karena itu saja tanyakan L.B. itu dari siapa? L.B. pokoknja itu golongan Perwira jang dalam hal ini disebut Pak DJOJO dari golongan perwira-perwira tadi. Pak DJOJO, saja tidak menanjakan waktu itu siapa dia

itu. Bahwa kita sudah tahu itu nama samaran, kebiasaan militer.

Hakim Ketua : Memakai nama samaran tidak hanya militer, orang saudara sendiri juga pakai nama samaran TUGIMIN RUKMA alias SUGIONO dan seterusnya.

Terdakwa : Waktu itu saja terima itu tawaran, saja mau, itu adalah kegiatan pertama.

Hakim Ketua : Mau membantu apa ?

Terdakwa : Mentjari tenaga-tenaga untuk dijadikan suatu tjadangan dan latihan di Lubang Buaja jang sewaktu-waktu kalau memang djadi, jaitu dibantukan pada mereka sebagai tenaga-tenaga bantuan.

Hakim Ketua : Djadi tenaga tjadangan.

Terdakwa : Namanja tenaga tjadangan, sewaktu-waktu untuk bantuan operasi militer itu kegiatan jang pertama.

Hakim Ketua : Nanti dulu jang pertama bagaimana mulanja pelaksanaannya ?

Terdakwa : Terus saja tjapai kata sepakat dengan kawan SUKATNO, kepada dia saja bantukan beberapa tenaga dari CDR jaitu saudara NICO, DJOHAR dan KASIMAN.

Hakim Ketua : Tiga-tiganja anggota CDR!

Terdakwa : O, tidak jang dua bung NICO sama DJOHAR staf CDR, jang KASIMAN dari SOBSI daerah Djakarta Raya. Itu saja bantukan untuk memudahkan mengurus tenaga-tenaga.

Hakim Ketua : Hubungan Sdr. dengan SUKATNO apa?. Tidak ada? Masa begitu, ia minta tenaga bantuan kemudian Saudara berikan, saudara sanggupkan!

Terdakwa : Jang terang saja tahu bahwa ia punya hubungan sama Pak DOJO, itu sudah djelas.

Hakim Ketua : Dari golongan perwira itu ja?

Terdakwa : Tinggal sikap saja, saja penuhi apa tidak permintaan dari SUKATNO ini untuk menjampaikan permintaan dari LOBANG BUAJA (Pak DOJO). Kemudian saja ambil sikap penuhi, dengan membantukan tiga orang itu tadi.

Hakim Ketua : Lalu?

Terdakwa : Ini suatu kegiatan bantuan, kegiatan lain jaitu SUKATNO kemudian datang lagi memberi tahukan ini semua masih permulaan September, bahwa jang dilatih itu nantinja tidak diurus lagi oleh CDR, tapi, itu mendjadi tenaga tjadangan jang dengan sendirinja diatur, diurus oleh Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Saudara berkata bahwa tidak lagi diurus, dus sebelumnya diurus oleh CDR.

Terdakwa : Ja, tentang pengiriman-pengirimannya.

Hakim Ketua : Nah, sekarang tidak lagi artinja dalam pengirimannya sadja. Dus jang mentjarikan dan sebagainya tetap CDR?

Terdakwa : Ja, diurus oleh Sektor-Sektor, saja dimintai bantuan menundjuk Komandan-komandannya jang akan dibawa ke Lobang Buaja. Djadi bantuan jang telah saja berikan adalah juga tjari tjalon-tjalon Komandan Sektor.

Hakim Ketua : Djadi Sdr. jang mengadakan daftar nama jang ditjalonkan untuk Komandan Sektor, terserah kepada L.B. untuk mengangkat ?

Terdakwa : Komandan Sektor itu langsung dibawah Komando dari Lobang Buaja. Ketiga, pernah saja diminta bantuan mentjarikan Dokter-Dokter dan Djuru Rawat.

Hakim Ketua : Siapa jang minta?

Terdakwa : Penghubung saja dengan Lobang Buaja, djadi jang minta itu SUKATNO.

Hakim Ketua : Kapan diminta?

Terdakwa : Ini saja agak lupa mungkin pertengahan September mungkin.

Hakim Ketua : Djadi pokoknja belakangan?

Terdakwa : Ja, sesudah latihan-latihan Komandan Sektor-sektor. Djadi jang saja kemukakan adalah apa jang diminta, waktu itu saja mentjari-tjari dokter, nama-nama dan hanya dapat seperti saja kemukakan dalam laporan pemeriksaan pendahuluan empat orang. Itu kegiatan pokok saja dalam memberikan bantuan kepada Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Djadi hanya terbatas kepada tenaga, mengirimkan tenaga kemudian mengadakan daftar nama tjalon komandan sektor dan mentjari tenaga-tenaga untuk team kesehatan.

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Itu sudah dilakukan?

Terdakwa : Sudah! Semiendjak kawan SUKATNO minta.

Hakim Ketua : Sedjak awal September?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tjaranja saudara memperoleh tenaga bagaimana? bagaimana tjaranja!

Terdakwa : Tjaranja jaitu tadi terutama oleh Staf jang dibantukan itu, memang pergi kemana-mana, disini ke CS-CS dan bilang bahwa itu instruksi dari saja untuk

Hakim Ketua : Siapa yang membawa?

Terdakwa : Tiga tadi, Si NICO, si DJOHAR. Itu tjaranja menghubungi langsung ke CS-CS, bahwa saya minta tenaga-tenaga untuk dilatih kemiliteran di Lobang Buaja. Itu tjaranja. Kemudian diberikan daftar, daftar itu sahkan, kemudian diserahkan daftar itu kepada salah satu yang mengurus persiapan.

Hakim Ketua : Yang mengurus persiapan itu artinja masing-masing dari CS-CS?
Lalu kembali kepada NJONO untuk disahkan, baru ke KATNO itu!

Terdakwa : Ja, formilnja.

Hakim Ketua : Djadi tidak bisa dari CS itu langsung ke KATNO?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Lalu, dalam rangka tenaga-tenaga tjadangan itu tadi dan dalam segi sektor dan Komandan Sektor bagaimana!

Terdakwa : Betul itu saja yang memberikan nama-nama.

Hakim Ketua : Sesudah selesai? Diminta berapa banyak?

Terdakwa : Mula-mula itu untuk lima Sektor.

Hakim Ketua : Lima nama.

Terdakwa : Ja, kemudian seluruhnja pada achir September itu enam nama.

Hakim Ketua : Lalu, mengenai team Kesehatan tadi siapa-siapa sadja namanja!

Terdakwa : Team Kesehatan itu saja menghubungi yang saya anggap mungkin tahu, jaitu pada kawan SUWARDI, wakil Ketua CC GERWANI, itu yang saya mintai tolong mentjarikan nama-nama dokter. Kalau sudah dapat dan saya setndjui kemudian penjelenggaraannya kami serahkan kawan KATNO dan kawan SUWANDI. Itu mengenai dokter-dokter, atau perawat-perawat.

Hakim Ketua : Dus segala kegiatan2 ini atas permintaan KATNO, seakan-akan menurut pengakuan sekarang ini tidak ada hubungannya dengan suatu tugas yang dibebankan kepada Saudara.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Sedangkan dalam berita Atjara Pendahuluan yang lalu senantiasa dikemukakan bahwa ini adalah didalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dibagikan dan dipertanggung-djawabkan kepada Saudara. Ini kok ada perobahan radikal, bagaimana perobahan dari keterangan ini, seakan-akan inisiatief Saudara sendiri, ja toh?

Terdakwa : Ja. Nah itu berhubung dengan alasan yang belum saja beritikan. Memang kesan yang saya terangkan tadi yang sesungguhnya. Dari Politbiro, djadi tuduhan yang senantiasa diberikan kepada saya, tanda tangan, itu mengenai keputusan Politbiro, seluruh yang saya terangkan dulu itu saja mungki.

Hakim Ketua : Djadi tidak dalam rangka keputusan yang diadakan tanggal 28 ini saudara adakan ini.

Terdakwa : Ja, itu tadi sudah saya jelaskan pembagian tugas keputusan itu tidak ada, djadi saya lakukan segala kegiatan itu atas tanggung-djawab saya sendiri. Djadi saya tidak menuruti putusan dari Politbiro.

Hakim Ketua : Hem, djadi Terdakwa tidak menurut putusan dari Politbiro! Djadi kalau menurut Politbiro itu mestinja tunggu dulu sikap Presiden bagaimana, tapi ini tidak menunggu sikap dari Presiden, ambil putusan sendiri memenuhi permintaan itu.

Ini tulisan saudara bukan! (Hakim menunjukkan surat berupa barang bukti). Apa benar, batja lagi diulangi! Pengakuan-pengakuan soal saudara, ini lagi, ini benar apa ndak!

Terdakwa : O, ija sebagian, tapi

Hakim Ketua : Bagaimana, itu kan mempersulit saudara sendiri. Surat-surat tentang merobah keterangan yang diajukan setjara tertulis itu terdapat kata-kata pertimbangan politik. Tapi ini adalah saudara akui sebagai tulisan saudara sendiri.

Terdakwa : Ja, djelas.

Hakim Ketua : Ini bukan, bukan pemalsuan?

Terdakwa : Bukan, ja bukan.

Hakim Ketua : Ini ni! ini, tanda tangan-tanda tangan ini?

Terdakwa : Ja betul, ja betul djuga. (Hakim Ketua memperhatikan tanda tangan terdakwa).

Hakim Ketua : Lalu disini, membuat schema dan sebagainya! jaitu ja! semuanya ada. Lalu didalam tiap kali pemeriksaan ada dan lain sebagainya. Lalu dalam pemeriksaan BAP tiap kali ditanda tangani?

Terdakwa : Betul djuga.

Hakim Ketua : Betul, itu tanda tangan saudara. Itu lagi tiap-tiap berita atjara itu betul!

Terdakwa : Ja betul. Ini saya minta untuk adjukan kesempatan mendjelaskannya.

Hakim Ketua : Ja, nanti dulu. Djadi diakui bahwa segala sesuatunja tadi adalah benar. Apa ada tulisan-tulisan dan pengaku-

an-pengakuan sendiri yang pernah diberikan pada waktu itu diadakan team pemeriksaan pertama dan ada pula pengakuan-pengakuan yang ditulis sendiri yang berten-tangan dengan apa yang dibicarakan sekarang yang dinjatakan, yang diadjudkan tadi, inilah yang benar dan katanja akan diadjudkan perubahan terhadap keterangan ini, dasarnya apa yang tadi yang mau diadjudkan ! Bahwa tadi akan ada perubahan apa dasarnya ?

Terdakwa : Keterangan-keterangan yang saya sebutkan ini sesungguhnya saya tidak mendapat kesempatan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ODITUR, dan karena itu saya adjudkan keterangan ini, yang saya perlu jelaskan.

Hakim Ketua : Apa sadja ?

Terdakwa : Waktu itu ditanyakan antara lain dalam rangka menga-pa itu G. 30. S. itu dan sebelumnya itu ada pertanyaan yang perlu dianggap pro daripada G. 30. S. apa saja jelaskan. Djadi mengenai pro G. 30. S. dalam jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan politis Oditur itu saya jawab pokoknja bahwa pro itu adalah kegiatan-kegi-atan untuk menggagalkan Kudeta dari Dewan Djenderal, itu pertama.

Kedua, dalam rangka keputusan Politbiro adalah seperti saya jelaskan tadi karena itu saya minta agar Oditur memasukkan perubahan keterangan sebagai suatu susulan.

Hakim Ketua : Apakah yang diadjudkan dalam perubahan yang diadjudkan pada tanggal 3 Pebruari ini.

Terdakwa : Tanggalnja saya lupa itu kira-kira pada tanggal 30.

Hakim Ketua : Kira-kira berisikan mengenai tuduhan politik Dewan Djenderal yang mengenai Sosial historis dan mengenai kesimpulan yang ditutup dengan : saya mengubah kete-rangan-keterangan saya pada pemeriksaan yang telah lalu, ija begitu !

Terdakwa : Ija, ja !

Hakim Ketua : Begitu !

Banjak keterangan-keterangan diatas baru saja kemu-kakan dan karena pertimbangan-pertimbangan politik dengan mengingat adanja hak membela atau menjangkal dimuka pengadilan. Yang dimaksudkan keterangan diatas itu maka sekarang merupakan keterangan baru, atas dasar pertimbangan politik itu apa maksudnja ?

Terdakwa : Disitu saja tulis dimana saja maksudkan politik jaitu kapan saja mengadjudkan perubahan keterangan saja itu.

Hakim Ketua : Apa yang menjinggung bidang politik ?

Terdakwa : La ini yang akan saya jelaskan. Yang menjimpang satu pemikiran bahwa dari suasana umum dalam pemeriksaan dan bahan-bahan seperti bekas-bekas koran yang terda-pat selama dalam tahanan saja melihat bahwa dalam masa epiloog itu ada kampanye anti komunis dengan menggunakan sebagai alasan membentji PKI, karena itu saja ada kewajiban untuk membela. Kampanje anti Komunis itu kami melihat suasana dalam pemeriksaan : apa yang paling tepat itu tanggal 3 Pebruari atau saja kemukakan didalam sidang ini. Djadi merobahnja ini atas dasar karena pada waktu itu epiloog G. 30. S. ini terdapat kampanje anti PKI.

Hakim Ketua : Yang lain tidak ?

Terdakwa : Yang saya tidak tulis jaitu suasana umum dalam peme-riksaan yang saya anggap diliputi oleh suasana komunisto-phobi suasana komunisto-phobi.

Hakim Ketua : Jaitu suasana yang bagaimana ?

Terdakwa : Saya mengetahui banjak suasana gembira dan suasana sedih perkara komunisto-phobi jaitu suasana dalam pemeriksaan jaitu mengedjar-ngedjar.

Hakim Ketua : Sekarang ini apa pemeriksaan saja ini mengedjar-ngedjar ?

Terdakwa : Oh tidak itu dalam pemeriksaan pendahuluan, bukan disini.

Suasana umum pemeriksaan pendahuluan yang meliputi komunisto-phobi, jaitu semangatnja dalam edjeikan atau dalam mengedjar-ngedjar keterangan-keterangan itu, pokoknja didjuruskan kesatu ialah PKI itu dalang itulah yang saya maksud dengan suasana sehingga suasana itu saja sendiri orang tahanan harus saja perhitungkan dengan pemikiran toh nanti didalam pengadilan saja bisa sangkal itu.

Hakim Ketua : Djadi seakan-akan keterangan yang dahulu diberikan itu karena dipaksa ?

Terdakwa : Nah itu kalau setjara djelasnja kalau buat saja memang mengalami sematjam sekali paksaan.

Hakim Ketua : Kapan ?

Terdakwa : Jaitu saja kurang lebih kalau tidak salah tanggal 18 Nopember itu saja ketahuan sebagai NJONO. Sesudah itu tanggal 22 pada suatu ketika saja sedang diperiksa kemudian disitu ada istilah bahwa akan ada ujian djiwa. Kepada pemeriksa, saja katakan tidak mengerti apa itu barulah saja tahu bahwa yang dimaksud ujian djiwa itu, bahwa saja harus mengalami terhadap pukulan-pukulan.

Itu buat saja hanya satu kali itu kira-kira setengah hari ingat saja tetapi setjara umum ditahanan pemeriksaan disana boleh bilang setiap hari saja melihat pukulan-pukulan lha ini yang saja maksud suasana komunisto-phobi yang harus saja hitungkan dengan tjatatan bahwa terdakwa mempunyai hak sangkal dimuka pengadilan.

Hakim Ketua : Djadi keterangan-keterangan yang sudah Saudara berikan disangkal didasarkan kepada pertimbangan politis jaitu bahwa didalam masa epiloog itu ada kampanye anti komunis dengan dalih PKI adalah dalang G. 30. S.

Terdakwa : Itu satu. Yang kedua bahwa terdapat pada pemeriksaan pendahuluan terdapat suasana komunisto-phobi.

Hakim Ketua : Ini yang menjejaskan saudara sekarang mengingkari pada beberapa persoalan, tetapi tidak seluruhnya. Tadi saja kemukakan bahwa beberapa persoalan memang benar terutama didalam rangka soal keputusan yang diambil didalam rapat tanggal 28 Agustus. Betul ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Saja ulangi lagi djadi keputusan itu sama sekali diganti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ini.

Terdakwa : Ja itu tadi sedjak semula memang saja membuat keterangan memang tidak betul.

Hakim Ketua : Ja. Tjoba jelaskan ! Sebabnya apa !

Terdakwa : Sebabnya ada suasana komunisto-phobi itu.

Hakim Ketua : Lha ini bagaimana ditiap-tiap pemeriksaan-pemeriksaan, yang saja maksud pemeriksaan pertama, yang dibuat oleh pak Oditur kemudian itu pada tanggal 2 Januari 1966 setelah selesai dibuat, kemudian ditutup dengan demikianlah berita atjara ini ditutup untuk sementara yang telah dibatjakan ulangan yang diperiksa tanggal 2 Januari 1966, kemudian dibubuhi tanda tangan sebagai benar, dan NJONO teken bahwa ini benar, kemudian ditutup.

Selanjutnya pada pemeriksaan yang kedua pertanjaan ialah apakah Saudara pada pemeriksaan itu tetap pada keterangan yang Saudara telah berikan ? Ja saja masih tetap pada keterangan yang saja berikan.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Jalah djadi semendjak tiap kali itu Saudara selalu dusta.

Terdakwa : Ja dusta.

Hakim Ketua : Lahu tiap kali ditanyakan apakah Saudara dalam memberikan keterangan ini tidak berada dalam keadaan dipaksa Saudara djawab tidak. Bagaimana itu ?

Terdakwa : Nah kalau begitu ini tidak ada paksaan tetapi saja perhitungkan suasana umum dalam tahanan.

Hakim Ketua : Djadi semendjak diperiksa oditur suasana itu masih ?

Terdakwa : Ja suasana masih.

Hakim Ketua : Djadi kalau pertanjaan saja ini saja ulangi, ini adalah didalam rangka oleh karena ada banjak perbedaan besar sekali dan merupakan perbedaan yang prinsipil, dengan yang telah Saudara berikan pada pemeriksaan-pemeriksaan yang lalu dari pada pemberian pendjawaban terhadap pertanjaan djawaban pada pemeriksaan ini. Yang oleh Saudara dinjatakan bahwa perobahan itu pertama-tama atas dasar pertimbangan politik jaitu didalam masa epiloog terdapat kampanye, dengan mendalihkan P.K.I. sebagai dalang G. 30. S. Kedua waktu pemeriksaan terdahulu dibuat, terdapat suatu Komunisto-phobi, itu alasan-alasan dari pada dirubahnja.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Jaitu mengenai Komunisto-phobi dan saja akan landjutkan terhadap tuduhan kedua yang mengenai kegiatan yang tadi sepintas lalu Saudara berikan Jah !

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Apa sebabnya itu ? Masih ada yang ditanyakan ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Memberikan kepada Pak GANI. (HAKIM ANGGAUTA) dari Angkatan Laut untuk menanjakan langsung kepada terdakwa.

Hakim Angg. : Saudara Njono saja minta djuga beberapa pertanjaan jaitu mengenai Saudara dari pendjelasan-pendjelasan yang sudah dikemukakan itu ingin mendjelaskan bahwa permupakatan ataupun perundingan yang dilakukan

beberapa kali didalam bulan Agustus itu bahwa perundingan-perundingan itu sama sekali pisah dari pada apa yang telah terdjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 sampai hari ini djam 4.00 dan seterusnya !
Itu tadi djelas ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Kemudian saja ingin djelaskan pula dalam keterangan baik pagi ini maupun dalam wedjangan-wedjangan tanggal 3 Pebruari. Kalau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI jaitu saudara sendiri maka kegiatan-kegiatan itu adalah tanggung djawab daripada Saudara sendiri, tanggung djawab dari pada saudara dan tokoh-tokoh itu sendiri !

Terdakwa : Jah, baik.

Hakim Angg. : Sekarang saja tanjakan jaitu dalam organisasi PKI dimana didalam anggaran Dasar ditentukan bahwa tiap-tiap tindakan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan misalnja dan sebagainya itu tidaklah dapat dilakukan tanpa seizin daripada pimpinan-pimpinan, dan kalau dilihat dari pada sudut kedjadian dalam G. 30. S. ini maka tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara itu sendiri, dilakukan hampir diseluruh plosok di Indonesia. Sekarang saja ingin tanjakan kepada Saudara apakah seluruh kegiatan itu atas inisiatip mereka masing-masing sadja ?

Terdakwa : Ja, sewaktu diseluruh plosok pertama saja tidak mempunyai bahan oleh karena sudah ditahan sedjak Oktober saja sudah ditahan. Itu mengenai kegiatan seluruh plosok buat saja sendiri sebenarnya masih membutuhkan bahan apa gerakannja seluruh plosok itu sesudah gerakan G. 30. S. di Djakarta mengalami kegagalan apa masih bersifat kelanjutan dari G. 30. S. ini terutama sesudah saja ditahan ini tidak mengetahui situasi, atau bersifat sesungguhnya seperti saja alami di Djakarta jaitu pembelaan dari pelaku-pelaku G. 30. S. dan kaum Komunis sampai kepada yang bukan Komunis yang bersimpati itupun harus mengadakan pembelaan seperti di Djakarta karena sesudah terdjadi kegagalan, dilakukan rasia terhadap Komunis-komunis.

Hakim Angg. : Baiklah ini, saja hanya minta didjawab demikian fakta-faktanja itu kemudian jaitu saja hanya mau menanyakan dapatkah mereka ini mengambil tindakan-tindakan yang oleh saudara disebutkan membantu atas inisiatip dan tanggung djawab sendiri, dalam partai saudara jaitu partai komunis Indonesia ?

Terdakwa : Itu bisa, djadi kalau seperti di Djakarta saja sebagai seorang tokoh melanggar kepada putusan politbiro apalagi mereka. Soalnja itupun bisa djadi satu perbuatan yang sifatnja tidak mentaati suatu keputusan, pada suatu saat bisa terdjadi. Tapi saja ingin mendjelaskan bahwa tidak mentaati bukan hanya di Djakarta sadja, tetapi hampir diseluruh plosok Indonesia.

Hakim Angg. : Ja, benar.

Saudara NJONO, didalam keterangan saudara dalam tanja-djawab saudara dengan Ketua MAHMILLUB disini antara lain telah memberi keterangan bahwa ada pentjegahan terhadap rentjana coup de'tat Dewan Djenderal, ja' bagaimana ?

Terdakwa : Diambil tindakan-tindakan pentjegahan oleh Politbiro, oleh Presiden. Djadi Politbiro melapor sama Presiden dan mengharapkan Presiden mengambil langkah-langkah pentjegahan, djadi bukan Politbiro telah melantarkan tindakan-tindakan pentjegahan terhadap adanya rentjana Dewan Djenderal.

Hakim Angg. : Apakah djuga ada rentjana-rentjana dan tindakan-tindakan pentjegahan-pentjegahan itu ?

Terdakwa : Ah, tidak, tidak.

Hakim Angg. : Apakah dalam rapat politbiro itu ada dipikirkan atau didiskusikan terdiri dari pada apa tindakan pentjegahan-pentjegahan itu ?

Terdakwa : O, kongkrit belum. Djadi yang pokok lapor dulu pada Presiden.

Hakim Angg. : Kenapa sampai ada urusan ini dengan yang sebagaimana yang saja dengar tadi didalam keterangan saudara, saja berpendapat bahwa kekuatan militer ini senantiasa dikemukakan oleh rapat pertama, kedua dan ketiga, ingat ja !

Terdakwa : Ija.

Hakim Angg. : Mengapa ini, berdasarkan apa motif saudara! apa motif politbiro. Saudara mengetahui itu apa sebabnja ini mendjadi salah satu soal yang penting, sekedar berhubungan dengan soal Komunis sadja bukan ?

Terdakwa : Bukan, itu adalah soal militer. Motief sebagai salah satu faktor dalam menindjau situasi politik. Itu motifnja. Djadi mustinja kalau pertimbangan militer itu baik itu bisa ada kemungkinan bahwa itu Dewan Revolusi nanti bisa berdiri didalam rangka perspektip politik.

Hakim Angg. : Baiklah, bagi siapa, untuk siapa! menilai perspektif politik tentang kemungkinan-kemungkinan politik yang dihadapi dalam situasi yang kita hadapi.
Ja, apa pentingnya diperbincangkan juga soal militer itu. Jadi untuk siapa situasi militer setjara umum itu baik?

Terdakwa : Setjara Politik ada kemungkinan.

Hakim Angg. : Baik buat siapa?

Terdakwa : Baik buat perwira-perwira yang menentang Dewan Djenderal jaitu kekuatannya jaitu kekuatan antara militer Dewan Djenderal dan militer yang menentang Dewan Djenderal. Yang penting maksud imbalan militer.

Hakim Angg. : Apakah ada hubungan antara politbiro dengan sekelompok perwira itu, perwira sebagaimana yang telah saudara bitjarakan tadi.

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Angg. : Tidak ada?

Terdakwa : Ja, tidak ada.

Ini saja harus membuat keterangan yang saya sebut tadi dalam pemeriksaan. Itu sedjak semula saja tidak menyesuaikan itu. Memang suasana pemeriksaan tidak ada paksaan-paksaan terhadap saya, tetapi karena Oditur cukup nuchter dalam memeriksa saya, maka yang tadi-nja perubahan ini akan saya adjukan didalam pengadilan, saya anggap lebih baik saya adjukan sebelumnya. Itulah, karena itu saya akan mentjaba..... (suara gaduh).
Jadi saudara SUKATNO bilang bahwa maksud anggota dari Pak DJOJO ini yang sudah mendapatkan bantuan saya, jadi saya, SUKATNO, Pak DJOJO ini itu sudah.

Oditur : Yang saya tanya siapa dia?

Terdakwa : Anggota DPRGR, Sekdjen Pemuda Rakjat.

Oditur : Siapa yang menundukkan antara saudara dengan.....

Terdakwa : Kalau begini saja sebut yang menundukkan tadi kawan DISMAN. Saya tidak tahu bagaimana seluk beluk hubungan kawan SUKATNO dengan PAK DJOJO, itu saya tidak tahu tapi yang tahu ialah kawan SUKATNO minta bantuan-bantuan saya, dan saya penuhi.

Oditur : Baiklah, saudara tidak mengerti hubungan seluk-beluk antara KATNO dengan Lubang Buaja, tetapi kok sudah diminta bantuan pada saudara, saudara berikan, begitu! Itu permintaan dari mana?

Terdakwa : Dari Pak DJOJO dari Lubang Buaja, itu saja sudah mengerti maksudnja.

Oditur : Sekarang pada rapat Politbiro dan putusan Politbiro pada tanggal 28 Agustus yang ditudjuk-- kepada saudara itu bagaimana! Apakah itu tidak merupakan pelaksanaan.

Terdakwa : Oh, tidak. Pelaksanaan dari.....

Oditur : Itu kan penting?

Terdakwa : Ja, pelaksanaan putusan Politbiro itu lapor pada Presiden.

Oditur : Tanggal berapa dilaporkannya pada Presiden?

Terdakwa : 28 Agustus.

Oditur : Tanggal permulaan September saudara mulai mengirim Sukarelawan?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Itu yang saya tanya, apakah tidak ada hubungan antara putusan Politbiro dengan mengirim tenaga tjadangan, yang saya maksud waktunya.

Terdakwa : Oh, tidak.

Oditur : Apakah Saudara kalau betul-betul saudara tidak taat kepada putusan Politbiro pernah mendapat tegoran dari pada Politbiro?

Terdakwa : Ja, dari kawan SUDISMAN pernah sekali jaitu mengenai kalau tidak salah, sekitar pertengahan September juga itu kenapa ada laporan bikin panitia-panitia, aksi, itu saya djawab, ini namanja bukan panitia aksi, pos-pos yang kalau nanti ada Komando dari Presiden sudah siap (hadirin ketawa riuh).

Oditur : Sekarang diwaktu saudara mengirimkan tenaga-tenaga tjadangan yang disediakan oleh CS-CS dan Komite-komite Seksi apakah itu saudara lakukan dalam suatu tugas sebagai Sekretaris Pertama Komite Djakarta Raya?

Terdakwa : Saya maafkan itu karena sebagai Sekretaris Komite PKI Djakarta Raya.

Oditur : Oh sekarang saya bertanya bagi saya semendjak melakukan pemeriksaan terhadap diri saudara, pemeriksaan setjara nuchter terhadap saudara dan kemudian keterangan-keterangan yang saudara robah tadi belakangan ini menimbulkan suatu logika, suatu hal yang berten-

tangan dengan logika saja barangkali juga saja akan bertanya dengan logika kepada saudara NJONO seorang anggota Politbiro hanya 1 dari 9 orang.

Itu hanya sembilan, dimana bung NJONO nampak yang selama duapuluh tahun mengabdikan kepada Partai tiba-tiba tidak mematuhi garis yang diputuskan oleh partai, yang sangat krisis sekali. Bagaimana kira-kira apakah saudara dapat memahami orang masih dapat memper-tajajai saudara itu ?

Terdakwa : Itu dalam soal partai itu bisa kejadian.

Oditur : Terus, terus bagaimana saudara

Terdakwa : Maksudnya itu dari pada tanggung Jawab saja kepada yang akan diselesaikan dalam bidang CC mau diambil putusan apa. Seperti halnya dahulu pernah mengeluarkan itu yang dinamakan TAN LING DJIE-ISME, itu diambil putusan. Hal mengenai ini logisnya apa itu tadi yang saya kemukakan karena saya tahu persis diskusi dalam Politbiro yang tadi saya kemukakan, saya ketarik pada berlangsungnya imbangan kekuatan militer tadi, ini mengenai proses bagaimana kalau perimbangan suatu kekuatan militer lebih baik psychologis kalau mau bertindak itu perwira-perwira. Dan dalam prinsipnya dengan putusan Politbiro itu sama-sama lapor. Tapi kelihatannya belakangan. Karena tahu begitu saja didorong untuk berbuat membantu pada Perwira-perwira. Yang saya kemukakan didalam pemeriksaan politik terutama dengan gagalnya G. 30. S. ini memang sesungguhnya putusan politbiro yang betul. Tapi itu sudah saja lakukan.

Oditur : Tapi kalau itu menurut anggapan saya ini, maka saudara adalah seorang pembohong yang baik. Kok begitu salah satu keputusan Politbiro yang saudara mungkir yaitu pembagian tugas dimana saudara itu ditugaskan membentuk tenaga tjadangan yang kemudian saudara tambah dan kemudian saudara didalam praktek saudara mau laksanakan itu mengirim atau membentuk tenaga tjadangan untuk dilatih kemiliteran tetapi sekarang saudara bohong, bahwa pembentukan tenaga tjadangan sampai terdjadinya peristiwa G. 30. S. itulah tanggung jawab saya, jadi saya mendapat kesan bahwa saudara itu pembohong sadja.

Selanjutnya Ketua menanyakan lagi kepada Oditur, apakah ada yang

Oditur akan ditanyakan lagi kepada TERDAKWA ? dijawab oleh Oditur tidak, tidak ada lagi yang kami tanyakan tjukup.

Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang yang diselenggarakan hari (waktu) ini telah tjukup untuk ditutup, dan akan dibuka kembali nanti malam jam 19.00.—

SIDANG KE II TANGGAL 14—2—1966

Dimulai pada jam 19.00, (terdakwa NJONO)

Hakim Ketua : Pemeriksaan akan kami lanjutkan didalam rangka yang telah diperoleh atau ditemukan pada rapat atau sidang yang pertama siang tadi. Saya masih ingin kembali lagi sebentar didalam rangka rapat-rapat yang diadakan dan yang menurut saudara tiga kali itu. (Pembela interupsi).

Pembela : Saudara Ketua, para hadirin, saya mau mengemukakan sesuatu mengenai sidang yang tadi pagi dalam suasana tenang yang begitu saja harga, terjdadi satu hal yang menjesal yang saya harus protes.

Tadi itu terdakwa disebut pembohong, sebenarnya seperti sudah diuraikan oleh Bapak Ketua, terpaksa dengan menjangkal bertindak dalam batas haknya. Djanganlah kita mempersulit pemakaian hak itu. Tentang alasan terdakwa yang diberikan oleh terdakwa untuk bertindak sedemikian.

Tetapi kita semua yang sudah mengikuti pidato Bapak Presiden mengenai epiloog dari pada Gerakan 30 September kiranya tahu juga bahwa seorang tokoh PKI seperti terdakwa, mempunyai alasan tjukup untuk merasa sjukur bahwa pada hari ini dia dalam keadaan sehat walafiat dapat menghadap dimuka pengadilan ini. Sekian sadja, terima kasih.

Hakim Ketua : Djadi pada intinya Pembela mengajukan Protes berkenaan dengan digunakannya oleh Oditur perkataan "bohong", bahwa penjangkalan terhadap keterangan-keterangan yang lalu adalah didalam batas-batas haknya. Terhadap protes ini Mahkamah akan memberi jawaban dan keputusannya. Memang mahkamah tadi tidak menegor Oditur waktu menggunakan kata-kata bohong, bahkan kata-kata "pembohong yang baik". Oleh karena mengingat bahwa penggunaan kata-kata tersebut adalah didalam hubungannya dengan hal-hal yang diketemukan didalam sidang. Diakui oleh terdakwa bahwa sebagian keterangan baik yang ditulisnya sendiri maupun Berita Atjara Pemeriksaan yang ditanda tangrannya sendiri

dalam pemeriksaan pendahuluan, adalah hal-hal dan keterangan-keterangan yang "tidak benar". Dalam sidang ini ia mungkir atau sangkal keterangan-keterangan yang sudah pernah diberikan dengan alasan-alasan yang telah kita dengar bersama tadi.

Memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengemukakan alasan-alasannya adalah dipandang dari sudut pemberi keterangan suatu pembohongan yang diberi alasan. Disamping itu kata-kata bohong adalah kata-kata sehari-hari yang tidak mempunyai nilai penghinaan, bahwa ditambahkan pada pembohong adalah pembohong yang baik, yang baik menurut pendapat Mahkamah telah diajukan alasan-alasannya. Djelas pula kata-kata diutjapkan tidak tertudju khusus atau hanya kepada tertudju, tanpa alasan, (apabila hal itu dilakukan dengan sendirinya merupakan penghinaan Ouditor terhadap tertudju), tetapi dilandasi oleh dan berhubungan dengan apa yang ditemukan dalam sidang ini, ialah keterangan-keterangan pengingkaran atau penjangkalan dari tertudju dalam hal-hal yang pernah diakui sebelum ini. Atas dasar pertimbangan itu Mahkamah menolak "protes" yang diajukan oleh Pembela.

Sebelum melanjutkan pemeriksaan, saya akan kembali dulu mengenai rapat-rapat yang telah diadakan setjara serangkaian dan menurut pendapat Saudara 3 yang terpenting diantaranya : Rapat yang pertama itu apa saja yang sebenarnya dalam agendanya yang diinformasikan dan tidak dibicarakan kemudian dalam rapat yang selanjutnya. Dalam rapat pertama, tjoba. Apa yang diinformasikan oleh Aidit pada rapat atau pertemuan yang pertama.

Terdakwa : Seperti yang saya kemukakan yang diinformasikan dalam rapat pertama mengenai tiga materi :

1. Informasi tentang kesehatan Presiden yang sangat terganggu.
2. Adanya rentjana coup d'etat dari Dewan Djenderal.
3. Adanya inisiatif dari golongan Perwira yang mau mendahului menggagalkan rentjana coup d'etat dari Dewan Djenderal sesuai dengan yang diinformasikan.

Hakim Ketua : Pada rapat yang pertama.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Dari jam berapa, berapa lama terjdinnya rapat itu, berapa jam kira-kira diselenggarakannya.

Terdakwa : Seingat saja itu siang, jam 2 begitu kira-kira sampai jam 4 barang kali.

Hakim Ketua : Djadi 2 jam.

Terdakwa : Ja, kira-kira.

Hakim Ketua : Lalu mengenai perimbangan kekuatan militer pada rapat yang seberapa diajukan.

Terdakwa : Pada rapat yang pertama, seperti yang sudah saja kemukakan, mulai ditanjakan tapi kawan D.N. Aidit belum siap untuk membuat rumusannya. Karena itu, maka rapat pertama itu tidak diambil keputusan apa-apa, oleh Aidit ditjoba untuk merumuskan, memang mengenai perimbangan kekuatan militer itu.

Hakim Ketua : Lalu kapan mengenai perimbangan kekuatan itu didiskusikan atau dibicarakan ?

Terdakwa : Mulai diinformasikan seingat saja dalam rapat kedua itu dikemukakan.

Hakim Ketua : Rapat yang kedua, ja.

Dalam rapat kedua itu, oleh karena dalam rapat pertama sudah diajukan tetapi belum bisa dikeluarkan estimate atau dikeluarkan estimate oleh D.N. Aidit, baru pada rapat kedua.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Mengenai persoalan Dewan Revolusi, pada rapat yang seberapa didiskusikan ?

Terdakwa : Yang diberikan rumusan agak jelas, itu mengenai kemungkinan-kemungkinan politik yang saja kemukakan itu pada rapat yang kedua.

Hakim Ketua : Dalam rapat kedua juga. Dalam rapat kedua itu disamping persoalan pemberian estimate yang dibuat oleh Aidit juga persoalan Dewan Revolusi. Begitu ?

Terdakwa : Ja, itu yang dirumuskan agak jelas.

Hakim Ketua : Agak jelas, jadi persoalan Dewan Revolusi pada rapat juga pernah diajukan ?

Terdakwa : Ada suatu inisiatif dari Perwira itu.

Hakim Ketua : Sudah pada rapat yang pertama, pada rapat pertama itu tidak hanya mengenai inisiatif untuk mentjegah saja, atau menentang rentjana Dewan Djenderal tadi, tetapi juga sekaligus persoalan Dewan Revolusinya juga sudah diajukan.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus dijadikan bahan diskusi. Belum ?

Terdakwa : Belum. Diwaktu itu banjak terpantjang pada tadi, bagaimana sesungguhnya perimbangan militer sampai ada Perwira yang berani bertindak itu.

Hakim Ketua : Pada rapat yang pertama itu tadi, ja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tetapi mengenai Dewan Revolusi sudah disinggung, se-tidak-tidaknya didiskusikan setjara mendalam, baru pada rapat kedua, jaitu rumusannya. Lalu pada rapat terakhir pada tanggal 28 Agustus 1965 itu diperoleh satu keputu-latan atau keputusan untuk melapor kepada Presiden, meminta kepada Presiden agar mentjegah.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu menginformasikan kedalam artinja ke Partai mengenai adanya bahaya Dewan Djenderal.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Didalam pengambilan keputusan itu bahwa akan melapor kepada Presiden. Apa yang akan dilaporkan kepada Presiden ?

Terdakwa : Bahaya Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Tok, mengenai perimbangan kekuatan militer dan seba-gainja tidak ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Lalu minta kepada Presiden untuk mentjegah, itu apakah djuga sudah dibuatkan satu konsepsi, pentjegahan dari padanja.

Terdakwa : Saja kira didiskusikan.

Hakim Ketua : Tidak. Hanya minta diputuskan untuk meminta kepada Presiden agar mengambil langkah-langkah atau tindakan mentjegah, begitu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Yang diinformasikan kedalam, tentunya kedalam partai, apa sadja.

Terdakwa : Djadi ada.

Hakim Ketua : Salah satu soal pokok.

Terdakwa : Soal pokok, jaitu adanya bahaya Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Sadja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus mengenai inisiatif Perwira itu tidak diinformasikan kedalam ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Sama sekali tidak ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Didalam memberikan informasi kedalam, maksud saja kedalam Partai, apakah dilakukannya setjara rapat-rapat ataupun setjara bagaimana.

Terdakwa : Itu kebiasaannya melalui rapat-rapat digolongannya masing-masing.

Hakim Ketua : Dus dalam rangka melaksanakan keputusannya yang keempat itu dilakukannya setjara mengadakan rapat-rapat digolongannya masing-masing. Artinja golongannya masing-masing ?

Terdakwa : Maksud saja sebagai ada kaum Komunis yang di DPR, nanti ada dalam CDR dengan komite-komite bawahan-nya. Itu maksud saja.

Hakim Ketua : Lalu yang membuat themanja ? Adalah kalau di CDR, saudara Njono yang membuatnya ? Untuk diteruskan kebawah itu.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Saudara mengadakan kontrol atau tidak kebawah. Apa benar yang disampaikan itu ?

Terdakwa : Sampai

Hakim Ketua : Sampai tingkat berapa ?

Terdakwa : Kebawah ?

Hakim Ketua : Ja.

Terdakwa : Kebawah itu, CS-CS itu umumnya setahu saja sudah diberikan tahu.

Hakim Ketua : Sudah mengetahui ?

Terdakwa : Adanya bahaya.

Hakim Ketua : Dari mana diketahuinya Bung Njono kalau sudah diberifahkan ? Diadakan check sendiri begitu, ja ? Tjara-nya ?

Terdakwa : Ada dua matjam, ada yang saja sendiri ada yang laporan dari petugas CDR lainnya.

Hakim Ketua : (Didalam rangka Perwira ini, kalau ada yang mau menanja ? Ini ditunjukkan kepada anggota Mahkamah).

Hakim Angg. : Sesudah rapat ketiga oleh Politbiro, djadi sesudah
(A.L.) tanggal 28—8 apakah saudara pernah berdjumpa dengan D.N. Aidit, Njoto dan Lukman.

Terdakwa : Jang seingat saja pernah berdjumpa dalam hubungan kerja biasa dengan kawan Aidit, pernah berdjumpa.

Hakim Angg. : Dalam perdjumpan itu
(A.L.)

Terdakwa : Perdjumpan saja dalam perdjalan ke kantor CC maka Aidit ada disitu.

Hakim Angg. : Apakah pernah saudara bitjarakan, bahwa saudara telah mempersiapkan pasukan tjadangan jang dilatih di Lobang Buaja ?
(A.L.)

Terdakwa : Tidak, saja tidak bitjarakan.

Hakim Angg. : Tidak dibitjarakan ?
(A.L.)

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Dan tidak ditanjakan ?
(A.L.)

Terdakwa : Tidak. Mengenai pekerjaan biasanja melalui kepala Sekretariat kawan Sudisman.

Hakim Angg. : Tenaga-tenaga jang dilatih di Lobang Buaja itu biasanja dapat dari mana ?
(A.L.)

Terdakwa : Pembiajan waktu itu dipikul oleh diri sendiri, oleh Lobang Buaja sendiri. Djadi jang diminta bantuan dari saja jaitu menjediakan orang-orangnja, hanja sampai mentjari orangnja.

Hakim Angg. : Bagaimana Saudara Njono memberi keterangan kepada (Dep. Keh.) Mahmillub ini, jaitu mengenai rapat pertama, jaitu di mana antara lain dibitjarakan mengenai inisiatif dari pada Perwira jang disebut "progresip". Waktu dibitjarakan itu apakah sudah ada, apakah Polit Biro waktu itu menjetudjui apa tidak.

Terdakwa : Djadi, tidak ada persetudjuan, waktu itu sebagai informasi mengenai situasi politik jang dihadapi. Saja hanja terbatas pada inisiatif apakah dalam hal ini disetudjui oleh rapat Polit Biro dimana djuga hanja diinformasikan.

Hakim Angg. : Bagaimana dengan rapat jang kedua ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Jang kedua itu informateris lagi.

Hakim Angg. : Bagaimana dengan rapat ketiga ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Disitu diambil keputusan seperti saja kemukakan.

Hakim Angg. : Dapatkah saudara jelaskan selain pada kami disini, (Dep. Keh.) bagaimana isi persetudjuan mengenai inisiatif para perwira tersebut ?

Terdakwa : Djadi terhadap inisiatif ini tidak kami berikan persetudjuan.

Hakim Angg. : Tidak diberikan persetudjuan ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Tidak, seperti saja terangkan tadi disini ada dua tjara mentjegah Dewan Djenderal, jaitu tjara pertama dari semua Perwira ini intisarinja bertindak, lapor kemudian kepada Presiden. Tjara kedua jang didjadiakan putusan dari Politbiro adalah lapor adanja bahaja Dewan Djenderal itu, dengan begitu tidak ada persetudjuan terhadap putusan dari Politbiro.

Hakim Angg. : Apakah jang djelas kami tidak menjetudjui inisiatif para (Dep. Keh.) Perwira, dirumuskan demikian ?

Terdakwa : Tidak, tidak dirumuskan demikian ; dirumuskan bahwa : Sikap jang tepat menghadapi semua soal itu adalah melaporkan kepada Presiden.

Hakim Angg. : Disamping melaporkan kepada Presiden itu andaikata itu benar djuga diadakan tindakan-tindakan dalam rangka untuk menjambut apa mamanja inisiatif para Perwira ?

Terdakwa : Tidak, politbiro hanja melaporkan kepada Presiden.

Hakim Angg. : Dan menggambarkan adanja Dewan Djenderal ? Kemudian berdiam diri sepanjang masa pada waktu tidak ada apa, bertopang dagu ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Jang diharapkan memang dari, sikap dari
(Dep. Keh.).

Hakim Angg. : Maka dari itu, mengharap kan sadja ? sampai kapan Presiden itu, sampai kapan permintaan itu.
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Permintaan sampai meletusnja G 30 S belum diberi - saja belum diberi tahu bagaimana sikap Presiden.

Hakim Angg. : Djadi berdiam diri sadja sambil menunggu sebagaimana apa jang Saudara katakan.
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Setjara, itu urusan Presiden saja tidak tahu.

Hakim Angg. : Tapi urusan Polit Biro sendiri apakah anggauta Polit Biro berdiam diri sadja masing-masing dirumahnja bertopang dagu, atau apa tidak ada mempersiapkan strategi
(Dep. Keh.).

segala-galanya kalau andai tidak ada jawaban bagaimana.

Terdakwa : Jang dilakukan oleh anggauta berdasarkan putusan atau petundjuk Polit Biro tidak ada. Saja pribadi ada kegiatan.

Hakim Angg. : Saudara sendiri ada kegiatan ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Ja, seperti sudah saja terangkan tadi.

Hakim Angg. : Pribadi dalam arti apa ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Jaitu atas tanggung djawab saja.

Hakim Angg. : Lepas dari pada ini ? Polit Biro ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Dalam rapat kedua saudara tadi mengatakan bahwa sudah diadakan perumusan jang djelas mengenai Dewan Revolusi, tapi Saudara tidak mengatakan apa djelasnja disini, perumusan itu tadi.

Terdakwa : Jang dimaksud tadi, itu sudah saja terangkan, djikalau Dewan Revolusi itu sampai berdiri, itu merupakan satu kekuasaan politik jang batasnja paling banter itu sebagai satu koalisi jang bersifat anti Dewan Djenderal, djadi segala unsur anti Dewan Djenderal itu bisa bersatu disitu. Itu jang saja maksud.

Hakim Angg. : Ja, saja sudah tahu dari jang saudara uraikan tadi pagi.
(Dep. Keh.). Tetapi bagaimana hubungan Dewan Revolusi dengan Pemerintahan pada waktu itu, Saudara dalam mendjelaskan hanja hubungan dewan Revolusi dengan Dewan Djenderal, djadi bagaimana hubungan Dewan Revolusi dengan Pemerintah pada waktu itu.

Terdakwa : Djadi, seperti sudah saja djelaskan pagi tadi Dewan Revolusi itu akan mendemisionerkan.

Hakim Angg. : Mendemisionerkan apa ?

Terdakwa : Mendemisionerkan Pemerintah jang ada kalau dianggap.

Hakim Angg. : Tjoba terangkan lagi, Dewan Revolusi mendemisionerkan. ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Dewan Revolusi kalau bisa berdiri djuga akan mendemisionerkan Kabinet Dwikora dengan alasan Kabinet itu keadaannja tidak memuaskan berhubung ada unsur-unsur Dewan Djenderal didalamnya.

Hakim Angg. : Dan tjara mendemisionerkan itu (apa) sudah dibitjarkan ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Oh tidak. Itu urusan dari Perwira, Djadi tudjuannja jang utama itu mendemisionerkan.

Hakim Angg. : Djuga mengenai informasi — diinformasikan kedalam mengenai bahaya Dewan Djenderal, bagaimana isi dari informasi itu, bagaimana bunjinja ?

Terdakwa : Isi pokoknja sederhana, jaitu bahwa Dewan Djenderal itu merentjanakan coup d'etat.

Hakim Angg. : Apa lagi ?
(Dep. Keh.).

Hakim Angg. : Itu jang pokok jang menggambarkan adanja bahaya.
(Dep. Keh.). tetapi apa djuga digambarkan tindakan-tindakan apa dari kalangan partaimu diberi tahukan ?.

Terdakwa : Coup d'etat itu ?

Hakim Angg. : Ja.
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Jaitu jang diinformasikan, mau coup d'etat.

Hakim Angg. : Saja mengerti, Sdr. mengabaikan isinja dari informasi
(Dep. Keh.). kepada/kedalam partai saudara itu, jaitu menggambarkan adanja bahaya Dewan Djenderal?.

Terdakwa : Dalam bentuk mau coup d'etat.

Hakim Angg. : Ja. Tetapi apakah djuga dibitjarakan apa selandjutnja
(Dep. Keh.). what next to do ? dipandang dari sudut partai sendiri. Saudara membayangkan adanja bahaya dari Dewan Djenderal ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Apa jang sama-sama menentukan, djadi partai itu ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Kalau kepada kader-kader itu diberi tahukan bahwa Polit Biro melaporkan bahaya itu ke Presiden, itu tindakannja.

Hakim Angg. : Ja, itu keluar, tetapi kedalam sendiri apa jang saudara
(Dep. Keh.). lakukan ?

Terdakwa : Informasi.

Hakim Angg. : Djadi informasi sadja, informasi sadja. Tidak ada tjara
(Dep. Keh.). lain, misalnja : "Hai kader-kader PKI kita musti begini.

kita musti begini, dari pihak PKI kita musti begini, Belum ?

Terdakwa : Berhubung memang belum.

Hakim Angg. : Kapan sudahnja ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Kalau sudah djelas bagaimana sikap Presiden sesuai dengan putusan. Umumnja itu diberi seruan supaya waspada.

Hakim Angg. : Waspada sadja ?
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Tetapi kongkrit belum diberikan

Hakim Angg. : Jang saja maksud itu jang dalam perbuatan.
(Dep. Keh.).

Terdakwa : Belum.

Hakim Angg. : Djadi hanya ada pemberitahuan sepihak sadja dari adanja
(Dep. Keh.). bahwa coup d'etat dari Dewan Djenderal sadja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Tidak ada penampungan bahwa coup d'etat itu ? Jang
(Dep. Keh.). berupa kongkrit. Tidak ada ?

Terdakwa : Ja.

(Ketua mempersilahkan Ouditur untuk mengadakan pertanyaan).

Ouditur : Diwaktu pemeriksaan jang pernah kita lakukan terhadap Saudara Njono, suasana pemeriksaan itu bagaimana ? Suasana pemeriksaan itu sendiri.

Terdakwa : Artinja, Ouditur ?

Ouditur : Ja. Sebab dasar dari pada sidangnja Mahkamah ini adalah atas dasar Berita Atjara pemeriksaan jang saja bikin. Sekarang saja ingin tanja, kepada saudara Njono, di waktu kita mengadakan pemeriksaan terhadap saudara Njono suasana pemeriksaan pada waktu itu bagaimana ?

Terdakwa : Tadi sudah saja kemukakan bahwa suasana pemeriksaan dari Ouditur saja anggap baik.

Ouditur : Sudah.

Terdakwa : Tapi saja minta

Ouditur : Saja tidak minta tambahan. Sekarang, dalam rapat-rapat Politbiro, tadi diantaranya dalam rapat pertama dan kedua dari anggauta menajakan kepada D.N. Aidit tentang perimbangan kekuatan militer. Kenapa rapat Partai memerlukan betul untuk menajakan perimbangan kekuatan militer ini kepada Aidit, dan Kenapa pula D.N. Aidit bersedia dan menjedjakan waktu pada rapat kedua untuk memberikan analisisja tentang perimbangan kekuatan militer.

Terdakwa : Jang tadi saja sudah djelaskan bahwa itu sebagai perhitungan perspektip politiknya, jaitu :
1. Mengapa Perwira itu pada berani,
2. Apa mungkin Dewan Revolusi itu berdiri, itu sudah pagi tadi saja kemukakan dari perspektip politik itu ada beberapa kemungkinan dari situasi politik keseluruhannya.

Ouditur : Pertama ?

Terdakwa : 1. Mungkin ada kabinet Dewan Djenderal. Itu pertama.

Ouditur : Tidak. Ini tadi perspektip politik jang saudara Njono sebutkan tadi.

Terdakwa : Dalam hubungan keseluruhan ?

Ouditur : Ja.

Terdakwa : 1. Mungkin ada kabinet Dewan Djenderal.
2. Mungkin ada Dewan Revolusi,
3. Jang djuga waktu itu diadjudkan problem stelling, lalu bagaimana dengan Kabinet Nasakom. Hal itu sebagai kemungkinan politik seluruhnja ditindjau dalam hubungannya dengan perspektip politik.

Ouditur : Djadi anggauta Politbiro ingin mengetahui soal perimbangan kekuatan militer itu dalam hubungan perspektip politik.

Terdakwa : Ja, djadi kemungkinan-kemungkinannya.

Ouditur : Djadi :
Pertama kenapa Perwira itu berani; begitu kan ? Sampai berani akan mengadakan tindakan.

Terdakwa : Djadi jang pokok apa Dewan Revolusi ada kemungkinan.

Ouditur : Dan apakah Dewan Revolusi ada kemungkinan, djadi berarti Politbiro mengharapkan adanja Dewan Revolusi.

Terdakwa : Oh tidak betul, karena jang ditindjau tidak hanya kemungkinan adanja Dewan Revolusi, kemungkinan Kabinet Dewan Djenderal, itu djuga satu kemungkinan.

Ouditur : Baiklah.

Terdakwa : Terima kasih.

Ouditur : Dari golongan mana sadja tenaga-tenaga jang saudara kirim ke Lobang Buaja untuk latihan kemiliteran.

Terdakwa : Saja ambikan sebagian besar dari Pemuda Rakjat.

Ouditur : Terus perintji. Dari Pemuda Rakjat ?

Terdakwa : Lain-lainnja dari SOESI, Gerwani, BTI,

Ouditur : Dari PKI tidak ? PKI-nja ?

Terdakwa : Tetapi tenaga tjadangannja dari Ormas.

Ouditur : Apa dasar pengiriman tenaga tjadangan itu, dasar pengiriman tenaga tjadangan itu oleh saudara ke Lobang Buaja ?

Terdakwa : Tadi saja kemukakan bahwa ada permintaan dari Lobang Buaja kepada saja.

Ouditur : Baik. Apa jang menjejabkan mereka itu mau dikirim ke Lobang Buaja, apa karena pengabdiannja kepada saudara Njono, atau karena kepentingan partai.

Terdakwa : Tidak. Terutama kita djelaskan bahwa buruh dan tani akan dipersendjatai dalam rangka mengganjang Nekolim. Ini jang membikin mereka mau dikirim ke Lobang Buaja.

Ouditur : Apa keuntungannja bagi saudara, didalam mengirimkan tenaga-tenaga tjadangan ke Lobang Buaja, ataukah untuk kepentingan Partai atau untuk kepentingan diri sendiri.

Terdakwa : Untuk memenuhi permintaan Lobang Buaja.

Ouditur : Saudara Njono kenal sama Lobang Buaja itu ?

Terdakwa : Tidak.

Ouditur : Djadi saudara Njono tidak kenal sama Lobang Buaja ?

Terdakwa : Artinja belum pernah kesana.

Ouditur : Ja, saudara Njono belum pernah kesana, tetapi jang dimaksud saudara Njono Lobang Buaja itu apa sih ?

Terdakwa : Djadi Lobang Buaja.....

Ouditur : Tempatnja apa orangnja ?

Terdakwa : Lobang Buaja tadi saja maksudkan adalah Komando dari pada Gerakan Perwira itu.

Ouditur : Djadi saudara Njono tidak kenal sama orang itu.

Terdakwa : Jang disebut rekan Katno Pak Djojo saja tidak tahu, tidak kenal.

Ouditur : Pokoknja orang-orang jang di Lobang Buaja tidak ada jang kenal.

Terdakwa : Tidak ada.

Ouditur : Tetapi en toch dibantu, toch jang diminta oleh Lobang Buaja itu disediakan, mengirim tenaga tjadangan seperti jang ditjeriterakan tadi, menundjuk komandan-komandan sektor, meminta team kesehatan, Walaupun tidak kenal toch saudara Njono menjediakan diri untuk melaksanakannja. Kan begitu.

Terdakwa : Ja, karena saja pertjaja pertama bahwa itu adalah golongan Perwira jang kami sebutkan, dan kedua kami memenuhi permintaan bantuan mereka.

Ouditur : Baik. Tadi siang saudara mengatakan bahwa saudara tidak patuh kepada keputusan Polit, djadi indisciplinair.

Terdakwa : Ja.

Ouditur : Tetapi itu tidak berarti bahwa saudara keluar dari Partai, karena itu akan dipertanggung djawabkan nanti, begitu keterangan saudara tadi ?

Terdakwa : Itu kalau setjara partai.

Ouditur : Ja. Djadi berarti walaupun dalam hal ini indisciplinair sebenarnja tindakan-tindakan saudara itu masih dalam rangka partai dalam rangka organisasi selama itu belum ditentukan salah atau benarnja, Djadi begitu ?

Terdakwa : Tidak bisa bilang begitu.

Ouditur : Tapi tadi saudara mengatakan : "kalau saja itu sudah ditjap pengkhianat" atau apakah istilahnja itu didalam partai saudara, itu nanti apabila sudah dimintai pertanggungan djawab.

Terdakwa : Ja.

Ouditur : Tetapi selama pertanggungan djawab itu belum diberikan kepada Partai maka tindakan saudara itu maka sebenarnja masih dalam rangka partai atau organisasi.

Terdakwa : Oh tidak. Djadi djelas bahwa apa jang saja lakukan atas tanggung djawab saja itu, djelas itu bertentangan dengan garis Partai, kapan Partai mengeluarkan itu lain soal.

Ouditur : Ja, selesai.
(Hakim Ketua menanjakan apa ada jang hendak ditanjakan oleh Pembela), didjawab tidak).

Hakim Ketua : Ketemu dengan Katno itu kapan, Sukatno kapan ketemu-
nja ?

Terdakwa : Kalau jang untuk permintaan Lobang Buaja itu.....

Hakim Ketua : Dalam rangka permintaan Lobang Buaja itu ?

Terdakwa : Sama..... orangnja Sukatno.

Hakim Ketua : Memang sama bajangannja Sukatno ? Sama orangnja
Sukatno. Kapan ?

Terdakwa : Bertemu untuk keperluan Lobang Buaja ?

Hakim Ketua : Ja. Tentang Lobang Buaja dalam rangka jang menjam-
paikan permintaan dari Lobang Buaja itu.

Terdakwa : Ingat saja permulaan September.

Hakim Ketua : Dimana itu ketemu ?

Terdakwa : Dirumah saja.

Hakim Ketua : Dirumah, djadi ia datang kerumahnja bung Njono. Lalu
bagaimana kira-kira kata-kata jang disampaikan, apa-
kah dia bertindak atas nama seorang, atas nama Lobang
Buaja, atas nama dirinja sendiri minta tenaga-tenaga
pengiriman.

Terdakwa : Tidak, jang disebut adalah nama Pak Djojo.

Hakim Ketua : Lalu, gimana ? Tjara mintanja, apa lalu langsung bitja-
rakan ?

Terdakwa : Djadi Pak Djojo dari Lobang Buaja itu minta supaja
latihan-latihannja untuk setiap tenaga jang akan datang
itu diteruskan malah diintensipkan.

Hakim Ketua : Dintensipkan ?

Terdakwa : Diintensipkan.
Saja tanja ini Pak Djojo termasuk Perwira jang mau
bertindak melawan Dewan Djenderal didjawab: "Ja".
Djadi dalam hal ini memang Sukatno sudah berbuat
untuk membantu pak Djojo.

Hakim Ketua : Lalu apa djawaban saudara ?

Terdakwa : Hal itu, seperti siang tadi sudah saja kemukakan saja
penuhi permintaan itu dan saja memanggil untuk disele-
saikan sekaligus segala tenaga jang saja bantukan
kepada kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Tjara-tjara memperoleh orangnja itu, tjara-tjaranja
bagaimana. Bukan tjara pengirimannja, tapi tjara men-

dapatkan itu bagaimana ?

Terdakwa : Tenaga-tenaga jang dibantukan.

Hakim Ketua : Itu orangnja. Tjara-tjaranja mendapatkan itu, apakah
saudara menulis surat kepada ini—ini—ini—saja minta
tenaga dari kamu sekian, dari kamu sekian apa ditemui
sendiri orang-orang itu ?

Terdakwa : Ditemui sendiri oleh CS-CS tenaga jang akan dibantukan
itu.

Hakim Ketua : Djadi kamu serahkan wewenang untuk mentjari orang-
orang itu kepada Sekretaris CS ?

Terdakwa : Bukan, kepada 3, Niko

Hakim Ketua : Ja, ja. Ja hari itu? Sekarang jang menemui CS-CS. ?

Terdakwa : CS-CS dengan membawa daftar kepada saja.

Hakim Ketua : Lalu dikirimkannja ?

Terdakwa : Pengirimannja diatur oleh Katno dengan kurir

Hakim Ketua : Dari tempat masing-masing ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tanpa diketahui atau tanpa dikontrol tanpa diperiksa
lagi oleh ?

Terdakwa : Saja ?

Hakim Ketua : Ja.

Terdakwa : Tidak lagi.

Hakim Ketua : Lalu dasarnja untuk memilih itu apa daftarnja diadjukan
kepada Njono ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu diadakan schifting, penjaringan.

Terdakwa : Itu sudah saja berikan petunjuk untuk digunakan
supaja.

Hakim Ketua : Apa itu ?

Terdakwa : Aktivist itu jang.....

Hakim Ketua : Aktivist apa ?

Terdakwa : Aktivist sematjam kami itu, anggauta jang aktif.

Hakim Ketua : Anggauta dari — masing-masing.

Terdakwa : Dari Ormas jang bersangkutan itu supaja element aktif.

Hakim Ketua : Apa lagi ?

Terdakwa : Itu jang pokok, disamping ada tambahan, diusahakan jang disiplin, sekitar aktivis dan disiplin.

Hakim Ketua : Mengenai kesehatan tidak ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Apakah pengiriman tenaga-tenaga ke Lobang Buaja ini jang sudah dilakukan menurut pengakuanmu tadi siang sedjak bulan Djuni dan Djuli itu ada — apakah itu djuga diatur, ditjari dan dikirimkan melalui Njono.

Terdakwa : Kalau jang sebelum bulan September tadi, jang sebelum atas permintaan dari Pak Djojo, dulu itu langsung, Pak Djojo ini langsung menghubungi - waktu itu . Pemuda Rakjat, Serbaud ; djadi waktu itu dengan pendjelasan latihan sukarelawan. Itu sebelum bulan September.

Hakim Ketua : Sebelum Bulan September. Djadi kalau begitu semendjak bulan Djuni kalau menurut katanja tadi siang itu.

Terdakwa : Setelah saja tahu itu memang.

Hakim Ketua : Djadi pengirim jang sedjak bulan Djuni-artinja sebelum bulan September itu dilakukan tanpa diketahui oleh saudara Njono.

Terdakwa : Ja. Itu asal mulanja.

Hakim Ketua : Asal mulanja. Lalu, mengapa pada semendjak bulan September itu disalurkan melalui Njono, bagaimana ?

Terdakwa : Oh, itu jang sesudah latihan biasa ?

Hakim Ketua : Ja.

Terdakwa : Itu setelah saja tahu, mereka — saja tegor, lain kali bitjara dulu ; dan mungkin karena ada tegoran inilah maka untuk keperluan bulan Sepetember.

Hakim Ketua : Apanja jang ditegor itu ?

Terdakwa : Itu saja tahu sedjak ahir Djuli atau baru satu atau dua angkatan, masih ketjil-ketjil, kira-kira bulan Djuli atau - baru satu atau dua angkatan, masih ketjil.ketjil.

Hakim Ketua : Kira-kira ahir bulan Djuli ?

Terdakwa : Itu satu atau dua angkatan baru, itu saja baru tahu bahwa ada kegiatan.

Hakim Ketua : Dalam Bulan Agustus berarti sudah tidak ada lagi jang latihan di Lobang Buaja lagi ?

Terdakwa : Bulan Agustus masih ada.

Hakim Ketua : Sesudah itu djuga masih ada jang mengirimkan ?

Terdakwa : Tapi itu lapor dulu sama saja.

Hakim Ketua : Djadi berarti sebelum September-pun ada pengiriman-pengiriman jang dilaporkan melalui Njono ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lha tadi katanja sudah ada. Oleh karena tadi saja tanjakan mengapa bulan September baru disalurkan melalui Njono ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Sebelum ketemu dengan Sukatno itupun sepengetahuan Njono ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah dalam permintaan Sukatno itu disebutkan djuga djumlah tertentu ? Supaja dikerahkan oleh Njono ?

Terdakwa : Disebut djumlah ?

Hakim Ketua : Ja.

Terdakwa : Disebutkan kurang lebih 2.000.

Hakim Ketua : 2.000 ?

Terdakwa : 2.000.

Hakim Ketua : Itu djumlahnja disebutkan itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Djadi dikatakan setjara tegas sedjumlah 2.000, begitu ?

Terdakwa : Ja, Ja.

Hakim Ketua : Lalu, saudara memberi djawaban "ja" kalau 2.000 itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dan memang berhasil untuk mengirimkan sedjumlah itu ?

Terdakwa : Ja, malah lebih.

Hakim Ketua : Malah lebih ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Persoalan, sekarang persoalan Sektor. Jang menjusun Sektor-sektor itu siapa ?

Terdakwa : Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Lobang Buaja ?

Dasarnja dengan pemitjaraan dulu dengan CDR oleh karena, itu didaerah CDR, tidak ?

Terdakwa : Oh, tidak. Langsung mereka itu menentukan sadja, langsung menentukan pembagian sektor.

Hakim Ketua : Saudara mengetahui adanja pembagian sektor kapan ?

Terdakwa : Permulaan September. Selain menyelesaikan soal pengi-

riman tidak lama lagi datang lagi jang terus dilatih itu akan diorganisasi dalam sektor-sektor.

Hakim Ketua : Mengapa hendak dibagi dalam sektor-sektor ? Untuk kepentingan apa ?

Terdakwa : Itu disesuaikan dengan rentjana operasi militer di Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Itu semendjak awal September ? Sudah diberitahukan sedjak awal September bahwa akan dibentuk sektor-sektor di Djakarta ini jang akan disesuaikan dengan operasi militer jang akan datang ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dari siapa itu ? Djuga dari Sukatno ?

Terdakwa : Ja hubungan saja dengan Lobang Buaja dengan kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Tidak diperoleh pendjelasannya ini dari siapa, mengenai pembagian sektor mula-mula 5 lalu kemudian mendjadi 6 masih memerlukan persetudjuannya tidak ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Djadi tanpa ada persetudjuan tahu-tahu lalu dibagi mendjadi 6 sektor, atas dasar itu lalu baru meminta tenaga ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu mengenai Komandan-komandan sektor bagaimana ?

Terdakwa : Nha itu saja dimintai tenaga-tenaganya dan saja jang memberikan nama-namanya.

Hakim Ketua : Djadi dipas karena ada 6 sektor lalu diberikan 6 nama begitu ? Atau ditentukan nama ini sektor ini, nama ini sektor ini ?

Terdakwa : Saja umumnya mengadjudkan nama-nama tetapi sesudah saja terima lalu saja pilih nama-nama itu dari CS-CS.

Hakim Ketua : Djadi ditentukan oleh CS-CS lalu Njono jang memilih ?

Terdakwa : Jang menjaring saja, lha jang saja berikan kepada Lobang Buaja ini sudah saja saring.

Hakim Ketua : Djadi kalau ada 6 sektor maka hanya ada 6 nama ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah 6 nama itu disesuaikan dengan daerah sektor-nja atau hanya 6 nama itu.

Terdakwa : Tidak jang tentu harus didasarkan atas wilayah disektor itu atau disalah satu CS jang masuk didalam wilayah sektor itu. Itu jang penting saja anggap paling tjotjok.

Hakim Ketua : Persaratan apa saudara menjaring itu jang paling baik ? Dasarnya apa ?

Terdakwa : Jang pokok bagi dia itu kader dalam artian mempunyai kwalitas bisa memimpin disamping sjarat lain itu disiplin.

Hakim Ketua : Djadi penundjukan komandan sektor itu setjara tertulis apa tjara begitu sadja atau sampaikan sadja itu nama-nama si A, B, C, atau setjara tertulis untuk diangkat sebagai komandan sektor, ditundjuk sebagai komandan sektor si A, si B, si C, tertanda Njono. Kalau tidak apa ?

Terdakwa : Tidak, setjara lisan sadja.

Hakim Ketua : Oh, setjara lisan sadja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Jang diadjudkan tjalon-tjalon jang namanya pernah diadjudkan untuk Sektor I, II, III sampai VI itu memang tjotjok semuanya, tidak ada perubahan ?

Terdakwa : Tidak, tidak ada.

Hakim Ketua : Sebenarnya siapa jang mengangkat Komandan Sektor ini, Siapa ?

Terdakwa : Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Ada surat pengangkatan ?

Terdakwa : Tidak djadi sesudah disetudjui umumnya mereka ikut latihan.

Hakim Ketua : Tidak, dalam rangka Komandan Sektor ini apabila daftar pokoknya sudah diadjudkan oleh Njono mereka tidak mengamandir lagi ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Ja, diterima begitu sadja ? Lalu kemudian hubungan antara sektor dengan CDR bagaimana dan dengan CS-CS ?

Terdakwa : Ini diatur langsung oleh Lobang Buaja, djadi organisatoris mengenai hubungan dengan CDR.

Hakim Ketua : Organisatoris mengenai hubungan dengan CDR (Hakim Ketua mengulangi).

Terdakwa : Sesudah Komandannya diangkat.

Hakim Ketua : Lalu mengenai hubungannya CDR kalau ada kepentingan-kepentingan, kan tenaganya kita kirimkan ? ja, kemudian tenaga itu dikembalikan pada tempat masing-masing jang tergabung dalam sektor ini diadakan khusus untuk mengkoordinir mereka itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu hubungannya dengan CDR mengenai tenaga-tenaga Sektor-sektor dengan CDR ?

Terdakwa : Sektor-sektor ini sehari-harinya diurus oleh kawan Sukatno dengan stafnya kalau Sektor ada keperluan hubungannya kawan Sukatno dengan saja.

Hakim Ketua : Djadi melalui Sukatno ?

Terdakwa : Jang mengurus langsung Sektor-sektor saudara Sukatno dengan saja.

Hakim Ketua : Dengan CDR artinya Saudara itu dengan CDR? Djadi masih ada hubungannya antara Sektor dengan CDR ?

Terdakwa : Dalam hal lain Sektor memerlukan bantuan-bantuan.

Hakim Ketua : Ja lah, tapi masih ada hubungan, djadi tidak tertutup sama sekali bahwa CDR tidak mempunyai hak apapun terhadap Sektor itu, tidak. Djadi masih ada hubungan ?

Terdakwa : Masih ada hubungan.

Hakim Ketua : Lalu sektor dengan Lobang Buaja sekarang bagaimana ?

Terdakwa : Itu hubungannya liwat kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Lewat Sukatno lagi? Djadi tidak bisa Komandan Sektor hubungan langsung dengan Lobang Buaja ?

Terdakwa : Dalam praktis itu biasa.

Hakim Ketua : Dari mana diketahui ?

Terdakwa : Seperti mereka pernah diundang briefing. Itu undangan ada jang.....

Hakim Ketua : Dilaporkan kepada Njono bahwa ada undangan briefing ?

Terdakwa : Hasil briefing dengan sendirinya oleh kawan Sukatno dilaporkan kepada saja, diberitahukan kepada saja. Briefing diatur sendiri oleh Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Dan diperoleh laporan hasil dari briefing itu sendiri ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Komandan Sektor tidak melaporkan ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Satu orangpun tidak ada jang laporan ?

Terdakwa : Ada jang.....

Hakim Ketua : Siapa itu ?

Terdakwa : Dia itu dimandati oleh Sukatno untuk laporan saja kalau tidak salah kawan Sawang.

Hakim Ketua : Sawang ?

Terdakwa : Lapor, menjampaikan laporan.

Hakim Ketua : Mengenai ?

Terdakwa : Hasil salah satu briefing.

Hakim Ketua : Lalu dalam pengakuan jang lalu saudara mengatakan mendirikan atau membentuk pos-pos Komando, pos-pos koordinasi, koordinator dan pos-pos lapangan, benar itu ?

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Itu dalam rangka apa membentuk pos-pos itu ?

Terdakwa : Jaitu karena saja tahu, bahwa akan ada peristiwa-peristiwa jang penting seperti rentjana dari Perwira-perwira itu, saja mengambil inisiatif supaya dalam mengikuti situasi itu tidak tergantung pada sektor, karena saja tidak mempunyai hak komando langsung, karena ini miliknya Lobang Buaja itu, maka saja bikin aparat sendiri, itu jang saja beri nama pos-pos komando, pos-pos koordinasi dan pos-pos lapangan.

Hakim Ketua : Bagaimana tjoba organisasinya, jelaskan; antara pos komando hubungannya dengan pos koordinator apa, dan dengan pos lapangan apa. Mereka ini dengan Njono ini bagaimana? Tjoba jelaskan organisasinya.

Terdakwa : Djadi di tiap CS itu dibentuk jang namanya pos Komando.

Hakim Ketua : Tiap-tiap CS ada pos komando ?

Terdakwa : Ja. Kemudian pos komando ini dibawah itu membentuk pos koordinasi; jumlah pos koordinasi ini disesuaikan dengan jumlah pos lapangan. Itu petundjuk jang saja berikan. Jang dimaksud pos lapangan jaitu pos-pos ditempat-tempat jang vital, baik berupa wilayah atau berupa perusahaan. Djadi pos jang paling bawah pos lapangan, jang sesuai dengan jumlahnya itu ada koordinator-koordinatonya; koordinator-koordinatonya inilah dipimpin oleh pos komando.

Hakim Ketua : Berapa pos komando jang ada di Djakarta ?

Terdakwa : Itu, 20 kira-kira.

Hakim Ketua : Pos Komando ini ?

Terdakwa : Ja, Pos-pos komando ini langsung berhubungan dengan saja. Sedang kebawahnya pos komando ini hanya mempunyai 2 eselon, jaitu pos koordinasi dan pos lapangan.

Hakim Ketua : Hubungan antara pos-pos Komando, pos-pos koordinator dan pos-pos sektor itu bagaimana? Ada hubungannya tidak organisatoris ?

Terdakwa : Tidak ada hubungan.

Hakim Ketua : Tidak ada hubungan ?

Terdakwa : Ja, artinja pos ko.....

Hakim Ketua : Itu pada hal disatu daerah, ada pos Ko dan ada pos sektor didalamnya ?

Terdakwa : Pos Sektor meliputi beberapa wilayah CS.

Hakim Ketua : Beberapa wilayah CS ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dan itu kan dalam satu daerah. Pada sesuatu daerah jang terdjadi adanja baik pos ko maupun pos sektor.?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Ataupun beberapa pos terdapat pada satu daerah ini ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apa tidak ada hubungan ?

Terdakwa : Hubungan organisatoris dalam artian pos-pos itu boleh ngomando sektor, itu jang saja maksudkan.

Hakim Ketua : Tidak ada, tetapi hubungan kerdjanja bagaimana ? Atau koordinasinja antara pos ko dengan pos lainja jang ada daerah sektor itu ?

Terdakwa : Hal itu mempunyai hubungan perorangan sadja.

Hakim Ketua : Perorangan bagaimana ?

Terdakwa : Perorangan, umpamanja Komandan Sektornja itu, seorang anggota Komunis dia lapor kepada CS-nja.

Hakim Ketua : Lalu didirikanja pos ko dan pos koordinator dan sebagainja itu apakah karena tidak bisa mempertjajai pada pembagian sektor itu kurang efficient lalu didirikan Pos Ko-Pos Ko.

Terdakwa : Karena saja anggap sektor itu hanja satu aparat bantuan kepada Lobang Buaja, pos ko-pos ko ini satu aparat jang berdiri sendiri jang langsung saja pimpin, hal itu jang ada tugas-tugas lain jang saja berikan.

Hakim Ketua : Apa tugasnja ?

Terdakwa : Umpamanja mengumpulkan informasi-informasi itu, bisa saja instruksikan kepada Pos Ko.Pos Ko ini.

Hakim Ketua : Apakah didirikanja Pos ko itu karena aparat-aparat dari CDR jang setjara biasa itu tidak bisa diharapkan lagi? Dus adanja hubungan CS CSS

Terdakwa : Ini satu kebiasaan, djadi untuk satu aksi itu biasa ada badan khusus aksi untuk keperluan itu.

Hakim Ketua : Djadi mendirikan pos-pos dsb-nja itu sudah biasa ja ? Berapa kali ?

Terdakwa : Khusus untuk dalam rangka membantu G. 30. S. itu namanja Posko, dan kalau istilah biasa itu.....

Hakim Ketua : Djadi mendirikan Posko itu baru sekali ini ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Belum merupakan satu kebiasaan ?

Dus khusus dalam menghadapi satu persoalan, kemungkinan menghadapi operasi militer ini dan didalam rangka itu didirikan pos-pos Ko, bukan karena tidak bisa mengharapkan dari aparaten biasa, tetapi hanja khusus menghadapi ini ditentukan garis komando jang lain. Begitu ?

Terdakwa : Ja. Dus situasi khusus.

Hakim Ketua : Kepada sektor apa tidak bisa diharapkan, bisa diperintahkan memperoleh informasi.

Terdakwa : Bukan, karena

Hakim Ketua : Kalau hanja sekedar untuk tugas-tugas menjari informasi ?

Terdakwa : Mereka tenaga tjadangan sektor ini jang sewaktu-waktu bisa diperlukan harus membantu operasi militer itu. Karena itu mereka dibawah komando dari Lobang Buaja.

Djadi mereka hanja diperlukan untuk tenaga bantuan operasi militer. Sedangkan posko-posko itu, tidak mengatur kekuatan militer tadi, tetapi apa jang nanti diperlukan langsung oleh saja.

Hakim Ketua : Siapa jang saudara angkat sebagai Komandan-Komandan Posko tiap CS itu ?

Terdakwa : Umumnja kita serahkan kepada CS-CS.

Hakim Ketua : Kemudian kan terus diangkat ini adalah Komandan Posko ?

Terdakwa : Itu tidak pakai pengangkatan dan petundjuk supaja diambilkan dari salah satu pimpinan CS disesuaikan dengan

Hakim Ketua : Nah, lalu saudara kalau itu komandan Posko, dari mana kalau tidak tahu orangnja jang mana ?

Terdakwa : Itu umumnja ada laporan.

Hakim Ketua : Ada laporan bahwa jang diangkat ?

Terdakwa : Bahwa ada beberapa CS malahan saja kontrol langsung.

Hakim Ketua : Tapi saudara ketahui/tidak siapa-siapa Komandan Posko itu ?

Terdakwa : Saja ketahui.

Hakim Ketua : Jang ada di Djakarta ini? Siapa ?

Terdakwa : Umumnja Sekretaris atau wakil Sekretaris CS.

Hakim Ketua : Jang mendjadi Komandan Sektor ? Umumnja ?

Terdakwa : Jaitu ada jang kami ambilkan wakil sekretaris, ada jang

kader CS.

Hakim Ketua : Djadi ada jang dari wakil Sekretaris ada jang dari Kadernja jang tidak menduduki dalam sekretariat CS itu ? Djadi orang luar sama sekali ?

Terdakwa : Tapi umumnja dari Komite dan bukan pimpinan.

Hakim Ketua : Djadi bukan Sekretaris atau Wakil Sekretaris. Ada Sekretaris atau Wakil Sekretaris jang diangkat mendjadi Komandan Sektor ?

Terdakwa : Sekretaris umumnja tidak.

Hakim Ketua : Ada Sekretaris jang diangkat mendjadi Komandan Posko ?

Terdakwa : Sekretaris itu ada.

Hakim Ketua : Sebabnja apa kok malah Sekretarisnja didjadikan Komandan Posko, malah ini jang untuk operasi militer jang perlu malah seorang Wakil bahkan dari luar, tidak seperti biasa ?

Terdakwa : Berhubung kalau sektor itu khusus boleh bilang pekerjaan bantuan militer itu sadja sedangkan posko jang saja kemukakan itu bisa matjam-matjam ketjuall bantuan militer.

Hakim Ketua : Ketjuall dasar pertimbangannja mengapa malah sekretaris tidak wakil sekretaris cs, jang diangkat mendjadi Komandan Posko.
Kapan itu selesai membentuk Posko. Pos-pos Koordina-
tor pos-pos Lapangan ?

Terdakwa : Itu umumnja sampai tanggal 20 September.

Hakim Ketua : Dimulai sedjak ?

Terdakwa : Umumnja sedjak selesai tanggal 20 September itu maka dilakukan kontrol tjekking.

Hakim Ketua : Dikeluarkannja itu kapan untuk membentuk Posko-Posko itu ?

Terdakwa : Jaitu semua ini disekitar permulaan September jang saja sebut tadi.

Hakim Ketua : Dimulai awal sampai kira-kira tanggal 20 September tapi dilakukan pemeriksaan oleh saudara Njono sendiri ?

Terdakwa : Beberapa tempat.

Hakim Ketua : Djadi siapnja itu kira-kira atau selesainja membentuk dan kemudian saudara kontrol atau adakan tjekking itu tanggal 20 September ja, lalu didalam pemeriksaan Pendahuluan saudara pada suatu ketika mendengar atau mengetahui adanja hari H dan djam D nja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Kapan kira-kira tahunja hari H dan djam D ?

Terdakwa : Jaitu tanggal 29 September sore.

Hakim Ketua : Sore artinja ?

Terdakwa : Djam 5 sore.

Hakim Ketua : Dari siapa itu ?

Terdakwa : Dari kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Dimana ?

Terdakwa : Dirumah.

Hakim Ketua : Dirumah Njono ?

Terdakwa : Ja, berhubung rumah saja belakangnja kantor kerdja saja.

Hakim Ketua : Djadi Sukatno datang kerumah pada tanggal 29 September ± djam 5 sore memberi tahukan bahwa hari H adalah itu dan djam D adalah itu ja, apa jang disebutkan hari H dan djam D nja itu berapa ?

Terdakwa : Jaitu ± nanti tanggal 30 mendjelang hari.

Hakim Ketua : Hari apa waktu itu.

Terdakwa : Pokoknja hari Djumat mendjelang fadjar jaitu kongkritnja sudah tanggal 1 djam 4 itulah hari H dan djam D.

Hakim Ketua : Waktu diberikan itu tanggal 1 atau tanggal 30 ?

Terdakwa : Oo disebut hari Djumat.

Hakim Ketua : Djadi tidak disebutkan tanggal ?

Terdakwa : Oo bukan.

Hakim Ketua : Djadi hari sadja jang ditentukan mendjelang fadjar.

Terdakwa : Ja mendjelang fadjar.

Hakim Ketua : Ja mendjelang fadjar tidak ditentukan djam berapa ?

Terdakwa : Ja ditentukan djam empat.
Itu kalau djamnja disebutkan empat tapi kalau harinja tidak — tanggalnja tidak disebutkan.

Hakim Ketua : Djadi hari Djum'at djam 4 pagi, ja Djum'at jang mana tidak ditanjakan ?

Terdakwa : Oo pada waktu itu sudah tanggal 1.

Hakim Ketua : Djadi dia menjebutkan tanggal 1 ?

Terdakwa : Istilahnja waktu itu Djum'at mendjelang fadjar kira-kira djam 4, kongkritnja.

Hakim Ketua : Jang mengkongkritkan siapa Sukatno atau Saudara ?

Terdakwa : Saja.

Hakim Ketua : Sukatno jang mengatakan hari H nja adalah hari Djum'at, djam D nja adalah mendjelang fadjar ?

Terdakwa : Ja djam empat.

Hakim Ketua : Oo djam 4 ja mengatakan djadi saja ulangi hari H nja adalah hari Djum'at djam D nja adalah djam 4 ?

Terdakwa : Ja djam empat pagi.

Hakim Ketua : Saudara tidak menandakan hari Djum'at jang mana apakah sudah diketahui Djum'at ini atau dua minggu lagi jang akan datang, dus hal ini tidak disebut ?

Terdakwa : Djum'at tanggal 1 itu.

Hakim Ketua : Tahunja dari mana ?

Terdakwa : Itu diberitahukan.

Hakim Ketua : Katanja tadi tidak memberitahukan jang mengkongkritkan tanggal itu Saudara ?

Terdakwa : Ja mengkongkritkan sama kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Jang mengkongkritkan kawan Sukatno membenarkan ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Djadi itu membenarkan ja tjotjok begitu ja ?

Terdakwa : Ija ja.

Hakim Ketua : Bukan saudara jang menentukan tanggal 1 nja bukan ?

Terdakwa : Bukan.

Hakim Ketua : Bukan, dus dari Sukatno diperoleh pemberitahuan mengenai hari H dan djam D bahwa hari H adalah hari tanggal satu dan djam D nja adalah djam 9, ee djam 4, maaf, maaf, lalu kemudian mengenai tanggal 1 atau tanggal 30 nja itu tidak diperbintjangkan apakah ini tanggal 30 sebenarnja ?

Terdakwa : Oo tidak.

Hakim Ketua : Djadi saudara mengatakan hari Djum'at itu tanggal 1 ?

Terdakwa : Ja ja.

Hakim Ketua : Ja djam 4 pagi, apa jang dilakukan setelah mendengar mengenai hari H dan djam D. saudara mendengar itu ?

Terdakwa : Ja, setelah mendengar hari H dan djam D itu, saja mengatur lewat bagian PHB CDR jang saja bentuk.

Hakim Ketua : PHB CDR penghubung ja ?

Terdakwa : Ja pemanggilan kepada kawan Sukadi dan Sigatot sebagai Pimpinan CDR bersama saja dan pemanggilan beberapa CS-CS jang mendjadi pembagian daerah CS bagian saja itu saja laporkan tanggal pemanggilan sampai tanggal 30.

Hakim Ketua : Pemanggilannja liwat ?

Terdakwa : Liwat PHB.

Hakim Ketua : Liwat PHB supaja kumpul tanggal 30, dimana ?

Terdakwa : Dirumah saja.

Hakim Ketua : Dirumah saudara, lalu ?

Terdakwa : Kemudian pertemuan dengan kawan Sukatno dan Sigatot, kami bagi supaja datang ke CS-CS jang mendjadi bagiannja, dengan saja beri instruksi jaitu pertama supaja kepada semua kader diberitahukan pada hari Djum'at pagi-pagi tadi itu mendengarkan siaran radio terus. Sektor-sektor itu supaja dikontrol stand bynya, kepada CC kami undang djuga, saja berikan instruksi demikian ketjuali dari PHB itu ada beberapa CS jang diundang.

Hakim Ketua : PHB jang mengundang itu untuk datang ketempatnja Njono, siapa itu ?

Terdakwa : Jaitu jang mendjadi bagian saja CS Senen, Salemba, Matraman itu bagian saja.

Hakim Ketua : Itu sadja tiga ?

Terdakwa : Ketjuali itu saja undang djuga Kampung Melaju.

Hakim Ketua : Dan mereka mengadakan gerakan apa jang diinstruksikan ?

Terdakwa : Ja supaja besok pagi mendengarkan Radio dan supaja mengontrol Pos-Pos dan stand bynya sektor.

Hakim Ketua : Kok bisa ngontrol bagaimana tadi kan tidak ada hujungannja antara sektor ?

Terdakwa : Djadi itu ada dalam salah satu briefing jang tadi pernah dilaporkan itu, dari situ saja mengetahui kalau nanti sudah ada pemberian tahu hari H dan djam D itu, akan ada instruksi dari Lobang Buaja ke sektor-sektor stand by untuk dapat dropping pakaian.

Hakim Ketua : Dari mana tahunja ?

Terdakwa : Dari hasil briefing komandan-komandan sektor di Lobang Buaja, diantara lain saudara Sawal jang melaporkan kepada saja.

Hakim Ketua : Si Sawal itu tadi ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus diketahui akan dilakukan dropping pada hari H dan djam D itu, atas dasar pemberitahuan itu kepada para Pos Ko-Pos Ko diinstruksikan atau diperintahkan

untuk mengetjek stand bynya sektor-sektor itu, ada hasilnya mereka mengetjek ?

Terdakwa : Itu dalam hubungan Komandan-komandan itu bisa ditanya oleh anggota PKI.

Hakim Ketua : Djadi saudara tadi saja tanyakan hubungan, tak mempunyai hak dan wewenang sektor-sektor karena sektor adalah milik — kata-kata milik itu kau pergunakan sendiri adalah milik Lobang Buaja, tapi pada waktu sudah mendekati kejadian itu saudara malah langsung memerintahkan mengetjek sektor-sektor itu, djadi bagaimana ?

Terdakwa : Jang saja maksudkan itu tidak boleh mengaduk, djadi umpamanya sektor gerak ini sektor gerak ini setjara organisatoris, jang bantuan operasi militer itu kami tidak mengetahui dan tidak berhak mengomando.

Hakim Ketua : Tapi mengetjek boleh ?

Terdakwa : Aa mengetjek itu kalau dapat laporan itu bisa.

Hakim Ketua : Untuk apa lalu mengetjeknya mereka sedang call segala untuk kepentingan apa ?

Terdakwa : Untuk kalau tidak djalan baik itu bisa meng-call.

Hakim Ketua : Boleh meng-call ?

Terdakwa : Tidak sebagai Komandan sektor, tapi sebagai kawan CS dalam posisi sebagai Komandan sektor jang dapat tugas dari Lobang Buaja itu tidak baik, itu bisa.

Hakim Ketua : Bisa ?

Terdakwa : Dalam hubungan dia sebagai anggota PKI, sedang bertugas sebagai komandan sektor.

Hakim Ketua : Mmmm disitu letak kemungkinannya adanya hubungan Komando, hubungan negor antara CDR dan sektor, dus ada hubungannya ja ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Lalu saudara katakan dalam mengatur kontrol jang akan dilakukan mengenai membagi tugas kontrol sana kontrol sini apa betul mereka melaksanakan hal itu atau tjekking jang saudara katakan tadi, melaporkan kemudian bahwa sudah dikontrol atau pemeriksaan ?

Terdakwa : Oo jang dimaksud kalau ini laporan jang tugas hari itu.

Hakim Ketua : Didalam rangka sesudah mendengar hari H dan djam D ?

Terdakwa : Laporan setelah stand by hari lain tidak ada, karena sesudah besok harinya sudah terdjadi sesudah laporan mengenai matjam-matjam jang masuk lewat PHB.

Hakim Ketua : Dari antara jang kau perintahkan untuk mengadakan tjekking, siapa itu namanja tadi ?

Terdakwa : Kawan Sukadi sama Sigatot.

Hakim Ketua : Itu tadi tidak ada jang melaporkan telah melaksanakan atau menjelesaikan tugas ?

Terdakwa : Mereka terus tinggal didaerah bagiamja, nanti laporan-laporan dibawa oleh PHB-PHB.

Hakim Ketua : Ada laporan-laporan dari mereka kemudian ?

Terdakwa : Oo tapi tidak khusus mengenai pelaksanaan tugas jang diperintahkan.

Hakim Ketua : Kegiatan apa jang saudara lakukan semendjak tanggal 1 dus semendjak hari H dan djam D itu, apa sadja jang saudara lakukan sebagai kegiatan ?

Terdakwa : Djadi pertama-tama, menerima dan menganalisa laporan-laporan dari PHB mengenai sudah berlakunya itu, jang pertama-tama waktu itu gerakan militer disekitar Gambir dan sekitar Istana, dengan laporan djuga telah didudukinja RRI, sama Kantor Tilgrap Pusat.

Hakim Ketua : Laporan itu dilaporkan setjara lisan atau tertulis ?

Terdakwa : Itu ada jang lisan dan tertulis.

Hakim Ketua : Jang lisan dari siapa terimanja ?

Terdakwa : Itu dari PHB-PHB.

Hakim Ketua : Itu dari PHB kurier-kurier misalnja ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Tapi setjara lisan ja ?

Terdakwa : Ja lisan atau tulisan dikonsentrir di PHB, disampaikan kepada saja.

Hakim Ketua : Na PHB-nja dimana si ?

Terdakwa : PHB kepalanja kawan Batoro.

Hakim Ketua : Kawan Batoro, dan tempatnja dimana ?

Terdakwa : Itu di Kantor CDR sebagian ditempat saja.

Hakim Ketua : Djadi dibagi dua, lalu bagaimana mengenai kegiatan tjoba teruskan ? Mengenai laporan dan menerima sebagai analisa ?

Terdakwa : Jang itu laporan-laporan sampai sore, jang pada pokoknja waktu itu saja mempunyai kesan, bahwa gerakan operasi militer itu mengalami kematjetan.

Hakim Ketua : Dari siapa menerima laporan kematjetan-kematjetan

itu diperoleh ?

Terdakwa : Pertama menerima dropping pakaian, sendjata, beas yang tidak djalan itu satu.

Hakim Ketua : Kapan kira-kira diterimanja pagikah, sorekah ?

Terdakwa : Oo itu umumnja kalau mengenai dropping mulai siang adanja laporan itu. Kalau pagi itu mengenai gerakan militer disekitar Istana.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Dan diperkuat dengan datangnya Komandan sektor Gambir djam 7 malam, lapor bahwa Kantor Tilgrap Pusat Gambir diduduki kembali.

Hakim Ketua : Pusatnja mereka telah menduduki begitu ?

Terdakwa : Pernah diduduki jang kemudian pendjagaannja diserahkan kepada Komandan Sektor Gambir dan waktu itu dilaporkan diduduki kembali dan tanpa perlawanan.

Hakim Ketua : Djadi diduduki kembali tanpa perlawanan, itu kira-kira djam berapa laporannja ?

Terdakwa : Kira-kira sesudah djam 7.

Hakim Ketua : Sesudah djam 7 tanggal 1 ?

Terdakwa : Ja, tanggal 1 malam.

Hakim Ketua : Lalu laporan-laporan apa lagi jang diterima dan analisa apa lagi ?

Terdakwa : Laporan mengenai adanja kematjetan ini diperdjelas dengan saja dengar siaran dari Djenderal Suharto pada djam 8 malam itu, bahwa RRI telah diduduki kembali, ada Komando untuk keamanan dan penertiban.

Hakim Ketua : Diterima sebagai laporan atau mendengar sendiri siaran ini ?

Terdakwa : Oo itu mendengar sendiri dari radio.

Hakim Ketua : Kalau begitu tidak dalam bentuk laporan ja, atau mendengarkan sendiri ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Lalu analisisnja ?

Terdakwa : Berdasarkan itu, kita ambil tindakan kesibukan semantara pada kematjetan dalam operasi militer, sehingga saja minta pada PHB untuk tanja ke Lobang Buaja mentjari kontak ke Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Siapa jang disuruh ?

Terdakwa : Kepala PHB-nja sendiri.

Hakim Ketua : Kepala PHB-nja sendiri saudara Batoro jang dikirim kesana ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Disamping itu saja mengetjek langsung kesektor Salemba, apa benar adanja kematjetan-kematjetan dropping itu dan dari tjekking jang masuk itu memang benar.

Hakim Ketua : Memang benar atas penglihatan sendiri.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Usaha dengan Lobang Buaja itu tidak berhasil, kira-kira tanggal 2 sore kalau tidak salah, lapor kawan Batoro bahwa usaha mentjari kontak dengan Lobang Buaja sudah tidak bisa.

Hakim Ketua : Itu kira-kira tanggal 2 sore, kira-kira 24 djam kemudian ja ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Dan saja pindah tempat kerdja mulai tanggal 2 dari rumah ke Kantor CS Salemba, itu tanggal 2 saja mulai kerdja disitu, tanggal 2 mulai didjalankannja rasia militer oleh tentara jang berpita putih, sehingga lewat PHB saja minta datang beberapa anggauta besok paginja tanggal 3.

Hakim Ketua : Kapan itu ?

Terdakwa : Tanggal 2 malam itu saja mulai.

Hakim Ketua : Tanggal 2 malam itu mulai supaja minta datang berarti sorenja tanggal 3 ?

Terdakwa : Tanggal 3 sore supaja datang beberapa orang jaitu staf CDR Sandjojo, Sutjahjo, Sugih Wiratmono itu. Supaja ketemu saja dirumah kawan Wiratmono.

Hakim Ketua : Sesudah saudara pindah itu ja ?

Terdakwa : Ja, sesudah tanggal 3 sore djam 4, jang saja undang orang-orang itu jang maksudnja mereka akan saja beri tugas untuk mentjek langsung kebenaran laporan rasia militer itu, disamping mungkin ada laporan-laporan lain jang mungkin mereka bisa kuasai.

Hakim Ketua : Jang disuruh mengundang mereka siapa ?

Terdakwa : Melalui tilpon dan melalui kurir kemudian lewat PHB Tapi baru berdjalan setengah djam kami sudah ditangkap.

Hakim Ketua : Tanggal 3 itu, ja ?

Terdakwa : Kurang lebih setengah lima.

Hakim ketua : Djadi baru 1½ (satu setengah) djam sudah ditangkap ?

Terdakwa : Baru setengah djam.

Hakim Ketua : Mereka berkumpul kan djam tiga ?

Terdakwa : Djam empat.

Hakim Ketua : Djadi tanggal 3 djam 4, kira-kira setengah lima ?

Terdakwa : Kami semua ditangkap.

Hakim Ketua : Sudah dibitjarakan apa sadja dalam ½ (setengah) djam tidak ada ?

Terdakwa : Itu baru memulai sesungguhnya.

Hakim Ketua : Baru mulai, lalu akan mulai, djadi baru mulai ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Apa ada jang dibahas ?

Terdakwa : Mestinja, permintaan kepada mereka supaya mereka tjek langsung razzia militer itu. Apa betul ada dan apa tudjuannya. Itu mestinja. Djadi belum sampai diberikan instruksi ini, kami sudah ditangkap.

Hakim Ketua : Terus dibawa kemana waktu itu ?

Terdakwa : KODAM.

Hakim Ketua : Terus !

Terdakwa : Pagi harinja ke KODIM.

Hakim Ketua : Sebagai Sugijono, ja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Kembali dalam rangka/soal penundjukan Komandan-komandan atau penjusunan Pos-pos Komando, Pos-pos Koordinator, dan Pos Lapangan, apakah mereka memang benar-benar pada waktu tanggal 1 (satu) itu benar-benar bisa digunakan kegunaannya ditarik manfaatnja, penjelenggaraannya atau susunan Pospos itu.

Terdakwa : Pada umumnya belum berbuat apa-apa.

Hakim Ketua : Semuanya ?

Terdakwa : Pada umumnya belum berbuat.

Hakim Ketua : Djadi Posko belum bergerak/belum mulai tugasnja ?

Terdakwa : Belum. — Sampai tanggal 1.

Hakim Ketua : Sampai tanggal 3 saudara ditangkap ?

Terdakwa : Ja, belum ada kerdja apa-apa.

Hakim Ketua : Djadi belum bekerdja apa-apa djadi tidak ada gunanja apa-apa saudara membentuk Pos-pos itu, Pos Ko, Koordinator ?

Terdakwa : Kalau tahu sebelumnya tidak ada gunanja memang lebih baik tidak dibentuk.

Hakim Ketua : Dari sekian banyak laporan dan sekian banyak analisa jang saudara buat itu, kesimpulan apa jang saudara buat, kesimpulan apa jang dihasilkan dari pembuatan-pembuatan itu dari laporan jang diperoleh atau analisa jang saudara buat itu ada kesimpulan umum jang bisa ditarik ?

Terdakwa : Seperti saja terangkan tadi, djadi kesimpulan saja ada kematjetan didalam operasi militer jang umumnya baru saja simpulkan waktu itu.

Hakim Ketua : Djadi kesimpulan umum ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Ini atas dasar analisa jang dibuat bahwa droppingnja matjet ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Apa didalam laporan jang ada terima itu djuga ada laporan djuga tembak menembak mengenai vuur Kontak, ada ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Sama sekali tidak ada ?

Terdakwa : Sama sekali tidak ada.

Hakim Ketua : Penembakan-penembakan sama sekali tidak ada, djuga tidak ada laporan ?

Terdakwa : Djuga tidak ada laporan.

Hakim Ketua : Laporan mengenai menempati menduduki suatu tempat jang vital ada laporan ? Dari siapa ?

Terdakwa : Ada dari RRI dan kantor Telegraf jang saja sebut tadi.

Hakim Ketua : Ketjuai itu tidak ada ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dus dari sekian banyak pos Ko dan pos Lapangan untuk mendjaga bangunan-bangunan vital itu laporan baru diterima laporan mengenai RRI dan kantor Telegraf Thamrin apa kantor Pos sentral ?

Terdakwa : Kantor tilpon sentral.

Hakim Ketua : Kantor Telegrapnja jang di.....
Laporan lain ketjuali itu apa jang diterima selain mengenai razia dan mengenai apa lagi laporan, tentu-nya laporan itu tidak dibatasi hanja dalam

Terdakwa : Tanggal 1 itu umumnja mengenai hanja ada gerakan tentara jang berpita putih, disana sini ada razia itu sadja.

Hakim Ketua : Itu sadja tok, lain-lain tidak ada ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dan perintah-perintah setelah didapatkan laporan itu ketjuali laporan jang diperintahkan kepada Ahmad Muhamad dari Gambir supaja menghubungi Lobang Buaja apa lagi ?

Terdakwa : Belum ada perintah lain.

Hakim Ketua : Hanja itu sadja.?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Kepada jang lain-lain, tidak ada perintah lagi laporan menganalisisir dengan mengeluarkan perintah ketjuali jang satu itu ja ?

Terdakwa : Ja tidak ada.

Hakim Ketua : Sama sekali pada pos Ko-pos Ko tidak ada suatu perintah ?

Terdakwa : Maksud saja pada waktu itu ditjek dulu mestinja.

Hakim Ketua : La didaerah jang sudah ditjek saudara sendiri Salemba sama anu ?

Terdakwa : Oo itu mengenai rasia, malah kami kerasia di Salemba, djuga malah kerasia.

Hakim Ketua : Aa artinja apa mau mengetjek disana ada rasia atau tidak ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Untuk mejakinkan silahkan kepada Hakim anggauta.

Hakim Angg. : Dari semua djawaban saudara atas pertanyaan jang (Mj. AL Gani). diadjukan oleh Hakim Ketua itu, saja melihat bahwa banjak jang sesuai dengan BAP. Tetapi dalam satu hal, jaitu mengenai apa jang tadi pagi diperbintjangkan ataupun ditanja, jaitu mengenai permufakatan itu oleh saudara Njono disanggah bahwa jang terdahulu artinja dalam berita atjara Pemeriksaan itu, tidak betul dan jang terachir jang betul jaitu apa jang saudara terang-

kan tanggal 3 Pebruari 1966. Saja melihat, bahwa ini adalah suatu pemikiran jang khusus, mengenai penjangkalan terhadap apa jang sudah didjelaskan terlebih dahulu dalam berita atjara pemeriksaan dan kehususasan itu jaitu bahwa saudara Njono ingin mendjelaskan bahwa kedjadian-kedjadian pada tanggal 1 Oktober pagi dan seterusnya itu adalah mendjadi tanggung djawab saudara sendiri apabila itu disangkal mengenai kedjahatan isi berita atjara jang terdahulu.

Alasan dari pada saudara Njono untuk mengadakan perobahan jang demikian jaitu bahwa karena pertimbangan-pertimbangan Politik, tadi sebetulnja sudah ditanjakan oleh Ketua, tapi untuk djelasnja lagi saja ingin menanjakan Pertimbangan-pertimbangan Politik itu apa ?

Terdakwa : Djadi tadi, telah saja djelaskan karena suasana Komunisto phobi didalam pemeriksaan umum itu, jaitu dan jang dimaksud pertimbangan politik jaitu saja dapat kesimpulan dari pada jang saja saksikan ditahanan itu, telah dilangsungkan kampanye anti Komunis. Bahan-bahan ini jaitu antara lain lihat dari tahanan-tahanan itu sendiri dan djuga dari djumlah tahanan jang saja bisa lihat dan saja tahu bahwa diantara mereka itu banjak jang tidak mengerti apa-apa.

Hakim Angg. : Tidak apa ?

Terdakwa : Tidak mengerti apa-apa, dan dari hal itu dan suasana pemeriksaan saja menarik kesimpulan, maka saja, membuat keterangan jang sesungguhnya tidak benar. Itu jang dimaksud pertimbangan politik, tetapi saja ada kewadjiban menerangkan hal jang benar sebagai bantahan terhadap kampanye anti Komunisnja itu. Tetapi kalau saja adjukan pada waktu itu, saja anggap tidak sesuai dengan suasana umum jang saja kemukakan tadi.

Hakim Angg. : Tapi dari keterangan itu sadja dan dengan keterangan jang baru sadja diberikan kepada Ketua tadi itu saudara membeda-bedakan. Keterangan ini, tetap saja anggap, bahwa keterangan mengenai perundingan itu harus dipisahkan dari pertimbangan-pertimbangan suasana politik. Seperti jang pernah saja adjukan bahwa dari bahan-bahan jang saudara dapat itu jaitu bahwa suasana adalah suasana anti Komunis, itu bukanlah suatu alasan dimana saudara sebetulnja harus menerangkan lain dari pada apa jang sebenarnya. Dan oleh saudara

Njono tadi dijelaskan, bahwa selama pemeriksaan oleh Ouditor itu diperlakukan dengan baik dan biasanja tidak dipaksa untuk menerangkan hal-hal jang iingin diterangkan atau jang sedjelan dengan Oditur. Pemeriksaan itu tanpa siksaan ataupun pemukulan, maka saudara sama sekali tidak mendapat landasan untuk itu, dengan demikian sebetulnja keterangan dari saudara Njono dalam berita atjara Pendahuluan itu, kalau dihubungkan dengan keterangan-keterangan lainnja, dihubungkan djuga dengan kedjadian sebelumnya, bukan sadja di Djakarta tetapi diluar Djakarta, maka keterangan dalam berita atjara pendahuluan itu saja kira jang lebih tepat.

Sebetulnja begini saudara Njono, saudara tidak beragama, saja tidak bisa menasehatkan pada saudara bahwa hukuman jang akan diberikan itu bukan sadja didunia tetapi diacherat dan saudara tidak pertjaja itu, djadi saja tjukup memberikan advis kepada saudara, supaja djangan bohong itu susah, agar djangan anak tjutju nanti semuanya djadi pembohong.

Djadi saja harapkan memberi keterangan jang betul dan tidak usah memungkiri.

Saja akan melandjutkan mengenai pertanyaan lain-lainnja jaitu saudara Sudisman itu siapa ?

Terdakwa : Pekerdjaan sehari-harinja jaitu Kepala Sekretariat CC.

Hakim Angg. : Kenal dengan saudara Sudisman ?

Terdakwa : Kenal.

Hakim Angg. : Dalam rangka persiapan dari pada tenaga tjadangan ini apakah jang pernah djnjatakan oleh Sudisman ?

Terdakwa : Djadi tidak ada hubungan dengan kawan Sudisman.

Hakim Angg. : Hubungan tidak ada dengan kawan Sudisman, tapi apakah dia memberikan advis kepada saudara ?

Terdakwa : Tidak ada sama sekali, hanja ada soal-soal panitia aksi.

Hakim Angg. : Bagaimana ?

Terdakwa : Jang pernah ada menegor Panitia-panitia aksi.

Hakim Angg. : Djadi Sudisman pernah menegor mengenal pos Ko-pos Ko ?

Terdakwa : Ja, mengenai pos Ko-pos Ko.

Hakim Angg. : Selaku apa ia menegor ?

Terdakwa : Ooo, dia sebagai kepala Sekretariat CC.

Hakim Angg. : Selaku Kepala Sekretariat CC PKI ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Kemudian kawan-kawan lainnja misalnja Anwar Sanusi dsb. pernah memberikan bantuan apa dalam soal menjiapkan tenaga-tenaga tjadangan ini ?

Terdakwa : Tidak memberikan bantuan apa-apa.

Hakim Angg. : Advis ?

Terdakwa : Sama sekali tidak.

Hakim Angg. : Ada beberapa istilah jang akan saja berikan lagi jaitu mengenai apa jang sering kali saudara sebut Perwira jang berfikiran maju itu maksudnja apa ? Perwira jang bagaimana jang dianggap tidak maju ?

Terdakwa : Saja tidak memakai istilah Perwira jang berfikiran maju.

Hakim Angg. : Jang saudara pakai perwira apa ?

Terdakwa : Perwira-perwira jang setia kepada Presiden jang mau bertindak mendahului dan seterusnya.

Hakim Angg. : Perwira-perwira jang loyal kepada Presiden, dan sekarang ternjata loyal, ja loyal ?

Terdakwa : Ja menurut kejakinan kami, mereka itu dalam arti bahwa politik Dewan Djenderal itu bertentangan dengan politik Presiden itu dalam hubungan itu.

Hakim Angg. : Saja perlu membentangkan hal ini bahwa saudara berpendapat perwira-perwira ini adalah Perwira-perwira loyal kepada Presiden ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Dan sekarang saudara masih berpendapat bahwa Perwira-perwira jang telah melakukan G. 30. S. ini adalah Perwira jang loyal kepada Presiden ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Baik. — Mungkin saudara Njono selama dalam tahanan itu tidak tjukup membatja ja, saja ingin tanja kepada saudara Njono.

Saudara Njono selaku pribadi dan djuga selaku anggota Politbiro itu, menganggap kepada Pemimpin Besar Revolusi masih menganggap Presiden Pangti ABRI, masih ?

Terdakwa : Ja, masih.

Hakim Angg. : Baik. — PKI itu masih menganggap PBR Pangli ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : G. 30. S. itu saudara anggap sebagai suatu tindakan Perwira yang loyal kepada Presiden, tetapi Paduka J.M. Presiden dengan keputusannya no.: 370/1965 yang waktu menanda tangani ini tidak dipaksakan, dengan jelas mengatakan bahwa maupun dalam pertimbangan atau pun dalam diktum putusannya menyatakan bahwa G. 30. S. ini adalah petualangan kontra revolusi.

Saja ingin tanya kepada saudara Njono, setelah mengetahui Keputusan ini apa tindakan Njono mengenai G. 30. S. ini, terangkan !

Terdakwa : Kalau bisa sekarang mengajukan permohonan kepada Oditur, supaya saja dibolehkan membuat sebagai bahan antara lain pidato-pidato Presiden dalam masa epiloog, karena memang saja sama sekali buta soal itu. Mungkin kalau diperlukan bahan itu Bapak Hakim apabila dimin- ta, memberi kesempatan untuk itu.

Hakim Angg. : Baiklah Ketua, untuk ini tjukup dulu.

(Kemudian kesempatan kepada Hakim Anggota dari AK).

Hakim Angg. : Mengenai latihan di Lobang Buaja, ingin saja tanyakan kepada saudara.

AK (AKBP Taslan SH). : Apakah saudara mengetahui mata pelajaran-peladjaran apakah yang diberikan kepada tenaga-tenaga tjadangan yang dikirim oleh saudara, ke Lobang Buaja ?

Terdakwa : Saja mengetahui dari laporan-laporan yang saja terima, yaitu mereka dilatih rata-rata dalam waktu 3 sampai 5 hari, baris berbaris dan dilatih menembak dengan segala matjam djenis sendjata. Itu yang saja ketahui dari laporan-laporan.

Hakim Angg. : Siapakah yang mengirim laporan-laporan itu ?
AK

Terdakwa : Seperti sudah saja gambarkan kepada ketua tadi itu lewat kawan Sukatno atau orang yang disuruh.

Hakim Angg. : Apakah saudara tahu selama latihan di Lobang Buaja, siapakah anggota dari Politbiro yang sudah meninjau Lobang Buaja ?

Terdakwa : Tidak tahu. Saja sendiri belum pernah kesana.

Hakim Angg. : Apakah ada rentjana dari saudara untuk meninjau Lobang Buaja ?

Terdakwa : Tidak, karena saja sudah pertjaja bahwa pengurus latihan itu sudah tjukup kuat, yaitu kawan Sukatno dengan sudah saja beri tenaga bantuan 3 orang. Djadi saja anggap sudah tjukup kuat.

Hakim Angg. : Saudara Njono, saja akan berbalik kepada rapat Polit- Biro yang ke-3, yang diadakan tahun yang lalu 1965, sebagai mana yang saudara kemukakan pada sidang pagi hari ini, saudara menarik suatu keterangan saudara berdasarkan keadaan suasana politik pada waktu itu. Dalam proses verbaal ada tertulis yang antara lain intinja disini saja batjakan bahwa disepakati untuk menjelenggarakan aksi mendahului rentjana coup d'etat Dewan Djenderal dalam bentuk operasi militer dan membentuk Dewan Revolusi untuk menggantikan Ka- binet Dwikora.

Dua, menetapkan pembagian tugas sebagai berikut : soal-soal militer diserahkan kepada D.N. Aidit, soal-soal politik umum seperti komposisi Dewan Revolusi dan pembagian kader-kader untuk daerah diserahkan kepa- da Dewan Harian Politbiro. Ketiga pembentukan 2.000 tenaga tjadangan untuk mendapat latihan di Lobang Buaja untuk daerah Djakarta Raja diserahkan kepada Njono. Keempat sesuai dengan posnja masing-masing dengan ketentuan bahwa keputusan tentang operasi militer hanya menjadi pengetahuan dari anggota Polit- biro saja untuk mentjegah kebotjoran. Ini ada dalam proses verbaal yang oleh saudara Njono tadi sudah ditarik kembali, dengan alasan yang menurut saja tak dapat dibenarkan.

Tetapi segala apa yang saja katakan barusan ini tadi, saja rasa adalah dalam rangka pembentukan 2.000 tenaga tjadangan yang akan menempuh latihan di Lobang Buaja, yang untuk daerah tingkat Djakarta Raja diserahkan kepada saudara sendiri. Djadi bagaimana itu, saudara mengatakan tidak benar itu keterangan saja dalam Berita Atjara yang telah saja berikan pada Oditur, tapi saudara barusan saja tjeriterakan tadi sesuai dengan Berita Atjara.

Terdakwa : Tadi saja djelaskan, bahwa yang saja lakukan ialah mengirim tenaga tjadangan karena ada permintaan dari Lobang Buaja. Itulah yang benar.

Hakim Angg. : Tidak, itu saja tidak tanjakan, apakah itu ada permintaan, apakah ada inisiatif dari saudara. Itu faktanya ada toh ? Mengenai pengerahan tenaga tjadangan sebanyak 2.000 orang jaitu suatu usaha jang baru sadja saudara terangkan dalam sidang pagi ini, dan djuga ada tertulis dalam proses verbaal jang saudara telah tarik kembali, berdasarkan alasan-alasan jang political dan sebagainya.

Terdakwa : Djadi kalau saja — pertanjaannya bagaimana ini ?

Hakim Angg. : Barusan tadi saudara menarik kembali semua apa sadja jang saudara berikan dalam pemeriksaan. Tetapi kalau kita tinjau tjeritera saudara sebagaimana jang barusan saudara kemukakan pagi ini, jaitu khusus mengenai pembentukan tenaga tjadangan untuk mendapat latihan di Lobang Buaja, itu semua benar bukan ?

Terdakwa : Djadi jang benar adalah bahwa saja telah mengirim lebih dari 2.000, tetapi jang saja sangkal bahwa itu bukan keputusan Politbiro; jang benar adalah atas permintaan dari Lobang Buaja. Djadi kalau soal pengiriman an jang 2.000 itu betul saja kerdjakan.

Hakim Angg. : Djadi penjangkalan saudara itu tidak dispesifisir, tetapi asal ngomong, saja tarik kembali apa jang saja tidak mengetahui itu. Betul tidak ? Rumuskan jang pasti!

Terdakwa : Jang saja akui, saja mengerdjakan adalah pengiriman lebih dari 2.000 tenaga tjadangan untuk dilatih di Lobang Buaja, jang saja sangkal pengiriman lebih dari 2.000 itu tadi dikerdjakan tidak atas putusan Politbiro, tapi saja kerdjakan atas tanggung djawab saja sendiri atas permintaan Lobang Buaja.

Hakim Angg. : Apakah dalam sidang terakhir itu ada ditetapkan pembagian tugas.

Terdakwa : Tadi siang oleh saudara Ketua sudah ditanyakan.

Hakim Angg. : Tidak ada ?
Sdr. Njono, ada pertanyaan lain, apa sebabnya saudara, memakai beberapa matjam nama ?

Terdakwa : Oh itu kebiasaan kerdja, berdasarkan kebiasaan kerdja.

Hakim Angg. : Kebiasaan kerdja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Dari siapa ?

Terdakwa : Dari beberapa pimpinan dari Partai.

Hakim Angg. : Partai siapa ?

Terdakwa : P.K.I.

Hakim Angg. : Partai Kominis ?

Terdakwa : Ja, ja.
Itu jang digunakan oleh orang-orang tertentu, djadi tidak umum.

Hakim Angg. : Berapa orang jang memakai nama seperti saudara ?

Terdakwa : Hanja orang-orang jang berhubungan kerdja langsung.

Hakim Ketua : Langsung kepada siapa ?

Terdakwa : Djadi umpamanya saja itu waktu di SOBSI memakai nama Tugimin, waktu di CDR ini saja memakai nama Rukman.

Hakim Angg. : Nama apa lagi jang pernah Saudara pakai ?

Terdakwa : Jang terakhir waktu ditahan untuk satu setengah bulan, Sugijono.

Hakim Angg. : Apa maksud Saudara atau motipnya itu ?

Terdakwa : Maksudnya, waktu itu supaja kalau dalam hal surat menjurat terutama, itu djatuh kefihak jang tidak berkepentingan itu tidak diketahui, dari mana surat itu datang dan kemana surat itu dikirim.

Hakim Angg. : Itu sampai tidak ketahuan jang berwadajib ?

Terdakwa : Jang tidak berkepentingan.

Hakim Angg. : Mengenai hal apa ? Segala matjam surat, segala matjam ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Angg. : Mengenai soal apa sadja jang saudara laksanakan ini ? Sistim 3 nama dalam soal apa ?

Terdakwa : Mengenai soal-soal politik jang kita anggap baik pakai nama samaran waktu kirim surat.

Hakim Angg. : Tidak menentang pemerintah ? Atau tidak menjokong Pemerintah ? Dan bagaimana tjoraknya ?

Terdakwa : Itu surat-surat mengenai.....

Hakim Angg. : Politik jang bagaimana tjoraknya ?

Terdakwa : Umpamanya politik jang biasa djuga mengenai, saja ambil tjonto..

Hakim Angg. : Tidak usah, bagaimana sadja tjoraknya ?

Terdakwa : Itu menurut perhitungan kita jaitu baik atau tidak.

jaitu kalau surat itu djatuh kepada fihak jang tidak berkepentingan.

Hakim Angg. : Djadi, supaja saudara tidak dapat dipegang, begitu ?

Terdakwa : Ja, umpamanja djangan sampai diketahui dari mana surat itu datang.

Hakim Angg. : Dapatkah saudara sebutkan dalam perbuatan apa sadja jang saudara pakai ini, nama samaran jang bermatjam-matjam ini ? Saudara sebagai anggauta PKI toch bukan Tugimin, bukan Rukma atau lain-lain. Kenapa dalam DPRGR atau MPRS selama bung Njono, dalam perkara urusan mempersiapkan diri dalam melaksanakan idee 30 September ini memakai berbagai matjam-matjam nama ?

Terdakwa : Nama samaran ini tidak khusus dipakai untuk G 30 S ini. Djadi sudah saja pakai, dalam pekerdjaan sehari-hari, umpama nama Tugimin itu sudah hampir 10 tahun. Kalau nama Rukma baru satu tahun lebih, karena saja di CDR baru satu tahun. Djadi bukan khusus untuk G. 30. S.

Hakim Ketua : Ada djuga nama saudara jang dipakai dalam DPR-GR lain dari pada Njono ?.

Terdakwa : Tidak.

Hakim Angg. : Hanja Njono sadja.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Angg. : Apakah saudara tidak pandang apa-apa untuk memakai nama lain ?.

Terdakwa : O, tidak.

Hakim Angg. : Djadi disitu saja anggap Njono, terutama memakai nama lain itu supaja misalnja surat djangan sampai djatuh kepada orang jang tidak berkepentingan.

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Dus supaja tidak dapat diketahui siapa itu jang menulis itu ?.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Angg. : Kalau untuk satu hal jang baik apa salahnja.

Terdakwa : Bagaimana ?

Hakim Angg. : Kalau sesuatu hal jang baik apa salahnja, saudara memakai nama Njono, tidak Tugimin atau Rukma.

Terdakwa : Hal itu umumnja hubungan dengan perhitungan, karena dalam hal jang kami maksudkan terutama kepentingan

itu adalah jang menurut ukuran kami ini masuk golongan jang reaksioner. Jang kami maksud itu djatuh pada golongan reaksioner, djadi kami ambil ini sematjam tindakan kewaspadaan itu karena kami menganalisis soal dalam situasi masjarakat sekarang.

Hakim Angg. : Mengapa ada penggolongan segala sesuatu. Bagaimana.

Terdakwa : Umpamanja djeias ada unsur-unsur sosialis kanan, Masjumi umpamanja.

Hakim Angg. : Diantara ada jang berwadjib sehingga Saudara dalam mengambil tindakan jang melanggar atau sesuatu jang tak patut dilakukan djangan sampai ditangkap.

Terdakwa : Oh tidak.

Hakim Angg. : Mengenai hal lain apa ada laporan kepada Saudara setelah terdjadinja G. 30. S. ini, selain dari pada penduduk an kantor-kantor vital. Laporan apalagi jang Saudara dengar, atau suatu hal jang penting selain daripaada itu ?

Terdakwa : Kalau mengenai operasi militer hanja soal pendudukan kedua tempat itu jang dilaporkan kepada saja.

Oditur : Itu harian Rakjat, apa merupakan Suara resmi dari Partai Komunis Indonesia.

Terdakwa : Harian Rakjat itu resmi.

Oditur : Suara resmi dari P.K.I.

Terdakwa : Ja.

Oditur : Naibahu itu pemimpin Harian Rakjat, itu anggauta CC.

Terdakwa : Bukan.

Oditur : Apa ?.

Terdakwa : Itu hanja pimpinan redaksi.

Oditur : Ja pimpinan, tetapi Harian Rakjat itu organ resmi dari partai ?.

Terdakwa : Ja.

Oditur : Organ itu dipimpin oleh seseorang bukan anggauta PKI.

Terdakwa : O bukan, bukan dari CC, tetapi anggauta PKI.

Oditur : Ja, itu jang saja tanjakan tadi itu bukan dari anggauta CC.

Terdakwa : O, ja, kalau anggauta CC bukan, tapi dari PKI.

Oditur minta kepada Hakim Ketua agar Panitera memperlihatkan surat bukti nomor satu tentang maklumat Naibahu.

Kemudian Panitera memperlihatkan kepada Terdakwa surat bukti No. 1, dan terdakwa menjatakan itu

adalah benar.

Oditur : Itu berbentuk suatu instruksi, jang saudara Njono tadi saksikan, apakah berbentuk instruksi dari Naibahu ?
Terdakwa : Djadi, surat dari Naibahu kepada temannja jaitu kawan Imron.

Oditur : Akan saja tjoba batjakan sebagian dari bunji instruksi itu :

Kawan-kawan Imron Ramlah, harap dikerdjakan :

1. Penjiaran-penjiaran pengumuman-pengumuman Dewan Revolusi, gunakan semua saluran jang ada :
 - a. Lewat siaran-siaran RRI bagian Luar Negeri Inggeris, Perantjis, Arab, Hindu. Mengadjak kaum buruh RRI dengan baik, supaja mereka bersedia terus-menerus menjiarkan, tapi harus ada jang tanggung djawab tentang korreknya penterdjemahan.
 - b. RRI supaja keluarkan instruksinja keseluruhan tanah air agar terus menerus menjiarkan segala pengumuman, dan setelah itu menterdjemahkan kedalam bahasa daerah dan segera menjiarkan :
 - c. Kantor berita Antara bisa menempuh dengan djalan mengundang perwakilan-perwakilan Kantor-kantor Berita Luar Negeri jang ada di Ibu Kota, mendiskusikan pada mereka pengumuman ke-1 dan selandjutnja dekrit-dekrit Dewan Revolusi dengan harapan segera siapkan.
2. Monitoring komentar-komentar Luar Negeri dan Dalam Negeri.
 - a. Segera bentuk team khusus diantara monitoring siaran-siaran Luar Negeri, Radio Centre Kontra Revolusi Dalam Negeri. Sebaiknja team langsung dipimpin Bung Wal dan wakilnja Bung Suprijo.
 - b. Lewat Deplu diminta supaja team monitoring CC djuga diperkuat djumlah dan orangnja ditambah.
 - c. Supaja dengan tjepat monitoring itu dikirim kepada kami, biar dua atau tiga kali sehari.
3. Amankan Pertjetakan Negara dengan maximum, mendesak penguasaan Pertjetakan Negara dan segera lewat Bung Tjuk ke Dewan Revolusi. Kemudian membentuk team buruh pertjetakan chu-

sus dan diberi tugas untuk mentjetak semua pengumuman Dewan Revolusi, pertama-tama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggeris.

Garis untuk Harian-Harian :

a. Supaja semua pengumuman kesatu dan dekrit jang segera akan menjusul editorial menjambut hangat, tindakan Letnan Kolonel Untung jang atas nama Angkatan Darat menjelamatkan Republik dan Bung Karno. Karakter Gerakan 30 September elemen-elemen revolusioner dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh elemen-elemen revolusioner di Angkatan-Angkatan lainnja bertindak mentjegah coup dari Dewan Djenderal jang kontra revolusioner. Berikan salut, dan supaja elemen-elemen dalam Angkatan lainnja mengikuti djedjak Letnan Kolonel Untung.

b. Khusus untuk Harian Rakjat supaja ditjetak dengan tambahan oplaag dibagi-bagi dengan gratis diantara rakjat, khusus diantara Pradjurit-Pradjurit.

4. Lain-lain.

- a. Siapkan sedjak sekarang karikatur-karikatur untuk lebih membikin populer Gerakan 30 September. Bentuk team khusus dibawah corps pengadjar Sarekat Buruh dan Biro Pendidikan sistim Agitprop.
- b. Kawan2 di PNI supaja menjiapkan daftar semua Harian, Madjalah BPS dan orang-orangnja disusun menurut urutan pendirian, pendirian-pendirian menurut tebalnja kontra revolusionernja. Instruksi ini supaja diteruskan djuga kepada kawan Tugimin (ini kurang djelas, karena ini foto copy) dan diteruskan pula kepada bagian Agit supaja Instruksi ini diikuti. Itulah bunji instruksi dari sdr. Naibaho. Dari ini saja mendapat kesimpulan, kalaulah Harian Rakjat itu organ CDR atau organ CC ?

Terdakwa : Itu CC.

Oditur : CC dimana didalamnja termasuk Polit Biro, bukan ?
Organisasinja kan begitu ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Kalau begini menurut keterangan Saudara Njono tadi, maka telah terdjadi pemberontakan besar-besaran dalam PKI. Tidak patuh lagi beberapa orang dari Polit Biro, sebab ini semua, organnja sudah menjiarkan Dewan Revolusi, dan surat perintah untuk memperhebat persoalan Dewan Revolusi; sedangkan tadi, Saudara Njono menjatakan bahwa Polit Biro ini tidak ikut. Djadi sekarang organ jang suaranya ditudjukan kemasjaraikat itu lain suaranya dengan Polit Biro. Ini jang saja tidak ngerti. Tjoba Saudara Njono terangkan supaja saja mudah-mudahan lebih ngerti lagi.

Terdakwa : Ja, jang pertama soal instruksi itu tentu saja terima turunannya, jaitu urusan kawan Naibahu dan kawan-kawannya sendiri, atau mengenai organ dari Harian Rakjat jang waktu itu terbit tanggal 2 itu pertama kalau itu memuat pengumuman-pengumuman dari pada Dewan Revolusi itu bisa difahami, karena memang dianggap itu tjetusan dari Perwira-Perwira jang saja kemukakan tadi jang loyal kepada Presiden. Tetapi pendirian dari pada Polit Biro itu tertjermin didalam tadjuk rentjananja dari Harian Rakjat tanggal 2 itu.

Oditur : Bagaimana bunjinja ?.

Terdakwa : Menurut saja — masih bisa ditjari — itu kurang lebih isinja bahwa tindakan Letnan Kolonel Untung dan kawan-kawannya itu tindakan jang patriotik — begitu kira-kira — tetapi bagaimanapun djuga itu soal intern Angkatan Darat. Terus ditutup dengan satu seruan supaja Rakjat mempertinggi kewaspadaan. Itu sadja, jang lainnja adalah sesuai dengan pendirian dari pada putusan Polit Biro jang memang tidak tjampur tangan dalam soal G. 30. S. itu.

Oditur : Djadi dalam editorial Harian Rakjat tadi tertjermin kata Saudara putusan Polit Biro ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Apa putusan Polit Biro? Putusan Polit Biro akan lapor ke Presiden. Dimaksud disana bahwa tindakan Letkol Untung adalah patriotik. kan begitu? Djadi dalam permupakatan-permupakatan itu sebenarnja Polit Biro sudah menganggap Perwira-Perwira ini patriotik. Bukan sebagai satu hal jang info begitu sadja, tertjermin dalam editorial dalam organnja jang dilemparkan ketengah-tengah masjaraikat.

Terdakwa : Boleh saja djawab ?.

Oditur : Boleh. Silahkan.

Terdakwa : Kalau mengenai itu saja sudah terangkan tadi siang bahwa patriotik — jang dipakai dalam editorial ini kan didalam sidang Polit Biro beberapa kemungkinan politik itu dilihat. Salah satu kemungkinan itu adalah: adanya Dewan Revolusi jang sifat politiknya pada pokoknja adalah anti Dewan Djenderal. Sifat politik inilah jang dianggap patriotik. Dan sebagai kemungkinan, memang seperti saja kemukakan tadi di-kemukakan dalam analisa djadi dalam menghadapi beberapa kemungkinan djalan mana jang baik ditempuh oleh Polit Biro. Itu tidak karena patriotik terus ngeblok ke Dewan Revolusi, tidak. Timbang punja timbang, terus lapor kepada Presiden.

Oditur : Persoalannya, karena ini ada hubungan. Kalau saja sekarang umpamanya mengatakan Saudara Njono patriotik, wah, nanti dulu, saja belum kenal. Tetapi persoalan patriotiknya, Letkol Untung dan kawan-kawannya jang disebutkan oleh Harian Rakjat ini, itu sudah dibitjarakan sebelumnya dalam Polit Biro. Artinja dalam Polit Biro sudah dibitjarakan, bahkan saudara dalam BAP kepada saja, kepada Major Warsito djuga menerangkan begitu, tetapi didalam sidang ini mempergunakan hak mungkir. Kemudian didalam Harian Rakjat ketahuan pula, memang themanja itu selalu soal intern Angkatan Darat. Tetapi Harian Rakjat ini sekarang sudah saudara akui sebagai Harian organ dari pada partai saudara sendiri, membawa suara dari pada partai saudara sendiri. Kemudian setelah ternjata G. 30. S. ditjetuskan memudji-mudji gerakan G. 30 S. itu.

Padahal sebelumnya sudah positip djangan bertindak penentuan langkah selanjutnja setelah ada sikap PJM Presiden, tetapi pada hari G 30 S ditjetuskan pada tanggal duanya dalam editorial dipudji sebagai tindakan patriotik, itu kan berlawanan ada pertentangan.

Terdakwa : Itu saja kemukakan dalam kemungkinan politik jang dihitung oleh Politbiro tadi sudah saja katakan.

Oditur : Djadi sudah dihitung ja.

Terdakwa : Tadi sudah saja katakan bahwa jang dihadapi itu ada beberapa kemungkinan Politik, itu bisa terdjadi lahjr Kabinet Dewan Djenderal, seperti jang saja terangkan

- bisa terjdadi Dewan Revolusi, terus hanja diper-
timbangkan tidak bisa dalam waktu singkat Kabinet
Nasakom ini semua didalam perhitungan.
- Oditur : Kalau ini diperhitungkan kemungkinan politik serentak
setelah G. 30. S. ditjetuskan, serentak itu disetudji ?
Sebab tadi itu ada kemungkinan-kemungkinan disetu-
dji dengan bunji editorial bahwa itu patriotik, dipudji
dan kemudian sebelum itu ada tindakan-tindakan Sau-
dara Njono dan Harian Rakjat ini organ CC bukan
organ CDR. Bolehkah saudara Njono sekarang menga-
takan Politbiro tidak ikut, itu tanggung djawab saja
sendiri, tetapi ternyata Harian Rakjat itu jang kepunja-
an CC tidak sependapat dengan saudara Njono, disitu
jang lutju, djadi organ dari pusat sendiri itu tidak
akan bertindak atau tidak akan menyiarkan berita
keluar jang akan mendjadi konsumsi daripada masja-
rakat apabila apa jang dia siarkan itu bertentangan
dengan prinsip daripada pimpinan partai. Kalau kita
akan melihat bagaimana pendirian Partai Komunis
Indonesia kan melihat Harian Rakjat ? Apa bukan
begitu ?
- Terdakwa : Antara Politbiro dan G 30 S itu dalam satu pendirian
politik itu memang ada persamaannya jaitu dalam tidak
menjetudji Kabinet dari Dewan Djendral, perbedaannya
dalam tjara.
- Oditur : Djadi dalam pendirian politik ada persamaan.
- Terdakwa : Dalam hal menghadapi Dewan Djendral.
- Oditur : Sekarang mengenai Sektor. Apakah Sektor-sektor jang
oleh saudara Njono tadi disusun oleh Lubang Buaja ?
- Terdakwa : Ja.
- Oditur : Djadi tanpa persetujuan saudara Njono bisa disusun.
- Terdakwa : Kalau mereka tidak minta bantuan sama saja bisa,
tetapi jang pokok disini saja bilang, verdeling daripada
sektor itu jang tidak minta persetujuan sama saja
dan memang tidak minta persetujuan.
- Oditur : Jang saja tanja, apakah Lubang Buaja itu bisa mem-
bentuk sektor-sektor itu tanpa persetujuan bung
Njono ?
- Terdakwa : Bisa.
- Oditur : Dari mana dia dapat tenaga ?
- Terdakwa : Soal tenaga ini minta sama saja.

- Oditur : Tapi kalau saudara tidak mengasih, djangan kasih pada
sektor sehingga sektor lumpuh tidak bisa bekerdja.
Sektor itu ada kemudian sebagai tjadangan kepunja-
an bung Njono untuk mengorganisir dan membentuk
tenaga mengomando tenaga tjadangan ini diperlukan
sektor-sektor kan begitu. Kalau mereka membentuk
sektor ini dan Bung Njono tidak memberikan persetu-
djuan apa jang mau dikomando, bukan begitu ?
- Terdakwa : Tidak karena disini saja minta bahwa sektor itu pem-
bagiannya adalah Lubang Buaja itu menentukan pem-
bagiannya sadja.
- Oditur : Djadi pembagiannya sadja, djadi territorial verdeling
begitu ?
- Terdakwa : Hal itu Lubang Buaja.
- Oditur : Tetapi prinsip mengenai sektor itu.
- Terdakwa : Mengenai sektor itu tenaga untuk Komandannya minta
bantuan saja.
- Oditur : Saja sementara sekian dulu.
- Hakim Ketua : Kembali kepada persoalan hari H dan djam D pada
waktu saudara menerima pemberitahuan itu bagaimana
reaksi saudara ? Reaksimu bagaimana atau kaget ter-
perandjat kemudian pada waktu menerima pemberi-
taan ?
- Terdakwa : Djadi tidak kaget.
- Hakim Ketua : Sebabnya ?
- Terdakwa : Pada waktu itu karena ada laporan dari hasil briefing
disana dari saudara Sawal.
- Hakim Ketua : Dari saudara Sawal itu atau dari salah satu ?
- Terdakwa : Saja dengar, nanti akan ada tenaga-tenaga jang
sudah mendapat latihan jang akan dipanggil kembali
ke Lubang Buaja, untuk istilahnya mendapatkan re-
freshing. Lalu dari laporan itu mereka sesungguhnya
akan mulai dikonsentrasi dan djadi kalau sebelumnya
itu saja sudah dapat laporan dari tenaga itu sudah
dipanggil kesana maka saja mengira-ngirakan bahwa
tentu gerakan itu sudah dekat waktunya. Itu pertama
dan saja terangkan jang ini tidak ada diberita atjara,
jaitu dilengkapi diberikan informasi jang diterima dari
kalangan dari Lubang Buaja jang mendjelaskan bahwa
Dewan Djendral dalam rapatnja.
- Hakim Ketua : Siapa, siapa jang memberitahukan ?
- Terdakwa : Kawan Sukatno, informasi jang didapat dari kalangan

Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Itu jang disampaikan kepada saudara bagaimana ?

Terdakwa : Jaitu bahwa Dewan Djendral dalam rapatnja, itu pokoknja sesudah tanggal 20 saja lupa persisnja itu, hanja saja masih ingat tempatnja jaitu di AHM.

Hakim Ketua : AHM ?

Terdakwa : Ja, Akademi Hukum Militer djalan Dr. Abd. Saleh belakang departemen Luar Negeri itu saja masih ingat.

Hakim Ketua : Itu diberitahukannja ?

Terdakwa : Bahwa disitu sudah dibuatkan oleh Pleno DD tentang rentjana Kabinet dan waktu dari pada kup itu.

Hakim Ketua : Hari H dan D nja kup itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu.

Terdakwa : Hal itu jang saja duga pertama dari informasi tentang rapat pleno dari Dewan Djendral itu di AHM, dan pemberian tahu bahwa adanja pemanggilan-pemanggilan sukarelawan tenaga-tenaga tjadangan ke Lubang Buaja maka diperhitungkan waktu sudah dekat, karena itu saja tidak kaget waktu terima pemberian tahu.

Hakim Ketua : Djadi betul apa jang diterangkan didalam BAP jang lalu ja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Perkataannja tidak keras ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Oleh karena hari H dan djam D itu Lobang Buaja bergerak, Njono djuga bergerak dan pos KO-pos KO dan pos Lapangannja dan didalam melaksanakan gerakan itu bersama-sama itu disana disebutkan, bahwa didalam melakukan gerakan tersebut terdapat pimpinan dan tindakan bersama-sama dari unsur Komunis dan Non Komunis jang dimaksudkan.

Ini masih dalam rangka sesudah ada hari H dan djam D maka tiba saatnja Lobang Buaja bergerak, bung Njono djuga bergerak dan memerintahkan mengetjek dan suruh stand by dan sebagainja.

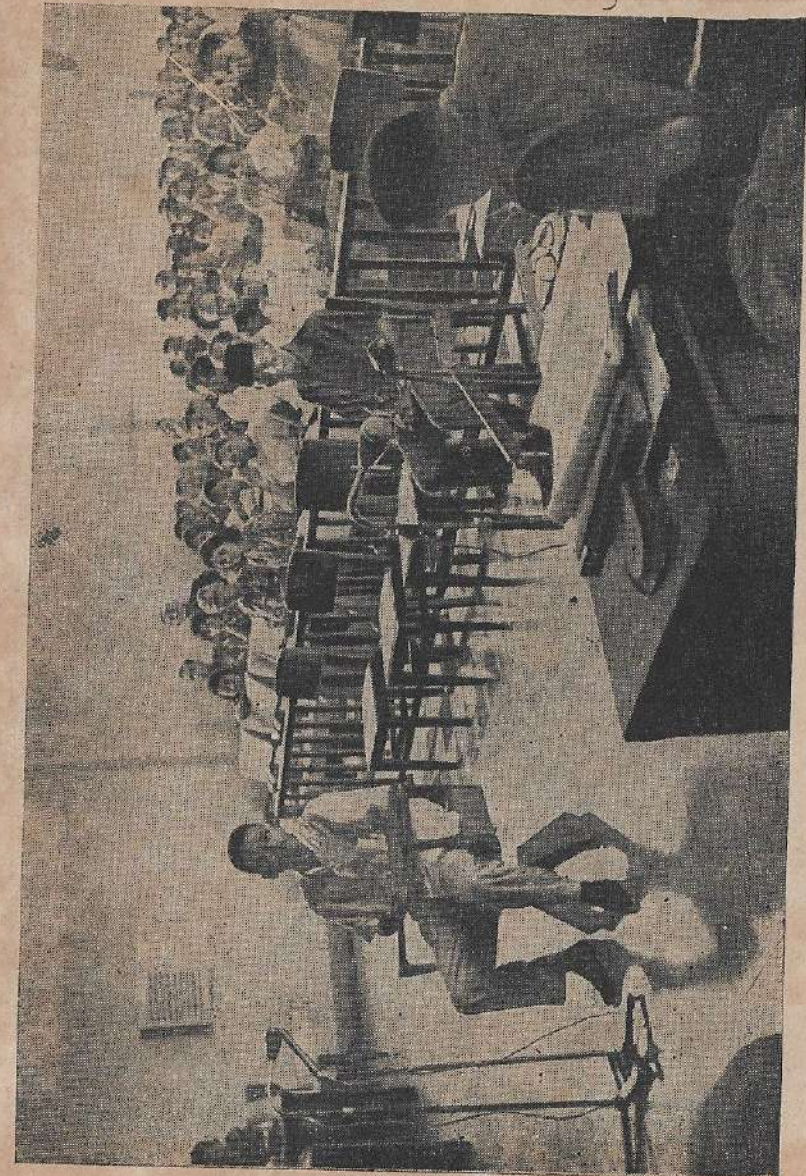


foto KEMPEN.

Tanja djawab antara Oditor dan terdakwa Njono.

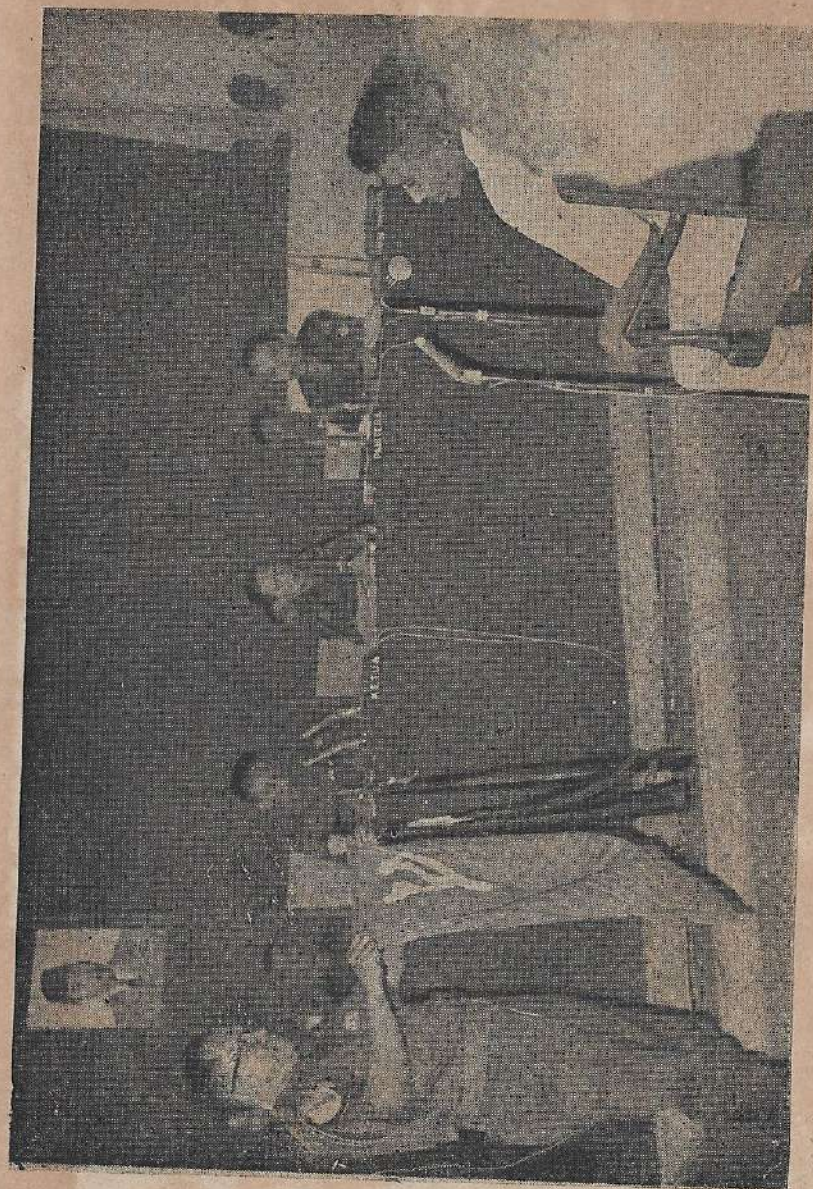


foto KEMPEN.
Oditur memperlihatkan barang bukti sehelai bendera P.K.I. kepada terdakwa Njono.

Didalam gerakan itu terdapat pimpinan dan tindakan bersama dari unsur Komunis dan Non Komunis jang sama ?

Terdakwa : Hal itu jang saja maksud di Lobang Buaja sebagai Komando sentral, disitu setjara garis besar kita tidak tahu mana jang Komunis dan jang Non Komunis sedang unsur Komunisnja itu ialah anggauta CDR.

Hakim Ketua : Khusus CDR-nja dengan pos Ko dan pos Lapangannja ja ?

Terdakwa : Oo bukan itu jang dimaksud, djadi jang Komandonja itu, Komando sentralnja di Lobang Buaja itu dari kalangan Perwira-perwira itu tentu ada unsur-unsur jang Komunis dan jang Non Komunis, hal jang CDR itu memang djelas Komunis seperti saja djelaskan fungsijnja membantu gerakan militer.

Hakim Ketua : Lalu dalam pimpinan dan gerakan bersama itu tersebut seperti saja akui seperti biasa dilakukan dibidang-bidang jang lain tokoh dan kader PKI berusaha mengambil peranan aktif didalam menentukan arah politiknya. Ini tetap ini ?

Terdakwa : Betul. — waktu itu kalau ada maksudnja kalau ada unsur Kom itu memang biasanya unsur Kom aktif.

Hakim Ketua : Terutama didalam menentukan arah politiknya, itu maksudnja apa ?
Antara lain berusaha mengambil peranan aktif dalam menentukan arah politiknya ?

Terdakwa : Hal itu sebetulnja antara lain dihubungkan dengan pertanyaan jang menjangkut arah politik.

Hakim Ketua : Apa jang dimaksudkan ini "dus tokoh-tokoh dan kader PKI berusaha mengambil peranan aktif", (Hakim Ketua membatja dari BAP) dalam menentukan arah politik jang mana ini ?

Terdakwa : Arah politik itu, konsepsi-konsepsi itu maksudnja.

Hakim Ketua : Dalam gerakan bersama jang kongkrit ini apa ?

Terdakwa : Jaitu umpamanja itu Dewan Revolusi umpamanja hal itu supaja susunan djangan melihat dari satu partai tapi dari bermacam-macam partai jaitu umpamanja itu suatu konsepsi politik.

Hakim Ketua : Baik, sekarang mengenai briefing dan info ataupun indoktrinasi kebawah dilakukan pula kampanye. kampanye politik, apa pula yang dilakukan informasi kebawah kedalam tubuh PKI maksud dan tujuan dari pada mengadakan briefing dan kampanye politik apa saja itu isi kampanye apa dan maksudnya untuk apa diberikannya itu kembali saja tanyakan kembali itu, jelaskan !

Terdakwa : Kalau kedalam Partai itu hanya diinformasikan soal bahaya Kup Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Mengenai kampanye politiknya ?

Terdakwa : Itu tidak ada.

Hakim Ketua : Tidak diadakan kampanye politik ?

Terdakwa : Oo kedalam partai kampanye politik itu berbentuk memberikan informasi tentang adanya bahaya DD itu didalam Partai, kalau keluar waktu itu dalam suasana dimana kampanye umum mengenai menggantung Kabir dan lain-lainnya itu memang suasana demikian hal itu diintensipkan.

Hakim Ketua : Didalam juga rangka briefing kebawah mengenai DD itu bersama-sama, dibuat shemanja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu kalau mengenai persoalan G. 30. S. Itu dinjatakan sebagai persoalan intern A.D. kapan itu mengatakannya diputuskannya menjebutkan atau mengkategorisir persoalan itu sebagai persoalan intern A.D. semendjak dalam rapat atau kemudian ?

Terdakwa : Djadi semendjak ada putusan dari Politbiro, semendjak itulah dikatakan bahwa dengan sikap atau tafsiran dari putusan itu dinjatakan oleh kawan Aidit semendjak diambil keputusan itu maka menjadi persoalan-persoalan Perwira-Perwira itu sendiri.

Hakim Ketua : Djadi hubungannya dengan kupasan-kupasan perimbangan militer dan yang lain-lain termasuk juga disana fasilitas yang akan diterima dari AURI apa hubungannya dengan persoalannya dengan intern A.D. itu ?

Terdakwa : Kalau peristiwa Perwira itu terjadi didalam lingkungan AD dan pokoknya itu adalah dilakukan oleh Perwira-

Perwira AD, tetapi dengan situasi menentukan itu yaitu Perwira-Perwira AD ini biasa dapat bantuan dari Perwira-Perwira lain waktu itu saja tahu antara lain umpamanya di Lobang Buaja ditempat latihan itu konsekwensi dari analisa itu.

Hakim Ketua : Artinja ?

Terdakwa : Dari situasi militer itu.

Hakim Ketua : Didalam rangka mengadakan pengiriman-pengiriman tenaga ke Lobang Buaja yang nantinya akan dijadikan tenaga tjadangan dalam rangka membantu gerakan operasi militer itu, apakah sudah bisa diperhitungkan oleh Njono bahwa akan timbul akibat-akibat yang tidak diinginkan misalnya saja dibidang ekonomi sudah diperhitungkan itu ?

Terdakwa : Waktu itu yang jelas saja pikirkan itu mengenai ekonomi ada akibat-akibatnya antara lain waktu itu saja usahakan bagaimana kalau ada gerakan itu lalu lintas darat udara itu tidak terhenti, itu yang kongkrit.

Hakim Ketua : Ini lalu lintas semestinya dihubungkan dengan pengangkutan baik dari bahan pangan maupun sandang, lalu kemudian !

Terdakwa : Itu yang pokok, tapi yang kongkrit sebenarnya saja kerjakan mengenai pengangkutan itu yang saja usahakan supaya jalan terus.

Hakim Ketua : Dengan siapa mengusahakan ?

Terdakwa : Itu mendiskusikan dengan Serikat-Serikat Buruh yang bersangkutan yaitu dalam SERBAUD mengenai angkutan darat dengan SBKA, SBKB dsb.

Hakim Ketua : Kapan itu pembijtaraan kira-kira ?

Terdakwa : Kira-kira diskusi antara tanggal 20 September.

Hakim Ketua : Dibidang keamanan tidak ada pembijtaraan apa-apa, mungkin timbul pengatjauan ada ini ada itu, karena adanya operasi militer itu, tidak ada diperhitungkan kemungkinan itu ?

Terdakwa : Diperhitungkan kemungkinan reaksi dari unsur-unsur bekas Masjumi dan bekas Partai Murba.

Hakim Ketua : Bekas Partai Masjumi dan Murba, sampai perhitungan begitu bagaimana ada reaksi dari bekas partai ini

partai itu ?

Terdakwa : Djadi diperhitungkan bahwa mereka akan menentang pada G. 30 S. itu. Djadi dalam kehidupan politik maka masuk unsur-unsur yang kami anggap tidak setuju, tidak loyal pada politik Presiden.

Hakim Ketua : Dibidang Internasional ada pula diperhitungkan ? djangan-djangan nanti katjau mendjadi keributan yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik ?

Terdakwa : Hubungan luar tjara khusus tidak ada.

Hakim Ketua : Saudara perhitungkan terhadap pengganjangan nekolim !

Terdakwa : Ditinjau setjara khusus tidak ada.

Hakim Ketua : Setjara umumnja tidak saudara perhitungkan ?

Terdakwa : Tidak diperhitungkan. Hanya setjara prinsip bahwa gerakan 30 S. ini akan memperkuat persatuan nasakom, karena itu akan memperkuat front anti nekolim.

Hakim Ketua : Dus hanya sebagai pengertian sadja, tidak karena gerakan ini. Pada waktu gerakan itu dilantjarkan maka terdjadi suatu kekompakan ?

Terdakwa : Ee tidak, konkrit itu tidak ada saja perhitungkan. Jang konkrit yang saja perhitungkan itu adalah.....

Hakim Ketua : Dengan diputuskannja gerakan 30 September maka dapat saja duga bahwa kekuatan nasional itu yang seharusnya diadjukan langsung untuk pengganjangan nekolim akan ban'ak teralih dan terlibat didalam peristiwa tersebut, hingga kontradiksi intern dalam negeri sementara akan menondjol dari pada kontradiksi extern jaitu antara rakjat dengan nekolim. Hal mana djika tidak ada penyelesaian yang tepat akan memperlemah pengganjangan nekolim ?

Terdakwa : Hal itu saja tahu dan saja djelaskan pada oditur, bahwa ini setjara konkrit seperti tadi, ekonomi, lalu-lintas, ini setjara sepintas lalu keamanan, itu setjara sepintas lalu; malah saat itu tidak sedemikian rupa diperhitungkan akibat konkrit seperti kemungkinan reaksi bekas Masjumi.

Hakim Ketua : Sidang akan kami sekors dan akan dibuka kembali besok pagi djam 08.00 dengan ini sidang kami tunda.

SIDANG KE : III.

TANGGAL : 15 — 2 — 1966.

MULAI DJAM : 08.15.

ATAS NAMA : 1. Terdakwa,

2. Saksi-Saksi : 1. P. Pardede,

2. A. Muhamad,

3. Sartaman.

Hakim Ketua : Sidang ke-III Mahkamah Militer Luar Biasa kembali kami buka dan dinjatakan terbuka bagi umum. Oditur silahkan memasukkan terdakwa.

Oditur : Supaja terdakwa dibawa masuk.

Hakim Ketua : Njono, akan saja ulangi, saja resuminir apa yang tadi malam kita temukan didalam sidang ini. Berikan djawabanmu „benar" kalau memang benar telah diutjapkan, dan kalau ada yang tidak benar artinja tidak demikian maksudnja supaja kau mintakan kesempatan untuk memperbaiki, djelas ?

Semalam tadi, atas pertanyaan saja Njono memberikan djawaban bahwa : Atas permintaan Lubang Buaja yang disalurkan lewat Sukatno, pada permulaan September tahun 1965 dilakukan pengiriman tenaga-tenaga yang terdiri dari Pemuda Rakjat, SOBSI, GERWANI, dan PKI ke Lubang Buaja. Kepada para tenaga tersebut dikatakan bahwa tudjuan pengiriman ke Lubang Buaja adalah untuk dilatih sebagai Sukarelawan dalam rangka pengganjangan Malaysia. Pengerahan tenaga dilakukan atau diambil dari CS-CS sedang yang mengatur pengiriman adalah Niko cs. bersama Sukatno. Untuk itu Njono hanya menerima laporan dari pada pelaksanaannya. Seakan-akan pengiriman tenaga-tenaga dari Sukarelawan ini adalah merupakan kelanjutan dari pada latihan yang diadakan sedjak bulan Djuni — Djuli.

Akan tetapi Njono menjadari, bahwa sedjak awal September tahun 1965 itu tudjuan pengiriman antara lain jaitu melatih tenaga-tenaga yang apabila operasi militer dilantjarkan sewaktu-waktu sudah dapat tenaga tjadangan yang terlatih dan dapat dibantukan kepada operasi militer tersebut.

Sektor-sektor yang membagi daerah Djakarta Raya

mendjadi enam buah Sektor, ditentukan oleh Lubang Buaja, sedang kewadjaban Njono adalah mengadakan nama dari Komandan Sektor kepada Lubang Buaja. Kenjataanja selalu disetujui oleh Lubang Buaja. Dengan lain perkataan pembagian batas Djakarta Raya dalam Sektor itu adalah urusan atau ditentukan oleh Lubang Buaja, sedang urusan atau penentuan Komandanja dipertanggung djawabkan kepada Njono.

Terdakwa : Saja mengusulkan diperbaiki.

Hakim Ketua : Bagaimana ?

Terdakwa : Saja memenuhi permintaan Lubang Buaja tentang

Hakim Ketua : Komandan-komandan Sektor ?

Terdakwa : Tjalon-tjalon Komandan Sektor.

Hakim Ketua : Ini masih dalam rangka Komandan Sektor tadi djadi hanya tambahannja sadja didalam urusan penentuan Komandan Sektor itu dipertanggung djawabkan kepada Njono atas permintaan Lubang Buaja, kemudian hubungan organisasi antara Sektor dan Lubang Buaja disalurkan melalui Sukatno, sedang persoalan jang ada diantara sektor dengan Lubang Buaja selalu dilaporkan kepada Njono dalam kedudukan mereka selaku anggota CS-nja, partai disiplin menentukannja.

Njono membentuk pula Pos-Pos Komando, pos-pos Koordinator, Pos-pos Lapangan dengan maksud untuk menggunakan alat-alat ini setjara langsung oleh karena tiadanya wewenang Komando terhadap sektor. Pembentukan pos-pos itu djuga diperuntukkan kepentingan lain dari pada tugas jang diberikan kepada sektor antara lain untuk memperoleh dan mentjari informasi.

Komandan-komandan dari bermatjam-matjam pos tadi ditentukan oleh Njono. Hubungan antara sektor dengan pos setjara organisatoris tidak ada tetapi dalam prakteknja erat sekali karena adanya kesamaan wilayah untuk kepentingannja.

Dus saja ulangi hubungan setjara organisatoris itu tidak ada, pos dengan sektor, karena keatas mempunjai garis masing-masing, tetapi dalam prakteknja mereka mempunyai hubungan kerdja biasa karena ada kesamaan wilayah, betul begitu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Njono, selesai dengan pembentukan POS KO pada tanggal 20 September, persoalan hari H dan Djani D dari pada operasi militer jang akan dilantarkan itu diterima pemberitaannja dari saudara Sukatno tanggal 29, kurang lebih djam 05.00 sore dirumah Njono, reaksi waktu penerimaan pemberitahuan itu adalah tidak verrast sebab sebelumnja saudara sudah menerima laporan-laporan tentang pemanggilan tjadangan jang diperhukan untuk dikonsentrasi di Lubang Buaja „saja menduga bahwa hal itu tidak lama lagi akan terdjadi“, maksudnja bahwa hal itu hari H dan djani D.

Terdakwa : Saja boleh mengusulkan bahwa tidak verrastnja itu selain sudah menerima laporan-laporan djuga karena diperkuat oleh informasi dari Lubang Buaja jang saja terima dari Sukatno, bahwa rapat pleno DD itu jang diadakan sekitar tanggal 20 September itu sudah mematangkan rentjana-rentjana coup d'etat ini.

Hakim Ketua : Terus diperkuat oleh info saudara Sukatno tentang pematangan DD, kapan itu ?

Terdakwa : Sesudah tanggal 23.

Hakim Ketua : Dalam mendjawab pertanjaan apa jang dilakukan oleh Njono sesudah menerima itu, didjawab bahwa setela menerima pemberitahuan segera diminta dari kawan PHB jaitu saudara Batoro untuk menjampaikan undangan kepada kawan-kawan Sukadi, saudara Sidarto dan beberapa Sekretaris CS untuk besok harinja tanggal 30 September datang kekantor dibelakang rumah Njono, ja ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Dan pada tanggal 30 September tahun 1965 kira-kira pada pagi hari djam 09.00 antaranja sampai kurang lebih djam 17.00 sore, mengadakan briefing dengan Sekretaris-sekretaris dan berbagai CS ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Dalam mendjawab pertanjaan kegiatan apa sadja jang dilakukan sedjak tanggal 1 Oktober itu saudara djawab bahwa sedjak tanggal 1 Oktober pagi sampai kira-kira djam 01.00 malam saja menerima laporan dari PHB dan membuat analisa-analisa terhadap laporan tersebut betul ?

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Setelah menerima laporan dan menganalisanja saja

mengusahakan adanya kontak dengan Lubang Buaja melalui tenaga-tenaga PHB dan antara lain pada jam ± 21.00 menurut saudara tadi pada hari itu 1 Oktober telah datang melaporkan Achmad Mohamad dalam kedudukannya sebagai Komandan sektor I, yang melaporkan bahwa usaha untuk menduduki itu gagal oleh karena telah direbut kembali oleh pasukan berpita putih, betul ?

Terdakwa : Betul, tentara berpita putih.

Hakim Ketua : Atas dasar laporan itu, A. Mohamad saja suruh untuk melaporkan atau untuk menjari hubungan dengan Lubang Buaja dan melaporkan situasinya. Betul itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Atas pertanyaan bahwa melaksanakan G. 30. S. terdapat pimpinan dan tindakan bersama dari unsur Komunis dan non Komunis diakui bahwa tokoh dan kader PKI mengambil peranan aktif dalam menentukan arah politik, kejelasannya aktif antara lain dalam mempersoalkan Dewan Revolusi, betul ?

Terdakwa : Sebagai contoh tadi yang Ketua tanja, kemarin saja jelaskan bahwa Dewan Revolusi itu ditentukan oleh Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Kemarin saja tanjakan, apa yang saudara maksudkan dengan kata-kata bahwa didalam rangka kerdjasama unsur-unsur Kom dan Non-Kom dalam G. 30. S. itu tokoh dan kader berusaha mengambil peranan aktif dalam menentukan arah politik tadi, sebagai pendjelasan dijawab bahwa antara lain didalam mempersoalkan politik didalam Dewan Revolusi itu, betul ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Lalu didalam memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dengan adanya gerakan operasi militer yang suatu saat akan dilantjarkan itu, disegi ini saudara sudah bisa memperhitungkannya dan mengusahakan jangan sampai apabila dilantjarkan jangan terdjadi kematjetan-kematjetan antara lain mengusahakan agar didjaga lalu lintas darat dan udara itu supaya berdjalan biasa.

Dalam pertanyaan saja dengan siapa saja dibitjarakan, dijawab dengan SERBAUD, SBKE, SBKA juga oleh Njono sudah bisa diperhitungkan akan timbulnya kesulitan ini dari segi-segi keamanan, mungkin timbul

kembali unsur-unsur bekas Masjumi dan bekas Murba, sedang dalam menghadapi pengganjangan Nekolim, saja batjakan jawabannya kemarin hanya dengan tjatatan bahwa hal itu dilakukan pembitjarannya sepintas lalu menurut Njono.

"Dengan ditjetuskannya G. 30 S. dapat saja duga bahwa kepentingan nasional yang seharusnya ditudjukan langsung untuk pengganjangan Nekolim, banjak yang teralih dan terlibat dalam peristiwa tersebut sehingga kontradiksi intern dalam negeri sementara lebih menondjol daripada kontradiksi extern jaitu antara rakjat langsung dengan nekolim, hal mana djika tak ada penjelesaian yang tepat akan memperlemah pengganjangan nekolim"; pemikiran ini dilakukannya hanya sepintas lalu, yang agak sudah dapat diperkirakan atau sudah dikirakan setjara mendalam, ialah yang mengenai diatas tadi dan melalui kemungkinan timbulnya unsur-unsur Murba dan ex Masjumi.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Oditur, ada pertanyaan yang lain yang akan diadjukan ?

Oditur : Saudara Njono, apakah bung Njono mengetahui adanya pentjulikan dan pembunuhan para pimpinan Angkatan Darat ?

Terdakwa : Saja mengetahui kira-kira tanggal satu pagi kurang lebih jam sepuluh begini.

Oditur : Dari Siapa ?

Terdakwa : Jaitu ada satu laporan, yang dibawa oleh PHB di Gambir yang memberi tahu tentang lolosnya Djenderal Nasution. Itu laporan tertulis, dari PHB.

Oditur : Laporan tertulis dari PHB ?

Terdakwa : Ja, betul begitu.

Oditur : Bagaimana isi laporan itu ?

Terdakwa : Jaitu bahwa Djenderal Nasution bisa lolos dari rumah.

Oditur : Yang lainnya ?

Terdakwa : Yang lainnya tidak ada. Laporan tentang lainnya selengkapnja dari pengumuman penerangan Angkatan Darat yang ditjetak.

Hakim Angg. : Saudara Njono, saudara diminta untuk menjediakan tenaga tjadangan sedjumlah 2000 orang untuk latihan di Lubang Buaja, ingin saja mendapat pendjelasan

berapa tenagakah jang sudah dikirim dari Djakarta Raja dan berapa pula dari daerah ?

Terdakwa : Daerah, maksudnja luar Djakarta ?

Hakim Angg. : Luar Djakarta.

Terdakwa : Jang saja tahu hanja dari Djakarta, jang luar daerah saja tidak tahu dan tidak ada urusan. Jang dari Djakarta kurang lebih 2500 orang.

Oditur : Kemarin saudara Njono menerangkan, bahwa politbiro mempertimbangkan tiga kemungkinan dalam perspektip politik, benar, jaitu tentang kabinet Dewan Djenderal, Dewan Revolusi, Kabinet Nasakom, betul ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Dan politbiro menimbang bahwa Kabinet Nasakom itu belum mungkin, ja ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Bahwa kabinet Dewan Djenderal ditentang ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Bahwa benar Harian Rakjat itu orgaan dari pada partai, suara daripada partai ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Bahwa benar, didalam editorial Harian Rakjat memuat bahwa tindakan daripada Untung es atau G. 30. S. adalah tindakan patriotik dan progresip revolusioner ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Bahwa benar kabinet Dwikora masih mengandung unsur-unsur Dewan Djenderal jang ditentang oleh politbiro ?

Terdakwa : Mengandung unsur-unsur Dewan Djenderal.

Oditur : Ja, bahwa dalam editorial Harian Rakjat ini dinjatakan bahwa dibenarkan tindakan gerakan 30 September jang menjelamatkan revolusi dan rakjat ?

Terdakwa : Kalau tidak salah disitu menjelamatkan.

Oditur : Ini saja kasi lihat Harian Rakjat tanggal 2 Oktober, tjoba saudara batja !

Terdakwa : Jang mana ?

Oditur : Jang itu (oditur menundjuk).

Terdakwa : Bagian kesatu !

Oditur : Ja.

Terdakwa : Tetapi bagaimanapun djuga persoalan tersebut adalah persoalan intern Angkatan Darat. Tetapi kita rakjat jang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi mejakini akan benarja tindakan jang dilakukan oleh gerakan 30 September, untuk menjelamatkan revolusi dan rakjat.

Oditur : Djadi benar bahwa Harian Rakjat telah menjatakan tindakan G. 30. S. atau membenarkan tindakan G. 30. S. betul begitu ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Djadi, kemarin djuga saudara katakan bahwa benar ada persamaan politik antara Dewan Revolusi dan politbiro jang anti Dewan Djenderal ?

Terdakwa : Dalam hal mentjegah bahaja Dewan Djenderal.

Oditur : Ja, sekian tjukup.

Hakim Ketua : Ini surat-surat jang ada didalam tas dan laporan-laporan diterima tanggal satu dan ada jang tanggal tiga pada waktu saudara ditangkap itu.

(Hakim Ketua memperlihatkan bukti-bukti).

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus ini adalah laporan dalam rangka pemberian laporan dan laporan inilah jang saudara analisa, tjoba lihat ini!

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah bung Njono sendiri sudah pernah menerima surat-surat jang berkenaan dengan barang bukti ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah Njonja Sunito ingin melihat surat ini semuanya ?

Pembela : Ja, saja ingin melihat semuanya. Akan kami peladjarinja.

Hakim Ketua : Kami persilahkan, melihatnja dulu.

Pembela : Terima kasih.

Hakim Ketua : Njono supaja mendjawab pertanyaan-pertanyaan saja jang berhubungan dengan surat-surat ini.

Mahkamah memandang sementara ini tjukup pemeriksaan terhadap terdakwa, dan untuk melengkapinja minta agar saksi Peris Pardede dihadapkan.

SIDANG KE : III.

TANGGAL : 15 — 2 — 1966 (djam : 09.00 pagi).

SAKSI : PERIS PARDEDE.

Hakim Ketua : Nama lengkap saudara ?

Saksi : Saudara ketua Mahkamah, sebelum saja memberikan penjaksaan saja, apa boleh saja disumpah dulu ?

Hakim Ketua : Saja tanja dulu nama saudara ?

Saksi : Peris Pardede bin Abdullah.

Hakim Ketua : Lahirnja dimana ?

Saksi : Lahir didesa Lumbanrau Persuburan atau ketjamatan di Tapanuli Utara.

Hakim Ketua : Pada tanggal ?

Saksi : Pada tanggal 26 Januari 1918.

Hakim Ketua : Pekerdjaan terachir ?

Saksi : Pekerdjaan terachir anggota DPRGR.

Hakim Ketua : Dan didalam lingkungan Party Komunis Indonesia ?

Saksi : Saja adalah anggota CC PKI, anggota sekretariat CC PKI disana, dan tjalon anggota Politbiro CC PKI dan ketua komisi kontrol CC PKI.

Hakim Ketua : Alamat ?

Saksi : Djl. Dr. Muwardi I nomer 554 Grogol Djakarta.

Hakim Ketua : Agama saudara ?

Saksi : Protestan.

Hakim Ketua : Dari anggota geredja mana ?

Saksi : H K B P.

Hakim Ketua : Sudah dibaptis, sudah dipermandikan ?

Saksi : Tidak, Protestant lain dari pada Kristen.

Hakim Ketua : Bagaimana, nama baptisnja !

Saksi : Peris Pardede.

Hakim Ketua : Didalam penjaksaan ini, terutama saja tanja dulu ada kesediaan untuk mendjadi saksi ?

Saksi : Ada.

Hakim Ketua : Nah, ada hubungan keluarga sama terdakwa ?

Saksi : Dengan saudara Njono, hubungan keluarga tidak ada.

Hakim Ketua : Kenal, dalam hubungan kerdja ?

Saksi : Dalam hubungan kepartaian ?

Hakim Ketua : Dan hubungan kerdja djuga ?

Saksi : Sama-sama anggota DPRGR.

Hakim Ketua : Dan saksi bersedia disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Menurut agamanja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Saudara penjumpah minta melakukan penjumpahan.

Saksi : Demi Allah nama Bapa dan Roch Kudus, saja bersumpah, bahwa saja sebagai saksi, akan menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnja tidak lain dari pada jang sebenarnja. Djika saja berdusta, saja akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saja.

Hakim Ketua : Djadi saudara Peris Pardede, kesediaan saudara untuk mendjadi saksi sudah saudara berikan, kesediaan untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah itupun sudah dilaksanakan. Saudara dihadapkan sebagai saksi dan akan memberikan kesaksian dalam perkara Njono ini didalam rangka gerakan apa jang disebut G. 30 S. atau GESTOK. Dan untuk itu saja minta agar ditjeriterakan setjara tenang, setjara djelas, dan teratur setjara kronologis kalau bisa dari awal sampai achir apa jang saudara ketahui, apa jang saudara dengar, dan apa jang saudara alami didalam rangka G. 30 S. ini. Djelas ini ?

Saksi : Djelas.

Hakim Ketua : Tjoba tjeriterakan, dari mana saudara akan mulai saja serahkan pada saudara sendiri !

Saksi : Apa boleh tjeritera sambil duduk sadja ?

Hakim Ketua : Silahkan duduk sadja, nanti kalau berdiri dan tjeriteranja pandjang, tjape !

: Terima kasih. Apa jang saja ketahu didalam proloog daripada G. 30. S. ini adalah bahwa pada suatu hari beberapa hari sesudah peringatan 17 Agustus 1965.... pernah diadakan satu sidang Polit-Biro jang diperluas. Saja katakan diperluas karena ketjuali anggauta Polit-Biro jang ada ditanah air, namanja JUSUB ADJITORUP S.H. tapi tidak ada ditanah air, memang tidak hadir, tapi jang hadir disini waktu itu hadir dan jang bukan anggauta Polit-Biro djuga ada, jaitu saja, karena saja baru tjalon anggauta dan kemudian saudara Suwandi jaitu jang kebetulan waktu itu berada di Djakarta. Sekretaris pertama CDB Djawa Timur. Kami berdua dianggap sebagai peserta tidak aktif disitu, Karena bukan anggauta Polit-Biro. Didalam sidang itu Ketua CC-PKI D.N. Aidit telah mendjelaskan perdjalanannja keluar negeri, karena atjara dari sidang itupun adalah mendengarkan oleh-oleh daripada ketua D.N. Aidit tentang perdjalanannja keluar negeri. Djadi ia djelaskalah itu. Perdjalanannja menjertai P.J.M. Presiden ke Kairo jang seharusnya ke Al-djazair pun didjelasannja. Kemudian pengalamannja di Paris, djadi keterangannja pengalamannja selama disana, mengenai keadaan Partai Komunis disana didjelaskan djuga, ia berhubungan djuga dengan Partai Komunis disana, dia djuga berziarah kemakam beberapa orang Partai Komunis disana, orang pertama Partai Komunis disana Maodestoris dan sebagainya. Kemudian ia djuga djelaskan tentang hasil kehadirannja di Kongres Partai Buruh Romania di Bukarest jang dibuka pada tanggal 19 Djuli. Kemudian sesudah menghadiri itu kongres beliau mengadakan perundingan pimpinan PKUS - Partai Komunis Uni Sovjet. Kemudian sesudah itu beliau djelaskan mengenai perkundjungannja ke Tiongkok, jang seharusnya beliau pergi ke Vietnam, tetapi mendapat surat, menurut keterangan beliau dari Sekretariat Negara, jang didjelaskan disitu bahwa beliau harus kembali ketanah air karena P.J.M. Presiden PBR djatuh sakit. Djadi, beliau jang seharusnya pergi ke Vietnam tidak djadi, terus pulang ketanah air, kalau tidak salah pada tanggal 7-8 bersama-sama satu plane bersama tamu DPR GR jang waktu itu djuga hendak menghadiri perajaan 17 Agustus.

Hal itu terutama pokok uraiannja. Pada bagian terakhir tentang uraiannja ini didjelaskan djuga bahwa beliau ini pulang untuk — karena dipanggil — beliau mendjelaskan tentang sakitnja PJM Presiden pada tanggal

4-8-1965.

Beliau mendjelaskan bahwa beliau sudah berkundjung 2 kali ke Istana, bahwa inisiatip beliau djuga membawa team kedokteran RRT, dari sana turut kemari. Beliau mendjelaskan bahwa sudah 2 kali mengundjung Istana melihat sakit beliau. Disitulah ketua D.N. Aidit mendjelaskan tentang seriusnja penjakit PJM Presiden.

Menurut keterangan dokter ahli, sakit ini kalau sekali lagi terdjadi alternatipnja ada dua : of lumpuh of wafat, meninggal dunia, dan kalau sudah lumpuh apalah artinja lagi, kira-kira begitulah. Beliau djuga mendjelaskan bahwa soal sakit ini djuga serious.

Memang, menurut keterangan dokter ahli tadi, kalau PJM Presiden menuruti sepenuhnya apa jang dikatakan oleh Dokter, ja, kemungkinan besar bisa sembuh. Tetapi beliau tidak begitu kuatir, begitu yakin, karena kekangan-kekangan, pembatasan-pembatasan dari dokter ahli itu banyak, bahwa beliau bisa menurutinja itu. Pun beliau mendjelaskan kesibukan dari PJM Presiden jang begitu banyak sedang pembantu-pembantu beliau banyak menggantungkan kepada keputusan beliau. Dan beliau sendiri — PJM Presiden — djuga turut mentjampurkan hal-hal jang sebenarnja djuga lebih banyak bersifat teknis. Tjontohnja beliau waktu itu mengemukakan podium 17 Agustus, misalnja, bagaimana mengatur baiknja. Djuga beliau tjampuri, ja, kata beliau kalau dilihat sebagai manusia biasa, dalam usia jang begitu tinggi, pekerdjaan jang begitu banyak, itu sudah berat.

Ditambah lagi — ini sebenarnja soal prive, saudara ketua, terutama soal keluarga beliau jang ada di Djakarta, membawa beban djuga bagi beliau. Djadi begitulah dibentangannja tentang sakitnja PJM Presiden. Selandjutnja ketua D.N. Aidit mendjelaskan bahwa ternjata bukan hanja kita jang membitjarakan sakitnja PJM Presiden, Pimpinan A.D. djuga membitjarakan soal sakitnja P.J.M. Presiden. Dan menurut info jang beliau terima, begitu, sudah terbentuk ada Dewan Djenderal.

Dan menurut info — begitulah jang diterangkan oleh D.N. Aidit — Dewan Djenderal ini akan melakukan coup dan akan membasmi komunis kalau PJM Presiden sudah meninggal dunia.

Dan diterangkan dengan pandjang mengenai itu, tentang Dewan Djenderal. Kemudian beliau mendjelas-

kan bahwa, dikalangan A.D. juga ada Perwira-Perwira yang tidak setuju kepada Dewan Djenderal. Istilah yang beliau pakai adalah Perwira-Perwira yang berfikir maju..... itulah istilah-istilah yang dipakai beliau dalam menjelaskannya.

Ada perwira-perwira yang berfikir maju yang tidak suka sama Dewan Djenderal. Kemudian saja menerangkan yang sebenarnya pada penutupan (ini sudah agak sore) kemudianlah beliau menjelaskan bahwa Perwira-perwira yang berfikir maju ini menanyakan kepada kami, bagaimana pendapat kami kalau mereka mendahului, itu ditanya kepada kita. Sesudah itu, saudara Ketua Mahkamah mungkin dianggap suatu atjara yang terus masuk begitu sadjalah, djadi timbul pertanyaan-pertanyaan, ada yang bertanya, anggauta yang hadir bertanya, yang bertanya mengatakan:

Apakah hal ini sudah pernah dibicarakan oleh/diakui Polit Biro sebelum disadjikan ini kepada sidang Polit Biro, dan bagaimana pendapat daripada Dewan Harian atau ketua sendiri mengenai soal ini, mana lebih untung, mendahului atau didahului. Kemudian ada yang menanyakan mengenai Dewan Djenderal ini, bagaimana kebenarannya ini, dari mana itu info, dan apakah itu bisa dipertajai. Kemudian juga ada yang bertanya Perwira-perwira yang berfikir maju itu dari mana sadja, dari angkatan mana sadja. Ini dijawab oleh saudara Ketua: Mengenai untung rugi, dua-duanya ada untung, ada ruginja. Soalnya sebenarnya siapa yang lebih dulu mengetahui tentang wafatnya P.J.M. Presiden. Sebab siapa yang dulu mengetahui, itulah yang mempunyai inisiatif. Kalau melihat siapa-siapa yang ada disekitar P.J.M. Presiden, tentulah mereka yang mengetahui lebih dahulu. Karena itu kalau saja persoonlijk, saja pribadi lebih suka sebenarnya mendahului, kata ketua waktu itu.

Kemudian mengenai soal — lupa saja saudara ketua nomer dua tadi persoalan apa — maklum ini umur sudah lanjut djadi suka lupa — mengenai soal, dari angkatan mana sadja, itu dikatakan bahwa Perwira-Perwira yang pikiran maju itu dikatakan ada yang dari Angkatan Darat dan ada yang dari Angkatan Udara.

Kemudian mengenai soal Dewan Djenderal, infonja itu dikatakan mendengar dari berbagai fihak. Dan kami juga tidak terus pertjaja begitu sadja, saudara ketua, kami juga tidak terus pertjaja begitu sadja, saja sudah

tjek, tetapi memang ada, info ini memang kami terima dari pedjabat-pedjabat yang kami anggap kompeten pasti mengetahui soal ini, jaitu disebut oleh beliau waktu itu — menurut ingatan saja — dari kepala Staf BPI (Badan Pusat Intelligent) Brigdjen Polisi SUTARTO. Kemudian beliau mengatakan:

"Walau begitu kami mentjek juga, tentang info ini, karena itu tentang bahan-bahan dokumen mengenai Dewan Djenderal, kami sudah berikan kepada P.J.M. Presiden, kepada Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio dan sebagai pertukaran info juga sudah diberikan kepada saudara Alisastroamidjojo, kata beliau.

Kemudian beliau juga menanyakan: "Djadi bagaimana pikiran dari pada sidang ini, apa setuju tidak, apa bagaimana, mereka-mereka tanya kepada kita". Mereka menanyakan pendapat kita, apa kita setuju kalau mereka mendahului. Tetapi saudara Ketua Mahkamah tak ada yang menjawab.

Sesudah tak ada yang menjawab, dan saja kira juga — ini pendapat pribadi, bagaimana atjara seperti itu terus diminta pendapat yang begitu singkat, tak ada, lalu beliau menanyakan: Apakah ini bisa diserahkan kepada Dewan Harian? Lalu ada seorang yang menjawab, begitu terus diketokkan palu tanda sidang sudah ditutup.

Sebenarnya menurut kebiasaan, saudara Ketua, musti ada pemungutan suara didalam soal-soal begini, hoofdelijke stemming. Tetapi tidak dilakukan, saja tidak tahu apa sebabnya menurut fikiran saja sudah djam tudjuh mungkin beliau hendak menghadiri resepsi, atau mungkin juga dianggap tidak perlu; disambung lagi pada lain waktu, saja tidak tahu.

Soal itu pokoknya begitulah, ja terus ditutup sadja. Djadi pokoknya menurut anggapan saja tak ada putusan apa-apa didalam sidang itu. Sidang itu tidak memutuskan apa-apa, dan atjarapun adalah atjara mendengarkan oleh-oleh ketua dari luar negeri. Nah, itulah ingatan saja saudara Ketua Mahkamah, mengenai didalam proloog daripada G. 30. S. ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentu sadja saja bersedia menjawabnya.

Hakim Ketua: Pertanyaan itu nanti akan saja adjukan, kalau ada hal-hal yang belum jelas, tapi kami minta dilandjutkan

dulu, masih didalam rangka kalau saudara ingin memaknai nama itu juga, proloog itu mengenai pertemuan saudara dengan Sudisman, itu masih ada yang perlu ditegaskan bukan, itu masih dalam rangka proloog bukan ?

Saksi : Baik masih. Djadi kira-kira sepuluh hari setelah sidang itu, saudara Ketua, djadi kira-kira sepuluh hari sesudah itu, maaf apa bulan Agustus apa permulaan September, saja tidak ingat lagi, djadi kira-kira sepuluh hari menurut ingatan saja sudah waktu tjukup pada mereka membitjarakan. Saja tanjakan pada saudara Sudisman dikantor CC PKI Kramat Raja 81, saja tanja pada beliau, kami bitjara empat mata waktu itu, dan tanjakan bagaimana apa ada kelanjutan dari sidang dahulu, dan bagaimana sebenarnya mengenai apa yang pernah dikatakan itu apakah mendahului atau didahului, terus saudara Sudisman menjawab, ja putusannya itu mendahului, artinja ketua D.N. Aidit tjondong kepada mendahului, dan bagaimana mengatasi itu kelemahan-kelemahan, dahulu katanja ada kelemahan-kelemahan, kalau ditjetuskan kalau perwira yang berpikiran maju itu mendahului, jaitu PKI di Djakarta lemah, perwira-perwira yang berpikiran maju juga lemah, dan kemudian juga kuatir bahwa akan dikutuk, tidak disetujui oleh PJM Presiden, hal itu dijawab oleh saudara Sudisman bahwa memang betul lemah, oleh karena itu untuk membantu mereka, akan diperbantukan pemuda-pemuda rakjat pada mereka yang sudah dilatih terlebih dahulu, walaupun mereka sebenarnya tidak suka, perwira-perwira itu lebih suka berbuat sendiri saja, tidak ditjampuri oleh orang-orang sipil, pada mereka kemudian mengenai kemungkinan PJM Presiden tidak setuju dikatakan oleh saudara Sudisman, bahwa kalau aksinja itu hanya ditudjukan terhadap Dewan Djendral saja, saja kira PJM Presiden akan memahaminya, kemudian saja tanjakan lagi kapan itu mau ditjetuskan, dikatakan tidak tahu itu mesti tergantung pada persiapan mereka yang melaksanakan itu. Dan apa arti nama dari pada ini namanya, mereka mengatakan bahwa junta tidak populer, djadi Dewan Revolusi seperti di Kasmir itu yang populer, begitulah keterangannya, saudara Ketua Mahkamah, tetapi ada satu lagi yang juga menjadi persaksian saja yang saja jelaskan, tetapi didalam proses verbal saja sebagai tersangka sudah saja jelaskan,

saja hendak tambahkan disini jaitu karena saja anggap itu serious, jaitu saja menemui saudara Lukman mengenai soal ini

Hakim Ketua : Apakah ini dalam rangka proloog itu ja ?

Saksi : Ja. Dalam rangka proloog. Sesudah itu saja tanjakan pada saudara Lukman, saja tanjakan apakah betul ada putusan mengenai mendahului, saudara Lukman marah pada saja : „Dari mana saudara dengar !” Saja katakan dari saudara Sudisman, kenapa saudara tanja-tanja, saudara sudah tahu dari Sudisman, apa lagi saudara musti tanja saja! Apa lagi yang kamu tanja sama saja, ja mengenai itu saja tidak tanjakan bagaimana sesungguhnya. Dikatakan bahwa apa yang dikatakan saudara Sudisman itu sudah jelas. Kemudian dikatakan oleh saudara M.H. Lukman, lain kali djangan suka tanja-tanja. Kalau pimpinan tahu bahwa saudara sebagai tjalon anggauta politbiro itu perlu tahu, akan diberitahu maka tidak usah bertanja-tanja. Dan apa jg. sudah di jelaskan oleh saudara Sudisman itu adalah fikiran DN Aidit sebelum dibawa ke sidang. Tapi setelah dibawa kesidang putusannya lain, karena itu saudara tidak usah Niewsgierig itu tidak baik. Buat seorang anggauta komunis tidak baik. Demikianlah di jelaskan oleh saudara M.H. Lukman. Nah begitulah tambahan dalam rangka proloog ini.

Hakim Ketua : Pertemuan sdr. dengan M.H. Lukman itu kira-kira tgl. berapa ?

Saksi : Pokoknja sehari kira-kira sesudah dengan Sudisman.

Hakim Ketua : Lalu apa sesudah waktu itu masih ketemu dengan kawan Sudisman lagi ?

Saksi : Tidak ketemu lagi dan tidak mentjeriterakan kepada Sudisman bahwa diperoleh tegoran dari kawan Lukman karena kuatir itu dianggap bersalah.

Hakim Ketua : Minta diteruskan mengenai soal proloog itu pertemuan Sudisman dengan rapat sekretariat itu masih didalam rangka proloog.

Saksi : Rapat Sekretariat, djadi pada suatu hari ingatan saja pada tanggal 29 September, djadi Sudisman ini mengadakan sematjam briefing. Saudara Ketua mahkamah kita Sekretariat ini sifatnja oleh kepala kami biasanja di-

dulu, masih didalam rangka kalau saudara ingin memaknai nama itu juga, proloog itu mengenai pertemuan saudara dengan Sudisman, itu masih ada yang perlu ditegaskan bukan, itu masih dalam rangka proloog bukan ?

Saksi : Baik masih. Djadi kira-kira sepuluh hari setelah sidang itu, saudara Ketua, djadi kira-kira sepuluh hari sesudah itu, maaf apa bulan Agustus apa permulaan September, saja tidak ingat lagi, djadi kira-kira sepuluh hari menurut ingatan saja sudah waktu tjukup pada mereka membitjarakan. Saja tanjakan pada saudara Sudisman dikantor CC PKI Kramat Raja 81, saja tanja pada beliau, kami bitjara empat mata waktu itu, dan tanjakan bagaimana apa ada kelanjutan dari sidang dahulu, dan bagaimana sebenarnya mengenai apa yang pernah dikatakan itu apakah mendahului atau didahului, terus saudara Sudisman menjawab, ja putusannya itu mendahului, artinja ketua D.N. Aidit tjondong kepada mendahului, dan bagaimana mengatasi itu kelemahan-kelemahan, dahulu katanja ada kelemahan-kelemahan, kalau ditjetuskan kalau perwira yang berpikiran maju itu mendahului, jaitu PKI di Djakarta lemah, perwira-perwira yang berpikiran maju juga lemah, dan kemudian juga kuatir bahwa akan dikutuk, tidak disetudjui oleh PJM Presiden, hal itu dijawab oleh saudara Sudisman bahwa memang betul lemah, oleh karena itu untuk membantu mereka, akan diperbantukan pemuda-pemuda rakjat pada mereka yang sudah dilatih terlebih dahulu, walaupun mereka sebenarnya tidak suka, perwira-perwira itu lebih suka berbuat sendiri sadja, tidak ditjampuri oleh orang-orang sipil, pada mereka kemudian mengenai kemungkinan PJM Presiden tidak setuju dikatakan oleh saudara Sudisman, bahwa kalau aksinja itu hanya ditudjukan terhadap Dewan Djendral sadja, saja kira PJM Presiden akan memahaminja, kemudian saja tanjakan lagi kapan itu mau ditjetuskan, dikatakan tidak tahu itu mesti tergantung pada persiapan mereka yang melaksanakan itu. Dan apa arti nama dari pada ini namanja, mereka mengatakan bahwa junta tidak populer, djadi Dewan Revolusi seperti di Kasmir itu yang populer, begitulah keterangannya, saudara Ketua Mahkamah, tetapi ada satu lagi yang juga mendjadi persaksian saja yang saja jelaskan, tetapi didalam proses verbaal saja sebagai tersangka sudah saja jelaskan,

saja hendak tambahkan disini jaitu karena saja anggap itu serious, jaitu saja menemui saudara Lukman mengenai soal ini

Hakim Ketua : Apakah ini dalam rangka proloog itu ja ?

Saksi : Ja. Dalam rangka proloog. Sesudah itu saja tanjakan pada saudara Lukman, saja tanjakan apakah betul ada putusan mengenai mendahului, saudara Lukman marah pada saja : „Dari mana saudara dengar !” Saja katakan dari saudara Sudisman, kenapa saudara tanja-tanja, saudara sudah tahu dari Sudisman, apa lagi saudara musti tanja saja! Apa lagi yang kamu tanja sama saja, ja mengenai itu saja tidak tanjakan bagaimana sesungguhnya. Dikatakan bahwa apa yang dikatakan saudara Sudisman itu sudah djelas. Kemudian dikatakan oleh saudara M.H. Lukman, lain kali djangan suka tanja-tanja. Kalau pimpinan tahu bahwa saudara sebagai tjalon anggauta politbiro itu perlu tahu, akan diberitahu maka tidak usah bertanja-tanja. Dan apa jg. sudah dijdelaskan oleh saudara Sudisman itu adalah fikiran DN Aidit sebelum dibawa ke sidang. Tapi setelah dibawa kesidang putusannya lain, karena itu saudara tidak usah Niewsgierig itu tidak baik. Buat seorang anggauta komunis tidak baik. Demikianlah dijdelaskan oleh saudara M.H. Lukman. Nah begitulah tambahan dalam rangka proloog ini.

Hakim Ketua : Pertemuan sdr. dengan M.H. Lukman itu kira-kira tgl. berapa ?

Saksi : Pokoknja sehari kira-kira sesudah dengan Sudisman.

Hakim Ketua : Lalu apa sesudah waktu itu masih ketemu dengan kawan Sudisman lagi ?

Saksi : Tidak ketemu lagi dan tidak mentjeriterakan kepada Sudisman bahwa diperoleh tegoran dari kawan Lukman karena kuatir itu dianggap bersalah.

Hakim Ketua : Minta diteruskan mengenai soal proloog itu pertemuan Sudisman dengan rapat sekretariat itu masih didalam rangka proloog.

Saksi : Rapat Sekretariat, djadi pada suatu hari ingatan saja pada tanggal 29 September, djadi Sudisman ini mengadakan sematjam briefing. Saudara Ketua mahkamah kita Sekretariat ini sifatnja oleh kepala kami biasanja di-

panggil.panggil itu kalau ada jang perlu dipanggil, begitulah waktu dipanggil beberapa anggota Sekretariat jang ada waktu itu di Kramat raja 81 djadi jang hadir waktu itu menurut ingatan saja adalah sdr. Sudartojo sdr. Djokosudartono dan saja, djadi 3 orang hadir bilang begini : „Djadi dalam rangka turba Oktober kita musti membantu daerah-daerah, Ketua perlu saja terangkan bahwa di CC ada ketentuan tiap bulan Mei dan Oktober CC turba djadi pada waktu itu sudah dekat bulan Oktober kita harus turba dibawah sebagian dari kita harus membantu didaerah, sebagian harus tetap di Djakarta karena pekerdjaan harus tetap berdjalan sebagaimana biasa, tiap daerah-daerah untuk itulah ia terangkan jang perlu diadjukan djuga kedaerah diberikan info tentang DD dan adanja Perwira jang berfikir-an madju itu, djuga diberikan info itu tentang adanja DD rentjana mau coup dan sebagainya mau membasmi PKI dan kemudian dengan adanja Perwira-perwira jang berfikir-an madju jang tidak suka sama Dewan Djendral itu, diterangkan supaja ke daerah-daerah dan kemudian membantu Komite-komite didaerah.

Kemudian diterangkan kita bagi-bagi kemana baiknja: saja akan tjabat anggaota Sekretariat antara lain diterangkan saudara Ketua bahwa mengenai saudara Njono sudah ada tugas di Djakarta djadi dia tidak hadir waktu itu seperti sudah saja terangkan disitu, semendjak pertengahan bulan September saja tidak ketemu saudara Njono. Didjelaskan saudara anu sudah menjatakan mau kesana karena itu saudara Pardede mau kemana, saja terangkan karena dulu sudah ada ketentuan mengenai saja, dari CDB Sumatra Timur bahwa disana akan ada Konferensi Komisi kontrol pada pertengahan bulan Oktober, supaja jang melakukan kesana djangan dua orang, beajanja terlalu banyak, supaja satu orang sadja. Dus komisi kontrol turba satu orang sadja, karena saja djuga ikut komisi kontrol, apa tidak lebih baik Saudara Pardede sadja jang ke Sumatra Timur.

Kata surat itu jang didesposisi : setudju Saudara Parde-de ke Sumatra Timur. Oleh karena itu saja katakan waktu itu, karena sebelumnya sudah ditetapkan bahwa saja ke Sumatra Timur, baiklah saja ke Sumatra Timur sadja. Djadi saja ditundjuk ke Sumatra Timur. Begitulah, Sdr. Ketua Mahkamah.

Hakim Ketua : Mengenai tugas turba tadi, ketjuali informasi kedaerah mengenai Dewan Djendral dan bahajanja, mengenai Perwira-perwira jang berpikiran madju; sakitnja Bapak didjadikan persoalan apa tidak ?

Saksi : Djuga didjadikan bahan.

Hakim Ketua : Betul ? Mengenai persoalan di-atau mendahului, djuga didjadikan ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Tidak, ja ? Tiga sadja jang akan didjadikan thema jang akan dibawa, jaitu :

Pertama, mengenai Dewan Djendral dan bahajanja. Kedua, mengenai Perwira-perwira jang madju, dan jang Ketiga, mengenai sakitnja Bapak jang serius. Dan kemudian saudara berangkat ke ?

Saksi : Kemudian saja berangkat ke Medan. Tetapi sebelum berangkat ke Medan, saudara Ketua, saja menemui saudara Sudisman-kepala kami, kepala Sekretariat, saja katakan sudah di-booking di CIA, saja katakan itu tgl. 28 menurut ingatan saja-, tgl. 28-9. Djadi saja katakan kepada saudara Sudisman, bahwa nama saja sudah di-in-book oleh CIA. Menurut ketentuan CIA saja berangkat ke Medan tgl. 1 Oktober take off djam 05.00 pagi.

Nah, itu saja terangkan, apa pesan-pesan untuk saja, apa jang harus saja kerdjakan disana. Dibentangkan oleh saudara Sudisman ini sudah saja terangkan dalam kesaksian saja pertama tugasmu kesana adalah turba Oktober, dan kemudian Komisi Kontrol. Itu tugasmu jang pertama.

Kemudian, dikatakan oleh saudara Sudisman- mengenai kedua ini, saja kira perumusannja agak berbeda sedikit, oleh saudara Sudisman dikatakan begini : Pertama-tama dengarkan setiap hari RRI Pusat Djakarta agar kau tahu apa jang kedjadian di Ibu Kota.

Dan kalau ada kedjadian jang penting di Ibu Kota, segera merundingkan dengan Saudara Djaludin Sekretariat pertama disana apa jang kau kerdjakan.

Ketiga temui saudara Njoto jang ada disana menurut pikiran saja perhitungan kami kalau nanti saudara ada disana saudara Njoto masih ada disana karena dia akan tiba sebelumnya, sebelum saja, dan memang njatannya

saudara Njoto tiba sehari sebelum saja disana mah,

Keempat beliau mengatakan bahwa saudara disana hanya membantu saja, membantu saudara Djalal, jangan bertindak disana se-olah-olah saudara mengambil pimpinan, saudara tiukup membantu saja.

Kelima saudara tidak boleh lebih dari sebuah disana, turba Oktober itu sebulan saudara Ketua, namanya juga Oktober, jadi selama bulan Oktober saja, sudah itu terus pulang, itulah tugasnya.

Hakim Ketua : Ada beberapa persoalan yang akan saja tanjakan. Pada intinya atau pada garis besarnya, dan malah pada kebanyakan persoalan, keterangan yang saudara berikan ini adalah sesuai dengan apa yang pernah diberikan didalam pemeriksaan pendahuluan. Hanya ada beberapa persoalan, beberapa hal yang untuk kejelasannya saja masih ingin minta untuk diberikan penjelasan.

Ini yang dari belakang, yang terakhir tadi adalah didalam pemeriksaan yang lalu yaitu pada tanggal 26 September, bertempat dikantor CC-PKI sebelum mengadakan tugas-tugas turba kedaerah Sudisman dihadapan para anggota-anggota Sekretariat selama diadakan briefing tentang situasi yang akan dihadapi, setjara ringkas dijelaskan bahwa akan ada gerakan-gerakan oleh Perwira-perwira yang berpikiran maju untuk mendahului tindakan Dewan Djendral. Ini memang betul diberikan begini ?

Saksi : Mengenai mendahului sesudah saja ingat-ingat lagi tidak ada dikemukakan itu saudara Ketua.

Hakim Ketua : Dus pertanyaan-pertanyaan tadi didalam rangka turba itu, turba Oktober, tidak dimasukkan sebagai bahan turba, itu persoalan Perwira maju yang akan mendahului, tetapi bahwa ada terdapat golongan Perwira yang berpikiran maju itu memang dikemukakan, dan dibawa juga kedaerah ?

Saksi : Dikemukakan, dibawa juga kedaerah, pokoknya apa yang dijelaskan dibawa kedaerah.

Hakim Ketua : Jadi mengenai bahwa Perwira maju ini tidak benar bahwa mereka akan mendahului tidak dijelaskan ?

Saksi : Tidak dijelaskan.

Hakim Ketua : Itu satu. Tadi dikatakan bahwa atas pertanyaan saudara Lukman kemudian marah-marah, janganlah sekali-kali

sebagai anggota PKI sebagai tjalon anggota Polit Biro lagi. begitu nioewsgiering menanjakan. Kemudian yang ditanyakan, apa saja yang diteriterakan oleh Sudisman kepada saudara Peris Pardede, sebetulnya ?

Saksi : Bagaimana ?

Hakim Ketua : Dus, pada waktu sudah ditegor kenapa mesti tanja-tanja begitu, kemudian ditanya : Apa sebenarnya yang sudah ditanya kepadamu, begitu betul ?

Saksi : Memang betul.

Hakim Ketua : Lalu kemudian ?

Saksi : Saya katakan, saya jawab sebagaimana penjelasan Sudisman, lalu ia katakan, bahwa itu adalah pikiran kawan Ketua, itu sebelum sidang, tetapi sesudah sidang tidak begitu katanja.

Hakim Ketua : Didjelaskan begitu, dus penjelasan Sudisman tidak benar, bagaimana buktinya tidak benar ?

Saksi : Itu tidak mau lagi saja tanjakan.

Hakim Ketua : Artinya tidak ditanya dan tidak didjelaskan ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Hanya dikatakan, bahwa itu adalah putusan dari kawan Aidit yang dibawa sebelum sidang. Bahwa sekarang tidak diperoleh penjelasan lebih lanjut dan tidak ditanyakan ?

Saksi : Betul, sajapur. tidak tanjakan.

Hakim Ketua : Ini ada lagi penjelasan yang saja mintakan didalam rangka rapat itu, pertanyaan-pertanyaan antara D.N. Aidit dengan kawan-kawan : Bahwa kalau kita setuju mereka mendahului sebagaimana mereka kemukakan itu, Partai tidak akan mengambil bagian ?

Saksi : Tidak akan mengambil bagian. ja.

Hakim Ketua : Tetapi kemudian, seperti kau jelaskan tadi, ditanyakan apakah setuju untuk mendahului, ada suatu kontradiksi, apabila kita tidak ingin mengambil bagian mengapa pula Polit Biro ini harus memberikan persetujuan ? Dalam rangka apa kemudian persetujuan mendahului itu diberikan.

Saksi : Kalau menurut tanggapan saja saudara Ketua Mahkamah.

adalah sebagaimana djuga jang saja terangkan disitu, mereka tanja kepada kami, dan menurut pikiran saja dalam kerdja sama PKI djuga kerdjasama dengan golongan Nasionalis dan golongan lain, itu bisa sadja orang bertanja kepada kita. Dalam arti jang itulah saja anggap djadi ada golongan lain jang bertanja bagaimana pendapatnja, dalam rangka itulah.

Hakim Ketua : Disini dikatakan : Kalau kita setuju, kita tidak akan mengambil bagian. Hubungannja bagaimana ? Kita memberikan persetudjuan waktu ditanja itu, setuju, tapi ta' ambil bagian ?

Saksi : Itulah saja tanjakan, saudara Ketua Mahkamah, ada dua pertanjaan jang terpisah. Ada jang bertanja : Apakah PKI akan ambil bagian aktif didalam itu. Djadi itu dijawab oleh Ketua, betul sesuai dengan pendapat ketua, dijawab oleh ketua, bahwa kita terhadap pertanjaan apa kita ambil bagian, dijawab „tidak“, kita tidak ambil bagian begitu.

Hakim Ketua : Tetapi toh meskipun tidak ambil bagian, perlu memberi persetudjuan ?

Saksi : Meskipun tidak ambil bagian, karena ada pertanjaan, itu dianggap perlu untuk memberikan djawaban, djawaban setuju.

Hakim Ketua : Persoalan setuju/tidaknja, itu ada didalam rangka pemilihan „didahului“ atau „mendahului“.

Saksi : Ja, dalam rangka itu dipersoalkannja.

Hakim Ketua : Kemudian pada waktu Ketua, dalam hal ini D.N. Aidit, melihat bahwa peserta rapat itu belum bisa memberikan keputusan lalu meminta bagaimana kalau persoalan ini diberikan kepada Dewan harian Politbiro untuk memutuskan hal ini, ini betul dia meminta persetudjuan dari sidang Politbiro ?

Saksi : Ja betul, ada seorang anggota jang bilang setuju.

Hakim Ketua : Tidak ada lebih tapi hanya seorang sadja jang mengatakan setuju kemudian diketok, tidak ada protes waktu diketok ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Apakah, apabila ini sudah disetujui artinja meskipun atas dasar seorang suara itu sadja dan kemudian jang lain tidak protes, berarti menjerahkan wewenang/menjerahkan kekuasaan kepada Dewan Harian Politbiro

untuk memutuskannja ?

Saksi : Menurut ketentuan jang berkaku bagi kami tidak, karena ditentukan harus ada.

Hakim Ketua : Tidak menurut ketentuan, tapi dalam soal ini ?

Saksi : Djadi itu sebetulnja tidak sjah.

Hakim Ketua : Sebenarnja tidak sjah, djadi ?

Saksi : Djadi tidak ada putusan apa-apa, tidak menerangkan keputusan, djadi sebenarnja kepada dewan harian tidak menjerahkan wewenang mengambil keputusan.

Hakim Ketua : Apabila hal ini diserahkan kepada Dewan harian maka sebenarnja keputusan jang diberi oleh Dewan Harian Politbiro akan mengikat djuga kepada Politbiro ?

Saksi : Ja, hal ini karena suatu keputusan.

Hakim Ketua : Tetapi karena hal ini dikerahkannja tanpa memenuhi prosedur normal atas keputusan Dewan Harian tidak membawa ikatan apapun kepada para anggotanja, begitu ?

Saksi : Ja, betul.

Hakim Ketua : Kemudian saja tanjakan pada waktu ada suara setuju, sekali lagi saja tanjakan itu, diketok. Baik sesudah rapat itu ataupun waktu kemudiannja apakah tidak ada seseorangpun jang menjatakan bahwa apapun putusan Politbiro, saja tidak akan mengikatkan diri pada keputusan jang akan diambil oleh Dewan Harian, pernah ada suara begitu ?

Saksi : Begini saudara Ketua Mahkamah, karena saja seorang tjalon jang tidak mempunyai hak suara dalam sidang itu tentu dari pihak saja tidak bisa, sebab tidak ada hak.

Hakim Ketua : Djadi bagaimana dengan soal itu ?

Saksi : Sebenarnja bisa ditanja kepada anggota Politbiro, pendeknja sesudah itu Ketua D.N. Aidit tidak lagi mengadakan sidang Politbiro, memang normal dalam organisasi selalu diadakan protes.

Hakim Ketua : Kemudian, saudara katakan pada waktu menemui Sudisman dan menanjakan bagaimana apa sudah ada keputusan dewan harian politbiro, dengan nada jang serious saudara Sudisman menjawab sudah. Tetapi tidak menerangkan pada sidang jang mana diputuskan

atau kapan, yang memberikan keputusan-keputusan siapa. Lalu apakah ini tidak merupakan suatu ikatan, oleh karena sudah diputuskan oleh Dewan Harian. Sedangkan saudara boleh menolak, oleh karena bukan suatu kekuasaan yang diberikan kepada Politbiro untuk mengambil keputusan. Ini saja lihat suatu kontradiksi lagi, antara soal yang normal dan yang tidak normal ini dan apakah didalam yang abnormal ini memang sebenarnya Dewan Harian Politbiro ini berwenang untuk mengambil keputusan tanpa kekuasaan yang diberikan oleh anggotanya ?

Saksi : Karena itulah, saya hendak jelaskan bahwa didalam Partai kami karena tidak setiap hari ada sidang memang ada kadang-kadang juga pendapat D.N. Aidit itu sudah dianggap, itu sering terjadi dan memang tidak correct, tapi karena ia Ketua maka pendapat itu mengikat. Tetapi setjara organisatoris tidak benar, dan disitu dalam pendjelasan kepada Ketua Mahkamah sudah saja jelaskan bahwa saudara Sudisman mengatakan bahwa Ketua D.N. Aidit tjondong, djadi ia juga menekankan kepada Ketua.

Hakim Ketua : Djadi "tjondong" dikemukakan dalam soal ini. Tetapi keputusannya ternyata tetap akan sesuai dengan keinginanannya ?

Saksi : Djadi artinya, saya menapsirkan begitu, kalau begitu dengan ditambah keterangan M.H. Lukman, memang rupanya pendapat seorang saja baru, pendapat D.N. Aidit.

Hakim Ketua : Meskipun saudara katakan bahwa sering-sering pendapat kawan Aidit dijadikan sebagai pendapat yang resmi, apa misalnja, diluar ini ?

Saksi : Hanya soal-soal yang kecil misalnja mengenai soal Kader, djadi dimana baiknja ditempatkan ditanyakan dulu kepada D.N. Aidit. Pendapatnja itu biasanja sering dituruti walaupun itu nanti harus dipertanggungjawabkan, dengan sendirinja dipertanggungjawabkan, djadi ada keputusan sementara dari Ketua tetapi dipertanggungjawabkan.

Hakim Ketua : Dalam rangka ini, bagaimana ?

Saksi : Dalam rangka ini, kalau menurut pikiran saya ketjondongan ketua D.N. Aidit ini pada suatu waktu harus dipertanggungjawabkan juga kepada organisasi.

Hakim Ketua : Sebelum sidang Politbiro CC-PKI itu yang diperluas, apakah sudah pernah mendengar desas-desus ataukah mendengar info, ataupun dari djurusan mana datangnja berita mendengar persoalan Dewan Djenderal ?

Saksi : Pernah.

Hakim Ketua : Pernah ? Djadi sebelum sidang Politbiro CC-PKI itu ?

Saksi : Ja, sudah pernah mendengar.

Hakim Ketua : Kapan ?

Saksi : Ja sebelumnya.

Hakim Ketua : Kalau begitu artinya ada lagi suatu keterangan yang bertentangan dengan yang sudah diberikan. Dalam keterangan yang lalu, oleh karena itu saja katakan pada pokoknja, pada intinja untuk garis besarnya sama, tetapi ada hal-hal yang kontradiktif yang ingin saja mintakan kedjelasannya. Didalam djawaban saudara yang sudah diberikan pada waktu yang lalu, sebelum sidang Politbiro CC-PKI yang diperluas itu :

Saja, belum pernah mendengar adanya Dewan Djenderal dan adanya rentjana untuk menggulingkan Pemerintah yang sjah. Apakah ini belum mendengar adanya Dewan Djenderal yang akan mengadakan coup, ataukah belum mendengar adanya Dewan Djenderal tok. Mengenai apa yang belum ?

Saksi : Ja, mengenai itu, mengenai coup Dewan Djenderal. Karena itu diadakan pertanyaan.

Hakim Ketua : Lalu mengenai Dewan Djenderal kira-kira kapan meskipun itu pada sebelum sidang, kira-kira djangka waktunya, ataukah dalam tahun 1964.

Saksi : Menurut ingatan saja kira-kira sesudah bulan Djuni.

Hakim Ketua : Sesudah bulan Djuni tahun 1965 ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Lalu mengenai persoalan CC PKI, apakah sebenarnya "sidang politbiro yang diperluas" itu sebenarnya sudah geijkt atau hanya asal diberikan nama saja untuk sebutan ?

Saksi : Dalam pemeriksaan pendahuluan sudah saja jelaskan bahwa itu sebenarnya sebutan dari saja sendiri, karena saja lihat ada dua orang yang bukan anggota politbiro hadir. Saja menyebutkan diperluas, tjalon Politbiro hanya saja, yang lain bukan.

Hakim Ketua : Bukan tjalon anggota politbiro ?

Saksi : Bukan, kalau saja tjalon.

Hakim Ketua : Didalam rangka para perwira jang maju itu, jang berkeinginan untuk mendahului Dewan Djenderal dan mereka hanya mengharapkan persetujuan sadja itu, apakah oleh kawan-kawan Aidit pada waktu itu tidak dijelaskan mengapa perwira-perwira itu minta persetujuan dari sidang PKI !

Saksi : Tidak dijelaskan, dan djuga tak ada jang bertanja.

Hakim Ketua : Tak ada jang bertanja ?

Didalam sidang politbiro jang diperluas itu, beberapa anggota jang hadir tentunja mengadakan pertanjaan. Apakah saudara ingat berapa orang jang mengajukan pertanjaan, dan kira-kira apa jang ditanjakan ?

Saksi : Kalau jang ditanjakan itu orangnja ?

Hakim Ketua : Orangnja, orangnja siapa dan apa jang ditanjakan ?

Saksi : Jang positif saja ingat jang bertanja waktu itu pak Sakirman, tapi begitulah, ingatan setjara kurang positif ada djuga jang saja kemukakan disitu bahwa saudara Njono djuga tanja djuga saudara Anwar Sanusi, tetapi persis apa jang ditanjakan masing-masing saja tidak ingat.

Hakim Ketua : Djadi waktu itu belum ada penetapan waktu, baru ada pertanjaan-pertanjaan sadja.

Didalam rangka turba, saja ingin menanjakan dan minta pendjelasan lebih landjut kepada saudara, ada saudara beri djawaban kepada penanja (pemeriksa) waktu itu, jaitu : "Saja ini tidak tau tugas-tugas jang bersifat umum jang diberikan kepada Sekretaris CDB dalam rangka G. 30. S. ini". Kalau tidak diketahui tugas-tugas jang bersifat umum, apakah saudara Peris Pardede mengetahui tugas-tugas khusus jang diberikan kepada CDB-CDB itu ?

Saksi : Tidak, hanya jang bersifat umum sadja, tidak tahu djuga jang khusus.

Hakim Ketua : Seharusnja tidak perlu disebutkan kata-kata jang umum dan karenanja dalam hal ini jang chususpun tak diketahui dan tak ditanjakan.

Lalu saudara sebelumnja diberitahukan oleh Sudisman — sebelum berangkat ke Medan untuk turba — "Bantulah CDB, tetapi djangan mengambil oper jang bersifat pimpinan", dan dijelaskan : "Tugasmu hanyalah mem-

bantu". Dalam hal apa membantu itu ?

Saksi : Dalam rangka umum.

Hakim Ketua : Ja, bagaimana itu ?

Saksi : Djadi ada tugas-tugas umum/routine, sebab biasanya orang CC ini jang merasa dirinja dari pusat, begitulah biasanya terus ia mendikte didaerah.

Hakim Ketua : Itu jang dikatakan mengambil oper pimpinan ?

Saksi : Ja, itulah jang dimaksud.

Hakim Ketua : Lalu kemudian ?

Saksi : Membantulah.

Hakim Ketua : Hanya membantu sadja ?

Saksi : Ja, tugasnja hanya membantu sadja. Kami hanya membantu sadja, jang lebih tahu disana. Begitulah kira-kira.

Hakim Ketua : Dus hanya membantu dalam kegiatan apapun sehari-hari disana, itu maksudnja ?

Saksi : Jalah.

Hakim Ketua : Didalam kegiatan daripada CDB dibutuhkan bantuan apa sadja ?

Saksi : Artinja begini, bukanlah kalau dalam arti membantu, tentu pada kita bantuan apa sadja, djuga dalam bantuan ekonomi.

Hakim Ketua : Didalam rangka bantuan itu ja ?

Pada suatu djawaban pertanjaan jang disampaikan itu saudara berani menjatakan bahwa pada waktu saja menghadiri sidang politbiro saja tidak menjadari tentang beleid Politbiro CC PKI sebagai perentjana tunggal, tetapi sekarang, dus pada waktu diperiksa itu, saja berpendapat bahwa Dewan Harian Politbiro CC PKI adalah perentjana, pendorong, dan pemimpin gerakan 30 September. Saja ingin menanjakan sekarang apa dasar fikiran saudara jang membawa pada pendapat jang sedemikian ?

Saksi : Saudara Ketua, pertama sebelum pertanjaan itu diadjukan kepada saja, pada saja dijelaskan, bahwa menurut pengakuan Letnan Kolonel Untung, Letnan Kolonel Untung hanya wajang sadja, tidak ambil bagian apa-apa. Saja katakan pada waktu itu, saja menilai tinggi TNI kita, Letnan sadja kemampuannya sudah besar, kok ini Letnan Kolonel, Kolonel, Brigdjen masa

tjuma wajah, menurut pengakuannya ia tjuma wajah saja. Nah, saja pikir waktu itu, toeh musti ada penggeraknja. Jang menggerakkan bukan Letnan Kolonel Untung, CC menurut pengetahuan saja bukan, politbiro bukan, ja tentunya dialah.

Walaupun saja terangkan diwaktu itu, tapi tak masuk djuga diakal saja, melihat pangkatnja Letnan Kolonel, Kolonel dan Brigdjen, bahwa mereka hanja wajah saja. Tetapi saudara ketua, didalam pemeriksaan proses verbaal terhadap saja, hal itu saja sudah lakukan sesuai dengan fikiran saja jang asli.

Saja fikir waktu sesudah saja diperiksa, buat apa saja terpengaruh oleh pemeriksaan terhadap Letnan Kolonel Untung. Lebih baik fikiran asli saja saja saja kemukakan. Karena itu didalam proses verbaal saja, saja sudah terangkan bahwa menurut pendapat saja, satu-satunya penggerak daripada G. 30. S. adalah Letnan Kolonel Untung es. Begitu saja terangkan semula.

Didalam proses verbaal itu walaupun saja sendiri, tidak mengenal perwira-perwira jang turut aktif dalam rangka G. 30. S. Sudah saja terangkan dalam pemeriksaan saja sebagai tersangka, dan disini. Saja waktu itu masih terpengaruh oleh apa itu wajah.

Hakim Ketua : Dus itulah dasar fikiran jang saja tanyakan, mengapa saudara sampai berpendapat seperti tersebut tadi ?

Saksi : Ja, maka saja berpendapat begitu, oleh karena melihat bahwa manusia-manusia ini dianggap sebagai wajah tok.

Hakim Ketua : Lalu kemudian kaukatakan : "Tetapi bagaimanapun djuga anggota-anggota politbiro jang bukan dewan harian politbiro adalah djuga turut bertanggung jawab". Dalam rangka apa ini ?

Saksi : Itu djuga sebenarnya karena tadi.

Hakim Ketua : Apakah karena tadi jang tidak ada penjerahan setjara formil, sebetulnja kekuasaan jang sekarang sudah diambil keputusannya oleh Dewan harian maka mau tidak mau djuga turut bertanggung-djawab, sebagai anggota politbiro ?

Saksi : Djadi itu sebenarnya tidak.....

Hakim Ketua : Ja, saja ingin mengetahui dasar-dasar daripada apa

jang telah dikemukakan. Sebab kemudian ada disebut satu kalimat lagi jaitu 'mentjetuskan aksi itu menurut fikiran saja adalah sesuatu aksi militer, daripada perwira-perwira Angkatan Darat dan Angkatan Udara'. Itu, oleh karena disana dikatakan "menurut fikiran saja", apakah saudara sudah mempunyai info, atau dikatakan oleh Aidit, dari Angkatan Darat dan dari Angkatan Udara itu setjara positif, nama-nama disebut atau tidak disebut ?

Saksi : Tidak. Segolongan dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara jang akan melancarkan aksi.

Hakim Ketua : Kira-kira bagaimana utjapannya Aidit ?

Saksi : Djadi jang dikatakan perwira-perwira jang berfikiran maju itu, adalah perwira-perwira jang terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

Hakim Ketua : Kemudian, "maka dugaan saja tentang bentuk aksi itu adalah bahwa perwira-perwira apa jang dikatakan berfikiran maju itu akan menangkap anggota-anggota Dewan Djenderal dan menjerahkannya pada Presiden untuk diadili." Djadi dasar dugaan jang ada pada saudara itu jang saja ingin ketahui, bagaimana sampai ada pendapat jang sedemikian ?

Saksi : Djadi menurut fikiran saja, karena dikatakan oleh pemeriksaan-pemeriksa kepada saja : „menurut anggapan saudara sebagai saksi". Kalau dikatakan mendahului menurut penafsiran saja dimana saja katakanlah fikiran saja, fikiran pribadi ini, penafsiran saja, djadi mereka perwira-perwira maju ini kalau dikatakan mendahului, djadi akan menangkap dan tidak membunuh seperti jang terdjadi, akan menangkap untuk diserahkan pada Presiden, dan kemudian untuk diadili, itu menurut fikiran saja, interpretasi saja.

Hakim Ketua : Kemudian satu lagi, dalam rangka dasar-dasar fikiran itu kau katakan "sedangkan jang saja artikan itu kemungkinan bisa djuga ada, coup terhadap pemerintah oleh perwira-perwira jang berpikiran maju itu adalah setengah memaksa Presiden, supaya membubarkan kabinet dan menggantikannya dengan kabinet Nasakom, dimana kaum kominis mendapat tempat lebih banyak" ?

Saksi : Djadi pada waktu itu menurut tanggapan saja, atas pertanyaan itu apakah kemungkinan jang lain, djadi kemungkinan jang satu seperti jang telah saja kemu-

kakan tadi, tapi apa jang dimaksud kalau coup, penger-
tian saja Kalau coup ja begitulah.

Hakim Ketua : Dus akan memaksa kepada Presiden supaja membubar-
kan Kabinet ?

Saksi : Begitulah kira-kira pikiran atau penafsiran saja.

Hakim Ketua : Sedang penafsiran saudara terhadap Perwira-Perwira
jang berpikiran maju adalah perwira-perwira jang
sesungguhnya pro PKI atau setidak-tidaknya bersimpati
kepada PKI, betul ?

Saksi : Ja, betul, atau jang saja terangkan disitu jang lazim
disebut progresif revolusioner ?

Hakim Angg. : Saudara Peris, waktu saudara bertemu dengan Sudisman
sepuluh hari sesudah rapat Politbiro jang diperluas itu,
saudara mendapat tahu dari Sudisman tugas-tugas
saudara ke Medan, antara lain saudara tadi djuga men-
djelaskan bahwa saudara Sudisman djuga memberi
tahu tugas-tugasnja anggota lainnja, si anu tugas-
nja ini, si anu tugasnja ini. Sekarang saja mau mena-
njakan, tugasnja saudara Njono apakah ?

Saksi : Mengenai tugas saudara Njono dikatakan waktu itu
adalah begini, sudah bertugas di Djakarta. Kemudian
waktu saja diperiksa mengatakan karena jang biasa
disebut di PKI Panitia Aksi, ja saja sebut Ketua Panitia
Aksi. Tapi itu sebenarnja begitulah proses pemitjaraan
itu, saja tidak ingat saja tanja kepada pemeriksa,
pemeriksa bilang tidak boleh tanja sama kami, karena
dia sebagai Panitia Aksi saja bilang Ketua Panitia
Aksi. Dikatakan, panitia Aksi sebagai apa tugasnja
presis tidak saja terangkan.

Hakim Angg. : Djadi menurut Sudisman tugasnja hanja sebagai Ketua
Panitia Aksi ?

Saksi : Di Djakarta.

Hakim Angg. : Di Djakarta ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Tidak ada pendjelasan lain ?

Saksi : Tidak. Dan memang waktu itu lebih banjak pendjelasan
pembagian pekerdjaan si Njono sudah disana, sianu
sudah disana dan kau kemana, begitulah kira-kira sifat
pada waktu itu.

Hakim Angg. : Dan saudara mengenai Panitia Aksi ini djuga bagaima-
na, pendapat saudara ?



Barang bukti lainnja terdapat diantaranja gambar D.N. Aidit.
foto KEMPEN.



foto KEMPEN.
Suasana dalam ruangan sidang mendapat perhatian besar dari pedjabat Militer, Sipil maupun umum,
a.l. nampak J.M. MEN/PANGAD LETDJEJEN. TNI Soeharto dan isteri.

- Saksi : Menurut pikiran saja Panitia Aksi, djadi kalau selama ini panitia Aksi itu, kalau ada panitia Aksi ada sesuatu misalnja kedjadian harga naik ada panitia Aksi jang me nuntut supaja harga itu diturunkan. Begitulah, djadi sesuatu jang melaksanakan. Begitu Panitia Aksi itu melaksanakan sesuatu.
- Hakim Angg. : Jang membagi-bagi tugas itu siapa ?
- Saksi : Saudara Sudisman.
- Hakim Angg. : Sewaktu saudara Pardede diperiksa itu, dipaksa ?
- Saksi : Tidak.
- Hakim Angg. : Semua keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan itu betul semua ?
- Saksi : Jang pendahuluan ini ?
- Hakim Angg. : Ja.
- Saksi : Jang ini. Ja, tetapi ja bagaimana lazimnja tiap pemeriksa selalu ditanjakan misalnja, jang hari ini selalu ditanjakan apakah terhadap keterangan jang kemarin masih ada keterangan tambahan dan sebagainja, karena kemungkinan lupa. Karena keterangan ini sudah 1½ (satu setengah) bulan hampir, memang ada hal-hal jang waktu itu saja tak ingat tetapi sebagai tadi telah dibuk tikan oleh saudara Ketua Mahkamah jang pada pokok nja sama, tetapi disana-sini ada tambahan, ada pendje lasan.
- Hakim Ketua : Apa pada waktu itu tidak dipaksa ?
- Saksi : Tidak, sama sekali tidak, tidak ada paksaan, sukarela, kata sukarela ini selalu saja tambah-tambahkan.
- Hakim Ketua : Diwaktu rapat Politbiro diperluas, apakah pernah Ketua D.N. Aidit menjatakan bahwa dia akan melaporkan kepada P.J.M. Presiden ?
- Saksi : Betul ?
- Hakim Ketua : Mengenai adanja Dewan Djenderal ?
- Saksi : Ja.
- Hakim Ketua : Kemudian jang saudara dengar dari anggaute Politbiro lainnja, hasil daripada laporan itu ? Apakah saudara mengetahui ?
- Saksi : Saja tidak pernah tanjakan.
- Hakim Ketua : Tidak Pernah mengetahui bagaimana hasilnja ?
- Saksi : Tidak pernah.
- Hakim Ketua : Djuga dalam rapat politbiro diperluas, dibitjarakan me-

ngenai Dewan Revolusi ?

Saksi : Tidak, tidak ada disitu, dan memang tidak ada dibicarakan.

Hakim Ketua : Sudah pernah disinggung, kemungkinan sesuatu Dewan Revolusi ?

Saksi : Tidak pernah disinggung.

Hakim Ketua : Tadi saudara menjelaskan bahwa nama Junta Militer sudah tidak tepat lagi tetapi sebaiknya dipakai suatu nama Dewan Revolusi, sebagaimana dipakai di Kashmir ?

Saksi : Itu menurut keterangan Sudisman begitu, yang dikatakan kira-kira sepuluh hari sesudah sidang politbiro yang diperluas itu.

Hakim Ketua : Tetapi tidak dibicarakan ?

Saksi : Sama sekali tidak disinggung disidang itu.

Hakim Angg. : Saudara Peris Pardede, saya akan tetap dalam rangka keterangan saudara dan tidak akan menajukan lebih lanjut apa-apa. Dalam pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 1966 ada memberikan keterangan, tetapi supaya lebih menegaskan disini mungkin saudara ada yang lupa, jadi baiklah saya batjakan. Mungkin yang akan saya batjakan ini ada juga tertjakup dalam pertanyaan pak ketua, tapi tak mengapa, sebab yang penting disini jaitu mengenai soal-soal, saudara masih ingat bukan, bilamanakah sidang politbiro mengambil keputusan, apa-apa yang diputuskan dan bagaimana tugas untuk anggota-anggotanya, dan disini saudara jawab bahwa kurang lebih sepuluh hari sesudah sidang Politbiro yang diperluas, saya telah mendatangi saudara Sudisman anggota politbiro, dan kepada sekretariat CC PKI dikantor CC PKI dan menajukan padanya apakah dewan harian politbiro sudah mengambil keputusan tentang didahului atau mendahului, seperti yang dipersoalkan tempo hari oleh sidang politbiro, yang diperluas dan bagaimana tentang mengatasi kedua soal itu, maka dengan nada yang serious dijawab, sudah. Tetapi tidak menerangkan diputuskan oleh sidang mana, kapan dan dimana sebab saja sendiri tidak hadir pada waktu sidang itu. Kedua, bahwa sekarang situasi sudah semakin serious untuk mengikuti perintah yang diterima oleh dewan harian politbiro Dewan Djenderal akan bertindak. Tidak sesudah Presiden meninggal dunia, tapi pada sekitar hari Angkatan Perang. Mungkinkah mereka mengingat bahwa Presiden akan tetap segar bugar ? Ketiga bahwa perwira-perwira yang berfikir

madju ideologi tidak kuat seperti kita, karena mereka belum pernah mendapat pendidikan partai, tetapi putusanja tetap bahwa kita akan mendahului sesuai dengan keinginan ketua D.N. Aidit. Untuk mengatasi kedua persoalan adalah sebagai berikut :

Satu, karena perwira yang berfikir madju itu dikatakan lemah, maka kepada mereka akan diperbantukan sejumlah tenaga-tenaga pemuda rakjat yang sudah terlebih dahulu menerima latihan kemiliteran. Dan bahwa hal ini sesungguhnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi mereka lebih suka bertindak tanpa ditjampuri oleh tenaga sipil. Bahwa untuk Djakarta Raya sudah dibentuk satu panitia aksi yang diketuai oleh Njono.

Kedua, Mengenai kekuatan para perwira yang berfikir madju bahwa kalau mereka mendahului maka Presiden PBR akan marah. Tapi yang mengingat kalau Presiden PBR melihat bahwa gerakan itu semata-mata ditujukan kepada Dewan Djenderal beliau akan memahaminya. Bahwa selanjutnya, jaitu saudara sendiri menjatakan tentang apakah nama gerakan itu nantinya, tanggal berapa mau diadakan dan bagaimana wujudnya, maka saudara Sudisman menjawab sebagai berikut : Bahwa junta militer tidak populer, tapi lebih populer dengan nama Dewan Revolusi, seperti yang di Kashmir. Bahwa tentang tanggal berapa akan diadakan belum dipastikan. Sebab ini aksinya tergantung pada persiapan dan lain pelaksanaannya sendiri. Bahwa soal bentuknya kita serahkan sama mereka sebab kita orang sipil, tidak mengerti soal begitu. Bahwa mengenai pembagian tugas telah dijelaskan oleh Sudisman dihadapan anggota-anggota CC-PKI, kalau tidak salah tanggal 26 September 1965. Dikantor CC PKI jaitu sesudah mengadakan briefing atau penjelasan singkat tentang situasi yang akan dihadapi maka Sudisman menjelaskan sebagai berikut, bahwa anggota-anggota Sekretariat harus menjari kedaerah-daerah ke Djawa untuk minta bantuan pada CDB sendiri bahwa walaupun aksi yang dihadapi sesuai dengan aksi militer, tetapi mungkin tidak bisa bertahan lama karena CDB-CDB perlu dibangun bahwa anggota Dewan harian Politbiro telah ada pembagiannya jaitu :

D.N. Aidit dan M.H. Lukman di Djawa Tengah Njoto dan Rewang di Djakarta sebab P.K.I. harus tetap berdjalan sebagai biasa. Sudisman di Djatim, bahwa kemu-

dian Sudisman menanjikan kepada masing-masing anggauta Sekretariat, terserah djalan mana jang dipilih tetapi Njono sudah ditetapkan bertugas di Djakarta sebagai Ketua panitia aksi dan karena kedudukannya anggauta-anggauta Sekretariat itu maka ditetapkan Anwar Sanusi tetap di Djakarta berhubung pada pekerjaannya di PB Front Nasional, Peris Pardede, sendiri di Medan berhubung telah tetap sebelumnya, telah didisposisi Sudisman dan surat CDB Djatim jang meminta saja kesana untuk tugas Komisi Kontrol dan Turba Oktober dan Rifai di Djabar dan Djaelani di Djakarta, Achmad Kadi di Djakarta Raya kalau perlu di Djawa Tengah Djoko Sudjono di Djawa Tengah, Sunartojo di Djawa Timur. Kemudian dalam rangka saudara Njono sebagai Ketua Aksi itu, sebelumnya saja akan memberi ini keterangan Saudara dihadapan pemeriksa Sutisno Bc Hk pada 4 Djanuari 1966, kemudian dengan Njono tidak banjak tjeritakan dalam sidang sekarang ini, dalam sidang proses verbal tanggal 5 Djanuari 1966 djuga atas pemeriksaan Kapten Sutisno Partosusilo Bc. Hk. itu banjak beri keterangan mengenai Njono perkara apakah bisa saudara memberi keterangan masih ingat lagi kalau ingat saudara tjeriterakan.

Saksi : Mengenai Njono ?

Hakim Angg. : Ja.

Saksi : Kalau jang mengenai jang pertama jang dibatjakan tadi oleh Saudara Hakim Anggauta itu, tadi bahwa sudah satu setengah bulan jang lalu djadi kemudian sesudah ingat-ingat lagi apalagi ada kesempatan tenang berpikir karena selama isolasi, nah itulah jang saja terangkan itu tadi sama ketua jang pertama ada mendjelaskan, saja sudah djelaskan disana-sini mengenai soal dibatjakan tadi ada mendjelaskan mengenai Saudara Lukman tadi.

Hakim Angg. : Tapi apa ia memberikan ini bertambah disini ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Apa jang mendorong Saudara ?

Saksi : Itu didalam proses verbaal saja, saja sudah terangkan begitu dan memang sesudah saja ingat-ingat begitu dan apa jang saja terangkan disini sesuai djuga sekiranya dalam proses verbaal saja.

Hakim Angg. : Jang saja maksudkan disini, apakah jang mendorong

Saudara memberi keterangan mengenai Saudara Lukman tadi ?

Saksi : Karena menganggap itulah kelengkapan, itulah kebenarannya, djadi itu saja sudah njatakan dalam proses verbaal.

Hakim Angg. : Nah itu jang mendorong Saudara, mengenai Njono bagaimana ?

Saksi : Mengenai Njono jang saja ingat disitu mengenai Saudara Njono dalam pemeriksaan pendahuluan apakah saudara maksud mengenai tugas ?

Hakim Angg. : Hanja mengenai Njono saja, tak usah utjapan-utjapan jang tidak perlu. Kenalkah saudara dengan Njono, sedjak kapan dan dalam hal apa saja ?

Saksi : Djadi saja djawab setjara kenal dari djauh, sudah semendjak di Djokja dulu, tetapi mengenal dekat, sesudah kami sama-sama mendjadi anggota DPR, kemudian sama-sama mendjadi anggota CC, apalagi setelah sama-sama mendjadi anggota sekretariat CC PKI. Kalau dari djauh itu semendjak tahun 1946 di Djokja, saja mengenal ia sebagai salah seorang pemimpin Sobsi.

Hakim Angg. : Tapi nama Njono saja ?

Saksi : Njono saja semendjak dulu.

Hakim Angg. : Tahukah sdr apa tugas-tugas jang dipertanggungjawabkan kepada saudara Njono dalam rangka pelaksanaan rentjana penggulingan pemerintah jang sjah dengan gerakan 30 September ini.

Saksi : Ja, itu saja djawab tidak.

Hakim Angg. : Tahukah saudara akan tindakan, gerakan Njono dalam rangka 30 September ?

Saksi : Djadi saja terangkan disitu, sedjak pertengahan September saja tak pernah ketemu dengan sdr. Njono, baik di DPR maupun di CC sedjak kira-kira pertengahan September; jang saja tahu, jang saja mengenal kegiatannya jaitu pertama sebelum katakan disini pernah Saudara Sudisman mengatakan bahwa dia bertugas di Djakarta sebagai ketua Panitia Aksi walaupun mengenai panitia aksi ini adalah sebagai pendjelasan jang dibitjarakan itu kemudian bahwa saja tahu, saja mendengar bahwa dia djuga mengumpulkan Anggauta Pemuda Rakjat untuk dilatih setjara ke-militeran di Tjihilitan.

Hakim Angg. : Dimana, di Tjililitan itu ?

Saksi : Dipinggir Djakarta.

Hakim Angg. : Dimana masa tidak tahu ?

Saksi : Di Djakarta.

Hakim Angg. : Ja dimana di Djakarta itu semua orang tahu ?

Saksi : Kemudian saja dengar namanja itu Lobang Buaja, saja tahu ketika itu didjelaskan Tjililitan.

Hakim Angg. : Kemudian bagaimana ? Apa karena sibuk dengan tugasnja maka tak djumpa, apa sibuk sana sini atau bagaimana ?

Saksi : Itu sadja jang saja ingat saudara !

Hakim Angg. : Disini diinjatakan rupa-rupanja terlalu sibuk dengan tugasnja sehingga tidak pernah kelihatan ?

Saksi : Ja saja ambil jang positif sadja, sibuk.

Hakim Angg. : Ini apa namanja mengenai pertanjaan, jaitu salah satu pertanjaan dari pemeriksa terhadap saudara, apakah saudara menjadari bahwa G 30 S PKI adalah perentjana tunggal, pendorong pemimpin dan pengatur pelaksanaan dari gerakan 30 September. Itu pertanjaannya ?

Saksi : Ja, itulah waktu diadjukan pertanjaan ini, itu waktu saja mendjawab saja terpengaruh oleh keterangan jang mengatakan waktu itu bahwa perentjana dari pada ini adalah dewan harian politbiro bersama-sama perwira-perwira jang berpikiran maju, begitulah djawaban saja karena waktu itu saja terpengaruh oleh pikiran itu tadi bahwa katanja Letkol. Untung wajang, Dewan Harian Politbiro dan perwira-perwira jang berfikiran maju itu perentjana, pendorong.

Hakim Angg. : Tjoba terangkan mengenai perentjana ?

Saksi : Ja CC PKI mengenai perentjana, tetapi kalau pelaksana, sekurang-kurangnya perwira jang berpikiran maju itu adalah pelaksana sekurang-kurangnya kata Anwar Sanusi itu dan melihat pangkat mereka jaitu Letkol, Kolonel, Brigdjen ada djuga kemungkinan bahwa mereka djuga adalah perentjana dari pada G. 30. S. demikian.

Hakim Angg. : Barangkali baik saja batjakan apa keterangan Gestapu ini ?

Saksi : Pada waktu saja menghadiri sidang Politbiro saja tidak menjadari tentang hal itu, tetapi sekarang saja berpendapat bahwa Dewan Harian Politbiro CC PKI adalah perentjana/pendorong pemimpin gerakan 30 Sep-

tember bahwa betul hal ini dibitjarakan dalam sidang Politbiro, tetapi sidang itu hanya menjangkap tentang setudjukah perwira jang berpikiran maju itu mendahului atau tidak dan kemudian meminta persetudjukan sidang untuk menjerahkan pengambilan keputusan kepada Dewan Harian Politbiro, tetapi bagaimanapun djuga alangkah anggauta Politbiro jang bukan anggota Dewan Harian agar djuga turut bertanggung djawab maupun saja sendiri tidak mengenal Perwira-perwira jang turut aktif dalam G. 30. S; tapi melihat pangkat mereka jang mengingat G. 30 S. sekali lagi adalah gerakan militer maka saja berpendapat bahwa perwira itu djuga mungkin sadja turut serta dalam merentjanakan G. 30. S. dan sekurang-kurangnya mereka tentu mengatur dalam pelaksanaan G. 30. S. dalam gerakan operasi militer itu, itulah pendapat saja pada waktu itu.

Hakim Angg. : Ini pendapat saudara betul itu ?

Saksi : Betul pada waktu itu kira-kira satu setengah bulan jang lalu itulah pendapat saja.

Hakim Angg. : Tjukuplah !

Oditur : Tadi sdr. mengatakan bahwa D.N. Aidit mengatakan ada perwira jang berpikiran maju menanjakan kepada kita apa menunggu atau didahului oleh rentjana coup d'etat Dewan Djendral begitu ?

Saksi : Betul.

Oditur : Ada dua matjam pertanjaan, pada umumnya pertanjaan karena orang itu betul-betul tidak tahu djawabannya pertanjaan, orang-orang jang betul-betul tidak tahu djawabannya, umpamanya sebagai murid kepada guru, pertanjaan jang bodoh kepada orang pintar atau pula pertanjaan anak kepada bapak, ada pula pertanjaan orang jang tahu apa djawabannya, biasanja pertanjaan guru kepada murid didalam mengudji kepintarannya atau didalam keadaan biasa membanggakan kepinterannya. Sekarang didalam rangka dua matjam pertanjaan itu, para perwira ini pertanjaan mana kira-kira pertanjaan sebagai jang pertama itu, tidak tahu akan djawabannya atau pertanjaan jang kedua itu sudah tahu apa djawabannya ?

Saksi : Itu saja tidak tahu Saudara Oditur dan saja tidak tanja djuga kenjataannya jang saja terangkan djuga dalam proses perbal itu persoalan jang dikemukakan sesudah beliau mendjelaskan segala itu, tidak tahu.

Oditur : Baik, tadi Saudara mengatakan bahwa perwira-perwira yang berpikiran maju itu ialah perwira-perwira yang progresief revolusioner ?

Saksi : Anggapan saja begitulah, tafsiran saja.

Oditur : Djangan pakai tafsiran, Saudara mengatakan tadi perwira yang berpikiran maju itu adalah perwira yang apa ?

Saksi : Jang progresief Revolusioner.

Oditur : Apa pengertian perwira yang progresief revolusioner.

Saksi : Djadi pengertian saja mengenai apa yang dinamakan Progresief Revolusioner adalah seseorang yang menghendaki progres kemadjuan, tjara kemadjuan yang diperoleh setjara perobahan tjepat revolusioner, nah itu menurut pikiran saja.

Oditur : Djadi perwira-perwira yang berpikiran maju itu adalah perwira-perwira yang menghendaki perobahan tjepat Revolusioner ?

Saksi : Ja.

Oditur : Tetapi saudara Njono djuga memberikan arti jaitu Perwira-perwira Kom dan non Kom, apa itu ? Bahwa perwira-perwira itu terdiri dari unsur Kom dan non Kom ?

Saksi : Saja tidak pernah mendjawab begitu Saudara Oditur.

Oditur : Tidak saja katakan kepada saudara Pardede, saja pernah memeriksa kepada Njono bahwa Perwira-perwira itu terdiri dari unsur Kom dan non Kom. Memang Saudara tidak pernah mendjawab baru hari ini ketemu disidang, djadi apa itu pengertian Kom dan non Kom ?

Saksi : Penjaksian saja disitu tidak ada Kom tapi jang pro.

Oditur : Ja pengertian Kom itu apa ?

Terdakwa : Komunis dan non Komunis.

Oditur : Apakah Kom dan non Kom termasuk progresief revolusioner ?

Saksi : Djadi menurut pengertian saja yang Kom itu progresief revolusioner dan yang non Kom djuga bisa progresief revolusioner.

Oditur : Tadi D.N. Aidit djuga menerangkan, menurut keterangan saudara ini, apabila kita setuju Partai tidak perlu mengambil bagian betul ?

Saksi : Ja.

Oditur : Kemudian djuga ada diterangkan oleh Sudisman bahwa walaupun perwira itu tidak mau diberi bantuan tetapi toh diputuskan memberikan bantuan Pemuda Rakjat

kepada mereka benar ?

Saksi : Benar, saja djelaskan tadi.

Oditur : Djadi bagaimana ini, ada seorang yang tidak mau diberi bantuan kok kita tetap bantu, itu apa disana ada unsur paksaan ?

Saksi : Tapi disitu ada dalam keterangan, dalam djawaban saja bahwa karena mereka memang lemah, djadi asal mulanja kurang suka dibantu, begitulah tafsiran saja, tapi karena kenjataanja lemah achirnja diterima djuga, begitulah tanggapan saja.

Oditur : Sekarang mengenai pertimbangan kekuatan dalam Angkatan Bersendjata, kenapa sampai rapat Politbiro membitjarkan perimbangan kekuatan dari Angkatan Bersendjata ?

Saksi : Ada anggauta yang tanja sebab dalam pikiran anggauta yang hadir waktu itu, kok atjara dibidang ini penting.

Oditur : Apakah saudara tahu djalan pikiran anggauta, kan bukan kepentingan saudara kalau begitu saudara tukang nudjum.

Saksi : Dari pertanjaannja sebab anggauta tanja, dari pertanjaannja tahu itu kita bisa tahu. Kalau itu ditanjakan setudju mendahului atau tidak bagaimana perimbangan kekuatan- kata anggauta, anggauta yang tanja. Djustru karena ini ada soal dari Ketua D.N. Aidit mempersoalkan apakah setudju mendahului atau tidak, anggota yang tanja bagaimana perimbangan lalu kami diminta pendapat.

Oditur : Djadi itu sebagai dasar untuk mengambil keputusan harus tahu lebih dulu perimbangan kekuatan begitu ja ?

Terdakwa : Ja, saja kira begitu maksudnja.

Hakim Ketua : Saudara Njono tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh saksi Peris Pardede, betul apa yang diutjapkan oleh saksi ini ?

Terdakwa : Betul mengenai sidang Politbiro ketjuali mengenai keterangan Sudisman yang saja tidak tahu.

Hakim Ketua : Oléh karena memang tidak menghadiri ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tapi keterangan didalam persoalan Politbiro yang lain-lain itu betul ? Oleh karena tidak menjaksikan sendiri pembitjaraannja dengan Sudisman tentulah bagian keterangan Sudisman ini yang tidak diketahui, selain ini betul ja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Pemeriksaan terhadap saksi Peris Pardede kita anggap

selesai dan kepada Oditur diminta untuk diadjudkan saksi kedua dalam rangka perkara ini, Achmad Muhammad bin Jacob ?

- Oditur : Supaja dibawa Muchamad bin Jacob kedepan sidang.
- Hakim Ketua : Berdiri dulu, nama selengkapnja ?
- Saksi : Achmad Muhamad bin Jacob.
- Hakim Ketua : Dimana lahir ?
- Saksi : Di Djakarta di Tanah Abang.
- Hakim Ketua : Kapan dan tanggal berapa ?
- Saksi : 7 Djuli 1925.
- Hakim Ketua : Pekerjaannja ?
- Saksi : Pengurus Koperasi di Kampung Djati.
- Hakim Ketua : Lalu didalam Partai, maksud saja dalam Partai PKI Djadi apa ?
- Saksi : CSS.
- Hakim Ketua : Sebagai apa di CSS ?
- Saksi : Sebagai Sekretaris CSS Djati Petamburan.
- Hakim Ketua : Alamat, tempat tinggalnja dimana ?
- Saksi : RT 19 RK VIII dari Kelurahan Djati.
- Hakim Ketua : Agamanja apa ?
- Saksi : Islam.
- Hakim Ketua : Islam betul, djangan ngaku-ngaku Islam, bisa membuat sjahadat ?
- Saksi : Bisa.
- Hakim Ketua : Tjoba.
- Saksi : Ashadualla ilahailollah waashadu anna Muhammadar rasullulloh !
- Hakim Ketua : Kamu akan didjadikan saksi didalam perkara Njono ini, bersedia didjadikan saksi ?
- Saksi : Bersedia.
- Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga sama saudara Njono itu ?
- Saksi : Tidak ada.
- Hakim Ketua : Dan sebelum didengar keterangannja sebagai saksi, saudara akan disumpah dulu menurut agama Islam, bersedia disumpah ?
- Saksi : Bersedia.
- Hakim Ketua : Selama disumpah, supaja mengikuti apa jang saja utjapkan dibelakangmu ada dari Pusat Rochani Islam jang akan menaungi Qur'an diatas kepaiamu.
- Saksi : Kemudian saksi mengikutinja:
- Demi Allah saja bersumpah bahwa saja didalam per-

sidangan Mahmilub ini akan memberikan penjaksaan terhadap perkara tertuduh Njono menurut keadaan jang sebenarnja dan dengan penuh kedjudjuran, semoga Tuhan menurunkan siksa dan kutukannja atas diri saja apabila saja melanggar sumpah saja ini.

Hakim Ketua : Achmad Muhamad bin Jacob, saudara diharapkan sebagai saksi didalam perkara Njono didalam rangka pada G. 30. S. ataupun Gestok, tjoba tjeriterakan dengan djelas dengan teratur apa jang saudara lihat, ketahui, alami sendiri, artinja dalam rangka persoalan ini, setjara pelan-pelan, setjara tenang, djelas, setjara teratur, tjoba tjeriterakan ?

Saksi : Pada tanggal 2 September atas perintah Muladi dari Petamburan supaja saja mengikuti latihan sukarawitan di Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Untuk apa kata Bung Muladi itu ?

Saksi : Jaitu untuk kesiap siagaan untuk menghadapi Malaysia.

Hakim Ketua : Itu Muladi dalam kedudukannja sebagai Ketua CS ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Terus ?

Saksi : Kemudian saja berangkat ke Lubang Buaja pada tgl. 3 mulai dilatih disana dilatih oleh Pak Kumis dan Pak Djojo banjak jang lainnja saja tidak kenal namanja jaitu dilatih baris berbaris dilatih bongkar pasang sendjata dilatih serangan djuga sedikit dan indoktrinasi tentang Manipol Usdek.

Setelah itu selesai latihan pada tgl. 8 oleh Pak Djojo diberitahukan bahwa jang sudah latihan dikasi Nada. hanrev jaitu Wahanakrida Ketahanan Revolusi, kemudian saja pulang ditugaskan melakukan latihan-latihan pada rakjat disitu.

Pada tgl. 20 berapa saja tidak tahu agar pembentukan sektor kemudian saja diberitahu oleh saudara Prajitno dari Kebajoran bahwa saja mendjadi anggota sektor Kebajoran kemudian pada tanggal 24 diadakan rapat lagi dimana saja diundang jang tadinja akan diadakan di Kramat Lontar di gedung CDR karena disitu tidak muat maka pindjami tempat di CC.

Pada tgl. 24 kemudian bung Katno membentuk sektor-sektor diperluas, saja diangkat mendjadi Komandan sektor VI jaitu meliputi daerah Tanah Abang Petamburan sekaligus Kebon Sirih, sesudah itu diundang lagi ke Lubang Buaja pada tgl. 26 oleh Pak Saleh sektor-pun dirobah namanja lalu 6 mendjadi 1, dan 1 mendjadi

2 sektor yang lainnya tetap dan saja ditetapkan oleh Pak Saleh yaitu Komandan Sektor 1 yang tugasnya mengkoordinir Sukarelawan Sukarelawan yang sudah diatur di Lubang Buaja lalu menggrupkan mereka kedalam 2 groep yaitu kesatuan tjepat dan kesatuan lambat, wilayah. Kesatuan tjepat untuk tjadangan Djaja yaitu Pak Saleh apabila diminta dan yang lambat untuk tjadangan sektor.

Kemudian pada tgl. 29 semua Komandan sektor di panggil oleh Pak Saleh diberikan briefing bahwa pada tgl. 5 Oktober, DD akan mengadakan coup dan akan membunuh Bung Karno karena itu kita harus menjelamatkan revolusi dan mengamankan Bung Karno dari bahaya coup dan Komandan Sektor harus menyiapkan sukarelawan-sukarelawan didaerahnya masing-masing untuk menerima tugas lebih lanjut dari Lubang Buaja yaitu hal ini diberitahukan oleh Pak Saleh pada hari Djumat malam tanggal 30 jam 04.00 pagi harus sudah siap ditempatnya masing-masing, kepada Sektor-sektor akan dikirim tenaga militer dan dikirim sendjata akan diberikan juga beras untuk keperluan makan, kemudian kami mengajukan tentang tenaga-tenaga di Sektor karena daerah luas maka oleh Pak Saleh supaya dibentuk bagian dapur bagian penghubung, bagian pasukan dan bagian Administrasi yaitu bagian penghubung Saudara DARMO, Bagian Administrasi saudara ADNIN dan bagian Pasukan saudara SUTARNO, terus bagian dapur Saudara SUPENO kesemuanya kami telah beritahukan supaya siap jam 04.00 pagi di Petamburan berkumpul semua mulai jam 07.00 jam 08.00 itu tidak ada militer yang datang; sendjataupun tidak dikirim kemudian kami hanya mengadakan latihan baris di Petamburan dipinggir kali yaitu dilapangan bola sambil menunggu datangnya militer yang datang itu, sebelum itu pada malam kira-kira jam 23.00 malam pada waktu kami akan menerima tugas, beras tidak diberikan karena tidak ada hanya diberikan pakaian seragam hidjau 300 stel dan uang Rp. 200.000, uang itu usaha untuk makan dan saja serahkan pada bagian Dapur Saudara Supeno, pakaian saja serahkan kepada Saudara Mirin, kemudian karena jam 01.00 tidak ada maka saja datang pada Pak Saleh dan oleh Pak Saleh disuruh djaga dan bilang tidak ada sendjatanja kemudian atas perintah Pak Saleh mengambil sendjata di Lubang Buaja jam 03.00 sampai di Lubang Buaja

Hakim Ketua : Dimana ketemuja sama Pak Saleh ?

Bakal : Di RRI tanggal 1 siang kira-kira jam 01.00, kemudian saja berangkat ke Lubang Buaja dan tiba disana sama Saudara Darmo, Saudara Supeno sambil minta Beras dan menjampaikan tugas djaga, yaitu dapat sendjata dari Pak MASUDI AURI 2 Tjung, 4 Garand, 25 G. 3 kemudian pada jam 05.00 saja kembali terus saja menjerahkan sendjata itu seluruhnya pada Saudara Sutarno pada jam 06.00 sore di Petamburan kemudian sesuai dengan perintah Pak Saleh supaya mendjaga Kantor Telepon di Djalan Gambir, terus Kantor Telepon di Djalan Thamrin, terus Listrik Negara Karet dan Penjaringan Air, maka saja perintahkan kepada Saudara Sutarno supaya Pasukan dibagi empat-empat pada jam 07.00 saja berangkat ke PB Front Nasional sebagai mana yang telah ditetapkan oleh Pak Saleh supaya dekat RRI dan kira-kira jam 07.30 pasukan yang akan mendjaga dipos tertentu sudah siap untuk berangkat tapi sampai di PB F.N. kemudian saja ditangkap oleh Tentara yang berpakaian Loreng kemudian pada tentara itu saja memberi kode saja bilang TAKARI maksud saja supaya dijawab AMPERA sebab apabila ketemu Tentara menjebut Takari kemudian dijawabnya AMPERA tetapi tentara itu bilang apakah ini (hadirin ketawa) kemudian saja bilang itu Pak Lubang Buaja dan katanja apa itu Lubang Buaja, kemudian saja kasih tanda itu kuning hidjau dan merah. Loh kalau begitu kamu kumpul disana lalu saja disuruh kumpul didepan P.T.T. disitu kurang lebih sudah ada 200 rakjat yang dikumpulkan oleh Tentara selama Tentara mengadakan pemeriksaan digedung itu kami suruh tunggu didepan, tidak lama kemudian datang truck dengan yang akan mendjaga Telekomunikasi dengan sendjata lengkap berpakaian hidjau yaitu kaja Sukarelawan, Kami diangkat lalu dikumpulkan di PB F.N.

Hakim Ketua : Kemudian diangkat dan ditangkap ja ?

Bakal : Ja terus dibawa, saja sendiri tidak mengerti sebab Tentara yang menugaskan djaga tetapi Tentara djaga yang menangkap, kemudian oleh Tentara yang menangkap itu semua rakjat diberitahukan bahwa ada kejadian reaksioner, supaya Saudara semua djangan terpengaruh dan sekarang saudara akan pulang dengan ati-ati dan djangan ikut-ikutan, kemudian kami semua keluar dengan rakjat kemudian kami menuju ke R.R.I. maksudnja mau laporan tetapi didjaga, saja tidak masuk

kemudian kami lari ke CC mau ketemu sama Saudara Sukatno, Kasiman, Nico sama Djohar itu tidak ada sebab oleh pendjaga CC diantarkan kerumahnja Njono kemudian didepan bung Njono bilang mau ketemu sama bung Katno atau sama bung Kasiman. Ada apa kedjadian tadi ? Terus bung Njono mengatakan tadi itu ada kematjetan segera sadjalah ke Lubang Bua-ja, kemudian saja berangkat djuga tetapi di Lubang Buaja tidak ada siapa-siapa disana banjak Tentara jang djaga dan kami djuga ingin masuk, kemudian kami menanjakan Pak Imam, Pak Saleh didjawabnja tidak tahu dan supaja segera keluar. Kami keluar ke CC tidak bisa bermalam dan kami bermalam di SOBSI di Gang Tengah sambil menunggu Kasiman, Nico atau Djohar tidak ada jang memerintah satupun tidak ada djuga jang datang maka ada keterangan bisa ketemu sama bung Muladi jaitu dirumahnja di Pedjompangan pada tanggal 4 sore saja menudju kesana. Sampai tanggal 4 ternjata tidak ada Nico datang maka ada keterangan djika bertemu saja bung Muladi, jaitu dirumahnja Pak Karnen di Pedjompangan. Pada tanggal 4 sore saja mengikuti kesana, dan saja bermalam ternjata disana tidak ada, kemudian saja tjari di Petodjo tidak ada, lalu saja kembali bermalam di SOBSI. Sesudah tanggal 8 gedung CC diserbu dan dibakar maka saja tahu bahwa dengan adanja siaran-siaran betul-betul gagal gerakan 30 September, saja djuga kena, terlibat, maka saja menjerahkan diri kepada jang berwadajib, jaitu polisi.

Hakim Ketua : Kenapa tidak sama tentara ?

Saksi : Sebab saja chawatir tentara mana jang benar.

Hakim Ketua : Kapan ada tanda-tanda, tanda putih ?

Saksi : Saja tidak perhatikan.

Hakim Ketua : Tidak perhatikan ? Kemudian ?

Saksi : Kemudian waktu saja diperiksa, sampai tanggal 21 saja djelaskan sebagaimana adanja, sebagai diproses verbaal, di Djatinegara djuga diproses verbaal sebagaimana adanja, tanggal 27 pindah ke RTC, saja djelaskan bagaimana adanja, dan sampai sekarang.

Hakim Ketua : Memang tidak ada perbedaannja, dalam pemberian keterangan ini, pada waktu pemeriksaan pendahuluan dan dipersidangan ini. Tapi saja masih ingin tanja sedikit, untuk memberikan pendjelasan dalam keterangan jang sudah kamu berikan, kapan kamu lapor pada polisi itu tidak kamu sebutkan ? Tanggal berapa itu tepatnja, melaporkan pada polisi, tanggal berapa itu ?

Saksi : Tanggal 8 sore, djam 02.00.

Hakim Ketua : Tanggal 8 djam 02.00, dipolisi mana ?

Saksi : Di Kramat Djati.

Hakim Ketua : Terus langsung ditahan ?

Saksi : Ja, ditempat polisi itu djuga.

Hakim Ketua : Kapan diangkutnja ?

Saksi : Tanggal 21 ke Djatinegara dan tanggal 27 dibawa ke RTC.

Hakim Ketua : Kemudian dalam gerakan 30 September engkau adalah sebagai Komandan Sektor I jang meliputi daerah jang berdekatan Gambir, Tanah Abang Petamburan, Siapa jang mengangkat sebagai Komandan Sektor I ?

Saksi : Saudara Katno, setjara lisan tidak diberikan Surat keputusan dan kemudian dirobah lagi oleh Pak Saleh mendjadi Komandan Sektor I. Diangkatnja pada tanggal 24 September, tugas saja mengkoordinir dan menggrupkan mereka kedalam 2 groep. Groep kesatuan Tjepat dan groep kesatuan Lambat, kesatuan Tjepat jaitu Tjadangan untuk Komando Djaja di Lubang Buaja. Groep jang lambat untuk Tjadangan Sektor.

Hakim Ketua : Lalu mengenai pendjagaan keamanan mengenai objek objek vital itu memang djadi tugasmu bukan ?

Saksi : Ja, itu memang ditugaskan.

Hakim Ketua : Disamping dua itu masih ada tugas lainnja pendjagaan objek-objek gedung-gedung vital ini ja ?

Saksi : Tugas chususnja mendjaga itu.

Hakim Ketua : Itu malah chususnja mendjaga gedung-gedung vital — khusus — baik. Pada rapat tanggal 24 September itu jang kau katakan tadi siapa-siapa jang hadir ?

Saksi : Semua Komandan Sektor.

Hakim Ketua : Semua Komandan Sektor, 1 sampai dengan 6 ?

Saksi : Ja betul kalau tak salah semua datang, nama-nama tidak ingat.

Hakim Ketua : Tidak ingat lagi ja, djadi tidak ingat lagi dengan tepat siapa-siapa jang hadir tapi kalau tidak salah lengkap semua Komandan Sektor hadir tanggal 24. Dimana rapat itu diadakan ?

Saksi : Diruangan belakang CC PKI Kramat itu.

Hakim Ketua : Lalu pada tanggal 29 September diterangkan oleh Pak Saleh bahwa sebelum tanggal 5 Oktober, Dewan Djen-deral akan mengadakan coup dan membunuh Bung

Karno. Bagaimana katanja kira-kira, utjapannja bagaimana ?

Saksi : Kurang lebih begitu, persis tidak bisa saja.

Hakim Ketua : Ja bagaimana ?

Saksi : Dia bilang bahwa Negara kita didalam

Hakim Ketua : Itu didalam rangka rapat Kramat, apa didalam rapat khusus ?

Saksi : Dalam rapat Komandan Sektor, bahwa negara kita dalam bahaya, bahwa sebelum tanggal 5 Dewan Djenderal akan mengadakan coup dan akan membunuh Bung Karno, karena itu kita harus siap menjelamatkan Bung Karno.

Hakim Ketua : Ini jang tidak didjelaskan didalam Berita Atjara Pemeriksaan. Atas dasar itu diperintahkan semua sektor siap semendjak saat itu.

Memang betul kamu siapkan sektormu ?

Saksi : Ja sekembali dari sana.

Hakim Ketua : Apa tindakan mu ?

Saksi : Mengumpulkan.

Hakim Ketua : Itu kan sudah tugas sebelumnya jang dilakukan. Didalam rangka sesudah diberitahukan bahwa sebelum tanggal 5 Oktober akan ada coup Dewan Djenderal dan bahwa akan membunuh Bung Karno, jang kemudian dikeluarkan perintah supaya sektor siap ini kamu melakukan kegiatan, kegiatan apa ?

Saksi : Memberitahukan kepada 4 pembantu kami jaitu saudara Peno

Hakim Ketua : Untuk membantu tugas itu ja ?

Lalu — terus !

Saksi : Kami siapkan Sukarelawan di Petamburan ini.

Hakim Ketua : Apa ini pernah kamu laporkan mengenai ini pada Bung Njono, bahwa anak buah saja jang sedianja akan melakukan tugas pendjagaan ditempat-tempat jang vital seperti kantor Tilpon dan gedung Front Nasional sudah ditangkap. Jang memberikan tugas itu siapa untuk pendjagaan itu ?

Saksi : Pak Saleh.

Hakim Ketua : Saja tanjakan jang memberikan tugas kepada anak-anak itu siapa ?

Saksi : Saudara Tarno kepala pasukan.

Hakim Ketua : Kepala pasukannja, kemudian Tarno jang mengumpulkan orang-orangnja, karena ada objek vital sekian, dan sekian orang disana, jang sedianja akan melakukan tugasnja untuk pendjagaan, djam berapa mereka ditangkap ?

Saksi : Kurang lebih djam delapan.

Hakim Ketua : Pagi, sore, malam ?

Saksi : Djam 08.00 malam.

Hakim Ketua : Apakah waktu ditangkap kamu melihat sendiri mereka ditangkapnja itu, ditiap-tiap objek vital. Atau sebagian dari objek vital ?

Saksi : Saja kebetulan kumpul dengan rakjat didepan PTT, kemudian ada truk masuk ke PB F.N. djadi kelihatan. Sudah itu dibawa, sajamapun semula djuga dibawa.

Hakim Ketua : Kemudian Bung Njono setelah mendengar laporan jang kau sampaikan bagaimana ? Ketika itu Njono mengatakan, kalau begitu ada kematjetan, apa jang dimaksudkan dengan kematjetan ?

Saksi : Tidak tahu.

Hakim Ketua : Tidak tahu, lantas kamu tidak menanyakan apa jang dimaksudkan dengan kematjetan, setelah lapor ada komentar dari Bung Njono itu : "Wah, kalau begitu ada kematjetan". Kamu tidak menanyakan kematjetan apa ? Karena kemudian Bung Njono memerintahkan kamu untuk ke Lubang Buaja, betul itu dan memang dilaksanakan perintah itu, ke Lubang Buaja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Dengan siapa ?

Saksi : Sendiri.

Hakim Ketua : Dan sampai ke Lubang Buaja ?

Saksi : Saja masuk.

Hakim Ketua : Sudah pernah kenal Bung Njono ?

Saksi : Diwaktu laporan.

Hakim Ketua : Baru diwaktu laporan.

Saudara Oditur, minta dimadjukan barang-barang bukti jang diakui oleh terdakwa, terutama jang katanja dari AURI.

Kamu tadi menyebutkan adanja menerima uang, menerima pakaian hidjau dan menerima sendjata bermatjam jenis, ja betul, saja kepingin tahu jang mana, jang kamu maksudkan, sendjata mana sadja jang kamu

terima dari Pak Marsudi itu. Tjoba ini lihat, bukan ini, jang saja tundjuk. Berapa banjak djenis ini ?

Saksi : Duapuluhtiga atau duapuluhlima.

Hakim Ketua : Djenis apa sendjata ini ?

Saksi : G. 3.

Hakim Ketua : Ini ?

Saksi : Garrand, saja terima empat.

Hakim Ketua : Ini ?

Saksi : Tjung.

Hakim Ketua : Tjung, berapa banjak kau terima Tjung ?
Lalu kapan katanja kamu terima itu dari Pak Marsudi, memang betul ini ? Lalu nangnja ?

Saksi : Empatratas ribu.

Hakim Ketua : Empatratas ribu, ini berapa empatratas apa tigaratus ? Berapa Tjung-nja ?

Saksi : Dua.

Hakim Ketua : Dua, betul ja, lalu itu tanda jang kau sebutkan tadi jang begini ini ?

Saksi : Ja betul.

Hakim Ketua : Ini jang kau maksudkan, tanda pita merah, kuning, hidjau, lalu tentara jang kau lapori itu apa tidak pakai begini ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Tidak, habis pakai tanda apa ?

Saksi : Tidak diperhatikan tanda-tandanja.

Hakim Ketua : Ini maksudnja apa tanda-tanda jang begini ini, jang merah apa, jang hidjau untuk apa dan jang kuning untuk apa, kan ada maksudnja sendiri-sendiri ?

Saksi : Itu tanda nasakom. Nas jang kuning. A jang idjo dan Kom jang merah.

Hakim Ketua : Ini peluru-pelurunja ja, berapa kali kamu dapat latihan di Lubang Buaja ?

Saksi : Satu kali.

Hakim Ketua : Satu kali, sudah pernah diadjar ini ? Peluru apa ini, jang mana jang untuk sendjata tiga ini ? Diadjar nembak djuga di Lubang Buaja ?

Saksi : Diadjar djuga.

Hakim Ketua : Mengenai pasang bongkar sendjata ? Sendjata apa sadja jang diadjarkan ?

Saksi : Pistol Colt 45, karabijn, bazoka.

Hakim Ketua : Setiap kamu menerima pembagian sendjata itu kamu menanda tangani daftar penerimaan ? Misalnja tigaratus, begitu ?

Saksi : Dibuku mereka.

Hakim Ketua : Lalu pernahkah dilakukan pada tanggal 28 September atau sebelumnja itu, suatu latihan ulangan. Ada panggilan, di Lubang Buaja, dan didalam itu saudara waktu ditanja pemeriksa memberi djawaban bahwa panggilan untuk refreshing, dus latihan ulangan, penjegaran kembali, ditudjukan kepada groep kilat. Tentang ini orang jang berangkat dari sektormu itu, sektor Achmad Mohammad, engkau tidak tahu, karena pemberangkatan ini diatur oleh CS. Lalu hubungannja antara orang-orang jang berangkat latihan dengan komandan sektor bagaimana ?

Saksi : Itu melalui organisasi Pemuda Rakjat.

Hakim Ketua : Kapan kamu jang diperintahkan untuk mengkoordinir lalu menggroepkan ja to, artinja membagi didalam groep-groep kilat. Ada jang diambil, tidak tahu bagaimana itu ? Ada berapa sub sektor ?

Saksi : Ada enam subsektor lebih.

Hakim Ketua : Ja bagaimana djuga kan kamu mempunyai pengawasan dalam komando ?

Saksi : Tidak ada, saja tjuma memberi tahukan pada subsektor, supaya kesatuan tjepat ikut latihan untuk refreshing.

Hakim Ketua : Djadi mengenai latihan refreshingnja kamu tahu, hanja djumlahnja jang tidak tahu. Lalu kamu sebutkan disana satu djawaban pada tanggal 30 September ja: "Saja minta supaya mereka jang ikut latihan refreshing ini jang berasal dari sektor saja, sektor I, supaya ikut saja karena tenaga mereka dibutuhkan, tetapi jang pulang kira-kira hanja 27 orang", benar ?

Saksi : Tidak tahu semua berapa.

Hakim Ketua : Djadi jang kau ketahui djumlahnja hanja 27 orang. Memang mungkin jang berangkat hanja 27 orang ?

Saksi : Mungkin.

Hakim Ketua : Kamu tidak tahu ! Mengenai organisasi dari sektormu, bisa mendjelaskan kamu ! Sebagai komandan sektor organisasi dari sektor, hubungan mereka dengan sekliaan sektor, antara sektor dengan CS, hubungan sektor dengan Lubang Buaja, CDR, bagaimana ?

Saksi : Itu hubungan saja dengan sektor, itu kebawahnya ada subsektor.

Hakim Ketua : Lantas, keatasnya itu kepada ?

Saksi : Ko Djaya.

Hakim Ketua : Komando Djaya ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Tempatnya dimana itu Ko Djaya ?

Saksi : Di Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Komandannya siapa ?

Saksi : Bung Katno, Kasiman, Djohar dan Nico.

Hakim Ketua : Itu semuanya merupakan komando Djaya jang di Lobang Buaja. Antara Komando Djaya dan komando sektor tidak ada apa-apa lagi ?

Saksi : Tidak ada, tjuma Kasiman itu sadja, ke Lubang Buaja pun harus lewat situ.

Hakim Ketua : Meskipun Komando Djaya berada di Lubang Buaja. Lalu didalam Sektormu didirikan Pos-pos Komando, tahu kamu ?

Saksi : Tahu.

Hakim Ketua : Didirikan oleh Bung Njono itu, ada Pos Komando, ada Pos Koordinator, ada Pos Lapangan ?

Saksi : Tapi itu bukan tugas Sektor.

Hakim Ketua : Ja memang, tetapi didalam wilayah/didalam Sektormu ada Komando-komando Pos itu ?

Saksi : Ada.

Hakim Ketua : Ada, ja. Hubungannya antara kamu sebagai Komandan Sektor dan Komandan-komandan Pos Komando, Pos Koordinator, Pos Lapangan ada/tidak ?

Saksi : Ada, tapi tjuma mengawasi sadja.

Hakim Ketua : Mengawasi ? Siapa jang mengawasi ?

Saksi : Poskom.

Hakim Ketua : Poskom mengawasi Sektor begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Berapa Poskom sih ?

Saksi : Tjuma satu, Bung Muladi.

Hakim Ketua : Bung Muladi tok, dia dari Pos Komando ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Pos Komando artinja jang dibentuk Njono ?

Saksi : Mungkin, itu lain sih, sektor sama itu lain.

Hakim Ketua : Memang lain, tetapi kamu tidak tanja Pos Komando itu siapa jang membentuk ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Asal ada sadja, dalam Sektormu ja masa bodoh, ja ? Ini kamu sebutkan : „Saja sadar bahwa G-30-S ini digerakan oleh PKI dan dibantu oleh beberapa orang Tentara, dalam hal ini adalah Angkatan Darat seperti-nja sebagian dari Tjakra Birawa dan beberapa Tentara dari Djawa Tengah dan djuga dari AURI“. Kok kamu bisa punja pendapat sebegitu djauh itu dari mana tahunja ?

Saksi : Dari Pemeriksa, pemeriksa mengatakan begitu ?

Hakim Ketua : Oh, pemeriksa jang mengatakan ja betul, begitu ?

Saksi : Saja hanya ja sadja.

Hakim Ketua : Hanya ja sadja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Digebukin ?

Saksi : Digebukin djuga (sambil ketawa saksi mengutjapkan-nja).

Hakim Ketua : Kok ketawa, djadi ini bukan keterangan ?

Saksi : Ja, saja tjuma ikut sadja apa kata Pemeriksa.

Hakim Ketua : Jang lain-lain tadi djuga begitu ?

Saksi : Tidak, jang betul saja bilang betul.

Hakim Ketua : Oh, jang betul bilang betul, ketjuali ini, djadi ini sebetulnja kesadaran kamu tidak tahu ?

Saksi : Tidak tahu, saja, tahunja tjuma militer.

Hakim Ketua : Djadi tjuma segi militernja jang kamu ketahui, djadi segi politiknya tjuma ikut pemeriksa sadja, begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Saksi, saksi didjandjikan apa sadja oleh Partai saksi, apabila Gerakan ini berhasil ?

Saksi : Tidak didjandjikan apa-apa.

Hakim Angg. : Tidak pernah didjandjikan apa-apa ? Misalnja kepangkatan dan sebagainya ?

Saksi : Tidak.

Hakim Angg. : Semua kegiatan jang dilakukan oleh saksi itu berdasarkan apa sadja ?

Saksi : Untuk menjelamatkan Revolusi dan Bung Karno.

Hakim Angg. : Untuk menjelamatkan revolusi dan Bung Karno.
Itu sesuai dengan briefing antara Pak Djojo dan siapa itu ?

Saksi : Pak Saleh.

Hakim Angg. : Karena dibilangkan Pak Djojo dan Pak Saleh bung Karno terantjam keselamatannya dan sebagainya ?

Hakim Angg. : Saja ingin bertanja.

jang lain. : Dari pemeriksaan ini mula-mula saudara ditunjuk sebagai Komandan Sektor 6, kemudian tanggal 26 September saudara menjadi Komandan Sektor 1, apakah saudara mengetahui mengapa diadakan perubahan komandan Sektor ini ?

Saksi : Itu Pak Saleh yang mengatur.

Hakim Angg. : Djadi saudara tidak mengetahui ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Djadi saudara menurut saja pada Pak Saleh ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Jang latihan di Lubang Buaja itu apakah orang-orang dari lain golongan ?

Saksi : Saja tidak memperhatikan.

Hakim Angg. : Beberapa orang waktu itu dilatih ?

Saksi : Jang rombongan kami 26 orang.

Hakim Angg. : Tidak kenal satu sama lain ?

Saksi : Kenal.

Hakim Angg. : Apakah mereka dari anggota-anggota lain dari Pemuda Rakjat atau dari mana ?

Saksi : Umumnya dari partai Komunis dan dari Pemuda Rakjat dan dari Serikat Buruh.

Hakim Ketua : Saudara Oditur, pertanjaan lain tidak ada ? Dalam rangka pemeriksaan ulangan ada hubungannya dengan keterangan tadi jang tidak tjotjok ?

Oditur : Tjotjok.

Hakim Ketua : Tidak ada jang akan ditambahkan ?
Djadi dalam rangka ini tidak ada kematjetan, kemudian atas perintah itu terus pergi ke Lubang Buaja, betul ?

Saksi : Betul.

Hakim Ketua : Pemeriksaan saksi kedua sudah tjukup. Saksi ketiga Sartaman bin Masdjan.

SAKSI SARTAMAN BIN MASDJAN.

Oditur : Supaja saksi Sartaman bin Masdjan dibawa masuk.

Hakim Ketua : Nama lengkapmu siapa ?

Saksi : Sartaman bin Masdjan.

Hakim Ketua : Lahir dimana ?

Saksi : Tjirebon.

Hakim Ketua : Tjirebonnya mana ?

Saksi : Desa Kedjaksan.

Hakim Ketua : Tanggal berapa lahir ?

Saksi : Tanggal 21 Djuli 1921.

Hakim Ketua : Pekerdjaaannya apa ?

Saksi : Agen Harian Rakjat.

Hakim Ketua : Didalam Partai Komunis ?

Saksi : Sebagai sekretaris CS Mangga Dua.

Hakim Ketua : Tempat tinggalnya dimana ?

Saksi : Kebon Djeruk 12 nomor 106.

Hakim Ketua : Agamanya ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Betul Islam, rukun Islam ?

Saksi : Lima.

Hakim Ketua : Kamu sembahjang ?

Saksi : Sembahjang kadang-kadang.

Hakim Ketua : Saudara akan diminta kesaksiannya, didalam pemeriksaan bung Njono ini, ja ! dalam rangka G. 30 S. Sedia djadi saksi ?

Saksi : Sedia.

Hakim Ketua : Kenal dengan bung Njono ? ada hubungan keluarga ?

Saksi : Kenal, tidak ada.

Hakim Ketua : Untuk itu saudara akan disumpah dulu, menurut agama jang saudara anut, dalam hal ini agama Islam, bersedia disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Lalu saksi disumpah dimuka persidangan Mahmulub setjara agamanya (Agama Islam).

Hakim Ketua : Djadi sekali lagi Sartaman bin Masdjan akan dihadapkan untuk memberi kesaksian didalam perkaraⁿja Bung Njono ini jah. Didalam rangka apa jang disebut G. 30. S./GESTOK, sekarang saja minta, agar Bung Sartaman bin Masdjan mentjeriterakan apa jang dike^tahui dalam persoalan ini setjara jang tenang jang djelas dan teratur tentang apa jang telah didengar, apa jang diketahui, apa jang dilihat dan apa pula jang telah dialami dalam rangka Gestok itu tadi seluruhnja. Tjoba tjeriterakan jang benar ! Dari mana terserah kau mulai ?

Saksi : Djadi mengenai persoalan penjaksian saja ini bahwa sehubungan dengan G. 30. S. itu, saja dalam beberapa hari sebelumnja atau didalam rangka satu bulan penuh bulan September itu, saja sering mendapat keterangan-keterangan atau indoktrinasi dihubungkan dengan pentingnja Sukarelawan jang harus dilatih, karena itu adalah untuk meningkatkan daya tahan pertahanan Nasional untuk Dwikora jaitu jang sering saja dapat pendjelasan sehingga kamipun melaksanakan tugas-tugas itu. Jang memberi pendjelasan kawan Njono ke-pentingannja latihan-latihan Sukarelawan jang sekarang dengan populair dilatih di Lubang Buaja, waktu itu bukan Lubang Buaja tetapi didaerah Tjililitan bagian itu dan latihan itu adalah resmi dari Angkatan Bersendjata ehhususnja jaitu AURI melatih Sukarelawan-Sukarela-^wan PKI maupun Ormas-Ormasnja. Itu dalam rangka didalam bulan September dan dihubungkan dengan informasi jang kami dapat kira-kira tanggal 24 itu kami diberi informasi dari kawan Njono bahwa dengan situasi jang penting ini dan akan ada coup Dewan Djenderal maka itu perlu ditingkatkan Sukarelawan-Sukarelawan itu dalam latihannja. Oleh karena itu kami melaksanakan tugas dar' pimpinan kami jaitu NJONO. Dalam melaksanakan latihan-latihan itu tempatnja jah karena ada informasi Dewan Djenderal itu akan dicoup dalam Pemerintahan jang sekarang, itulah garis besar-nja jang kami laporkan itu garis besar dalam pelaksa-naannja kami mengadakan piket-piket

Hakim Ketua : Mengenai Piket-piket, dinas-dinas piket jang ditekankan supaya diadakan Penguatan Dinas Piket tanggal 30 September, bagaimana itu ?

Saksi : Djadi tanggal 30 September itu Piket-piket jang diminta untuk tenaga-tenaga tjadangan apabila itu terdjadi untuk membantu Pemerintah.

Hakim Ketua : Membantu Pemerintah jah, disini keseluruhannja jang Saudara ketahui didalam rangka ini akan saja tjoba menandakan untuk memberikan pendjelasan karena terlalu singkat jang kau berikan, pada tanggal 14 September pertama dipanggil bung Njono dan pada tanggal tersebut Njono memberikan briefing, dimana ?

Saksi : Di Kantor C.D.R.

Hakim Ketua : Di Kantor CDR siapa lagi jang dipanggil ketjuah Sartaman ?

Saksi : Memang ada beberapa kawan.

Hakim Ketua : Semuanya dari Sektor Mangga Dua ?

Saksi : Tidak semuanya, dari lain-lain CS, mewakili CS-CS dus pada waktu itu seakan-akan ada rapat CDR jang di-panggil CS-CSnja itu.

Hakim Ketua : Siapa-siapa jang dipanggilnja ? Langsung dipanggil oleh bung Njono atau melalui telefon apa pakai kurier ?

Saksi : Melalui wakilnja, kawan Suwandi.

Hakim Ketua : Kawan Suwandi ?

Saksi : Ja kawan Suwandi.

Hakim Ketua : Jang merentjanakan latihan di Lubang Buaja adalah kawan Njono. Siapa jang bilang itu, kawan Njono sendiri atau ini pendapat Katno atau pendapatmu ?

Saksi : Dia sendiri jang memberikan briefingnja.

Hakim Ketua : Oh pada waktu briefing ini jang dianggap penting jang merentjanakan latihan di Lubang Buaja adalah kawan Njono sendiri jang dalam hal ini adalah masih untuk Sukarelawan Dwikora dan untuk ketahanan Revolusi lalu pada tanggal 24 September, 10 hari kemudian kurang lebih lalu saja laporkan kepada kawan Njono di CDR, pelaksanaan dalam tugas latihan di Lubang Buaja sudah berdjalan kemudian pada waktu itu kawan Njono memberikan informasi itu jang sangat dirahasia-kan betul begitu apakah dia menjatakan lebih dahulu rahasia ini, itu bagaimana, ini sangat rahasia, memberi keterangan jaitu informasi adanja Dewan Djenderal jang mau coup dan bahwa ini rahasia. Tidak boleh di-kebawahkan.

Hakim Ketua : Disitu ada petanja ?

Saksi : Ada.

Hakim Ketua : Waktu memberikan informasi ada jang hadir apa tidak ?

Saksi : Kebetulan saja sendiri.

Hakim Ketua : Dimana itu diberikan ?

Saksi : Di CDR.

Hakim Ketua : Djadi dikantornja bung Njono, Lalu bung Njono mengeluarkan instruksi agar dikantor partay, pertjetakan pertjetakan surat kabar harian rakjat dan warta bakti, pertjetakan persatuan, diadakan piket, dari anggota-anggota PKI dan ormasnja. Piket ini mulai diinstruksikan sedjak tanggal 25 September sampai 30, dan tudjuannja membantu keamanan dan menggagalkan bila memang ada coup dari Dewan Djenderal. Itu kapan diberikan ?

Saksi : Pada tanggal 24 September 1965.

Hakim Ketua : Bersamaan dengan waktu memberikan informasi itu dikeluarkan instruksi ini. Kemudian, tanggal pasti coup dari pada Dewan Djenderal jang informasinja sangat dirahasiakan itu, tidak didjelaskan oleh bung Njono ? Hanja mengatakan dari pada tanggal 25 September, itu pendjagaan piket-piket diperkuat betul ?

Saksi : Betul.

Hakim Ketua : Didalam salah satu djawaban jang dimajukan oleh penanja dulu kau memberikan djawaban, bahwa kawan Njono "sering-sering" memberi tahukan tentang adanja Dewan Djenderal, tentang adanja bahaya Dewan Djenderal, dan djuga mengandjurkan latihan di Lubang Buaja. Dikatakan sering-sering itu sudah berapa kali ? Tjoba sebutkan mana jang rahasia ?

Saksi : Sebetulnja bukan sering-sering itu.

Hakim Ketua : Djadi tidak pakai sering-sering ?

Saksi : Tidak, hanja satu kali sadja itu, hanja tanggal 24 itu sadja. Sebelumnja itu tidak pernah diberi tahukan ada Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Djadi hanja sekali tanggal 24 itu sekaligus diberikan informasinja, dan sesudah itu tidak diberi tahukan lagi.

Hakim Ketua : Lalu kemudian tentang apa memang benar bahwa saja (saja ini artinja Sartaman) bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 sekira djam 10.00 pagi melapor kepada saudara Suparno sebagai komandan sektor 5, betul ?

Saksi : Djadi sebetulnja itu bukan saja jang melapor, wakil saja Umar Said pada waktu itu.

Hakim Ketua : Dimana engkau pada waktu Umar Said melapor ?

Saksi : Dirumah, djam 10.00 pagi dimana sesudah mengadakan laporan bahwa sesudah melaksanakan tugas.

Hakim Ketua : Tugas apa ?

Saksi : Seperti lapor sama Suparno, mengantar orang jang mempunyai tugas kekantor telpon itu.

Hakim Ketua : Tentang pemutusan kawat telpon kota ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang memutuskan siapa ?

Saksi : Itu orangnja tidak tahu, Saudara Suparno sendiri jang bawa, dari Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Bukan dari Sektor situ ?

Saksi : Bukan.

Hakim Ketua : Dari Lobang Buaja, jang mengantarkan ?

Saksi : Suparno minta orang untuk mengawal petugas itu, kekantor telpon.

Hakim Ketua : Jang betul, kamu sudah disumpah ja, tadi sudah membatja sahadat. Saja tanjakan mengenai tanggal satu itu, jang melapor siapa, laporannja apa, siapa jang memutuskan kawat telpon kota itu ja ?

Saksi : Jang memutuskan kawat telpon kota, itu orangnja jang dibawa langsung oleh saudara Suparno dari Lobang Buaja. Untuk pergi kesana kekantor telpon itu. Parno minta supaya dibantu keamanannja dengan 10 orang Suparno minta kepada saja lalu saja berikan, kemudian itu tugasnja djam 05.00 pagi dan malamnja datang, kemudian saja kasih tugas sama Umar Said supaya memberikan 10 orang untuk menemani orang jang akan bertugas ke Kantor telepon itu dan itu dilaksanakan oleh Umar Said, dan langsung lapor kepada Suparno tersebut.

Hakim Ketua : Bahwa benar dilaporkan kepada Komandan Sektor tentang tanggal 1 Oktober djam 10.00 itu oleh Suparno tentang pemutusan kabel telepon Kota ?

Saksi : Itu kawan Said atas nama saja.

Hakim Ketua : Lalu mengenai pengiriman tenaga ke Lobang Buaja pada tanggal 30 sore itu kamu tidak laporkan kepada kawan Suparno, sebab waktu pengiriman tenaga tersebut Suparno di Cs. Mangga Dua, begitu ?

Saksi : Betul.

Hakim Ketua : Djadi apa jang dilaporkan olehmu ketjuali Umar Said jang melaporkan ?

Saksi : Karena waktu itu saya masih ada di rumah, kawan Marsaid jang melaporkan, jang sore itu tanggal 30 sebetulnja, saya jang melaporkan bahwa 30 orang untuk ikut latihan lagi di Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Lalu jang memerintahkan pendjagaan di Pertjetakan persurat kabaran Warta Bakti dan sebagainya itu siapa ? Koordinatorja, Komandannja siapa ?

Saksi : Saja sendiri.
Perintah pendjagaan atau piket tanggal 25 itu saja berikan setjara tertulis.

Hakim Ketua : Pakai surat tugas ? Isinja apa, dasar tugas apa ?

Saksi : Ja pakai, atas dasar kewaspadaan.

Hakim Ketua : Lalu disini disebutkan „di CS, kami ada sedia surat-surat/pormulir, surat tugas piket didalam rangka pendjagaan di pertjetakan harian Rakjat untuk djaga saja tanda tangani sendiri karena dalam situasi genting. Jang dimaksud situasi genting adalah adanya disinjafir gerakan orang-orang ex Partai Murba”. Itu siapa jang mensinjafir ?

Saksi : Itu kami diindoktrinasi dari pimpinan.

Hakim Ketua : Berapa kali bung Njono itu turba ke Mangga Dua ?

Saksi : Kalau kawan Njono sendiri hanja tiga kali, kalau tidak salah tiga kali tanggal 14 - 24 dan pertengahan Agustus.

Hakim Angg. : Sartaman, sekedar saja akan tanjakan bagaimana riwayat hidup saudara jaitu Riwayat Hidup itu betul-betul sebagaimana telah diterus.terangkan di dalam Berita Atjara Pemeriksaan ?

Saksi : Riwayat Hidup saja, saja sekolah S.R. tamat 6 tahun.

Hakim Angg. : (Membatjakan riwayat hidupnja saksi Sartaman) apa betul itu ?

Saksi : Ja betul.

Hakim Ketua : Bung Njono apa jang ditjeriterakan oleh Saksi itu benar ?

Terdakwa : Ja, saya terima keterangan-keterangan saksi jang menjangkut diri saja.

Kemudian oleh ketua dinjatakan bahwa sidang pada siang hari ini tjukup kiranja, dan akan dilandjutkan kembali nanti djam 19.00 sore.

SIDANG : IV.-
TANGGAL : 15 — 2 — 1966.
DJAM : 19.00 (sore).
ATAS NAMA SAKSI : PRAJITNO Bin KARNEN.

Setelah Ketua membuka sidang Ke-IV maka Hakim Ketua memerintahkan kepada OBITUR agar TERDAKWA NJONO dihadapkan dipersidangan.

HAKIM KETUA MEMERIKSA TERDAKWA NJONO :

Hakim Ketua : Atjara pemeriksaan malam ini kita landjutkan dengan memeriksa 3 orang saksi lagi dan sebelum kita mulai dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi jang akan dihadapkan malam ini, saja ingin mengetahui apakah Njono ada keterangan jang akan diadjukan kehadapan penjaksian ketiga orang saksi pagi tadi ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Oditur kami minta agar dihadapkan saksi PRAJITNO bin KARNEN.

HAKIM KETUA MEMERIKSA SAKSI PRAJITNO bin KARNEN :

Hakim Ketua : Saja minta Saudara berdiri.

Hakim Ketua : Nama lengkapnja ?

Saksi : PRAJITNO bin KARNEN, lahir di Semarang, tanggal 29 Desember 1931, pekerdjaan Pegawai Djawatan Perindustrian bagian Perairan, alamat terachir Djalan Sampit I No. 60 Kebajoran Baru, Agama Islam.

Hakim Ketua : Sedia untuk djadi saksi ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Bersedia djuga disumpah dalam penjaksian dalam perkara Njono ini ?

Saksi : Ja, saja bersedia.

Hakim Ketua : Kenalkah sama Njono ?

Saksi : Ja, kenal.

Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga ?

Saksi : Tidak.

Kemudian Saksi disumpah menurut agamanja(Agama Islam).

Hakim Ketua : Prajitno dihadapkan sekarang ini untuk memberikan kesaksian didalam perkara Njono, dalam rangka apa yang dinamakan G. 30 S. atau GESTOK, dan saya minta agar ditjeritakan dengan segala ketenangan yang jelas, teratur mengenai segala sesuatu yang diketahui, yang didengar yang dilihat dan apa yang kau alami sendiri. Dalam hal ini saya minta supaya ditjeritakan kegiatanmu didalam rangka G. 30 S.

Saksi : Dalam rangka G. 30 S. ini maka tanggal 1 saya diperlihatkan oleh Sekretaris bahwa mendapat panggilan untuk latihan Sukarelawan di Lubang Buaja dari Komite Jakarta raya pada tanggal 1 yaitu untuk berangkat tanggal 2 selama kurang lebih lima hari. Pada tanggal 2 saya menjalankan perintah tersebut dan bersama-sama dengan kawan lain untuk melaksanakan latihan di Lubang Buaja sampai dengan tanggal 7 kembali tanggal 8, sesudah kembali dari latihan di Lubang Buaja, kami langsung menuju ke CDR kami laporkan bahwa latihan telah selesai, sebaliknya kami mendapat tugas untuk memberangkatkan Sukarelawan-Sukarelawan angkatan selanjutnya, kemudian pada tanggal 22 saya diundang ke CDR, yang undangannya akan diberikan oleh Pemimpin Jakarta Raya sendiri tetapi ternyata yang memimpin adalah Saudara Sukatno, pada waktu itu dibentuklah Komandan Sektor dimana saya ditunjuk menjadi Komandan Sektor II, Tugas Komandan Sektor pada waktu itu dijelaskan yaitu untuk mengkoordinir sukarelawan yang sudah latihan di Lubang Buaja baik dari Angkatan pertama sampai Angkatan keempat, selanjutnya juga menggroepkan sukarelawan sukarelawan didalam dua groep yaitu groep tcepat dan groep wilayah. Pada tanggal 24 kami mendapat panggilan lagi, dari CDR yang dalam hal ini ada perubahan mengenai sektor. Sektor yang semula empat, tanggal 24 tersebut dirobah menjadi 6, tugas selanjutnya disektor adalah untuk mengadakan latihan-latihan dan mempertcepat. Kemudian tanggal 26 kami mendapat perintah dari Kasiman yaitu wakil dari pada Sukatno dimana kami diminta untuk mengikuti briefing, di Lubang Buaja. Tanggal 26 tersebut kami penuh untuk mengikuti briefing di Lubang Buaja. Briefing dipimpin oleh seorang yang menamakan dirinya Pak Saleh, dan didalam briefing tersebut menjatakan bahwa sektor-sektor yang telah ditetapkan oleh Sukatno ada perubahan mengenai wilayah. Dengan demikian saya menjadi sektor 6, yaitu wilayah Kebajoran Baru, Kebajoran Lama,

Mampangprapatan dan Pasar Minggu. Didalam briefing yang diberikan oleh Pak Saleh, antara lain diperlihatkan peta, yaitu mengenai soal pembagian wilayah-wilayah. Kemudian saya diminta untuk melengkapkan yaitu peta dengan wilayah masing-masing. Dengan permintaan agar jangan kelihatan pergi dan datang kembali untuk briefing.

Tanggal 28 briefing juga kami ikuti kembali. Selanjutnya briefing tanggal 28 telah kami ikuti yang mana pada tanggal 29, mendadak diadakan briefing lagi, dimana yang membriefing juga Pak Saleh, dengan diikuti oleh Pak Inam dan Pak Djojo. Didalam briefing dinjatakan, bahwa Dewan Djenderal akan mengadakan coup, dan tugas kita adalah menggagalkan coup dari pada Dewan Djenderal. Yang pada waktu itu telah ditetapkan yaitu pada H.I. dan D 4. Artinja tanggal 1 jam 04.00 pagi. Sedangkan untuk komandan-komandan sektor dapat tugas untuk membantu gerakan ini dimana gerakan itu sendiri, akan dilakukan oleh Angkatan Bersendjata khususnya, telah disebutkan Jon 530 dan Jon 454 dan kami ditugaskan standby pada waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang selanjutnya akan diberikan Pak Djojo. Juga mengenai apa yang dilakukan pada saat 29 September, adalah untuk kami diperintahkan mengambil pakaian di Lubang Buaja pada tanggal 30. Pada tanggal 30 kami menjampaikan hasil kepada subsektor-subsektor kami didampingi oleh poskom, yaitu saudara Wiratmono yang mana penjemputan ini juga merupakan persiapan mereka supaya standby diposnya masing-masing. Pada sekira jam 11.00 malam, saya bersama dua kawan yaitu Suprpto dan Sukardono dengan kendaraan jeep pergi ke Lubang Buaja untuk mengambil pakaian. Pakaian yang tersedia yang sisa 170 waktu itu dan yang 40 stel kami masukkan dalam jeep, akan dibawa kepos sektor, sedangkan yang 20 stel kebetulan ada dari Pasarminggu juga kami sampaikan 20 stel, 110 stel karena jumlah yang cukup besar kami mintakan bantuan kepada seorang anggota AURI untuk menjediakan truck yang sudah ada disana. Dan 110 stel tersebut kami masukan dalam truck untuk dibawa juga ke Kebajoran Baru. Segera setelah jam 02.00 malam kami kembali ke Lubang Buaja langsung menuju kepos sektor yang berada di Senajan. Dengan mengedrop saudara Suprpto sebagai wakil sektor dan

mengedrop pakaian 40 stel. Selanjutnya kami sendiri langsung pulang ke Djalan Sampit I untuk menurunkan saudara Sukartono yang mengendarakan jeep. Sampai di rumah kami sebentar, saudara Wiratmono sebagai poskom sudah berada di rumah, kemudian mengadjak supaya kami stand by di pos Senajan. Begitu lah keadaan pada tanggal 1 disekira jam 06.00 saudara Wiratmono meninggalkan pos sektor untuk menjari berita. Saja tunggu sampai jam 10.00 saudara Wiratmono sebelum meninggalkan berdjandji untuk ketemu kembali dengan saja, di rumah saudara Sumanang di Djalan Tjiledug Kebajoran Lama untuk bertemu jam 0.900 malam. Pada jam 10.00 pagi saja meninggalkan pos sektor, ja sebelumnya itu sekira jam 06.00 disektor Senajan telah didrop sendjata sebanyak tiga putjuk beserta dua peti peluru. Dua buah peti peluru ada ditaroh di pos sektor, dan kemudian saja melihat dan saja buka dan saja minta untuk ditjotjokan dengan sendjatanja. Dan sendjata yang ada ditempat lain ternjata bahwa peluru tersebut tidak tjotjok. Kemudian saja perintahkan kawan-kawan yang berada disektor kembali ketempat masing-masing djangan terlalu banyak menjolok. Saja tunggu sampai jam 10.00 karena tidak ada berita apa-apa dan perintah-perintah selanjutnya, maka saja kembali kerumah.

Pada sore harinja sekira jam 20.00 di rumah kami datang gaz dari AURI dengan membawa dua kawan kami jaitu Achmadi dan Sumarno untuk mengedrop sendjata pula sebanyak 7 putjuk beserta pelurunya. Sekira jam 20.30 saja meninggalkan rumah untuk memenuhi djandji kami dengan saudara Wiratmono di rumahnja. Setelah kami tinggalkan rumah jaitu pada tanggal 1 jam setengah sembilan malam. Selanjutnya sampai di rumah saudara Sumanang sudah tidak ada di rumah, kosong dan saja tunggu sampai datangnya saudara Wiratmono. Demikianlah saudara Wiratmono tersebut datang sendirian dengan memberi tahukan bahwa situasi sudah berobah. Dan hanja diminta untuk berhati-hati jaitu sementara tidak pulang dulu kerumah. Selanjutnya diberi tahukan bahwa karena yang di rumah tidak ada jaitu Sumarno maka kami diadjak untuk menemui saudara Iman Supangat di Simpruk Senajan dan kami berdua menudju kesana. Ternjata di rumah saudara Iman Supangat tidak ada, yang ada hanja isterinja, dan kemudian menjatakan pada saudara

Wiratmono yang djuga di rumah Iman Supangat sore tadi didrop sendjata sebanyak 3 putjuk. Diperintahkan oleh saudara Wiratmono supaya sendjata tersebut diamankan.

Kami kemudian akan meninggalkan rumah Sumarno. Demikianlah keadaan malam itu kami bermalam di rumah Djl. Simpruk. Untuk selanjutnya pada tgl. 2 pagi kami menudju ke SBKA untuk melaporkan keadaan dengan poskom. Dan kami ketemu dengan Wiratmono dari SBKA untuk melapor. Selanjutnya mulai tanggal 2 saja tidak pernah kembali kerumah, maksudnja mengamankan diri, dan saja tertangkap pada tanggal 20 Oktober, kira-kira jam 09.30 pagi di rumah Njonja Warsono di Djl. Senopati I nomor 20.

Hakim Ketua : Djadi saja lihat bahwa Prajitno dalam memberikan kesaksian sekarang ini baik urutannya maupun isinya, sama sekali tidak ada bedanja dengan apa yang dikatakan pada waktu pemeriksaan pendahuluan. Kemudian, masih ada beberapa soal yang ingin saja tanyakan, terhadap keterangan-keterangan yang diberikan tadi. Senantiasa disebutkan saudara Sukatno, hubungan apa yang terdapat diantara saudara dengan Sukatno itu; hubungan apa yang ada ?

Saksi : Saudara Sukatno adalah pengurus organisasi dari pada Pemuda Rakjat dan didalam hal ini saja berpendapat bahwa diutus atau mendjadi utusan dari pada CDR. artinja mewakili CDR. Dengan demikian saudara Sukatno berhak untuk menundjuk atau sesudah diputuskan oleh CDR untuk menundjuk saja sebagai komandan sektor.

Hakim Ketua : Didalam organisasi PKI saudara mendjabat sebagai wakil Sekretaris, betul ?

Saksi : Betul, sebagai wakil Sekretaris CS Kebajoran.

Hakim Ketua : Dengan sendirinja atasan saudara adalah CDR, dalam hal ini Sekretaris CDR nja adalah saudara Njono, lalu dengan adanya Katno sebagai atasan saudara dan Njono sebagai atasan saudara ini bagaimana tjaranja mengatur hubungan garis keatasnja, siapa sebetulnja yg. menjadi atasan ?

Saksi : Bahwa pada waktu itu, karena saudara Njono tidak sempat, maka saudara Njono mengirimkan kurier Sukatno itu.

Hakim Ketua : Dus, seakan-akan saudara Sukatno inilah yang

dikuasai Njono untuk mengatur didalam persoalan ini, begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang mengangkat saudara sebagai komandan sektor ?

Saksi : Pada waktu itu saudara Sukatno.

Hakim Ketua : Dimana ?

Saksi : Dgedung SOBSI jang semula rapat akan dilaksanakan dgedung CDR, tapi di CDR ruangan tidak memenuhi sehingga diadakan dgedung SOBSI.

Hakim Ketua : Pengangkatan tertulis atau setjara lisan sadja ?

Saksi : Lisan.

Hakim Ketua : Dan saudara sebelumnja diangkat sudah tahu bahwa perginja kesana adalah untuk pengangkatan ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Waktu datang untuk apa ?

Saksi : Untuk rapat membitjarkan masalah pekerjaan-pekerjaan.

Hakim Ketua : Baru ditempat itu diketahui saudara diangkat dan ditundjuk sebagai komandan sektor. Lalu kepergian Prajitno ke Lubang Buaja untuk mengikuti latihan sedjak tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 itu atas perintah siapa ?

Saksi : Ada surat permintaan dari CDR.

Hakim Ketua : Ada permintaan ?

Saksi : Ada, tertulis dibagi ke Cs-Cs.

Hakim Ketua : Dengan disebut nama supaja Prajitno berangkat ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Masih ingat surat itu tanggal berapa ?

Saksi : Tanggal 1 September 1965.

Hakim Ketua : Jang menandatangani siapa ?

Saksi : Jang menandatangani ialah Sutio.

Hakim Ketua : Anggauta C.D.R. ?

Saudara menganggap bahwa surat itu sjah ?

Saksi : Jah, karena ada Stempel C.D.R.

Hakim Ketua : Lalu kemudian menjiaipkan 50 anggota P.R. dan P.K.I. Kebajoran Baru untuk mengikuti latihan, jang memerintahkan siapa ?

Saksi : Pada waktu itu hasil daripada habis latihan, pulang dari Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Tidak tertulis lagi perintahnja ? Jang ditentukan 50 orang ?

Saksi : Pendjataan dari CDR.

Hakim Ketua : Dari siapa pendjatahannja ?

Saksi : Dari Sukatno, bahwa djumlah 50 ditetapkan dari Sektor Kebajoran.

Hakim Ketua : Dalam rapatnja tanggal 20 itu tadi ditjeriterakan mengikuti rapat pembentukan Sektor dan Komandan-Komandan Sektor, siapa jang memimpin rapat itu ?

Saksi : Sukatno.

Hakim Ketua : Sukatno didalam waktu mengikuti sidang untuk perubahan Sektor siapa jang memimpin rapat ?

Saksi : Saudara Sukatno djuga.

Hakim Ketua : Pada waktu mengikuti briefing tanggal 26 di Lubang Buaja jang memimpin briefing itu siapa ?

Saksi : Pak Saleh.

Hakim Ketua : Pak Saleh, pada waktu itu ada Sukatno disitu ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Mengadakan penggroepan Sukarelawan ini atas pertundjuk siapa ?

Saksi : Ditentukan oleh Saudara Sukatno djuga.

Hakim Ketua : Kemudian mengikuti lagi briefing di Lubang Buaja, dalam hal ini jang mimpin mungkin djuga masih tetap Pak Saleh. Perginja ke Lubang Buaja itu dasar perintah atau dasar undangan atau kemauan sendiri ?

Saksi : Atas dasar permintaan tanggal 26.

Hakim Ketua : Apakah itu ditentukan, tanggal 26 dan tanggal 28 kembali lagi ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Pada waktu mengikuti briefing jang terakhir itu djuga ditentukan tanggalnja ?

Saksi : Tidak, tanggal 29 itu mendadak mendapat undangan pagi-pagi.

Hakim Ketua : Oh djadi mendapat undangan ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Itu undangan dari siapa ?

Saksi : Pada waktu itu Kasiman jang membawa.

dikuasai Njono untuk mengatur didalam personalia ini, begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang mengangkat saudara sebagai komandan sektor ?

Saksi : Pada waktu itu saudara Sukatno.

Hakim Ketua : Dimana ?

Saksi : Dgedung SOBSI jang semula rapat akan dilaksanakan dgedung CDR, tapi di CDR ruangan tidak memenuhi sehingga diadakan dgedung SOBSI.

Hakim Ketua : Pengangkatan tertulis atau setjara lisan sadja ?

Saksi : Lisan.

Hakim Ketua : Dan saudara sebelumnja diangkat sudah tahu bahwa perginja kesana adalah untuk pengangkatan ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Waktu datang untuk apa ?

Saksi : Untuk rapat membitjarakan masalah pekerdjaan-pekerdjaan.

Hakim Ketua : Baru ditempat itu diketahui saudara diangkat dan ditundjuk sebagai komandan sektor. Lalu kepergian Prajitno ke Lobang Buaja untuk mengikuti latihan sedjak tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 itu atas perintah siapa ?

Saksi : Ada surat permintaan dari CDR.

Hakim Ketua : Ada permintaan ?

Saksi : Ada, tertulis dibagi ke Cs-Cs.

Hakim Ketua : Dengan disebut nama supaja Prajitno berangkat ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Masih ingat surat itu tanggal berapa ?

Saksi : Tanggal 1 September 1965.

Hakim Ketua : Jang menandatangani siapa ?

Saksi : Jang menandatangani ialah Sutio.

Hakim Ketua : Anggaula C.D.R. ?

Saudara menganggap bahwa surat itu sjah ?

Saksi : Jah, karena ada Stempel C.D.R.

Hakim Ketua : Lalu kemudian menjiapkkkan 50 anggota P.R. dan P.K.I. Kebajoran Baru untuk mengikuti latihan, jang memerintahkan siapa ?

Saksi : Pada waktu itu hasil daripada habis latihan, pulang dari Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Tidak tertulis lagi perintahnja ? Jang ditentukan 50 orang ?

Saksi : Pendjataan dari CDR.

Hakim Ketua : Dari siapa pendjatahannja ?

Saksi : Dari Sukatno, bahwa djumlah 50 ditetapkan dari Sektor Kebajoran.

Hakim Ketua : Dalam rapatnja tanggal 20 itu tadi ditjeriterakan mengikuti rapat pembentukan Sektor dan Komandan-Komandan Sektor, siapa jang memimpin rapat itu ?

Saksi : Sukatno.

Hakim Ketua : Sukatno didalam waktu mengikuti sidang untuk perubahan Sektor siapa jang memimpin rapat ?

Saksi : Saudara Sukatno djuga.

Hakim Ketua : Pada waktu mengikuti briefing tanggal 26 di Lubang Buaja jang memimpin briefing itu siapa ?

Saksi : Pak Saleh.

Hakim Ketua : Pak Saleh, pada waktu itu ada Sukatno disitu ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Mengadakan penggroepan Sukarelawan ini atas pertundjuk siapa ?

Saksi : Ditentukan oleh Saudara Sukatno djuga.

Hakim Ketua : Kemudian mengikuti lagi briefing di Lubang Buaja, dalam hal ini jang numpin mungkin djuga masih tetap Pak Saleh. Perginja ke Lubang Buaja itu dasar perintah atau dasar undangan atau kemauan sendiri ?

Saksi : Atas dasar permintaan tanggal 26.

Hakim Ketua : Apakah itu ditentukan, tanggal 26 dan tanggal 28 kembali lagi ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Pada waktu mengikuti briefing jang terakhir, itu djuga ditentukan tanggalnja ?

Saksi : Tidak, tanggal 29 itu mendadak mendapat undangan pagi-pagi.

Hakim Ketua : Oh djadi mendapat undangan ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Itu undangan dari siapa ?

Saksi : Pada waktu itu Kasiman jang membawa

sudah tidak ada lagi.

Hakim Ketua : Selama didalam rangka gerakan itu kalau ada laporan ditunjukkan pada siapa laporan-laporan itu ?

Saksi : Kami melaporkan kepada saudara Sukatno mula-mula, setelah itu tidak pernah kami laporkan, hanya kami laporkan kepada poskom.

Hakim Ketua : Poskom ? Poskom akan meneruskan, sudah pernah ditjek, sudah pernah diteruskan ?

Saksi : Belum pernah kami tjek.

Hakim Ketua : Oditur, ada jang akan ditanjakan ?

Oditur : Saudara Prajitno, tadi saudara mentjeriterakan tentang bung Wiratmono, Wiratmono itu hubungannya dengan sektor bagaimana ?

Saksi : Wiratmono dalam hal ini kedudukannya sebagai Pos Komando dimana pos komando ini sudah dibentuk dari orang-orang CDR.

Hakim Ketua : Djadi semua laporan-laporan dari sektor ditunjukkan keposkom ?

Saksi : Ja.

Oditur : Djadi semua laporan-laporan dari sektor kepada poskom ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Ada lagi satu jang ingin saja tanjakan, dalam berita atjara jang lalu, jang pernah kau tanda tangani disebutkan bahwa pemberangkatan dan pulang kami dengan kendaraan jang dibiajai oleh CDR. Itu kendaraan dari siapa ?

Saksi : Artinja diatur oleh pimpinan rombongan kami, jang dalam hal ini adalah Saudara Kasiman.

Hakim Ketua : Djadi atas usahanya, tapi kendaraan, kendaraan CDR ?

Saksi : Bukan, CDR jang mengusahakannya.

Hakim Ketua : Dus CDR jang mengusahakan dan mendjamin kendaraan transport baik untuk perginja maupun untuk pulangnja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Pernah kau sebutkan djuga bahwa semua pelatihnja adalah dari AURI, mana kamu tahu kalau semuanya dari AURI ?

Saksi : Dari pakaiannya dapat saja ketahu.

Hakim Ketua : Ada jang menggunakan tanda pangkat ?

Saksi : Menggunakan tanda pangkat djuga.

Hakim Ketua : Tahunja dari tanda pangkat, tahunja kalau mereka pasti dari AURI ?

Saksi : Ja, karena Lubang Buaja adalah wilayah AURI.

Hakim Ketua : Keshuruhannya itu dari AURI ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Lalu kau sebutkan bahwa ternyata kemudian bahwa latihan-latihan itu diselenggarakan disana adalah dalam rangka Dwikora, tetapi sebenarnya merupakan persiapan untuk gerakan 30 September, dari mana bisa kau ketahui ini ?

Saksi : Ja, artinja didjuruskan, sebab kami seolah-olah didjuruskan untuk mengikuti, jaitu membantu gerakan sebagaimana briefing jang diadakan oleh Pak Saleh itu.

Hakim Ketua : Diberi tahukan setjara umum, apa khusus hanya pada-mu ?

Saksi : Khusus Komandan-komandan Sektor.

Hakim Ketua : Komandan Sektor satu, dua, tiga, empat, lima dan enam ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Komplit, bagaimana tjaranja memberi tahukan ?

Saksi : Ja, bahwa gerakan itu untuk menggagalkan coup Dewan Djendral, akan dimulainya telah ditetapkan pada hari H I/D-0400.

Hakim Ketua : Tidak didjelaskan apa H I itu ?

Saksi : Didjelaskan, H I adalah hari tanggal 1 Oktober dan D 0400 adalah djam 04.00 pagi.

Hakim Ketua : Didjelaskan oleh siapa ?

Saksi : Oleh Hasan dan Pak Saleh.

Hakim Ketua : Saudara Njono, sudah dengar tadi itu ?

Terdakwa : Sudah.

Hakim Ketua : Kamu tahu kegiatannya saksi ini atau tidak ?

Terdakwa : Tidak tahu.

Hakim Ketua : Tidak, belum pernah ada laporan mengenai kegiatan Komandan Sektor ?

Terdakwa : Tidak pernah dari saksi ini.

Hakim Ketua : Adakah keterangan diberikan itu jang menurut pendapat Njono bertentangan dengan kebenaran ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Benar djadinja ?

Terdakwa : Benar.

Hakim Ketua : Benar juga pendapat dia bahwa Sukatno itu adalah jang mendapatkan kewenangan dari Njono untuk mengatur persoalan ini ?

Terdakwa : Ja, sudah saja djelaskan itu pada pemeriksaan kemarin.

Hakim Ketua : Djadi benar ?

Terdakwa : Ja, benar, Sukatno dengan Kasiman, djadi lebih tepat disebut Kasiman begitu, tidak CDR.

Hakim Ketua : Djadi Sukatno dan Kasiman ?

Terdakwa : Atau lain-lainnja. Saudara Prajitno jang menjebut Sukatno dan Kasiman, itu lebih tepat dari pada CDR.

Hakim Ketua : Begitu sadja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Agar dihadapkan saksi Sastrosandjojo bin Tjitrowikongko ?

Hakim kepada saksi Sastrosandjojo bin Tjitrowikongko.

Hakim Ketua : Saja minta berdiri dulu.
Nama lengkapnja siapa ?

Saksi : Sastrosandjojo bin Tjitrowikongko.

Hakim Ketua : Ada aliasnja ?

Saksi : Susetyo.

Hakim Ketua : Lagi alias lainnja ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Lahir dimana ?

Saksi : Djatirata daerah Djatirsana Kabupaten Wonogiri.

Hakim Ketua : Tanggal ?

Saksi : Tanggal 17 September 1928.

Hakim Ketua : Tempat tinggal terahir sebelum ditangkap ?

Saksi : di Kajumanis Rt. 6 Rk. 5.

Hakim Ketua : Pekerdjaan terahir ?

Saksi : Pekerdjaan terahir mendjadi anggota dipekerdjakan pada Staf Sekretariat PKI Djakarta Raja, disamping itu berdagang.

Hakim Ketua : Dagang apa ?

Saksi : Dagang ada djam tangan, ada mesin tik, dll.

Hakim Ketua : Tidak tentu ?

Saksi : Tidak tentu.

Hakim Ketua : Ditangkapnja tanggal berapa ?

Saksi : Tanggal 3 Oktober.

Hakim Ketua : Dimana ditangkap ?

Saksi : Dikampung Kawi-Kawi.

Hakim Ketua : Siapa jang menangkap waktu itu ?

Saksi : Dari ABRI.

Hakim Ketua : Dan sedjak itu ditahan ja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Agamanja Sandjojo apa ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Bersedia untuk didjadikan saksi dalam perkara ini ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Dan bersedia djuga disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Kenal sama NJONO, kenal, kenal sama bung Njono ?

Saksi : Kenal.

Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga ?

Saksi : Bagaimana ?

Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Sama sekali tidak ada ?

Saksi : Sama sekali tidak ada.

Hakim Ketua : Sebab bung Njono djuga orang Djawa Tengah soalnya, tidak ada hubungan keluarga ja ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Sebelum memberikan keterangan akan disumpah dulu, menurut agama Islam, ja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Supaja diikuti apa jang saja utjapkan ?

Saksi : Ja.

Penjampahan : WALLAHI, DEMI ALLAH, SAJA BERSUMPAH, bahwa saja didalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa ini akan memberikan penjaksaan terhadap perkara tertuduh Njono menurut keadaan jang sebenarnja, dan penuh kedjudjuran. Tuhan akan menurunkan siksa-kutukannja atas diri saja apabila saja melanggar sumpah saja ini.

Hakim Ketua : Sudah, duduk !

Sandjojo dihadapkan untuk memberikan kesaksian dalam perkara Bung Njono, didalam rangka apa jang disebut "Gerakan 30 September" atau GESTOK. Dida-

lam penjaksaan itu diminta agar kamu mentjeriterakan segala sesuatu yang kamu ketahui, kamu dengar, kamu alami dan kamu lihat sendiri. Mentjeriterakannya supaya dengan setjara teratur supaya djelas sampai se-djelas mungkin sampai tidak perlu ada yang ditanyakan lagi. Tjoba kamu tjeriterakan apa yang kamu ketahui didalam rangka G-30S ini, bagaimana hubungan yang ada antara kamu dengan Bung Njono !

Saksi : Bisa mulai ?

Hakim Ketua : Ja.

Saksi : Kira-kira bulan Agustus dan September diadakan andjuran dan djuga pengaturan mengenai mengikuti latihan Pemuda Sukarelawan di Halim Perdanakusuma. Jang mengatur dalam hal ini adalah bung Njono bersama-sama dengan Sukatno dari Pemuda Rakjat. Usaha itu menurut pengertian saya adalah usaha yang resmi dan bersamaan dengan adanya latihan di Halim Perdana-kusuma itu yang kemudian saya tahu disebut Lubang Buaja itu djuga diadakan andjuran mengikuti latihan-latihan Sukarelawan dan Hansip di Perusahaan, Kampung dan lain-lain. Latihan itu diperlukan untuk memenuhi panggilan tanah air jaitu untuk mengganjang Nekolim Malaysia. Adapun djumlahnya yang dilatih saja sendiri tidak tahu presis berapa, tetapi adalah banyak jaitu kira-kira menurut gelagatnya dan apa itu namanja/ istilah Djawa ombjaknya itu, istilah Djawa ombjak itu apa namanja (Hakim Ketua menerangkan = ramenja) menurut ramenja kira-kira ada seribuan, itu menurut pikiran saja.

Adapun sampai terdjadinja Gerakan 30 September itu saja sendiri tidak tahu, karena tidak pernah dibitjarkan oleh Bung Njono kepada saya dan setjara Partai yang saya ikuti itu adalah tidak pernah mengadakan rapat untuk itu maupun rentjana untuk Gerakan itu.

Tanggal 2 Oktober kira-kira djam 3 sore saja dipanggil oleh bung Njono kerumahnja. Disitu diminta oleh bung Njono supaya saya suka membantu mendengarkan suara-suara, situasi, gerak-gerik yang ada karena diperlukan untuk membantu menyelesaikan peristiwa 30 September itu. Itu djuga saya sanggupi untuk mentjari suara-suara, gerak-gerik, situasi.situasi itu dengan maksud memang baik untuk menyelesaikan/membantu penyelesaian Pemerintah dalam hal ini.

Kemudian pada tanggal 3 kira-kira djam 3 siang

saja sedang berada dikantor PKI Djakarta Raya seperti biasa, datang seorang pesuruh namanja Sumirat bahwa saya dipanggil oleh seorang namanja Wiratmono yang rumahnja dikampung Kawi-Kawi itu, terus disana ketemu dengan bung Njono, pada waktu itu bung Njono sudah berada dirumah Wiratmono. Kira-kira djam 4 lebih, djam 16.00 lebih sedikit, kira-kira lebih seperempat djam begitu datang ABRI terus menangkap termasuk saja, bung Njono, seorang lagi Kuntjahjo, terus satu orang lagi yang berada diluar rumah jaitu namanja Sugih, terus seorang yang mondok dirumahnja Wiratmono itu namanja Pak Karjo Dihardjo, terus ditahan sampai sekarang ini.

Hakim Ketua : Wiratmononja ?

Saksi : Pada waktu itu dia bilang mau tjari minuman terus sampai sekarang saja tidak tahu dimana.

Hakim Ketua : Didalam Berita atjara yang pernah dibuat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirimu itu kamu djelaskan bahwa untuk mempersiapkan tenaga untuk Lubang Buaja ini adalah salah satu dari kegiatan bung Njono sebelum terdjadi G. 30. S., jaitu mempersiapkan tenaga untuk dilatih di Lubang Buaja. Sering ia memberikan informasi pada CS-CS dan orang yang dipanggil dan diberi informasi itu berupa mengenai situasi daerah soal-soal pidato-pidato Presiden dan meliputi keamanan dan sebagainya.

Tahunja, apa kamu pernah mengikuti informasi.informasi yang diberikan ikut pada waktu memberikan briefing ?

Saksi : Tidak selamanja, tapi pernah mengikuti.

Hakim Ketua : Dan memang benar itu yang diberikan ?

Saksi : Kalau mengenai soal Lubang Buaja itu memang diandjurkan oleh Njono.

Hakim Ketua : Kalau informasi mengenai situasi daerah apakah meliputi keadaan daerah dan keamanannya, begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Lalu persoalan Dewan Djenderal itu tidak pernah dengar di-informasikan ? Kamu mendengar tentang Dewan Djenderal itu kapan ?

Saksi : Bulan September kira-kira sesudah tanggal 20-an, kira-kira 22 atau tanggal 23.

Hakim Ketua : Jang memberitahukan siapa ?

Saksi : Djuga bung Njono.

Hakim Ketua : Dimana diberitahukannya ?

Saksi : Dirumahnya bung Njono.

Hakim Ketua : Dalam rangka apa diberitahukannya, waktu ada rapat-kah atau sendirian diberitahukan ?

Saksi : Sendirian.

Hakim Ketua : Tidak ada orang lain ?

Saksi : Pada waktu itu tidak ada.

Hakim Ketua : Tjara memberitahukannya bagaimana ?

Saksi : Bahwa pada pokoknya sekarang ini ada Dewan Djenderal yang membahayakan negara.

Hakim Ketua : Lalu ?

Saksi : Hanya begitu saja.

Hakim Ketua : Lalu dijelaskan "selain ada Dewan Djenderal bung Njono pernah menjelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu oleh Njono mengingat gawatnya keadaan kesehatan Presiden", orang lain yang dianggap perlu itu siapa ? Kamu bisa menentukan orang-orang yang dianggap perlu oleh bung Njono yang diberitahukan mengenai gawatnya kesehatan Presiden, siapa orang-orang yang dianggap perlu oleh bung Njono ?

Saksi : Yang dianggap perlu itu juga kader-kader yang diatur oleh bung Njono sendiri.

Hakim Ketua : Siapa-siapa orangnya ?

Saksi : Ja misalnya pimpinan CDR sendiri.

Hakim Ketua : Siapa-siapa yang hadir waktu itu, waktu memberitahukan gawatnya sakitnya Presiden ?

Saksi : Saya tidak tahu sebab dia menerangkan itu hanya pada saja sendiri.

Hakim Ketua : Kapan kamu ketahui bahwa ada orang-orang dianggap perlu oleh Bung Njono, kapan diberitahu ?

Saksi : Karena ada pemanggilan kepada CS-CS itu.

Hakim Ketua : Langkah-langkah yang diambil oleh PKI umumnya dan bung Njono pada khususnya untuk menghadapi Dewan Djenderal ataupun kesehatan Presiden yang gawat itu bung Njono mengatakan agar orang-orang PKI memperhatikan gerak-gerik golongan lain yang mentjurigakan, golongan lain ini yang mana ?

Saksi : Pada waktu itu perdjelasannya organisasi-organisasi maupun kumpulan-kumpulan gelap.

Hakim Ketua : Kumpulan-kumpulan gelap itu misalnya apa ?

Saksi : Kalau pasnya saja tidak ingat misalnya Kuo Mintang seperti gerombolan-gerombolan yang matjam-matjam yang pokoknya kita disuruh mengawasi.

Hakim Ketua : Ja, kalau tidak tahu siapa yang harus diawasi bagaimana kamu akan mengawasi. Saya tanjakan, yang diawasi antara lain juga organisasi gelap, tapi kamu tidak bisa menjelaskan yang gelap ini yang bagaimana misalnya. Yang kamu awasi itu apa ?

Saksi : Yang tidak disahkan oleh Pemerintah.

Hakim Ketua : Kelihatan tapi ?

Saksi : Ja pokoknya kita disuruh awasi.

Hakim Ketua : Ja pokoknya yang kamu awasi itu siapa ?

Saksi : Misalnya Kuo Mintang.

Hakim Ketua : Tahunja itu Kuo Mintang itu dari mana ?

Saksi : Jaitu kita disuruh mendengarkan ada gerak-gerik atau bagaimana.

Hakim Ketua : Dus kalau ada desas-desus terus diawasi begitu ?

Saksi : Tidak — diperhatikan.

Hakim Ketua : Artinja diperhatikan itu bagaimana ? Kamu itu tamatan S.M.P. jangan seperti orang nggak tahu apa-apa. Menurut riwayat hidupmu itu tamat S.M.P. !

Saksi : Ja Pak.

Hakim Ketua : Jangan mempersulit, kamu kan tadi sudah disumpah beri jawaban yang sebenarnya saja. Mentang-mentang orang pada ketawa terus senang. Tjoba jelaskan mengenai yang diawasi itu !

Saksi : Antara lain namanya Tri Sutji, Raka Pasti, dll.

Hakim Ketua : Apa itu Raka Pasti ?

Saksi : Itu saja sendiri kurang tahu pasti Pak ! Tapi itu ada organisasi yang mentjurigakan.

Hakim Ketua : Dimana organisasi gelap itu ?

Saksi : Saya tidak tahu, itu dari bung Njono.

Hakim Ketua : Engkau kan disuruh mengawasi yang mentjurigakan itu ?

Saksi : Artinja kalau ada gerak-gerik supaya dilaporkan kepada bung Njono supaya nanti kita jangan sampai kena pantjingan, jangan sampai terdjadi hal-hal mentjurigakan negara. Itu Pak.

Hakim Ketua : Sebenarnya kamu itu orang pintar, tapi pura-pura bodoh !

Waktu kamu diberi tugas oleh bung NJONO pada tanggal 2 Oktober, jaitu untuk membuka Kantor CDR, memperhatikan berita-berita keadaan situasi umum dan ABRI. Tugas itu diterima dimana ?

Saksi : Dirumahnya bung Njono.

Hakim Ketua : Tidak di C.D.R. ?

Saksi : Tidak di Kantor C.D.R.

Hakim Ketua : Tertulis atau biasa setjara memerintahkannya ?

Saksi : Biasa saja untuk melaksanakannya.

Hakim Ketua : Dan apa jang kau kerdjakan ?

Saksi : Ja disitu saja setjara biasa, djadi barang kali ada tamu seperti biasa itu.

Hakim Ketua : Lalu memperhatikan situasi-situasi umum dan ABRI, apa jang kau lakukan ?

Saksi : Kalau itu penglihatan saja sendiri jaitu bahwa pada waktu itu menurut jang saja ketahui bila ABRI memakai putih-putih dipundaknya.

Hakim Ketua : Apa lagi ?

Saksi : Ada peraturan di Djakarta berlaku djam malam, terus keadaan didjalan pada waktu aman saja tidak ada kejadian apa-apa, terus orang-orang jang dilatih di Lubang Buaja, itu ada jang pulang menemui itu, saja melihat pada waktu saja akan pergi kerumahnya Wiratmono.

Hakim Ketua : Bagaimana tahu mereka pulang dari Lubang Buaja ?

Saksi : Sebab membawa perbekalan, jaitu membawa tikar.

Hakim Ketua : Apa jang bawa tikar itu pasti pulang dari sana ?

Saksi : Tapi kelihatan (hadirin ketawa).

Hakim Ketua : Ja dia itu bukan setan, masa nggak kelihatan. Apa tandanya dari Lubang Buaja apa ada tulisannya Lubang Buaja ?

Saksi : Saja tahu dari pembijtaraannya itu.

Hakim Ketua : Nah djadi dalam pembijtaraannya itu kamu bisa dengar ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Djadi oleh karena itu kamu tahu bahwa mereka pulang dari Lubang Buaja.

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Njono, apakah keterangan jang diberikan oleh saksi itu betul ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Benar, memang pernah diberitahukan bahwa adanya Dewan Djenderal dan bahaya Dewan Djenderal kemudian supaya waspada memperhatikan gerak-gerik dan pada tanggal 2 Oktober diperintahkan diberikan tugas untuk membuka kantor CDR memperhatikan berita situasi umum dan ABRI, apa betul itu ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Dan kemudian dia melaporkan kepada Njono mengenai pada tanggal 3 Oktober itu adanya orang-orang jang pulang dari Lubang Buaja, berlakunya djam malam di Djakarta, apa dilaporkan olehnya ?

Terdakwa : Jah saja tahu tetapi karena dia mendjaga kantor.

Hakim Ketua : Djadi keterangan jang diberikan itu tidak ada jang ditambahkan ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Kepada Oditur diminta agar saksi Sutarno Djogosudarjo dihadapkan untuk diperiksa.

Oditur : Memerintahkan supaya saksi Sutarno Djogosudarjo dihadapkan kepada sidang.

Hakim Ketua : Saudara Sutarno supaya berdiri.

Saksi : Baik.

Hakim Ketua : Nama lengkapnya ?

Saksi : Sutarno bin Djogosudarjo.

Hakim Ketua : Ada aliasnya ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Lahirnya dimana ?

Saksi : Di Solo.

Hakim Ketua : Tanggal ?

Saksi : Tahun 1930, tanggal tidak ada.

Hakim Ketua : Tempat tinggal terakhir ?

Saksi : Dukuh atas Rt. 4 Rk. 4 Tanahabang.

Hakim Ketua : Pekerjiaan terakhir ?

Saksi : P.T. Rama, dalam organisasi Pemuda Rakjat, sebagai anggauta biasa bukan pimpinan.

Hakim Ketua : Ditangkap tanggal berapa ?

Saksi : Tanggal 1 di Front Nasional, oleh RPKAD.

Hakim Ketua : Sedjak itu ditahan ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Agama dari Tarno apa ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Dalam penjaksaan ini apa ada kesediaan dari Tarno untuk menjadi saksi, dan bersedia disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Kenal dengan saudara Njono ?

Saksi : Kenal.

Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Sebelum menundjukan kesaksian saja akan sumpah dulu.

Saksi lalu disumpah menurut agamanya (Islam)

Hakim Ketua : Saudara disilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Tarno dihadapkan kesaksian didalam perkara Njono ini dan saja minta diterangkan dalam rangka G. 30 S. ini atau GESTOK itu dan dalam rangka ini dalam rangka GESTOK itu tjoba agar kamu mentjeriterakan apa jang kau ingat dan kau lihat dan kau alami dan supaya ditjeriterakan kepada Mahkamah ini setjara djelas, setjara tenang dan setjara teratur, sedemikian rupa kalau bisa setjara djelas itu tak perlu lagi diadakan pertanyaan-pertanyaan. Tjoba tjeriterakan jang kau ketahui.

Saksi : Pada tanggal 30 kami diperintahkan oleh Muhamad untuk berkumpul di Petamburan, atau 30 malam mulai djam 12 malam jaitu malam tanggal 1 kami diperintahkan oleh Muhamad berkumpul di Petamburan dan kami kerdjakan dan kami djuga kumpul disitu datang di Petamburan djam 12.30 kira-kira, tanggal 1 antara djam 03.00 — 04.00 saudara Muhamad mengumpulkan para pimpinan-pimpinan Sukarelawan termasuk saja disitu memberikan pendjelasan bahwa kita sukarelawan mendapatkan tugas dalam rangka menjelamatkan Bung Karno sebagai P.B.R. dan Pemerintah R.I. jang sjah dari coup de'tat Dewan Djendral. Didjelaskan oleh Muhamad pada malam itu dan malam itu kami djuga termasuk dibagi pakaian hidjau dan pada tanggal 1 pagi kira-kira djam 08.00 kami diperintahkan oleh Muhamad supaya mengambil appel para Sukarelawan jang ada disitu, djumlah kira-kira 210. Didalam appel Amat Muhamad mendjelaskan bahwa para Sukarelawan setelah appel tidak diperkenankan untuk pulang, supaya tetap berada ditempat itu, dan setelah kami bubarkan sebahagian ada jang masuk dirumah-rumah

pinggir kali dan sebahagian ada jang melandjutkan latihan baris-berbaris. Sehari disitu jaitu sampai makan siang dan selandjutnja kira-kira djam 16.00 sampai 17.00 Amat Muhamad menjerahkan sendjata kepada kami sebanjak kira-kira 29 (duapuluh sembilan). Setelah sendjata diserahkan kepada kami lantas kira-kira djam 18.00 kami mendapat perintah lagi dari Muhamad supaya sore itu semua pasukan dipindahkan ke Front Nasional. Tetapi disamping itu sebelumnya supaya mendrop beberapa anggota Sukarelawan ditempat objek-objek vital jaitu diantaranya Listrik Karet, Kantor Telegraf dan sisanja supaya ditempatkan dikantor Pengurus Besar Front Nasional. Dan pekerjaan itu kami lakukan jaitu jang di Listrik kami tempatkan kurang lebih 15 orang dengan 5 (lima) putjuk sendjata. Jang kedua dengan berkendara truck kami bawa kira-kira 30 orang menudju kekantor telegraf ke Djl. Thamrin dengan sendjata kira-kira 10 (sepuluh) putjuk. Setelah mendrop di Djl. Thamrin kami kembali ke Petamburan lagi dengan maksud mengambil Sukarelawan jang masih di Petamburan dan kami lakukan dengan membawa kira-kira penuhnja truck sebanjak 30 orang dan pada waktu itu belum membawa sendjata, jang bersendjata tjuma saja sendiri dan setelah datang di Front Nasional kami terus ditangkap oleh RPKAD.

Hakim Ketua : Djam berapa kira-kira ?

Saksi : Kira-kira djam 20.00 — 21.00 malam.

Hakim Ketua : Lalu setelah ditangkap ?

Saksi : Setelah ditangkap kami bersama-sama 30 orang lainnja dengan kendaraan dibawa ke Guntur.

Hakim Ketua : Dibawa ke Guntur, langsung ?

Saksi : Ja. Kami sendiri dibawa ke KOSTRAD terus kembali bersama-sama 30 orang itu lalu dibawa langsung ke Guntur.

Hakim Ketua : Atas dasar keterangan jang lalu saja masih minta pendjelasan. Pada tanggal 30 tadi dikatakan kumpul, atas perintah siapa kumpul itu, atas perintah Ahmad Muhamad ?

Saksi : Muhamad sendiri.

Hakim Ketua : Langsung kepada kamu memerintahkannya atau melalui orang lain ?

Saksi : Langsung kepada saja sendiri.

Hakim Ketua : Pada tanggal 30 ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Lalu pada tanggal 1 Oktober kurang-lebih djam 05.00 pagi atau antara djam 03.00 dan 04.00 seperti kamu katakan tadi, menerima pembagian pakaian seragam hidjau, dari siapa itu terima ?

Saksi : Pakaian hidjau itu sudah ditempat penggergadjian.

Hakim Ketua : Tempat penggergadjian dimana kamu berkumpul ?

Saksi : Kami bertempat didekat penggergadjian, tempatnja agak sedikit djauh dari tempat kami berkumpul itu.

Hakim Ketua : Lalu menerima pembagian itu dari siapa ?

Saksi : Dari Muhamad.

Hakim Ketua : Tjaranja membagi ?

Saksi : Tjaranja membagi tidak teratur, tjuma bergantian, datang pakai, keluar, datang pakai, keluar begitu sadja.

Hakim Ketua : Diatur demikian rupa setjara bergiliran ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang mendjaga ditempat pakaian itu siapa ? Jang membagikan ?

Saksi : Jang membagikan tidak ada.

Hakim Ketua : Tahunja kalau disitu ada pakaian ?

Saksi : Muhamad memberi tahu bahwa pakaian sudah siap di-penggergadjian.

Hakim Ketua : Saudara tadi mengaku sebagai pemimpin Sukarelawan, sudah dilatih di Lubang Buaja apa belum, djadi pemimpin ?

Saksi : Sudah.

Hakim Ketua : Kapan ?

Saksi : Pada kira-kira hampir achir Agustus.

Hakim Ketua : Achir Agustus, berapa lama ?

Saksi : Lima hari.

Hakim Ketua : Hanja satu kali itu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Tidak pernah kembali lagi ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Waktu diperintahkan dari Ahmad Muhamad untuk mendjaga atau memimpin penempatan pasukan-pasukan diobjek vital, itu didjelaskan diobjek vital jang mana ? Apa situ sendiri jang menentukan objek vitalnja ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Ahmad Muhamad jang menentukan ?

Saksi : Ja, jang kita kuasai ialah daerah Karet dan Gambir.

Hakim Ketua : Kamu djelaskan djuga „karena hanja tersedia satu truck sadja untuk pengangkutan pasukan tidak dapat menempatkan pasukan sekali gus”. Dari siapa itu truck ?

Saksi : Kalau tidak salah dari PELNI.

Hakim Ketua : Pengemudinja djuga dari PELNI ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Tinggalnja memang disana ? Di Petamburan ?

Saksi : Di Petamburan.

Hakim Ketua : Djuga kamu katakan tadi bahwa „hanja saja sendiri jang bersendjata pada waktu menduduki Front Nasional”, sendjata apa itu ?

Saksi : G-3.

Hakim Ketua : Bagaimana, disini (deretan barang bukti) ada ?

Saksi : Ini ada, jang paling kanan (sambil menundjuk sendjata/bukti jang terletak dimedja).

Hakim Ketua : Lalu sendjatanja dirampas/dilutjuti. Bagaimana dengan jang didrop dilain-lain tempat ada laporan bahwa mereka ditangkap atau dilutjuti atau disergap masih ada laporan ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dus tidak diketahui lagi bagaimana nasibnja ?

Saksi : Tidak diketahui setelah kami ditangkap itu.

Hakim Ketua : Setelah ditangkap tidak ada laporan dan tidak pernah lagi mengetahui bagaimana nasibnja teman-teman itu ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Didalam tahanan tidak pernah ketemu salah satu teman-teman jang didrop itu ?

Saksi : Dalam satu blok tidak ada.

Hakim Ketua : Dilain blok tidak ada ?

Saksi : Tidak ketemu.

Oditur : Dari 270 orang anggota jang Saudara namakan sukarelawan itu dari golongan mana sadja mereka ?

Saksi : Dari Pemuda Rakjat dan sebagian besar dari SOBSI.

Oditur : Dari golongan lain tidak ada ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dari pembela mungkin akan ada pertanyaan jang akan diadjudkan kepada saksi ?

Pembela : Tidak ada.

Hakim Ketua : Njono mengenai hal ini Saudara tak tahu-menahu karena hubungannya dengan Achmad Muhammad yang kemudian itu sebagai penguat hubungan dari Achmad Muhammad dan atas dasar apa yang dilakukan oleh saksi ini itulah yang kemarin dilaporkan kepada bung Njono mengenai telah didudukinya kembali objek-objek vital ini.

Apakah dari Oditur masih ada hal-hal yang akan ditanyakan kepada terdakwa ?

Oditur : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dari Pembela juga tidak ada yang akan ditanyakan sebelum kami akhiri pemeriksaan saksi ini ?

Pembela : Tidak ada.

Hakim Ketua : Mahkamah menganggap tjukup dalam pemeriksaan terhadap saksi yang dihadapkan didepan sidang dan kemudian akan membuatkan kesaksian tertulis yang disampaikan oleh beberapa Pendjabat didalam rangka persoalan yang sedang kita periksa ini.

Jang pertama adalah dari PEPELRADA DJAYA DAN SEKITARNJA yang akan saja batjakan untuk keselu-ruhanja sebagai berikut :

(Kemudian dibatjakan Pernyataan dari PANGDAM V/DJAYA selaku PEPELRADA dan surat dari MENTERI KDCI Djaya).

Saja landjutkan pematjaan surat/barang bukti yang dilampirkan pada berkas perkara ini ialah :

1. Dekrit No. 1 tentang pembentukan DEWAN REVOLUSI INDONESIA dst.
2. KEPUTUSAN No. 1 tentang Susunan DEWAN REVOLUSI INDONESIA dst.

Hakim Ketua : Setelah didengar saksi-saksi dan dibatjakan penjelasan tertulis dibawah sumpah dan dibatjakan sekaligus Dekrit-dekrit sebagai barang bukti dari Gerakan 30 September dan Dewan Revolusi itu didepan sidang ini, masih akan ditanyakan kepada Oditur apakah masih ada sesuatu hal yang akan diadjudkan atau dikedepanlan didalam Sidang ini ?

Oditur : Saja serahkan kepada Panitera untuk memperlihatkan Surat-Surat Bukti yang dapat disita dari Saudara Njono yang sekarang ada pada diantaranya surat-surat dari Njonja Suharti Suwarto.

Hakim Ketua : Dari Njonja Suharti Suwarto sadja ?

Oditur : Mengenai pembentukan team Kesehatan. Kalau tidak

salah bukti nomer 2. Dan djuga supaya diperlihatkan laporan-laporan dari PHB-PHB dan djuga analisa analisa dari Saudara Njono sebanjak kalau saja tidak salah 5 dan seterusnya.

Hakim Ketua : Ada lagi, sudah ?

Barang bukti yang dimintakan oleh Oditur untuk sepe-nuhnja diakui sebagai barang-barang yang disita dari tasnja Njono.

Apakah ada hal-hal lain yang masih akan diadjudkan dalam rangka ini ?

Oditur : Dalam rangka pemeriksaan ini saja tidak akan menga-djukan hal-hal lagi.

Hakim Ketua : Dari Pembela mungkin ada hal-hal yang hendak di-adjudkan ?

Pembela : Tidak ada.

Hakim Ketua : Njono, apakah masih ada hal-hal yang akan diadjudkan ? Oditur, apa yang akan diadjudkan ?

Oditur : Saja disini hanya ingin menundjukkan kepada Saudara Njono gambar yang diambil waktu pengangkatan majat-majat dari para almarhum-almarhum Perwira Tinggi dan Pertama dari Angkatan Darat yang telah diketemu-kan di Lubang Buaja. (Oditur menundjukkan gambar-gambar yang dimaksud kepada terdakwa).

Oditur : Mengenai barang-barang bukti saja kira sudah selesai.

Hakim Ketua : Apakah Pembela masih akan mengadjudkan sesuatu ?

Pembela : Saja ingin..... (?) Minta diberikan kesempatan oleh Bapak Ketua untuk mengenai beberapa hal menga-djukan saksi.

Hakim Ketua : Mengenai ?

Pembela : Mengadjudkan Saksi tambahan.

Hakim Ketua : Mengadjudkan Saksi tambahan ?

Pembela : Mengadjudkan Saksi a decharge.

Hakim Ketua : Artinja mengadjudkan saksi baru diluar saksi-saksi yang sudah diperiksa ini ?

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Dengan pertimbangan ?

Pembela : Dengan pertimbangan bahwa ada satu hal yang hanya disebut oleh saudara Njono yang dianggap penting da-lam menilai perbuatan saudara Njono sepanjang belum

ditegaskan atau dibuktikan dari bukti-bukti yang sudah diadjudkan kepada Mahkamah sekarang ini.

Hakim Ketua : Jaitu ?

Pembela : Untuk nama-nama saksi saja belum bisa memberikan.

Hakim Ketua : Kalau belum bisa menjabutkannya, didalam rangka persoalan apa misalnja ?

Pembela : Persoalan itu hubungan diantara saudara Njono dengan itu Lubang Buaja, dus persoalan keterangan saudara Njono bahwa bantuan pasukan tjadangan disediakan olehnja atau sepengetahuan atas permintaan seorang yang dinamakan Pak Djojo.

Hakim Ketua : Pak Djojo. Hanja itu sadja ?

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Kalau saja boleh menangkap dan benar tangkapan saja ini, Pembela minta agar bisa kiranya diadjudkan didalam sidang ini sebagai saksi tambahan Pak Djojo, didalam hubungannya Njono dengan Lubang Buaja.

Pembela : Ja, kalau Pak Djojo memang bisa dihadapkan dimuka Mahkamah ini. Kalau umpamanya tidak mungkin kita harus mentjari kemungkinan lain/orang lain yang bisa menerangkan mengenai hubungan itu.

Hakim Ketua : Mengenai hubungan antara Njono dengan Lubang Buaja ?

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Hanja itu permintaannya ?

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Sidang akan dischors untuk mempertimbangkan permintaan pembela selama 15 menit.

Sidang dibuka kembali.

Hakim Ketua : Agar terdakwa diperintahkan dibawa masuk.

Oditur : Terdakwa dibawa masuk.

Hakim Ketua : Setelah mahkamah bermusjawarah, diputuskan untuk menjetudjuj permintaan pembela didalam hal ini untuk mengadjudkan seorang saksi tambahan, Pak Djojo dari Lubang Buaja. Didalam rangka Mahkamah Militer Luar Biasa yang masih mengikatkan dirinya pada ketjepatan proses pemeriksaan, kepada oditur diminta menjiapkan segala sesuatunya dan dapatnja mengadjudkan saksi tersebut pada besok pagi djam 09.00.

Pembela : Saja sangat berterima kasih pada Mahkamah/Bapak Ketua bahwa tadi dikabulkan. Saja harap bahwa dengan kemungkinan untuk membawa Pak Djojo kesini untuk memberi kesaksiaannya, kalau tidak, saja harap ada kemungkinan untuk mentjari saksi yang lain.

Hakim Ketua : Saksi yang lain, yang mana lagi ? Tadi ada dimintakan seorang saksi.

Pembela : Saja menjabutkan seorang saksi, tetapi saja djuga dengan djelas ditambah kalau Pak Djojo tidak bisa diketemukan.
Terima kasih.

Hakim Ketua : Dengan demikian Mahkamah Militer Luar Biasa akan menangguhkan sidangnya sampai besok pagi djam 09.00.
Dengan ini sidang ditutup.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

BERITA ATJARA PERSIDANGAN TERDAKWA

N J O N O

SIDANG : V.

TANGGAL : 16 FEBRUARI 1966.

MULAI DJAM : 08.00.

ATAS NAMA : SAKSI TAMBAHAN EX MAJOR
UDARA SUJONO (PAK DJOJO).

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

UNTUK KEADILAN.

SIDANG KE-V TANGGAL 16-2-1966

PERKARA : N J O N O

**KETERANGAN SAKSI KE-7 : SUJONO alias "PAK
DJOJO".**

Hakim Ketua : Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa kembali kami buka dan tetap dinjatakan terbuka untuk umum. Oditur, agar terdakwa diperintahkan dibawa masuk kedalam.

Oditur : Supaja terdakwa Njono dibawa masuk keruang sidang.

Hakim Ketua : Saudara Njono, atas permintaan Pembela jang kita berikan persetudjuannja akan dihadapkan hari ini seorang Saksi lain lagi, saksi tambahan. Tentunja kamu sendiri tidak berkeberatan ada saksi baru lagi ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Karena tentunja Pembela sudah merundingkannja dengan kamu ?

Terdakwa : Sudah memberi tahukan.

Hakim Ketua : Kepada Oditur saja minta agar saksi tambahan jang dimintakan oleh Pembela jang telah kami setudjui serta perintahkan untuk dihadapkan pagi ini, dihadapkan didepan Mahkamah.

Oditur : Supaja saksi jang bernama PAK DJOJO dibawa masuk keruangan sidang.

Hakim Ketua : Nama lengkap saudara ?

Saksi : Sujono.
Lahir di Kediri, tanggal 22 Oktober 1920.
Pekerdjaan terachir Komandan Tesimen PPP (Pasukan Pertahanan Pangkalan).
Tempat tinggal terachir di Djakarta, Komplek Perwira

Baru nomor 11 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Hakim Ketua : Saudara ditahan sedjak kapan dan dimana ditahan ?

Saksi : Sedjak tanggal 3 Oktober 1965, di Halim.

Hakim Ketua : Agamanya ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Saudara pagi ini dihadapkan dipengadilan ini di Mahkamah Militer Luar Biasa atas permintaan Pembela sebenarnya untuk dijadikan saksi didalam rangka pemeriksaan Njono, dalam panggilan itu sebagai saksi saja ingin lebih dahulu tahu, bersedia untuk memberikan kesaksian ?

Bersedia untuk memberikan kesaksian pagi ini ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Apa kenal dengan Njono ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Sedia disumpah ?

(Kemudian terhadap saksi diadakan penjurupahan setjara Islam dalam perkara Terdakwa Njono).

Hakim Ketua : Saudara Sujono, saudara pagi ini dihadapkan untuk memberikan kesaksian dalam rangka perkara — jang sedang diperiksa ini mengenai persoalan G-30-S terutama segi-segi jang saudara ketahui artinja — jang saudara lihat, dengar dan alami sendiri, terutama adalah dalam persoalan Lubang Buaja oleh karena nama saudara disebut-sebut dalam rangka itu.

Saja minta agar saudara mentjelaskan dengan terang, djelas, dan teratur apa jang saudara bisa tjelaskan dalam hal ini, jang saudara ketahui sendiri baik dengan melihat sendiri, dengar dan alami sendiri berkenaan dengan Gerakan 30 September atau terkenal dengan GESTOK.

Saksi : Bapak Ketua dan para hakim sekalian Jih. perkenankanlah kami sebagai saksi dari pada peristiwa GESTOK chususnya dalam perkara ini untuk menyaksikan dengan keadaan jang sebenarnya kami ketahui, lihat, maupun jang kami dijalankan didalam rangka hingga terdjadi peristiwa jang sangat menjedihkan itu.

Tentang peristiwa di Lubang Buaja maka kami ingin mulai per-tama-tama adanja latihan NADA HANREV latihan Hansip Angkatan Udara jang diberi nama NADAHANREV adalah WAHANA KRIDA PERTAHANAN KEAMANAN REVOLUSI, artinja WAHANA KRIDA suatu perdjoangan.

Kereta perdjoangan jang menudju Ketahanan revolusi. Adapun latihan NADAHANREV ataupun Hansip di Lubang Buaja dengan sesungguhnya sama-sama adalah inisiatif saja sendiri, mengingat adanja instruksi dari pada pertama-tama DEPUTY MENTERI URUSAN OPERASI jang pada waktu itu dijabat oleh Laksamana Muda Udara SRI MULJONO HERLAMBAH, jang isinja antara lain untuk menambah kekuatan dalam Pangkalan-pangkalan dengan tenaga Hansip Angkatan Udara, kemudian adanja statement J.M. MENTERI/PANGAU dimana ditegaskan berulang kali tentang adanja pidato P.J.M. Presiden/Panglima Besar Revolusi dalam LEMHANNAS tentang Angkatan ke-V. Dalam statement tersebut pokok isinja adalah mendukung adanja Angkatan ke-V tersebut, ditambah pula dengan adanja Wedjangan-wedjangan P.J.M. Presiden/PBR Bung Karno pada waktu Kursus Kilat NASAKOM dan Amanat Politik BERDIKARI dan TAKARI, maka kami mengambil inisiatif untuk mengadakan latihan di Lubang Buaja tersebut, disamping untuk terutama men-sukseskan adanja statement atau merealisasikan instruksi MEN/PANGAU jang waktu itu dijabat oleh Laksamana Madya Omar Dhani.

Oleh beliau telah dijelaskan bahwa sesuai dengan apa jang telah ditugaskan oleh P.B.R. Bung Karno maka hal ini harus di perhebat — dipertjepat hingga dalam rangka menghadapi KAA II 2 Nopember 1965 jang pada waktu itu akan berlangsung telah disinjalir — limity attack jang akan dilakukan oleh fihak Nekolim terhadap bangsa dan Negara Indonesia dengan demikian maka kami menganggap inisiatif jang kami ambil itu merupakan suatu jang sjah meskipun surat Perintah resmi tidak ada.

Setelah kami mendapat restu dari J.M. Men/Pangau pada waktu itu tak hadir maka telah ada beberapa Ormas dari P.K.I dari B.T.I., SERBAUD jang telah mengadakan setjara resmi untuk mengikuti latihan tersebut di Lubang Buaja. Kemudian setelah mereka kami panggil dan mendapat kata sepakat maka mulai tanggal 5-7-1965 kita buka Angkatan I dari pada latihan NADAHANREV tersebut.

Berturut-turut hingga latihan pada Angkatan I selesai, II, III s/d jang IV maka mulai adanja informasi-informasi jang kami terima baik dari fihak-fihak terutama

kawan-kawan dari Angkatan Darat sendiri maupun dari J.M. MEN/PANGAU sendiri tentang adanya kegiatan-kegiatan Subversif yang akan merobohkan Pemerintah R.I. berkenaan dengan sakitnya P.J.M. Presiden/P.B.R. Kami melihat dan mengetahui sendiri atas undangan Saudara Latief yang waktu itu berpangkat Kolonel maka kami menghadiri pertemuan yang pertama di rumah Kapten Inf. Wahjudi tanggal 6 September 1965.

Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan terutama oleh Saudara UNTUNG yang waktu itu mendjabat Letnan Kolonel yang menguraikan tentang sakitnya Presiden/P.B.R. Bung Karno.

Dalam pada waktu saja melihat dua orang berpakaian preman yang semula kami duga dia itu adalah juga kawan dari Angkatan Darat tapi ternyata kemudian dengan pasti kami mengerti dan memahami bahwa itu adalah tokoh dari PKI yang satu bernama Saudara SJAM atau SUGITO yang nama ini baru kami ketahui kemudian setelah peristiwa G.30.S. meletus dan satunya lagi Saudara PONO.

Kedua tokoh tersebut telah memberikan suatu penjelasan bahwa dengan sakit P.J.M. pasti akan diambil oleh pihak Kontra Revolusi dalam negeri untuk merebut kekuasaan didalam Negeri.

Selanjutnya mengadakan pertemuan lagi yang kedua di rumah Saudara LATIEF pada tanggal 13 menurut ingat saja didalam penjelasan tersebut juga Letnan Kolonel UNTUNG yang pada waktu menginformasikan tentang Gerah-nya P.J.M., maupun tentang situasi — yang bersangkutan pedjabat-pedjabat dalam Kabinet Dwikora. Oleh Saudara SJAM dan Saudara PONO yang baru kami kenal kemudian itu telah disebut-sebut pula adanya rentjana suatu sikap yang menurut terdakwa apa yang dinamakan Dewan Djenderal yang sampai kepada akhirnya sampai sekarang ini belum juga dibuktikan adanya. Oleh Saudara SJAM yang merupakan seorang tokoh dari PKI yang kami lihat dan kami ketahui merupakan orang yang memegang penentuan dalam rapat maupun pertemuan-pertemuan itu. Ini dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal 15 berikutnya sewaktu mengadakan pertemuan yang ke-III kali tapi Saudara SJAM tak hadir hingga dibatalkan: jadi kami berpendapat bahwa Saudara SJAM atau Saudara SUGITO adalah tokoh yang menentukan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kemudian baru pada tanggal 23 kami mengikuti

pertemuan lagi di rumah Saudara Sjam atau Sugito atas pemberitahuan dari Kapten Inf. Suradi yang datang di rumah pada tanggal 21. Dari padanya/Kapten Inf. Suradi kami mendapat keterangan, bahwa kami sebenarnya telah di Undang 2 kali tapi kebetulan tak berada ditempat dan dijelaskan oleh Kapten Suradi pada saja bahwa sebenarnya tanggal 20 September yang lalu, akan direntjanakan suatu gerakan tentang apa yang disebut oleh pihak Angkatan Darat dan Saudara Sjam itu adalah Dewan Djenderal.

Karena keadaan tak meyakinkan dan situasi belum memungkinkan maka gerakan tersebut dibatalkan. Kemudian oleh Saudara Suradi dinjatakan bahwa kami diharapkan dengan sangat agar tanggal 23 bisa datang. Karena kami belum mengetahui rumah Saudara Sjam dan Sugito maka kami datang ke rumah Kolonel Latief di Jalan Tjawang kemudian kami diantar ke rumah Sjam dan Sugito.

Pada tanggal 23 September itulah kami mendapat penjelasan-penjelasan dari Saudara Untung Letkol. yang menjatakan bahwa persiapan-persiapan kekuatan yang akan dipergunakan untuk menentang Dewan Djenderal telah disiapkan, juga oleh Saudara Untung telah dinjatakan pula tentang adanya latihan-latihan HANSIP di Lubang Buaya yang rupanya mereka lebih tahu banyak tentang keadaan-keadaan yang sebenarnya.

Dapat kami ambil suatu kesimpulan kemudian bahwa Saudara Untung telah mendapat informasi-informasi dari kawan-kawannya terutama dari Ormas-Ormas P.K.I.

Dalam kesempatan itu oleh Saudara Sjam telah ditugaskan pula bahwa kita tinggal menunggu saatnya untuk dapat menghimpun kekuatan. Oleh Saudara Sjam kemudian dijelaskan bahwa untuk daerah Djakarta yang menghimpun kekuatan tenaga-tenaga dari Angkatan Bersenjata adalah Saudara Kolonel Latief dan kemudian untuk kekuatan-kekuatan yang dari luar Djakarta adalah Saudara Letkol. Untung.

Oleh Letkol. Untung telah dinjatakan bahwa semua telah dihubungi dan pada tanggal 27 September yang akan datang mereka telah memastikan akan datang ke Djakarta, demikian pula Saudara Latief telah memberikan laporan-laporan mengenai hubungannya kekuatan-kekuatan Angkatan Darat didalam Ibu Kota.

Oleh Saudara Sjam telah diuraikan pula mengenai segala kegiatan yang bersangkutan dengan apa yang dikatakan Dewan Djendral tentang segala tindakan-tindakan dan penjelewengan-penjelewengan yang meskipun telah berulang kali kami tanyakan Dewan Djendral itu apa dan sebagai bewijsnya bahwa Dewan Djendral itu ada, tetapi sebegitu jauh hingga pada saat terakhir Gerakan itu dimulai ternyata tidak juga dapat membuktikan. Oleh Saudara Sjam telah disebut-sebut pula bahwa hal itu/rentjana ini telah diketahui pula oleh PJM Presiden/PBR dan juga telah diketahui oleh JM Wakil Perdana Menteri Subandrio dan khusus-nya oleh JM MEN/PANGAU Omar Dani. Dari Saudara Sjam atau Sugito telah dinyatakan bahwa fihak Angkatan Udara telah menyatakan didalam Gerakan ini kesanggupannya tentang adanya Gerakan tersebut, juga disebut-sebut bahwa pada waktu itu JM MEN/PANGAU yang kami hubungi yang setelah selesai rapat kami menghadap menyatakan bahwa berita tersebut memang dapat dipertjaja, akan tetapi sebagai Angkatan Udara yang selalu patuh dan taat kepada Pemimpin Besar Revolusi hendaknya hal tersebut kita harus mentjegah, jangan sampai terjdadi mendahului adanya rentjana/hal yang direntjanakan oleh kawan-kawan Angkatan Darat tersebut. Dengan pernyataan J.M. MEN/PANGAU tersebut kami mengambil suatu kesimpulan bahwa memang ada dan benar apa yang disebut-sebut bahwa adanya Dewan Djendral, kemudian oleh JM Menteri kami diperintahkan untuk memperhebat lagi agar supaya semua Pangkalan-pangkalan terutama Pangkalan Abdurachman Saleh, Iswahjudi, Adi Sutjipto, Husein Sastranegara dan Pangkalan Djakarta diperkuat, demikian rupa, karena hal ini telah disinjalir adanya gerakan contra revolusi Dalam Negeri. Perlu kami terangkan disini bahwa sebelum tanggal 23 yaitu pada pertengahan Agustus telah dikeluarkan oleh JM MEN/PANGAU apa yang disebut operasi UTUH. Operasi Utuh yang dikeluarkan tersebut berisikan terutama menurut ingatkan kami bahwa yang pertama adalah mentjegah adanya tindakan-tindakan sabotage dari Contra Revolusi yang akan merongrong pemerintah Indonesia maupun gerakan-gerakan infiltrasi yang akan dilakukan oleh fihak Nekolim.

Jang kedua ditekankan dalam perintah operasi UTUH tersebut agar supaya mentjegah pertentangan-perten-

tangan ketjil antara kita dengan kita antara Angkatan Udara R.I. dengan Angkatan lain hendaknya segala sesuatu dapat diselesaikan setjara damai dan dihindarkan persengketaan bersendjata. Waktu kami melaporkan tanggal 23 bulan September maka operasi UTUH tersebut telah diulangi oleh JM MEN/PANGAU dan juga kami laporkan bahwa kejadian-kejadian selama kami mengikuti pertemuan dengan fihak Angkatan Darat, tapi oleh JM MEN/PANGAU waktu itu Laksamana Madya OMAR DANI telah mentjegah dan menegaskan bahwa itu soal intern Angkatan Darat kemudian pada tanggal 26 kami mendapat undangan rapat lagi di rumah Kolonel Latief di Tjawang kurang lebih pada waktu hari Minggu oleh Saudara GITO yang hadir pada waktu itu bersama Letkol. UNTUNG dan Saudara SJAM maupun Saudara PONO waktu kami datang di tempat itu telah hadir dan baru saja kami tiba terus ditanya oleh Saudara Kolonel Latief bahwa ini seharusnya harus datang tetapi hal ini sekarang seharusnya bagi pelaksana-pelaksana saja jadi yang dimaksudkan undangan tersebut adalah bukan Major Udara SUJONO tetapi adalah pelaksana saja yang akan mengikuti Gerakan menentang Dewan Djendral tersebut.

Setelah kami mau kembali ditanya oleh Kolonel Latief sikap kami terhadap Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno „Bagaimana sikap Saudara SUJONO terhadap pemimpin Besar Revolusi kalau Gerakan ini tidak disetujui oleh Presiden”.

Maka kami dengan tegas bahwa tentang hal ini dan sampai kepada saat apapun selama Bung Karno masih ada maka Bung Karno-lah satu-satunya Pemimpin Besar Revolusi yang dapat menentukan kemenangan bagi Revolusi Indonesia.

Kemudian oleh Saudara Latif dinyatakan kalau tidak setuju maka kami tetap menentang adanya usaha-usaha yang oleh Saudara Sjam kalau perlu maka hal ini Presiden perlu disingkirkan.

Demikianlah pernyataan Saudara Sjam yang mendapat tentangan dari kami setjara keras yang juga dibantu Oleh Saudara Untung. Saudara Untung juga menyatakan kebenaran adanya mempertahankan setjara matimatan tentang berlangsungnya Pemimpin Besar Revolusi memimpin Revolusi Indonesia. Oleh Saudara Sugito kemudian di djandjikan memang hal ini tidak

kita harapkan, akan tetapi Saudara-Saudara dari pihak militer tak usah turut tjampur dalam soal politik, tetapi kami belum puas terhadap djawaban itu, kemudian kami mendapat penegasan dari Saudara Sugito atau Sjam yang menjatakan bahwa hal tersebut akan dilaporkan pada Saudara Ketua. Pada saat itu kami dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang disebut Saudara Ketua itu tidak lain dan tidak bukan adalah Saudara Aidit atau MENKO AIDIT pada waktu itu. Oleh Saudara Sugito dinjatakan bahwa gerakan ini tetap Gerakan Nasakom dan gerakan ini adalah melaksanakan TAKARI. Kemudian dari/oleh pihak Let. Kol. Untung hal ini kami mendapat penegasan pula bahwa memang bagi Pemimpin Besar Revolusi bagaimanapun tidak ada duanya. Setelah dalam ketegangan yang hebat itu maka kami kembali dan mereka melanjutkan rapatnya.

Pada pertemuan tersebut telah disinggung-singgung oleh Kolonel Latif tentang adanya usaha dari Kapten Infanteri Suradi yang telah menghubungi tokoh Ormas dari PKI yang sedang mengikuti latihan di Lubang Buaja. Oleh Kolonel Latif dijelaskan bahwa hal tersebut telah mendapat kata sepakat oleh kedua belah pihak dalam hal ini antara Kapten Suradi dan Ormas-ormas. Dari Kapten Suradi kami mendapat penjelasan bahwa tentang penggunaan tenaga-tenaga Hansip tersebut akan dipergunakan untuk memperkuat Sektor-Sektor.

Dari Kolonel Latif mengharap agar supaya saja memerintahkan kepada mereka untuk berkumpul di Lubang Buaja, tetapi yang telah dilatih tersebut adalah belum diresmikan oleh Angkatan Udara. Jadi mereka setelah dilatih harus dikembalikan; jadi mereka belum ada suatu ikatan organisasi Hansip Angkatan Udara.

Sehingga Kapten Suradi mengadakan hubungan langsung. Dan kami sendiri juga menjatakan kalau memang mau menggunakan itu agar mereka mengadakan hubungan langsung untuk sanggup atau tidaknya itu terserah pada masing-masing dan kami mendapat laporan dari wakil saja Major Udara Gatot Sukresno mewakili saja selalu di Lubang Buaja bahwa memang telah dilakukan dua kali rapat oleh Kapten Suradi dengan Ormas-ormas untuk mengumpulkan tenaga-

tenaga tersebut.

Dengan tidak kami duga-duga pada tanggal 28 sore telah datang sedjumlah besar tenaga-tenaga yang minta dilatih. Sebenarnya pada tanggal 28 itu adalah sudah angkatan yang terakhir atau penutupan, karena ada perintah dari DEPUTY MENTERI URUSAN OPERASI yang pada waktu itu dijabat oleh Komodor Dewanto agar supaya latihan tersebut dialihkan, jangan hanya melatih Ormas-ormas dari pihak kiri saja, atau pihak Komunis saja, tetapi supaya melatih juga dari pihak NAS dan A. Kami laporkan pada waktu itu bahwa tidak benar kalau semuanya adalah dari tokoh-tokoh Komunis melulu karena kenyataannya terdapat beberapa tenaga-tenaga yang dilatih itu dari orang non partai atau dari beberapa pihak golongan Nasionalis dalam hal ini dari PARTINDO.

Perlu kami jelaskan disini bahwa dengan adanya kedatangan tenaga-tenaga yang sedjumlah ± 1500 yang minta dilatih setjara mendadak tanggal 28 itu maka sebagai kebidaksanaan kami tidak bisa menolak. Sementara itu perintah dari Deputy Menteri Urusan Operasi Komodor Dewanto telah kami persiapkan untuk melatih dari bagian ANSOR dan dari pemuda-pemuda, MARHAEN untuk mengadakan latihan pada tanggal 1 di Halim Perdanakusuma.

Tetapi hal ini setelah kami hubungi dengan BODM setempat dan telah mendapat sepakat bahwa tenaga-tenaga yang menyiapkan adalah dari B.O.D.M., kemudian terhalang oleh kejadian adanya peristiwa yang tragis ini.

Perlu kami tambahkan disini bahwa tentang Latihan latihan di Lubang Buaja seperti apa yang telah kami uraikan terdahulu dari pihak Ormas terutama dari pihak BURUH, PEMUDA dan TANI masing-masing menempatkan wakilnya; yang dari Buruh menempatkan seorang wakilnya/penghubung bernama Saudara KASIMAN kalau tidak salah ingat saja, dan dari bagian Pemuda menempatkan diri pemuda NICOLAS, kemudian satu lagi saudara DJOHAR.

Mereka inilah yang menghimpun dan mengumpulkan tenaga-tenaga dari Ormas-ormas yang bersangkutan, dan mereka ini pula yang mengusahakan segala kebutuhan bagi orang-orangnya misalnya kebutuhan makan dan sebagainya.

Perlu kami jelaskan disini bahwa latihan NADA-

HANREV adalah dari usaha berdikari, sedang para Pelatihnja adalah semua dari Kader-kader Pasukan lulusan KADER NASAKOM dan kemudian diperkuat oleh 2 orang Major, seorang Major Udara KARTONO dari Kehakiman dan seorang lagi Major GATOT SUKRESNO dari Intel, masing-masing Major Udara. Gatot dan Kartono adalah kawan sekolah sewaktu di KOTRAR pada permulaan tahun 1965.

Kepada mereka para siswa itu telah dididik dan dilatih setjara kilat, tetapi melihat situasi dan keadaannya tidak sama tiap-tiap angkatanja.

Pada waktu permulaan mereka melakukan latihan selama 12 hari, kemudian dipersingkat lagi menjadi angkatan kedua 10 hari, kemudian dipersingkat lagi menjadi 7 hari, sampai menjelang akhir latihan, dipersingkat lagi menjadi 5 hari.

Isi dari pada latihan di Lubang Buaja yang kami berikan dan rentjana untuk dilatih kepada mereka-mereka itu adalah :

Pertama Indoktrinasi Pantja Azimat Revolusi, itu dilakukan oleh Major Udara Kartono dan saja sendiri. Kemudian mengenai taktik dan tehnik kesendjataan berbagai sendjata; apakah perlu kami uraikan matjam-matjam sendjatanja? Kemudian yang ketiga adalah tentang pengetahuan Taktik dan Tehnik Kemilteran, keempat tentang Etika, Moralita pradjurit Revolusi oleh kami sendiri. Dan kemudian tentang Intelgience yang dikatakan oleh saudara Gatot adalah Mata Kantjing/samarannya itu diberikan oleh saudara Gatot sendiri, khusus bagi para kader yang dimaksudkan yang memiliki pengetahuan landjutan dari pada Sekolah Menengah.

Dari hasil latihan yang telah kami berikan dari 5 Djuli sampai pada akhir/tanggal 30 September yang pada hakikatnja sedjak tanggal 28 itu adalah khusus didatangkan oleh Ormas-ormas PKI yang memang sengadja dipersiapkan untuk mengikuti gerakan tersebut tetapi mengingat waktunya bahwa dua hari itu tidak mungkin dilatih setjara baik sehingga kepada mereka oleh Kapten Suradi telah diberikan bantuan sendjata untuk dapat menggunakan sendjata-sendjata dari Angkatan Darat; dari Kapten Suradi kami menerima bantuan 100 putjuk sendjata Garand yang dimaksudkan supaya dipergunakan untuk Hansip yang

akan digunakan itu.

Pada tanggal 29 di Lubang Buaja diminta oleh Kolonel Latif supaya dapat dipergunakan pada Komandan Komandan Pelaksana terutama yang baru datang dari Jon DIPONEGORO 454 dan Komandan Jon BRAWIDJAJA 530. Benar pada tanggal 29 djam 19.00 telah datang beberapa orang yang berpakaian Sipil dan Militer dari BRAWIDJAJA dan dari DIPONEGORO semua pakaian dinas dan lain-lainnya pakaian sipil. Untuk ini tidak ketinggalan saudara SJAM dan saudara PONO hadir pada waktu itu. Dalam pembitjaraan tersebut maka telah dibentangkan semua rentjana gerakan tersebut oleh Kolonel Latif. Demikian pula telah ditentukan Code-code untuk gerakan menentang Dewan Djendral. Kemudian oleh para pelaksana-pelaksana terutama dari Jon 530 dan Wadan Jon 454 telah diuraikan tentang keadaan pasukan yang dibawanya, bahwa mereka semuanya belum diberi tahu tentang segala sesuatu adanya maksud Gerakan ini dan mereka mendjandjikan kepada Kolonel Latif dan Kapten Suradi dari Wadan Jon 454 untuk menjumbangkan 1000 stel pakaian untuk hansip. Kemudian ini diminta kepada saja untuk menerima dan membagikan.

Pada waktu itu oleh saudara Sjam telah diterangkan pula bahwa rentjana apa yang akan dilakukan ini telah dianggap tjukup karena telah terkumpul sejumlah kekuatan 15.000, hanya oleh Kolonel Latif dilaporkan bahwa tentang tank dan panser yang di-djandjikan akan dihubungi ternyata tidak/belum berhasil. Kemudian ditugaskan kepada Kapten Suradi untuk mengurus lagi pada Ki Tank dan Panser yang akan digunakan mengikuti gerakan tersebut. Dalam pembagian tugas yang telah ditentukan oleh Kol. Latif bahwa dia sendiri sebagai Panglima Komando Divisi Ampera dan Gerakannya dinamakan „Gerakan Takari“. Adapun susunannya: Sebagai Dan PASOPATI dan penjergap adalah Lettu A. Arif dan tenaga-tenaganya mengambil dari Tjakrabirawa dan Jon 454, satu Ki Jon 530.

Kami mendengar dari mereka bahwa yang mengerti komandan-komandannya saja, sedangkan anak buahnya tidak tahu-menahu tentang rentjana Gerakan tersebut. Djuga kami mengerti dan mendengar bahwa segala gerakan yang dilakukan untuk mengamati-

amati untuk mensukseskan atau menjelidiki tentang sasaran-sasaran apa yang disebut oleh mereka Dewan Djenderal itu sepenuhnya dilakukan oleh anggota-anggota Tjakrabirawa; menurut Let. Kol. Untung dan dibantu oleh anak buah Kapten Suradi dari Brigif kemudian dari mereka telah dibitjarakan tentang persediaan senjata dan makanan. Menurut Kolonel Latif bahwa senjata yang disimpan oleh Dewan Djendral telah tjukup banyak, melebihi daripada yang kita perlakukan, djadi untuk sementara tidak diperlukan soal senjata. Nanti tentang senjata yang disimpan oleh Dewan Djendral yang disebut-sebut oleh Kolonel Latif diantaranya disimpan di Lenteng Agung di Tandjung Priuk, Djatinegara, Pasar Minggu, nanti akan diambil pada djam D min 1, untuk digunakan memperlengkapi Hansip atau untuk memperlengkapi Sukwan yang kami dengar djuga dipergunakan Sukwan dari DWIKORA yang kami maksudkan.

Setelah tanggal 29 sampai djam 23.00 malam selesai maka saudara Sjam pada akhir penutupan rapat disinggung pula bahwa bantuan dari Angkatan Udara sangat diharapkan. Tetapi oleh saudara Sjam dinjatakan bahwa hari ini telah dihubungi langsung Djendral SUPARDJO untuk menghubungi JM MEN/PANGAU.

Dari kami sebenarnya diminta untuk melaporkan langsung mengenai kebutuhan itu tetapi telah ditegaskan bahwa JM MEN/PANGAU setuju untuk membantu gerakan apa saja untuk menghantjurkan Kontra Revolusi. Tetapi J.M. Menteri tidak bersedia untuk mendahului, mana kala fihak Kontra Revolusi telah mulai Angkatan Udara baru menjanggupkan. Tetapi hal ini oleh saudara Sjam yang ternjata adalah tokoh-P.K.I telah dikatakan bahwa hal itu gampang. Djadi dengan perkataan yang menggampangkan itu kami mengambil kesimpulan bahwa ada hubungan-hubungan yang kami sendiri tidak ketahui antara saudara Sjam dengan pihak tokoh PKI lainnya dengan JM MEN/PANGAU. Tetapi yang djelas MEN/PANGAU tetap waktu kami hubungi menjatakan bahwa hal itu adalah persoalan Angkatan Darat; kita harus membatasi diri dan djangan mendahului sehingga nanti akan menghilangkan simpati massa. Tetapi entah bagaimana pada tanggal 30 mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para pelaksana terutama para pelaksana baik Kolonel Latif sebagai Panglima Komando Ampera mau-

pun Kapten Suradi sebagai penguasaan Ibu Kota dan kemudian Major Udara Gatot sebagai Komandan Basis. Kami ulangi bahwa Lettu Arief sebagai Komandan Pasopati bertugas untuk melakukan pentjulikan dan pembunuhan. Sasaran yang akan diambil ini telah ditentukan pula oleh saudara Sjam dan saudara Latif; kami sendiri tidak djelas karena pada mereka nama-nama tersebut dengan nama-nama samaran. Adapun nama-nama samaran ini baru kami ketahui kemudian dalam pemeriksaan di Margahayu. Nama-nama samaran yang disebut diantaranya SINGER, TOYOTA dan sebagainya yang kami sendiri lupa, ini yang menentukan adalah saudara Sjam dan Kolonel Latif.

Setelah mereka menjatakan demikian minta kepada saja untuk dapat membantu tempat untuk Central Komando dan membantu tentang kendaraan kalau dalam swipnya nanti, djuga merentjanakan akan melakukan swip dan kalau nanti swip ini gagal mereka akan menjerobot kendaraan AURI.

Segala sesuatu telah kami njatakan akan kami laporkan pada atasan kami lebih dahulu dan kami tidak bisa menjanggupkan atau memberikan keputusan. Kemudian ditentukan hari H dan djam D adalah hari H tanggal 1 dan djam D adalah djam 04.00. Dalam keputusan tak ada perubahan bernama TAKARI gerakanja dan Divisinja adalah Divisi AMPERA.

Tetapi untuk tempat Central Komando oleh Kolonel Latif diminta agar bisa dipergunakan ANGKASA PURI atau PENAS.

Tetapi hal ini kami djuga belum bisa memastikan karena hal ini harus kami laporkan terlebih dahulu kepada atasan kami.

Setelah demikian maka mereka berdjandji bahwa nanti bersama Djendral Pardjo djuga akan datang di Penas pada djam 22.00 — 23.00 supaya saja diminta datang lebih dahulu di Penas hasil dan tidaknja gedung Penas dipakai untuk Central Komando itu. Tetapi kalau tidak mungkin mereka akan menggunakan rumah Kolonel Latif sebagai Central Komando.

Djuga direntjanakan bahwa segala pimpinan yang perlu diamankan ini diminta kepada saja untuk memberikan tempat di Halim Perdanakusuma. Maka tentang tempat saja tanjakan siapa-siapa yang akan ditempatkan di Halim itu. Maka dijawab oleh saudara Sjam dan Ko-

kolonel Latif bahwa disebut-sebut MENKO AIDIT, Bung NJOTO, Pak ALI SASTROAMIDJOJO, Bung LUKMAN dan ada dua lagi, ingat kami lima tapi jang kami ingat pasti tiga orang; kemudian Pak BANDRIO demikian pula PJM SUKARNO akan ditempatkan di Halim. Untuk ini telah kami sanggupi akan kami bi-tjarakan dengan atasan kami.

Kemudian djam 21.00 kami telah siap menunggu se-telah kami laporkan kepada atasan kami Let. Kol. Udara HERU ATMODOJO jang pada waktu itu men-djabat Direktur Intel Angkatan Udara. Telah kami laporkan segala sesuatu tentang rentjana dan gerakan, kemudian oleh beliau/Let. Kol. Heru akan meneruskan laporan kepada JM MEN/PANGAU.

Bertepatan pada saat itu djuga kami mengatakan ten-tang penggunaan Penas dan kendaraan jang diperlukan oleh Gerakan Takari tersebut. Oleh beliau disanggup-kan setelah menghadap J.M. MEN/PANGAU.

Setelah kami menjiapkan segala sesuatunja dan ternjata mengenai Gedung Penas disetudjui dan berhasil maka pada djam 22.00 lebih sedikit kami melihat Djendral Pardjo telah datang, dan memberi tahukan/menanjakan apakah sudah berhasil mengenai Gedung Penas dan sudah kami laporkan kemudian. Oleh Djendral Pardjo diminta supaya datang kerumah saudara Sjam jang dirumahnya di Gang Tengah dekat stasiun Kramat. Setelah kami laporkan hal ini kepada Let. Kol. Heru mengenai kedatangan Djendral Pardjo kami lihat ke-mudian Dan Jon 530 dan 454 djuga sudah datang di Penas dan kami laporkan kepada Let. Kol. Heru dan setemh itu kami mendjemput MENKO AIDIT dirumah saudara Sjam. Kami datang disana melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa disana sudah siap menunggu jang dalam proses verbal tidak kami sebutkan karena pada waktu itu masih didalam lindungan PJM PRESIDEN ialah Djenderal PRANOTO.

Djenderal Pranoto waktu itu kami melihat bersama MENKO AIDIT, begitu kami datang dan kami lapor terus-naik kendaraan jang telah kami siapkan; kami menggunakan 2 kendaraan kemudian menanjakan apa-kah semuanya sudah siap dan soal tempatnja kami maksudkan kemudian menanjakan apa Kolonel Latif sudah datang di Central Komando. Kami djawab pada waktu itu belum datang, jang datang baru Djendral

Pardjo, dan djuga menanjakan tentang tank dan panser kami djawab bahwa hal itu belum kami dengar dan belum berhasil, jang mengurus adalah Kapten Suradi. Dan kami bersama MENKO Aidit dan Djenderal Pranoto membawa ketempat jang telah dipersiapkan di Halim Perdanakusuma salah sebuah rumah anggota bernama Sersan Major SUWADI.

Setelah kami sampai ketempat tersebut terus kami tinggal dan kami melihat bahwa MENKO Aidit dan Djenderal Pranoto membawa actentas dan membawa kalau tidak salah transistor dan lagi adalah mesin tik. Kemudian kami meninggalkan tempat tersebut dan me-laporkan kepada Djenderal Pardjo bahwa sudah selesai tentang penempatan MENKO Aidit.

Kemudian djam 23.00 malam kami lihat Kolonel Latif bersama saudara Sjam dan saudara Pono datang ke Penas. Setelah itu kami melaporkan kepada Kol. Heru jang datang ketempat itu untuk memerintahkan supaya saja memberi tahu Menteri Angkatan Udara jang se-karang berada dirumah mertuanja supaya masuk ke Halim Perdanakusuma. Tetapi kami datang ketempat-nja beliau tidak ada dan kami melihat bahwa Jang Mulia Menteri Angkatan Udara berada di KOOPS Halim Perdanakusuma. Kemudian oleh Kolonel Heru kami di-minta untuk mentjari tempat untuk PJM Presiden dirumah Komodor Leo dan dirumah Komodor Susanto dan melaporkan kepada Komodor Dewanto. Akan tetapi kami datang kerumah Komodor Leo masih tidur dan kemudian kerumah Komodor Dewanto.

Pada pagi harinja mendapat kesanggupan bahwa tem-pat Presiden telah disetudjui dan disiapkan maka kami melaporkan kepada Jang Mulia Menteri Angkatan Udara di KOOPS. Segala sesuatunja telah kami laporkan kemudian JM Menteri memerintahkan kepada kami supaya melakukan pendjagaan jang kuat disekitar ru-mah Komodor Susanto. Setelah kami mempersiapkan segala sesuatunja untuk tenaga pengamanan maka kami kembali ke Penas. Kami kembali ke Penas telah me-lihat bahwa disana sudah siap berpakaian dinas adalah Djenderal Pardjo berpakaian kebesaran kemudian Let. Kol. Heru pakaian saku empat dengan tanda pangkat kebesaran. Kemudian saudara Komandan Batalion 530 dan Komandan Batalion 454 jang siap menurut ke-terangannja akan pergi ke Istana. Dan setelah mereka berangkat maka kami menjiapkan segala sesuatu pe-ngamanan bagi Presiden DI Halim Perdanakusuma di rumah Komodor Susanto.

Kami melihat bahwa pada waktu kira-kira jam 08.30 Kol. Heru kembali dan menghadap MEN/PANGAU kemudian membawa Helikopter entah kemana; terus pada jam 09.00 kami melihat kurang lebih jam 09.05 PJM PRESIDEN tiba yang sebelumnya didahului oleh telepon dari orang yang kami dengar namanya Pak PARTO, telepon ke JM Menteri Angkatan Udara, bahwa akan datang kemudian jam 09.00 kemudian kami melihat P.J.M. PRESIDEN dengan kendaraan Pak Sabur dan Pak Saelan, melihat datang pertama-tama ke KOOPS kemudian terus menuju kerumah Komodor Susanto. Dan setelah semuanya berdjalan lantjar maka Djenderal Pardjo kami lihat turun dari Helikopter terus langsung menuju kerumah Komodor Susanto dan menghadap Presiden, tetapi yang lain-lainnya tinggal diluar pintu, hanya Djenderal Pardjo saja, dan didalam kami melihat PJM Presiden bersama J.M. Men/PANGAU Omar Dhani sampai berlangsung kira-kira jam 11.00.

Maka Djenderal Pardjo keluar dengan membawa kertas tapi kami tidak melihat isinya kertas itu dan memberi tahuhan kepada kami kalau Presiden telah merestui. Kami melihat Djenderal Pardjo menghadap maka Presiden menepuk-nepuk pundaknya Djenderal Supardjo yang kemudian keluar membawa kertas dan memberi tahuhan kepada semua terutama Kolonel Latif dan Let. Kol. Untung bahwa Presiden telah merestui dan sebentar lagi akan diumumkan statement yang diinjatkan oleh PJM Presiden tentang dukungannya. Akan tetapi sebegitu jauh apa yang diuraikan dan dikatakan oleh Djenderal Pardjo tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah kami dengar, terketjuali Statement pertama dari Let. Kol. Untung sebagai ketua Presidium yang menyatakan bahwa tindakan ini adalah melaksanakan PANTJA AZIMAT REVOLUSI BUNG KARNI yang ditanda tangani sendiri dan surat tersebut kami melihat dikeluarkan dari tasnya saudara Sjam, yang kemudian menjuruh kurirnya Kolonel Latif untuk mengirimkan ke RRI, tetapi waktu itu isinya kami belum tahu.

Dan kemudian pada kira-kira jam 12.00 ada siaran lagi mengenai anggota Presidium 5 orang yang masing-masing adalah : Ketua Let. Kol. Untung, Wakilnya Djenderal Pardjo kemudian Let. Kol. Heru, kemudian yang ketiga adalah Komisaris Anas, terus yang keempat

dari Angkatan Laut kami tidak kenal dan tidak datang, juga dari Angkatan Kepolisian tidak pernah ada dan tidak pernah kami lihat mengikuti rapat.

Terketjuali tersebut maka kami sewaktu bertugas di Halim setelah mendengar pengumuman adanya Anggota Presidium tersebut maka kami menyatakan kepada Let. Kol. Untung bahwa apakah mengenai Dewan Revolusi dan mengenai anggota-anggota serta mengenai penurunan pangkat serta mengenai mendemisionerkan Kabinet tidak bertentangan dengan rapat yang telah diputuskan, oleh Let. Kol. Untung hanya dijawab mengangkat pundaknya, seolah-olah tidak tahu-menahu hal itu. Dan waktu kami tanya bagaimana mengenai Presiden oleh Let. Kol. Untung dijawab : "Ini kan untuk sementara saja" sehingga kami sudah mulai sangsi terhadap gerakan apa yang mereka namakan 30 September yang selama rapat dan selama keputusan itu tidak pernah disinggung-singgung bahwa namanya itu adalah Gerakan 30 September.

Tetapi baru kami ketahui kemudian bahwa pada tanggal 30 sore waktu kami akan ketempat/Penas bahwa mereka-mereka terutama Kolonel Latif, Let. Kol. Untung dan Sjam bersama beberapa pelaksana itu mengadakan rapat sendiri yang kami tidak hadir yang menentukan mengenai nama gerakan tersebut. Dengan keadaan ini maka untuk sementara kami rasa tjukup dapat memberikan gambaran, tetapi bilamana perlu nanti dengan tulus ichlas kami akan menjawab dan menerangkan segala sesuatu yang diperlukan oleh ketua Sidang. Terima kasih.

Hakim Ketua : Sedikit komentar, mengenai tulus ichlasnya tidak begitu penting, yang penting adalah diberikan dengan kejujuran dan benar. Ichlas atau tidak itu urusan saudara.

Djadi apabila Oditur dalam mengajukan saksi ini tadi masih akan disertai dengan keterangan atau keterangan-keterangan lain atau resume ? Apakah tidak ada ?

Oditur : Tidak.

Hakim Ketua : Sebelum dilandjutkan pemeriksaan : Njono, apakah benar saudara Sujono menggunakan nama "PAK DJOJO" atau lazim mengenalkan sebagai Pak Djojo ?

Terdakwa : Benar.

Hakim Ketua : Dan oleh karena saksi Sujono ini dihadapkan sidang adalah atas permintaan pembela, kepada pembela ter-

lebih dahulu kami beri kesempatan untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan apabila ada yang ingin diajukan kepada saksi.

Pembela : Ja, terima kasih bapak Ketua.

Hakim Ketua : Silahkan langsung saja saudara pembela kepada saksi untuk menanyakan.

Pembela : Sebenarnja sudah dijawab oleh saudara tadi bahwa apakah memang saudara biasa dinamakan Pak Djojo ?

Saksi : Oh tidak, hanya untuk selama latihan itu dan tidak selalu pakai Pak Djojo, itu hanya untuk ke-umum tetapi untuk pimpinan kami tetap pakai nama yang sebenarnja Major Udara Sujono dan kami sendiri pakai tanda pangkat resmi.

Pembela : Dus saudara disana menjadi pelatih ?

Saksi : Menjadi Komandan Pelatih.

Pembela : Komandan Pelatih di Lubang Buaja ? Apakah saudara kenal dengan saudara Sukatno ?

Saksi : Tidak kenal.

Pembela : Jang saudara kenal saudara Djohar, siapa lagi ?

Saksi : Saudar Kasiman dan saudara Nicolas.

Pembela : Apakah saudara tahu, saja rasa tadi saudara jelaskan ada banjak yang dibicarakan oleh saudara, sekarang ingin menegaskan beberapa hal. Apakah saudara mengetahui itu bulan September itu digiatkan, ditinggalkan Latihan dari pada Sukarelawan ?

Saksi : Kurang mengerti pertanyaannya.

Pembela : Itu saudara tadi menerangkan bahwa berhubungan dengan situasi kira-kira bulan Agustus/September latihan atas Sukarelawan digiatkan ?

Saksi : Bulan September itu latihan baru mulai digiatkan.

Pembela : Itu digiatkan dengan tjara apa ?

Saksi : Jang dimaksud menggiatkan itu adalah kita perhebat, kita tambahkan tenaga-tenaga pelatih jang tadinja itu hanya mengambil dari Djakarta saja, kemudian kita perkuat dari Pangkalan-Pangkalan, jang kita datangkan dari lain-lain Pangkalan di Djakarta.

Pembela : Itu pelatih jang hanya ditambahkan.

Saksi : Pelatih itu hanya ditambah.

Pembela : Itu orang jang dilatih.

Saksi : Orang jang dilatih pertama-tama pada Angkatan ke 1 itu sedikit, 200 orang, kemudian ditambah lagi 300, itu tambah terus sampai angkatan terakhir jaitu angkatan ke-VI sampai 1200.

Pembela : Dari mana dikirim tenaga-tenaga itu ?

Saksi : Itu semua diurus dan didatangkan oleh tenaga-tenaga penghubung jang sudah ditempatkan disitu.

Pembela : Atas permintaan siapa jang tiga orang itu ? Menurut jawaban saudara tadi tiga orang itu mengirimkan pasukan atau tambahan pada saudara Latif. Itu atas permintaan siapa ?

Saksi : Mengenai penempatan tenaga-tenaga penghubung itu adalah dari Ormas-Ormas itu sendiri karena didalam latihan tersebut kami tidak menanggung soal makan maupun akomodasinya terketjuali memberikan latihan saja.

Djadi mereka itu jang ditempatkan oleh Ormas-ormasnya untuk mengurus segala kebutuhan dari tenaga-tenaga jang datang ketempat itu untuk dilatih.

Pembela : Djadi terima saja ?

Saksi : Ja, setelah datang di Seksi lantas kita terima.

Pembela : Diadakan Seksi bagaimana ?

Saksi : Djadi diadakan tjeking, sekrining.

Pembela : Siapa ?

Saksi : Ja orang-orang itu ?

Pembela : Apa oleh jang tiga orang itu ?

Saksi : Oh bukan.

Pembela : Saja minta sebenarnja jang U tahu tentang kegiatan U sendiri bahwa latihan di Lubang Buaja, U ada tiga pembantu lalu tahu dari mana pembantu ini ? Siapa jang kasih, siapa jang menentukannya ?

Saksi : Ja tadi sudah kami sebutkan bahwa mereka itu dari ormas-ormasnya Pemuda, BTI dan Ormas Buruh-Buruh, saudara Kasiman, saudara Nicolas itu terus satunja, saudara Djohar.

Pembela : Ja ini sudah kita tahu siapa jang memberikan itu bantuan kepada U dimana mintanja atau datang sendiri ?

Saksi : Datang sendiri atas penundjukan dari Ormasnja jang bersangkutan. Pokoknja saja hanya tahu tenaga-tenaga itu sudah ada, tidak tahu mengurusja bagaimana, kalau memang mau dilatih tenaga itu sudah harus siap.

Pembela : Itu jang memimpin latihan di Lubang Buaja siapa ?

Saksi : Saja sendiri.

Pembela : U sendiri memimpin ?

Saksi : Saja dan wakil saja adalah Pak Major Gatot.

Pembela : Tapi U jang memimpin ?

Saksi : Ja benar.

Pembela : Siapa jang sebenarnja jang memerlukan bantuan itu, orang sekian banyak bisa dilatih disana ?

Saksi : Saja tidak menentukan sekian-selkian, ada kita latih karena dalam ketentuan jang ditetapkan JM PANGAU itu kira-kira untuk satu resimen.

Pembela : O, dus dengan demikian dengan petundjuk-petundjuk dari atasan U, supaja sebanjak mungkin.

Saksi : Sama sekali belum sampai batas jang ditentukan jang kita kehendaki itu.

Pembela : Dus U tidak pernah ada hubungan dengan Saudara Sukatno ?

Saksi : Tidak pernah.

Hakim Ketua : Dari Oditur ada jang hendak ditanjakan silahkan se-tjara langsung sadja.

Oditur : Tadi Saudara mengatakan dalam latihan-latihan ada 3 orang jaitu jng namanja Kasiman, Djohar, Nico. Jang mengkoordinir itu siapa, jang mengangkat dia jang menundjuk mendjadi penghubung disana itu siapa ?

Saksi : Jang nundjuk dari ormas-ormasnja masing-masing.

Oditur : O begitu. Jang dikoordinir itu apa ?

Saksi : Apa jang dilakukan adalah mendatangkan orang-orang-nja jang mau dilatih dan djuga mengurus mengenai kebutuhan akomodasinja, makanja, angkutan setelah itu mereka kembali.

Oditur : Djadi jang membawa mereka Kasiman, Nico dan Djohar seribu, duaribu bukan begitu ?

Saksi : Tidak.

Oditur : Djadi jang membawa mereka Kasiman, Nico dan Djohar dengan perbekalamja sekali ?

Saksi : Ja.

Oditur : Tadi ada djuga sedikit dan sering Saudara itu menjing-gung "perkataan-perkataan", kalau tidak salah dengan menjebut Kolonel Latif pelaksana, Letnan Kolonel Untung pelaksana, kalau begitu ada perentjanaan ?

Saksi : Ja, perentjanaan itu kalau menurut pendapat saja tidak bisa lain adalah dari itu Saudara Sjam jang

Oditur : Sjam itu siapa ?

Saksi : Sjam atau Sugito itu saja ketahu pasti bahwa ia ada-lah tokoh/sponsor PKI.

Oditur : Djadi dalam setiap rapat itu selalu hadir itu Sjam dan Pono ?

Saksi : Kalau tak ada dia, rapat itu tidak djadi.

Oditur : Djadi jang mengenai nama Sukatno tidak kenal ?

Saksi : Tidak.

Oditur : Itu hal Pak Djojo menjebut anggota jang dilatih sebagai apa, apanja sukarelawan ?

Saksi : Hansip.

Oditur : Djadi kalau begitu berbeda dengan sebutan Saudara Njono jang menjebutkan tenaga tjadangan. Djadi kalau Pak Djojo menjebutnja Hansip.

Diwaktu tanggal 28 September 1965 Pak Djojo tadi menerangkan ada berkumpul orang-orang jang akan dilatih, itu dari ormas apa sadja ?

Saksi : Sedjak tanggal 28 kami hanja menerima laporan dari wakil saja bahwa telah datang 1.000 sekian tjalon-tjalon siswa jang akan dilatih, jaitu minta persetudju-an dari saja, bahwa karena kami melihat mereka itu datang dari djauh dan pada umumnja keadaannja itu adalah tidak berada, maka dengan berat kami perin-tahkan supaja dilatih sadja.

Oditur : Djadi mereka datang dilaporkan kepada Pak Djojo, Pak Djojo terus melihat keadaan mereka ?

Saksi : Kami tidak melihat sendiri pada waktu itu tjuma me-nerima laporan.

Oditur : Dan terus memerintahkan supaja dilatih terus ?

Saksi : Ja dilatih sadja.

Oditur : Itu djuga atas usaha Djohar, Nicolas dan Kasiman ja ?

Saksi : Kalau tidak salah dalam pembitjaraan kami dengan Kolonel Latif bahwa itu jang menghubungi Kapten Suradi.

Oditur : Tapi Nico ini ikut ada ?

Saksi : Ja ada.

Pokoknja selesai koordinator ia ada, tanpa Nico, Djohar dan tanpa Kasiman itu tidak bisa.

Hakim Ketua : Saudara Sujono, kalau tadi dikatakan bahwa pada tang-gal 28 itu mereka setjara berdujun-dujun datang ke Lu-bang Buaja atas dasar Keputusan kebidjaksanaan dan

atas dasar juga pertimbangan juga bahwa sebelumnya sudah pernah ada permintaan latihan, itu yang ditolak itu siapa ? Yang minta dilatih dan ditolak itu dari Organisasi mana ?

Saksi : Jang ditolak ?

Hakim Ketua : Ja, jang kemudian atas dasar pernah ditolak itu diambil tindakan kebidjaksanaan untuk melatih mereka pada tanggal 28. Dari Organisasi mana saja jang mula-mula ditolak kemudian atas dasar kebidjaksanaan dilatih juga akhirnya.

Saksi : Katanja, ini kami ketahui kemudian dari laporan wakil saja saudara Gatot, bahwa mereka pada umumnya 90% adalah Ormas PKI.

Hakim Ketua : Kebanyakan, tidak semuanya ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Dalam rangkaian dengan saksi jang lain saja tanyakan mengenai Code-code. Itu diterima tanggal berapa ?

Saksi : Code-code itu dibuat di Pasar Minggu ditetapkan pada tanggal 28, kemudian dibuat oleh para siswa Gerwani jang sudah ada di Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Code-code pita-pita itu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang menentukan code-code itu siapa ?

Saksi : Kolonel Latif sendiri.

Hakim Ketua : Mengenai Sektor tadi disebutkan jang menentukan Sektor-Sektor itu siapa ?

Saksi : Jang menentukan sektor-sektor ini karena urusan militer jang menentukan Kolonel Latif, tapi pelaksanaannya Kapten Suradi.

Hakim Ketua : Mahkamah telah memandang tjukup didalam memeriksa saksi tambahan ini, apakah dari pihak Pembela masih ada jang akan diadjudkan dalam hal ini ?

Pembela : Ada satu lagi pertanjaan untuk Saksi.

Hakim Ketua : Silahkan.

Pembela : Atau melalui Bapak Ketua bisa, dus jang saja ingin ketahui keputusan jang diambil oleh Kolonel Latif, Letnan Kolonel Untung dan Sjam mengenai bantuan ormas-ormas. Kalau ternyata tidak, kepada Sujono jang menjampaiannya, siapa jang menjampaiannya.

Apakah mungkin Kapten Suradi jang menjadi penghubung dari Ormas ini, jadi ingin mengetahui apakah Saudara Sujono mengetahuinya ?

Saksi : Jang menjadi penghubung ja jang tiga tadi disebutkan Saudara Nicolas, Djohar dan Kasman.

Pembela : Ja tapi mereka tidak dapat perintah dari U, dari siapa mereka dapat perintah ?

Saksi : Mereka sebelumnya dapat briefing dari Kapten Suradi itu.

Pembela : Oh, Kapten Suradi jang menjadi itu perantara diantara mereka sama Kolonel Latif dan Letnan Kolonel Untung.

Saksi : Oh, bukan hanya dengan Ormas-ormas itu saja.

Pembela : Dus Ormas-ormas ini musti ada hubungan dengan Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latif ?

Saksi : Jang kami lihat hanya dengan Kapten Suradi menurut pendapat saja.

Pembela : Bagaimana, hanya dengan kesimpulan-kesimpulan jang dikemukakannya ?

Saksi : Kapten Suradi melaporkan sendiri kepadanya. Jangan ditjampur adukan antara Kapten Suradi dengan orang-orang jang ditugaskan sebagai penghubung tetap itu.

Pembela : Jang dilaporkan Kapten Suradi ialah bahwa telah mengadakan hubungan dengan Ormas-ormas, telah mendapat kesanggupan bahwa mereka bersedia untuk mengerahkan tenaga ?

Pembela : Dus Kapten Suradi menerangkan kepada U bahwa dia telah menghubungi Ormas-ormas dan mendapat persetujuan mereka untuk dilatih. Atas permintaan siapa ?

Saksi : Atas permintaan Kapten Suradi sendiri jang mewakili Kolonel Latif.

Pembela : Saja minta ini ditjatat Bapak Ketua.

Hakim Ketua : Semua apa jang dikemukakan dalam sidang ini ditjatat.

Pembela : Terima kasih.

Hakim Ketua : Betul apa jang dikatakan oleh Sujono tadi bahwa tidak kenal bung Njono, betul ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Didalam pemberian penjaksian, walaupun keterangan-keterangan tidak ada hubungannya setjara langsung, apakah diantara itu jang perlu diberikan komentar oleh Njono. Artinja diberi komentar, oleh Bung Njono mau ditambah dikomentari atau dibenarkan apa sama sekali tidak tahu menahu tentang hal itu ?

Terdakwa : Tidak ada yang perlu ditambah.

Hakim Ketua : Tidak memberi komentar atas penjaksaan ini ?

Terdakwa : Tidak. Kalau saja dengar itu seperti dikatakan pembela jalah bagaimana kawan Sukatno bilang hubungan dengan Lubang Buaja adalah dengan Pak Djojo, ternyata Pak Djojo tidak merasa ada hubungan. Saya merasa mendapat ketegasan, jadi siapa itu yang menjadi penghubung antara Sukatno atau kawannya dengan Kolonel Latif dan tentang Sjam itu saja.

Hakim Ketua : Apakah dari Oditur sesuatu masih ditanjakan kepada terdakwa ?

Oditur : Kemarin saudara Njono mengatakan atas permintaan Lubang Buaja, kalau ditulis tanda kurung (Pak Djojo melalui Sukatno saja mengirim tenaga tjadangan untuk dilatih). Sekarang Sukatno tidak dikenal oleh terdakwa dan Pak Djojo tidak pernah minta. Sekarang saja ingin taja dan belum saja tanjakan dalam B.A.P. tentang Celsistim. Tjoba terangkan sedikit tentang celsistim yang sering dipergunakan dalam tjara bekerdja.

Terdakwa : Jang dimaksud dengan cel sistim jaitu mengorganisasi orang-orang dalam organisasi ketjil, dalam cel-cel begitu, jang satu sama lain tidak saling berkenalan. Itu jang dimaksud cel sistim.

Oditur : Djadi mengorganisasi beberapa orang dibawah satu pimpinan kemudian beberapa orang lagi dibawah satu pimpinan lain lagi dan orang-orang ini satu dengan lainnya tidak kenal mengenal.

Terdakwa : Ja.

Oditur : Sudah itu saja pernah mendengar satu perkataan jang sering disebut GTM itu apa ?

Terdakwa : Gerakan Tutup Mulut.

Oditur : Djadi artinja tidak mau bitjara ?

Terdakwa : Tidak boleh mentjeriterakan, membualkan sesuatu kepada orang lain jang tidak berkepentingan.

Oditur : Apa bung Njono dalam pemeriksaan ini djuga mempergunakan taktik G.T.M. ?

Terdakwa : Tidak (sambil tertawa).

Oditur : Terhadap Njono pertanyaan ini saja kira selesai, tjuma saja mengajukan untuk membatjkan suatu hal jang dapat digunakan sebagai petunjuk, jaitu hasil pemeriksaan Panitia OUNDANG.

(Kemudian Oditur membatjkan Berita Atjara Panitia Oundang tersebut).

Hakim Ketua : Bisa kami peroleh Oditur BAP itu untuk saja gunakan sebagai aanwijzing dalam perkara ini ?

Terdakwa Njono, tadi sudah dengar, apa mau lihat ?

Terdakwa : Apakah kami boleh lihat ?

Hakim Ketua : Boleh.
(Terdakwa maju kedepan melihat Berita Atjara tersebut).

Pembela : Saya mau bertanja sesuatu pada Bapak Ketua, saja mau minta apakah pada perkara tertuduh Njono diperlengkapi djuga dengan visum et repertum dari pada para Dokter mengenai wafatnya para Djenderal di Lubang Buaja, supaya visum tersebut dimasukkan kedalam berkas.

Hakim Ketua : Didalam berkas memang tidak terdapat karena memang tidak dituduhkan kepada saudara Njono "moord" atau lain-lainnya jang memerlukan kelengkapan visum ?

Pembela : Memang, akan tetapi kemarin saudara Oditur Militer telah memperlihatkan foto-foto kepada tertuduh, dus dengan demikian persoalan ini diajukan dalam persidangan ini. Seandainya tidak ada, maka saja tidak akan tanja.

Hakim Ketua : Mahkamah kemarin memang melihat Oditur mengajukan beberapa foto disamping bahan-bahan lain, ada bendera, foto's, ada gambar D.N. Aidit hal ini oleh Mahkamah diterima didalam rangkaian memberikan ilustrasi terhadap fakta-fakta apa jang dikemukakan didalam sidang ini. Dus tambahan ilustrasi saja tentang jang ingin diketemukan Mahkamah didalam perkara Njono semasa G. 30. S., ilustrasi mana khususnja mengenai korban-korban itu tidak memerlukan pembahasan lebih lanjut karena Niet terzake.

Pembela : Tapi saja anggap lebih baik kalau visum et repertum itu dimasukkan dalam berkas.

Hakim Ketua : Mahkamah memandang tidak perlu oleh karena itu tidak dijadikan barang bukti dan tidak diperlukan sebagai barang bukti.

Pembela : Ada barang bukti lain Bapak Ketua ada disana didalamnya ada satu pernyataan djuga saja tidak tahu jang mana surat itu karena saja belum melihat semua stukken-stukken itu, mengenai persoalan ini. Mural

bukti didalam berkasnja mengenai persoalan korban jang terdjadi di Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Tetapi diluar persoalan jang dituduhkan ?

Pembela : Memang tetapi ada disana mengenai persoalan itu. Surat-surat pernjjataan jang dibuat oleh para pedjabat itu. Kalau saja boleh melihat berkas itu.

Hakim Ketua : Silahkan mempeladjadi keterangan-keterangan dari pedjabat.

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Pembela, oleh karena waktu untuk melihat surat-surat saja rasa ada baiknja untuk dischors sidang ini. Dengan ini Mahkamah menjatakan sidang ditunda untuk lima menit.

Pembela : Setelah saja periksa lagi saja tidak menganggap memang tidak penting dan saja tarik kembali permintaan tadi.

Hakim Ketua : Oleh karena permintaan dari Pembela untuk melengkapi itu ditarik kembali, dan oleh karena Mahkamah menganggap pemeriksaan terhadap terdakwa, terhadap saksi-saksi jang diadjukan dalam sidang, pula terhadap saksi tambahan jang diminta oleh Pembela telah tjukup, maka akan menjerahkan kesempatan kepada Oditur untuk mengadjukan Requisitoirnja. Apakah Oditur sudah siap dengan Requisitoirnja, apa mau minta waktu ?

Oditur : Kami minta waktu.

Hakim Ketua : Baik, kalau minta waktu, berapa lama waktunja ?

Oditur : Untuk membatja requisitoir pada besok tanggal 17 Pebruari 1966 djam 19.00 waktu Sumatera Utara oh, djam 19.00 Indonesia Bagian Barat.

Hakim Ketua : Saja tahu bahwa Oditur datang dari Sumatera Utara, djadi membiasakan diri dengan waktu setempat. Djadi bisa saja ulangi, djadi besok tanggal 17 Pebruari 1966 djam 19.00 WIB. Tentang permintaan waktu itu Mahkamah akan mempertimbangkan dahulu ditempat, untuk itu sidang akan dischors dua menit lagi.

Hakim Ketua : Kembali dibuka sidang. Setelah mempeladjadi permintaan dari Oditur, dan kalau diperhitungkan berarti dari sekarang minta waktu 31 djam 30 menit, waktu itu dipandang oleh Mahkamah terlalu lama. Oleh karena Mahkamah tak bisa melepaskan diri dari tudjuan ketjepatan sidang ini, tanpa mengurangi terlampau banjak waktu jang diminta itu, Mahkamah mengambil kepu-

tusan memerintahkan kepada Oditur untuk mengadjukan Requisitoirnja besok pagi djam 11.30 WIB atau meluluskan waktu 24 djam.

Oditur : Diterima.

Hakim Ketua : Ini ada kekeliruan Oditur sedikit, soalnja bukan diterima atau tidak, tetapi diperintahkan untuk mengadjukan requisitoir.

Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa pada hari ini dipandang tjukup dan ditangguhkan sampai besok djam 11.30.

SIDANG KE : VI
TANGGAL : 17 FEBRUARI 1966.
PADA DJAM : 11.30.
DALAM PERKARA : TERDAKWA — N J O N O —

1. Sidang Ke-VI MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA dibuka kembali dan tetap menjatakan sebagai Sidang terbuka bagi umum.
2. Hakim Ketua: kepada Oditur dipersilahkan untuk mengajukan Requisitoirnja.
3. Oditur mohon agar kepadanya diberikan waktu lagi, sampai djam 21.00 hari ini tanggal 17 Pebruari 1966 berhubung beliau belum siap dengan Requisitoirnja.
4. MAHKAMAH menshors sidang untuk memusjawarahkan permohonan Oditur selama 5 menit.
5. Setelah memusjawarahkan permohonan Oditur (mempeladjar dan mempertimbangkan) MAHKAMAH berkeputusan untuk **M E N J E - T U D J U I** permohonan Oditur mengundurkan waktu pengadjuan Requisitoir sampai malam nanti djam 19.00 jang berarti bahwa kepada Oditur dengan demikian telah berikan waktu selama 31 djam dan dengan tjatatan bahwa pengunduran waktu untuk kedua kalinya dengan dalih apapun akan ditolak.
Sidang ditangguhkan sampai djam 19.00.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
STAF ODITUR

UNTUK KEADILAN.

T U N T U T A N
(REQUISITOIR)

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH.

Dengan ini tibalah kesempatan bagi kami untuk mengutjapkan requisitoir kami didepan sidang Mahkamah jang terhormat ini, jang dengan idzin Tuhan Jang Maha Esa dan dibawah pimpinan jang bidjak-sana dari Overste Ketua, sidang-sidang dari Mahkamah Militer Luar Biasa ini selama beberapa hari sampai saat ini telah bekerdja dengan penuh ketekunan dan kesungguhan dalam usaha-usahanja untuk menjari dan mendapatkan kebenaran materiel guna dapat memberikan uitspraaknja, sungguhpun sikap terdakwa jang tidak djudjur dan plintat-plintut mempersulit djalannja persidangan-persidangan; untuk ini pada tempatnja bila kami disini dengan tulus ichlas menjatakan penghargaan kami jang setinggi-tingginja kepada pimpinan sidang Mahkamah jang terhormat ini.

Kita semuanya disini menjadari, bahkan seluruh rakjat Indonesia disemua pendjuru tanah air dapat merasakan, bahwa perkara jang sedang kita hadapi sekarang ini bukanlah hanya sekedar perkara Kriminil biasa sadja, tetapi satu perkara pidana jang luar biasa, jang proloognja berlatar belakang dan berthema politik, dengan motif-motief bernada politik dan dengan tudjuan-tudjuan politik tertentu. Bukan sadja dalam proloognja tetapi djuga dalam peristiwa dan fakta. nja sendiri terdapat pelaku-pelaku, baik sebagai intellectuële daders maupun sebagai materiele daders jang terdiri dari orang-orang jang biasa kita sebut sebagai orang-orang politik. Dari itu kami berpendapat, bahwa perkara jang sedang kita hadapi ini adalah satu perkara pidana jang bertjorak politik dan dapat pula dikatakan sebagai perkara politik jang bertjorak pidana jang sepenuhnya mendjadi kompetensi dari Mahkamah ini untuk mengadilinja.

Disamping itu kita djuga mengetahui dan menjadari, bagaimana besarnja perhatian jang ditudjukan kepada apa jang sedang berlangsung dalam ruangan sidang Mahkamah jang terhormat ini, baik perhatian dari dalam negeri maupun perhatian dari luar negeri. Dari itu adalah wadjar, bila dalam bahagian pendahuluan dari requisitoir

kami ini, kami ingin menjangkung latar belakang dan tema yang bertjorak politik dari perkara-perkara pidana ini untuk memberikan gambaran keseluruhan dan pelengkap dari bagian pokok dari requisitoir kami ini, jaitu dibidang juridisnja, sehingga tjorak politiknya djuga dapat diungkapkan disini setjara objektif-faktuil.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH.!

Dalam Keputusan Presiden R.I. No. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 baik dalam bahagian konsideransnja maupun dalam dietumnja sendiri, kita menemui dua kali istilah „Kontra revolusi“ ditjantumkan. Dalam ajat 3 dari „Menimbang“ disebutkan: „bahwa oleh karenanja apa yang dinamakan „Gerakan 30 September“ tersebut merupakan petualangan kontra revolusi, sehingga memerlukan penyelesaian segera dan dalam bahagian pertama dari „Memutuskan“ disebut: „Menetapkan“: Menunjuk Mahkamah Militer Luar Biasa yang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963, untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara dan tokoh-tokoh yang tersangkut atau terlibat dalam petualangan kontra revolusi, jaitu apa yang dinamakan „Gerakan 30 September“.

Begitu djuga dengan gugurnja 6 orang Perwira Tinggi dan seorang Perwira Pertama A.D. sebagai korban „Gerakan 30 September“, yang dengan Keputusan Presiden telah dinjatakan sebagai Pahlawan Revolusi, merupakan pula suatu bukti bahwa a contrario perbuatan „Gerakan 30 September“ suatu perbuatan kontra-revolusi.

Terang dan gamblang, bahwa baik perbuatan-perbuatannya maupun tokoh-tokohnya dari „Gerakan 30 September“ dinjatakan oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi kita sebagai petualangan kontra revolusi, sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Presiden tersebut diatas.

Istilah kontra revolusi pada hakekatnja adalah istilah politik bukan istilah hukum arti terminologi juridis, tetapi istilah kontra revolusi pasti adalah istilah yang dipergunakan dalam terminologi hukum revolusi, hukum tertinggi, dari rakjat dan Negara yang sedang ber-revolusi. Kontra revolusi tidak hanya sekedar landveerraad atau hoog-verraad sadja yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, tetapi lebih, daripada itu perbuatan-perbuatan kontra revolusi memanifestasikan pengkhianatannya terutama dibidang idil, menjelewengkan revolusi, menghantjurkan sistim dan nilai-nilai sosial dari masyarakat dan rakjat revolusioner, memundurkan revolusi, memandegkannya atau melompatkan revolusi itu beberapa tahap kedepan, yang untuk revolusi Indonesia garis-garis besarnya telah ditentukan dalam ajaran-ajarannya P.B.R. BUNG KARNO.

Bahwa perbuatan-perbuatan dan tokoh-tokoh dari „Gerakan 30 September“ adalah petualangan dan petualang kontra revolusi telah setjara uitdrukkelijk disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik

Indonesia No. 370 tahun 1965 tersebut diatas, maka untuk dapat memahami tjorak politik dari perkara pidana „Gerakan 30 September“, kami dari tempat ini menunjuk kepada terdakwa NJONO bin SAS-TROEDJO alias TUGIMIN alias RUKMA, suatu bukti hidup, salah seorang tokoh dari „Gerakan 30 September“. Untuk dapat digolongkan apakah seseorang termasuk klas tokoh atau klas bukan tokoh adalah suatu feitelijke vraag, yang harus dinilai baik dari segi peranannya dalam peristiwa „Gerakan 30 September“ maupun dari segi kedudukan sosialnja, karena kedua segi ini pada umumnya mempunyai hubungan timbal-balik. Terdakwa NJONO adalah seorang tokoh politik dalam kedudukan sosialnja sebagai seorang dari pimpinan Partai Komunis Indonesia dan berapa besar peranannya dalam petualangan kontra revolusi „Gerakan 30 September“ dapat dinilai dari proses-pemeriksaan yang telah berlangsung selama beberapa hari dalam ruangan persidangan Mahkamah yang terhormat ini.

Dalam sebuah keterangan yang ditulis sendiri oleh terdakwa pada bulan Desember 1965, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang latar-belakang dari pengakuannya setjara terus terang bahwa „Gerakan 30 September“ adalah rentjana dari Politbiro CC-PKI, terdakwa memberikan djawaban sebagai berikut: „bahwa tentang „Gerakan 30 September“ saja kemukakan terus terang karena fakta-fakta tersangkutnja tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia dalam „Gerakan 30 September“ adalah sulit dihindarkan, soal pokok daripada „Gerakan 30 September“ adalah soal politik yang perlu dijdelaskan duduk-perkaranja, tidak tepat djika saja melepaskan tanggung djawab tentang peranan saja dalam „Gerakan 30 September“ tersebut dan pengakuan terus terang memudahkan fihak pengadilan, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO dan rakjat memberikan penilaiannya“. Demikianlah pengakuannya yang diberikan oleh terdakwa NJONO, seorang tokoh dari 9 tokoh-besar pimpinan pusat Partai Komunis Indonesia yang disebut Politbiro CC PKI, disamping itu merangkap sebagai Sekretaris Pertama atau Ketua dari Komite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya. Kedudukan politis yang sangat penting dari daerah Djakarta Raya sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, mendorong pimpinan pusat Partai Komunis Indonesia untuk menempatkan salah seorang rekannya dari Politbiro memimpin Komite Daerah partainya untuk Djakarta Raya. Sekarang dalam sidang Mahkamah ini terdakwa dengan sia-sia mentjoba merobah/menarik kembali dan memutar balikkan keterangan-keterangannya dan pengakuan-pengakuannya yang telah berulang kali diberikannya dalam usahanya untuk menjelamatkan partainya dan mentjoba mengambil tanggung djawab atas dirinya sendiri, jaitu NJONO in persoon, tetapi bagaimana terdakwa akan dapat membantah fakta-fakta yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum, bahkan sikap tidak djujur dan plintat-plintut terdakwa telah memberikan indruk/kesan psikologis yang tidak baik, yang bagi the man in the street merupakan indikasi yang kuat bahwa memang benar, bahwa

Partai Komunis terlibat dan tersangkut dalam petualangan kontra revolusi „Gerakan 30 September”. Sebagai ilustrasi disini kami kemukakan beberapa fakta-fakta, bahwa setiap pertemuan-pertemuan yang terjdadi dalam bulan Agustus 1965 untuk permufakatan dan perentjaan „Gerakan 30 September” selalu disebut terdakwa sebagai rapat-rapat Politbiro CC — dan memang rapat-rapat tersebut hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh yang dikenal sebagai anggota Politbiro sadja; djuga instruksi-instruksi/briefing-briefing yang diberikan oleh terdakwa kepada pimpinan organisasi bawahan partainya dalam rangka persiapan „Gerakan 30 September” dilakukannya dalam kwalitasnya sebagai Sekretaris Pertama CDR atau lebih tegas lagi dilakukannya dalam hubungan organisasi partai, bukan antara NJONO dengan SAR-TAMAN dari Mangga dua atau dengan WARDOJO dari Pasar Minggu dan lain-lainnya.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH. !

Kami menjdari, bahwa Mahkamah Jth. ini tidak mempunyai wewenang untuk memberikan Keputusan politik, karena wewenang tersebut hanya ada satu-satunya dalam tangan Presiden/PANGTI AERI-P.B.R. BUNG KARNO, yang telah mendapat dukungan keprtjajaan dari seluruh rakjat Indonesia tanpa reserve. Dan bila kami dalam requisitoir ini menjebut-njebut soal-soal politik, maka itu adalah dalam hubungan perkara pidana yang kita hadapi sekarang ini yang tidak terlepas satu sama lainnya, dan djika tidak dikemukakan didepan sidang Mahkamah Jth; ini akan merupakan suatu gambar atau lukisan yang tjatjad, karena bahagian yang terpenting dari gambar atau lukisan tersebut kabur atau tidak terlihat sama sekali. Perlu kami tegaskan disini, bahwa tjorak politik dari perkara pidana ini yang akan kami ungkapkan disini bukan didasarkan kepada „politieke aanwijzingen”, jaitu istilah yang sering dikemukakan oleh terdakwa dalam argumentasi-argumentasinya „politieke aanwijzingen” tersebut tidak dapat diterima sebagai pembuktian, karena selalu disandarkan kepada tanggapan-tanggapan politik yang subjektif spekulatif tergantung dari ideologi dan faham politik yang dianut oleh seseorang, tetapi didasarkan kepada pengalaman-pengalaman selama melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi baik yang berupa keterangan-keterangan lisan dan tulisan maupun kenjataan-kenjataan yang berupa keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan yang sudah merupakan pengetahuan umum yang satu sama lain saling berhubungan. Diatas dasar keadaan yang immanent dan objektif tersebut diatas kami kemukakan disini tjorak politik dari perkara pidana ini dan untuk itu kami sengadja sebanyak mungkin memakai istilah-istilah yang sering dipergunakan oleh terdakwa.

Dalam keterangan-keterangan yang pernah diberikan oleh terdakwa, bahwa faktor-faktor politik yang mendorong Politbiro CC.PKI untuk

mempersoalkan perobahan kekuasaan politik atau dalam istilah biasa penggantian pemerintahan yang kemudian mengakibatkan timbulnya „Gerakan 30 September” adalah 1. sakitnya P.J.M. Presiden yang serius; 2. adanya informasi tentang rentjana kudeta Dewan Djenderal dan 3. adanya ketidak sabaran golongan Perwira-perwira yang hendak mendahului rentjana Dewan Djenderal tersebut.

Bagi hukum, faktor politik atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pidana tidak dipersoalkan, apapun djuga alasannya seseorang tidak boleh berbuat diluar hukum atau mendjadi hakim sendiri. Terdakwa menjatakan bahwa diantara ketiga faktor politik tersebut, kern-probleemnya ialah ada atau tidak ada Dewan Djenderal, tetapi sebaliknya ia yakin Dewan Djenderal itu ada berdasarkan kepada info-info „politieke aanwijzingen”, social historis, yang dimulainya dengan „peristiwa 17 Oktober 1952”; konsepsi pembentukan satu partai negara; mempertahankan S.O.B. dengan menjalah gunakan wewenang S.O.B. melalui BKS-BKS Buruh, Tani dan Militer mentjoba membatasi peranan Front Nasional dan Organisasi-organisasi massa; pembentukan Organisasi Karyawan „Soksi” dan praktek-praktek politik Dewan Djenderal yang ingin mengganti Nasakom dengan Nasasos dan menjalah tafsirkan Nasakom dengan „djiwa Nasakom” dan dalam praktek Dewan Djenderal merupakan suatu golongan politik tersendiri. Itulah diantaranya serentetan „politieke aanwijzingen”, info-info dan social-historis yang didjadikan dasar oleh terdakwa dan kawan-kawan separtainya untuk menjatakan adanya Dewan Djenderal dan mejakinkan simpatisan-simpatiasannya, didjadikan suatu mythos politik yang kemudian mendjadi faktor politik yang mendorong Politbiro untuk merentjakaan dan kemudian mentjetuskan sendiri pertjobaan kudeta yang katanya menurut info akan dilakukan oleh Dewan Djenderal terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang sjah yang dipimpin oleh Presiden/Perdana Menteri/P.B.R. BUNG KARNO melalui apa yang menamakan dirinya „Gerakan 30 September” dengan dalih „mendahului” rentjana Kudeta Dewan Djenderal.

Dari politieke-aanwijzingen, fakta-fakta politik, analisa social-historis althans dari sudut pandangan politik terdakwa dan kawan-kawan sefamahnya serta info-info yang tidak pernah ditjek kebenarannya, mereka membangun suatu these, sesuai dengan ajaran ajaran kontradiksi, bahwa kegiatan-kegiatan politik yang mereka namakan Nasakom-phobi atau lebih tegas lagi Komunisto-phobi telah melahirkan Dewan Djenderal. Dengan adanya apa yang mereka namakan „situasi-revolusioner” yang diantara tjiri-tjirinja ialah golongan „pro-rakjat” mulai mendesak golongan „anti Rakjat” yang dibuat matang melalui kampanye-kampanje politik atau menurut istilah D.N. AIDIT dengan tjara-tjara „offensief-revolusioner” mereka membuat anti-thesenja, yang kemudian melahirkan synthesenja jaitu: „Dewan Revolusi”. Inilah kenjataan-kenjataan dan keadaan-keadaan yang telah terjdadi dan inilah

pada hakekatnya latar belakang atau thema politik dari „Gerakan 30 September”.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH. !

Sebelum kami memberikan pendapat kami tentang apa yang di kemudikan oleh terdakwa sebagai tersebut diatas, kami dengan tegas dapat mengatakan disini bahwa tjara mengambil kesimpulan-kesimpulan oleh terdakwa beserta rekan-rekannya dari Politbiro CC PKI yang semata-mata berdasarkan info-info, analisa tentang fakta-fakta politik dan social-historis yang subjektif selalu akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bertendens fitnahan/lasterij, yang berbahaya dan membahayakan persatuan dan kesatuan Nasional, pengamanan revolusi dan adjaran-ajaran P.B.R. BUNG KARNO. Kami tidak akan mengungkapkan disini praktek-praktek politik dari PKI pada masa-masa yang lalu yang selalu merongrong Pemerintah melalui apa yang mereka sebut aksi-aksi rakjat dan bahwa pada akhirnya kekuasaan tersebut harus direbut dengan kekerasan (violence-revolution), karena hal-hal tersebut sudah merupakan pengetahuan umum.

Pertama-tama kami ingin menundukkan disini, bahwa semua tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan tersebut diatas khusus ditujukan terhadap Pimpinan Angkatan Darat yang berarti djuga terhadap Angkatan Darat dalam keseluruhannya, sehingga menimbulkan pertanyaan yang logis : apakah bukan tuduhan komunisto-phobi disebabkan karena adanya Angkatan Darat-phobi dalam batang tubuh partainya terdakwa.

Bukanlah Angkatan Darat yang telah memukul dan menggagalkan pemberontakan dan pengkhianatan Madiun ? Dan bukankah peristiwa „Gerakan 30 September” mereka sebut-sebut dan tuduhan sebagai soal intern Angkatan Darat. Ini bukan analisa social-historis, tetapi een harde feit, suatu kenyataan yang keras. Pertumbuhan yang unik dari T.N.I. A.D. pada khususnya dan ABRI pada umumnya sebagai anak kandung dan anak sulung revolusi, memberikan tempat yang unik pula kepadanya dalam konstelasi-revolusi Indonesia jaitu sebagai karyawan, baik sebagai alat revolusi maupun alat Negara.

Sebagai golongan karya atau karyawan anggaute-anggaute T.N.I. A.D. ikut serta dalam semua kegiatan dibidang politik, sosial dan ekonomi dan kedudukannya sebagai satu kekuatan sosial dalam masyarakat Indonesia diterima dan diakui rakjat sebagai suatu kenyataan sedjarah. Dengan dekrit Presiden/PANGTI ABRI tanggal 5 Djuli 1959 T.N.I.-A.D. menemukan kembali kepribadiannya dan peranannya sebagai alat revolusi dan sebagai satu kekuatan sosial politik yang sociologia/organis-fungsional disamping partai sebagai kekuatan sociologia-idil menjadi lebih dipertegas dan pasti. Kegiatan-kegiatan yang menonjol dalam djordjoran, Kompetisi Manipolis, menjebak badju hidjau terlihat dimana-mana, hampir disemua lapangan kehidupan masyarakat. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran dan ketjemasan pada pimpinan partai terdakwa yang berpangkal kepada dasar psyche yang Angkatan

Darat-phobi, dan menjebutnya dengan istilah Dewan Djenderal yang merupakan suatu golongan politik. Adalah lebih baik djika A.D. itu hanya sebagai alat Negara tok, kalau toh mau ikut berpolitik sebaiknya badju hidjaunya dibuka sadja, satu dalil liberalisme, yang tak segan-segan dipergunakan oleh suatu partai yang katanja anti liberalisme. Terdakwa menjebut-njebut „peristiwa 17 Oktober” sebagai sandaran social-historis tentang adanya Dewan Djenderal, tetapi terdakwa tidak pernah menjinggung-njinggung „pemberontakan Madiun” yang berdarah yang telah terdjadi lebih dulu pada saat-saat memuntjaknja physical revolution sebagai sandaran social-historis dari „Gerakan 30 September” pada saat meningkatnja Dwikora.

Semua kegiatan-kegiatan politik dari anggaute A.D. sebagai karyawan revolusi, pendukung, pengamal dan pengaman dari adjaran-ajaran P.B.R. BUNG KARNO, yang diantaranya telah diopsomen oleh terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan diatas yang telah diberi warna oleh katjamata yang A.D.-phobi, maka rechtvaardiggingnja sungguh-sungguh tidak diperlukan, karena tidak ada yang akan di rechtvaardigen.

Dalam Tri Ubaya Sakti, Doktrin Perdjjuangan T.N.I.-A.D. yang telah direstui oleh Presiden/PANGTI A.B.R.I. Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO, disebutkan bahwa pembinaan potensi perang-revolusi Indonesia disandarkan kepada dua azas sistim persendjataan, jaitu azas sistim persendjataan teknologi dan azas sistim persendjataan sosial-politik.

Jang dimaksud dengan persendjataan sosial-politik adalah : penggunaan setjara sistimatis semua hasil kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, ideologi maupun personilnja sebagai alat offensif bagi politik dalam rangka melaksanakan azas sistim persendjataan sosial-politik milah maka anggaute-anggaute T.N.I.-A.D. memenuhi kewadjabannya sebagai karyawan dalam semua bidang kehidupan masyarakat sebagai suatu kekuatan sociologis/organis fungsional dan bukan sebagai partai politik dalam pengertian sociologis-idil. Tanpa mengetahui : latar belakang dari kegiatan-kegiatan kekaryawanan dari anggaute T.N.I. A.D. yang sepenuhnya didasarkan kepada Doktrin perdjjuangan — Tri Ubaya Sakti, orang dengan mudah akan menuduh, bahwa T.N.I. A.D. bertindak sebagai satu golongan politik, sebagaimana yang pernah di tuduhkan oleh PKI terhadap apa yang mereka sebut „Dewan Djenderal” yang akhirnya menimbulkan tragedi nasional, yang merugikan perdjjuangan revolusi kita. Fitnahan-rendah yang dilemparkan kepada alamat A.D. tidak perlu dilajani, yang paling pokok adalah persatuan antara P.B.R., Rakjat dan ABRI harus tetap terpelihara dan tak terpetjahkan, itulah modal utama untuk mengamankan dan menjelesaikan revolusi.

Dibawah Pimpinan P.B.R. Jata BUNG KARNO dan dengan senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran beliau sepanjang zaman, kami yakin dan pertjaja, bahwa hahuan dan tudjuan revolusi Indonesia tetap terpelihara dan terdjamin, sekali kiri tetap kiri, menudju masyarakat sosialisme Indonesia yang bersendikan Pantjasila, masjarakat adil dan makmur. Kita melihat kenyataan, jaitu setelah P.K.I. dinonaktifkan kegiatan-kegiatannja dalam semua bidang terutama dalam bidang kehidupan politik, tidaklah terasa adanya kekosongan dalam pimpinan massa-revolusioner, karena massa Indonesia sudah sedjak lama terlatih revolusioner dan berwatak revolusioner sesuai dengan kondisi masjarakat yang sedang berrevolusi dan masih terus berrevolusi.

Terlibatnja P.K.I. dalam petualangan Kontra revolusi „Gerakan 30 September“, baik dalam proloog maupun dalam peristiwanja sendiri, baik sebagai perentjana maupun sebagai pelaku sebagaimana yang dikonstatir dan dibuktikan dalam sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Jth. ini merupakan perbuatan pengkhianatan terhadap Pantja Azimat Revolusi. Ia telah menghantjurkan persatuan dan kesatuan Nasakom, Azimat pertama dari revolusi Indonesia, ia meremehkan golongan-golongan lainnja, ia bertindak sendiri dengan mempergunakan segolongan Perwira-perwira yang tenaga intinja terdiri dari Perwira-perwira yang setjara politik ideologis telah dibina bertahun-tahun sebelumnya, sehingga Perwira-perwira tersebut mengkhianati Sapta Marga dan sumpah Pradjurit. Dengan dalih menjelamatkan revolusi dan P.B.R. dari rentjana Kudeta Dewan Djenderal, mentjoba menggulingkan Kabinet Dwikora yang dipimpin sendiri oleh Presiden/Perdana Menteri/PANGTI ABRI/P.B.R. BUNG KARNO dan membentuk Dewan Revolusi, suatu bentuk dan sistim pemerintahan yang tak dikenal oleh Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Dasar Proklamasi yang didjiwai Pantjasila.

Menerima Pantjasila bukan sebagai ideologi negara bukan sebagai weltanschauung bangsa Indonesia, tetapi hanya sebagai taktik-perdjuangan dan sebagai alat-pemersatu sadja adalah berbahaya bagi tjita-tjita revolusi Indonesia bahkan bersifat bukan-Indonesia, karena Pantjasila adalah mutiara-mutiara asli yang digali oleh BUNG KARNO dari bumi dan sedjarah Indonesia sendiri.

Bahkan kita akan berusaha untuk mendjadikan Pantjasila sebagai „Piagam Universil“ yang akan merupakan landasan persahabatan dan perdamaian dunia yang kekal abadi.

Menanggapi amanat politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada pembukaan Sidang Umum ke III M.P.R.S. tanggal 11 April 1965 tentang djiwa dan watak persatuan dan kesatuan Nasional Progresip-revolusioner dari pada Nasakom sebagai perasaan dari Pantjasila, beliau diantara lain mengatakan :

„Tidakkah kita mengerti, menginsafi, mejakini kenyataan-kenyataan sedjarah, bahwa kekuatan NAS sendiri sadja kurang sanggup dan

tidak mampu untuk merebut kemerdekaan dan memelihara perdamaian, baik nasional maupun internasional ? Tidakkah kita tahu dan mengerti, bahwa kekuatan A sendiri sadja tidak berhasil melahirkan kemerdekaan dan menggalang perdamaian, baik nasional maupun internasional ?

Dan sanggupkah kekuatan KOM sendiri sadja mendatangkan kemerdekaan dan menggalang perdamaian, baik nasional maupun internasional ? Tidak, sedjarah pergerakan kita menunjukkan dengan pasti : tidak ! sekali lagi : tidak ! Tapi persatuan dan kesatuan Nasakom serta kenyataan sedjarah-perdjoangan Indonesia yang telah diungkapkan oleh Presiden dalam amanat politik beliau tersebut diatas tidak diatjuhkan dan diperdulikan oleh P.K.I. karena dengan mentjetuskan „Gerakan 30 September“ mereka ingin menunjukkan, bahwa dengan kekuatan sendiri mereka sanggup menggalang perdamaian dan menyelesaikan revolusi Indonesia tentu dengan tjara mereka sendiri dan kearah yang mereka kehendaki. Dengan perbuatan-perbuatan mereka yang kontra-revolusi tersebut, mereka menghantjurkan persatuan dan kesatuan nasional-progresip-revolusioner dari Nasakom, bahkan mereka hendak menempatkan KOM diatas golongan-golongan lainnja, diatas golongan NAS dan A, karena estimate mereka tentang „situasi-revolusioner“ memungkinkan mereka untuk mentjapai keinginan-keinginan politik mereka dengan tjara-tjara „offensief-revolusioner“ lebih radikal lagi, jaitu dengan kekerasan sendjata. Pernah terdakwa dalam hubungan ini mengatakan kepada kami dalam suatu pemeriksaan, bahwa komposisi Dewan Revolusi menunjukkan sifat politiknya yang koalisi-nasional, yang terdiri dari unsur-unsur Nasakom. Ja untuk sementara, siapa yang dapat mempertjajinja untuk selandjutnja, suatu Dewan Revolusi yang dibentuk dengan paksaan dengan meninggalkan sama sekali Pemimpin Besar Revolusi, meremehkan tata krama Nasakom, konsultasi dengan kawan dan konfrontasi dengan lawan, sedangkan siapa lawan atau musuh revolusi kita sudah ditegaskan dalam Manipol. Dengan tindakan-tindakan mereka yang kontra-revolusi, mereka telah memperketjil musuh nation Indonesia jaitu projek Nekolim „Malaysia“ dan memukul dengan tiba-tiba Karyawan-karyawan revolusi yang mereka sebut „Dewan Djenderal“ yang dituduh akan melakukan Kudeta, dengan istilah golongan „anti rakjat“ harus didesak/di geser oleh golongan „pro-rakjat“ jaitu mereka sendiri, mereka tanpa disadari sudah mengandjurkan dan kemudian mentjetuskan sendiri suatu revolusi-sosial dalam negeri, suatu pemutar balikan atau pelompatan tahap revolusi Indonesia bertentangan dengan ajaran Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO dan dosa mereka mendjadi berlipat ganda tak berampun, karena sasaran-sasaran yang mereka pilih dalam penindakan-penindakan physieknja adalah orang-orang yang kini telah mendjadi pahlawan revolusi dan pahlawan-pahlawan revolusi pastilah pahlawan rakjat dan pahlawan rakjat tidak mungkin anti

rakjat. Strategi politiknya sudah kontra revolusioner bertentangan dengan pentahapan revolusi Indonesia, yang menurut Pemimpin Besar Revolusi kita sedang berada dalam penyelesaian tahap nasional demokrasi untuk akan mengindjak ambang pintu tahap socialisme, socialisme Indonesia, bukan socialisme asing yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Benarlah apa yang dikatakan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam pidato Ulang tahun ke 20 Republik Indonesia, 17 Agustus 1965 yang berjudul „TAKARI“ : Mereka yang kemarin progresif, hari ini mungkin menjadi reprogresif, anti progresif, yang kemarin revolusioner, hari ini mungkin menjadi kontra revolusioner, yang kemarin radikal, hari ini mungkin menjadi melempem.

Apa yang disinjalir oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam pidato beliau tersebut diatas ternyata menjadi kenyataan 1½ bulan kemudian yaitu peristiwa apa yang menamakan dirinya „Gerakan 30 September“ petualangan Kontra-revolusi yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, sebagaimana dapat dirasakan, dilihat dan didengar selama sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa ini dan adalah telah menjadi tradisi atau dalam istilah hukumnya „precedent“ dari Mahkamah ini untuk mengadili oknum-oknum yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan petualangan kontra-revolusi.

Itulah sekedar latar belakang politik dari perkara pidana yang bertjorak politik ini atau perkara politik yang bertjorak pidana yang sedang kita hadapi sekarang ini dan sebagai penutup dalam uraian pendahuluan dari requisitoir kami ini, sebelum memasuki bahagian juridisnya, ingin kami menjampaikan suatu hal yang kami anggap penting, bahwa kami tidak akan terkedjut, bila pada suatu-waktu nanti ada orang-orang tertentu yang akan mengatakan, bahwa suasana pemeriksaan dalam sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa ini diliputi oleh suasana Komunisto-phobi, karena pedjabat-pedjabatnya adalah antek-antek Dewan Djenderal, sungguhpun Mahkamah Militer Luar Biasa ini hanya dapat bersidang berdasarkan keputusan dari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi sendiri.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGOTA JTH. :

Sekarang kami masuk kebahagian jurisdi dari requisitoir kami, dimana kami lebih dulu hendak membahas perbuatan-perbuatan terdakwa dalam peristiwa atau faktanya sendiri dari "Gerakan 30 September", yaitu kejadian atau keadaan yang paling dekat waktunya dengan saat, saat persidangan Mahkamah Jth. ini untuk memberikan gambaran yang lebih djelas dan terang dan masih segar dalam ingatan kita semua yang merupakan tragedi nasional, untuk kemudian dari sini bertolak kewaktu-waktu yang agak djauh kebelakang, sebagai yang disebutkan dalam

surat tuduhan No. TUD/001/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966 dan sebelum pemeriksaan-pemeriksaan disidang dimulai telah kami batjatkan dan terangkan kepada terdakwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang tertjantum dalam Surat penetapan Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa No. KEP-002/MBI/A/1966 tanggal 7 Pebruari 1966.

1. TUDUHAN KETIGA.

Tuduhan ketiga ini berkisar pada memimpin dan mengatur pemberontakan, dengan mengangkat sendjata terhadap kekuasaan yang sudah berdiri di Indonesia, terhadap tuduhan mana terdakwa telah memberikan pengakuan-pengakuannya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar permulaan September 1965 terdakwa telah mengirimkan tenaga tjadangan yang terdiri dari anggota-anggota PKI, Pemuda Rakjat, SOBSI, GERWANI, BTI ke Lubang Buaja untuk latihan-latihan kemiliteran ;
2. Bahwa benar pada pertengahan September 1965 telah disusun Sektor-Sektor dan terdakwa menundjuk Komandan-Komandan Sektornya ;
3. Bahwa benar terdakwa telah membentuk Pos-Pos Aksi pada tingkat CS-CS yang terdiri dari Pos-Pos Komando, Pos-Pos Koordinasi, Pos-Pos Lapangan yang langsung berada dibawah komandonya yang dipimpinnya dari Pos kerdjanja ;
4. Bahwa benar terdakwa telah membentuk P.H.B. yang dikepalai oleh BATHORO ;
5. Bahwa benar terdakwa tanggal 29 September 1965 telah mengetahui tentang Hari H dan Djam D dan tentang dropping sendjata api, pakaian seragam, pita-pita pengenalan dari Lubang Buaja untuk Sektor-Sektor ;
6. Bahwa benar terdakwa telah menginstruksikan kepada CS-CS untuk bersiap-siap menerima dropping barang-barang tersebut diatas ;
7. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 telah melakukan kontrol sampai djauh malam terhadap Pos Komando dan Sektor Salemba tentang kesiap-siagaan dan dropping sendjata-sendjata api dan barang-barang lainnya ;
8. Bahwa benar terdakwa telah mendapat laporan-laporan tentang situasi dan tentang gerakan tentara yang berpita putih dan membuat analisa-analisa tentang laporan tersebut ;
9. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 1 Oktober djam 19.00 atau 20.00 malam telah menerima laporan dari ACHMAD MUHAMAD Komandan Sektor I Gambir tentang tertangkapnya pasukan-pasukan tenaga tjadangan bersendjata dari sektornya yang berusaha menduduki Kantor Pengurus Besar Front Nasional, Kantor Sentral Telepon Otomatis Djalan Merdeka Selatan.

SAKSI ACHMAD MUHAMAD bin JACUE dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar IA mendjabat sebagai Sekretaris CSS PKI Djati.
2. Bahwa benar IA didalam "Gerakan 30 September" mendjabat sebagai Komandan Sektor I sedjak tanggal 24 September 1965 ; jang mengangkatja menjadi Komandan Sektor adalah Soekarno Sekdjen Dewan Nasional Pemuda Rakjat.
3. Bahwa benar ia telah mengikuti latihan kemiliteran dari tanggal 3 s/d tanggal 8 September 1965 di Lubang Buaja jang diselenggarakan oleh Pak Djojo dan pembantu-pembantunya dari Angkatan Udara atas perintah Sekretaris CS Petamburan MULADI dan untuk kedua kalinya ia dilatih kembali pada tanggal 28 s/d tanggal 30 September untuk refreshing.
4. Bahwa benar selama latihan perawatannya diselenggarakan oleh AURI dan pelatih-pelatih semuanya serta alat-alat sendjatanya berasal dari AURI pula.
5. Bahwa benar dilatih itu para Sukarelawan dapat pelajaran antara lain : Bongkar pasang sendjata : Tjung, Pistol, Bren, 12,4, Basoka, meriam penangkis serangan udara serta tjara menembakkannya dan pula diberikan indoktrinasi.
6. Bahwa benar menurut pelatihnja jang bernama Pak IMAN dan Pak Djojo, maka tudjuan latihan itu untuk mempertinggi kewaspadaan Nasional dalam menghadapi Malaysia, tetapi kemudian ternyata bahwa latihan-latihan itu merupakan persiapan untuk "Gerakan 30 September" karena Sektor-Sektor menerima tugas dari "Gerakan 30 September" dan orang-orang jang telah dilatih di Lubang Buaja dalam angkatan extra (latihan refreshing) sebanyak 26 orang itu, semuanya menduduki tempat-tempat jang penting dalam Sektor Sektor.
7. Bahwa benar IA pernah menerima briefing dari Sukarno tentang bahaya Kup Dewan Djenderal pada tanggal 24 September 1965 di gedung CC PKI di Kramat Raya 81 Djakarta.
8. Bahwa benar IA mengetahui tentang akan adanya "Gerakan 30 September" pada tanggal 29 September 1965 pada waktu diadakannya briefing oleh Pak Saleh dengan para Komandan Sektor di Lubang Buaja dimana Pak SALEH menerangkan akan diadakannya suatu gerakan oleh mereka pada hari H Djum'at tanggal 1 Oktober 1965 djam D djam 04.00 pagi, untuk menggagalkan Kup jang akan dilakukan Dewan Djenderal dan bagaimana rentjana pelaksanaanja gerakan tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 30 September 1965 dengan tudjuh orang dari Sektornja IA pulang dari Lubang Buaja setelah terlebih dahulu menerima uang sebanyak Rp. 200.000,— dari Pak DJOJO pada tang-

gal 29 September 1965 untuk keperluan penjelenggaraan dapur umum dan kurang lebih 300 pasang pakaian seragam hidjau dari Pak MARSUDI dari AURI.

10. Bahwa benar pada terdjadinja peristiwa "Gerakan 30 September" pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 17.00 IA menerima sendjata api dari PAK MARSUDI (dari AURI) di Lubang Buaja jang terdiri dari : 2 putjuk sendjata djenis Tjung, 4 putjuk sendjata api djenis Garrand 23 — 25 putjuk sendjata djenis G-3, dan peluru-peluru bagi sendjata tersebut.
11. Bahwa benar sekembalinja dari Lubang Buaja sendjata-sendjata itu IA serahkan kepada SUTARNO Komandan Pasukan Sektornja untuk dibagikan pada anggota-anggota Sektor jang telah ditentukan.
12. Bahwa benar pada djam kurang lebih 19.30 ia berangkat ke Front Nasional Djalan Merdeka Selatan untuk menduduki objek jang ditentukan oleh Pak Saleh, sedang anak buahnya akan menjusul dibawah pimpinan SUTARNO dengan sebuah truck.
13. Bahwa benar anak buahnya jang menjusul dan menduduki objek-objek tersebut seperti Kantor Telepon Gambir, Gudang P.B. Front Nasional serta instalasi penjernihan air pada djam 20.00 semuanya ditangkap oleh RPKAD termasuk juga Komandan Pasukannya SUTARNO, sedang IA sendiri berhasil meloloskan diri karena berpakaian preman dan tak membawa sendjata.
14. Bahwa benar IA segera menjari Pak SALEH atau salah seorang diantara pembantu-pembantunya jaitu SOEKATNO, DJOHAR, KASIMAN atau NICO untuk melaporkan peristiwa tersebut tetapi IA tak berhasil menemukan mereka sehingga IA menjari kegedung CC PKI tetapi disanapun orang-orang tersebut tidak dapat dikelempakan, oleh penjaga gedung IA dibawa kerumah NJONO dan IA melaporkan tertangkapnja anak buahnya kepada NJONO.
15. Bahwa benar setelah NJONO menerima laporan itu IA mengatakan kepadanya, bahwa kalau demikian ada kematjatan dan memerintahkan kepadanya untuk lapor kepada Lubang Buaja dan juga kepada Sekretaris CS Petamburan di Setyabudi.
16. Bahwa benar setelah IA tiba di Lubang Buaja tak dapat menjumpai siapapun, maka IA kembali menjari pemimpin-pemimpinja kegedung SOBSI di Djalan Gang Tengah dan setelah bermalam disitu selama 1 malam maka IA terus berusaha menjumpai Sekretaris CS Petamburan tetapi tupun tak berhasil sehingga karena bingungnja ia kemudian melaporkan diri kepada Polisi dan selanjutnja IA ditahan.

SAKSI PRAJITNO bin KARNEN dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar IA mendjabat sebagai Wakil Sekretaris CC PKI Kebajoran Baru sedjak bulan Maret 1965.

2. Bahwa benar IA sedjak tanggal 22 September 1965 diangkat menjadi Komandan Sektor Kebajoran Baru, Kebajoran Lama, Mampang Prapatan dan Pasar Minggu yang sedjak tanggal 26 September 1965 disebut Sektor 6.
3. Bahwa benar perubahan Sektor pada tanggal 26 September 1965 diputuskan oleh Pak Saleh didasarkan peta yang ditunjukkan kepada para Komandan Sektor, sambil menerangkan bahwa disektor-sektor dapat dibentuk Sub Sektor-Sub Sektor sesuai dengan kebutuhan Sektor.
4. Bahwa benar olehnya Sektor VI dibagi dalam Sub Sektor-Sub Sektor sebagai berikut :
 1. Kebajoran Baru dipimpin oleh H.S. SUWANDI;
 2. Rawa Mangun Barat — dipimpin oleh KANSASI;
 3. Gandaria - Ilir — dipimpin oleh MARTONO;
 4. Simpruk — Grogol Udik — dipimpin oleh IMAM SUPANGAT;
 5. Kebajoran Lama — dipimpin oleh SUPARDJO;
 6. Mampang Prapatan — dipimpin oleh TOHARI/SINGO dan
 7. Pasar Minggu — dipimpin oleh WARDOJO.
5. Bahwa benar semua anggota Sektornya terdiri dari anggota-anggota CS PKI dan Pemuda Rakjat yang sudah dilatih sebagai Sukarelawan di Lubang Buaja.
6. Bahwa benar CS merupakan pimpinan politik diwilajahnya yang berhubungan langsung dengan Pos Komando yang terdiri dari anggota-anggota CDR.
7. Bahwa benar hubungan sektor dengan CDR melalui dua badan, yaitu :
 1. Setjara politis Sektor didampingi oleh Pos Komando yang dipimpin oleh anggota-anggota CDR yaitu WARDOJO, WIRATMONO dan SALAM.
 2. Setjara taktis dipimpin langsung oleh Komando DJAJA yang terdiri dari orang-orang pilihan CDR, yaitu SOEKATNO, KASIMAN, dan NICO.
8. Bahwa benar hubungan sektor dengan Lubang Buaja lewat (atas perintah) Komando Djaja.
9. Tugas pokok Sektor ialah :
 1. Mengkoordinir Sukarelawan, Sukarelawan yang telah dilatih di Lubang Buaja.
 2. Menggrupkan mereka menjadi Kesatuan Tjepat dan Kesatuan Wilajah;
 3. Mengadakan latihan berkumpul tjepat.
10. Bahwa benar IA pernah dilatih di Lubang Buaja dari tanggal 2 s/d 7 September 1965.
11. Bahwa benar latihan Sukarelawan tersebut ditujukan untuk mempertinggi kewaspadaan terhadap Nekolim Malaysia, tetapi kemudian

ternyata, bahwa latihan itu merupakan latihan untuk gerakan 30 September, karena latihan yang diikuti oleh 26 orang itu terdiri dari anggota-anggota PKI dan Pemuda Rakjat yang tergabung dalam CS. CS itu diikuti juga oleh anggota-anggota CDR yaitu : KASIMAN, DJOHAR dan NICO.

12. Bahwa benar pada tanggal 28 September 1965 grup kesatuan tjepat dikumpulkan di Lubang Buaja dari Daerah-Daerah dan diberi latihan ulangan.
13. Bahwa benar didalam briefing dari Pak SALEH kepada Komandan Sektor diberikan Hari H dan Djam D yaitu hari Djum'at tanggal 1 Oktober 1965 jam 04.00 pagi.
14. Bahwa benar setelah briefing selesai para sukarelawan sebagian harus tinggal di Lubang Buaja dan sebagian pulang ke sektor masing-masing.
15. Bahwa benar pada tanggal 29 September 1965 IA menerima uang dari Pak SALEH sebesar Rp. 140.000 untuk keperluan dapur umum disektornya.
16. Bahwa benar sekira jam 23.00 tanggal 30 September 1965 Wakilnya telah menerima 170 pasang pakaian seragam dari Lubang Buaja.
17. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 06.30 Pos Senajan menerima dropping 3 putjuk sendjata api beserta 2 peti peluru kemudian pada jam 20.00 dapat dropping lagi 7 sendjata api dan pada hari itu juga di rumah SUPANGAT telah didrop 3 putjuk sendjata.
18. Bahwa benar pada jam 22.00 pada hari itu juga datanglah WIRATMONO yang memberitahukan bahwa situasi telah berubah dan IA tak dibenarkan tidur di rumah.
19. Bahwa benar setelah selama kurang lebih 20 hari berpindah-pindah tempat tersembunyi akhirnya IA ditangkap oleh tentara pada tanggal 20 Oktober 1965.

SAKSI SOETARNO bin DJOGOSOEDARJO dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar ia menjadi anggota Pemuda Rakjat Duku atas, dan ditunjuk oleh Gerakan 30 September bagi Komandan Pasukan Sukarelawan Sektor I.
2. Bahwa benar Ia pada tanggal 21 s/d 25 September 1965 mengikuti latihan kemiliteran di Lubang Buaja.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 September 1965 mulai jam 24.00 IA dengan pasukannya berkumpul di rumah BASUKI di Petamburan atas perintah dari Komandan Sektornya, dan pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 05.00 diadakan pembagian pakaian seragam hidjan.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 17.00 tiba sendjata

dari Lubang Buaja sebanjak 30 putjuk dengan pelurunya jang kemu-
dian dibagikan kepada anggota pasukannya.

5. Bahwa benar pada djam 20.00 IA berangkat untuk menempatkan pasukan pendjagaan diobjek-objek vital jaitu kantor Telegraf di Djalan Thamrin, Perusahaan Listrik Negara Karet dan Kantor Pengurus Besar Front Nasional di Djalan Merdeka Selatan.
6. Bahwa benar setelah menetapkan pasukan pendjagaan di P.L.N. Karet dan Kantor Telegraf Djl. Thamrin maka setelah IA dan anak buahnya tiba di P.B. Front Nasional IA dan anak buahnya dilutjuti sendjatanja dan ditahan.

Berdasarkan keterangan-keterangan dan pengakuan, pengakuan ter-
dakwa jang diberatkan oleh keterangan-keterangan para saksi dibawah
sumpah dan djuga diberatkan oleh barang-barang bukti jang telah di-
ajukan didepan Sidang maka menurut hukum tuduhan ketiga ini telah
terbukti dengan sjah.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH.

Perkenankanlah kami memberi sekedar ulasan tentang tuduhan
ketiga ini sebagai berikut :

Perbuatan, memimpin dan mengatur pemberontakan dengan
mengangkat sendjata terhadap kekuasaan jang sudah berdiri di Indone-
sia telah ternjata dan terbukti dari kegiatan kegiatan terdakwa dalam
kedudukannya sebagai anggota Politbiro CC PKI dan Sekretaris Pertama
CDR jaitu : sedjak permulaan September 1965 dengan mengirimitkan
tenaga-tenaga tjadangan jang diambil dari Ormas-ormasnya untuk la-
tihan militer di Lubang Buaja, menjetudjui pembagian sektor-sektor
dalam daerah Djakarta Raya dan menundjuk Komandan-Komandannya,
pembentukan pos-pos aksi pada tingkat CS-CS P.K.I. jang terdiri dari
Pos Komando, Pos Koordinasi dan Pos Lapangan untuk mendampingi
sektor. Terdakwa telah memberikan instruksi-instruksi dan melakukan
kontrol-kontrol tentang kesiap-siagaan dan dropping sendjata api
pakaian seragam, pita-pita tanda pengenalan, beras dan lain-lainnya.

Sampai akhir September 1965 terdakwa telah berhasil membentuk
kurang lebih 2500 (duaribu limaratus) orang tenaga tjadangan dan pada
tanggal 1 Oktober 1965 djam 19.00 sedjumlah tenaga-tenaga tjadangan
dengan bersendjata dari sektor I Gambir telah menduduki kantor P.T.T.
Djalan Thamrin, Instalasi P.L.N. Karet dan ketika tenaga-tenaga tj-
adangan bersendjata tersebut berusaha menduduki kantor P.B. Front Na-
sional telah ditangkap oleh Pasukan R.P.K.A.D. Kedjadian tersebut telah
dilaporkan oleh Komandan Sektor I Gambir Achmad Muchammad kepada
terdakwa. Dalam operasi militer sebagai keseluruhan terdakwa mem-
punjai bagiannya sendiri jaitu dibidang tempur/teritorial, terhadap ba-
gian mana IA bertindak sebagai pemimpin dan pengatur sebagaimana
diuraikan diatas



foto KEMPEN.

Oditur sedang membatjakan requisitoirnya.

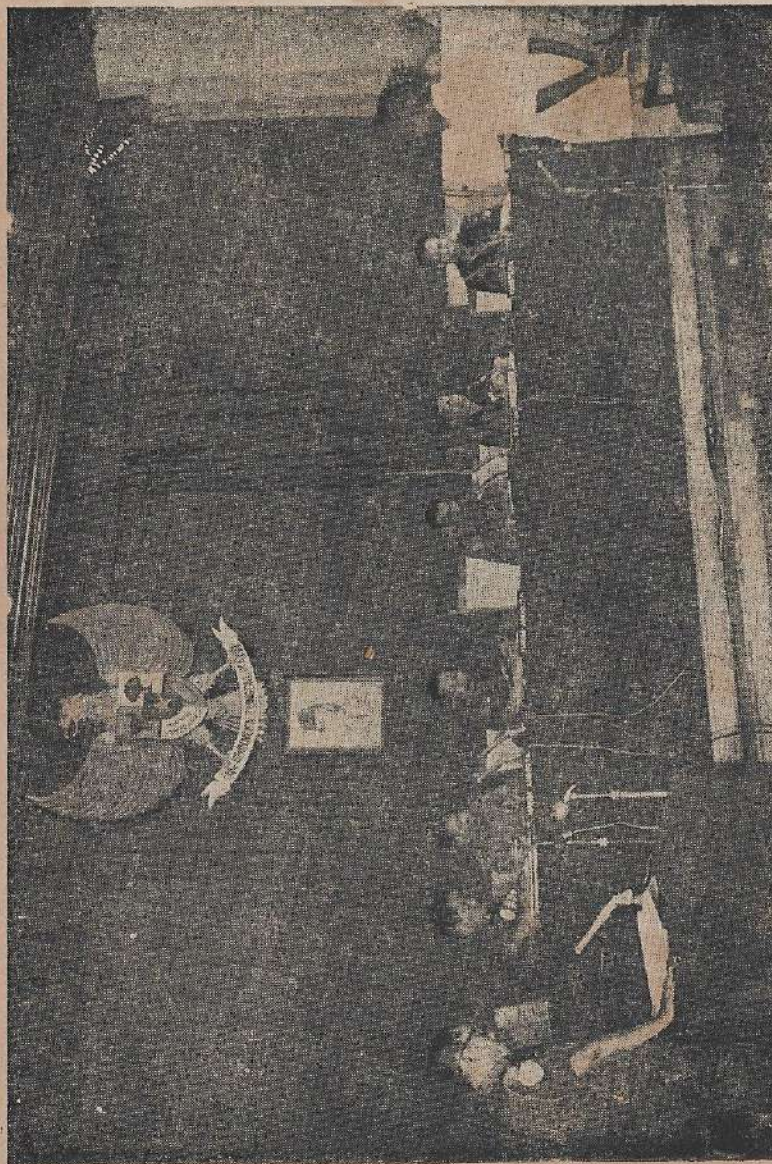


foto KEMPEN.

Terdakwa Njono sedang mendengarkan requistoir dari Oditur.

Pangkal tolak kami adalah bahwa pengiriman tenaga-tenaga yang dilatih di Lubang Buaja bukan disebabkan karena adanya permintaan dari Lubang Buaja, tetapi justru sebaliknya langsung diatur oleh OR-MAS-ORMAS itu sendiri yang dikoordinir oleh KASTMAN, DJOHAR dan NICO, ketiga-tiganya dari CDR.

Hal ini dikuatkan oleh keterangan bekas Major Udara SUJONO alias Pak DJOJO bahwa pengiriman tenaga-tenaga itu bukan atas permintaannya, tetapi ia dihadapkan dengan suatu kenyataan keadaan (fait a compli) yaitu datangnya beratus-ratus orang pada tanggal 28 September 1965, sehingga sulit baginya untuk menolaknya, ditambah bahwa orang-orang tersebut sudah membawa perbekalan masing-masing untuk waktu selama latihan di Lubang Buaja.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH.

Demikianlah tuduhan ketiga dimana perbuatan-perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh tindak pidana yang bersangkutan dan pensaratan pembuktian perbuatan terdakwa yang menguatkan tuduhan ketiga tersebut menjadi terbukti dengan meyakinkan.

Sekarang kami lanjutkan dengan pembuktian terhadap :

2. TUDUHAN KEDUA :

Tuduhan kedua ini berkisar kepada memimpin dan mengatur untuk melakukan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan Pemerintah R.I yang sah, terhadap tuduhan mana terdakwa telah memberikan keterangan-keterangan dan pengakuan-pengakuannya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar pada permulaan September 1965 terdakwa telah mengirimkan tenaga tjadangan yang terdiri dari anggauta-anggauta P.K.I., Pemuda Rakjat, SOBSI, GERWANI, B.T.I. ke Lubang Buaja untuk latihan-latihan kemiliteran ;
2. Bahwa benar pengiriman tenaga tjadangan untuk latihan kemiliteran di Lubang Buaja dan pembentukan Sektor-Sektor adalah untuk bantuan operasi militer Gerakan 30 September ;
3. Bahwa benar pada pertengahan September 1965 telah disusun Sektor-sektor dan terdakwa menundjuk Komandan-Komandan Sektor-nja ;
4. Bahwa benar terdakwa telah membentuk Pos-Pos aksi pada tingkat C.S. - C.S. yang terdiri dari Pos-Pos Komando, Pos-Pos Koordinasi dan Pos-Pos lapangan yang langsung berada dibawah komandonya yang dipimpinnya dari pos kerdjanya ;
5. Bahwa benar terdakwa telah membentuk PHB yang dikepalai oleh BATHORO ;

6. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 29 September 1965 telah mengetahui tentang hari H dan jam D dan tentang dropping senjata api, pakaian seragam, pita-pita tanda pengenal dari Lubang Buaya untuk sektor-sektor;
7. Bahwa benar terdakwa telah menginstruksikan kepada CS-CS untuk bersiap-siap menerima dropping barang-barang tersebut diatas;
8. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 telah melakukan kontrol sampai jauh malam terhadap pos-Komando dan Sektor Salemba tentang kesiap siagaan dan dropping senjata api dan barang-barang lainnya;
9. Bahwa benar terdakwa telah mendapat laporan tentang situasi dan tentang tentara yang berpita putih dan membuat analisa-analisa tentang laporan-laporan tersebut;
10. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 1 Oktober jam 19.00 atau 20.00 malam telah menerima laporan dari ACHMAD MUCHAMMAD Komandan Sektor I Gambir tentang tertangkapnya pasukan-pasukan tenaga tjadangan bersenjata dari Sektornya yang berusaha menduduki kantor Pengurus Besar Front Nasional, kantor Telepon Otomatis Jalan Merdeka Selatan;

SAKSI SARTAMAN bin MASDJAN : dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar IA mendjabat sebagai Sekretaris CS PKI Mangga Dua,
2. Bahwa benar pada minggu pertama bulan September 1965 S. SUKADI wakil dari NJONO datang di CS PKI Mangga Dua dan memberikan briefing tentang pentingnya tenaga-tenaga sukarelawan yang dilatih di Lubang Buaya dan mengandjurkan kepada CS-CS dilingkungan CDR untuk mengirimkan anggota-anggota atau tjalon-tjalon anggotanya ke Lubang Buaya untuk dilatih kemiliteran sebagai Sukarelawan Dwikora.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 September 1965 IA melaporkan kepada NJONO bahwa tjalon-tjalon Sukarelawan telah dikirim untuk latihan di Lubang Buaya.
4. Bahwa benar selama ini telah dikirim tiga angkatan sukarelawan sejumlah 100 orang yang terdiri dari anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya ke latihan di Lubang Buaya.
5. Bahwa benar terdakwa telah memberi instruksi kepadanya untuk menjaga kantor-kantor partai, pertjetakan-pertjetakan. Surat Kabar Harian Rakjat, Warta Bhakti serta Pertjetakan Persatuan, dengan tujuan untuk menjaga keamanan.
6. Bahwa benar IA mengetahui tentang pengangkatan Suparno sebagai Sektor V.

7. Bahwa benar ada instruksi dari NJONO lewat wakilnya S. SUKADI kepada semua sadja, agar pada tanggal 1 Oktober 1965 semua anggota PKI mendengarkan siaran Radio sedangkan S. SUKADI menambahkan bahwa akan ada peristiwa mendadak.
8. Bahwa benar ketika IA mendengarkan siaran radio tentang pengu- muman Dewan Revolusi tjiptaan ex Letnan Kolonel Untung. Ia baru dapat menerka bahwa peristiwa inilah yang dimaksud S. SUKADI dengan peristiwa mendadak itu.
9. Bahwa benar IA pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 10.00 melaporkan kepada Komandan Sektor SUPARNO bahwa telah dilakukan pemutusan Kantor Telepon Kota ;
10. Bahwa benar pada tanggal 30 September 1965 kira-kira jam 18.00 IA mendapat instruksi dari S. SUKADI, supaya malam 30 September 1965 anggota CS-nja stand-by karena akan menerima dropping senjata api ;
11. Bahwa benar yang diterima hanya dua karung beras dan tanda-tanda kain pengenal berwarna hijau, merah, dan kuning sedangkan dropping senjata tidak ada.

Keterangan-keterangan dari Saksi-saksi Achmad Muchammad bin Jacob, PRAJITNO bin KARNEN dan SUTARNO bin DJOGOSUDARJO dalam hal ini sesuai dengan yang telah ditjantumkan dalam rangka pembuktian tuduhan ketiga.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGOTA JTH.

Perbuatan-perbuatan memimpin dan mengatur dari terdakwa adalah sama dengan perbuatan-perbuatan memimpin dan mengatur sebagaimana diuraikan dalam ulasan dari tuduhan ketiga. Mulai dari permulaan September 1965 yaitu dengan pengiriman tenaga tjadangan untuk latihan militer di Lubang Buaya, menjetudui pembagian daerah Djakarta Raya dalam Sektor-Sektor dan menunjuk „KOMANDAN-KOMANDAN-nja membentuk PHB CDR yang dikepalai oleh BATHORO, membentuk pos-pos aksi yang terdiri dari Pos-Pos Komando, Pos-Pos Koordinasi dan Pos-Pos Lapangan pada tingkat CS-CS PKI, melakukan cheking tentang kesiap-siagaan dan dropping senjata api dan barang-barang lainnya sampai 1 Oktober 1965 dengan pemutusan kabel telepon dan menduduki objek-objek vital (Djawatan-Djawatan Resmi Pemerintah seperti Kantor P.T.T. Djl. Thamrin, Instalasi P.L.N. Karet dan Kantor Besar Pengurus Besar Front Nasional adalah serangkaian perbuatan (een Complex van handelingen) yang merupakan permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar dengan niat menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah.

Demikianlah TUDUHAN KEDUA dimana perbuatan-perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh tindak pidana yang bersangkutan dan pensjaratan pembuktian perbuatan terdakwa yang

menguatkan tuduhan kedua tersebut menjadi terbukti dengan meyakinkan. Sekarang kami melanjutkan dengan pembuktian terhadap :

3. TUDUHAN PERTAMA.

Tuduhan pertama ini berkisar kepada permufakatan djaat atau komplotan (samenspanning) untuk melakukan makar dengan niat/ maksud menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dan melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata melawan kekuasaan Pemerintah yang sudah berdiri di Indonesia; terhadap tuduhan mana terdakwa telah memberikan sangkalan-sangkalan dan pengakuan pengakuan yang dalam kenjataan saling bertentangan satu sama lain sebagai berikut :

1. Mungkinkah ada asap tanpa api, mungkinkah ada perbuatan-perbuatan pelaksanaan seperti yang telah dibuktikan dalam tuduhan ketiga dan kedua tanpa perbuatan-perbuatan perentjanaan dan persiapan seperti yang kami kemukakan dalam tuduhan pertama ini. Tetapi kami yakin bahwa perbuatan itu pasti ada, karena PKI yang terkenal sebagai suatu Organisasi yang militant, yang selalu bekerja dengan rentjana dengan plan seperti yang akhir-akhir ini plan 4 tahun dan sebagainya, memperkuat kejakinan kami bahwa terang dan pasti perbuatan-perbuatan pelaksanaan tersebut didahului oleh persiapan-persiapan yang berupa perentjanaan dan permufakatan.
2. Diakui oleh terdakwa bahwa memang telah diadakan serangkaian rapat penting Politbiro yang selalu mengambil tempat di Kantor CC PKI Djalan Kramat 81 Djakarta dalam bulan Agustus 1965, penting karena berhubungan dengan materi yang dibicarakan, yang dihadiri oleh lebih dari 2 orang antara lain: Terdakwa sendiri, D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, Sudisman, Ir. Sakirman, Anwar Sanusi, Rewang, Peris Pardede dan Suwandi. Materi yang dibicarakan adalah situasi politik yang memuat 3 (tiga) materi yaitu: Sakitnya P.J.M. Presiden yang serius, adanya rentjana kudeta Dewan Djenderal dan adanya inisiatif segolongan Perwira yang hendak mendahului Kudeta Dewan Djenderal. Yang merupakan pokok adalah materi inisiatif segolongan Perwira yang akan mendahului Kudeta Dewan Djenderal, yang menimbulkan persoalan pokok bagaimana tjaranja untuk menjegah Kup Dewan Djenderal. Djuga untuk itu digariskan dua tjaraja atau taktik, yaitu :
 1. Bertindak mendahului dari pada rentjana Coup Dewan Djenderal, kemudian lapor P.J.M. Presiden.
 2. Persoalan tersebut tidak mengenai segi Militer saja, djuga mengenai segi politik, dan segi politik inilah yang lebih penting maka tjaranja lapor kepada P.J.M. Presiden dan menunggu Keputusan P.J.M. Presiden.

Dalam rapat-rapat tersebut didiskusikan djuga kemungkinan-kemungkinan dalam perspektif politik yaitu tentang kabinet Dewan Djenderal, Dewan Revolusi dan Kabinet NASAKOM.

Tentang Kabinet Dewan Djenderal P.K.I. pasti menentangnja, sedangkan tentang Kabinet Nasakom belum waktunya untuk diper-timbangkan dan bila Dewan Revolusi sampai terbentuk maka Dewan Revolusi akan lebih baik dari Kabinet Nasakom yang masih mengandung unsur-unsur Dewan Djenderal djuga dibicarakan tentang imbahangan kekuatan militer yang gunstig.

Pada tanggal 28 Agustus rapat Politbiro mentjapai climax-nya dengan diambilnja keputusan, yang berlainan dengan keterangan terdakwa yang semula, yaitu 1. Melaporkan kepada P.J.M. PRESIDEN tentang bahaya Kudeta Dewan Djenderal. 2. Mengharapkan langkah-langkah penjegahan. 3. Menginformasikan tentang bahaya Dewan Djenderal Kedalam Partai.

Bila dilihat dari materi yang dibicarakan dalam Politbiro terutama tentang kemungkinan dan perspektif politik dan tentang imbahangan kekuatan Militer yang gunstig dihubungkan dengan „Gerakan 30 September“ yang sudah menjadi pengetahuan umum, kami diidjinkan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa kepada Oditur dalam Berita Atjara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya, yaitu bahwa pada tanggal 28 Agustus 1965 telah tertjapai kesepakatan dan kebulatan dalam Politbiro membenarkan tindakan untuk mendahului rentjana kudeta Dewan Djenderal dalam bentuk operasi militer untuk membentuk Dewan Revolusi, tetapi dengan dalih politik telah ditarik kembali oleh terdakwa dalam sidang Mahkamah yang terformat ini.

3. Terdakwa mengakui bahwa memang benar ada persamaan politik antara dengan Dewan Revolusi yang sama-sama anti Dewan Djenderal tetapi menjangkal bukan Keputusan Politbiro yang membenarkan tindakan mendahului rentjana Dewan Djenderal dan disamping itu terdakwa djuga mengakui bahwa HARIAN RAKJAT adalah orgaan CC PKI yang membawa suara resmi dari partainya dan terdakwa tidak dapat mentjari dalih-dalih politik untuk memungkiri fakta-fakta yang dimuat dalam editorialnya tanggalnya 2 Oktober, bahwa Gerakan 30 September adalah tindakan yang patriotik dan revolusioner djadi memang benar ada persamaan dalam politik dan kami tambah dijakinkan lagi bahwa djuga dalam tindakannya ada persamaannya, karena HARIAN RAKJAT suara Partai mejakini benarnya tindakan yang dilakukan oleh G. 30. S. untuk menjelamatkan Revolusi dan Rakjat demikian ditulis dalam editorialnya.
4. Terdakwa mengakui bahwa ia telah membentuk tenaga-tenaga tjadangan sebanyak 2000 orang tetapi ia mengingkari bahwa pembentukan tenaga tjadangan adalah tugas yang khusus dipikulkan

oleh Politbiro kepadanya sebagaimana diterangkannya dalam Berita Atjara Pemeriksaan dia mengatakan bahwa pengiriman tenaga (Pak Djojo) dengan perantaraan Sukatno Ketua Dewan Nasional Pemuda Rakjat.

Dalam persaksiannya didepan Sidang Mahkamah ini Pak Djojo menerangkan, bahwa ormas-ormas itulah yang datang sendiri minta dilatih ke Lubang Buaja dengan membawa perbekalannya sendiri dan dikoordinir oleh 3 (tiga) orang yang dikenal oleh Pak Djojo yaitu Nico, Kasiman dan Djohar yang sebenarnya adalah anggota Staf CDR. Lagi kami dapat dijamin, bahwa usaha-usaha terdakwa untuk mengambil tanggung-djawab dalam tugasnya sendiri kentara untuk dapat berhasil.

5. Tidak lengkap bila disini tidak disebutkan pengakuan terdakwa tentang „cel sistem” dan „GTM” yang sudah pasti dibuat satu dasar itikat-djahat, kalau merupakan tjara-tjara yang terselimut dan untuk tudjuan-tudjuan yang terselimut pula. Hukum sendiri sering tidak berdjaja terhadap sistem yang rendah dan lihay ini.

Apakah perlu untuk mengembangkan sistem tersebut ditamah air kita sendiri ditengah-tengah bangsa sendiri kami serahkan djawabannya kepada terdakwa, yang pernah me-GTM-kan dirinya sebagai SUGIJONO tukang pendjual makanan, burung, tetapi hanya dapat bertahan selama 1½ bulan dan kebenaran telah mengalahkannya.

6. Dalam surat bukti — petundjuk yang telah diperlihatkan kepada terdakwa dalam sidang, terdakwa mengatakan dalam hubungan pembagian tugas anggota Politbiro antara lain : Prosedur pelaksanaan : 1. soal-soal militer oleh Bung AIDIT, 2. soal-soal daerah oleh Dewan Harian Politbiro Bung AIDIT, LUKMAN, NJOTO, 3. Saja sendiri yang tugas pokoknya sebagai pimpinan CDR harus menjiapkan : a. tenaga tjadangan dari Pemuda Rakjat yang akan dilatih di Lubang Buaja, b. membentuk sektor-sektor yang mengorganisasi tenaga-tenaga tjadangan tersebut

1. Saksi PERIS PARDEDE dibawah sumpah menerangkan :

- 1.1. Bahwa benar ia mengenal NJONO sedjak tahun 1947 di Jogjakarta, ketika NJONO menjadi salah seorang anggota pimpinan SOBSI, mengenal setjara dekat, baru waktu sama-sama duduk di D.P.R. Pusat (hasil pemilihan umum) dan di D.P.R.G.R., sedang mengenal setjara langsung adalah ketika sama-sama menjadi anggota C.C. P.K.I. dan sewaktu ia menjabat anggota Sekretariat C.C. P.K.I.

- 1.2. Bahwa benar kira-kira sesudah hari Proklamasi 17 Agustus 1965 (tanggalnya yang tepat tidak teringat lagi oleh saksi) diadakan Rapat Politbiro C.C. P.K.I. yang diperluas, bertempat di kantor C.C. P.K.I. Kramat 81 Djakarta yang berlangsung dari djam 13.00 siang sampai djam 19.00 malam, yang dihadiri oleh :

1. Terdakwa, 2. D.N. Aidit, 3. M.H. Lukman, 4. Njoto, 5. Sudisman, 6. Ir. Sakirman, 7. Rewang, 8. Anwar Sanusi, 9. Suwandi, 10. Saksi sendiri Peris Pardede.

- 1.3. Bahwa benar dalam Rapat tersebut D.N. Aidit mengemukakan beberapa persoalan pokok yaitu :

- 1.3.1. Bahwa benar kawan Aidit mendjelaskan tentang seriousness sakit Presiden. Menurut ahli, sakitnya kalau terdjadi hanya 2 alternatif: lumpuh atau meninggal dunia.

Djuga didjelaskan, beliau menganggap sakitnya serious memang menurut ahli dokter, kalau Presiden memenuhi advice dokter, bisa sembuh. Tetapi karena banyak pembatasan dari dokter, maka agak kuatir djuga, karena kesibukan-kesibukan yang harus dilakukan Presiden; djuga karena Presiden terlalu mentjampuri soal-soal technis.

Katanja, kalau dilihat sebagai manusia biasa, pekerdjaan yang begitu banyak, maka akan berat. Djuga mengenai keluarga beliau di Djakarta semua digambarkan disitu.

- 1.3.2. Bahwa menurut kawan Aidit, bukan hanya mereka yang membitjarakan, pimpinan A.D. djuga membitjarakan menurut info yang diterima sudah dibentuk adanya Dewan Djendral. Menurut info. Dewan Djendral ini akan mengadakan coup dan akan membasmi Komunis kalau Presiden sudah meninggal dunia. Mengenai ini diterangkan dengan pandjang.

- 1.3.3. Bahwa menurut info yang diterima Dewan Harian Politbiro CC. PKI, maka sekarang sudah terbentuk Dewan Djendral yang beranggotakan 10 orang dan dipimpin oleh Djendral A.H. Nasution dan Djendral Yani ;

- 1.3.4. Bahwa kemudian D.N. Aidit mendjelaskan, bahwa ada Perwira yang berfikiran maju ada yang tidak setuju adanya Dewan Djendral. Istilah yang dipakai adalah Perwira yang berfikiran maju, yang tidak suka sama Dewan Djendral.

- 1.3.5. Bahwa ternyata ada Perwira-perwira dikalangan Angkatan Darat yang berfikiran maju yang tidak suka kepada Dewan Djendral dan menjatakan keinginannya untuk mendahului Dewan Djendral dan mereka mengharapkan persetujuan dari P.K.I.

- 1.3.6. Bahwa D.N. Aidit menajukan kepada Sidang, apakah Sidang setuju apabila Perwira-perwira yang berfikiran maju itu mendahului Dewan Djendral.

- 1.4. Bahwa benar sidang menjanggupi pertanyaan D.N. Aidit dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan s.b.b. yaitu :

adanya apa yang dinamakan „Pasukan Kutjing Hitam” di singkat P.K.I. „Gerakan Dasj Hidjau” yang diduga dari bekas G.P.I.I. dan lain-lainnya pun terdakwa mengakui bahwa dengan ditjetuskan „Gerakan 30 September” dapat diduga bahwa, kekuatan nasional yang seharusnya ditudjukan langsung untuk pengganjangan Nekolim banjak teralih dan terlibat dalam peristiwa tersebut, sehingga kontradiksi intern dalam Negeri sementara lebih menonjol daripada kontradiksi extern (yaitu antara rakjat langsung dengan Nekolim), hal mana jika tidak ada penyelesaian yang tepat, akan memperlemah pengganjangan Nekolim.

Kami mengetahui bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan triprogram Pemerintah mengalami perubahan-perubahan yaitu triprogram gaja baru, melandjutkan pembangunan dibidang sandang pangan, melandjutkan usaha-usaha pemulihan keamanan, dan terus mengganjang „Malaysia”.

Perubahan program tersebut kiranya tidak akan membawa perubahan hakekat daripada Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959, karena tidak terdapat perubahan setjara prinsipil, nadanya masih sama.

Untuk kelengkapan pembuktian dalam proses perkara ini, telah dibuatkan pula pokok-pokok isi daripada pernyataan-pernyataan tertulis atas sumpah jabatan dari Brig. Djen. T.N.I. AMIR MACHMUD, Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah Djakarta Raya dan sekitarnya dan Major Djendral TNI Dr. SOEMARNO SOSROATMODJO Menteri/Kepala Daerah Ibukota Khusus Djakarta Raya, yang berisikan pengutaraan korban-korban, kerugian-kerugian, keganasan-keganasan dan kekatjauan-kekatjauan, pentjukan-pentjukan yang dilakukan dan yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan dari Gerakan 30 September. Pernyataan-pernyataan tersebut menambah kejakinan kami, bahwa memang benar-benar perbuatan-perbuatan terdakwa mengakibatkan hal-hal yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 tersebut.

Sebelum kami meningkat pada ukuran hukuman ataupun hukuman yang setimpal dan wajar diberikan kepada terdakwa, perkenankanlah kami mengutarakan masalah yang meliputi perbuatan-perbuatan dan diri pribadi terdakwa.

Masalah-masalah yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
2. Terdakwa adalah anggota DPRGR, MPRS, Produksi Nasional dan Pengurus Besar Front Nasional, maka termasuk seorang yang berjasa terhadap Bangsa dan Negara.

Masalah-masalah yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam sidang-sidang Mahkamah ini selalu memberikan keterangan-keterangan dengan berbelit-belit yang sungguh-sungguh menjulitkan pemeriksaan di sidang.



foto KEMPEN.

Oditur menjerahkan requisitoirnya kepada Hakim Ketua

P E M B E L A A N

BAPAK-BAPAK KETUA DAN PARA HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH INI, BAPAK ODITUR.

Sebelum memulai pleidooi saja, saya ingin mengutarakan rasa penghargaan saya yang setinggi-tingginya untuk kesabaran dan tjara yang tidak memihak (onpartijdig) dari Bapak Ketua dalam mengadakan pemeriksaan pada tertuduh dan para saksi.

Pantas juga saya utjapkan terima kasih saya kepada Bapak Oditur yang dalam batas waktu yang ada masih memungkinkan saya untuk melihat dokumen-dokumen dan berbitjara dengan klien saja. Terima kasih khusus ingin saya sampaikan kepada kedua pembantu dari team pembela, Maj. Soewarno S.H. dan Maj. Zainuddin Junus Bc. Hk., atas segala usaha mereka untuk meringankan tugas saja.

Achirnja saya tidak lupa menjatakan rasa terima kasih saya untuk bantuan moril J.M. Menko, Kompartimen Dalam Negeri dan Kehakiman, Bapak Wirjono Prodjodikoro, khusus atas pendjelasan beliau kepada chalajak ramai mengenai tugas pembela yang tidak lain dan tidak kurang daripada ikut menggali kebenaran.

Bapak Ketua, walaupun saya pagi ini djam 7 dengan rasa lega dapat menyelesaikan naskah pembelaan ini, namun saya tahu, bahwa apa yang saya kerdjakan disini djauh dari sempurna berhubung dengan singkatnja waktu.

Maka karena itu saya tetap berpendapat, bahwa sejogjanja kita harus setjepat mungkin menuju kesuatu masa, dimana pengadilan kita yang biasa diperlengkapi sedemikian rupa, sehingga mampu untuk menghadapi semua perkara pidana yang harus diadili di Indonesia, sesuai dengan pasal 4 dari Undang-undang no. 19 th. 1964 tentang „Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman“, dimana disebut bahwa : „Tiada seorang djuapun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginja oleh Undang-undang“.

Hukum, Bapak Ketua, adalah suatu tanaman yang paling subur bertumbuh dalam suasana yang sederhana, yang biasa sadja, demikian pula keadilan. Keluarbiasaan Mahkamah ini, bagaimanapun atjaranja ditertibkan dan dikendalikan dengan baik namun mempunyai disadvantages yang besar — dalam hal ini saya tetap berselisihan faham dengan Bapak Ketua — dan hal ini kiranya terbukti dengan njata pada hari kemarin, sewaktu Bapak Oditur terpaksa harus minta waktu lagi karena, sungguhpun telah bekerdja siang-malam, tidak dapat menyelesaikan dalam djangka waktu yang telah ditetapkan, requisitoirnja yang penting ini, dalam mana dituntut hukuman mati atas seorang makhluk manusia.

Pengedjaran waktu, yang dengan sendirinja mengandung beberapa rintangan yang lain, seperti sangat terbatasnja kesempatan untuk mendengar saksi-saksi a decharge dan untuk mempeladjar unsur-unsur hukum setjara mendalam, tidak bisa tidak sangat mengurangi nilai pekerdjaan saja. Walaupun saja mengakui, bahwa ketjepatan adalah unsur yang penting dalam mengadili perkara, namun menurut hemat saja, kiranja ketjepatan tidak dapat diutamakan diatas ketelitian dan kematangan fikiran.

Bapak Ketua, tadi telah saya sebut tuntutan yang berat daripada Oditur dalam perkara ini. Dalam uraian saja, saya akan berusaha untuk mengemukakan dan dimana mungkin membuktikan, bahwa tuntutan Bapak Oditur ini tidak boleh kita benarkan, karena tidak mempunyai dasar hukum — baik hukum tertulis maupun Hukum tak tertulis yang tumbuh dalam Revolusi kita —, tidak adil, dan tidak bijak sana dalam rangka perdjongan kita.

Pertama-tama saja harus menjelami lebih mendalam beberapa hal yang menarik perhatian saja dalam requisitoir Bapak Oditur. Ditekan-kan oleh Bapak Oditur, bahwa perkara ini bertjorak politik, perkara politik yang sepenuhnya mendjadi „kompetensi dari Mahkamah ini untuk mengadilinja“.

Wewenang Mahkamah ini tidak pernah saja bantah — yang saja kemukakan tadi ialah, bahwa Pengadilan-Pengadilan luarbiasa, setiap pengadilan luarbiasa, adalah hal yang kurang baik dalam lingkungan Peradilan, karena merupakan petundjuk tentang adanya situasi yang kurang stabil, atau adanya ketidak-mampuan, kekurangan-kekurangan dalam rangka peradilan biasa. Dengan begitu memberi tekanan pada unsur-unsur politis dalam perkara ini, Bapak Oditur sebenarnya „begeeft zich op glad ijs“. Sebab bagaimanapun, peradilan dalam Negara Hukum kita harus bersandar pada Hukum, tidak lain dan tidak kurang daripada itu.

Keluar biasaan Mahkamah ini tidak memberikan wewenang kepadanya untuk menjimpang dari Hukum. Yang harus diadili ialah tindakan kriminal, bukan pendapat-pendapat politik. Yang diadili ialah seorang individu, bukan suatu partai.

Pengertian „collectieve schuld“ adalah pengertian primitip, yang kadang-kadang timbul kembali dalam dunia Hukum Modern, sebagai suatu retrogressi; umpamanja dalam perang dunia ke-II, disana-sini seluruh desa diganjang karena melindungi orang-orang gerilja (umpamanya di-Liditse, Tjekoslowakia) —, kita kenal gejala yang djahat ini dari sedjarah kolonial kita sendiri; dalam peperangan di Vietnam; kadang-kadang pikiran-pikiran yang primitip ini mendjelma dalam bentuk rasialisme; orang Jahudi yang menjebabkan ketidak-bahagiaa rakyat Djerman; orang Tionghoa yang menjebabkan harga mahal Kata-kata dan perkataan-perkataan yang sedjenis ini telah mentjetus-

kan kejadian-kejadian yang membuat kita sebagai manusia bermuka merah padam karena malu dan sedih, kalau kita mengingatnya.

Karena itu kita harus pegang teguh pada pertanggungan jawab perseorangan atas tindakan-tindakannya menurut Hukum yang berlaku, lepas dari penilaian-penilaian politis.

Persoalan ini membawa saja kepada lain hal dalam *requisitoir*, ialah ketjenderungan yang nampak disana-sini, untuk bersandar pada pendapat-pendapat orang banyak, pada „perasaan Rakyat diseluruh pendjuru tanah-air“, pendek kata pada apa yang biasanja disebut „openbare mening“.

Dizaman televisi, radio dan surat-surat kabar yang dibatja oleh banyak orang yang mentjuraikan kepertjajaan penuh kepada segala apa yang ditjetak, — maka dalam zaman sedemikian itu „openbare mening“ adalah pendapat daripada yang menguasai alat-alat publikasi dan komunikasi. Dalam hubungan ini ingin saja mengutjapkan penghargaan saja atas kesopanan — saja tidak mengatakan *onpartijdigheid*, sebab pers terang sudah mendahului keputusan Hakim dalam publikasinya, — djadi atas kesopanan pers kita.

Sebagai akibat baik daripada itu, maka tak ada *tjoret-tjoretan* atau demonstrasi atau lain pertanda daripada yang biasanja disebut „kemarahan Rakyat yang meluap yang tidak bisa dikendalikan“. Dan hal ini sekaligus merupakan bukti, atau sekurang-kurangnya petundjuk, bahwa semangat Rakyat selalu dapat disalurkan dalam saluran-saluran yang konstruktif. Kembali kepada ketjenderungan yang saja lihat dalam *requisitoir* untuk bersandar pada „openbare mening“, saja ingin sekali lagi menekankan, bahwa dalam peradilan tak ada lain sandaran dari pada Hukum dan sekali lagi Hukum.

Memang benar, bahwa diantara alat-alat bukti djuga dapat di kemukakan pengetahuan umum, saja tekankan pengetahuan dan bukan pendapat. Bahwa umpamanya di Indonesia sekarang ini harga barang naik, merupakan pengetahuan umum; bahwa tertuduh, sebagai anggota CC PKI mengikuti konspirasi untuk merongrong dasar Negara, sekarang dapat dikatakan merupakan pendapat umum, yang disini, di muka Mahkamah, harus diselidiki dan dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti yang sjah.

Bapak-bapak Ketua, para Bapak-bapak Hakim dan Bapak Oditur, setelah introduksi ini saja ingin mengemukakan sesuatu mengenai Hukum yang berlaku dalam perkara ini. Pada pokoknya, tuduhan Bapak Oditur berdasarkan pasal-pasal KUHP, ialah pasal 108 ayat 2 jo. ayat 1 dibawah 1 (memimpin dan mengatur pemberontakan); pasal 107 ayat 2 jo. ayat 1 (memimpin dan mengatur makar dengan maksud meruntuhkan pemerintahan) pasal 110 ayat 1 (permufakatan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud dalam pasal 107 dan 108).

Mengenai *delicts omschrijving* dalam KUHP harus saja kemukakan, bahwa pemakaian kata dan istilah dalam Kitab Hukum itu, sangat tidak sistematis; umpamanya kadang-kadang digunakan kata „opzet-

telijk“ (dengan maksud, seperti dalam pasal 107), kadang-kadang *opzet* itu terkandung dalam *delictsoomschrijving* itu sendiri, seperti dalam pasal 108 (melawan dengan sendjata kekuasaan yang telah berdiri). Namun djelaslah, bahwa maksud djahat selalu mesti ada, djuga djikalau perkataan „dengan maksud“ atau „dengan maksud yang djahat“ tidak djpergunakan dalam *delictsoomschrijving*.

Maka untuk dapat dihukum, tertuduh harus bertindak dengan maksud :

- a. melawan kekuasaan yang sjah di Indonesia dengan sendjata;
- b. meruntuhkan Pemerintah, dan maksud djahat itu harus dibuktikan dengan djelas dan meyakinkan.

Bapak Ketua, sebelum saja membitjarakan soal bukti, saja hendak menundjuk pada kesulitan dalam menilai intipokok pasal-pasal tersebut.

Pasal mengenai makar berasal dari Hukum Belanda, satu dunia yang berlainan sekali dengan dunia kita. Perbedaan diantara kedua dunia itu yang penting bagi perkara ini, ialah bahwa dunia Barat sudah selama kira-kira satu abad dalam keadaan stabil, djuga dapat dikatakan „*stilstand*“ — ini tergantung dari alam fikiran orang yang menilainya —, maka kekuasaan Negara dan alat-alatnya pun mempunyai usia yang sudah landjut dan tradisi-tradisi yang lama pula.

Dalam dunia sematjam itu, setiap perobahan yang mendadak kiranya akan dirasakan sebagai „makar untuk menggulingkan atau meruntuhkan pemerintah“.

Sebaliknya dunia kita berada dalam perkembangan revolusioner, alat-alat Negara kita tidak mempunyai stabilitas seperti alat-alat Negara dunia Barat; dalam proses Revolusi kita dalam tahun-tahun yang terachir, kita kembali ke-UUD 1945, merobah sifat DPR mendjadi DPRGR, berulang kali merobah susunan kabinet sampai achirnya mendjadi Kabinet Dwikora, akan tetapi semua perobahan itu diadakan dalam rangka menjelesaikan Revolusi kita dan membawa masyarakat Indonesia kearah Masyarakat Sosialis Adil dan Makmur, dengan senantiasa memegang teguh pada Manipol-Usdek dan dasar filsafat Negara, Pantja Sila.

Maka, yang ingin saja tekankan ialah, bahwa alat-alat dan lembaga-lembaga kita tidak mempunyai kontinuitas seperti alat-alat dan lembaga-lembaga Barat; yang menentukan kontinuitas dalam sistim Negara kita ialah: filsafat negara kita Pantja Sila, dan Garis-garis Besar Haluan Negara kita, jaitu Manipol/Usdek.

Oleh karenanya kata-kata dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak boleh diberi arti yang sempit, pemerintah kita baru dapat dikatakan digulingkan atau diruntuhkan, djikalau dasar-dasar negara dan pemerintahan kita ini dirusak atau diiadakan, atau garis politik-pemerintahan Bung Karno hendak diselewengkan kelain djurusan daripada Haluan Negara yang menudju kemasjarakat Sosialis yang Adil dan Makmur.

Dalam hubungan ini dua hal penting yang harus kita ingat : terutama bahwa kita, di Indonesia, sering-sering suka menggunakan kata-kata asing, sedangkan arti sesungguhnya daripada kata atau istilah itu tidak kita pahami betul-betul ; demikian pula dengan istilah „mendemisionerkan“ kabinet. Satu kabinet demisioner adalah Kabinet dalam proses pemberhentian, akan tetapi belum pergi, belum bubar, masih mengerdjakan pekerdjaan sehari-hari. Pada umumnya sekarang ini istilah „mendemisionerkan“ dianggap sama dengan „menjingkirkan“ dan demikianlah kiranya tafsiran istilah ini dalam requisitoir Bapak Oditur.

Akan tetapi, sesungguhnya, kalau kabinet dinjatakan demisioner, tindakan itu harus diambil oleh pejabat yang berwenang untuk itu, ialah dalam hal ini Bapak Presiden kita sendiri.

Maka sebenarnya Kabinet Dwikora tidak dapat didemisionerkan oleh siapapun selain daripada Bung Karno sendiri, dan tidak mungkin tertuduh Saudara Njono mengambil suatu tindakan untuk mendemisionerkan kabinet.

Bagaimanapun, yang ingin mendemisionerkan Kabinet adalah apa yang dinamakan „Dewan Revolusi“, bukan Saudara Njono, bahkan Saudara Njono sama sekali tidak tertjantum namanya dalam Dewan Revolusi.

Hal kedua yang harus kita ingat ialah, bahwa yang dinamakan „Dewan Revolusi“ sebenarnya tidak pernah djadi. Orang-orang diluar oknum-oknum yang dituduh terlibat Gestok yang namanya disebut sebagai anggota „Dewan Revolusi“, tidak tahu-menahu tentang djabatan baru yang sekonjong-konjong diberikan kepada mereka, malah ada diantara mereka yang pada waktu itu sedang berada diluar negeri dan ada diantara mereka yang djuga menjadi Menteri dalam Kabinet Dwikora.

Karena tindakan-tindakan unsur-unsur Gestok adalah ineffectief, sulit diketahui, apakah, kalau mereka berhasil, benar-benar pemerintah kita akan diruntuhkan.

Jang kita tahu dengan pasti ialah, bahwa dekrit-dekrit yang dikeluarkan pada hari-hari satu dan dua Oktober atas nama Dewan Revolusi yang abortif ini, meneruskan Triprogram Pemerintah Pantja Azimat Revolusi dalam keseluruhannya, politik luarnegeri Indonesia, serta semua Ketetapan-Ketetapan MPRS, termasuk Ketetapan MPRS tentang Presiden Sukarno sebagai Presiden seumur hidup serta sebagai Mandataris MPRS.

Kalaupun seandainya Dewan Revolusi dianggap sudah „verwezenlijkt“, hal itupun tidak dapat dijadikan bukti tentang adanya maksud untuk meruntuhkan atau menggulingkan Pemerintah.

Sebab, menurut pengumuman Bagian Penerangan dari Dewan Revolusi yang disiarkan oleh „Antara“ pada tanggal 1 Oktober 1965, maka :

„untuk sementara waktu mendjelang pemilihan umum MPR (Majelis Permusjawaratan Rakjat) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi

sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia“, serta selanjutnya :

„Lebih djauh diumumkan Dewan Revolusi adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memulihkan Pantja Sila dan Pantja Azimat Revolusi seluruhnya“.

Djadi, apa yang sesungguhnya terdjadi ialah, bahwa Dewan Revolusi untuk sementara waktu mendjelang pemilihan umum MPR, mengambil alih kekuasaan MPR Sementara (suatu lembaga yang tidak dikenal dalam UUD 1945).

Dengan demikian sekaligus menjadi djelas, bahwa tidak tertjantunya nama Presiden dalam Dewan Revolusi-pun tidak dapat dijadikan bukti tentang adanya maksud menggulingkan/meruntuhkan Pemerintah, disamping karena hal-hal tersebut diatas, ialah karena Presiden selaku Kepala Pemerintahan tidak mungkin duduk dalam lembaga yang menjadi sumber kekuasaan tertinggi daripada negara. Oleh karena itu, sekali lagi, sulitlah untuk menjatakan terbukti bahwa unsur-unsur Gestok bermaksud untuk meruntuhkan Pemerintah Indonesia.

Lagi pula motif daripada Gestok dan kemudian Dewan Revolusi, sebagaimana kita dapat menangkapnya dari keterangan-keterangan tertuduh dan saksi-saksi, beserta dari surat-surat bukti yang ada, ialah yang disebut „Dewan Djenderal“ yang menurut pendapat Gestok adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA yang merentjanakan „coup“.

Bapak Ketua, karena „maksud djahat“, opzet, ditentukan oleh apa yang sebenarnya dikehendaki oleh seorang tertuduh, oleh apa yang sebenarnya mendorongnya untuk bertindak, motif itu harus kami bitjarakan.

Dalam hubungan ini, Bapak Ketua, kiranya tidak penting, apakah Dewan Djenderal itu suatu „mythos“, seperti dikatakan oleh Bapak Oditur, ataukah memang ada ataukah pernah ada.

Jang penting ialah, apakah tertuduh Saudara Njono sendiri pertjaja dan dapat dipertjaja sebagai orang yang berfikiran sehat, bahwa Dewan Djenderal dengan segala bahajanya itu adalah suatu kebenaran.

Jang penting ialah apa yang benar menurut pikiran tertuduh. Untuk mendjelaskan maksud saja, satu tjontoh, Bapak Ketua : dari atap dan djendela disebelah rumah saja, banjak keluar asap dan bau kebakaran ; oleh karenanya saja lari ketilpon saja dan menilpon regu pemadam kebakaran yang segera datang. Kalau kemudian ternyata, bahwa saja chilaf, karena asap itu berasal dari sumber yang tidak membahayakan, umpamanya kompor baru yang sedang ditjoba atau lain sebagainya, tindakan saja, yaitu mendatangkan regu pemadam kebakaran sedangkan sama sekali tidak ada kebakaran bukan merupakan tindak pidana, karena tindakan saja itu diambil berdasarkan kejakinan saja tentang adanya kebakaran.

Opzet djahat tidak ada pada saja.

Demikian pula, kalau tertuduh dalam segala tindakannya dalam rangka Gestok ini, dimotivir, didorong, oleh kejakinannya yang tjukup

beralasan, bahwa ia ikut menjelamatkan Negara dengan melawan tindakan djahat, "coup", yang direntjanakan oleh kelompok orang lain, maka opzet, maksud yang djahat, untuk menggulingkan pemerintah, yang sjah, atau untuk melawan kekuasaan yang telah berdiri, pun tidak ada.

Kalau terbukti Dewan Djenderal dan rentjana couponja tidak benar, tertuduh adalah korban penipuan, dan dalam hal ini timbul problem yang tjukup interessant tentang siapa yang mendalangi penipuan itu dengan maksud untuk menghanturkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, hal mana sering ditjanangkan oleh Bapak Presiden kita. (Amanat Presiden Sukarno pada tanggal 27 Oktober 1965 dihadapan Wakil-Wakil Partai Politik, yang berdjulud "Marilah kita bersama-sama menjelamatkan Revolusi kita" — halaman 14).

Djadi : tjukupkah alasan bagi tertuduh Saudara Njono untuk setjara wadjar pertjaja, bahwa dalam membantu Gerakan 30 September, ia membantu menjelamatkan Negara dan Revolusi kita dari antjaman Dewan Djenderal ?

Sumber utama Saudara Njono adalah informasi dari Ketua CC PKI Aidit dalam rapat-rapat Politbiro PKI. Hal ini dibenarkan oleh saksi Sandara Pardede, yang djuga hadir dalam salah satu rapat itu.

Menurut tertuduh dan saksi, Aidit menyebut sumbernja, ialah Kepala Staf Badan Pusat Intelligence, Brig. Djen. Polisi Sutarto. Menurut saksi Saudara Peris Pardede, djuga disebut oleh Aidit adanya barang bukti yang telah diserahkan kepada pedjabat-pedjabat tinggi dan nama pedjabat-pedjabat itu disebut oleh Aidit. Maka keterangan-keterangan Aidit pada rapat-rapat itu agak gedetailleerd.

Informasi ini memperkuat yang disebut oleh saudara Njono dalam keterangannya : "politieke aanwijzingen".

Kiranya dapat ditambah disini kenyataan yang tidak disebut oleh tertuduh, akan tetapi yang pasti ikut memperkuat kejakinannya mengenai adanya Dewan Djenderal, ialah bahwa yang djuga pertjaja tentang adanya Dewan Djenderal, bukan sembarang orang, melainkan beberapa tokoh masyarakat kita yang tjukup berkewibawaan, seperti njata dari keterangan-keterangan saksi Soejono, sehingga akhirnya dianggap perlu membentuk suatu komite terdiri dari Perwira dan pedjabat tinggi untuk meneliti Dewan Djenderal itu, apakah ada atau tidak ada. Kalaupun ternyata dianggap perlu untuk mengadakan pemeriksaan resmi dan bantahan resmi dalam hal ini, maka djelas kiranya, bahwa tertuduh tak dapat disalahkan karena ia pernah pertjaja dan sekarangpun kiranya masih pertjaja, akan kebenaran adanya Dewan Djenderal itu.

Dalam hubungan ini, Bapak Ketua, dikemukakan oleh Bapak Oditur suatu hypothese, ialah bahwa Dewan Djenderal itu adalah isapan djempol dari tokoh-tokoh PKI sendiri.

Tentang hypothese itu dapat dikatakan, bahwa Bapak Oditurpun tidak dapat membuktikan kebenarannya.

Akan tetapi disamping itu, hypothese Bapak Oditur itu menurut hemat saja tidak meyakinkan; sebab, bagaimana mungkin bahwa sedjumlahnya pedjabat-pedjabat tinggi Perwira-Perwira tinggi menerima, dan menelan mentah-mentah, indoktrinasi dari tokoh-tokoh salah satu partai mengenai sesuatu yang terdjadi dalam tubuh Angkatan Bersendjata ?

Dalam hal ini kiranya dapat kita pertjaja pada tjanang Pemimpin Besar Revolusi kita, bahwa yang selalu mentjoba merongrongi persatuan dan kesatuan Rakyat Indonesia adalah Nekolim.

Djuga interessant dalam hubungan ini, ialah pendapat seorang pengarang, luar-negeri, jaitu Donald Hindley dalam bukunya "The Communist Party of Indonesia" 1951-1963, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1964, yang mengemukakan, bahwa suasana sebelum terdjadi Gerakan 30 September adalah sangat subur bagi perkembangan PKI, sehingga tak ada alasan sedikitpun bagi partai itu untuk hendak merobalmja.

Bapak Ketua, masalah-masalah yang saja kemukakan tadi tentang sifatnya pasal-pasal KUHP yang berasal dari Hukum Belanda dan tentang motif daripada Gerakan 30 September itu; kedua-duanya bersifat agak umum.

Sekarang kita harus menindjau peranan tertuduh, tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh tertuduh.

Dan hal ini membawa kita kepada apa yang dikatakan oleh Bapak Oditur : sikap tertuduh yang tidak djudjur dan plintat-plintut.

Apa toh sesungguhnya fakta-faktanya dalam hal ini ?

Betulkah Saudara Njono telah memutar-balikan segala keterangan yang diutjapkannya dalam pemeriksaan pendahuluan ?

Saja berpendapat tidak.

Pada pokoknja, tertuduh telah menegaskan semua keterangannya semula dan membenarkan pula keterangan-keterangan para saksi mengenai tertuduh. Maka kiranya berlebih-lebihan kalau dikatakan oleh Bapak Oditur, bahwa tertuduh menjulitkan perdjalanannya sidang.

Yang sebenarnya terdjadi ialah, bahwa suatu pendapat umum, yang sudah lama setjara luas disebarkan oleh pers kita sehingga sudah menjadi iets vanzelf-sprekends dan yang kiranya djuga telah meresap dalam pendapat dan pikiran para pemeriksa, disangkal kebenarannya oleh tertuduh dimuka sidang ini; atau lebih konkrit, yang disangkal olehnya ialah, bahwa pada rapat Politbiro yang ketiga, yang dihadiri oleh tertuduh, diambil keputusan untuk menjetudjai dan aktif ikut melaksanakan suatu gerakan militer yang ditudjukan kepada Dewan Djenderal.

Keputusan itu menurut Saudara Njono, adalah lain, jaitu dalam garis besarnya "wait and see", akan tetapi tertuduh dibiarkan untuk meningkatkan latihan sukarelawan-sukarelawan hansip di Lobang Buaja. Menurut keterangan saksi Soejono, peningkatan latihan itu terdjadi atas permintaan seorang yang dinamakannya Kapten Soeradi, yang menghubungi ketiga wakil Pemuda Rakyat, utusan Saudara Sukatno, pe-

laksana dari segala hal tentang latihan di Lubang Buaja yang langsung menghubungi Njono.

Keterangan Njono mengenai keputusan Politbiro PKI, dibenarkan oleh saksi Peris Pardede, juga dalam hal ini dengan satu tambahan pada keterangannya dalam pemeriksaan pendahuluan.

Apakah ada hubungan antara tertuduh dan saksi?

Kiranya tidak mungkin, mengingat pendjagaan yang keras dan te-liti. Saksi Peris Pardede meninggalkan kesan yang baik.

Bagaimanapun, satu-satunya orang yang dapat kita dengar ketेरangannya mengenai apa yang terjadi pada rapat ketiga Politbiro, adalah tertuduh, dan keterangannya tentang sidang ini dibenarkan oleh satu orang saksi.

Selama tidak mungkin mengemukakan bukti-bukti yang lain, tidak ada dasar hukum untuk membebaskan kepada Saudara Njono tuduhan pasal 108, conspiratie, permufakatan djaht.

Dalam hubungan ini harus saja singgung motif Saudara Njono untuk dalam pemeriksaan pendahuluan memberikan keterangan yang lain.

Menurut tertuduh, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam suasana yang dinamakannya „komunisto phobie“, dan bahwa ia mengalami tekanan mental; atau lebih konkrit, bahwa ia beranggapan bahwa ia akan tjelaka kalau tidak tunduk pada apa yang dianggap benar oleh pemeriksa. Hal ini tjukup penting untuk diperiksa lebih lanjut, lebih-lebih karena seorang dari saksi-saksi yang didengarkan dalam perkara ini, ialah Achmad Muhamad bin Jacub, telah menjatakan bahwa ia dipukul. Djuga saksi itu menjatakan bahwa kalimat dalam pemeriksaan pendahuluan mengenai kejakinannya bahwa penjelenggara Gerakan 30 September adalah PKI, sebenarnya adalah pendapat pemeriksa, yang ditandatangani oleh saksi untuk menghindarkan diri dari pukulan.

Bapak Ketua, dalam rangka pemeriksaan kilat ini, sulit bagi saja sebagai pembela untuk menghalang-halangi sidang dengan meminta tambahan pada bukti yang sudah ada; mengingat pula, bahwa satu-satunya kali saja meminta mendengarkan seorang saksi a decharge, permohonan saja ini masih harus dipertimbangkan oleh Mahkamah belum dapat dikabulkan. Dan yang dikabulkan ialah hanya mendengarkan satu saksi saja. Maka mengenai suasana yang dapat dikatakan tjukup seram terhadap orang anggauta PKI, Pemuda Rakjat dan lain-lain organisasi yang dianggap tersangkut, saja menundjuk saja pada beberapa tjanang Presiden, yakni Amanat tertanggal 10 Nopember 1965 di Istana Negara, Amanat yang berdjudul "Binalah Kesatuan dan Persatuan Nasional Progresif Revolusioner atas dasar Pantja Azimat Revolusi" tertanggal 23 Oktober 1965 (Penerbitan Khusus Departemen Penerangan R.I. hal. 13), dan pada pidato lain lagi dimana Bapak Presiden antara lain mengutjapkan kata-kata dalam Bahasa Belanda: "Tot Zulk een prijs?".

Bapak Ketua, kami kembali pada peranan konkrit Saudara Njono, yang dibuktikan dengan djelas berdasarkan keterangannya sendiri dan

berdasarkan keterangan 7 orang saksi, ialah rentetan tindakan pelaksanaan yang pada pokoknya ialah mengenai peningkatan kegiatan latihan sukarelawan Hansip di Lubang Buaja dengan maksud untuk bila diperlukan mendukung Perwira-Perwira yang telah merentjanakan gerakannya untuk melawan makar terhadap Pemerintah dan Presiden, dengan membentuk pasukan tjadangan. Menurut saksi Soejono, maka pasukan tjadangan itu terdiri dari Hansip.

Dengan segala hormat yang patut saja berikan kepada Bapak Oditur, harus saja kemukakan bahwa kutipan oleh Bapak Oditur daripada keterangan saksi Soejono, tidak lengkap adanya, dan karena itu memberikan kesan yang tidak benar; yang akhirnya diterangkan oleh saksi itu ialah bahwa kiriman pasukan Hansip itu bukan atas permintaan saksi, melainkan diurus oleh Kapten Suradi, seperti pernah diberitahukan oleh saksi kepada Kapten Suradi itu.

Adapun aneh dan ongeloofwaardig djikalau orang yang akan dilatih begitu saja datang tanpa persiapan di Lubang Buaja; hal ini juga bertentangan dengan keterangan saksi Achmad Mohamad, yang menjatakan, bahwa pada tanggal 29 September oleh saksi Soejono telah diberikan uang kepadanya sebanjak Rp. 200.000,—, untuk membuat dapur umum.

Saksi Achmad telah menerangkan pula, bahwa segala perawatan dan alat-alat sendjata diurus oleh orang militer di Lubang Buaja, hal mana kiranya tidak mungkin kalau tentang pengiriman orang untuk dilatih tidak ada pesan/permintaan dari Lubang Buaja pula.

Tindakan-tindakan yang tadi kami sebut itu, oleh Bapak Oditur diartikan sebagai: memimpin dan mengatur pemberontakan, memimpin dan mengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, beserta permufakatan djaht untuk melakukan makar. Bapak Ketua, Para Hakim yang terhormat,

Menurut hemat saja, maka, unsur-unsur yang semestinya ada, untuk tuduhan pemberontakan, tidak semuanya dipenuhi; maksud djaht untuk melawan kekuasaan Pemerintah Indonesia yang sjah, ternyata tidak ada, sekurang-kurangnya tidak dibuktikan oleh Bapak Oditur.

Dengan demikian tidak mungkin pula, bahwa pemberontakan dianggap dipimpin dan diatur oleh tertuduh; dalam hal ini masih saja kemukakan, bahwa pengiriman/pengurusan pasukan Hansip yang bilamana perlu pada waktunya akan dipergunakan sebagai tjadangan, menurut hemat saja tidak mengandung unsur "memimpin".

Pun untuk mengadakan "makar", diperlukan maksud yang djaht untuk menggulingkan/meruntuhkan Pemerintah yang sjah, dan maksud itu ternyata tidak ada pada tertuduh, — seperti telah diuraikan lebih dahulu — sekurang-kurangnya tidak dibuktikan oleh Bapak Oditur dengan bukti yang njata dan meyakinkan; maka tidak mungkin untuk menuduh terdakwa bahwa dia telah mengadakan permulaan

pelaksanaan untuk melakukan makar dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah, apa lagi memimpin dan mengaturnya; sedangkan unsur "memimpin" seperti telah dibuktikan nyata, tidak terdapat dalam pengiriman/pengurusan pasukan Hansip sebagai tjadangan.

Tuduhan berdasarkan pasal 110 KUHP mengenai permufakatan jahat untuk melakukan makar; yang dikwalifisir sebagai "permufakatan" oleh Bapak Oditur, ialah pembijtaraan anggota-anggota Politbiro dalam tiga rapat, khususnya dalam rapat yang ketiga kira-kira pada 28 Agustus.

Seperti telah kami uraikan, maka kita tidak mungkin dapat mengetahui apa yang terdjadi dan apa yang diputuskan dalam rapat tersebut selain daripada dua orang, ialah tertuduh dan saksi Pardede. Aanwijzingen yang dipergunakan Bapak Oditur sebagai bahan bukti, menurut hemat saja tidak mentjukupi untuk menganggap tertuduh bersalah.

Chususnja djalan fikiran Bapak Oditur yang bersandar pada pepatah: Dimana ada asap pun ada api, tidak meyakinkan dan terlalu remeng-remeng, lagi pula adalah suatu fakta sebagaimana dikemukakan oleh saksi Soejono, bahwa latihan-latihan Hansip dan pasukan-pasukan tjadangan diselenggarakan atas permintaan pihak militer di Lubang Buaja.

Saksi Peris Pardede memberikan kesaksiannya setjara gedetailleerd, dalam nada yang sungguh-sungguh. Requisitoir Bapak Oditur pada halaman 22 alinea kedua mengenai persoalan ini kiranya mengandung kechilafan, yang berbunyi: „tentang imbalan kekuatan militer yang gunstig," sedangkan dalam pemeriksaan dinjatakan oleh tertuduh dan saksi-saksi, bahwa sebenarnya perwira-perwira yang ingin bertindak untuk melawan Dewan Djenderal, djustru di Djakarta lemah, demikian pula diluar Djawa dan diluar Djawa PKI pun lemah pula.

Dalam hubungan ini saja tundjuk pula pada Amanat Presiden Sukarno pada pembukaan sidang paripurna Kabinet Dwikora, tertanggal 6 Nopember 1965: "..... tanjakan kepada pemimpin-pemimpin Kom, apakah perbuatan Gestapu itu ada dalam lijn daripada Kom. Tidak". Harus lagi ditekankan disini, bahwa saksi Peris Pardede tidak hadir dalam sidang tertanggal 28 Agustus itu, melainkan dengar ada satu "keputusan lain" (yakni lain daripada yang diberitahukan kepadanya beberapa waktu lebih dulu oleh Sudisman) dari Lukman, sehingga mengenai kejadian-kejadian pada rapat tertanggal 28 Agustus ini tak ada lain bukti yang langsung daripada keterangan daripada tertuduh sendiri.

Bahwa surat kabar „Harian Rakjat", dalam edisinya tertanggal 2 Oktober, mendukung Gerakan 30 September, adalah wajar karena Gerakan 30 September melawan Dewan Djenderal; akan tetapi dukungan ini setelah terdjadinja Gestok, tidak dapat didjadikan sebagai bukti, bahwa PKI ikut merentjanakan Gerakan 30 September.

Maka oleh karenanya dalam hal ini saja berselisihan faham dengan Bapak Oditur.

Maka mengenai persoalan apakah terbukti tuduh-tuduhan yang disebut tuduhan yang pertama yang disebut sebagai ketiga dalam requisitoir tidak terbukti, dan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tertuduh, tidak dapat dihukum sebagai pemberontakan (tuduhan ketiga yang didjadikan yang kesatu dalam requisitoir) ataupun sebagai makar tuduhan yang kedua), karena maksud yang jahat (opzet) dalam kedua hal tidak dibuktikan.

Lagi pula, bagaimana dapat dikatakan ada pemberontakan sedangkan unsur "melawan dengan sendjata" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 108 sama sekali tidak terpenuhi.

Bapak Ketua, Para Bapak Hakim;

Bapak Oditur berpendapat, bahwa pada ketiga tuduhan berdasarkan KUHP, hukuman atas tertuduh dapat didasarkan Pen. Pres. 5/1959. Walaupun pendapat Bapak Oditur ini tidak bersalah dalam melakukan kedjahatan-kedjahatan yang disebut dalam Buku II Titel II KUHP (kedjahatan-kedjahatan yang dimaksud dalam pasal-pasal 107, 108 dan 110) namun harus saja menjawab pendapat ini agar supaya lengkapnja djawaban saja atas requisitoir Bapak Oditur.

Menurut hemat saja pendapat Bapak Oditur sangat "geforceerd" Tuduhan berdasarkan Pen. Pres. 5/59 dibagi tiga, terdiri dari tuduhan bahwa tindakan jahat terdakwa mengakibatkan kesulitan ekonomi; bahwa tindakan-tindakan itu mengandung bahaya untuk keamanan dalam Negeri, dan bahwa tindakan-tindakannya menghalangi perdjjuangan kita melawan nekolim.

Bapak Ketua, dalam surat bukti yang didjadikan dasar daripada tuduhan itu, disebut Gestok sebagai sebab terhalangnja pelaksanaan Triprogram Pemerintah. Akan tetapi, untuk menjalahkan chusus tertuduh sadja berdasarkan Pen. Pres. 5/1959 — hal mana hanya mungkin apabila tertuduh dinjatakan bersalah berdasarkan pasal-pasal KUHP yang sudah saja sebut — masih perlu untuk membuktikan hubungan sebab-musabab (causaal verband) diantara tindakan-tindakan tertuduh yang tadi telah kami sebut, jaitu menjiapkan pasukan Hansip sebagai pasukan tjadangan untuk pada waktunya membantu perwira-perwira yang bergerak melawan Dewan Djenderal, dan terhalangnja pelaksanaan Triprogram.

Hubungan sematjam itu, menurut hemat saja, tidak ada. Hal ini djelas, djika kita menilai peranan tertuduh dalam rangka kejadian Gestok.

Apakah peranan itu dapat dikatakan menentukan untuk terdjadinja Gestok ?

Kiranya tidak. Andaikata pasukan tjadangan yang disiapkan oleh terdakwa tidak bertindak, apakah dalam hal ini Gestok itu tidak terdjadi ? Dalam hubungan itu harus kami tekankan, bahwa sebenarnya pasukan Hansip/tjadangan yang diurus oleh terdakwa, hampir tidak

beroperasi sama sekali. Mereka hampir seketika itu juga ditangkap, lengkap dengan sendjata dan komandan-komandannya tanpa mengadakan perlawanan dan tanpa melepaskan satu tembakanpun. Maka untuk membebaskan segala akibat daripada Gestok pada pundak tertuduh sendiri saja, — dengan akibat yang berat, bahwa tertuduh hanya karena itu dapat dihukum mati, dapat dikatakan "tever gezocht" dan tidak sesuai dengan keadilan.

Bukti yang dikemukakan oleh Bapak Oditur mengenai terhalangnya pelaksanaan Program Sandang-Pangan itu sendiri sudah merupakan tanda, bahwa juga Bapak Oditur agak merasa sulit untuk membuktikan causal verband itu.

Sebagai bukti dikemukakan oleh Bapak Oditur, bahwa tertuduh bersalah justru karena dia telah mengambil tindakan-tindakan untuk mentjegah adanya kegontjangan dalam ekonomi, jika akan terdjadi gerakan Perwira-Perwira di Lubang Buaja.

Dalam redenering Bapak Oditur ini adalah sesuatu yang tidak wajar; tindakan Saudara Njono, hanyalah mempunyai arti dan makna dalam rangka follow-up daripada Gerakan 30 September, jika gerakannya itu berhasil dan tindakan itu justru mempunyai maksud untuk berusaha agar tak ada kematjatan dalam perlengkapan sandang-pangan untuk rakyat. Sewaktu Gerakan 30 September itu gagal, dan mulai ditumpas, maka tindakan-tindakan Njono yang termaksud itu, tidak mempunyai arti lagi.

Disamping itu, kiranya setjara ilmiah tidak benar, kalau kita menjatakan kesulitan ekonomi bagi rakyat kita adalah akibat daripada Gestok. Kesulitan itu sudah bertahun-tahun kita alami dan kita mentjaba mengatasinya dengan Dekon dan politik Berdikari dan akhir-akhir ini dengan beberapa peraturan moneter.

Dalam hubungan ini saja tundjuk pada andjuran Bapak Pemimpin Besar Revolusi kita untuk tidak mehlui mendjadikan Gestok sebagai akibat segala penyakit-penyakit masyarakat kita. (Lihat Amanat Presiden tertanggal 16 Djanuari 1966 didepan sidang paripurna Kabinet Dwikora dengan dihadiri juga oleh wakil-wakil dari mahasiswa dan wartawan.

Oleh karena itu, malahan andaikata tertuduh dianggap bersalah berdasarkan salah satu atau lebih dari pasal-pasal KUHP tersebut, maka strafverzwaring berdasarkan Pen. Pres. 5/1959 dalam hal ini menurut hukum tidak mungkin.

Achirnya, kami sampai pada masaalah ukuran hukuman, yang juga harus kita bahas, agar tangkisan kami atas requisitoir menjadi lengkap. Dalam hal ini disebut oleh Bapak Oditur masalah-masalah yang memberatkan dan yang meringankan tertuduh.

Tentang persoalan yang memberatkan tertuduh menurut pendapat Bapak Oditur, ingin saja tekankan, bahwa tertuduh dengan pasti tidak pernah memikirkan semomenpun untuk berusaha menjingkirkan kepe-

mimpinan Presiden Sukarno dan mengenai soal inipun tak ada bukti. Selanjutnya ingin saja kemukakan, bahwa kiranya kita terlalu membesar-besarkan peranan tertudju apabila kita menjatakan bahwa perbuatannya menggontjangkan dan melemahkan ketahanan Revolusi Rakyat Indonesia. Tentang soal-soal yang meringankan saja minta perhatian atas djasa-djasa tertuduh yang sudah disebut pula oleh Bapak Oditur, yang tidak sedikit untuk seorang yang masih muda seperti tertuduh.

Jang patut dipikirkan pula dalam hal ini, ialah — dan sekarang saja mengikuti Bapak Oditur —, bahwa perkara ini adalah perkara politics. Saudara Njono bukan seorang pendjahat yang menghisap darah Rakyat untuk memperkaja diri atau yang hendak merugikan Rakyat; ia semata-mata bertindak atas dasar kejakinan politicsnya, tidak meminta sedikit-dikitung untuk diri sendiri dan dalam pekerdjaan sehari-hari, tugas pekerdjaannya dalam lembaga-lembaga negara senantiasa diutamakan di atas kepentingannya sendiri. Buktinya ialah, bahwa ia seorang sederhana, yang tidak mempunyai kekajaan apa-apa.

Keluarga Saudara Njono terdiri dari isterinya dan anak tunggalnya berumur 10 tahun; orang tuanya yang sudah lanjut usianya keduanya masih hidup.

Maka berdasarkan pada segala yang telah saja uraikan saja harus berkesimpulan, bahwa klien saja tidak bersalah atas segala yang tuduhkan terhadapnya, maka oleh karena itu harus dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan.

Djakarta, 19 Februari 1966.

ttd.

(Nj. T. SUNITO S.H.)

S A L I N A N.

PEMBELAAN — NJONO — DIMUKA MAHMILLUB PADA TANGGAL 19 PEBRUARI 1966.

Jth. Saudara Ketua dan para Anggota Mahmillub,
Terima kasih sebesar-besarnya saja sampaikan kepada Mahmillub
jang telah memberi kesempatan kepada saja untuk membuat pembelaan.

Waktu memulai menjusun pembelaan ini dikamar tahanan jang
bertembok-beton dan berterali-besi, mendesinglah ditelinga saja nada
jang bersemangat kuat dari sebuah lagu baru jang tertjipta di Rumah
Tahanan Khusus Salemba. Lagu baru ini adalah lagu "Barisan Sukarno"
Sjairnja dimulai dengan kata-kata sbb. :

Tegap berderap
Barisan Sukarno
Dikota, didesa, dimana-mana
Teguh bersatu
Membenteng badja
Bagaikan banteng gagah perwira.

Saja tidak bermaksud menjanjikan lagu baru itu dimuka Mahmillub.
Hal ini saja kemukakan disini untuk mengiringi isi hati jang hendak
saja njatakan sedjudjur-djudjurnja. Jaitu hingga sekarang Partai saja,
Partai Komunis Indonesia tetap mengakui P.J.M. Presiden Sukarno
sebagai P.B.R. sebagaimana ditetapkan oleh MPRS. Hingga sekarang
tidak ada pernajaan politik dari Presiden/P.B.R. Bung Karno jang
tertjinta jang menegaskan bahwa PKI adalah satu Partai kontra-revo-
lusioner, sebaliknya masih diakui sebagai satu Partai jang revolusioner.
Oleh karenanja saja masih berhak untuk menyatakan bahwa saja ter-
masuk salah seorang dari "Barisan Sukarno". Maka itu dalam membuat
pembelaan saja berusaha sekuat tenaga berpedoman kepada ajaran-
ajaran revolusioner dari Presiden Sukarno serta petundjuk-petundjuk
pelaksanaannja.

Dalam Amanat Presiden Sukarno dihadapan wakil-wakil Partai Po-
litik di Guesthouse Istana, Djakarta, tanggal 27 Oktober 1965, ditegaskan
bahwa "..... kedjadian 30 September bukan sekadar kedjadian 30
September, tetapi adalah suatu kedjadian politik didalam Revolusi kita".
Selanjutnja dinjatakan, bahwa untuk dapat bertindak bidjaksana tidak
gegabah, harus diselidiki dan dipeladjari proloog, fakta peristiwanya
sendiri dan epilooq daripada "G. 30. S.". Penegasan Presiden ini saja



Hakim Ketua MAHMILLUB LETKOL. CKH. ALI
terhadap terdakwa Njono.
SAID SH. membatjakan VONNIS hukuman "mati"
foto KEMPEN.

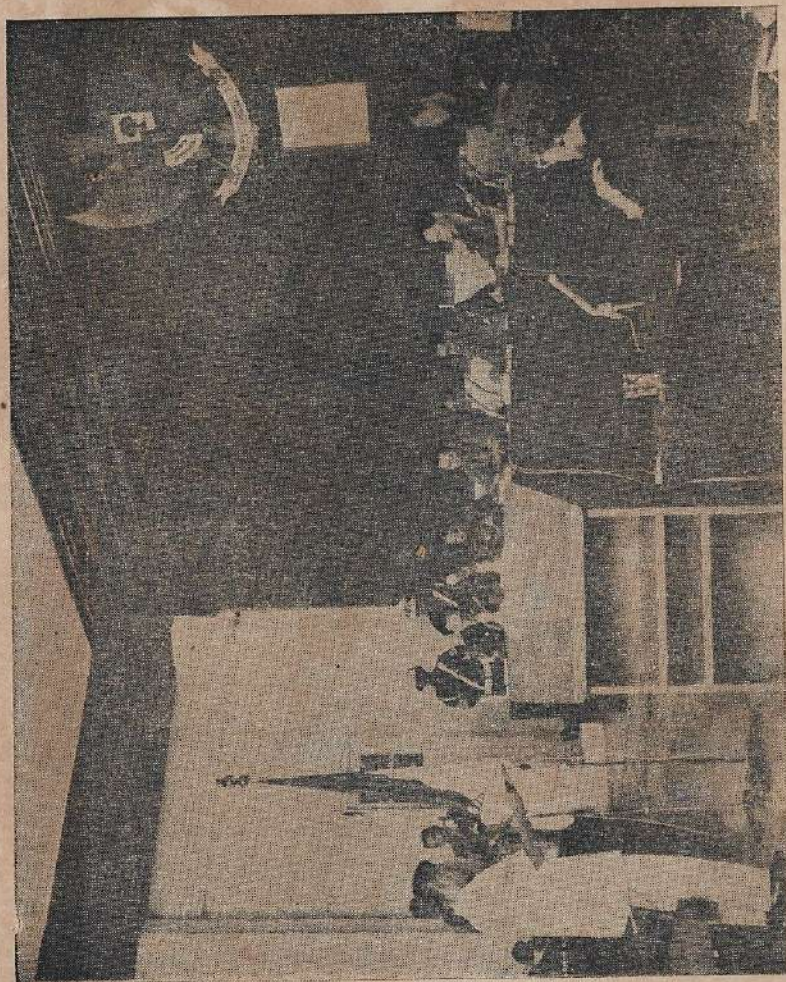


foto KEMPEP.
Terdakwa Njono sedang membacakan pembelaannya (Zelfbedoon).

djadikan pedoman dalam membahas persoalan "G. 30. S."

Saja sudah kemukakan bahwa proloog daripada „G. 30. S." adalah adanya rentjana kudeta dari Dewan Djenderal. Dalam bahasa sehari-hari dapat dikatakan bahwa gara-gara ada Dewan Djenderal maka ada Dewan Revolusi. Ada atau tidak ada Dewan Djenderal itulah persoalan politik yang pertama-tama harus diselesaikan. Dengan adanya persidangan Mahmillub sekarang ini, persoalan Dewan Djenderal telah menjadi persoalan terbuka bagi Rakjat. Saja pertjaja bahwa Rakjat pasti akan ikut membitjarkannya berdasarkan pengalaman-pengalaman politik Rakjat sendiri. Dan selama darah Rakjat masih mengalir, Rakjat pasti akan menjadi hakimnya yang menentukan siapakah yang benar dan yang salah, siapakah yang emas dan yang lojang.

Dalam requisitoirnya, Oditur menjimpulkan bahwa soal Dewan Djenderal hanjalah satu fitnahan rendah belaka dari P.K.I. yang dilemparkan kepada alamat Angkatan Darat. Dalam membuat kesimpulan ini Oditur berbuat tidak konsekwen. Kepada saja Oditur menjatakan, bahwa saja mengemukakan adanya Dewan Djenderal tanpa pembuktian hanjalah bersandar kepada tanggapan-tanggapan politik yang subjektif spekulatif mengenai apa yang saja namakan informasi-informasi, politieke aanwajzingen, fakta-fakta politik, analisa sosial-historis dll-nja. Saja ingin bertanja mengapa Oditur boleh menjimpulkan dalam requisitoirnya tentang "PKI membuat fitnahan mengenai Dewan Djenderal" berdasarkan tanggapan-tanggapan politik Oditur sendiri dan tanpa pembuktian mengenai apa yang diinjatakan oleh Oditur bahwa PKI di-hinggapi Angkatan-Darat phobi; bahwa PKI berpendirian supaja Angkatan Darat hanja menjadi alat negara tok; bahwa "pemberontakan Madiun" menjadi sandaran social-historis dari "G. 30. S.", bahwa PKI mau melakukan pelompatan tahap revolusi Indonesia dll-nja. Meninjau kata-kata Oditur hal-hal yang diadjukan oleh Oditur itu merupakan fitnahan-fitnahan rendah yang dilemparkan kepada alamat PKI. Fitnahan-fitnahan rendah Oditur ini tidak akan saja bahas disini, karena saja akan langsung bitjara mengenai persoalan pokoknja jaitu apakah keterangan tentang adanya Dewan Djenderal merupakan satu fitnahan politik ataukah satu kenjataan politik? Saja tetap berpendirian bahwa hal itu merupakan satu kenjataan politik. Pertimbangan-pertimbangan-nja adalah sbb. :

Pertama : Memang benar bahwa fakta-fakta tentang Dewan Djenderal saja dapat dari informasi-informasi. Dalam hal ini saja minta diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Oditur dan Mahkamah Militer Luar Biasa pernyataan P.J.M. Menteri Kehakiman Astrawinata S.H. yang berulang-kali menjerukan kepada rakjat untuk memberikan social control dan "social support" dibidang pengusutan dan peradilan.

Informasi-informasi yang saja kemukakan didapat dari tokoh-tokoh politik dari pedjabat-pedjabat pemerintah yang kompetent dan diperoleh tidak hanja dari satu pihak, tetapi dari berbagai pihak, bahkan ada

jang dari pihak-pihak resmi seperti BPI dan informasi SUAD I. Malahan saja pernah mendapat keterangan dari kalangan "Lubang Buaja" bahwa Kedjaksanaan Agung djuga sudah menerima laporan-laporan tentang Dewan Djenderal. Laporan-laporan ini diberikan oleh informasi SUAD I pada akhir bulan September 1965 dan diterima oleh Brigadir Djenderal Sumarjo Pembantu Menteri Djaksa Agung.

Sifat dari pada informasi-informasi tersebut adalah terperinci, gedetailerd dengan menjabutkan tanggal, djam, tempat, nama, atjara persoalan dan lain-lainnja.

Saja bertanja apakah informasi-informasi jang diperoleh dari banjak sumber dan sifatnja gedetailerd, boleh dibilang sematjam "inside informations" bisa dianggap sebagai kabar-kabar angin belaka? Bagi akal sehat, hal-hal jang sedemikian setidak-tidaknja bisa diterima sebagai "social control" dan "social support" sebagaimana dimaksudkan oleh J.M. Menteri Kehakiman Astrawinata S.H. untuk dilakukan pengusutan pengusutan lebih landjut oleh alat-alat keamanan negara. Untuk menguatkan pendapat saja ini, idjinkanlah saja memberikan beberapa tjontoh tentang informasi-informasi jang bersifat gedetailerd tersebut.

Tjontoh pertama adalah tentang komposisi keanggotaan Dewan Djenderal. Jang saja masih ingat jalah bahwa tidak semua djenderal masuk dalam Dewan Djenderal. Djumlah anggautanja kurang lebih 40 Djenderal, diantaranya kurang lebih 25 orang jang aktif mendjalankan politik Dewan Djenderal. Tokoh-tokoh utamanja ada 7 orang jaitu Djen deral A.H. Nasution, A. Jani, Suparman, Harjono, Suprpto, Sutojo dan Sukendro.

Tjontoh lain jalah adanya rapat pleno Dewan Djenderal seingat saja pada tanggal 21 September 1965, di A.H.M., Djl. Dr. Abdulrachman Saleh Djakarta. Jang berhalangan datang adalah Djenderal-Djenderal A.H. Nasution dan A. Jani. Rapat pleno tersebut dipimpin oleh almarhum Suparman dan Harjono serta mensjahkan rentjana komposisi Kabinet Dewan Djenderal dan menetapkan waktu dilakukannya kudeta, jaitu sebelum Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober 1965.

Tentang rentjana komposisi Kabinet Dewan Djenderal dapat di kemukakan jang pokok-pokok sadja jaitu :

- Perdana Menteri Djenderal A.H. Nasution.
- WPM/HANKAM-KASAB — Djenderal A. Jani.
- WPM/Pembina Djiwa Revolusi Men. Pen. Djendr. Dr. Ruslan Abdul Gani.
- Menteri Dalam Negeri — Djenderal Suprpto.
- Menteri Luar Negeri — Djenderal Harjono.
- Menteri Kehakiman — Djenderal Sutojo.
- Menteri Djaksa Agung — Djenderal Suparman, dll-nja.

Demikianlah beberapa tjontoh informasi-informasi jang bersifat gedeta illeserd. Apakah informasi-informasi jang demikian terperinci itu dapat dianggap sebagai „hisapan hisapan djempol" belaka ?

Kedua : Saja telah kemukakan bahwa dalam prakteknja Dewan Djenderal merupakan satu golongan politik tersendiri. Disini perlu saja tegaskan, karena tidak semua djenderal masuk dalam Dewan Djenderal maka Dewan Djenderal adalah satu golongan politik tersendiri dari Djenderal-djenderal tertentu jang mendjalankan politik nasakom-phobi, chususnja komunisto-phobi, hal mana adalah bertentangan dengan politik Presiden Sukarno. Apakah bukti-buktinja ? Saja kemukakan satu informasi politik jang boleh ditjek kebenarannya, jaitu seingat saja pada tanggal 8 Djuni 1965, bertempat dirumah kediaman WPM Chairul Saleh, atas undangan Menko Hubra Dr. Ruslan Abdulgani telah dilangsungkan pertemuan antara almarhum Djenderal-djenderal A. Jani, dan Harjono dengan tokoh-tokoh PNI antara lain Pak Ali Sastroami djojo. Dalam pertemuan tersebut diusulkan oleh almarhum Djenderal A. Jani dan Harjono serta Djenderal Sukendro untuk membentuk kerdja sama PNI-FN dengan TNI untuk melawan PKI, usul maña tidak mendapat sambutan dari tokoh PNI jang hadir dalam pertemuan tsb.

Apa informasi tentang kegiatan anti-komunis jang terperinci demikian ini harus dianggap sebagai fitnahan belaka ? Kegiatan anti-komunis tsb. adalah langsung bertentangan dengan politik Presiden Sukarno jang djusteru kurang lebih dua minggu sebelumnya berkenaan memberikan Amanat dirapat raksasa Ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senajan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandakan bahwa P.K.I. adalah „ja sanak ja kadang, jen mati melu kelangan".

Ketiga : Bahwasanja bisa ada Djenderal-djenderal tertentu berbuat jang tidak beres, hal itu adalah mungkin sekali. Bukanlah P.J.M. Presiden Sukarno telah memberikan tjanang-tjanang politiknya ? Pernah diperingatkan bahwa „bukan bedil jang memimpin Manipol, tetapi Manipol jang memimpin bedil". Dalam Amanat „Takari P.J.M. Presiden Sukarno mentjanangkan" aku muak, mual mau muntah, kalau mendengarkan omongan orang jang mau djasa, djasa, djasa sadja. Biar engkau dulu Djenderal — petak ditahun 1945, tetapi kalau sekarang memetjah persatuan nasional revolusioner, kalau sekarang mengatjau front Nasakom, kalau sekarang memusuhi sokoguru-sokoguru revolusi, engkau mendjadi tenaga reaksi !

Demikianlah tjanang politik Presiden kepada para Djenderal dan tidak masuk akal, djika tjanang politik itu diberikan oleh P.J.M. Presiden Sukarno selaku Pangti dan PBR tanpa ada alasan-alasan.

Menurut analisa klas daripada PKI, kebenaran analisa mana saja serahkan kepada Rakjat untuk mempertimbangkannya, tiap golongan politik atau tiap Partai Politik dalam masjarakat jang berklas-klas pasti mewakili klas tertentu. „Timbullah pertanjaan, klas apakah jang diwakili oleh Dewan Djenderal ? P.K.I. berpendapat bahwa Dewan Djenderal mewakili kepentingan ekonomi dan politik dari pada klas Kapitalis-birokrat jang tumbuh pada tahun-tahun terachir daripada berlakunya SOB pada waktu penindasan pemberontakan separatis PRRI/

Permesta. Maka itu selama ada kapitalis-birokrat dikalangan militer selama itu akan ada segolongan militer yang mewakili kepentingan kepentingan ekonomi dan politiknya dengan namanya bisa berubah-ubah. Kali ini bernama Dewan Djenderal, lain kali bisa bernama lain. Djelaslah bahwa menentang Dewan Djenderal pada hakekatnya adalah menentang Djenderal tertentu yang menjadi kapitalis-birokrat atau yang menjalankan politik kapitalis birokrat, yang dalam prakteknya bersifat memusuhi nasakom dan sokoguru-sokoguru revolusi. Oleh karenanya saja menolak keras pendapat Oditur bahwa menentang Dewan Djenderal adalah sama dengan menentang A.D. atau sama dengan Angkatan Darat-phobi. Saja kira umum telah mengetahui bahwa PKI adalah salah satu Partai yang mengandjurkan persatuan Dwitunggal Rakjat dan Tentara.

Dalam „Takari“, P.J.M. Presiden Sukarno memperingatkan „Saja selalu mengatakan bahwa perjuangan klas harus ditundukkan kepada perjuangan nasional Tetapi aku memperingatkan, kalau koruptor-koruptor dan pentjoleng-pentjoleng kekajaan negara meneruskan operasi mereka yang sesungguhnya anti Republik dan anti — Rakjat itu, maka djangan kaget djika pada satu waktu perjuangan antar-golongan berkobar dan membakari kemewahan hidup kaum Koruptor dan pentjoleng itu!“. Demikian peringatan Presiden. Kaum kapitalis-birokrat adalah termasuk golongan pentjoleng-pentjoleng kekajaan negara. Salah satu tjontohnya adalah apa yang pernah dihebohkan sebagai „Skandal Tandjung Periuk“ jaitu peristiwa penjelundupan setjara besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan Djenderal. Demikianlah tiga matjam pertimbangan-pertimbangan politis yang memberi kejakinan politik saja tentang adanya Dewan Djenderal. Bagaimana tjara pembuktiannya setjara juridis saja serahkan kepada pembela hukum saja.

Saja lebih yakin lagi akan adanya Dewan Djenderal setelah saja sekedar mendapatkan bahan-bahan masa epiloog dari G.30.S. Masa epiloog merupakan masa „openbaring atau masa terbukanya wadjah politik yang sesungguhnya daripada Dewan Djenderal. Dari koran-koran dapat diketahui bahwa Djenderal A.H. Nasution muntjul terangan-terangan dengan kampanye anti-komunisnya, sungguhpun Presiden Sukarno tiada djemu-djemunya memberikan indoktrinasi-indoktrinasi tentang mutlaknja Nasakom bagi penyelesaian revolusi Indonesia. Akibat daripada kampanye komunis ini terdjadilah pengedjaran, penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan ribu kaum Komunis dan patriot-patriot lainnya yang dianggap korban komunis, tidak terbatas kepada mereka yang tersangkut langsung dengan „G. 30. S.“. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan P.J.M. Presiden Sukarno dalam Amanat beliau pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor pada tanggal 15 Djanuari 1966, yang menegaskan „Kita tidak perlu tutup kita punja mata, ada penunggan-penunggan didalam epiloog untuk membuat keadaan disini makin katjau, makin katjau, makin katjau, makin bersih daripada apa yang dinamakan komunis-komunis dan antek-antek dari-

pada komunis, sampai kepada orang-orang yang tidak tahu-menahu tentang komunisme dibersihkan sama sekali“

Pudjangga besar India Rabindranath Tagore pernah memudja daun-daun yang sudah kuning berguguran sebagai rabuk bagi pohon-pohon yang hidup. „Demikianlah saja yakin bahwa tulang-belalang kaum komunis dan patriot-patriot lainnya yang berguguran dalam epiloog „G. 30. S.“ akan menjadi rabuk bagi gerakan revolusioner Rakjat Indonesia. Apapun dalih dan alasannya, kampanye anti-komunis itu hanya lah menggembirakan kaum imperialis, halmana bisa dilihat dari suara pers-radio mereka sehari-hari; sehingga Presiden Sukarno terpaksa mengusir wartawan AS.

Dalam persidangan Mahmillub sekarang ini, satu-satunya barang bukti yang diajukan oleh Oditur adalah surat pernyataan dari Panitia Odang untuk menjangkal adanya Dewan Djenderal. Hasil-hasil dari pada Panitia Odang masih sulit didjadikan pegangan politis, karena dalam surat pernyataan tersebut dinjatakan bahwa kesimpulan-kesimpulannya masih bersifat sementara. Saja sangat meragukan hasil-hasil pemeriksaan panitia Odang, karena Panitia tersebut dibentuk oleh Djenderal A.H. Nasution sendiri, sedangkan Djenderal A.H. Nasution djusteru disebut-sebut sebagai tokoh utama Dewan Djenderal. Dalam bahasa sehari-hari dapat dinjatakan bahwa „itu mah mengadili sendiri“.

Maka itu saja menolak kesimpulan Oditur dan Panitia Odang bahwa soal Dewan Djenderal hanyalah satu fitnahan belaka yang dibuat oleh PKI, chususnya oleh Kawan D.N. Aidit. Ini berarti bahwa sidang-sidang Politbiro CC PKI pada bulan Agustus 1965 benar-benar mendiskusikan masalah bagaimana tjara yang tepat menggagalkan rentjana kudeta Dewan Djenderal, bukan mendiskusikan masalah bagaimana membuat fitnahan untuk mentjetuskan „G. 30. S.“.

Tentang keputusan-keputusan sidang Politbiro pada akhir bulan Agustus 1965 saja tetap pada pengakuan yang saja berikan dalam pemeriksaan Mahmillub dalam sidang-sidang yang telah lalu. Keputusan-keputusan tersebut sebagaimana sudah saja djelaskan adalah: 1) Melaporkan kepada P.J.M. Presiden tentang bahaya kudeta Dewan Djenderal dan mengharapakan P.J.M. Presiden mengambil langkah-langkah pentjegahan. 2) Tindakan PKI menunggu sikap P.J.M. Presiden dan 3) Menginformasikan kedalam Partai tentang bahaya kudeta Dewan Djenderal. Pengakuan saja ini djelas diperkuat oleh keterangan-keterangan Saksi Peris Pardede dan saksi pak Djojo yang oleh Oditur keterangan tersebut tidak disinggung sama sekali.

Saja kira Oditur tidak lupa, bahwa saksi Peris Pardede telah menjelaskan bahwa keterangan-keterangan kawan Sudisman kepadanya tidak dibenarkan oleh kawan M.H. Lukman yang menjatakan bahwa keinginan bertindak mendahului terhadap rentjana Dewan Djenderal hanyalah menjadi ketjondongan keinginan kawan D.N. Aidit sendiri yang setelah disidangkan lain keputusannya.

Pak Djojo memang menjelaskan bahwa ormas-ormas datang sendiri minta dilatih di Lubang Buaja, tetapi Pak Djojo juga menerangkan keterangan inilah yang tidak disinggung oleh Oditur — bahwa yang mengajukan permintaan dan yang membuat persetudjuan dengan ormas ormas mengenai soal latihan tersebut adalah Kapten Suradi. Jadi keterangan pak Djojo itu tetap memperkuat pengakuan saja bahwa pengiriman tenaga-tenaga tjadangan tersebut dilakukan atas permintaan Lubang-Buaja yang oleh pak Djojo diperdjelaskan atas keputusan ex Kolonel Latif dkk-nja.

Selain melupakan keterangan-keterangan tersebut diatas, dalam requisitoirnja Oditur sekali lagi berbuat tidak konsekwen jaitu melakukan tanggapan-tanggapan politik yang subjektif yang menurut pendapat Oditur sendiri tidak punya nilai-nilai pembuktian setjara juridis. Tanggapan-tanggapan politik yang subjektif ini ialah keterangan-keterangan karena PKI adalah organisasi yang militaint yang selalu bekerdja dengan rentjana, karena sidang-sidang Politbiro CC PKI menbitjarakan tentang imbangan kekuatan militer dan perspektif politik, karena ada persamaan politik antara Harian Rakjat dan Dewan Revolusi dalam menentang Dewan Djenderal, dan karena adanya „cel-sistim” dan „GTM”, maka Oditur otomatis menarik kesimpulan bahwa PKI lah dalangnya „G.30.S.”.

Kesimpulan-kesimpulan Oditur ini djelas bersifat subjektif. Misalnya tiap persamaan politik tidak otomatis berarti ada persamaan dalam hal-hal lain. Buktinja antara Oditur dan saja terdapat persamaan pendirian politik dalam menentang nekolim, tetapi terdapat perbedaan penilaian mengenai Dewan Djenderal.

Saja mengakui bahwa saja telah melakukan serentetan kegiatan membantu „G.30.S.”. Tetapi saja menolak dakwaan bahwa dengan membantu „G.30.S.” itu maka saja telah melakukan perbuatan penggulingan atau pemberontakan bersendjata terhadap pemerintah yang ada. Satu-satunya barang bukti yang diadjukan oleh Oditur selama dalam pemeriksaan Mahmillub adalah adanya Dekrit No. 1 dari „G. 30 S.” tentang pembentukan Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwikora. Tetapi dalam menggunakan Dekrit No. 1 tersebut sebagai barang bukti tidak dilakukan setjara konsekwen. Dalam dekrit tersebut — dinjatakan, bahwa „Gerakan 30 September adalah gerakan semata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengachiri perbuatan sewenang-wenang Djenderal-djenderal anggota Dewan Djenderal dst-nja”. Dibagian lain daripada Dekrit No. 1 tersebut — dinjatakan bahwa „G. 30 S.” adalah suatu „Gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinja Dewan Djenderal yang telah merentjanakan kup mendjelang hari Angkatan Bersendjata 5 Oktober 1965”. Maka itu dalam keterangan saja pada waktu pemeriksaan telah saja djelaskan bahwa didemisionerkannja Kabinet Dwikora adalah karena dalam Kabinet tersebut terdapat unsur-unsur Dewan Djenderal.

Bahwasanja „G.30.S.” bukanlah suatu pemberontakan bersendjata terhadap pemerintah yang ada, tetapi suatu gerakan pembersihan, hal ini tidak hanya dinjatakan dalam pengumuman dan dekrit Dewan Revolusi, djuga dibuktikan oleh fakta-fakta tentang perbuatan-perbuatan konkritnja.

Dalam tiap sedjarah pemberontakan bersendjata terhadap pemerintah yang ada, baik yang kita alami sendiri ataupun yang terdjadi di berbagai negeri tentulah ada tindakan kongkrit seperti penangkapan penangkapan terhadap pendjabat-pendjabat yang bertanggung djawab dalam pemerintahan yang bersangkutan. Tetapi apa yang terdjadi dengan „G.30.S.” Seorang Menteripun tidak ada yang ditangkap, apalagi Presiden yang mengepalai Kabinet Dwikora.

Djelaslah bahwa „G.30.S.” bukanlah suatu pemberontakan, tetapi suatu gerakan pembersihan. Bagaimana keterangan juridisnja saja serahkan kepada pembela hukum saja.

Djuga tidak bisa saja terima dakwaan bahwa akibat-akibat „G.30.S.” adalah menghalang-halangi Triprogram Pemerintah. Kenjataan kenjataannja ialah selain saja telah berusaha untuk mentjegah kemacetan lalu-lintas darat dan udara dan gejala-gejala negatif yang bisa mengganggu keamanan, perbuatan mana adalah djelas bersifat konstruktif, apa yang dinamakan „G.30.S.” bagi ibukota Djakarta Raya hanjalah berlaku sehari, bagi kota-kota lain mungkin beberapa hari sesudah itu yang berlaku adalah epiloog daripada „G.30.S.”. Mengenai epiloog ini PJM. Presiden mensinjalin adanya gejala-gejala yang mau membawa revolusi Indonesia kekanan, adanya usaha-usaha penunggang-an, adanya kegiatan-kegiatan nekolim, termasuk CIA, dan pada waktu achir-achir ini adanya usaha-usaha pendongkelan-pendongkelan setjara gelap terhadap PJM. Presiden sendiri. Djelaslah bahwa gejala-gejala politik kekanan, penungngangan-penungngangan dan pendongkelan-pendongkelan itulah yang menghalang-halangi pelaksanaan Tri-program pemerintah. Sebuah bukti adalah pernjataan PJM. Presiden dalam Amanat beliau di Sidang Paripurna Kabinet di Bogor pada tanggal 15 Djanuari 1965, jaitu „..... di Djl. Thamrin salah satu papan ditulis: Mengatjaukan harga sekarang ini adalah antek-antek Gestapu. Lha kok murah sekali,”. Demikian pernjataan Presiden. Saja tidak bermaksud mentjap dakwaan Oditur sebagai dakwaan murah. Saja hanya minta supaya dikemukakan „blote feiten”. Tjontoh lain misalnja djika ada gontok-gontokan yang sampai membawa korban yang menurut surat-kabar di luar negeri djumlahnja lebih besar daripada djumlah korban perang 3 tahun di Vietnam, hal itu terang bukan sebagai akibat „G.30.S.” tetapi akibat penungngangan-penungngangan yang bersifat anti komunis. Dan kampanye anti-komunis inilah yang memperlemah perjuangn anti-Malaysia dan anti-nekolim.

Kesimpulan umum.

Berdasarkan keterangan-keterangan dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka saya tetap menolak dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh Oditur dan menganggap tuntutan hukuman yang dijatuhkan oleh Oditur tidak adil. Ini tidak berarti saja tuntutannya terhadap segala kegiatan yang telah saya lakukan dalam membantu „G.30.S.”.

Soal pokoknya adalah tjukup gamblang, yaitu antara Oditur dengan saya terdapat perbedaan penilaian politik mengenai ada atau tidak adanya Dewan Djenderal. Oditur berpendirian bahwa P.K.I.-lah yang membuat fitnahan mengenai Dewan Djenderal. Saya berkejakinan bahwa Dewan Djenderal bukanlah satu fitnahan, tetapi sungguh-sungguh ada. Kontradiksi politik ini akan berlaku dalam pengolahan politik dalam negeri untuk waktu yang lama.

Siapakah yang benar ?. Saya yakin bahwa pada suatu masa Rakjat yang tjukup tinggi kesadaran politiknya akan menghakiminya siapa yang benar dan salah.

Setjara politis saya serahkan penyelesaian politiknya kepada PJM. Presiden selaku PBR dan penjambung lidah Rakjat.

Hingga sekarang PJM, Presiden belum mengambil penyelesaian politik. Kenyataan politik ini saya harapkan dipertimbangkan sebaik-nja oleh Mahmillub dalam menjatuhkan vonnis, sehingga bisa dihindarkan kontradiksi antara penyelesaian setjara juridis dengan penyelesaian setjara politis, sehingga dapat diambil keputusan yang dapat dipertanggung djawabkan kepada kebenaran sedjarah dihari ini dan dihari nanti serta tidak memberikan kesan bahwa dewasa ini ada usaha-usaha untuk menjalankan politik menghabisi njawa tokoh-tokoh pimpinan terpenting daripada PKI, politik mana pada suatu masa pasti tidak dibenarkan dan dikutuk oleh Rakjat. Nasakom adalah suatu realitet sosial. Dan sebagai suatu ilmu dan tjita-tjita sosial komunisme tidak mungkin bangun selama masih ada proletariat dan Rakjat pekerdja lainnya.

Saudara Ketua dan para anggota Mahmillub, saya achiri pembelaan saya ini dengan menjatakan kejakinan saya akan kebenaran pepatah Djawa „betjil ketitik olo ketoro” yang berarti siapa yang benar dan yang salah achirnya ketahuan oleh umum.

Sekian dan terima kasih.

Sesuai dengan aselinja
PANITERA PADA MAHMILLUB :
ttd.

W. H. FREDERIK Bc. Hk.
KAPTEN CKH NRP. 295948.

Replik terhadap pleidooi Pembela.

Ketua beserta para Hakim, Pembela Jth.

Menanggapi pleidooi Pembela dalam replik kami ini maka tangkisan kami terutama ditujukan mengenai oogmerk/maksud atau opzet, karena ini akan kami buktikan, sehingga semua tuduhan kami akan menjadi terbukti karenanya yaitu sebagai berikut :

Terdakwa dalam menarik/menolak keterangannya dengan alasan suasana Komunisto phobi, alasan ini tak dapat diterima, karena bukan merupakan keadaan yang memaksa (psyche-dwang). Tujuan terdakwa dengan alasan tersebut diatas adalah untuk menjelamatkan partainya.

— Mengapa saksi-saksi lain seperti Peris Pardede dan Achmad Machammad yang djuga ditahan bersama-sama dengan terdakwa dan djika benar berada dalam suasana yang sama menurut terdakwa, tetap tinggal pada keterangannya semula.

— Pembuatan Berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan yang di djadikan dasar dalam sidang MAHMILUB ini yang dibuat oleh Oditur telah diakui oleh terdakwa dilakukan tanpa paksaan fisik maupun psychis.

Ini merupakan suatu petundjuk, bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa dalam Berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan adalah keterangannya yang sebenarnya.

— Saksi Peris Pardede mengatakan bahwa dalam rapat yang dihadapinya memang belum ada keputusan, tetapi ia mendengar sendiri dalam rapat tersebut AIDIT mengatakan, bahwa ia menjatujui untuk mendahului.

— Kemudian Sudisman mengatakan kepada Saksi Peris Pardede bahwa AIDIT tjondong untuk mendahului. Dan karena pendapat ketua AIDIT adalah djuga pendapat partai, Saksi berpendapat bahwa keputusan mendahului sudah diambil.

— Sudisman mengatakan kepada Saksi, bahwa terdakwa mendapat tugas sebagai Ketua Panitia aksi.

— Waktu saksi Peris Pardede Turba kedaerah Sumatera Utara kepadanya diperintahkan untuk mendengarkan Siaran RRI, karena akan ada kedjadian yang mendadak. Ia di Sumatera Utara supaya berhubungan dengan Djalaluddin Nasution (Sekretaris CDB Sumatera Utara) dan NJOTO yang akan datang ke Sumatera Utara. Semua keterangan Peris Pardede merupakan Petudjuk yang kedua. Keterangan PAK DOJO (EX MAJOR UDARA SUJONO) dimana pada pokoknya saksi tersebut menerangkan, bahwa rapat rapat perwira yang diantaranya dihadiri oleh Ex Letkol. Untung dan ex Kolonel Latif selalu dihadiri oleh dua orang tokoh PKI yaitu Sjam dan Pono.

Dalam rapat tersebut dibicarakan thema yang sama, yaitu tentang adanya info mengenai rentjana kudeta Dewan Djendral dan tentang sakit yang serius dari P.J.M. PRESIDEN.

- Latihan-latihan di Lubang Buaya yang khusus diadakan untuk mengadakan stoot kata Pak Djojo mulai dikerahkan tanggal 28 September 1965 dan kemudian pada suatu rapat ditentukan Hari H dan Djam D. Keterangan saksi Pak Djojo ini merupakan petunjuk ketiga.
 - **Petunjuk yang keempat** adalah keterangan kelima-lima saksi lainnya, yaitu Sartaman bin Masdjan, Achmad Muchammad bin Jacub, Prajitno bin Karnen, Sastrosandjojo bin Tjitrowikongko dan Sutarno Djogosudarjo, yang semuanya memberikan pengakuan pengakuan mereka sesuai dengan Berita Atjara Pemeriksaan.
 - Sekarang tentang Dewan Revolusi, yang menurut pembela belum terjadi, memang benar, karena bila terjadi, maka berarti perbuatan menggulingkan (omwenteling) telah berhasil.
- Replik terhadap pembelaan politik dari terdakwa.**
- Pembelaan dari terdakwa kami anggap sebagai suatu agitasi saja dan juga kembali merupakan suatu fitnah, tjontohnja Rapat diadakan di A.H.M. tanggal 21 September 1965 yang njatannya adalah Commanders-Call KOPLAT memöitjarkan soal-soal pendidikan dan latihan serta rapat karyawan dan tidak pernah ada rapat Dewan Djendral.
 - Yang lain-lainnja dari Pleidooi terdakwa tidak kami lajani, sebab titik tolak kami sudah djelas sebagaimana kami kemukakan dalam requisitoir kami.

Sekianlah tangkisan kami dan tetap pada pendirian dan tuntutan yang telah kami kemukakan dalam requisitoir yang dibatjakan pada tanggal 17 Pebruari 1966 djam 19.00 didepan Sidang MAHMILLUB yang terhormat ini.

Terima kasih.

ODITUR PADA MAHMILLUB

ttd.

DT. R. MULIA S. H.

LETKOL. CKH. NRP. 12319.

SIDANG KE-VIII TANGGAL 19 PEBRUARI 1966 DJAM 10.25
PEMBATJAAN DUPLIK PEMBELA
NJONJA T. SUNITO, S.H.

Terima kasih atas kesempatan untuk sebentar menjawab perlawanan dari Bapak Oditur.

Bapak Ketua dan Bapak Hakim, dengan segala hormat dan saya patut memberikan kepada argumen saya kepada Bapak Oditur, bahwa saya akan mengemukakan bahwa Bapak Oditur memang suka lupa akan apa yang tidak tjotjok dengan itu pendapat, pendapat Bapak Oditur.

Saya sebenarnja tidak mengerti bahwa sudah begitu saja bisa meyakinkan Bapak Oditur bahwa itu pendapat saja ada yang benar. Akan tetapi saya ingin mengemukakan beberapa hal terutama bahwa saksi PERIS PARDEDE juga pada sudut ini tertambat pada keterangannya walaupun memang dia bilang bahwa dia tidak dipaksa, bahwa paksaan itu adalah suatu peristiwa yang agak luas. Dia mengakui tidak dipaksa, tetapi toch dia tambah keterangannya pada sidang ini setjara sumpah, bahwa sumpah yang diutjapkan dengan nada yang tjukup serious. Dia tambah sesuatu yang sangat penting pada hal dia tidak ada hubungan terlebih dahulu sedikitpun, sekurangnya saja tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa ada hubungan dengan tertuduh saudara NJONO dan tambahannya tjotjok dengan apa yang diutjapkan oleh tertuduh pada sidang ini.

Djuga itu disebut Bapak Oditur sekarang ini bahwa saksi ACHMAD MUHAMAD bin JAKUB pada sidang ini bilang bahwa didalam pengakuan pemeriksaan pendahuluan dimana disebut bahwa ACHMAD MUHAMAD bin JAKUB berkejakinan "saya tidak ingat kata-kata yang persis akan tetapi artinja saya ingat berkejakinan bahwa yang menjadi penjelenggara GESTOK adalah PKI" bahwa kalimat ini semata-mata pendapat dari pada pemeriksa yang ditanda tanganinja saja karena ia dipukul, djuga dikatakan dibawah sumpah. Mengenai persoalan bahwa saudara NJONO bilang pada PERIS PARDEDE pada waktu dia turba kedaerah bahwa dia senantiasa harus mendengarkan radio karena mungkin ada apa-apa, tetapi tidak mengherankan bahwa memang itu tertuduh menjangkal bahwa pada waktu tertentu dia sadar dia mengetahui bahwa ada golongan Perwira yang ada apa-apa bisa bertindak pada suatu

waktu, sebenarnya itu kelalaian tanpa mengetahuinya juga sebab kita tidak berkesempatan untuk mentjotjokan itu pembelaan saudara NJONO, hanya mengadakan satu pembetulan kerdja semata-mata membenarkan pikiran saja bahwa dia sampai sekarang ini berkejakinan bahwa bertindak atas dasar kejakinannya bahwa dia bertindak sebagai seorang patriot bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang merugikan negara kita. Mengenai soal ketjil lagi, yang diutjapkan oleh saksi SUJONO bahwa dia selalu melihat rapat-rapat Perwira di Lubang Buaja ada orang-orang preman yang ikut yang dia kemudian mengetahui bahwa ada itu tokoh-tokoh P.K.I. sebenarnya saja ingin mengetahui bagaimana saudara SUJONO bisa mengetahuinya itu dalam keterangan dari pada saksi ini sama sekali adalah semata-mata merupakan pendapat yang tidak merupakan fakta.fakta.

Sekian yang saja kemukakan, terima kasih.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

PUTUSAN

NOMER : PTS - 009/MBI/A/1966.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN J.M.E.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA yang bersidang di Djakarta berturut-turut sedjak tanggal 14 Pebruari 1966 djam 09.00 sampai hari ini, t e l a h memberikan putusan dalam peradilan tingkat pertama dan terakhir mengenai perkara tertuduh :

N a m a	: NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.
Lahir pada tanggal	: 28 Agustus 1925.
Di	: Tjilatjap.
Bertempat tinggal terakhir	: Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta.
A g a m a	: Tidak beragama.
Pekerdjaan terakhir	: — anggota M.P.R.S.
	— „ D.P.R.G.R.
	— „ PB. Front Nasional.
	— „ Dewan Produksi Nasional.
	— dalam PKI sebagai anggota Polit. Biro dan Sekretaris Pertama
	C.D.R.

yang telah ditangkap dan ditahan sedjak tanggal 3 Oktober 1965 berdasarkan surat-surat :

1. Radiogram penangkapan dan penahanan dari KASKOTI No. : TR-1576/DA/11/1965 tanggal 6 - 11 - 1965;
2. Surat Perintah penangkapan dan penahanan sementara dari PANGDAM V/DJAJA selaku PEPERDA DJAJA No. : PRIN-06/11/1965 tanggal 9 - 11 - 1965;
3. Surat Perintah penahanan dari Oditur Djenderal A.D. No. PRIN-5/1/1966 tanggal 27 - 1 - 1966.

MENGINGAT :

1. Penetapan Presiden R.I. No. 16 Tahun 1963 tanggal 14 Desember 1963;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 370 Tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965;
3. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. :
3.1. KEP-03/KOPKAM/1/1966 tanggal 27 — 1 — 1966;
3.2. KEP-05/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 — 1 — 1966.

MEMBATJA :

1. Berkas Perkara dari tertuduh NJONO bin SASTROREDJO yang disusun oleh Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. : 003/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966;
2. Surat Keputusan Penjerahan Perkara dari Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. : KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966;
3. Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. : TUD-001/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966 ;
4. Surat Keputusan tentang Penetapan Hari Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa No. : KEP-002/MBI/A/1966 tanggal 7 Pebruari 1966;
5. Surat Keputusan tentang Penundjukan Pembela bagi tertuduh yang dikeluarkan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa No. : KEP-006/MBI/A/1966 tanggal 12 Pebruari 1966;

MENDENGAR :

Pembatjaan dalam persidangan Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa jang pada pokok-intinja memuat tuduhan :

KESATU : Bahwa IA — TERDAKWA — pada waktu jang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sedikit-tidaknya kira-kira dalam bulan Agustus 1965 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam triwulan ketiga tahun 1965, bertempat dikantor Central Komite Partai Komunis Indonesia jang terletak di Djalan Kramat 81 Djakarta Raya atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum Mahkamah Militer Luar Biasa, bersama-sama dan bersekutu dengan kawan-kawannya separtai/P.K.I. jaitu antara lain dengan :
1. D.N. AIDIT, 2. M.H. LUKMAN, 3. NJOTO, 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. ANWAR SANUSI, 7. REWANG, 8. SUWANDI, (semuanya hingga sekarang belum tertangkap)

dan PERIS PARDEDE telah mengadakan komplotan (permupakatan djahat/samenspanning) untuk melakukan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan (meruntuhkan/omwenteling) Pemerintah Republik Indonesia jang sjah atau untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang telah ada di Indonesia.

KEDUA : Bahwa IA — TERDAKWA — sebagai anggota Politbiro Central Komite Partai Komunis Indonesia dan Sekretaris Pertama Komite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya, sedikit-tidaknya sebagai peserta permufakatan djahat, dalam bulan September 1965 dan pada permulaan bulan Oktober 1965, ditempat-tempat diibu kota Republik Indonesia Djakarta Raya, sebagai pemimpin dan pengatur (leiders en aanleggers) telah melakukan makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah sebagaimana jang telah diuraikan dalam tuduhan PERTAMA dengan melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan jang merupakan permulaan pelaksanaan sebagai perwujudan dari kehendak akan melakukan perbuatan tersebut diatas.

KETIGA : Bahwa IA — TERDAKWA — pada waktu-waktu dan ditempat-tempat serta dalam kedudukannya seperti tersebut dalam Tuduhan KEDUA, telah MEMIMPIN dan MENGATUR pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang telah ada di Indonesia.

Rangkaian tindak pidana sebagaimana jang telah diuraikan dalam Tuduhan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA tersebut diatas jang dilakukan oleh TERDAKWA, dengan mengetahui atau patut menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya Triprogram Pemerintah (Gaja Baru) dalam memperlengkapi sandang-pangan rakyat, penjelenggaraan keamanan rakyat dan Negara, dan perdjjuangan menentang Nekolim, jaitu :

1. TERDAKWA telah dapat menduga sebelumnya, bahwa selama berlakunya "Gerakan 30 September" akan timbul kesulitan-kesulitan ekonomi, karenanya TERDAKWA sebelumnya ternjata antara lain telah berusaha dengan serikat-serikat buruh bersangkutan, agar dapatnja lalu-lintas darat dan udara tetap berdjjalan sebagaimana biasa;
2. TERDAKWA telah memperhitungkan akan timbul kesulitan-kesulitan dalam bidang keamanan selama berlakunya "Gerakan 30 September", jang menurut TERDAKWA akan ditimbulkan oleh unsur-unsur bekas Masjumi dan bekas Partai Murba;
3. TERDAKWA djuga telah menduga sebelumnya, bahwa menurut TERDAKWA selama berlakunya "Gerakan 30 September" jang

merupakan pertentangan dalam negeri, maka pertentangan dalam negeri itu akan lebih menondjol dari pertentangan luar negeri (antara Republik Indonesia dengan Nekolim) maka djika tidak ada penjelesaian jang tepat akan dapat memperlemah perdjjuangan menentang Nekolim.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA tersebut diatas diatur dan diantjam dengan hukuman sebagaimana tertjantum dalam :

a. untuk tuduhan pertama :

Pasal 110 ayat 1 berhubungan dengan pasal 107 dan pasal 108 berhubungan dengan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

b. untuk tuduhan kedua :

Pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

c. untuk tuduhan ketiga :

Pasal 108 ayat 1 sub 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Kesemuanja pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada a., b., dan c. diatas berhubungan dengan pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959.

Mengingat dan memperhatikan :

1. Keppres No. 226 tahun 1963 tanggal 6 Nopember 1963;
2. Penpres No. 16 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963;
3. Keppres No. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965;
4. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-05/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966;

MENUNTUT :

1. Agar perkara TERDAKWA tersebut diatas diperiksa dan diadili dalam persidangan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA karena perbuatan-perbuatan tersebut diatas;
2. Agar TERDAKWA tetap ditahan;
3. Agar dipanggil dan dihadapkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

MENDENGAR :

Eksepsi jang diajukan setjara lisan oleh Pembela didalam sidang tentang pemakaian Penpres No. 16 tahun 1963 jang dianggap oleh Pembela merugikan TERDAKWA berhubung telah keluarnya Undang-Undang No. : 19 tahun 1964 tentang "Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman" dimana terdapat suatu azas jang penting ialah Pengadilan selalu dilakukan dalam dua tingkat dan tentang Kewenangan Mahkamah Militer Luar Biasa;

MENDENGAR :

Tangkisan Oditur terhadap eksepsi Pembela jang pada pokoknja beriakim :

1. Bahwa berdasarkan Keppres No. 226 tahun 1963 Presiden diberi kekuasaan tertinggi untuk mengambil kebidjaksanaan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan hidup Negara dan pengamanan mentjapai tudjuan revolusi Indonesia. Penpres No. : 16 tahun 1963 tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa dikeluarkan dengan pertimbangan kalau terdjadi perkara dalam Negara jang sedang ber-revolusi, bahwa untuk keperluan itu dibentuk suatu badan peradilan khusus jang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan tjepat;
2. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa ini masih berpedoman kepada H.I.R. mengenai hukum Atjaranja, sedang pembuktian mempergunakan Undang-Undang Mahkamah Agung ;
3. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa hanya mengadili perkara-perkara khusus jang ditentukan oleh Presiden dan adalah tidak pada tempatnja kalau kita dalam sidang ini menilai kebidjaksanaan Presiden;

MENIMBANG :

Bahwa terhadap eksepsi Pembela terurai diatas, Mahkamah Militer Luar Biasa MENOLAKNJA dengan alasan-alasan :

1. Mahkamah Militer Luar Biasa berpendapat bahwa dengan diadju-kannya tertuduh kedepan sidang ini tidak dirugikan meskipun telah diundangkan Undang-Undang No: 19 Tahun 1964, sebab sekalipun pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa didasarkan pada tudjuan untuk mengadakan suatu peradilan jang dapat menyelesaikan perkara-perkara khusus dengan tjepat sekali, azas-azas dan sendi-sendi keadilan tidaklah sekali-kali ditinggalkan sehingga hak-hak daripada tertuduh masih tetap dijamin sebagaimana dapat ditemukan dalam Penpres No: 16 Tahun 1963;

Disamping itu, Mahkamah Militer Luar Biasa berada dilingkungan peradilan militer jang berdasarkan Undang-Undang Darurat No: 1 Tahun 1958 dalam atjaranja berpedoman pada H.I.R. jang berlaku dilingkungan peradilan umum dan disegi pembuktiannya memper-lakukan hukum pembuktian Mahkamah Agung, untuk ini ditundjuk-kan surat J.M. Menteri Ketua Mahkamah Agung No: 1281/Sek/5354/65 tanggal 16 Desember 1965 ;

2. Keraguan akan wewenang Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditangkis-djawab sebagai berikut :

- 2.1. Mahkamah Militer Luar Biasa mendasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara dari pada tokoh yang tersangkut atau terlibat didalam petualangan kontra-revolusi G. 30. S./Gestok pada Keputusan Presiden No : 370 Tahun 1965 tertanggal 4 Desember 1965, dalam diktum memutuskan bab Pertama ;
- 2.2. Keputusan Presiden RI No : 370 Tahun 1965 tersebut mengindikasikan dirinya pada Penetapan Presiden RI No : 16 Tahun 1963 tertanggal 24 Desember 1963 yang meskipun tidak memuat pasal dan ayat yang menjatakan/menetapkan adanya kemungkinan untuk mendelegasikan kewenangan Presiden RI kepada orang lain, tetapi tidak pula berisikan sebuah pasal dan sebuah ayatpun yang menentukan larangan pendelegasian itu ;
- 2.3. Bahwa Presiden berkewenangan untuk mengambil kebidjaksanaan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan Negara dan pentjapaian tudjuan revolusi Indonesia, mendasarkan pada segala hukum dari perundang-undangan yang ada dan segala hukum yang bersumber pada djalannya revolusi Indonesia se. bagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden RI No. : 226 Tahun 1963 tertanggal 24 Desember 1963;
- 2.4. Disegi sahnja susunan Mahkamah Militer Luar Biasa yang sekarang bersidang ini, kembali lagi persoalannya kepada Keputusan Presiden RI No : 370 Tahun 1965 tertanggal 4 Desember 1965 tahadi yang menjadi sandaran dari Surat Keputusan Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No : 05/KOPKAM/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966, sedangkan penentuan tertuduh NJONO sebagai tokoh petualangan Kontra-Revolusi G. 30. S./Gestok ditemukan dalam Surat Keputusan Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No : 03/KOPKAM /1/1966 tertanggal 27 Djanuari 1966 sebagai pemenuh sjarat yang ditentukan dalam Keputusan Presiden RI No. : 370 Tahun 1965 tersebut diatas ;
- 2.5. Pada ahirnya persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa ini menjandakan pemeriksaan tertuduh pada :
 - 2.5.1. Surat Keputusan Penjerahan Perkara Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No : KEP-13/KOPKAM/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966, dan
 - 2.5.2. Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No : TUD/001/OM/1966 tertanggal 4 Pebruari 1966 ;

MENDENGAR :

1. pengakuan dan penjangkalan TERDAKWA serta keterangan-kete-

rangan yang diberikan oleh para SAKSI yang telah disumpah dalam persidangan ;

2. keterangan-keterangan para SAKSI setjara tertulis dan dibuat atas sumpah serta dibatjakan di-persidangan ;

MENIMBANG

1. bahwa TERDAKWA m e n j a n g k a l telah merentjanakan atau membuat komplotan untuk menggulingkan Pemerintah yang ada atau melakukan pemberontakan bersendjata, dan menjatakan bahwa :

- 1.1. sidang-sidang Politbiro CC PKI yang diadakan dan dihadiri oleh TERDAKWA dalam bulan Agustus 1965 bukanlah untuk merentjanakan atau membuat Komplotan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah, melainkan mendiskusikan tiga faktor politik, yakni tentang :

- a. sakitnja P.J.M. Presiden yang serius;
- b. adanya rentjana kudeta Dewan Djenderal;
- c. adanya inisiatip segolongan Perwira yang mau bertindak mendahului dan menggagalkan rentjana Dewan Djenderal;

dan keputusan Sidang Politbiro CC PKI pada tanggal 28 Agustus 1965/sidang terakhir adalah :

- a. melaporkan kepada P.J.M. Presiden SUKARNO tentang bahaya kudeta Dewan Djenderal dan mengharap adanya langkah-langkah pentjegahan;
- b. langkah-langkah PKI ditetapkan menunggu sikap P.J.M. Presiden SUKARNO;
- c. menginformasikan kedalam Partai (PKI) adanya bahaya kudeta Dewan Djenderal;

- 1.2. Politbiro CC PKI tidak tjampur tangan dalam „G. 30. S.“ karena berpendapat bahwa „G. 30. S.“ adalah urusan „INTERN ANGKATAN DARAT“ dan karenanja TERDAKWA merasa bertanggung djawab sendiri dalam perbuatan membantu „G. 30. S.“ atas permintaan Lubang Buaja dan terdorong oleh rasa tidak sabar dalam mengikuti garis Politbiro CC PKI.

2. bahwa sangkalan TERDAKWA tersebut dilandasi dengan alasan-alasan :

- 2.1. dikemukakannya sangkalan-sangkalan diatas dimuka sidang-I tanggal 14 Pebruari 1966 dan sebelumnya telah setjara tertulis disampaikan oleh TERDAKWA tertanggal 3 Pebruari 1966 adalah karena pertimbangan-pertimbangan politik dengan mengingat adanya hak-hak membela atau menjangkal dimuka sidang pengadilan;

2.2. yang dimaksudkan dengan pertimbangan-pertimbangan politik adalah bahwa dalam masa epiloog "G. 30. S." dirasakan dan diketahuinja, selama dalam tahanan, adanya kampanye Anti-Komunis dengan dalih "PKI = dalang G. 30. S.";

2.3. dirasakan adanya suasana "komunisto-phobi" selama dalam tahanan, tetapi sebaliknya diakui oleh TERDAKWA didalam sidang, bahwa suasana pemeriksaan oleh Oditur adalah baik/Oditur memeriksa setjara "nuchter" sekali;

2.4. TERDAKWA dengan alasan yang dikemukakannya untuk merobah keterangan yang telah diberikannya pada pemeriksaan pendahuluan oleh Oditur, TERDAKWA hendak mengemukakan adanya "keadaan yang memaksa" (OVERMACHT) atas dasar mana ia terpaksa mengaku;

MENIMBANG :

Bahwa alasan-alasan yang dipergunakan oleh TERDAKWA untuk mengemukakan sangkalannya tersebut, ialah dengan pertimbangan-pertimbangan politik yang diartikan adanya "Kampanje Anti Komunis" dan "Suasana komunisto-phobi" selama dalam tahanan serta pada saat-saat pemeriksaan pendahuluan bukan oleh Oditur, sehingga dianggap perlu oleh TERDAKWA (atau TERDAKWA terpaksa) untuk merubah sebagian daripada keterangan-keterangannya dimuka sidang, maka Mahkamah meninjau dari :

1. Sudut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, ialah :

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal ajaran tentang "OVERMACHT" yang dirumuskan didalam pasal 48 KUHP. Menurut doktrin, overmacht mempunyai tiga bentuk yaitu :

- a. absolute overmacht ;
- b. relatieve overmacht ;
- c. noodtoestand.

ad. a : dalam bentuk ini orang yang berbuat, tidak dapat berbuat lain ketjuali apa yang menimpa dirinya ;
sipembuat (de dader) disini hanya merupakan alat belaka dan karenanja tidak dapat dipersalahkan kepadanya ;

ad. b : dalam bentuk ini orang yang berbuat masih dapat berbuat lain daripada apa yang telah dilakukannya tetapi dengan resiko yang sangat besar bila ia toch melaksanakannya ;

ad. c : Noodtoestand :

- c.1. ada dalam keadaan pertentangan antara dua kepentingan hukum (rechtsbelangen) ;
- c.2. ada dalam keadaan pertentangan antara kepentingan hukum (rechtsbelang) dengan kewadajiban berdasarkan hukum (rechtsplicht) ;

c.3. ada dalam keadaan pertentangan antara dua "rechts-plichten" ;

Kondaan-kondaan terpaksa seperti tersebut pada uraian ad. a, b dan ad. c diatas tidak terdapat sama sekali pada TERDAKWA ;
Demikian djuga keadaan terpaksa dapat terdiri atas :

- physische dwang — atau —
- psychische dwang

yang didalam rangka ini djuga tidak terdapat pada diri TERDAKWA ;

2. Dari sudut fakta yang diketemukan :

a. selain daripada itu, dari 6 (enam) orang SAKSI yang dihadapkan dimuka sidang Mahkamah, tidak seorangpun dari mereka yang merubah pengakuan/penjaksiannya yang telah diberikannya terdahulu kepada Oditur, dan tetap memberikan kesaksiannya sesuai dengan apa yang telah mereka berikan terdahulu kepada Oditur ;

b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh para SAKSI ternyata tjtjok/sesuai dengan keterangan-keterangan TERDAKWA yang diberikannya pada pemeriksaan pendahuluan oleh Oditur yang dihadapkan Mahkamah dikatakannya tidak benar itu ;

MENIMBANG :

Dengan sandaran peninjauan seperti terurai diatas, yaitu dari segi :

- 1. ilmu pengetahuan (hukum pidana) ;
- 2. keterangan-keterangan SAKSI-SAKSI yang diberikan dimuka sidang Mahkamah dan yang dibenarkan oleh TERDAKWA sendiri ;
- 3. pengakuan tidak terasa adanya suasana "komunisto-phobi" oleh TERDAKWA pada saat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Oditur ;

maka Mahkamah berpendapat bahwa alasan-alasan yang dipergunakan oleh TERDAKWA, bahwasanja selama dalam tahanan pada masa epiloog "G.30.S." merasa adanya kampanye politik Anti-Komunis dan PKI sebagai Dalang "G.30.S.", yang menjebebak TERDAKWA mengubah/menjangkal sebagian daripada keterangan-keterangan yang telah pernah diberikan dan dibuatkan Berita-berita Atjara untuk itu dan telah ditanda tangani sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan politik seperti dimaksud diatas, TIDAK DAPAT DITERIMA oleh karena tidak berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana tertjantum/ dimaksudkan dalam pasal 48 KUHP serta mengingat titik-titik 2 dan 3 diatas, dan dengan demikian Mahkamah memutuskan MENOLAK alasan-alasan yang dipakai oleh TERDAKWA dalam mengemukakan sangkalannya dan dengan demikian Mahkamah tetap mempergunakan :

- 1. Berita-berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah ditanda tangani sendiri oleh TERDAKWA ;

2. Pengakuan, pengakuan dan pernyataan TERDAKWA dimuka sidang, sebagai hal-hal yang merupakan sebagian dari pada pedoman untuk menjatuhkan KEPUTUSAN (VONNIS) didalam sidang ini;

MENIMBANG :

Bahwa meskipun demikian keputusan Mahkamah, mengingat tugasnya adalah untuk mentjari materiele-waarheid, maka Mahkamah merasa perlu untuk mengudji kedua keputusan tersebut dengan fakta-fakta yang sungguh-sungguh telah terdjadi dan yang telah ditemui didalam sidang;

MENIMBANG :

Bahwa Pembela dalam pleidooinja telah mengemukakan bahwa inti dari keputusan Politbiro CC PKI, sesuai dengan pengakuan TERDAKWA didepan sidang adalah „wait and see”, sebaliknya diakui oleh TERDAKWA didalam pemeriksaan pendahuluan, yang telah ditanda tangani olehnya yang menurut keterangannya sendiri didepan sidang Mahkamah telah diberikan tanpa adanya paksaan dari Oditur yang memeriksanya, keputusan Politbiro tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan suara bulat membenarkan adanya aksi „mendahului” rentjana Dewan Djenderal dalam bentuk operasi militer dan pembentukan Dewan Revolusi untuk menggantikan Kabinet Dwikora ;
2. Menetapkan pembagian pekerdjaan sebagai berikut :
 - 2.1. soal-soal militer diserahkan kepada D.N. AIDIT ;
 - 2.2. soal-soal politik umum seperti komposisi Dewan Revolusi dan pembagian kader-kader untuk daerah-daerah diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro D.N. AIDIT, MH. LUKMAN dan NJOTO ;
 - 2.3. pembentukan lebih kurang 2.000 (dua ribu) tenaga tjadangan tempur yang mendapat latihan di Lobang Buaja untuk daerah Djakarta Raya diserahkan kepada NJONO ;
 - 2.4. masing-masing supaya segera di pos pekerdjaannya dengan ketentuan bahwa keputusan tentang operasi militer hanya menjadi pengetahuan anggota Politbiro biro untuk mentjegah kebotjoran;

MENIMBANG :

1. bahwa fakta-fakta yang telah ditemui didalam sidang yang terdjadi sesudah keputusan itu diambil jaitu tentang rapat terachir tanggal 28 Agustus 1965, adalah sebagai berikut :
 - 1.1. bahwa TERDAKWA atas pertanyaan Mahkamah menerangkan bahwa sidang Polit Biro tanggal 28 Agustus 1965 itu adalah sidang terachir dan sudah itu tidak diadakan sidang lagi ;
 - 1.2. TERDAKWA menerangkan bahwa ia sedjak permulaan September telah melakukan kegiatan-kegiatan menyiapkan tenaga-

tenaga untuk dilatih di Lobang Buaja, yang ia sebut tenaga tjadangan untuk sewaktu-waktu dapat di gunakan sebagai bantuan operasi militer itu, keterangan man telah diperkuat oleh kesaksian dibawah sumpah didepan Mahkamah dari saksi PERIS PARDEDE yang menjatakan tidak pernah lagi melihat TERDAKWA setelah sidang tersebut dan menduga bahwa TERDAKWA sibuk dengan tugasnya ;

- 1.3. bahwa menurut TERDAKWA, ia dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini berhubungan dengan SUKATNO dan kepada SUKATNO ia perbantukan beberapa tenaga, jalah NICO dan DJOHAR dari Staf CDR dan KASIMAN dari SOBSI daerah Djakarta Raya; keterangan inipun telah diperkuat oleh kesaksian dibawah sumpah didepan Mahkamah dari saksi ex. Major Udara SUJONO alias PAK DOJJO yang membenarkan adanya tiga tenaga yang diperbantukan oleh TERDAKWA tersebut ;
- 1.4. bahwa tenaga tjadangan yang telah dilatih di Lobang Buaja itu menurut pengakuan TERDAKWA didepan sidang berdjumlah sekitar 2.000 (dua ribu) orang lebih, djumlah mana adalah sama dan sesuai dengan djumlah yang telah ditetapkan oleh Polit Biro;
- 1.5. bahwa SAKSI dibawah sumpah PERIS PARDEDE telah memberikan kesaksiannya bahwa ia mendengar dari SUDISMAN anggota Polit Biro bahwa Ketua D.N. AIDIT tjondong pada aksi „mendahului” rentjana Dewan Djenderal dalam bentuk operasi militer dan pembentukan Dewan Revolusi;
- 1.6. bahwa keterangan tambahan dari saksi PERIS PARDEDE yang menerangkan bahwa ia mendapat tegoran dari LUKMAN, yang djuga disinggung oleh Pembela dalam dupliknja, haruslah dilihat dalam hubungan dengan keputusan Polit Biro diatas yang menjatakan bahwa keputusan tentang operasi militer hanya menjadi pengetahuan anggota Polit Biro untuk mentjegah kebotjoran, dan sebagaimana telah diterangkan oleh SAKSI didepan sidang, saksi PERIS PARDEDE belum menjadi anggota Polit Biro tetapi baru merupakan seorang tjalon anggota sadja.
- 1.7. bahwa menurut keterangan SAKSI dibawah sumpah ex Major Udara SUJONO alias PAK DOJJO, ia melihat datangnya konsep tentang komposisi Dewan Revolusi adalah dari SJAM, seorang kepertjajaan D.N. AIDIT.
- 1.8. bahwa menurut keterangan SAKSI dibawah sumpah ex Major Udara Sujono alias Pak Djojo rapat-rapat yang diadakan oleh mereka (militer) selalu dihadiri oleh SJAM seorang kepertjajaan D.N. AIDIT, bahkan merupakan faktor yang menentukan oleh karena bila SJAM tidak hadir maka rapat senantiasa dibatalkan;

2. bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang telah ditemukan didalam sidang sebagaimana uraian diatas, yang seluruhnya adalah sesuai dengan isi keputusan Polit Biro beserta perintjannya, yang telah diberikan oleh TERDAKWA dalam keadaan tenang dalam pemeriksaan pendahuluan, dengan penuh kejakinan Mahkamah mengambil kesimpulan, bahwa keputusan inilah sesungguhnya telah diambil oleh Polit Biro dalam sidangnya tanggal 28 Agustus 1965 ;

MENIMBANG :

Bahwa keterangan SAKSI PERIS PARDEDE alias ABDULAH yang diberikan atas sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. beberapa hari sesudah tanggal 17 Agustus 1965 pernah didalam suatu sidang Polit Biro, sidang mana oleh SAKSI disebut Sidang Polit Biro yang diperluas, karena selain dihadiri oleh anggota-anggota Polit Biro juga dihadiri oleh SAKSI sendiri sebagai Tjalon Anggota Polit Biro dan SUWANDI sebagai Sekretaris I. C.D.B. Djawa Timur ;
2. bahwa seluruhnya yang hadir adalah 1. D.N. AIDIT, 2. MH LUKMAN, 3. NJOTO, 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. REWANG, 7. NJO-NO, 8. ANWAR SANUSI, 9. SAKSI SENDIRI, 10. SUWANDI. Si- dang ini dipimpin oleh Ketua D.N. AIDIT ;
3. bahwa sidang ini selain mendengarkan hasil kunjungan D.N. AIDIT keluar Negeri juga mendengarkan dan memberitarkan info yang diadjudkan oleh D.N. AIDIT, sebagai berikut :
 - 3.1. bahwa P.J.M. Presiden pada tanggal 4 Agustus 1965 jatuh ping- san dan menurut keterangan Dokter ahli, kalau terdjadi sekali lagi akan lumpuh atau meninggal ;
 - 3.2. bahwa tentang sakitnya P.J.M. Presiden ini dikalangan Pimpinan Angkatan Darat juga telah dibicarakan ;
 - 3.3. bahwa telah terbentuk Dewan Djenderal yang dipimpin oleh Djenderal A.H. NASUTION dan Djenderal A. YANI, yang ber- tudjuan mengambil oper pemerintahan (coup) djika Presiden meninggal dunia dan sesudah itu akan membasmi Komunis ;
 - 3.4. bahwa ada Perwira-perwira yang berfikiran madju yang tidak setuju akan Dewan Djenderal ini dan menyatakan keinginan- nya akan mendahului Dewan Djenderal dan mereka mengharap- kan persetujuan P.K.I. ;
4. bahwa karena hal tersebut D.N. AIDIT menanyakan kepada sidang apakah dapat menyetujui djika Perwira-Perwira yang berfikiran madju itu mendahului Dewan Djenderal ;
5. bahwa akibat pertanyaan tersebut timbul tanggapan-tanggapan se- bagai berikut :
 - 5.1. Perwira-perwira yang berfikiran madju itu dari mana saja ;

- 5.2. bagaimana untung dan ruginya djika mendahului ;
- 5.3. apakah hal ini telah dibicarakan oleh Dewan Harian Polit Biro ;
- 5.4. bagaimana pendapat Dewan Harian atau Ketua sendiri ;

6. bahwa atas pertanyaan-pertanyaan ini D.N. AIDIT pada pokoknya menjawab sebagai berikut :
 - 6.1. mengenai Perwira-Perwira yang berfikiran madju adalah dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara, yang penting diketahui ialah kekuatan mereka tjukup baik di Djawa ketjuali di Dja- karta lemah, yang terkuat di Djawa Tengah. Menurut pendapat D.N. AIDIT siapa yang menguasai Djawa berarti menguasai seluruh Indonesia ;
 - 6.2. mengenai untung ruginya oleh D.N. AIDIT dijawab bahwa ke- dua-duanya ada untung dan ruginya. Soalnya yang penting ialah siapa yang lebih dahulu mengetahui meninggalnya Presiden itu- lah yang mempunyai inisiatif dan tentulah mereka yang men- dahului. Kalau saja pribadi tentulah lebih baik mendahului ;
7. bahwa akhirnya D.N. AIDIT menanyakan pada sidang apakah dapat menyetujuinya atau tidak kalau mendahului. Karena tidak adanya jawaban segera dari hadirin maka ditanyakan dan disarankan oleh- nya, apakah setuju kalau diserahkan persoalannya pada Dewan Harian dan kemudian diketok palu sidang sebagai tanda bubar se- telah ada suara setuju ;
8. bahwa mengingat seriusnya persoalan ini maka pada beberapa hari berikutnya saksi menemui SUDISMAN di Kantor CC PKI untuk menanyakan keputusan Rapat Dewan Harian, apakah Dewan Harian sudah mengambil keputusan tentang mendahului atau didahului ;
9. bahwa pertanyaan ini dijawab oleh SUDISMAN dengan nada yang serius bahwa itu sudah diputuskan tetapi tidak diterangkan oleh sidang mana, kapan dan dimana, sebab ia sendiri tidak hadir dalam sidang itu ;
10. bahwa selanjutnya SUDISMAN menjelaskan :
 - 10.1. bahwa menurut info yang diterima oleh Dewan Harian Polit Biro, Dewan Djenderal akan bertindak tidak sesudah Presiden meninggal tetapi pada sekitar Hari Angkatan Perang ;
 - 10.2. bahwa Perwira-Perwira yang berpikiran madju ideologis tidak kuat seperti kader-kader PKI, karena mereka belum pernah menerima pendidikan Partai, tetapi berputusan tetap akan mendahului sesuai dengan keinginan Ketua D.N. AIDIT ;
 - 10.3. bahwa untuk mengatasi kelemahan para Perwira dan Pradjurit di Djakarta maka kepada mereka akan diperbantukan sedjum- lah Pemuda Rakjat yang sudah terlebih dahulu dilatih kemiliter- an walaupun ini tidak sesuai dengan keinginan para Perwira dan Pradjurit tersebut dan untuk keperluan itu suatu Panitia Aksi telah dibentuk yang diketuai oleh NJONO ;

2. bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang telah ditemukan didalam sidang sebagaimana uraian diatas, yang seluruhnya adalah sesuai dengan isi keputusan Polit Biro beserta perintjannya, yang telah diberikan oleh TERDAKWA dalam keadaan tenang dalam pemeriksaan pendahuluan, dengan penuh kejakinan Mahkamah mengambil kesimpulan, bahwa keputusan inilah sesungguhnya telah diambil oleh Polit Biro dalam sidangnya tanggal 28 Agustus 1965 ;

MENIMBANG :

Bahwa keterangan SAKSI PERIS PARDEDE alias ABDULAH yang diberikan atas sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. beberapa hari sesudah tanggal 17 Agustus 1965 pernah didalam suatu sidang Polit Biro, sidang mana oleh SAKSI disebut Sidang Polit Biro yang diperluas, karena selain dihadiri oleh anggota-anggota Polit Biro juga dihadiri oleh SAKSI sendiri sebagai Tjalon Anggota Polit Biro dan SUWANDI sebagai Sekretaris I. C.D.B. Djawa Timur ;
2. bahwa seluruhnya yang hadir adalah 1. D.N. AIDIT, 2. MH LUKMAN, 3. NJOTO, 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. REWANG, 7. NJO-NO, 8. ANWAR SANUSI, 9. SAKSI SENDIRI, 10. SUWANDI. Si- dang ini dipimpin oleh Ketua D.N. AIDIT ;
3. bahwa sidang ini selain mendengarkan hasil kunjungan D.N. AIDIT keluar Negeri juga mendengarkan dan memberitarkan info yang diadjudkan oleh D.N. AIDIT, sebagai berikut :
 - 3.1. bahwa P.J.M. Presiden pada tanggal 4 Agustus 1965 jatuh ping- san dan menurut keterangan Dokter ahli, kalau terdjadi sekali lagi akan lumpuh atau meninggal ;
 - 3.2. bahwa tentang sakitnya P.J.M. Presiden ini dikalangan Pimpinan Angkatan Darat juga telah dibicarakan ;
 - 3.3. bahwa telah terbentuk Dewan Djenderal yang dipimpin oleh Djenderal A.H. NASUTION dan Djenderal A. YANI, yang ber- tudjuan mengambil oper pemerintahan (coup) djika Presiden meninggal dunia dan sesudah itu akan membasmi Komunis ;
 - 3.4. bahwa ada Perwira-perwira yang berfikiran madju yang tidak setuju akan Dewan Djenderal ini dan menyatakan keinginan- nya akan mendahului Dewan Djenderal dan mereka mengharap- kan persetujuan P.K.I. ;
4. bahwa karena hal tersebut D.N. AIDIT menanyakan kepada sidang apakah dapat menyetujui djika Perwira-Perwira yang berfikiran madju itu mendahului Dewan Djenderal ;
5. bahwa akibat pertanyaan tersebut timbul tanggapan-tanggapan se- bagai berikut :
 - 5.1. Perwira-perwira yang berfikiran madju itu dari mana saja ;

- 5.2. bagaimana untung dan ruginya djika mendahului ;
- 5.3. apakah hal ini telah dibicarakan oleh Dewan Harian Polit Biro ;
- 5.4. bagaimana pendapat Dewan Harian atau Ketua sendiri ;

6. bahwa atas pertanyaan-pertanyaan ini D.N. AIDIT pada pokoknya menjawab sebagai berikut :
 - 6.1. mengenai Perwira-Perwira yang berfikiran madju adalah dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara, yang penting diketahui ialah kekuatan mereka tjukup baik di Djawa ketjuali di Dja- karta lemah, yang terkuat di Djawa Tengah. Menurut pendapat D.N. AIDIT siapa yang menguasai Djawa berarti menguasai seluruh Indonesia ;
 - 6.2. mengenai untung ruginya oleh D.N. AIDIT dijawab bahwa ke- dua-duanya ada untung dan ruginya. Soalnya yang penting ialah siapa yang lebih dahulu mengetahui meninggalnya Presiden itu- lah yang mempunyai inisiatif dan tentulah mereka yang men- dahului. Kalau saja pribadi tentulah lebih baik mendahului ;
7. bahwa akhirnya D.N. AIDIT menanyakan pada sidang apakah dapat menyetujuinya atau tidak kalau mendahului. Karena tidak adanya jawaban segera dari hadirin maka ditanyakan dan disarankan oleh- nya, apakah setuju kalau diserahkan persoalannya pada Dewan Harian dan kemudian diketok palu sidang sebagai tanda bubar se- telah ada suara setuju ;
8. bahwa mengingat seriusnya persoalan ini maka pada beberapa hari berikutnya saksi menemui SUDISMAN di Kantor CC PKI untuk menanyakan keputusan Rapat Dewan Harian, apakah Dewan Harian sudah mengambil keputusan tentang mendahului atau didahului ;
9. bahwa pertanyaan ini dijawab oleh SUDISMAN dengan nada yang serius bahwa itu sudah diputuskan tetapi tidak diterangkan oleh sidang mana, kapan dan dimana, sebab ia sendiri tidak hadir dalam sidang itu ;
10. bahwa selanjutnya SUDISMAN menjelaskan :
 - 10.1. bahwa menurut info yang diterima oleh Dewan Harian Polit Biro, Dewan Djenderal akan bertindak tidak sesudah Presiden meninggal tetapi pada sekitar Hari Angkatan Perang ;
 - 10.2. bahwa Perwira-Perwira yang berpikiran madju ideologis tidak kuat seperti kader-kader PKI, karena mereka belum pernah menerima pendidikan Partai, tetapi berputusan tetap akan mendahului sesuai dengan keinginan Ketua D.N. AIDIT ;
 - 10.3. bahwa untuk mengatasi kelemahan para Perwira dan Pradjurit di Djakarta maka kepada mereka akan diperbantukan sedjum- lah Pemuda Rakjat yang sudah terlebih dahulu dilatih kemiliter- an walaupun ini tidak sesuai dengan keinginan para Perwira dan Pradjurit tersebut dan untuk keperluan itu suatu Panitia Aksi telah dibentuk yang diketuai oleh NJONO ;

- 10.4. bahwa karena nama Junta Militer tidak lagi populer maka dipilih nama Dewan Revolusi sebagai nama dari gerakan ini, seperti halnya di Kashmir;
- 10.5. bahwa tanggal mendahului belum dipastikan karena tergantung dari persiapan dan pelaksanaannya;
11. bahwa pada hari berikutnya saksi menemui M.H. LUKMAN di Sekretariat CC. PKI untuk meminta penjelasan tentang apa yang telah dijelaskan oleh SUDISMAN, yang oleh LUKMAN dijawab dengan marah-marah supaya jangan bertanya-tanya lagi tentang hal yang telah dijelaskan oleh SUDISMAN dan bahwa keputusan adalah pikiran AIDIT sebelum dibawa kesidang;
12. a. bahwa tanggal 29-8-1965 SUDISMAN memberikan briefing di Kantor Sekretariat CC. PKI kepada Anggota-anggota Sekretariat yakni:
1. SIDARTOJO, 2. DJOKO SUDJONO dan 3. SAKSI sendiri, dalam briefing itu selain membagi-bagi tugas untuk membantu daerah-daerah dalam rangka turba yang biasa dilakukan dalam bulan-bulan Mei dan Oktober, juga diberikan tugas untuk memberikan info mengenai coup Dewan Djenderal dan supaya anggota-anggota tetap waspada;
 - b. bahwa dalam pembagian tugas ini untuk SAKSI sudah ada ketentuan yakni ke Sumatera Timur, SIDARTOJO ke Djawa Timur dan DJOKO SUDJONO ke Djawa Tengah;
 - c. bahwa dalam pada itu juga dijelaskan bahwa mengenai NJONO sudah ada tugas di Jakarta sebagai Ketua Panitia Aksi, walaupun NJONO pada waktu itu tidak hadir;
13. bahwa khusus kepada SAKSI, SUDISMAN menugaskan untuk pergi di Sumatera Timur dan agar SAKSI:
- a. mendengar setiap hari siaran RRI Pusat agar mengetahui kejadian-kejadian penting yang terjadi di Ibu Kota;
 - b. kalau mendengar sesuatu peristiwa segera merundingkan dengan Sekretariat CDB apa yang harus diperbuat dan menemui NJOTO yang sudah akan tiba disana sebelumnya;
 - c. petunduk-petunduk untuk Medan sudah disampaikan kepada NASIR dan supaya berhubungan dengan Djalahudin Jusuf saja
 - d. Di Medan hanya untuk 1 bulan sesudah itu kembali;
14. bahwa menurut kesimpulan SAKSI sudah ada keputusan untuk mendahului karena SUDISMAN mengatakan AIDIT tjonjong pada tindakan mendahului sedang dalam Partai adalah merupakan kelaziman bahwa kehendak dari Ketua itu merupakan keputusan dan selalu mengikat Partai;

MENIMBANG :

Bahwa mengenai SAKSI ini Mahkamah akan menentukan nilai apa yang dapat diberikan pada keterangan-keterangannya menurut hukum pembuktian, sebagai berikut :

1. Mengenai sub. 1 s/d 7.

Bahwa hal ini merupakan kesaksian penuh karena terutama mengenai fakta-fakta yang telah diakui oleh TERDAKWA sendiri dan yang dialami oleh SAKSI sendiri yaitu, tentang adanya rapat Polit Biro yang membicarakan tentang sakitnya P.J.M. Presiden yang serius, adanya Dewan Djenderal yang akan mengadakan kudeta, golongan perwira yang tidak menyetujui Dewan Djenderal dan yang ingin mendahului rentjana kudeta tersebut, serta kemungkinan mana yang lebih baik mendahului atau didahului sedangkan AIDIT pribadi lebih setuju kalau mendahului;

2. Mengenai Sub. 8 s/d 13.

- 2.1. bahwa dalam hal ini kesaksian yang diberikannya tidak dialaminya sendiri melainkan didengarnya dari orang lain yaitu SUDISMAN Sekretaris CC PKI merangkap anggota Polit Biro oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan apakah keterangan tersebut merupakan de auditu atau tidak;
- 2.2. bahwa kesaksian de auditu adalah apabila saksi menyatakan telah melihat sendiri sesuatu hal, sedangkan sebenarnya ia mendengarnya dari orang lain yang telah melihatnya sendiri;
- 2.3. bahwa i.e. kesaksian yang diberikan PERIS PARDEDE, adalah mengenai suatu hal yang didengarnya dari SUDISMAN yang mendengarnya atau melihatnya sendiri yaitu terutama mengenai AIDIT yang tjonjong untuk mendahului dan NJONO telah diberi tugas sebagai Ketua Panitia Aksi;
- 2.4. bahwa oleh karena itu kesaksian tersebut bukan merupakan keterangan de auditu;

3. Mengenai sub. 14.

- 3.1. bahwa mengenai hal ini Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keterangan ini merupakan suatu mening atau gissing yang berdasarkan fs. dalam H.I.R. tidak dapat diterima sebagai alat bukti;
- 3.2. bahwa Mahkamah berpendapat keterangan ini bukan suatu me-atau gissing yang berdasarkan fs. dalam H.I.R. tidak dapat dilihatnya sendiri, melainkan suatu kesimpulan yang diambil dari 2 facta yaitu:
 - a. bahwa pendapat AIDIT adalah pendapat Partai;
 - b. bahwa SUDISMAN mengatakan AIDIT tjonjong untuk men-

dahului, sesuai dengan apa yang saksi sendiri juga dengar dalam salah satu rapat;

- 3.3. bahwa oleh karena itu Mahkamah berpendapat keterangan saksi PERIS PARDEDE dalam keseluruhannya merupakan petunjuk yang ke 2 yang memperkuat petunjuk ke 1 yang telah diuraikan diatas;

MENIMBANG :

Bahwa selanjutnya SAKSI ex. Major Udara SUJONO alias PAK DOJJO yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- a. bahwa benar SAKSI telah mengadakan latihan-latihan kemiliteran di Lobang Buaja ;
- b. bahwa mula-mula latihan-latihan tersebut diadakan dalam rangka Nadahanrev yaitu latihan Hansip Angkatan Udara untuk memenuhi instruksi atasannya untuk menambah kekuatan dalam pangkalan-pangkalan dengan tenaga Hansip A.U. ;
- c. bahwa kemudian setelah melatih 6 (enam) angkatan SAKSI mendapat info terutama dari Angkatan Darat maupun dari J.M. PANGAU tentang adanya gerakan subversi yang akan merobohkan Pemerintah Republik Indonesia berhubungan dengan sakitnya P.J.M. Presiden ;
- d. bahwa pada tanggal 6 September 1965 atas undangan ex. Kolonel Latief SAKSI menghadiri rapat di rumah ex. Kapten Suradi ;
- e. bahwa dalam rapat tersebut ex. Letnan Kolonel Untung menguraikan tentang sakitnya P.J.M. Presiden ;
- f. bahwa dalam rapat tersebut SAKSI melihat adanya 2 orang preman yang semula diduga adalah kawan-kawan dari Angkatan Darat, tetapi ternyata kemudian diketahui dengan pasti bahwa mereka adalah tokoh-tokoh PKI yang bernama SJAM atau SUGITO dan PONO, kedua tokoh mana memberikan penjelasan bahwa dengan sakitnya P.J.M. Presiden pasti akan diambil kesempatan oleh pihak Kontra Revolusi dalam negeri untuk merebut kekuasaan ;
- g. bahwa tanggal 13 September 1965 diadakan lagi rapat di rumah ex. Kol. Latief dimana ex. Let. Kol. Untung lagi memberikan penjelasan tentang sakitnya P.J.M. Presiden, demikian pula SJAM dan PONO telah menjebut-jebut adanya rentjana dari Dewan Djenderal ;
- h. bahwa SJAM dalam rapat-rapat tersebut sebagai tokoh PKI mempunyai peranan yang penting, karena ketika akan diadakan lagi suatu rapat pada tanggal 15 September 1965, rapat tersebut dibatalkan karena SJAM tidak hadir ;
- i. bahwa kemudian pada tanggal 23 September diadakan rapat di rumah SJAM, dimana ex. Letnan Kolonel Untung menyatakan persiapan-persiapan kekuatan yang akan dipergunakan untuk menentang

Dewan Djenderal telah selesai, dan menyatakan pula tentang adanya latihan-latihan Hansip di Lubang Buaja ;

- j. bahwa SJAM dalam rapat tersebut menegaskan perlunya menunggu saat untuk menghimpun kekuatan, yaitu untuk Daerah Djakarta oleh ex. Kolonel Latief sedangkan dari luar daerah oleh ex. Letnan Kolonel Untung, kekuatan-kekuatan mana akan datang ke Djakarta pada tanggal 27 September ;
- k. bahwa pada tanggal 26 September 1965 diadakan lagi rapat di rumah ex. Kolonel Latief, yang seperti dalam semua rapat-rapat terdahulu dihadiri oleh ex. Letnan Kolonel Untung, SJAM dan PONO ;
- l. bahwa dalam rapat tersebut dimaksudkan bagi semua pelaksana yang mengikuti gerakan menentang Dewan Djenderal ;
- m. bahwa dalam rapat tersebut ketika SAKSI mau kembali, ex. Kolonel Latief mengatakan tetapnya rentjana akan dilantarkan walaupun P.J.M. Presiden tak menjetudjuinnya, sesuai dengan pendapat Sjam yang menyatakan apabila perlu maka P.J.M. Presiden akan disingkirkan ;
- n. bahwa dalam rapat tersebut ex. Kolonel Latief menjinggung-njinggung tentang usaha ex. Kapten Suradi yang telah berhasil menghubungi tokoh-tokoh dari Ormas-Ormas P.K.I. untuk mendapat latihan-latihan di Lubang Buaja, tenaga mana kemudian akan dipergunakan untuk memperkuat sektor-sektor ;
- o. bahwa pada tanggal 28 September 1965 sore Ormas-Ormas tersebut telah datang untuk dilatih sebanyak 1.500 orang ;
- p. bahwa latihan di Lubang Buaja tersebut pihak Ormas-Ormas telah mengirimkan sebagai wakilnya. Kasiman (wakil buruh) Nicolas dan Djohar (wakil Pemuda) untuk mengkoordinir dan mengusahakan keperluan mereka sehari-hari ;
- q. bahwa latihan-latihan yang diadakan terakhir ini dari tanggal 28 sampai tanggal 30 September 1965 khusus untuk mengadakan gerakan anti Dewan Djenderal ;
- r. bahwa rapat tanggal 29 September 1965 di Lubang Buaja oleh ex. Kolonel Latief diperkenalkan Komandan-Komandan pelaksana dari Bataljon 454/Diponegoro dan Bataljon 530/Brawidjaja dan beberapa orang sipil diantaranya juga SJAM dan PONO ;
- s. bahwa dalam rapat tersebut SJAM menjelaskan kekuatan sudah cukup karena sudah berjumlah 1.500 orang, hanya menurut ex. Kolonel Latief mengenai tank dan panser belum mendapat bantuan oleh karena mana ex. Kapten Suradi ditugaskan untuk menghubungi ;
- t. bahwa ex. Kolonel Latief ditugaskan sebagai Panglima Komando Divisi Ampera dan gerakan Takari sedangkan ex. Lettu Dularief adalah Komandan pasukan Pasopati dengan tugas mengadakan pen-tjulikan dan pembunuhan ;

- u. bahwa pada tanggal 30 September 1965 diadakan rapat di Lubang Buaja yang dihadiri lengkap oleh para pelaksana dalam rapat mana ditentukan sasaran-sasaran dari gerakan Anti Dewan Djenderal dan ditetapkan hari H pada tanggal 1 Oktober dan Djam D pada djam 04.00 ;
- v. bahwa pemimpin-pemimpin yang perlu diamankan akan ditempatkan di Kompleks Halim, antara lain AIDIT, NJOTO, ALI, LUKMAN, SUBANDRIO dan P.J.M. Presiden ;
- w. bahwa pada djam 22.00 hari itu juga ex. Brigadir Djenderal SOE-PARDJO dan SAKSI diminta untuk menjemput AIDIT di rumah SJAM ;
- x. bahwa setelah sampai di rumah SJAM SAKSI melihat Brigadir Djenderal PRANOTO disitu, kemudian bersama-sama dengan AIDIT dan Brigadir Djenderal PRANOTO berangkat pergi ke Kompleks Halim di rumah Serma SUWARDI ;
- y. bahwa pada djam 09.00 P.J.M. Presiden tiba di rumah Komodor SUSANTO ;
- z. bahwa saksi menerangkan tak kenal pada SUKATNO dan menegaskan sekali lagi latihan pada tanggal 28 - 30 September 1965 diadakan atas permintaan Ormas-Ormas P.K.I. bahkan tanpa orang-orang yang ditunjuk oleh Ormas-Ormas P.K.I. sebagai wakil yaitu NICO, DJOHAR dan KASIMAN latihan-latihan tersebut tak dapat diselenggarakan ;

MENIMBANG :

1. bahwa terhadap keterangan SAKSI yang diuraikan diatas Mahkamah menilainya sebagai suatu petunjuk menurut hukum (yang ke-3) yang menunjukkan telah terjadinya suatu kejahatan sebagaimana diuraikan dalam tuduhan Pertama ;
2. bahwa yang diuraikan oleh SAKSI adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian dan/atau keadaan-keadaan yang begitu sesuai dan erat hubungannya dengan kejahatan itu sendiri, yaitu :
 - 2.1. info tentang sakitnya Presiden dan adanya Dewan Djendral yang ingin mempergunakan kesempatan ini untuk merobohkan Pemerintah/mengadakan coup d'etat, (lihat sub : c) ;
 - 2.2. adanya segolongan Perwira-Perwira yang ingin mendahului kudeta tersebut dengan mengadakan gerakan Anti Dewan Djendral dalam bentuk operasi militer kemudian mendemisionerkan kabinet (sub : q, t, o) ;
 - 2.3. peranan P.K.I. dengan adanya tokoh-tokoh yang ikut menentukan tentang tjara dan bilamana operasi militer itu akan dilantjarkan (sub : f, p, u, w, x) ;

- 2.4. diadakannya latihan-latihan di Lubang Buaja atas permintaan Ormas-Ormas PKI dengan maksud sebagai bantuan tempur pada operasi militer yang akan dilantjarkan sebagai gerakan Anti Dewan Djendral ;

MENIMBANG :

Keterangan saksi SARTAMAN bin MASDJAN, Sekretaris CC PKI Mangga Dua yang diberikan diatas sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. bahwa dalam minggu pertama bulan September 1965, S. Sukadi wakil dari TERDAKWA datang di CS PKI Mangga Dua dan memberikan briefing tentang pentingnya tenaga-tenaga Sukarelawan yang akan dilatih di Lubang Buaja ;
2. bahwa pada tanggal 14 September 1965 TERDAKWA sendiri telah memberikan briefing pada para Sekretaris CS-CS dilingkungan CDR untuk mengirimkan anggota-anggota atau tjalon anggota PKI ke Lubang Buaja untuk dilatih kemiliteran sebagai Sukarelawan DWIKORA ;
3. bahwa pada tanggal 25 September 1965 SAKSI melapor pada TERDAKWA bahwa tjalon2 Sukarelawan telah dikirim ke Lubang Buaja, dan bahwa pada kesempatan itu TERDAKWA memberikan informasi yang sangat dirahasiakan yaitu bahwa telah ada Dewan Djendral yang hendak menggulingkan Pemerintahan R.I. dan P.B.R. Bung Karno, maka tujuan latihan adalah disamping tugas Dwikora juga untuk menjelamatkan Revolusi dan P.B.R. dari Kudeta Dewan Djendral ;
4. bahwa selanjutnya TERDAKWA memberikan instruksi kepada SAKSI agar Kantor Partai, Pertjetakan-Pertjetakan surat-surat kabar Harian Rakjat dan warta Bakti serta pertjetakan Persatuan diamankan dengan mengadakan Piket sedjak tanggal 25 s/d 30 September 1965 ;
5. bahwa ada lagi instruksi dari TERDAKWA melalui wakilnya S. Sukadi kepada semua CS, agar pada tanggal 1 Oktober 1965 semua anggota PKI mendengarkan siaran radio sebab akan ada siaran mendadak/penting ;
6. bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 1965 ± djam 18.00 SAKSI mendapat instruksi lagi dari S. Sukadi supaya malam 30 September 1965 anggota-anggota CS standby dipos masing-masing untuk menerima dropping senjata ;
7. bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 10.00 SAKSI melapor kepada Komandan Sektor Suparno bahwa keputusan Kantor Telepon Kota telah dilaksanakan ;

8. bahwa ternyata dropping senjata tidak ada dan hanya menerima dua karung beras serta tanda-tanda kain berwarna hijau, merah dan kuning ;

II. bahwa setelah SAKSI mendengarkan siaran radio pada tanggal 1 Oktober 1965 tentang pengumuman mengenai Dewan Revolusi maka SAKSI dapat menerka bahwa tentulah ini yang dimaksud dengan berita mendadak serta berkesimpulan bahwa yang merentjanakan G. 30. S. adalah TERDAKWA beserta sebagian dari ABRI ;

MENIMBANG :

Keterangan saksi ACHMAD MUHAMAD bin JACUB, Sekretaris CSS PKI Djati yang didengar diatas sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 24 September 1965 digedung CC PKI djalan Kramat Raya 81 Djakarta diadakan rapat pembentukan Sektor-Sektor dalam rapat mana SAKSI diangkat oleh Sukatno Sekdjen Dewan Nasional Pemuda Rakjat sebagai Komandan Sektor VI, yang kemudian diroboh menjadi Sektor I, meliputi daerah Sub-sub Sektor Gambir, Tanah Abang, Petamburan dan Kebon Djeruk ;
2. bahwa tugas pokok Sektor-sektor adalah mengkoordinir Sukarelawan yang telah dilatih di Lubang Buaja dan menggrupkan mereka dalam kesatuan dan grup wilayah ;
3. bahwa tugas Sektor I adalah menjaga bangunan-bangunan vital seperti Kantor Tilpun Gambir, Kantor P.T.T. Djalan Thamrin, Kantor P.L.N. Karet dan Instalasi Penjernihan air di Pedjompangan ;
4. bahwa Sektor mempunyai hubungan taktis dengan Lubang Buaja melalui Komando Djaja dan hubungan politis lewat POS Komando, serta anggota-anggotanya terdiri dari Pemuda Rakjat dan Ormas-Ormas simpatisan PKI yang sudah dilatih di Lubang Buaja ;
5. bahwa SAKSI telah mengikuti latihan dari tanggal 3 s/d 8 September 1965 di Lubang Buaja dan kemudian dilatih kembali dari tanggal 28 s/d 30 September 1965 untuk refreshing hal mana adalah atas perintah Sekretaris CS Petamburan Muladi ;
6. bahwa SAKSI pada tanggal 24 September 1965 di Gedung CC PKI di Kramat Raya 81 Djakarta telah menerima briefing dari Sukatno tentang bahaya coup Dewan Djenderal, dan kemudian SAKSI pada tanggal 29 September 1965 mengetahui akan adanya G. 30. S. setelah memperoleh briefing dari Pak Saleh bersama para Komandan-Komandan Sektor di Lubang Buaja, tentang akan dilantarkannya gerakan pada hari Djumat tanggal 1 Oktober 1965 djam 04.00 ;

7. bahwa pada tanggal 28 September 1965 SAKSI telah menerima sebanyak Rp. 200.000,— dari Pak DJOJO untuk keperluan penjenggaran dapur umum dan \pm 300 pasang pakaian seragam hijau ;

8. bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 17.00 SAKSI telah menerima senjata (melalui PAK MARSUDI) dari Lubang Buaja, terdiri dari 2 putjuk jenis Chung, 4 putjuk jenis Garrand \pm 25 putjuk jenis G-3 ;

9. bahwa pada djam 19.30 tanggal 1 Oktober 1965 SAKSI telah pergi ke Front Nasional djalan Merdeka Selatan bersama anak buahnya untuk mendudukinya akan tetapi komandan pasukan dan anak buahnya ditangkap oleh R.P.K.A.D. sedang IA lolos karena berpakaian preman ;

10. bahwa IA segera setelah itu menjari Pak SALEH atau SUKATNO, DJOHAR, KASIMAN atau NICO untuk melaporkan peristiwa tersebut, tapi tak berhasil ;

11. bahwa setelah itu SAKSI pergi kegedung CC PKI untuk menjari salah seorang tersebut diatas, tetapi tidak dapat menemui, kemudian dibawa oleh penjaga gedung kerumah TERDAKWA untuk melaporkan peristiwa tersebut ;

II. bahwa setelah TERDAKWA menerima laporan dari SAKSI, memerintahkan SAKSI untuk segera melaporkan POS Komandonya dan kepada Lubang Buaja ;

MENIMBANG :

Pokok-pokok keterangan saksi PRAJITNO bin KARNEN, Wakil Sekretaris CS PKI Kebajoran, yang diberikan atas sumpah sebagai berikut :

- I. 1. bahwa SAKSI sejak tanggal 22 September 1965 diangkat menjadi Komandan Sektor VI oleh SUKATNO, yang meliputi daerah daerah Kebajoran Baru, Kebajoran Lama, Mampang Prapatan dan Pasar Minggu ;
2. bahwa semua anggota-anggota Sektor terdiri dari CS PKI dan Pemuda Rakjat yang sudah dilatih sebagai Sukarelawan di Lubang Buaja ;
3. bahwa CS merupakan pimpinan politik diwilayahnya dan berhubungan langsung dengan Pos Komando yang ditetapkan oleh dan terdiri dari orang-orang CDR, karenanya hubungan Sektor dengan CDR dilakukan melalui 2 badan yaitu :
 - 3.1. setjara politis didampingi dan dipimpin oleh Pos Komando yang terdiri dari orang-orang CDR yaitu WARDJOJO, WIRATMONO dan SALAM ;

3.2. setjara taktis dipimpin langsung oleh Komando Djaja yang terdiri dari orang-orang pilihan CDR jaitu SUKATNO, KASIMAN, NICO dan DJOHAR :

4. hubungan Sektor dengan Lubang Buaja disalurkan melalui (dibawah perintah) Komando Djaja ;
5. bahwa SAKSI pernah dilatih di Lubang Buaja dari tanggal 2 s/d 7 September atas perintah SUTILJO c.q. SUKATNO ;
6. bahwa SAKSI pada tanggal 29 September 1965 di Lubang Buaja telah menerima uang sejumlah Rp. 140.000,— dari seorang anggota AURI untuk keperluan penjelenggaraan dapur umum ;
7. bahwa sekira djam 23.00 tanggal 30 September 1965 bersama dengan wakilnya yang bernama SUPRAPTO telah mengambil 170 pasang pakaian seragam hidjau dari Lubang Buaja, dan pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 06.30 satuan dibawah perintahnya Pos Senajan menerima dropping 3 putjuk sendjata api beserta 2 peti peluru, kemudian ± djam 20.00 didrop 7 sendjata api lagi, pada hari itu djuga dirumah IMAN SUPANGAT telah didrop 3 putjuk sendjata api.

MENIMBANG :

Pokok-pokok keterangan saksi SUTARNO bin DJOGOSUDARJO, anggota Pemuda Rakjat Dukuh Atas, yang diberikan atas sumpah sebagai berikut :

1. bahwa SAKSI tanggal 21 s/d 25 September 1965 mengikuti latihan militer di Lubang Buaja atas perintah Achmad Muhamad Sekretaris CSS PKI Djati ;
2. bahwa SAKSI pada tanggal 26 September 1965 memimpin latihan gerakan kumpul tjepat dilapangan belakang Hotel Indonesia (atas perintah Achmad Mohamad) sebagai Komandan Pasukan ;
3. bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 Achmad Mohamad memberikan tugas pada SAKSI bersama anak buahnya untuk mendjaga keselamatan objek-objek vital dari usaha-usaha perusahaan pasukan Dewan Djenderal, dalam rangka penjelamatan PBR Bung Karno dan Pemerintah R.I. yang sjah ;
4. bahwa antara djam 16.00 dan 17.00 pada hari itu djuga, SAKSI menerima sendjata api sebanyak 30 putjuk dari Achmad Mohamad ;
5. bahwa pada djam 19.00 hari itu djuga diperintahkan oleh Achmad Mohamad untuk memimpin penempatan pasukan dalam rangka penjagaan objek-objek vital jaitu Kantor Telegrap Djalan Thamrin, Perusahaan Listrik Negara di Karet dan Kantor Pengurus Besar Front Nasional di Djalan Merdeka Selatan ;

MENIMBANG :

1. bahwa menurut keterangan-keterangan dari setiap SAKSI tersebut diatas menundjukkan dengan njata bahwa telah ada satu kedjahatan yang dilakukan jaitu memberikan bantuan untuk melakukan operasi militer yang kemudian dikenal sebagai "Gerakan 30 September" sebagaimana yang disebutkan dalam tuduhan PERTAMA ;
2. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas merupakan petundjuk yang ke-4 menurut hukum, yang memperkuat petundjuk yang ke-1 tersebut diatas ;

MENIMBANG :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan diatas Mahkamah berpendapat telah terbukti setjara sjah dan mejakinkan bahwa TERDAKWA telah bersalah melakukan kedjahatan yang dituduhkan padanja dalam tuduhan PERTAMA ;

JAITU :

"BAHWA TERDAKWA DIDALAM BULAN AGUSTUS 1965 BERTEMPAT DI KANTOR CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA JANG TERLETAK DIDJALAN KRAMAT NO. 81 DJAKARTA RAYA, BERSAMA-SAMA DENGAN KAWAN-KAWAN SEPARTAINJA/PARTAI KOMUNIS INDONESIA, JAITU ANTARA LAIN D.N. AIDIT, M.H. LUKMAN, NJOTO, SUDISMAN, IR. SAKIRMAN, ANWAR SANUSI, REWANG, SUWANDI DAN PERIS PARDEDE (SAKSI DALAM PERKARA INI), TELAH MENGADAKAN SERANG. KALIAN RAPAT JANG DISEBUT RAPAT POLITBIRO UNTUK SETELAH MENDENGARKAN PENDJELASAN DARI D.N. AIDIT RENTJANA KUDETA DEWAN DJENDERAL DAN ADANJA SEGO-TENTANG SAKITNJA P.J.M. PRESIDEN JANG SERIUS, ADANJA LONGAN PERWIRA JANG BERKEINGINAN MENDAHULUI RENTJANA DEWAN DJENDERAL TERSEBUT, SESUDAH MEMBIJTARAKAN SETJARA TERPERINTJI TENTANG PERIMBANGAN KEKUATAN MILITER JANG PERLU DIPERHITUNGAN UNTUK DAPAT MEMBENARKAN KEINGINAN SEGOLONGAN PERWIRA TERSEBUT DIATAS DAN SESUDAH MEMPERSOALKAN SETJARA MENDALAM TENTANG SIFAT POLITIK DARI PADA DEWAN REVOLUSI SEBAGAI LEMBAGA SUMBER KEKUASAAN NEGARA DAN SEBAGAI PENGGANTI KABINET DWIKORA JANG AKAN DIGULINGKAN, MEMPEROLEH KESATUAN PENDAPAT/KEMUFAKATAN UNTUK MENJETUDJUI AKSI SEGOLONGAN PERWIRA TADI MELANTJARKAN OPERASI MILITER DAN MEMBENTUK DEWAN REVOLUST".

MENIMBANG :

Bahwa sebelum sampai pada penelaahan terhadap pengakuan dan penjangkalan TERDAKWA serta keterangan para SAKSI yang diberikan

dimuka persidangan Mahkamah menganggap perlu mengupas lebih dahulu pasal 107 ayat (1) dan (2) KUHP yang dituduhkan kepada TERDAKWA sebagai berikut :

1. bahwa lebih dahulu perlu diuraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan makar (aanslag) ex. pasal 107 itu dan apa pula unsur-unsur dari kejahatan tersebut ;
2. bahwa kejahatan termaktub dalam pasal 107 KUHP itu ialah, berdasarkan riwayat pembentukan pasal tersebut : adalah setiap perbuatan yang bagaimana ketil dan ringannya sekalipun, DJIKA merupakan pelaksanaan niat jahat untuk merobohkan atau menggulingkan Pemerintahan yang sah ;
3. bahwa salah satu unsur yang penting dari kejahatan itu, ialah "oomerk" (niat-maksud) dalam arti khusus ialah, bahwa niat ini tidak usah berupa niat yang direntjana terlebih dahulu "dolus pre-meditatus" (voorbodachte rade), akan tetapi tjukuplah bila niat ini sudah ada dalam bentuknya yang sederhana ;
4. bahwa hal tersebut tidak lain disebabkan karena kejahatan itu, dipandang begitu berbahaja sekali bagi keselamatan dan keamanan Negara dan Pemerintahan ;
5. bahwa selanjutnya perlu diselidiki ada-tidaknya perbuatan-perbuatan TERDAKWA, yang mengandung maksud akan merobohkan atau menggulingkan Pemerintahan yang sah dan haruslah dibuktikan perbuatan-perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERDAKWA yang dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan kehendak akan penggulingan Pemerintahan yang sah itu ;

MENIMBANG :

Bahwa pokok-pokok keterangan-keterangan TERDAKWA sebagai mana yang pernah ia kemukakan dalam pemeriksaan pendahuluan keterangan-keterangan mana yang mempunyai nilai menurut hukum pembuktian adalah sebagai petunjuk (aanwyzing) berdasarkan uraian Mahkamah dalam analisa tuduhan PERTAMA tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. bahwa, TERDAKWA telah mengerahkan dengan mempergunakan bermacam-macam dalih antara lain :
 - a. untuk pengganjangan Nekolim Malaysia ;
 - b. untuk pengganjangan setan-setan kota, kabir, koruptor dan sebagainya anggota-anggota partainya (CC PKI) Ormas-Ormasnya antara lain dari Pemuda Rakjat, Gerwani, SOESI dan B.T.I. sejumlah kurang lebih 2000 orang untuk diberi latihan kemiliteran di Lubang Buaja dibawah pimpinan siapa yang disebut Pak DOJJO (ex. Major Udara SUJONO/SAKSI), sehingga terbentuklah suatu kekuatan terlatih kemiliteran yang ia sebut "tenaga tjadangan"

untuk digunakan sebagai bantuan apa yang disebut "Gerakan 30 September" dalam operasi militer melawan apa yang dinamakan Dewan Djenderal ;

2. bahwa, demi untuk koordinasi yang rapih "Tenaga Tjadangan" tersebut, TERDAKWA telah membagi daerah Djakarta Raya ini dalam Sektor-sektor dan mengangkat Komandan-Komandan Sektor-nja masing-masing antara lain :
 - a. ACHMAD MUHAMMAD untuk Sektor Petamburan, Tanah Abang, Gambir ;
 - b. PRAJITNO untuk Kebajoran Lama, Tjiputat, Kebajoran Baru ;
3. bahwa TERDAKWA telah pula membentuk Team Kesehatan untuk hal mana terdakwa menugaskan seorang wanita bernama Nj. SUDHARTI SUWARTO, perbuatan mana dikuatkan dengan bukti berupa surat-surat (No. urut 2/219) ;
4. bahwa pada tanggal 28 September 1965 dikerahkan kembali orang-orang yang pernah dilatih di Lubang Buaja dengan dalih untuk "latihan refreshing" padahal ternyata adalah untuk dijadikan permulaan pemusatan (konsentrasi) Tenaga Tjadangan di Lubang Buaja ;
5. bahwa djustru kepadanya oleh SOEKATNO pada tanggal 29 September 1965 diberitahukan penentuan hari "H" dan djam "D" yang djelasnya berbunyi :

"Hari Djum'at 1 Oktober menjelang fadjar kurang lebih djam 04.00 pagi" jaitu saat akan dilantarkannya "Gerakan 30 September" itu ;
6. kemudian, pada keesokan harinya TERDAKWA mengeluarkan instruksi-instruksi kepada Sekretaris CS-CS antara lain CS Matraman, Senen dan Kampung Melaju untuk memberitahukan kepada kader-kader P.K.I. dimasing-masing CS untuk mendengarkan siaran-siaran R.R.I. dan supaya bersiap-siap untuk menerima dropping antara lain sendjata api, peluru dan pakaian-pakaian seragam ;

MENIMBANG :

Bahwa SAKSI-SAKSI tersebut dibawah ini telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah dalam sidang jaitu :

1. SUJONO yang mengatakan bahwa, — walaupun ia, SAKSI tidak pernah kenal dengan terdakwa tetapi bahwa benar dialah pelatih kemiliteran dari anggota-anggota — Ormas dan Orpol P.K.I. di Lubang Buaja dan teristimewa mengenai kedatangan anggota-anggota Orpol dan Ormas P.K.I. dalam jumlah yang besar sekali yang menurut perkiraannya 1.500 orang dan yang setjara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dahulu telah datang di Lubang Buaja dengan membawa perbekalan mereka masing-masing dan minta kepada SAKSI untuk dilatih serta berdasarkan pertimbangan bahwa mereka itu adalah

orang-orang dari jauh maka SAKSI-pun mengambil kebidjaksanaan untuk melatih mereka itu dalam latihan militer teristimewa mengenai pemakaian berbagai matjam sendjata api ;

2. **SASTROSANDJOJO bin TJITROWIKONGKO**, sebagai salah seorang pembantu langsung dari TERDAKWA, menjatakan :

- a. bahwa kegiatan TERDAKWA sebelum terdjadinja peristiwa "G. 30. S." adalah mempersiapkan tenaga untuk dilatih di Lubang Buaja, dengan dalih mempersiapkan tenaga dalam rangka kewaspadaan dan ketahanan Revolusi Indonesia dan mengganjang Nekolim "Malaysia", akan tetapi sesudah G. 30. S., barulah saksi menjadari bahwa latihan di Lubang Buaja itu njatanja adalah dalam rangka G. 30. S. itu ;
- b. bahwa, TERDAKWA mengatakan kepadanya bahwa untuk memimpin Sukarelawan-Sukarelawan, Djakarta ini harus dibentuk Sektor-Sektor, hal mana kemudian memang demikianlah halnja ;
- c. bahwa, SAKSI melihat sendiri hubungan TERDAKWA dengan SUKATNO Sekretaris Dewan Nasional Pemuda Rakjat seluruh Indonesia jang selalu mengadakan pertemuan-pertemuan, baik di CDR maupun di rumah TERDAKWA ;

MENIMBANG :

Bahwa keterangan-keterangan pada SAKSI tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan TERDAKWA, djelaslah bagi Mahkamah bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA jang terdiri dari :

- a. mengerahkan mempersiapkan dan membentuk suatu konsentrasi tenaga tjadangan/kekuatan terlatih kemiliteran dalam rangka G. 30. S. ;
 - b. mengeluarkan perintah-perintah dan instruksi-instruksi membagi daerah Kota Djakarta Raya ini dalam sektor serta mengadakan dan mensjahkan komandan sektor tersebut ;
 - c. menganalisa segala laporan-laporan jang dikirimkan kepadanya dan kemudian menentukan siasat-tindakan selanjutnja dalam rangka G. 30. S. itu ;
- menunjukkan tjiri perbuatan-perbuatan seorang pemimpin dan pengatur, ditambah lagi dengan kenjataan bahwa TERDAKWA adalah seorang anggota Politbiro, suatu badan pimpinan dalam Partai Komunis Indonesia ;

MENIMBANG :

1. bahwa dilihat dari segi juridis, perbuatan-perbuatan TERDAKWA ini bukanlah bersifat sekedar membantu sadja/bukanlah merupakan suatu "ondergeschikte rol" semata-mata, akan tetapi adalah meru-

pakkan perwujudan kerdja sama jang bulat dan sempurna sebagai pelaksanaan tugas berdasarkan keputusan jang telah diambil dalam sidang Politbiro sebagaimana jang telah diuraikan dalam tuduhan PERTAMA, sehingga perbuatan-perbuatan TERDAKWA itu adalah sedjiwa dan tidak dapat dipisahkan dari apa jang disebut "Gerakan 30 September" (het is wel te onderscheiden doch niet af tesccheiden) ;

2. bahwa mengenai oogmerk sebagaimana jang telah diuraikan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat, sudah tersimpulnja unsur ini dalam perbuatan-perbuatan TERDAKWA tersebut diatas, atau dengan perkataan lain : perbuatan TERDAKWA adalah merupakan perwujudan dari maksud djahat untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah, hal ini lebih tegas lagi apabila Mahkamah menilai perbuatan para saksi-saksi ;
3. bahwa istilah mendemisionerkan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat bahwa haruslah ditafsirkan setjara teleologis, jaitu bertujuan menjingkirkan atau meniadakan kabinet Dwikora, sebagai salah satu perwujudan bangunan Pemerintahan jang sjah, dengan demikian dalam istilah undang-undang menggulingkan atau merobohkan Pemerintahan jang sjah itu sendiri terbukti pada penjusunan personalia Dewan Revolusi dimana setjara menjolok nama P.J.M. Presiden/Perdana Menteri tidak tertjantum didalamnya ;
4. bahwa kedjahatan sebagaimana jang termaksud dalam pasal 107 K.U.H.P. tersebut, adalah suatu "formeel delict", sehingga permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) dari kedjahatan ini dianggap ada apabila perbuatan tersebut sesuai dengan perumusan Undang-Undang ;
5. bahwa segala tindakan-tindakan TERDAKWA dalam rangka G. 30. S. sebagaimana jang telah diuraikan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan permulaan pelaksanaan untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah, maksud mana tidaklah berhasil terwujud disebabkan adanya tindakan pengamanan dari Angkatan Bersendjata hal mana Mahkamah memandang tidaklah perlu dibuktikan karena sudah merupakan pengetahuan umum (notoir feit) ;

MENIMBANG :

Bahwa demi untuk melengkapi bukti adanya niat untuk menggulingkan Pemerintah jang sjah, Mahkamah memandang perlu untuk mengemukakan Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dimana dinjatakan antara lain :

1. mendemisionerkan Kabinet Dwikora ;
2. Dewan Revolusi menjadi sumber daripada segala Kekuasaan Negara Republik Indonesia ;

3. menjebut para Menteri Kabinet Dwikora sebagai „bekas Menteri” dan mewadjibkan para „bekas Menteri” ini memberikan pertanggung an djawabnja kepada Dewan Revolusi;

MENIMBANG :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tertera diatas jalah berdasarkan keterangan-keterangan TERDAKWA dan keterangan-keterangan para SAKSI dalam sidang dibawah sumpah jang satu dengan lainnja mempunyai djalinan erat dan dihubungkan pula dengan surat-surat bukti jang ada, kesemuanya ini merupakan alat-alat bukti jang sjah menurut Undang-Undang sehingga melahirkan kejakinan Mahkamah akan kesalahan TERDAKWA melanggar fatsal 107 K.U.H.P. tersebut,

MENIMBANG :

Bahwa mengenai tuduhan KEDUA jang setjara singkatnja dirumuskan sebagai berikut :

„Sebagai pemimpin dan pengatur makar dengan niat untuk menggulingkan Pemerintahan Republik Indonesia jang sjah”. Mahkamah berpendapat :

1. bahwa mengenai unsur pemimpin dan pengatur sebagai termaktub dalam perumusan diatas, Mahkamah tetap berpegang pada uraiannja jang pada pokoknja berdasarkan penilaian-perbuatan TERDAKWA dalam kesatuan-hubungannja dengan apa jang disebut „Gerakan 30 September”, sebagai berikut :

- 1.1. TERDAKWA pada tanggal 24 September 1965 memerintahkan petugas-petugas CDR jang sudah ditentukan untuk turba langsung ke CS-CS dan bersama-sama mengerahkan tenaga dan anggota dari Pemuda Rakjat, SOBSI, B.T.I., GERWANI untuk diberikan latihan Kemiliteran di Lubang Buaja jang pengiriman diatur oleh SOEKATNO/Sekretaris Djenderal Pemuda Rakjat dan dibantu oleh NICO (Staf CDR), KASMAN (Pemimpin SOBSI) daerah Djakarta Raya dan DJOHAR (Staf C.D.R.) dengan mempergunakan dalih „Latihan Sukarelawan/Sukarela wati” dalam rangka memperhebat pengganjangan Nekolim Malaysia, supaya djangan sampai diketahui maksud jang sebenarnja;

- 1.2. TERDAKWA dengan perbuatan tersebut diatas membentuk tenaga tjadangan sedjumlah lebih kurang 2000 orang dengan tudjuan membantu gerakan operasi militer dibidang tempur atau pertahanan wilayah dan untuk menghadapi tenaga-tenaga Angkatan Bersendjata jang membantu Dewan Djenderal dan untuk mendjaga objek vital;

- 1.3. TERDAKWA membentuk pos-pos aksi jaitu Pos Komando, Pos

Koordinator dan Pos Lapangan jang diatur oleh CS-CS dan tenaga tenaga penghubung CDR;

- 1.4. mengorganisir tenaga-tenaga tjadangan tersebut dalam Sektor-sektor berdasarkan pembagian daerah Djakarta dalam 6 Sektor;

- 1.5. mengadakan kampanye politik kepada :

- a. SERBAUD di Kemajoran pada tanggal 27 September 1965 ;
 - b. kepada CS-CS di Djakarta pada tanggal 21, 23 dan 27 September 1965 ;
 - c. pemuda dan buruh pada tanggal 24 September 1965 ;
 - d. kader-kader dan aktivis P.K.I. ;
- dengan thema :

— adanja bahaya Dewan Djendral ;

— pengganjangan Setan-setan Kota, Koruptor, Pentjoleng, Kahir.

- 1.6. TERDAKWA menginstruksikan kepada anggota-anggotanja untuk memperkuat dinas piket-piket pada Kantor Partai, Gedung Pertjetakan Harian Rakjat, Warta Bhakti dan Pertjetakan Persatuan jang harus dimulai sedjak tanggal 25 sampai 30 September 1965 ;

- 1.7. TERDAKWA membentuk Team Kesehatan untuk hal mana ditugaskan Njonja SUHARTI SUWARTO, Wakil Ketua DPP GERWANI ;

- 1.8. Khusus kepada TERDAKWA diberitahukan oleh SOEKATNO pada tanggal 29 September 1965 tentang hari „H” dan djam „D” bagi „Gerakan 30 September” setelah mana feesokan hari-nja TERDAKWA memberikan briefing kepada Sekretaris CS-CS tentang sudah tibanja saat untuk melawan Dewan Djenderal dan menginstruksikan supaya mereka memberitahukan kepada kader-kader aktivis-aktivis P.K.I. agar besoknja mendengarkan R.R.I. Djakarta dan supaya Sektor-sektor „Stand By” mulai malam tanggal 30 September 1965 itu djuga pukul 20.00 untuk menerima dropping sendjata, pakaian seragam dan beras dari Lubang Buaja ;

- 1.9. memeriksa/mengkontrol pelaksanaan instruksi tersebut dan ke-siap-siagaan Pos-Pos Komando jang langsung berada dibawah Pemerintahannja ;

2. bahwa kesemuanya ini telah TERDAKWA lakukan dalam persiapan menjongsong „Gerakan 30 September”, dalam rangka pelaksanaan tugas jang diberikan oleh partai dan dalam kedudukannja sebagai anggota Politbiro PKI merangkap Sekretaris Pertama CDR hal mana dikuatkan dengan saksi PAK DJOJO (ex. Major Udara SUJONO) jang telah melihat dengan mata kepala sendiri pada tanggal 30 September 1965 di malam hari kira-kira pukul 22.00 malam pada

saat mana SAKSI mendjemput D.N. AIDIT di rumah SJAM di Gang Tengah dimana juga berada Djenderal PRANOTO setelah mana saksi membawa kedua orang tersebut ke Lapangan Halim Perdana-kusumah ;

3. bahwa SAKSI ex. Major Udara SUJONO/PAK DJOJO menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 1965 jam 19.00 telah menghadiri pembittjaraan dimana turut hadir ketjuai ex. Kolonel LATIEF dan ex. Kapten SURADI juga seorang yang bernama SJAM (yang kemudian SAKSI mengetahui bernama SUGITO) dan PONO yang berpakaian sipil;
4. bahwa saksi mendengar sendiri pula soal-soal kemiliteran yang menjadi pokok pembittjaraan pada waktu antara lain :
 - 4.1. mengenai rentjana gerakan menentang Dewan Djenderal;
 - 4.2. mengenai code.code yang akan dipakai dalam gerakan tersebut;
 - 4.3. mengenai keadaan pasukan-pasukan yang akan diikuti sertakan dalam gerakan tersebut;
 - 4.4. mengenai laporan SJAM (SUGITO) kepada Kolonel LATIEF yang menjatakan bahwa telah terkumpul sedjumlah tenaga berkekuatan 15000 orang;
 - 4.5. mengenai persiapan tank dan panser yang akan diturut-gerakan pula;
 - 4.6. mengenai pembagian tugas yang telah ditentukan oleh Kolonel LATIEF:
 - 4.6.1. Kolonel LATIEF akan bertugas sebagai Panglima Divisi „AMPERA” sedangkan gerakannya dinamakan „Gerakan Takari”;
 - 4.6.2. Lettu. A. ARIF sebagai Komandan Pasukan „PASOPATI” yang bertugas sebagai penjergap untuk melakukan pentju-likan dan pembunuhan.;
 - 4.6.3. mengenai anak-anak buah Ex. Let. Kol. UNTUNG dari TJAKRABIRAWA dan anak-anak buah Ex. Kapten SU-RADI bertugas untuk mengamati dan menjelidiki sasaran-sasaran apa yang mereka sebut Dewan Djenderal;
 - 4.6.4. mengenai sendjata-sendjata yang dibutuhkan akan diambil jam „D kurang 1” diantaranya di Tandjung Priok, Dja-tinagara dll. ;
 - 4.6.5. mengenai bantuan dari AURI yang sungguh diharapkan benar-benar oleh SJAM dan sudah dibittjarkan langsung antara Ex. Djenderal SUPARDJO dengan Ex. MEN./PANGAU;
 - 4.6.6. mengenai tempat Central Komando yang oleh Ex. Kolonel LATIEF diusulkan dipergunakan Gedung ANGKASA PU-

RI atau PENAS dan sekira-nja tidak mungkin rumah Kolonel LATIEF-lah yang akan dipakai;

- 4.6.7. mengenai rentjana pengamanan pemimpin-pemimpin yang perlu diamankan, kepada SAKSI diminta untuk mentjari-kan tempat di Kompleks Halim Perdana Kusumah;

MENIMBANG :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan diatas Mah-kamah berpendapat telah terbukti setjara sjah dan meyakinkan bahwa TERDAKWA telah bersalah melakukan kedjahatan yang dituduhkan padanja dalam tuduhan KEDUA :

”Bahwa terdakwa didalam bulan September 1965 di Djakarta dalam kedudukannya sebagai anggota Politbiro P.K.I. dan C.D.R. Djakarta Raya telah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan ialah :

Menjiapkan tenaga-tenaga Anggota-anggota P.K.I. Ormas ormas dan mantel Organisasi-organisasinya untuk dilatih di Lubang Buaja guna disusun dalam kesatuan-kesatuan tjadangan yang terdiri dari satuan tjadangan untuk sewaktu-waktu dapat membantu dalam Gerakan Ope-rasi Militer yang akan dilantjarkan oleh segolongan Perwira dengan maksud untuk membentuk Dewan Revolusi dan satuan-satuan dengan tugas pertahanan wilayah dan tugas menduduki dan menjaga objek-objek vital seperti kantor P.L.N. Karet, kantor Telegraf djalan Thamrin dan kantor Telecominikasi djalan Merdeka Selatan, kesemuanya di Dja-karta. Pula membantu membentuk sektor-sektor yang merupakan orga-nisasi-organisasi untuk menjusun tenaga-tenaga tjadangan tersebut di atas sesuai dengan tugas masing-masing dan untuk memudahkan penje-lenggaraan Pimpinan terhadap satuan-satuan tenaga tjadangan tersebut disamping menundjuk Komandan-komandan sektor dan mengusahakan tenaga-tenaga kesehatan (dokter-dokter/djururawat-djururawat) guna membantu dalam gerakan Operasi Militer tersebut, pula telah membentuk pos-pos Komando untuk melantjarkan Pimpinan terhadap satuan-satuan tjadangan yang akan diberi tugas menduduki dan menjaga objek-objek vital, dan mendjelang meletusnya peristiwa „G.30.S.”/Gestok, mengkon-trole kesiapan-kesiapan sektor-sektor dan setelah metelusnja peristiwa „G.30.S./Gestok” aktif ikut menilai dan menganalisa laporan-laporan tentang perkembangan-perkembangan dari pada operasi Militer dan akibat-akibatnja guna kepentingan kontinuitas dari Pimpinan terhadap aksi-aksi/kegiatan-kegiatan yang kesemuanya itu adalah dalam rangka penjelenggaraan operasi Militer dari Gerakan 30 September/Gestok. Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya sebagai anggota Politbiro ikut merentjanakan Gerakan 30 September/Gestok yang bertudjuan mem-bentuk suatu Dewan Revolusi untuk menggulingkan dan mengganti Pe-merintah dan alat-alat perlengkapan Negara R.I. lainnya (M.P.R.S.) yang sjah seperti perumusan yang telah diberikan pada tuduhan PERTAMA diatas.

MENIMBANG :

Bahwa mengenai tuduhan KETIGA setjara singkat dirumuskan sebagai berikut :

„Sebagai pemimpin dan pengatur pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan Pemerintah yang telah ada di Indonesia”, Mahkamah telah dapat menemukan dalam persidangan ini hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa mengenai unsur pemimpin dan pengatur sebagai termaktub dalam perumusan pasal 108 (2) K.U.H.P. Mahkamah tetap berpegangan pada uraiannya dalam Tuduhan KEDUA tersebut diatas yang pada pokoknya berdasarkan penilaian kualitas atau sifat kedudukan dan perbuatan-perbuatan TERDAKWA dalam kesatuan hubungan-nja dengan apa yang disebut „GERAKAN 30 SEPTEMBER”;
2. bahwa SAKSI PAK DJOJO mengatakan pada tanggal 30 September 1965 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh SAKSI sendiri, para pelaksana, KOLONEL LATIEF sebagai Panglima Komando Divisi Ampera, KAPTEN SURADI Komandan Penguasaan Ibu Kota, MAJOR UDARA GATOT sebagai Komando Basis, LETTU ARIEF sebagai Komandan Pasopati yang bertugas untuk melakukan pentjulikan dan pembunuhan dan SJAM, seorang tokoh P.K.I., dan
 - a. bahwa dalam pertemuan itu ditentukan hari „H” dan djam „D” jaitu tanggal 1 djam 04.00;
 - b. bahwa sebagai Central Komando ditetapkan Gedung PENAS;
 - c. bahwa kepada SAKSI diberi tugas untuk menjari tempat pengamanan di Halim Perdanakusumah bagi pemimpin-pemimpin yang menurut SJAM dan LATIEF adalah antara lain : AIDIT, NJOTO, ALI SASTROAMIDJOJO, LUKMAN, SUBANDRIO dan P.J.M. PRESIDEN;
 - d. bahwa SAKSI telah melaporkan kepada atasannya jaitu LETNAN KOLONEL HERU ATMODJO (Direktur Intell Angkatan Udara) tentang rentjana gerakan TAKARI, dan oleh HERU akan diteruskan kepada J.M. MEN/PANGAU;
 - e. bahwa, djam 21.00 SAKSI berada di PENAS menunggu kedatangan DJENDERAL SUPARDJO;
 - f. bahwa kemudian SAKSI pergi kerumah SJAM di Gang Tengah dekat Stasion Kramat untuk menjemput AIDIT atas perintah DJENDERAL SUPARDJO; dan bahwa di rumah SJAM tersebut, SAKSI melihat AIDIT dan DJENDERAL PRANOTO;
 - g. bahwa SAKSI menambahkan keterangannya mengenai DJENDERAL PRANOTO ini adalah untuk pertama kalinya ia utjapkan dan tidak ada dalam keterangan pemeriksaan pendahuluan;
 - h. bahwa saksi kemudian membawa kedua orang tersebut (DJEN-

DERAL PRANOTO dan AIDIT) ketempat yang sudah dipersiapkan di Halim Perdanakusumah, jaitu kerumah seorang anggota AURI;

- i. bahwa kemudian saksipun pergi melapor kepada DJENDERAL PARDJO di PENAS bahwa tugasnja sudah selesai;
 - j. bahwa mengenai betapa pentingnja peranan yang dimainkan SJAM dan PONO tokoh-tokoh P.K.I., dengan ketidak hadliran mereka rapat-rapat senantiasa dibatalkan;
 - k. bahwa melihat sikap dan tjara SAKSI memberikan keterangannya sehingga memberikan kesan kepada Mahkamah akan kesempurnaannya;
2. bahwa dari keterangan-keterangan SAKSI tersebut diatas ini serta keterangan-keterangan TERDAKWA dalam sidang, Mahkamah mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 - 2.1. bahwa segala perbuatan-perbuatan TERDAKWA adalah merupakan pelaksanaan atau perwujudan dari pada keputusan Politbiro PKI sebagaimana yang telah diuraikan diatas;
 - 2.2. bahwa, demikian djuga halnya dengan anggota Politbiro D.N. AIDIT yang diberi tugas untuk mengurus segala soal-soal kemiliteran untuk mana didjadikan pembantu-pembantunya ialah SJAM dan PONO, penghubung-penghubung dengan golongan Perwira,
 - 2.3. bahwa, pelaksanaan keputusan Politbiro CC. PKI adalah dilaksanakan bersama-sama dengan oknum tertentu dikalangan Angkatan Bersendjata sebagai tenaga pelaksana;
 3. bahwa mengenai soal apakah ada pemberontakan Mahkamah berpendapat bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan pentjulikan dan atau penganiajaan hingga mati dan atau pembunuhan terhadap pedjabat-pedjabat tinggi sebagai personifikasi dari Pemerintahan yang telah ada di Indonesia ini a.l. Menteri yang duduk didalam Kabinet Dwikora;
 4. bahwa, pentjulikan, penganiajaan dan pembunuhan tersebut diatas dilakukan dengan kekerasan sendjata oleh „GERAKAN 30 SEPTEMBER” terhadap para pedjabat-pedjabat Pemerintah a.l. Menteri Kabinet Dwikora yang merupakan perwujudan kekuasaan Pemerintah yang ada, maka Mahkamah berpendapat pemberontakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang njata terbukti.

MENIMBANG :

Berdasarkan pada uraian Mahkamah tersebut diatas, mengenai kwalitas/kedudukan TERDAKWA dalam Partai PKI sebagai salah seorang anggota Politbiro suatu instansi yang mempunyai kekuasaan tertinggi

dalam Organisasi Partai PKI dan melihat pula pada kualitas perbuatan TERDAKWA terhadap anggota-anggota Orpol PKI dan Ormasnya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dalam rangka pelaksanaan GERAKAN 30 SEPTEMBER ini maka Mahkamah berkesimpulan bahwa TERDAKWA NJONO-lah salah seorang yang merupakan pemimpin dan pengatur dalam pemberontakan tersebut diatas.

MENIMBANG :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah berpendapat telah terbukti setjara sjah dan meyakinkan bahwa TERDAKWA telah bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan KETIGA, dengan melakukan serangkaian perbuatan yang telah dimuat dalam rumusan bukti sjah meyakinkan telah melakukannya kejahatan dalam tuduhan KEDUA.

MEMPERHATIKAN :

Barang-barang bukti yang diajukan oleh ODITUR didalam perkara ini jaitu :

- Sendjata-sendjata api yang terdiri dari djenis Tjung, Garrand dan G-3;
- Sedjumlah peluru-peluru ;
- tanda-tanda pengenal yang berupa pita-pita merah, hidjan dan kuning;
- Seberkas surat-surat yang terdiri dari :
 - pengumuman-pengumuman "Dewan Revolusi" ;
 - laporan-laporan situasi yang ditudjukan terhadap TERDAKWA dan
 - Surat-surat lainnya ;
- Sebuah tas

serta tambahan barang bukti untuk penguat pembuktian yang disusunkan didalam sidang.

MENIMBANG :

Bahwa terhadap requisitoir, pleidooi, replik dan duplik yang setjara silih-berganti diutjap-pertahankan sebagai pendapat ODITUR disatu fihak dan PEMBELA serta TERDAKWA difihak lainnya, Mahkamah beranggapan perlu untuk menggariskan pendiriannya yang sekaligus akan merupakan pendahuluan dari Keputusan akhir yang akan diambil terhadap perkara ini.

MENDENGAR :

Requisitoir yang dibatjakan oleh ODITUR didepan persidangan, Mahkamah menanggapi yang terpokok pada dua segi :

- a. Segi politis, sebagai berikut :

1. Bahwa persoalan affair Madiun merupakan seakan-akan hanya persoalan Angkatan Darat dengan dalih "Bukanlah Angkatan Darat yang telah memukul dan menggagalkan pemberontakan dan pengkhianatan Madiun" ! Mahkamah berpendapat bahwa tidak benarlah masanja karena persoalan Madiun adalah suatu tragedi Nasional yang telah dapat ditanggulangi setjara nasional ;

2. Bahwa ODITUR menjatakan perkara yang sedang kita hadapi ini adalah perkara pidana yang bertjorak politik dan dapat pula dikatakan sebagai perkara politik yang bertjorak pidana, Mahkamah berpendapat berlainan sekali dengan bewering tersebut terutama sekali didalam hal pernyataan bahwa perkara ini adalah perkara politik yang mempunyai tjorak pidana.

3. Mahkamah akan sependapat dengan ODITUR apabila perumusan itu berbunyi "perkara yang sedang kita hadapi ini adalah perkara pidana biasa beraspek politik karena terdakwa berbuat kejahatan atas dasar kejakinan politik dan demi untuk mentjapai tudjuan politiknya, djadi sekedar terdapatnya aspek politik didalam kejahatan yang dilakukannya" ;

b. Segi juridis, sebagai berikut :

1. ODITUR berpendapat telah terbuktinja perbuatan tindak pidana sebagaimana tuduhan KEDUA bagi Terdakwa pada hal unsur utama jaitu "niat" untuk menggulingkan belumlah sampai pada akhir uraian tuduhan KEDUA dibuktikan, djustru pembuktian inilah yang perlu didahulukan sedjalan membahas tuduhan PERTAMA dahulu ;

2. Pertimbangan ODITUR untuk mengedepankan faktor peringanan bagi Terdakwa adalah keanggotaannya di DPR, MPRS, DEWAN PRODUKSI NASIONAL dan PBBN, bagi Mahkamah faktor ini lebih memperberat untuk menilai perbuatan dan tingkat hukuman bagi terdakwa dengan alasan bahwa sebagai seorang yang berkedudukan dilembaga-lembaga kenegaraan (terutama DPR, MPRS) seharusnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ada.

MENDENGAR :

Pleidooi yang dibatja oleh PEMBELA dimuka Persidangan dan yang pada intinja memuat pengelakan terhadap requisitoir ODITUR Mahkamah berkeputusan untuk memberikan sanggah-djawabnja sebagai berikut :

1. Dalam halaman 2 dinjatakan bahwa "Ke luar-biasaan Mahkamah ini bagaimanapun atjaranja ditertibkan dan dikendalikan dengan baik, namun mempunyai disadvantages yang besar — dalam hal ini saja tetap berselisih faham dengan Bapak Ketua — dan hal ini

kiranya terbukti dengan nyata pada hari kemarin, sewaktu Bapak ODITUR terpaksa harus minta waktu lagi karena, sungguhpun telah bekerja siang-malam, tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, requisitoirnya yang penting ini, — dst", dijawab :

- a. soal "ketjepatan" itu harus dihubungkan dengan bahaya besar bagi keamanan Bangsa dan Negara yang sedang ber-Revolusi, suatu ketjepatan penyelesaian perkara yang merupakan bahaya besar bagi keamanan Revolusi, ketjepatan sangat diperlukan dalam rangka pengamanan usaha-usaha mentjapai tujuan Revolusi ;
 - b. "ketjepatan" tersebut tentulah disertai dengan syarat TANPA meninggalkan azas dan sendi keadilan, keadilan yang akan dapat ditemukan apabila berpidjak diatas dasar fundamenteel ketelitian dan kematangan berfikir ;
 - c. "disadvantages" tersinggung diatas haruslah dikembalikan kepada nilai perkara yang menimbulkan "disadvantages" pula pada 1. gara, Bangsa dan Revolusi ;
2. Dalam halaman yang sama dinjatakan oleh PEMBELA bahwa "Pengadilan luar biasa, adalah hal yang kurang baik dalam lingkungan peradilan, karena merupakan petunjuk tentang adanya situasi yang kurang stabil, atau adanya ketidak mampuan, kekurangan-kekurangan dalam rangka peradilan biasa", tanggap sebagai berikut :
- a. Revolusi Indonesia sedang hebatnya bergelora, Revolusi yang mendjebol dan membangun dan yang berakibat tiadanya kestabilan dalam pengertian yang wajar ;
 - b. memang dalam pengertian tertentu dapat dikatakan keadaan kita adalah labil, labilnya suatu Negara yang sedang ber-Revolusi dan dalam hal menghadapi "perkara khusus" yang akan lebih melabilkan Negara dalam pengertian negatif, harus dilakukan penyelesaian setjepatnya demi mengembali-tenangkan keadaan yang extralabil itu ;
3. Dalam halaman 3 dan 4 dikemukakan mengenai "openbare mening" hal mana Mahkamah berpendapat sebagai berikut :
- a. Mahkamah memang tidak akan dibenarkan apabila ia menjandarkan dirinja hanya pada pendapat umum tanpa menjelidiki dan membuktikan kebenarannya ;
 - b. djustru karena itulah Mahkamah kini memeriksa dan mentjari bukti tentang salah-benarnya pendapat umum yang menjatakan bahwa TERDAKWA sebagai tokoh P.K.I. terlibat dalam petualangan Kontra Revolusi "G. 30. S." ;
4. Didalam rangka pendemisioneran Kabinet Dwikora Mahkamah telah

menjinggungnja diatas, akan tetapi perlu menambahkan bahwa pernyataan PEMBELA tentang pengambil-alihan kekuasaan M.P.R.S. sebagai lembaga yang tak dikenal oleh U.U.D. 1945 adalah "juris-tery" belaka serta tidak tepat dan benar adanya karena sudah ditetapkannya, dilantiknya para anggauta dan disjarkannya oleh Presiden/PBR semendjak tahun 1959 ;

5. Mendjawab persoalan "motief" yang mendasari dan mendjadi keper-tajaan TERTUDUH sendiri, hal ini diuraikan dihalaman 8, Mahkamah berpendapat bahwa motif apapun yang akan dijadikan dasar untuk bertindak pidana, terhadap tindak pidana itu sendiri tidaklah mungkin untuk dibiarkan lalu demikian sadja ketjuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang ;
Apakah seorang itu mentjuri dengan motif lapar, mentjuri karena iseng, atau karena ia seorang kleptomaan terhadap pentjuran dan pentjurinja itu wadib diadakan penyelesaian dan pengambilan tindakan ;
6. Dalam halaman 9 PEMBELA mengedepankan bahwa "opzet" djahat tidak ada karena TERDAKWA dalam segala perbuatannya dimotivir/didorong oleh kejakinannya yang tjukup beralasan ;
Sulit bagi Mahkamah untuk menerima pernyataan ini, sebab baik motif maupun dorongan kejakinannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan Mahkamah memerlukan bukti yang bisa diterima oleh ratio, sebab Mahkamah tidak memeriksa soal kejakinan, keper-tajaan dan mempersoalkan agama yang dilandasi adagium "waar de ratio zich eindigt, daar begint het geloof" ;
7. Dalam halaman yang sama PEMBELA menjatakan "kalau terbukti ...dst..., TERDAKWA merupakan korban penipuan"; jah, Mahkamahpun sulit untuk menerima alasan ini, sebab oleh PEMBELA telah diutarakan sendiri tentang dapat dipertjajanja TERTUDUH sebagai orang yang berfikiran sehat, lagi pula ia adalah seorang yang berkedudukan tinggi dalam golongannya, seorang anggauta Politbiro CC. PKI dalam mana persoalan DEWAN DJENDERAL dikonstruksikan dan didiskusikan setjara mendalam ;
8. Bahwa terdapat suatu Panitia khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan soal DEWAN DJENDERAL adalah semata-mata suatu keharusan didalam rangka mentjari kebenaran, menemukan djawab nyata atau fitnahnya bisik-desusan DEWAN DJENDERAL tersebut, oleh karena setjara terbuka belumlah hal itu pernah disiarkan-beritakan ;

MENDENGAR :

Pembelaan yang disusun dan dibatja sendiri oleh TERDAKWA dimuka persidangan, pada intinja memuat pengelakan terhadap requisitoir ODITUR, Mahkamah menanggapi-djawab sebagai berikut :

1. TERTUDUH menjatakan bahwa informasi-informasi didapat dari tokoh-tokoh politik, pedjabat Pemerintah yang kompeten dan diper-

oleh tidak hanya dari satu pihak, bahkan ada yang datang dari pihak resmi, akan tetapi oleh TERDAKWA didalam sidang hanya disebut satu sumber saja, ialah D.N. AIDIT, meskipun sumber-tunggal ini berkemungkinan besar mempunyai lebih dari sebuah sumber ;

2. bahwa sifat dari informasi tersebut adalah terperinci, gedetailleerd dengan menjebut tanggal - djam - tempat - nama - atjara dan lain-lainnya, demikian menurut tertuduh, Mahkamah berpendapat bahwa dengan konstruksi fiktif yang diberi gajapatut dan gajapantas untuk bisa diterima sebagai tjeritera yang logis, Mahkamah berpendapat bahwa tidaklah tentu kalau suatu yang logis itu senantiasa adalah "waarheid", apa yang logis belumlah pasti benar ;

5. menanggapi pembelaan TERTUDUH mengenai analisa klas dari P.K.I., Mahkamah ingin menunjukkan persoalan ini kepada pidato P.J.M. Presiden/Panglima Besar Revolusi di Los Angeles California didepan Council for World Affairs tanggal 21 April 1961 yang dibukukan dibawah judul "For Liberty and Justice" dikeluarkan oleh Department of Information Republic of Indonesia, Special issue/75, tjetakan tahun 1961, halaman 5 dan 6 yang kalimat achirnya berbunyi :

"..... Hence today, in our era of freedom, we are not troubled by the clash of classes. We are not troubled by that, because, generally speaking, classes do not exist. There is only one class, the Indonesian people" ;

4. dalam pembelaan selanjutnya TERTUDUH menjatakan bahwa sidang Polit Biro CC PKI dalam bulan Agustus 1965, itu benar-benar mendiskusikan masalah bagaimana tjara yang tepat untuk menggagalkan rentjana coup d'etat Dewan Djenderal, untuk mana Mahkamah bertanja :

"Mengapa pula ini tidak dilaporkan kepada Presiden dan kalaupun benar melaporkan keputusan sidang disampaikan Presiden, mengapa djustru persoalan operasi militer dan Dewan Revolusi tidak dilaporkan ?" ;

5. TERTUDUH menjatakan pula pendemisioneran Kabinet Dwikora didasarkan kepada kesepakatan pendapat tentang terdapatnya unsur-unsur Dewan Djenderal didalam Kabinet Dwikora tersebut dan perlunya diganti Kabinet itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalih apapun yang dikedepankan, pendemisioneran ini adalah satu penggulingan setidak-tidaknya awal penggulingan. Demikian pula Mahkamah menolak alasan TERTUDUH bahwa "G. 30. S." bukanlah suatu pemberontakan bersendjata karena tidak adanya tindakan konkrit, seperti penangkapan-penangkapan terhadap pejabat Pemerintahan dan seorang Menteri-pun tidak ada yang ditangkap, apa lagi Presiden yang mengepalai Kabinet Dwikora ;

Mahkamah melihat kenjataan lain, ialah bahwa dalam rangka

"G. 30. S." itu ada usaha gagal untuk menangkap WAPERDAM II, MENKO HANKAM/KASAB, tertangkap/tertjulik/terantaja/terbunuhnya MEN/PANGAD dan penjishan Presiden/Perdana Menteri Kabinet Dwikora dalam susunan Dewan Revolusi ;

6. bahwa TERDAKWA berpendapat ada atau tidak ada Dewan Djenderal itulah persoalan politik yang pertama-tama harus diselesaikan ; bahwa atas persoalan Dewan Djenderal ini Mahkamah telah menjatakan pendapatnya, tetapi disini sebagai tanggapan atas pembelaan TERDAKWA, Mahkamah merasa perlu mengemukakan bahwa persoalan Dewan Djenderal ini, menurut hukum tidak penting dalam perkara ini, oleh karena andai kata Dewan Djenderal itu benar-benar ada — meskipun Mahkamah yakin tidak ada — tetapi hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi hak kepada TERDAKWA dengan "Gerakan 30 Septembernya" untuk melakukan coup d'etat, mendjadi hakim sendiri menjingkirkan BUNG KARNO Perdana Menteri/Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, mendemisionerkan Kabinet Dwikora, mendjadi Dewan Revolusi sebagai sumber segala kekuasaan ;

7. bahwa terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan keterangan tambahan yang telah diberikan oleh saksi PERIS PARDEDE didepan sidang, sebagai keterangan penting yang menguntungkan TERDAKWA, tidak disinggung oleh ODITUR dalam requisitoirnya, pembelaan yang sama telah dikemukakan lagi oleh Pembela dalam duplik ;

bahwa Mahkamah dalam mempeladjadi pembelaan ini, perlu meneliti kembali apa sesungguhnya keterangan/kesaksian tambahan yang telah diberikan oleh saksi PERIS PARDEDE didepan sidang, setelah mempeladjadi keterangan/kesaksian tambahan dari saksi PERIS PARDEDE tersebut dan menghubungkannya dengan keputusan Polit Biro CC. PKI, dimana dinjatakan bahwa keputusan tentang operasi militer hanya mendjadi pengetahuan anggota Polit Biro untuk mentjegah kebotjoran, setelah memperhatikan reaksi MH. LUKMAN salah seorang anggota DEWAN HARIAN Polit Biro atas pertanjaan saksi TJALON anggota Polit Biro, Mahkamah berpendapat bahwa keterangan/kesaksian tambahan dari saksi PERIS PARDEDE telah lebih memperkuat kejakinan Mahkamah bahwa keputusan Polit Biro CC PKI yang sesungguhnya ialah sebagaimana yang telah didjelaskan oleh TERDAKWA dalam pemeriksaan pendahuluan ;

MENIMBANG :

Bahwa setelah mempeladjadi perkara ini Mahkamah berpendapat telah dapatnya dikwalivisir TERDAKWA dengan komplotan "Gerakan 30 September/Gestok" telah melakukan tiga kedjahatan sekaligus, jaitu kedjahatan-pidana, kedjahatan yang beraspek politik, dan kedjahatan

moral Pantjasila jang ber-Ketuhanan Jang Maha Esa, seperti dapat dibuktikan dibawah ini :

1. KEDJAHATAN PIDANA :

1.1. bahwa, dengan mendalihkan adanja "DEWAN DJENDERAL" jang telah merentjanakan untuk melakukan "coup d'etat" terhadap Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. Bung Karno, apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" telah melantjarkan gerakannya dalam bentuk operasi militer (melakukan kekerasan sendjata), pada tanggal 1 Oktober 1965 kira-kira djam 04.00, jang dimulai dengan pen-tjulikan, penganiajaan, penjiksaan, penjembelihan dan pembunuhan diluar batas-batas perikemanusiaan jang beradab, jang dibarengi dengan pendudukan objek-objek vital di Djakarta, kemudian disusul dengan pengumuman melalui R.R.I. Djakarta jang telah mereka kuasai, tentang terbentuknja DEWAN REVOLUSI jang dengan djelas :

- a. menjatakan mendemisionerkan Kabinet Dwikora jang dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. ;
- b. menjatakan dirinja sebagai sumber dari segala kekuasaan Negara ;
- c. menjisihkan kepemimpinan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. jang oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara R.I. telah diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup ;

1.2. bahwa, bahwa "DEWAN DJENDERAL" jang dijadikan alasan oleh apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" untuk membenarkan dilakukannya coup d'etat terhadap Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I., sebenarnya adalah suatu konstruksi-fiktif jang sengadja ditjip-takan, dengan maksud untuk menimbulkan kontradiksi-kontradiksi sosial/politik sebagai taktik dan disaat dalam mentjapai tudjuan kekuasaan politiknya ;

1.3. bahwa semua itu merupakan Kefiktifan, antara lain ternjata telah dibuktikan oleh Panitya Khusus Staf Angkatan Bersendjata (Panitya Oudang) termuat dalam Berita Atjara Pendapat jang dibuat serta ditanda tangani oleh segenap anggautannya atas sumpah djabatan, tertanggal 10 Djanuari 1966, jang menjatakan : "bahwa Dewan Djenderal tidak ada" ;

2. KEDJAHATAN JANG BERASPEK POLITIK :

2.1. bahwa, apa jang menamakan Gerakan 30 September/Gestok dengan segala akibat jang ditimbulkannya telah merugikan Revolusi dan Bangsa Indonesia, baik ditinjau dari segi Nasional

maupun Internasional, dan oleh karenanja merupakan suatu tragedie dan malapetaka Nasional ;

2.2. bahwa ditinjau dari segi Nasional, apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" telah :

- a. merugikan penggalangan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia jang diperlukan dalam usaha memperkuat/memperkokoh semua unsur kekuatan progressive-revolusioner dalam menghadapi Nekolim ;
- b. menggojahkan usaha-usaha pembinaan dan perwujudan konsepsi NASAKOM jang telah digariskan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. ;
- c. mengakibatkan kemunduran (set-back) bagi Revolusi Indonesia ;
- d. mengakibatkan baik setjara langsung maupun tidak langsung, adanja rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpetjahan, pertentangan, kekatjauan, kegelisahan atau kegontjangan dikalangan penduduk atau masjarakat jang bersifat luas ;
- e. mengganggu, mengatjaukan dan menghambat kelanjutan terlaksananya TRI PROGRAM Pemerintah jang sedang gigihnja diperdjoangkan oleh Pemerintah bersama-sama Rakjat dan Bangsa Indonesia ;

hal-hal mana telah dikuatkan oleh Surat-surat Pernyataan jang dibuat diatas sumpah djabatan, masing-masing dari :

- a. Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah Djakarta Raya, tertanggal 27 Djanuari 1966 No.: R-01/1/1966 ;
- b. Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, tertanggal 25 Djanuari 1966 No.: 20/Rhs/K/MKD/66 ;

sehingga apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" dengan segala akibatnja telah membahayakan keselamatan dan keutuhan Bangsa, Negara dan Revolusi Indonesia jang bertudjuan :

- a. **dibidang politik**, membentuk satu Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan Republik Indonesia jang demokratis dan berwilajah dari Sabang sampai Merauke ;
- b. **dibidang sosial**, membentuk suatu masjarakat adil dan makmur, jaitu adil dan makmur bendanijah dan rochanijah, atau dengan lain perkataan, masjarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila ;
- c. **dibidang Internasional**, membentuk persahabatan dan perdamaian dunia atas dasar saling hormat-menghormati dan atas dasar kerdja sama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan Kolonialisme/neokolonialisme, menudju Perdamaian Dunia jang sempurna ;

2.3. bahwa, ditinjau dari segi Internasional, apa yang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" telah :

- a. memudahkan kemertju-suaraan daripada Revolusi Indonesia dan usaha-usaha penggalangan kekuatan-kekuatan Nefos ;
- b. menurunkan gengsi Indonesia dimata dunia terutama di-negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin ;
- c. melemahkan posisi Indonesia dalam pertjaturan politik Internasional dalam menghadapi konfrontasi Indonesia terhadap projek Nekolim British Malaysia pada chususnja sebagaimana telah diungkapkan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. pada waktu merestui para Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa pada tanggal 12 Pebruari 1966 di Istana Bogor ;
- d. merugikan, terutama usaha-usaha realisasi kerangka ketiga daripada tudjuan Revolusi Indonesia ;

5. Bahwa, perbuatan-perbuatan dan facta-facta yang diakibatkan oleh apa yang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" tersebut diatas, menundjukkan suatu bukti yang njata pula dari adanya penjelewengan dan pengkhianatan terhadap Pantja Sila yang mendasar djiwa Revolusi Indonesia, sehingga merupakan **KEDJAHATAN MORAL PANTJA SILA**, ialah :

- 3.1. bahwa mereka telah mengkhianati Silanja Ketuhanan, ternjata dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan budi-pekerti-luhur yang senantiasa mendjiwai hidup dan kehidupan Rakjat dan Bangsa Indonesia ; hal itu menundjukkan hilangnya iman daripada pelaku-pelakunja, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. dalam bukunja yang berjudul "KEPADA BANGSAKU" telah menilai mereka yang telah kehilangan iman, sebagai berikut :
"Maka manusia yang telah kehilangan imannja itu mendjadilah lebih buas daripada chewan yang seliar-liarnja. Tubuhnja masih tetap manusia, tetapi isinja bukan manusia lagi. Ia mendjadi musuhnja Tuhan, musuhnja Negara, musuhnja Tanah-Air, musuhnja Bangsa" ;
- 3.2. bahwa mereka telah meninggalkan Sila Nasionalismenja Pantja Sila, terbukti dengan telah diadu-dombakannja kekuatan-kekuatan progressive-revolusioner dan memetjah-belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, merusak konsepsi NASAKOM, yang senantiasa diadjar-andjurkan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. ;
- 3.3. bahwa mereka telah mengkhianati Sila Kemanusiaan, ternjata dari perbuatan-perbuatan mereka yang memandang djiwa manusia sebagai rumput dipinggir djalan yang boleh dipotong-babat sesuka hati mereka, dan perbuatan-perbuatan teror lainnja yang

tidak kurang ganasnja, yang djika Pemerintah tidak tjepat mengambil tindakan tepat-bidjaksana akan dapat memungkinkan mendjalarnja "kontra-terror" ;

- 3.4. bahwa mereka telah mengkhianati Sila Kedaulatan Rakjat, ternjata dengan perbuatan-perbuatan mereka yang telah memperkosa kehendak Rakjat dan tidak mengindahkan lagi Tata-Krama NASAKOM ;
- 3.5. bahwa mereka telah mengkhianati Sila Keadilan Sosial, ternjata dengan perbuatan-perbuatan yang meninggalkan djiwa gotong-rojong yang sedjati yang telah mendarah-dagingi kedalam tulang sumsum Rakjat dan Bangsa Indonesia dalam mentjapai masjarakat adil dan makmur atau masjarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila ;

Bahwa, dari facta-facta tersebut diatas, maka Mahkamah tidak bisa berkejakinan lain, ketjuali menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" itu sebagai "GERAKAN KONTRA-REVOLUSIONER" dan mendjadi MUSUH REVOLUSI sebagaimana yang dimaksud dalam Manipol (halaman 31) ;

MENIMBANG :

Bahwa tentang keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan TERDAKWA dilakukan benar-benar bertentangan dengan dasar, tudjuan dan kewadiban Revolusi Indonesia, mengurangi usaha konsentrasi kekuatan Nasional dengan tetap merongronginja lewat pertentangan didalam bangsa dan didalam rakjat Indonesia, menodai sifat Revolusi Indonesia, menggelapkan hari-hari depan Revolusi Indonesia dan djelas merupakan musuh dari Revolusi Indonesia.

Hukum-hukum Revolusi Indonesia yang mengenal romantika, dinamika dan dialektikanja itu pada pokok pertamanja menentukan keharusan Revolusi mengenal kawan dan lawan, kekuatan-kekuatan Revolusi harus tahu benar siapa kawan dan siapa lawan dan harus ditarik garis-pemisah yang terang serta harus diambil sikap yang tepat terhadap kawan dan terhadap lawan itu, dalam rangka perbuatan-perbuatan TERDAKWA serta akibatnja sangat sulit bahkan tidak dapat ditemukan satu unsur-pun yang dimintakan untuk bisa menggolongkan ia sebagai kawan dalam Revolusi.

MENIMBANG :

Bahwa dari segi insani perlu ditelaah-kupas keadaan yang mendjadi kan kepribadiannja, Mahkamah berpendapat bahwa keadaan pribadi TERDAKWA sekarang adalah merupakan hasil atan akibat bentukannja dimasa lalu, terutama masa yang lalu belum terlampau ini. Hidup dan kehidupannja selaku salah seorang pemimpin yang senantiasa ingin mentjapai tudjuan politiknya, dengan alat dan djalan apapun harus di-

tempuhnja (het doel heiligt de middelen dalam arti jang kasar tiada pertimbangan kemanusiaan) mengakibatkan pandangan jang sangat serba tjuriga terhadap manusia lain jang bukan mendjadi teman hidup sebelukarnja. Bajangan-bajangan tinggi mengawan tentang hasil pemberontakannja tinggal tergantung sedatar bumi setelah melihat dan menjadari kegagalan-kegagalannja. Akan tetapi karena sifat-sifat kakunja, masih nampak gedjola hati untuk mengulang kembali bila sempat datang menghinggapinja. Rasa depressief menguasai diri dan sebagai insan jang belum lama berselang masih meradjai sekitarnja dan sanggup tega memenggal setiap penjaing jang muntjul didekatnja, kini sikap agressip itu nampak dalam bentuk gigih mengungkiri pertanggungan djawab jang dimintakan dari padanja.

Setiap retrospeksi dihindari dan konflik terdjadi untuk beralih ke-perasaan dendam jang dislipkan senantiasa dihati-ketjil-sanubari TERDAKWA.

Pribadi insan jang menurut penilaian Mahkamah tidak perlu lagi untuk diusahakan perbaikannja, karena ibarat perabot rumah tangga jang telah lapuk, dimakan rajap, bukanlah pemelituran kembali jang akan membawa pengawetannja.

MENIMBANG :

Bahwa atas dasar uraian diatas terbuktiilah untuk kesekian kalinya betapa tidak, berbahaja perbuatan TERDAKWA dan meskipun Mahkamah sadar akan tugas jang dibebankan kepadanya, memeriksa dan mengadili perkara daripada tokoh-tokoh kontra revolusi Gerakan 30 September/GESTOK dan tidak boleh mengetjimpungkan diri dalam arus politieke botsingen, namun akan tidak djudjurlah kiranja apabila tidak memberikan nilai terhadap perkara ini dalam hubungan dengan para pelaku-pelakunja.

Mahkamah menemui kesulitan untuk memisahkan TERDAKWA dari Organisasi, D.N. AIDIT, M.H. LUKMAN, NJOTO, SUDISMAN, SAKIRMAN, ANWAR SANUSI, REWANG dari Politbiro CC PKI, sulit memisahkannya, sebagaimana kesulitan jang akan dihadapi untuk memisahkan ikan dari air.

Tak pula perlu diulang-tegaskan persoalan jang telah diketahui umum ialah sebagaimana gamblangnja kenyataan bahwa Sang Matahari terbit dichufuk Timur dan membenamkan diri diudjung Barat, demikian pula terangnja kenyataan siapalah sebenarnja jang mendalangi "lakon semalam suntuk" Kontra revolusi G. 30. S./GESTOK.

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah sampai pada hukuman jang akan didjatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, akan memperhatikan terlebih dahulu hal-hal jang akan diuraikan dibawah ini :

— sebagai faktor jang meringankan :

hanjalah bahwa Terdakwa belum pernah dihukum,



Lobang maut, Lubang Buaja di Djakarta dimana 7 orang Pahlawan Revolusi dengan setjara biadab oleh petualangan G 30 S. ditimbun setelah dibunuh.



Salah satu rumah di Lubang Buaja a.l. rumah Pak Basar dipergunakan untuk menjimpan para Pahlawan revolusi sebelum dibunuh.

— sebagai faktor yang memberatkan :

1. bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa adalah kejahatan yang berkwalitas tiga sekaligus, yaitu selain tindak pidana terhadap keamanan dan keselamatan Negara juga merupakan kejahatan yang beraspek politik dan kejahatan Moral Pantja Sila ;
2. bahwa sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa telah timbul korban-korban dan kerugian-kerugian yang sangat besar dan yang mendjalar serta meliputi keseluruh pelosok Tanah Air ;
3. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah menggojahkan seluruh sendi kehidupan masyarakat antara lain dengan :
 - a. tidak terkendalikannya harga sandang-pangan,
 - b. timbulnja rasa-tjuriga mentjurigai antara sesama rakyat Indonesia,
 - c. timbulnja suasana takut dan tiada aman karena kekedjaman-kekedjaman yang telah dilakukan oleh apa yang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" yang melampaui batas-batas peri-kemanusiaan ;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut djustru dilakukan pada waktu Negara sedang melakukan konfrontasi total terhadap projek Britis Malaysia pada khususnya dan Nekolim pada umumnya ;
5. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memporak-porandakan Adjaran-Adjaran Pemimpin Besar Revolusi, terutama tentang idee Nasakom dimana kesatuan dan persatuan Nasional telah ditjerai-beraikan dan memudarkan kemertju-suaran Republik Indonesia dengan Pantja Silanja, terutama dikalangan Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, bahkan telah menjebabkan Revolusi Indonesia mengalami kemunduran (set-back) selama 8 tahun ;
6. Bahwa Terdakwa selama sidang telah menjulitkan djalannya persidangan dan menundjukkan suatu sikap yang sama sekali tidak memperlihatkan rasa penjesalannya ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas sampailah saatnja Mahkamah harus menentukan ukuran hukuman apa yang patut didjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena Undang-Undang menentukan sebagai hukuman :

1. Hukuman Mati,
2. Hukuman pendjara seumur hidup dan
3. Hukuman pendjara selama 20 tahun.

Bahwa untuk menentukan itu Mahkamah telah mempertimbangkan dengan seteliti-telitinja segala bukti-bukti yang diajukan maupun hal-hal yang bersangkutan dengan pribadi dan keluarga Terdakwa sendiri ;

Bahwa disamping itu Mahkamah telah menjelajahi hati nuraninya untuk meyakinkan apakah masih ada alasan dimana dimungkinkan bahwa Terdakwa diberikan suatu hak untuk melanjutkan hidupnya, walaupun hak mempertimbangkan tersebut Mahkamah menginsyafi adalah hak dari pada Tuhan Seru Sekalian Alam yang telah mentijptakan bumi dan langit ini dan sesuai pula dengan kehendak alam untuk masing-masing mentijoba yang telah memberikan hidup pada seluruh makhluk didalamnya, dan disamping itu adalah sesuai dengan peri-kemanusiaan mempertahankan dan menyelamatkan jiwa seseorang ;

Bahwa walaupun demikian Mahkamah berkejakinan akan melanggar kepertjajaan yang suci dan murni yang telah dilimpahkan oleh 105 djuta Rakyat Indonesia kepada Mahkamah ini apabila Mahkamah menunjukkan sikap yang tidak setimpal dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Bahwa sesungguhnya Mahkamah ini dibentuk untuk menegak-luruskan tidak lain daripada keadilan yang dipantjarkan oleh sinarnya Pantja Sila, yang telah dan senantiasa mendjiwai Proklamasi dan Revolusi Indonesia bukar saja, bahkan yang telah dan senantiasa akan memertjusuari perdjongan Bangsa-bangsa tertindas didjagat raya ini ;

Bahwa menjadilah suatu kehormatan yang tiada taranya bagi Mahkamah ini jika kepadanya dipertjajakan untuk melaksanakan tugas suci, melalui keputusannya, dalam menjaga dan mempertahankan ketuhanan serta keagungan Pantja Sila ;

Bahwa Mahkamah berkejakinan penuh, bahwasanya perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan daripada pertanggungan-djawabnya atas perkosaan-perkosaan dan pengingkaran terhadap Sila Kemanusiaan, Sila Kebangsaan, Sila Kedaulatan Rakyat dan Sila Keadilan Sosial, karena Terdakwa baik setjara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan gugurnya para Pahlawan Revolusi, terpetjahnya persatuan dan kesatuan Bangsa, merusak Konsepsi Nasakom, memperkosa prinsip Kedaulatan Rakyat dengan mengabaikan Tata Krama Nasakom, tidak mengindahkan sama sekali prinsip gotong-rojong dalam mentjapai tujuan Revolusi ;

Bahwa Mahkamah menilai perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar dan mengingkari Silanya Ketuhanan Jang Maha Esa daripada Pantja Sila ;

Bahwa bagi Mahkamah, Sila Ketuhanan Jang Maha Esa ini senantiasa dijadikan dasar pertimbangan dan pegangan pokok dalam menetapkan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu Mahkamah senantiasa akan memohon petundjuk dan tuntunan-Nya agar hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman yang seadil-adilnya, sesuai dengan kalimat 2 suci Al Quran dalam Surat Al Fatihah : „IJJAKA NA' BUDU WA IJJAKA NASTA'IN. IHDINAS SIROTOL MUSTAQIN“, yang artinya :

„Ja, Tuhan hanya kepada-MU-lah aku patut menjudjudkan puja dan berpaling memohon do'a. Beri-tundjukkanlah padaku djalan yang lurus dan benar.“

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Mahkamah berkejakinan adalah diluar batas-batas kemampuannya sebagai manusia untuk memberikan ampun terhadap dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan Terdakwa yang telah menjangkut seluruh kehidupan Rakyat Indonesia baik generasi kini maupun generasi mendatang, sehingga hanya kepada Tuhan Jang Maha Esalah kami pohonkan dan serahkan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Terdakwa ;

MENIMBANG :

Bahwa beaja-beaja dalam perkara ini melihat keadaan tidak perlu dibebankan pada TERDAKWA ;

MENIMBANG :

Bahwa barang-barang bukti perlu mendapat ketentuan, dirampas untuk Negara ;

MENGINGAT :

Ketjuali fasal-fasal tersebut diatas, pula pada fasal-fasal dalam Undang - undang, Peraturan - peraturan/Penetapan - penetapan/ Keputusan-keputusan/Instruksi-instruksi dari Pemerintah Republik Indonesia/Presiden Republik Indonesia, dan sebagainya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

MENETAPKAN :

— Bahwa TERDAKWA tersebut diatas, bernama :

— NJONO bin SASTROEDJO alias TUGIMIN alias RUKMA —

dilahirkan di	: Tjilatjap.
pada tanggal	: 28 Agustus 1925.
a g a m a	: tidak beragama.
pekerdjaan	: 1. Anggauta Politburo Central Komite, Partai Komunis Indonesia. 2. Sekretaris Pertama Komunis Indonesia Djakarta Raya, disingkat CDR.
tempat tinggal	: Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta.

bersalah melakukan kedjahatan-kedjahatan :

1. mengadakan komplotan (permufakatan djahat) untuk mengadakan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah dan untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang sjah ;
2. memimpin dan mengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah ;
3. memimpin dan mengatur pembontakan dengan mengangkat sendjata "melawan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia.

— **MENGHUKUM TERDAKWA TERSEBUT KARENA KEDJAHATAN-KEDJAHATAN ITU DENGAN :**

..... H U K U M A N M A T I

- Memerintahkan supaya barang-barang bukti semuanya dirampas untuk Negara.
- Ongkos-ongkos perkara dibebankan pada Negara.

Demikianlah diputuskan, pada hari SENIN TANGGAL DUA PULUH SATU PEBRUARI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM, serta diumumkan pada hari itu djuga dengan dihadiri oleh HAKIM-HAKIM ANGGOTA, ODITUR LETKOL. CKH. Dt. R. MULIA S. H. NRP. 12319, PANITERA KAPTEN CKH. W.H. FREDERIK BC. HK. NRP. 295948, TERDAKWA, PEMBELA dan UMUM.

Djakarta, 21 Pebruari 1966.

K E T U A :

ttd

ALI SAID S.H.

LETKOL. OKH-NRP. 14870.

PANITERA :

ttd

W.H. FREDERIK Bc. HK.

KAPTEN. CKH. NRP. 295948.

HAKIM2 ANGGOTA :

1. LETKOL. UD. MUKARTO.
ttd
2. AKBP. TASLAN KARNADI SH.
ttd
3. MAJOR /P- GANI DJEMAT SH.
ttd
4. MAJOR TIT. RAFFLY RASAD S.H.
ttd

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

PRO JUSTITIA.

S A L I N A N :

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : KEP — 18 /2/ 1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
selaku

PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

MENIMBANG :

Bahwa perlu memberikan fiat executie untuk mengumumkan dan melaksanakan Keputusan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA No. PTS — 009/MBI/A/1966 tanggal 21 Pebruari 1966 jang didjatuhkan kepada TERDAKWA :

— **NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA** —

dilahirkan di : Tjilatjap
pada tanggal : 28 Agustus 1925
a g a m a : tidak beragama
Pekerdjaan : 1. Anggauta Politbiro Central Comite, Partai Komunis Indonesia.
2. Sekretaris Pertama, Komunis Indonesia Djakarta Raya, disingkat CDR.
tempat tinggal : Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta,

TERDAKWA ditahan sedjak tanggal 3 Oktober 1965 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Oditur Djenderal Angkatan Darat No. PRIN-5/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966;

MENGINGAT :

1. Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963 tentang pembentukan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA ;
2. Keputusan Presiden No. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 ;
3. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. : 5/KOPKAM/1 1966 tanggal 29-1-1966 tentang susunan khusus MAHMILLUB dalam perkara NJONO tersebut.
4. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. : 13/KOPKAM/1/ 1966 tanggal 29-1-1966 tentang Penjerahan Perkara tertuduh NJO-NO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.

MENDENGAR :

Pertimbangan dari Ketua MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA beserta para Hakim-Anggautanja.

MEMUTUSKAN :

Memberikan persetudjuan pelaksanaan (fiat executie) terhadap Keputusan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA No. PTS-009/MBI/A/1966 tanggal 21 Pebruari 1966 didalam perkara TERDAKWA tersebut diatas bernama :

— NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA —

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 21 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
selaku
PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN.
t.t.d.
S O E H A R T O

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

1. Ketua MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
2. ODITUR pada MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA.

Tembusan :

1. P.J.M. Presiden/PANGTI/PBR ;
2. J.M. MENKO HANKAM/KASAB ;
3. J.M. MENKO Dalam Negeri dan Hukum ;
4. J.M. Menteri/Ketua Mahkamah Agung ;
5. J.M. Menteri/Kehakiman ;
6. J.M. Menteri Djaksa Agung ;
7. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Laut ;
8. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Udara ;
9. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian ;
10. IRKEH/ODDJEN ;
11. DIRPOM ;
12. PEPELRADA DJAYA ;
13. A r s i p . —